



PROSIDING



**SEMINAR NASIONAL
DAN KONFERENSI SOSIOLOGI
PERKOTAAN 2018**

“URBAN CRISIS AND STYLE OF URBAN DEMOGRAPHY”

ISSN: 2614-3615



12 DESEMBER 2018

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 115 Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 baik untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial.



PROSIDING



**SEMINAR NASIONAL
DAN KONGRES SOSIOLOGI
PERKOTAAN 2018**

“URBAN CRISIS AND STYLE OF URBAN DEMOGRAPHY”

12 DESEMBER 2018



Penerbit CV Kekata Group, Surakarta 2018

**PROSIDING KONFERENSI SOSIOLOGI PERKOTAAN 2018 URBAN
CRISIS AND STYLE OF URBAN DEMOGRAPHY**

Copyright © Peserta Konferensi Sosiologi Perkotaan 2018

Penulis: Peserta Konferensi Sosiologi Perkotaan 2018

Editor: Budi Kurniawan

Penata Letak: Mira Rahma Safirasari

Ayu Bella Ganawati

Ika Agustina

Penata Sampul: Rafliza Harnandhitya

CV KEKATA GROUP

Kekata Publisher

kekatapublisher@kekatagroup.co.id

kekatapublisher.com

Fanspage: Kekata Publisher

"Cafebaca" Jalan Kartika, Gang Sejahtera 1 No. 3, Jebres,

Surakarta, Indonesia

Cetakan Pertama, Desember 2018

Surakarta, Kekata Publisher, 2018

xvi + 363 hal; 21×29,7 cm

ISSN: 2614-3615

Dicetak oleh

Percetakan CV Oase Group

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Anggota IKAPI Provinsi Jawa Tengah

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

URBAN CRISIS AND STYLE OF URBAN DEMOGRAPHY
SEMINAR NASIONAL DAN KONFERENSI
SOSIOLOGI PERKOTAAN 2018

Reviewer :

1. Dr. Drajat Tri Kartono, M. Si.
2. Addin Kurnia Putri, S.Sos., MA.
3. Fitria Rismaningtyas, S.Pd., M.Sos.
4. Panggio Restu Wilujeng, S.Sos, M.Si.
5. Rosyid Nukha, S. Sos.
6. Aghniya Halim, S.Sos.
7. Dhany Oktaviany, S.Sos.
8. Khabib Bima Setiyawan, S.Sos.

SUSUNAN PANITIA

1. Penanggung Jawab..... : Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., D.E.A.
2. Pembimbing..... : Dr. Drajat Tri Kartono, M. Si.
3. Ketua Pelaksana..... : Aldi Aishal Kristanto
4. Ketua Seminar..... : Fikria Ariba
5. Ketua Riset..... : Ahmad Khoirur Roziq
6. Sekretaris..... : Nofiska Ade Lutfiah
..... : Ganis Haryanti Putri
..... : Edgar Bayu Refansyah
7. Bendahara..... : Anggun Nugroho
..... : Hikmah Eka Irmayanti
8. Sie Acara..... : Mira Rahma Safirasari
..... : Budi Kurniawan
..... : Ayu Bella Ganawati
..... : Ika Agustina
..... : Muhammad Ta'aruf Huda
9. Sponsorship..... : Dewangga Cipta Mahendra
..... : Dita Ayu Mustika
..... : Luluk Dwi Parwati
..... : Refa'i Zinedine
10. Pubdekdok..... : Rafliza Harnandhitya
..... : Ivander Jordan Leong
..... : Katarina Ratih Kusuma D.M
..... : Julita Ayu Cahyani
11. Sie Perlengkapan..... : Syai'fudin
..... : Hendrata Wahyuesa P
..... : Gumelar Ageng Pihadi
..... : Rivaldi
..... : Avif Yusuf Yanuttama
12. Sie Konsumsi..... : Roro Dyah Dwijayatri
..... : Wida Widiawati
13. Manajer Riset..... : Arum Tri Astuti
..... : Titin Marliyana
..... : Hikmah Eka Irmayanti
..... : Muhammad Arbi Yuli Utomo
..... : Zaky Gunawantoro

RUNDOWN

Waktu	Durasi	Kegiatan
08.00-08.30	30'	Registrasi
08.30-09.00	30'	Hiburan dan pembukaan oleh MC
09.00-09.30	30'	Sambutan a. Ketua panitia b. Ketua Program Studi Sosiologi c. Dekan FISIP
09.30-09.40	10'	Pengenalan pembicara oleh moderator
09.40-10.10	30'	Pembicara 1 (Titin Marliyana)
10.10-10.40	30'	Pembicara 2 (Dr. LV. Ratna Devi S.M.Si)
10.40-11.10	30'	Pembicara 3 (Kaesang Pangarep)
11.10-11.40	30'	Pembicara 4 (Ir. Ahyani M.A.)
11.40-12.30	50'	Sesi tanya jawab dan Penutupan
12.30-13.15	45'	ISOMA
13.15-15.15	120'	Sesi Paralel
15.15-15.20	5'	Peserta kembali ke aula
15.20-16.00	40'	Pengumuman Best Presentator dan Best Paper Penutupan acara dan Foto bersama peserta konferensi

SAMBUTAN KETUA PANITIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang terhormat, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Yang saya hormati Dr. Ahmad Zuber, S.Sos, D.E.A. selaku Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang kita cintai ini. Yang saya hormati pula pembimbing acara kami, Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si., selaku Dosen Pengampu mata kuliah Sosiologi Perkotaan. Yang terhormat para pembicara dan pemateri riset, Kaesang Pangarep, yang merupakan *public figure* dan *entrepreneur* muda, Dr. LV. Ratna Devi S. M.Si. yang juga merupakan salah satu dosen kami di Sosiologi, kemudian IR. Ahyani M. A., dan saudari Titin Marliyana tentunya. Serta seluruh peserta Seminar dan Konferensi Nasional Sosiologi Perkotaan yang saya hormati. Dengan rasa bangga tak lupa juga seluruh panitia Seminar dan Konferensi Nasional Sosiologi Perkotaan yang saya cintai.



Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, rahmat, serta karunianya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Seminar dan Konferensi Nasional Sosiologi Perkotaan dengan keadaan sehat tanpa ada suatu kekurangan apa pun. Atas kemurahan hati serta berkah-Nya pula, *Proceeding* ini dapat tersusun sebagai hasil atau *output* dari Konferensi Nasional Sosiologi Perkotaan yang pada tahun ini kembali kami hadirkan dengan tema *Urban Crisis and Style of Urban Demography*.

Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Aldi Aishal untuk memberikan sambutan kepada seluruh peserta Seminar dan Konferensi Nasional Sosiologi Perkotaan ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada panitia seminar dan juga riset yang telah mencurahkan segala waktu, tenaga, pikiran, dan segalanya. Saling bahu membahu untuk menyukseskan acara Seminar dan Konferensi Nasional ini, saya begitu bangga dan mengapresiasi semua panitia yang telah bekerja keras dan bersedia membantu saya selaku ketua panitia untuk bersama-sama mewujudkan dan menyukseskan acara ini. Terutama untuk kesigapan dan juga tanggungjawab dari saudari Fikria Ariba dan saudara Ahmad Khoirur Roziq, selaku koordinator tim seminar dan juga koordinator tim riset, yang telah mendampingi serta mengarahkan masing-masing tim. Begitu banyak kenangan dan pelajaran berharga yang teman-teman panitia semua berikan dalam proses mempersiapkan acara pada hari ini. Terima kasih juga saya haturkan kepada teman-teman terhebat saya, segenap tim riset yang telah melakukan penelitian dengan sangat baik tentunya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, segala jerih payah adalah suatu anugerah bagi kita untuk dapat selalu mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Usaha kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan apa yang kita suguhkan pada kesempatan ini adalah setiap cucuran keringat dan perjuangan yang saya percaya akan sangat bermanfaat di kemudian hari.

Sebagai tambahan informasi kepada seluruh peserta Seminar dan Konferensi Nasional Sosiologi perkotaan ini, bahwa beberapa bulan sebelum acara ini dilaksanakan, panitia telah mempersiapkan berbagai macam hal untuk Seminar dan Konferensi ini, berbagai hal seperti pembentukan panitia,

agenda rapat, penyusunan acara, pembuatan laporan hasil penelitian, publikasi, sosialisasi, sampai dengan konsumsi serta persiapan lain telah kami lakukan dengan konsep kerja sama dan kekeluargaan yang sedari awal menjadi pegangan kami untuk melangkah. Saya selaku ketua panitia sangat bangga tentunya dan mengapresiasi setiap kerja keras yang begitu dahsyat luar biasa mereka lakukan walaupun terkadang ada hambatan serta rintangan yang tak jarang mengendurkan semangat, namun dengan tekad yang kuat, rasa percaya, serta tanggung jawab kami semua dapat bangkit dan meneruskan perjuangan. Begitu juga kepada tim riset yang telah memberikan karya luar biasanya melalui hasil riset tentang *Urban Crisis and Style of Urban Demography* tentunya. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi segala bentuk penelitian yang dilakukan mulai dari pencarian data hingga penyusunan data dan menjadi sebuah laporan penelitian serta *paper* untuk dipresentasikan di Konferensi Nasional ini dengan beberapa sub tema penelitian tentang *Urban Crisis and Style of Urban Demography* di Surakarta.

Terima kasih dan selamat datang juga tak lupa saya sampaikan kepada seluruh peserta Seminar dan Konferensi Nasional Sosiologi Perkotaan yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam acara kami ini. Karena tanpa adanya peserta perjuangan dan jerih payah kami akan menjadi sia-sia tentunya. Saya secara pribadi dan mewakili segenap panitia yang bertugas memohon maaf kepada seluruh peserta apabila dalam jalannya pelaksanaan acara ini dirasa terdapat kekurangan yang membuat saudara sekalian merasa kurang nyaman. Untuk segala kekurangan dan keterbatasan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima segala macam bentuk masukan, kritik, maupun saran yang membangun sebagai bahan evaluasi acara Seminar dan Konferensi Nasional Sosiologi perkotaan ini. Besar harapan saya acara ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua terkait dengan penambahan wawasan ilmu mengenai *Urban Crisis and Style of Urban Demography*, kesempatan, serta menjalin relasi, dan manfaat lain yang dapat dijadikan bekal atau pengalaman berharga yang akan selalu diingat tentunya. *Proceeding* yang telah disusun juga diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penulisan-penulisan ilmiah yang kiranya dapat dikembangkan sebagai bahan penelitian yang bermanfaat serta membantu memecahkan segala bentuk permasalahan yang terjadi di perkotaan dewasa ini atau bahkan menjadi solusi dalam melihat gejala sosial yang ada di dalam masyarakat.

Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dalam benak dan hati saudara sekalian, dengan rendah hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Surakarta, 28 November 2018

Aldi Aishal Kristanto
Ketua Seminar Nasional dan Konferensi Sosiologi Perkotaan 2018
“*Urban Crisis and Style of Urban Demography*”

SAMBUTAN DOSEN MATA KULIAH SOSIOLOGI PERKOTAAN

Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M. Si., Kepala Program Studi Sosiologi FISIP UNS Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., D.E.A, semua pembicara seminar yang sudah menyempatkan waktunya dan tidak lupa semua mahasiswa Sosiologi Perkotaan kelas B tahun 2016 yang saya banggakan. Mata Kuliah Sosiologi Perkotaan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Sosiologi FISIP UNS, dalam prosesnya mata kuliah ini merupakan kuliah proyek yang harus dijalankan oleh mahasiswa. Untuk mengadakan sebuah acara Seminar dan Konferensi ini mahasiswa harus melaakukan riset mendalam yang hasilnya harus dibagikan kepada banyak orang.



Pada tahun ini tema yang kami ambil adalah *Urban Crisis and Style of Urban Demography*, dalam sebuah kota dengan perkembangan globalisasi yang semakin deras dan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Kota belum mampu mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi. Hal inilah yang kemudian melahirkan yang dinamakan krisis kota dari sebuah kota. Sejatinya, suatu krisis kota memiliki korelasi dengan berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi atau bahkan lingkungan fisik, dan hal macam itulah yang akan kami alami. Selain mengadakan seminar dengan memaparkan hasil penelitian, kami juga mengadakan konferensi *Call for Paper* yang dapat diikuti oleh semua mahasiswa dari berbagai universitas dengan sub tema seputar *issue-issue* perkotaan. Seperti Ruang Kota, Demografi, Gender, Mobilitas Sosial, Urbanisasi, *Cyber Society*, Ekonomi, Budaya, Identitas, dan Kesehatan. Dengan mengadakan *Call for Paper* ini kami berharap *issue-issue* tentang kota dan permasalahannya di dalamnya dapat didiskusikan dan diangkat ke permukaan. *Proceeding* ini kami harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan rujukan bagi para pemerintah, peneliti, dan para praktisi lain untuk sebuah kota yang lebih baik.

Surakarta, 28 November 2018

Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si
Dosen Mata Kuliah Sosiologi Perkotaan
Universitas Sebelas Maret

SAMBUTAN KEPALA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang begitu besar kita dapat bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini.

Kami menyelenggarakan seminar nasional dengan tema "*Urban Crisis and Style of Urban Demography*" dengan tujuan memaparkan atau mensosialisasikan hasil dari penelitian lapangan oleh mahasiswa Sosiologi B angkatan 2016. Dengan kerja keras, mahasiswa telah memberikan semua kerja terbaiknya pada acara ini.

Atas terselenggarakannya acara ini kami menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si, selaku dosen mata kuliah Sosiologi Perkotaan, para pembicara dan seluruh peserta yang hadir dalam kesempatan ini.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan kepada semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami menyampaikan permohonan maaf.

Kepada seluruh peserta kami mengucapkan selamat mengikuti Seminar dan Konferensi Sosiologi Perkotaan tahun 2018 di FISIP UNS, Surakarta. Kami berharap kita akan berjumpa kembali di acara Seminar Nasional Sosiologi Perkotaan yang akan datang. Demikian yang ingin kami sampaikan, terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan kepada kita semua



Surakarta, 28 November 2018

Dr. Ahmad Zuber, D.E.A
Kepala Program Studi Sosiologi
FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami curahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat segala limpahan rahmatnya, Prosiding ini dapat terselesaikan sebagai suatu *output* dari Konferensi Nasional Sosiologi Perkotaan. Di dalam Prosiding ini memuat Empat Puluh Tujuh karya tulis dengan sepuluh sub-tema, yaitu Ruang Kota, Demografi, Gender, Mobilitas Sosial, Urbanisasi, *Cyber Society*, Ekonomi, Budaya, Identitas, dan Kesehatan.

Tidak lupa pula, mahasiswa Progam Studi Sosiologi B 2016 selaku penyelenggara dari acara ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi demi terselesaikannya Prosiding ini tepat pada waktunya. Dan tak lupa kami selaku panitia mengucapkan sebesar-besarnya kepada pemakalah-pemakalah dari berbagai universitas atas partisipasinya dalam Konferensi Sosiologi Perkotaan 2018.

Semoga Prosiding ini mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak, demi kepentingan-kepentingan pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Di samping itu, Prosiding ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya penyelesaian masalah, khususnya dalam masalah perkotaan, serta dapat menjadi referensi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Surakarta, 28 November 2018

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA PANITIA	viii
SAMBUTAN DOSEN MATA KULIAH SOSIOLOGI PERKOTAAN	x
SAMBUTAN KEPALA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BUDAYA	1
Rekacipta Tradisi; Praktik Konco Wingking dalam Dunia Modern (Studi Etnografi pada Perempuan Pekerja <i>Nguplik</i> di Desa Paciran Kabupaten Lamongan)	2
Reproduksi Wisata Budaya Kreatif (Studi Fenomenologi Reproduksi Wisata Budaya Tari oleh Sanggar Soerya Sumirat di Surakarta).....	12
Literasi Masjid (Studi Kasus Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta).....	22
Pergeseran Nilai Kebudayaan Jaranan Kediri (Konstruksi Budaya Indang Jaranan Putra Ronggo Wijoyo Kota Kediri)	29
Kehampaan Spiritualitas dan Ekonomi Komunitas : Ekspresi Perubahan Sosial-Budaya di Komunitas Perempuan Muslim Jogokariyan, Yogyakarta	36
PERGESERAN RUANG TRADISI RELIGI MASYARAKAT BETAWI DI WILAYAH JAKARTA (STUDI KASUS MASYARAKAT KELURAHAN DUREN TIGA).....	44
IDENTITAS.....	50
Identitas Sosial <i>Abdi Dalem Garap</i> Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Sebuah Kajian Sosiologis Tentang Pengabdian <i>Abdi Dalem Garap</i>)	51
<i>Vape</i> Sebagai Identitas Baru Bagi <i>Vapers</i>	58
Pemuda Dan Gerakan Sosial Budiman Sujatmiko Dalam Bayang-Bayang Partai Rakyat Dekokrat (PRD) ..	65
Warung Kopi dan Identitas yang Hilang (Studi Kritis pada Warung Kopi di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri).....	70
EKONOMI.....	77
Dilema Prostitusi dan Ekonomi Dalam Pembangunan DKI Jakarta	78
Kajian Permasalahan Kemiskinan Di Ibu Kota Jakarta.....	86
Pola Keruangan Harga Tanah di Kota Banjarmasin	94
Menilik Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Selatan untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia	103
Kajian Empiris Terhadap Perspektif dan Kesiapan Mahasiswa dalam Dunia Kerja dan Wirausaha Guna Menghadapi Bonus Demografi (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Negeri Semarang).....	110
Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Taraf Ekonomi di Kampung Batik, Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang.....	117
Optimalisasi Penggunaan Internet Sebagai Solusi Modernisasi Pengusaha Kampung UKM Digital Kota Semarang dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi	123

RUANG KOTA	129
Meninjau Harmonisasi Alam dan Fungsi Ruang pada Bentang Lanskap Budaya Jawa Kuno di Lembah Kali Brantas.....	130
Pembangunan Kota Yogyakarta Berbasis <i>Sustainable City</i>	139
<i>Community Action Plan (CAP) Dan Kampung Improvement Program (KIP): Studi Komparatif Kebijakan Inklusif Tata Ruang Permukiman di Surabaya dan Jakarta</i>	148
Penataan Ruang Terbuka Publik (PS) dan Fasad Depan Komersial (CFF) di Koridor Utama Jl. Letjen S. Parman Jakarta Barat	157
Upaya Membangun Ruang Kota Melalui Perencanaan Pembangunan Wilayah Kota di Indonesia	168
<i>Junkspace: Pasal Kematian Ruang dalam Ihwal Toko Online versus Toko Offline</i>	177
Konsep Kota Layak Anak di Indonesia	185
Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Pekanbaru Tahun 2017.....	192
Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan untuk Mewujudkan Mamuju <i>Green City</i>	205
Menggagas Kampung Kota Berkelanjutan	212
Tongkrongan: Fenomena Ruang Kenakalan dalam Perspektif Kriminologi Budaya	220
GENDER	227
Ngucing; Gay Online Prostitution (Studi Kasus pada Tiga Pelacur Gay di Kota Bandung).....	228
Pilihan Rasional Perempuan Sebagai Buruh Angkut Pasar di Kota Surabaya.....	237
Street Harassment di Kota Surabaya.....	242
Peran Perempuan Suku Tengger dalam Menjaga Tradisi Petekan Di Desa Ngadas Poncokusumo Kabupaten Malang	250
CYBER SOCIETY	255
Identitas Kelompok Keagamaan dalam Ruang Cyber.....	256
Disruptif Inovasi dalam Akun Instagram	264
Menakar Tren Komunikasi Politik di Instagram.....	272
Krisis Identitas Keagamaan Masyarakat Urban dalam Media Sosial	278
DEMOGRAFI.....	285
Analisis Karakteristik Fertilitas Penduduk Migran dan Non Migran Provinsi Sumatera Utara	286
Karakteristik Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) Migran Risenke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Berdasarkan SUPAS 2015	296
Bonus Demografi dan Bela Negara.....	304
Gerakan Komunitas <i>Pra-Lansia (KOPRAL)</i> dalam Meminimalisir Masalah Sosial Lansia di Era Bonus Demografi	312
Paradoks Yogyakarta Sebagai Kota Ramah Lansia	318
Analisa Hubungan Kepadatan penduduk terhadap Krisis Perkotaan dalam Perspektif <i>Urban Life Manifesto</i> di Kecamatan Jebres	326
Analisa Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Krisis Perkotaan dalam Perspektif <i>Urban Life Manifesto</i> di Kecamatan Pasar Kliwon	331

Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Profesionalisme yang Tidak Berakar pada Kehidupan dan Kebutuhan Kota Sebagai Krisis Perkotaan di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta	339
Korelasi Antara Jumlah Penduduk dan Ketidakadilan dalam Perspektif <i>Urban Life Manifesto</i> di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta	345
Kondisi Krisis Perkotaan pada Korelasi Antara Jumlah Penduduk dan <i>Urban Life Manifesto</i> di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta	351
KESEHATAN.....	356
Pergeseran Pola Penggunaan KB Tradisional di Wilayah Perkotaan.....	357

BUDAYA

Rekacipta Tradisi;
Praktik Konco Wingking dalam Dunia Modern
(Studi Etnografi pada Perempuan Pekerja *Nguplik*
di Desa Paciran Kabupaten Lamongan)

Moh. Faiz Maulana, mas.faiz07@gmail.com

Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Abstrak

Hidup dalam dunia modern dengan berbagai persinggungan tradisi, situasi dan informasi telah membuat perempuan di Paciran mengalami *dilemma of the self*. Pada satu sisi modernisasi memberikan kebebasan, di sisi lain perempuan harus mampu menjaga tradisi tentang identitasnya sebagai *konco wingking*. Penelitian ini menceritakan upaya perempuan di Paciran merekaciptakan *konco wingking* dalam mempertahankan tradisi dan identitasnya sebagai perempuan Jawa yang mulai ke luar rumah untuk bekerja, namun tetap menempatkan rumah sebagai yang utama (*place of origin*). Dampak dari hal tersebut adalah pemilihan kerja perempuan yang menempatkan rumah sebagai tempat utama (*place of return*). Melalui pendekatan etnografi penelitian ini akan melihat seluruh aspek, sosial dan budaya yang melatari perubahan tersebut. Penelitian ini dilakukan kepada enam perempuan pekerja *nguplik* di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *konco wingking* melalui proses rekacipta tradisi: produksi-reproduksi, mampu ditampilkan dalam praktiknya yang berbeda. *Konco wingking* yang selama ini dianggap hanya sebagai praktik-praktik domestik telah mengalami perluasan menjadi praktik-praktik publik.

Kata Kunci: *konco wingking*, modernisasi, rekacipta tradisi.

Pendahuluan

Dalam tradisi Jawa, perempuan seringkali dikenal sebagai *konco wingking*, yang berarti adalah teman di belakang. *Konco wingking* dipahami sebagai bentuk peran dan tugas perempuan yang berada di belakang (dapur, kasur, sumur). *Konco wingking* diartikan bahwa seorang perempuan tugasnya hanya sebagai teman laki-laki (suaminya) yang posisinya berada di rumah, mengurus rumah tangga dengan peran *macak, masak, manak*.

Konco wingking menjelaskan tempat (*place of origin*) bagi perempuan Jawa, di mana ia diposisikan dalam suatu masyarakat dulu hingga sekarang. Kehadiran *konco wingking*, memberikan *standing position* bahwa rumah adalah identitas perempuan Jawa. Hal ini selain telah menjadi tradisi turun temurun, juga dianggap sebagai kodrat perempuan. Kodrat perempuan adalah sebagai pengelola rumah tangga, istri yang penurut dan ibu yang *mrantasi* (melengkapi) (Handayani & Novianto, 2004; Permandeli, 2015).

Di Paciran, *konco wingking* akan mudah kita jumpai dari kegiatan sehari-hari perempuan. Mereka hampir setiap pagi membersihkan rumah, memasak, berbelanja ke pasar, mengasuh anak, dan mengurus keperluan kerja suaminya. Hal ini dilakukan atas kesadaran diri mereka terhadap kodrat mereka menjadi istri.

Meskipun demikian, kuatnya pemahaman perempuan di Paciran tentang *konco wingking* yang menempatkan dirinya pada ranah domestik dengan tugas *macak, masak, manak*, tidak membatasi

perempuan untuk ke luar rumah untuk bekerja. Hal ini disebabkan oleh masuknya modernisasi dalam kehidupan mereka. Modernisasi sedikit banyak telah mempengaruhi pola berpikir masyarakat Paciran tentang dunia.

Modernisasi telah menampilkan citra dan peran, bahkan tradisi baru bagi perempuan. Dalam dunia modern, perempuan tidak hanya diposisikan pada ruang domestik, melainkan juga berada pada ruang publik. Modernisasi telah menciptakan pandangan baru mengenai “tugas” perempuan. Bahkan lebih jauh, modernisasi secara radikal menganggap *konco wingking* yang selama ini disandarkan pada perempuan Jawa adalah alasan yang menjadikan perempuan sebagai obyek dari ketidakadilan gender yang menimbulkan adanya stereotip, dan marginalisasi (Fakih, 2003:13).

Meskipun demikian, modernisasi di sisi lain telah memberikan pandangan baru kepada perempuan terhadap citra, peran, dan tradisi baru bagi dirinya, di sisi lain modernisasi membuat perempuan serba salah. Perempuan seringkali dinilai kehilangan jati dirinya saat telah bersinggungan dengan dunia modern. Perempuan di Paciran misalnya dianggap tidak *njawani*, jika mereka lebih memilih bekerja daripada mengurus rumah tangga. Modernisasi dianggap telah mengubah tatanan hidup masyarakat Paciran (perempuan berada di ranah domestik dan laki-laki berada di ranah publik) yang selama ini dianggap luhur.

Hidup dalam dunia modern dengan berbagai persinggungan tradisi, situasi, dan informasi telah membuat perempuan di Paciran mengalami *dilemmas of the self* (Giddens: 1991). Pada satu sisi modernisasi memberikan kebebasan kepada perempuan untuk “ke luar rumah”, di sisi lain perempuan dibatasi oleh berbagai tradisi tentang narasi identitas dirinya yang menempatkannya pada ranah domestik.

Dalam era modern seperti sekarang ini, perempuan hidup “di dunia” dalam arti yang berbeda dari era sebelumnya. Setiap perempuan di Paciran masih terus menjalani dan merawat kehidupan lokal (tradisi), namun pada konteks dan ruang serta waktu yang berbeda (modern). Transformasi tempat, ruang dan waktu yang lebih modern tidak begitu saja mengeliminasi perilaku atau kehidupan perempuan di Paciran yang bersandar pada tradisi terdahulu.

Oleh karena itu, rekacipta tradisi menjadi penting di era modern saat ini sebagai salah satu upaya menjelaskan kaitan logika budaya (*cultural logic*) perempuan Jawa dalam memandang diri (*self*) dan liyan (*the other*) hingga mampu keluar dari rasa dilema. Rekacipta tradisi adalah upaya untuk menjembatani perempuan dengan segala tradisi yang melekat pada dirinya dengan perubahan zaman yang semakin modern. Melalui rekacipta tradisi *konco wingking*, perempuan tidak hanya termarginalkan pada ranah domestik dengan *macak, masak, manak*, tetapi juga mampu tampil pada ranah publik tanpa kehilangan identitasnya sebagai satuan dari suatu masyarakat (*society*).

Mengkaji *konco wingking* sebagai tradisi perempuan Jawa dengan sendirinya menggambarkan sejarah masa lampau masyarakatnya dan penampilannya pada masa kini. *Konco wingking* yang dimaknai dan dipraktikkan ulang (*reinvented*) diproses oleh perempuan Jawa dalam sejarah masyarakat yang terus mengalami perubahan. Proses tersebut merupakan proses reproduksi prinsip-prinsip *konco wingking* di ranah internal mereka, sebagai respon terhadap ranah eksternal yang terbangun oleh perubahan zaman ke arah yang lebih modern.

Konco wingking sebagai titik sentral kajian ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah perempuan Jawa, di mana rumah merupakan basis utama dari mana *konco wingking* bersumber. Posisi perempuan dalam rumah telah membentuk statusnya sebagai individu, sehingga di tengah masyarakat, ia dapat diposisikan; dibedakan atau disejajarkan dengan individu yang lain karena posisi dalam rumah menentukan status dan keterpandangan seseorang dalam masyarakat. Posisi dan status tersebut menciptakan identitas pada setiap individu, sesuai tempatnya masing-masing. Pola semacam ini lambat laun berubah dan prinsip-prinsip *konco wingking* sebagai tradisi menjadi lebih terbuka.

Rekacipta tradisi menunjukkan bahwa tradisi tidak pernah menemukan bentuknya yang final, konstan, atau “jadi”, melainkan terus bergerak atau tidak pernah akan berakhir. Dalam hal ini *konco wingking* sebagai tradisi dipengaruhi dimensi sejarah (ada ruang dan waktu), sehingga konstruksi *konco wingking* itu sendiri berlangsung dalam proses yang dinamis. Pemaknaan *konco wingking* ini juga dianggap bagian dari sikap maupun respon terhadap dinamika yang berkembang yaitu *konco wingking* (teman belakang) yang dinamis, kontekstual, strategi perjuangan, dan representasi identitas perempuan dalam struktur masyarakatnya. Dengan kata lain terdapat bentuk dan pembentukan kembali tradisi dengan fungsi baru yang berjalan dalam sejarah.

Kerangka Konseptual

Rekacipta tradisi (*reinvented tradition*) pada dasarnya merupakan dialog antara tradisi dalam konteksnya yang lama, dengan konteks kekinian, sehingga memungkinkan munculnya wajah tradisi yang berbeda dari wujud lamanya tersebut. Dapat juga disebut proses, cara, atau tindakan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang berdaya menjadi penting. Shahab (2004) menyebut proses ini dalam konsep rekacipta. Beberapa bagian tradisi dipertahankan dan beberapa bagian lainnya diaktualisasikan dalam bentuk baru.

Terminologi tradisi dan penemuan kembali tradisi sudah dipergunakan secara luas. Tradisi sebagai entitas dianggap ada, ditemukan, kemudian dikonstruksi ulang. Proses ini menghasilkan kemunculan kembali tradisi dalam bentuk yang sederhana dan jelas, sehingga setiap orang yang mempelajarinya mengetahui darimana asal-usulnya dan perkembangannya. Keberlakuan tradisi tergantung penerimaan masyarakat, karena ada tradisi yang hanya mampu bertahan beberapa lama, namun ada juga penyerapannya sangat cepat.

Demikian halnya dengan perempuan-perempuan pekerja *nguplik* di Paciran, mereka berupaya keluar dari situasi dilema yang menempatkan dirinya pada posisi liminal akibat dari tindakan mereka yang “melanggar” tradisi dengan “ke luar rumah”. Tidak dipungkiri kesadaran itu merupakan reaksi atas situasi ambigu yang mereka alami disebabkan oleh perubahan zaman yang kian modern. Modernisasi di sisi lain dipuja sebagai penguatan ekonomi rumah tangga, di sisi lain dianggap sebagai biang keladi rusaknya tatanan masyarakat Paciran.

Modernisasi secara luas telah memengaruhi perilaku suatu etnik (masyarakat) yang disebabkan oleh arus informasi yang tidak lagi satu arah (lokal), melainkan banyak arah (global). Perubahan perilaku tersebut pada akhirnya juga berpengaruh terhadap perubahan budaya suatu etnik (masyarakat) (Giddens, 1998:64).

Modernisasi bagi David H. Smith (1983), tidak hanya menyentuh wilayah teknis, tetapi juga telah menyentuh wilayah nilai-nilai budaya. Menurutnya modernisasi berhubungan dengan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya dan sekaligus meliputi hubungan dengan kebudayaan masyarakat. Modernisasi bagi Giddens bergerak dengan daya universal yang pada dirinya menjelaskan sifat modern dalam perjumpaannya dengan praktik-praktik tradisional (Giddens, 1991: 21).

Konco wingking dalam dunia modern tidak lagi bisa dimaknai sebagai “yang di belakang” dengan peran domestiknya; *macak, masak, manak* sebagai sesuatu yang statis, yang dipresentasikan dengan posisi perempuan selalu berada dalam rumah. Melainkan harus dimaknai sebagai “*place of return*” dalam memandang realitas sosial; masyarakat dan keluarga. Bagi perempuan-perempuan di Paciran *konco wingking* diaktifkan melalui berbagai tindakan, salah satunya adalah *nguplik*. Presentasi *konco wingking* pada akhirnya tidak hanya dilihat dalam pertalian posisi dan peran perempuan dengan rumah, melainkan juga pertalian posisi dan peran perempuan dengan ruang publik.

Untuk menjelaskan tradisi dalam konteks rekacipta tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran kesadaran subjektif, sebagai *active consen* (kesepakatan aktif) dari pelaku/agen. Dalam teori

antropologi masa kini, “kesadaran subyektif” mendapat posisi yang sangat penting dalam “teori praksis” yang dikembangkan oleh Bourdieu. Pokok pikiran teori praksis yang paling relevan dalam pembahasan ini adalah bahwa konsep “praksis” (*practice*) Bourdieu dibedakan dari konsep tindakan (*action*) yang merupakan salah satu konstruk teoritis utama sosiologi Weber, yang diwariskan dalam berbagai pendekatan antropologis antara lain pendekatan intrepetatif Geertz (1973). Berbeda dengan konsep tindakan dalam tradisi Weber yang cenderung dilihat sebagai pencerminan ide-ide yang terkandung dalam kebudayaan si pelaku, konsep praksis menekankan adanya hubungan timbal balik (*dualitas*) antara si pelaku (agen) dan struktur atau kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi (Bourdieu, 1977:83).

Bourdieu melihat tindakan selalu sebagai hasil dialektika antara agen dan struktur “*the dialectic of the internalization of externality and the externalization of the internality.*” Agen menerima pengaruh dari struktur (internalisasi) dan melalui praktik mereka mengukuhkan struktur itu sendiri (eksternalisasi). Tradisi terbentuk dari hubungan dialektis antara agen dan struktur. Di sisi internal agen menerima pengaruh dari struktur, sementara ke sisi eksternal, aktivitas agen memproduksi struktur. Eksternalitas merupakan produk eksternalisasi agen yang berubah terus-menerus akibat relasi timbal-balik antara agen dan struktur, sehingga tradisi merupakan bentuk dari hasil proses interaksi terus-menerus (Bourdieu, 1977:72).

Tindakan para agen tersebut terjadi dalam situasi sosial nyata, diatur oleh seperangkat relasi sosial objektif yang oleh Bourdieu (2003:6) dibagi kedalam empat ranah (*fields*) yaitu ranah ekonomi, ranah sosial, ranah politik, dan ranah kultural. Setiap ranah memiliki logika dan modalnya masing-masing, juga memiliki aturan tersendiri dalam membagi posisi setiap agen. Kepemilikan modal di setiap ranah menentukan posisi setiap agen di ranah tersebut, dan pada akhirnya mempengaruhi tindakannya.

Tindakan atau praktik merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk sejarah dan ranah yang juga merupakan produk sejarah. Setiap ranah menuntut individu memiliki modal-modal khusus agar dapat bertahan dan hidup secara baik di dalamnya (Harker, 1990: xvii-xxv). Menurut konsep Bourdieu, agen tidak bertindak dalam ruang kosong, tetapi dalam situasi yang konkrit dan diatur oleh seperangkat relasi-relasi sosial yang objektif.

Dalam teori praksis ini Bourdieu ingin menggambarkan hubungan timbal balik di antara keduanya (agen-struktur) yang direproduksi secara terus menerus dalam praksis para pelakunya yang berada dalam kondisi historis tertentu. Dalam proses tersebut para agen mengartikulasikan dan mengapresiasi simbol-simbol budaya yang terdapat dalam struktur sebagai tindakan strategis dalam konteks sosial tertentu, sehingga proses timbal balik secara terus menerus antara praksis dan struktur dapat menghasilkan baik perubahan maupun kontinuitas. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa tradisi juga merupakan hasil dari relasi dualitas (agen-struktur), yang selalu terikat dengan sejarah, yaitu ruang-waktu dimana agen memproduksi tindakan-tindakannya.

Seturut dengan hal itu Giddens (1984:9) melihatnya sebagai kesadaran praksis, agensi terdiri dari peristiwa yang didalamnya individu bertanggungjawab atas peristiwa. Di mana peristiwa itu tidak akan terjadi jika individu tidak melakukan intervensi, dan dengan struktur memungkinkan individu untuk bertindak berdasarkan peraturan-peraturan dan sumber daya sehingga melahirkan kembali struktur baru yakni hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Jadi, struktur tidak berada di luar individu tetapi sebagai sarana maupun hasil aktivitas yang diatur oleh struktur secara terus menerus dan memberikan otoritas pada agen, sehingga struktur hanya ada di dalam sistem sosial dan terwujud melalui aktivitas agen itu sendiri, terwujud dalam “jejak memori” yang mengorientasikan tindakan agen manusia (Ritzer, 2009:572).

Dengan demikian, membicarakan *konco wingking* sebagai tradisi perempuan Jawa di Paciran, tentunya harus merujuk pada sistem sosial yang dimiliki setiap kelompok masyarakat yang dipahami bersama, maupun “jejak memori” khusus yang dilekatkan pada kelompok tersebut. *Macak, masak, manak* yang dilekatkan dalam *konco wingking*, misalnya, selain menjadi struktur juga bagian dari praksis keseharian masyarakat. Nilai-nilai dalam *konco wingking* sebagai tradisi tidak hanya sekadar pemikiran atau konsep melainkan juga sistem nilai yang dirujuk dan diinternalisasi oleh masyarakat dalam tindakan (Corr, Rachell & Harriet L. Wilkes, 2003). *Konco wingking* sebagai tradisi bukan esensi independen yang tinggal di luar kehidupan manusia, sebaliknya ia merupakan produk sejarah yang senantiasa dikonstruksi.

Metode Penelitian

Kajian ini dilaksanakan di desa Paciran Kabupaten Lamongan, pada perempuan pekerja *nguplik*. *Nguplik* adalah pekerjaan yang memisahkan cangkang/kulit rajungan matang dengan dagingnya. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu sesuai dengan maksud atau tujuan penelitian.

Penelitian ini bersumber pada cerita enam perempuan pekerja *nguplik* di Paciran. Subjek tersebut dipilih karena ingin melihat bagaimana perempuan pekerja di Paciran diposisikan dalam suatu masyarakat yang masih memandang bahwa tugas utama perempuan adalah di rumah, dengan *macak, masak, manak*. Subjek dipilih dengan mempertimbangkan karakter yang berbeda-beda, misalnya dari strata pendidikan, usia, dusun asal, dan tempat *nguplik*. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan menggunakan teknik pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan *life history* dalam melakukan pengumpulan data. Pemilihan teknik-teknik tersebut diharapkan mampu memberikan suatu penelitian yang utuh dan terpadu.

Pengamatan terlibat dalam penelitian ini berupaya untuk memotret kehidupan sehari-hari masyarakat Paciran, khususnya para perempuan pekerja *nguplik*. Bloch (1998:44) mengungkapkan “*most ethnographic monographs are based on the notion that the language of our informants provides direct access to their knowledge. This is a highly problematic proposition.*” Melalui pengamatan terlibat data etnografi akan menjadi semakin kaya, karena banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan subjek penelitian yang tidak terwakili oleh kata-kata atau bahasa. Apabila *event* yang terjadi memungkinkan untuk diikuti, pengamatan juga membantu peneliti untuk melihat atau mendengar secara langsung berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara tidak berstruktur (Sulistiawati, 2013:30).

Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang akurat saya juga melakukan wawancara mendalam dengan para informan. Tentu dengan maksud menggali data-data yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara saya dengan subjek penelitian selain berlangsung di tempat kerja, juga terjadi di rumah para subjek, dan juga terjadi di berbagai lokasi yang menjadi kesepakatan kita, seperti di kafe dan warung makan. Perbincangan yang dilakukan di rumah subjek penelitian berlangsung sekitar dua jam setiap kali pertemuan, sedangkan percakapan saat di tempat kerja bervariasi lamanya, karena dilakukan di sela-sela kegiatan.

Dalam penelitian ini, saya juga banyak meminta subjek penelitian untuk bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari sebagai istri dan sekaligus menjadi pekerja. *Life story* membantu saya melihat semua kejadian dan aktivitas dalam kehidupan subjek penelitian yang tidak dapat peneliti amati karena terjadi sebelum masa penelitian ini dilakukan, dan jelas merupakan bagian dari sejarah mereka. Fatterman (1989:61) mengungkapkan “*Life history is key actor’s detailed autobiographical description. In some instances the life history may not be verifiable or even factually accurate. In these cases, the life history is still invaluable because the record captures an individual’s perception of the past, providing a unique look at how the key actor thinks and how personal and cultural values shape his or*

her perception of the past.” Meskipun sulit untuk diverifikasi, *life history* tetap merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berguna untuk mendapatkan deskripsi kehidupan seseorang secara rinci (Sulistiawati, 2013:34).

Hasil dan Pembahasan

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, perempuan hidup dalam situasi dilema. Perempuan hidup di dunia dalam arti yang berbeda dari era sebelumnya, meskipun demikian setiap perempuan – seperti di Paciran- masih terus menjalani dan merawat kehidupan lokal (tradisi) namun berada pada konteks dan dalam ruang dan waktu yang berbeda (modern). Transformasi tempat, ruang dan waktu yang lebih modern tidak begitu saja mengeliminasi pengetahuan atau kehidupan perempuan Paciran yang bersandar pada tradisi terdahulu. Maka untuk mengatasi dilema tersebut, Giddens (1991) menawarkan sebuah definisi modernitas yang berdasar pada bertemunya apa yang lokal dengan apa yang global. Modernisme merupakan proses dialogis menyatunya kebudayaan dunia, antara individu dan masyarakat, lokal dan global.

Maka dalam konteks ini, modernisasi juga merupakan peluang bagi perempuan untuk mendialogkan kembali makna identitas sekaligus tradisi (*konco wingking*) yang melekat pada dirinya. Di situlah perlu adanya *reinvented tradition* atau rekacipta tradisi *konco wingking* bagi perempuan di Paciran. Rekacipta tradisi *konco wingking* digunakan untuk tetap meneguhkan identitas diri (*self identity*) perempuan Paciran, yang sekaligus menjadi identitas bersama (*society identity*) perempuan Paciran sebagai bagian dari suatu kelompok dalam ruang dan waktu yang berbeda.

Rekacipta Tradisi: Produksi dan Reproduksi *Konco Wingking*

Konco wingking, tidak terbentuk dalam sekejap namun merupakan sebuah proses produksi-reproduksi dari makna dan tindakan yang terpupuk dari waktu ke waktu yang akhirnya menjadi tradisi yang melekat pada perempuan Jawa. Mengubah pandangan masyarakat Paciran tentang *konco wingking* dari konotasi domestik; dapur, kasar, sumur bahkan cenderung negatif yang dalam sudut pandang entitas disebut *labelling* bukanlah hal yang mudah. Labeling sendiri berkaitan erat dengan bagaimana suatu kelompok etnik dipersepsikan baik positif maupun negatif oleh kelompok etnis lainnya.

Terbentuknya stigma tersebut tentu berkaitan erat dengan hasil interpretasi makna *konco wingking* oleh perempuan di Paciran yang terus direproduksi melalui berbagai pengetahuan yang didapatkan secara turun temurun dari orangtua atau ingatan sejarah. Dalam hal ini relasinya baik dalam struktur internal (antara mereka sendiri; masyarakat) maupun dengan di luar dirinya (struktur eksternal).

Perubahan zaman yang kian modern telah menjadi momen yang tepat untuk mengubah pandangan negatif tersebut tentang *konco wingking*. *Konco wingking* direproduksi dari nilai lama, disegarkan atau direkacipta (*reinvited tradition*) sehingga tidak menghilangkan identitas diri perempuan Paciran sebagai perempuan Jawa ketika berhadapan dengan modernitas. Selain itu, produksi dan reproduksi identitas merupakan strategi untuk mampu menghadapi perubahan zaman yang kian cepat dan mengglobal. Nilai-nilai *konco wingking* tetap dirawat sebagai sebuah identitas diri perempuan Paciran, namun juga tidak menjadikannya sebagai penjara untuk menghadapi dunia sosial. Melainkan sebagai jembatan yang mampu menghubungkan antara struktur internal (perempuan sebagai bagian dari suatu masyarakat) dengan struktur eksternal (perempuan sebagai bagian dari dunia luar yang disebut modernisasi dan globalisasi).

Perjuangan perempuan Paciran untuk keluar dari pandangan yang menyatakan bahwa letak perempuan adalah dapur, kasar, sumur dengan tugas *macak, masak, manak* merupakan bagian kecil dari perjuangan perempuan Paciran untuk keluar dari stigma yang sudah terlanjur melekat dan

“membeku”. Di sisi lain pengakuan atas diri perempuan tentang identitas suatu komunitas tidak boleh lepas. Berjuang di tengah kedilematisan tersebut mengharuskan perempuan-perempuan Paciran memberi praktik baru (rekacipta tradisi) terhadap *konco wingking* yang tetap bersumber pada tradisi masyarakat.

Memang dalam kehidupan masyarakat Paciran *konco wingking* masih dimaknai sebagai domain domestik yang dikhususkan untuk perempuan. *Konco wingking* dalam pandangan masyarakat Paciran sebenarnya mempunyai dua makna sekaligus, positif dan negatif. Namun, *konco wingking* cenderung dimaknai negatif karena dianggap sebagai ruang marginalisasi peran perempuan. Padahal perempuan dalam rumah tangga juga mempunyai peran penting sebagai penyeimbang kehidupan rumah tangga, yang mempunyai kontrol penuh terhadap rumah. Pada hakekatnya *konco wingking* adalah *positioning* yang digunakan masyarakat Paciran untuk memudahkan letak keberadaan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah, tidak lebih.

Modernisasi menjadi titik balik bagi perempuan Paciran untuk memaknai ulang (rekacipta tradisi) *konco wingking* melalui praktik atau tindakan ke luar rumah (bekerja). Salah seorang informan menuturkan:

“Zaman sekarang perempuan harus giat, tidak hanya menerima apa adanya, tidak hanya jadi *konco wingking*, tetapi juga jadi *konco urip*. Tidak hanya nunggu suami, tapi ya harus bisa bantu suami bersama-sama.”

Pernyataan tersebut merupakan gambaran kesadaran mereka akan posisinya yang telah “berpindah tempat” dari nilai ideal *konco wingking*. Namun “berpindah tempat” tersebut juga bukan berarti menggeser dirinya dari “tempat” asalnya (masyarakat). Perpindahan tempat (praktik) perempuan dalam mengimplementasikan *konco wingking* merupakan peluang untuk meredefinisi *konco wingking* sebagai “yang di belakang”. *Konco wingking* menjadi modal eksistensi dirinya sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai *konco urip*. Dengan adanya modernisasi perempuan di Paciran tidak lantas meninggalkan rumah sebagai yang utama (*place of origin*), melainkan menjadikannya sebagai tempat utama (*place of return*). Artinya bahwa setiap aktifitas yang dilakukan perempuan di luar rumah, bukanlah semata-mata untuk “membebaskan diri” dari aktifitas rumah, melainkan sebagai upaya perempuan untuk tetap saling terhubung antara dunia luar dan rumah.

Dengan memanfaatkan dinamika perubahan zaman yang sedemikian cepat dan kompleks, semakin memberikan ruang bagi perempuan-perempuan di Paciran untuk mereproduksi *konco wingking* dengan berbagai macam tindakan atau praktik. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya jenis pekerjaan yang digeluti oleh perempuan, dari yang rumahan hingga kantoran atau institusional. Hal ini dapat dilihat dari data monografi desa Paciran tahun 2017 yang memperlihatkan bahwa jumlah perempuan yang ke luar rumah untuk bekerja mencapai 513 jiwa, meningkat dari tahun 2015 yang hanya berjumlah 198 jiwa (Data monografi desa Paciran, 2017).

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik dari makna *konco wingking* yang selama ini dipahami sebagai domestik, di belakang telah mengalami “perpindahan tempat”. Melalui modernisasi *konco wingking* direproduksi melalui pekerjaan-pekerjaan, salah satunya adalah *nguplik*. Semangat modernisasi sejalan dengan hadirnya kesadaran akan pentingnya *konco wingking* dalam arena publik, baik sebagai legitimasi perempuan Jawa maupun sebagai titik pijak dalam melakukan tindakan. Meningkatnya jumlah perempuan di Paciran yang bekerja juga sebagai tanda bahwa mereka ada (eksis) dan diterima sebagai bagian dari suatu komunitas yang juga layak diperhitungkan dalam perekonomian rumah tangga, negara bahkan dunia. Mereka juga mulai membuktikan pandangan

bahwa perempuan mampu berpindah tempat (rumah) ke tempat lain (publik) tanpa meninggalkan tempat asalnya (komunitas) sebagai identitasnya. Pada akhirnya, perempuan di Paciran tidak dapat hanya disimplifikasi melalui tipologi 3M dengan *macak, masak, manak*, tetapi telah berubah menjadi 4M dengan *macak, masak, manak dan mergawe*.

Mergawe Wajah Baru Praktik Konco Wingking

Meningkatnya kompleksitas pengetahuan dan informasi masyarakat Paciran yang disebabkan oleh modernitas telah memengaruhi struktur masyarakat Paciran dengan berbagai pola-pola interaksi yang tentunya juga mengalami perubahan dari masa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Paciran memandang perempuan tidak lagi sebagai ibu rumah tangga (*housewife*) semata, melainkan juga ibu pekerja (*mother worker*). Tindakan Perempuan di Paciran dengan *mergawe* adalah bagian dari wajah baru praktik perempuan di Paciran di era modern saat ini. Perubahan pola interaksi ini dapat dilihat sebagai hasil dari rekayasa tradisi *konco wingking* yang dilakukan oleh Perempuan di Paciran dalam menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat di era modern.

Sebagai produk habitus, pengetahuan akan *konco wingking* menjadi modal dasar bagi perempuan di Paciran ketika berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupannya. *Konco wingking* merupakan pengetahuan dan kearifan lokal yang harus dihayati, dilaksanakan, dan dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Jangkauan dari *konco wingking* ini meliputi hampir semua aspek kehidupan perempuan di Paciran, di mana ranah sosialisasi utamanya adalah rumah. Secara singkat, *konco wingking* menjadi dasar utama tentang *positioning* perempuan di Paciran dalam segala tindakan yang dilakukannya.

Perempuan pekerja (*mergawe nguplik*) di Paciran mencoba untuk menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, dalam arti meski mereka ke luar rumah tetapi keberadaannya tetap terhubung dengan rumah sebagai ranah sosialisasi utamanya. Perempuan pekerja *nguplik* di Paciran menunjukkan kemampuan itu dengan menempatkan *konco wingking* sebagai "*positioning*" yang menanungi segala tindakan yang dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari kebebasan perempuan pekerja *nguplik* dalam mengatur jam kerjanya, yang disesuaikan dengan urusan rumah. Selain itu, pemilihan pekerjaan perempuan di Paciran juga menunjukkan masih banyaknya perempuan yang masih menempatkan rumah sebagai tempat utama bertindak, semisal lebih memilih bekerja sebagai penguplik, buruh rumahan, buruh tani daripada karyawan swasta di sebuah perusahaan.

Hal demikian menunjukkan bahwa kebebasan yang ditimbulkan oleh modernitas tidak begitu saja digunakan oleh perempuan di Paciran untuk "bebas" bertindak. Melainkan menjadi titik pijak perempuan di Paciran untuk kembali menempatkan posisinya di antara nilai tradisi dan modernisasi, dan dengan diterimanya perempuan keluar ke ranah publik untuk bekerja oleh masyarakat Paciran, mengartikan bahwa proses *positioning* perempuan berhasil. Perempuan tidak lagi dimonopoli dalam urusan domestik, melainkan juga punya hak yang sama keluar dalam arena publik.

Kesimpulan

Modernisasi telah mengubah peran perempuan tidak hanya berada pada ruang-ruang domestik, namun juga pada ruang-ruang publik. Modernisasi juga telah mengubah citra dan peran domestik perempuan Paciran yang selama ini dianggap dogmatis menjadi suatu hal yang dialektis.

Akumulasi dari kondisi-kondisi semacam itu telah menciptakan pandangan baru mengenai "tugas" perempuan di zaman modern. Perempuan tidak lagi bisa distigma dengan peran domestik. Modernisasi telah mengubah masyarakat dalam memandang perempuan, termasuk perempuan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh modernisasi telah menampilkan citra, peran dan tradisi baru bagi perempuan.

Pergeseran dalam cara memandang perempuan ini, pada akhirnya juga berimbas pada bergesernya pemahaman tentang *konco wingking* di masyarakat Paciran. Sebagai nilai dari satuan identitas masyarakat, *konco wingking* tidak mungkin begitu saja dihilangkan dalam laku perempuan di Paciran. Situasi yang seperti ini membuat perempuan mengalami *dilemma* dalam dunia modern.

Hal tersebut mendorong perempuan di Paciran untuk menemukan dan membentuk ulang identitas yang berakar dari tradisi sebagai upaya mengatasi situasi dilema. Salah satunya adalah dengan melakukan *reinvented tradition* atau rekacipta terhadap *konco wingking* sebagai nilai utama perempuan Jawa. Perempuan-perempuan harus mampu melakukan *reinvented tradition* atau rekacipta *konco wingking*, dengan tetap menempatkan makna aslinya (*identity as being*) sebagai nilai utama yang ditampilkan dengan performa yang berbeda (*identity as becoming*) di era modern sekarang. *Reinvented tradition* atau rekacipta merupakan dialog antara tradisi dalam konteksnya yang lama, dengan konteks kekinian, sehingga memungkinkan munculnya wajah tradisi yang berbeda dari wujud lamanya tersebut.

Rekacipta *konco wingking* dilakukan sebagai upaya dialogis perempuan Paciran dalam menempatkan dirinya pada “tempat” yang berbeda (publik) namun tetap tidak meninggalkan tempat asalnya (rumah). Kesadaran untuk merekacipta *konco wingking* dengan praktik baru juga bagian dari modal budaya perempuan dalam membangun relasi-relasi sosialnya.

Referensi

- Bloch, E.F. M., 1998 *How We Think They Think: Anthropological Approaches to Cognition, Memory and Literacy*. Colorado: Westview Press.
- Bloch, E.F. M., 1994 “Language, Anthropology, and Cognitive Science,” dalam R. Borofsky (peny.) *Assessing Cultural Anthropology*. McGraw-Hill, Inc. Hal: 276-283.
- Bourdieu, Pierre, 1984. *Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste*, translated oleh Richard Nice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre, 1998. *Practical Reason On The Theory of Action*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, Pierre, 2003. *The Field of Cultural Production: Essay on Art and Literature*. Edited and Introduced by Randal Johnson. Cambridge: Polity Press, Blackwell Publishing Ltd.
- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline Of A Theory Of Practice*. Cambridge University Press.
- Corr, Rachell & Harriet L. Wilkes, 2003. “Ritual, Knowledge, and the Politics of Identity in Andean Festivities”. *Honors College Florida Atlantic University* Author(s): Rachel Corr Source: *Ethnology*, Vol. 42, No. 1 (Winter, 2003) pp. 39-54.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fetterman, D.M. 1989 *Ethnography Step by Step*. Applied Social Research Methods Series Volume 17. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Giddens, Anthony. 1979. *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber* (terjem). Jakarta: UIP.
- Giddens, Anthony. 2005. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Terjem. Hurchadi dari *The Consequences of Modernity*. 2004. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Hall, Stuart. 1991. *Culture, Globalization and The World-System: Contemporary Conditions for TheRepresentation of Identity*. Edited by Anthony D. King. Houdmills, Basingstoke, Hampshire and London: MacMillan Education Ltd.
- Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto. 2011. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS
- Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence. 1992. *The Invention of Tradition*. Cambrige University Press.
- James, Allison, Jenny Hockey & Andrew Daws on, 1997. *After Writing Culture: Epistemology & Praxis in Contemporary Anthropology* (ed). Roudledge Taylor & Francis Group: London and New York Press.
- Permanadeli, Risa. 2015. *Dadi Wong Wadon Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Richard Harker, Cheelan Mahar, Chris Wilkes (ed). 2009. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*. Terjm. Pipit Maizier dari *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*. 1990. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Alih bahasa Alimandan dari *Modern Sociological Theory*, 2003. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shahab, Yasmine Zaki. 2004. *Identitas dan Otoritas, Rekonstruksi Tradisi Betawi*. Laboratorium Antropologi FISIP UI.
- Sulistiawati, Dian. 2013. *Living With HIV/AIDS: Dari Memahami Virus Hingga Menormalkan Kembali Kehidupan Pribadi*. Depok: Universitas Indonesia.

Reproduksi Wisata Budaya Kreatif
(Studi Fenomenologi Reproduksi Wisata Budaya Tari
oleh Sanggar Soerya Sumirat di Surakarta)

Rony Gilang Candra Saputra, S.Sos, ronygilang@gmail.com

Dr. Argyo Demartoto, M.Si, argyodemartoto@ymail.com

Dr. Supriyadi, SN, SU, supriyadi53@staff.uns.ac.id

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses reproduksi wisata budaya kreatif di sanggar tari Soeryo Soemirat Pura Mangkunegaran. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi pasif. Analisis data menggunakan model interaktif. Validitas data menggunakan rewinforman dan triangulasi sumber. Reproduksi wisata budaya kreatif di Sanggar Tari Soerya Soemirat dikaji dengan pemikiran Pierre Bourdieu. Sanggar tari Soeryo Soemirat di Pura Mangkunegaran ini bertujuan untuk melestarikan dan menumbuhkan kembangkan seni dan budaya masyarakat Solo. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pelaku wisata budaya kreatif dengan berbagai macam latar belakang. Mereka ini memiliki modal ekonomi yang didapatkan dari dana pemerintah kota dan iuran masing-masing anggota, modal budaya yang jelas melekat dalam sanggar yang mengusung tari tradisional dan merupakan sanggar besutan Keraton Mangkunegaran, dan modal sosial yang telah didapatkan dari eksistensi Sanggar Soeryo Soemirat selama bertahun-tahun sehingga memiliki jaringan dan relasi yang cukup luas. Reproduksi wisata budaya kreatif di Sanggar Tari Soeryo Soemirat dengan mengadakan latihan-latihan rutin bagi para anggotanya mengenai tari tradisional khas Solo yang telah diajarkan secara turun menurun tanpa adanya perubahan yang berbau modernitas sekalipun. Selain itu, reproduksi wisata budaya kreatif ini melalui penyelenggaraan pentas tari tradisional Jawa dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta.

Kata kunci: budaya kreatif, reproduksi wisata, Soerya Soemirat

Pendahuluan

Setiap daerah mempunyai sumber daya pariwisata yakni salah satu bentuk potensi sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi satu unit ekonomi melalui kegiatan pariwisata. Adanya kegiatan pariwisata ini, apabila dikelola dan dikembangkan secara profesional, maka akan dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effects*) dalam perekonomian daerah yang bersangkutan (Adisasmita, 2006:10). Hampir semua negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan obyek wisata mereka. Dewasa ini industri pariwisata dipandang memiliki prospek cerah dan cukup menjanjikan serta banyak mendatangkan keuntungan, antara lain menambah devisa negara, menambah pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mensejahterakan masyarakat sekitar.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1. Pariwisata memiliki ruang lingkup: berbagai macam kegiatan wisata, didukung oleh berbagai fasilitas seperti transportasi dan infra struktur yang memadai, serta adanya layanan yang disediakan oleh

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah seperti adanya biro perjalanan wisata, tour guide, pameran, akomodasi, pusat informasi pariwisata dan lain-lain.

Adapun wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1. Ruang lingkup wisata meliputi: kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, perjalanan tersebut bertujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata, serta dalam jangka waktu sementara.

Sektor pariwisata di daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah. pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa Negara. Dari segi perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja, pengembangan pariwisata berpengaruh positif. Peluang usaha/kesempatan kerja tersebut lahir karna adanya permintaan wisatawan. Kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan, perdagangan, sarana olah raga, jasa, dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk menunjang kehidupan rumah tangganya (Pendit, 2003:33).

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di dalam suatu latar yang diorganisasi (berstruktur) yang terjadi di luar sistem persekolahan. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi pemuda-pemudi dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Salah satu jenis pendidikan nonformal yaitu sanggar seni dan budaya. Sanggar seni dan budaya sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pengembangan diri khususnya dalam bidang seni dan budaya.

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Seni Pasal 1 menyatakan bahwa "sanggar seni budaya adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni".

Kota Solo bila dilihat dari sisi geografisnya tidak memiliki wisata alam tetapi merupakan kota yang dikenal dengan kota pariwisata. Salah satu aset dan modal yang dimiliki Kota Solo adalah budaya. Budaya ini dikembangkan dan dipamerkan sehingga menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi turis asing maupun lokal. Sehingga sangat menarik mengkaji wisata budaya di Kota Solo khususnya dalam bidang tari.

Dari penjelasan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana karakteristik pelaku wisata budaya kreatif di Sanggar Tari Soeryo Soemirat Mangkunegaran?

Kajian Pustaka

Batasan Konsep

1. Reproduksi

Reproduksi sendiri berasal dari bahasa Inggris *re* yang berarti kembali dan *production* yang berarti produksi atau yang dihasilkan (Wojowasito, 1980:160). Kamus Praktis Bahasa Indonesia kata reproduksi diartikan hasil pembuatan ulang (Marsam, 1983:221).

2. Pariwisata

Pariwisata menurut Spillane (2002:20) adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan / keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Pendit (2003:20), mendefinisikan pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

3. Sanggar

Sanggar adalah wadah kegiatan dalam membantu dan menunjang keberhasilan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan. Sanggar merupakan tempat berkumpulnya para pelaku seni, peminat seni, atau orang yang ingin menjadi seniman untuk berlatih bersama, menempa dan mengembangkan potensi diri atau keterampilan seninya (Jazuli, 2008: 22).

Pujiwiyana (2010:21) mengatakan bahwa sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau suatu kelompok orang atau masyarakat untuk melakukan kegiatan. Sanggar identik dengan kegiatan belajar pada suatu kelompok masyarakat yang mengembangkan suatu bidang tertentu termasuk seni tradisional.

4. Tari

Tari diciptakan dengan tujuan untuk dikomunikasikan kepada para penikmatnya, oleh karena itu, tari tidak hanya sekedar rangkaian gerak, tetapi mempunyai bentuk, wujud, kesatuan dan ciri khas. Bentuk dapat dikatakan sebagai organisasi dari kekuatan-kekuatan sebagai hasil dari struktur internal dari tari. Bentuk memberi satu keteraturan dan keutuhan dari tari (Widyastutieningrum dan Wahyudiarto, 2014:25).

Seni tari mempunyai peranan sebagai media ekspresi, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, dan juga media komunikasi. Tari mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan manfaat, seperti sebagai hiburan dan sarana komunikasi. Mengingat kedudukannya itu, tari dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sepanjang zaman sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusianya. Tari adalah bentuk gerak yang indah, lahir dari tubuh yang bergerak, berirama dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan tari (Jazuli, 2008:7).

5. Sanggar Tari

Salah satu pelestarian budaya terhadap bentuk karya seni khususnya bidang tari yaitu dengan didirikannya sanggar tari. Sanggar tari merupakan sarana yang digunakan suatu organisasi yang bergerak dibidang seni tari. Pendidikan di sanggar tari yaitu mempelajari tari-tarian yang sudah ada baik berupa tari klasik maupun tari kreasi. Dalam pengembangan tari selain menciptakan tari, sanggar tari juga mengembangkan bentuk-bentuk tari kreasi baru untuk melakukan suatu pertunjukan sebagai bukti keberadaan sanggar tari tersebut hidup di tengah masyarakat.

Landasan Teori

Pembangunan kota wisata terdapat beberapa peran masyarakat dalam melakukan pengembangan. Upaya pengembangan dilakukan untuk mengaplikasikan kearifan lokal masyarakat dari kearifan budaya serta kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Selain membangun dan mempertahankan kearifan lokal, masyarakat setempat akan mendapatkan dampak positif dari adanya pengembangan destinasi wisata dan dapat menarik masyarakat luar datang mengunjungi dan berwisata sehingga dapat menambah atau meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berangkat dari penjelasan berikut, maka penelitian ini menggunakan teori modal sosial yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu untuk membahas mengenai permasalahan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berjudul "Reproduksi Wisata Budaya Kreatif Kota Solo (Studi Fenomenologi Reproduksi Wisata Budaya Tari oleh Sanggar Soerya Sumirat di Surakarta)".

Teori praktek sosial dikembangkan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu merupakan ahli sosiologi yang menghubungkan ide teoritisnya dengan penelitian empiris dan didasarkan pada kehidupan sehari-hari (*sociology cultural*). Menurut Bourdieu dalam Fashri (2007), menganalisis praktik sosial aktor dapat dilihat melalui modal, habitus dan ranah yang mereka gunakan. Menurut Bourdieu habitus merupakan struktur mental yang mereka pahami melalui kehidupan sosial, pada dasarnya produk dari internalisasi struktur kehidupan sosialnya.

Modal bagi Bourdieu terdapat beberapa jenis modal yang dipertaruhkan dalam arena yakni modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Modal ekonomi mencakup hal-hal seperti alat-alat produksi, materi dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, modal budaya ialah yang termasuk dalam keseluruhan kualifikasi intelektual yang direproduksi secara formal maupun warisan keluarga. Modal sosial termanifestasikan melalui hubungan-hubungan dan jaringan yang terbentuk melalui ranah yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal simbolik mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi (Fashri, 2007:98-99).

Modal dan habitus akan dipertaruhkan dalam sebuah ranah yang merupakan arena kekuatan yang didalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan (Fashri, 2007:95). Dari ketigakomposisi tersebut, maka Bourdieu merumuskan bahwa $\text{Praktik} = (\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah}$, praktik sosial merupakan hasil produk dari relasi habitus sebagai produk sejarah, dan ranah yang juga merupakan produk dari sejarah. Di dalam ranah memiliki pertarungan yang mana kekuatan-kekuatan serta orang yang banyak memiliki modal, serta orang yang tidak memiliki modal, dalam hal ini modal merupakan sebuah konsentrasi dari kekuatan dimana kekuatan spesifik yang beroperasi dalam ranah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang lebih memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu suatu pengalaman yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu (Denzin dan Lincoln, 2009).

Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu (Iskandar, 2009).

Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan fenomenologis dimana peneliti melakukan pengamatan tentang fenomena apa saja yang peneliti lihat yang berkaitan dengan Sanggar Tari Soeryo Sumirat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak Trisno selaku Ketua Sanggar Tari Soeryo Soemirat, Bapak Sumardi selaku wali murid dari salah satu siswa sanggar, dan Ibu Endang selaku Kepala Sasi Pemanfaatan Ruang Kreatif Dinas Pariwisata.

Hasil dan Pembahasan

Di Kota Surakarta ada empat jenis aktor dalam ranah kesenian tradisional yaitu pelaku budaya, pengembang budaya, pelestari budaya, dan kritikus budaya. Even kesenian tradisional di sanggar tari Soerya Sumirat Mangkunegaran Surakarta sebagai praktik kesenian meliputi aktivitas intelektual artistik kelompok seniman tari dan karawitan.

Penyelenggaraan pentas kesenian tradisional ini juga dimaksudkan untuk pemeliharaan pengetahuan dan pemahaman tentang kesenian tradisional (tari dan karawitan) kepada masyarakat

luas. Hal ini juga yang menjadi salah satu misi dari sanggar tari Soerya Sumirat Mangkunegaran Surakarta untuk mengangkat kembali kesenian tradisional. Implementasi dari misi tersebut adalah menjalin kerja sama dengan beberapa kelompok seniman yang sebelumnya sudah aktif berkesenian, bersama-sama menyelenggarakan pentas kesenian tari dan karawitan. Penyelenggaraan kesenian tari tradisional di sanggar tari Soerya Sumirat Mangkunegaran Surakarta sebagai praktik kebudayaan merupakan hasil hubungan dialektis antara struktur obyektif dengan fenomena subyektif. Hubungan ini kemudian dijelaskan melalui konsep habitus, ranah, dan modal yang menghasilkan praktik reproduksi budaya.

Para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan even kesenian tari tersebut adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta bekerja sama dengan pihak sanggar tari Soerya Sumirat Mangkunegaran Surakarta. Sebelum terlibat dengan sanggar tari Soerya Sumirat Mangkunegaran Surakarta para aktor tersebut sudah memiliki habitus domestik sendiri. Habitus tersebut terbentuk melalui proses sejarah selama dalam ranah kesenian yang digeluti para aktor.

Habitus yang termanifestasikan pada individu tertentu diperoleh dalam proses sejarah individu dan merupakan fungsi dari titik temu dalam sejarah sosial tempat ia terjadi (Kleden, 2005). Para aktor kesenian tari tradisional memiliki habitus kesenian dan komitmen bersama untuk melestarikan budaya dalam hal ini kesenian tradisional tari melalui reproduksi budaya dalam pentas kesenian tari tradisional. Dalam praktik reproduksi budaya tersebut para aktor kesenian tari tradisional memiliki modal budaya, ekonomi, sosial, serta modal simbolik yang mencukupi untuk memperoleh akses tersendiri untuk memposisikan dirinya di sanggar tari Soerya Sumirat Mangkunegaran Surakarta sebagai arena bagi aktor kesenian tari tradisional.

Dalam proses reproduksi budaya tersebut modal menjadi konsep penting yang menunjang proses reproduksi. Bourdieu membagi modal tersebut menjadi empat macam, yaitu modal budaya, modal simbolik, modal sosial dan modal ekonomi. Modal merupakan logika yang mengatur perjuangan aktor dalam relasi kekuasaan di ranah (Harker Ed, 2009). Modal yang dimiliki para aktor kesenian tari tradisional di sanggar tari Soerya Sumirat Mangkunegaran Surakarta turut menentukan upaya reproduksi, menjadi faktor penunjang dan dapat pula menjadi penghambat upaya reproduksi.

Modal yang dimiliki aktor, modal budaya dan sosial mempunyai andil besar dalam mendukung reproduksi. Modal budaya yang dimiliki berupa pengetahuan seni dan budaya yang mencukupi. Modal sosial berupa jaringan sosial sudah terjalin dan dibangun kembali di ranah kesenian. Pihak yang terlibat dalam aktivitas kesenian ini melakukan perencanaan, pengorganisasian sebagai serangkaian proses reproduksi kesenian tradisional dengan pementasan sebagai pergerakannya. Mekanisme tersebut menjadi serangkaian proses reproduksi kesenian tradisional. Perencanaan meliputi rutinitas yang dilakukan kelompok kesenian. Kegiatan tersebut adalah latihan rutin yang diadakan setiap minggu.

Dinas pariwisata dan kebudayaan merupakan salah satu dinas yang terletak di Kota Surakarta dengan peran yang disandangnya sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan Kota Surakarta. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta memiliki peranan yang sangat besar terutama dalam pengembangan pariwisata dan kelestarian kebudayaan yang ada di Kota Surakarta. Seperti yang tercantum pada misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yaitu "Mewujudkan citra kota Surakarta sebagai kota budaya yang didukung oleh pelayanan jasa pariwisata, perdagangan, industri, yang bertumpu pada hasil kerajinan rakyat dalam tata perkotaan yang kondusif, merangsang kehidupan kreatif, produktif, dan mandiri", Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta berusaha mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota wisata yang bertumpu pada kekayaan budaya

yang melekat pada kota Surakarta dengan mengoptimalkan keunggulan lokal, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Masyarakat merupakan pelaku pengembangan pariwisata yang memiliki peranan yang sangat sentral, karena masyarakat sebagai tuan rumah (host) secara umum bersentuhan langsung dengan wisatawan yang berkunjung di Kota Surakarta seperti memberikan pelayanan jasa maupun menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta tidak akan berdiri sendiri untuk senantiasa mengembangkan pariwisata di kota Surakarta, tanpa kerjasama antar stakeholder yang ada yaitu masyarakat dan pihak swasta.

Selain menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membangun pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism). Diantaranya adalah gelar kreatifitas pelaku pariwisata. Gelar kreatifitas pelaku pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku wisata untuk mengembangkan kreatifitasnya. Hal tersebut menjadi salah satu aplikasi peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengakomodir kreatifitas pelaku wisata Kota Surakarta dalam bentuk pementasan, promosi wisata Kota Surakarta.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta yang selama ini terus gencar memaksimalkan kegiatan promosi dan pengembangan objek wisata agar lebih dikenal masyarakat. Diantaranya dilakukan melalui pengoptimalan gelaran event pertunjukan budaya tradisional khas Kota Surakarta secara kontinyu dan terjadwal.

Memanfaatkan kebudayaan lokal melalui kegiatan pariwisata budaya untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayahnya. Secara kontekstual hal ini sangat sesuai dengan konsep ekonomi kreatif yang ada dalam pengembangan ekonomi lokal, karena dalam konsep ini pengembangan ekonomi wilayah berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreatifitas sebagai kekayaan intelektual yang dapat dijadikan modal pembangunan.

Sanggar tari Soerya Sumirat Surakarta yang mewujudkan seni pertunjukan sebagai media dialog dan pembelajaran untuk merangsang kegairahan kreativitas komunitas seni dan masyarakat. Sanggar tari Soerya Sumirat mengolah proses-proses pembelajaran tentang seni dan menggunakan seni sebagai media, melalui presentasi karya seni pertunjukan, fasilitas pengembangan daya kerja kreatif seniman (artistik dan non artistik), serta merencanakan dan membangun program yang meningkatkan penyertaan aktif masyarakat bersama dengan masyarakat.

Kreasi seni yang ada di sanggar tari Soerya Sumirat Surakarta bervariasi hal ini dan merupakan aset budaya dan merupakan aset pariwisata di Surakarta yang cukup edukatif dan aplikatif yang ditunjukkan dengan seni pertunjukan yang membantu kunjungan pariwisata baik domestik maupun internasional. Strategi promosi yang lebih efektif dan mampu mengikuti persaingan yang cukup tinggi di dunia promosi. Kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai sumber utama dalam pengembangan promosi di sanggar tari Soerya Sumirat agar dapat eksis dan mampu menghadapi perkembangan budaya yang perubahannya cukup cepat.

Kreasi seni tentunya jangan sampai terkikis dan hilang adanya era globalisasi dan informasi yang cepat tentunya membawa perubahan berbagai aspek kebudayaan. Informasi sangat penting untuk melihat kebudayaan baik nasional maupun internasional sebagai tolak ukur agar ragam kegiatan seniman mampu menghasilkan karya-karya baru tanpa meninggalkan ciri khusus seni yang ada di sanggar tari Soerya Sumirat Surakarta.

Kesimpulan

Wisata kreatif merupakan wisata yang mengandalkan pengembangan aset budaya yang dihasilkan oleh kekayaan intelektual. Pariwisata kreatif ini dimulai dari kreatifitas, ketrampilan, dan bakat individual yang mempunyai potensi untuk menciptakan pekerjaan melalui intelektualitas. Wisata kreatif dibangkitkan oleh ide-ide yang terletak di persimpangan antara seni (kreativitas artistik), bisnis (*entrepreneurship*), dan teknologi (inovasi). Muara dari pariwisata kreatif adalah nilai-nilai ekonomi baru.

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan kota budaya yang dikenal hingga skala internasional. Berbagai event budaya telah digelar di Kota ini dengan keberhasilannya dalam mengundang kagum dan perhatian baik dari masyarakat Surakarta, masyarakat luar kota bahkan warga asing. Hal itu dikarenakan event-event tersebut sebagian besar berskala internasional, maka tak heran jika banyak wisatawan mancanegara yang menyempatkan diri menonton event tersebut.

Seni pertunjukan tari sebagai satu unsur kesenian memiliki peran yang sangat menonjol dalam konteks kegiatan kepariwisataan, bahkan sebenarnya telah menunjukkan posisinya sekaligus sebagai komponen daya tarik wisata. Era industri kepariwisataan secara tidak langsung membawa situasi dan kondisi yang positif bagi seni pertunjukan tradisional, serta memberi peluang bagi senimannya untuk berkreasi sebagai perwujudan partisipasinya. Seni pertunjukan tari dan Pariwisata merupakan dua kegiatan yang saling memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Seni pertunjukan dalam konteks industri pariwisata telah menjadi atraksi atau daya tarik wisata yang sangat penting dan menarik, khususnya apabila dikaitkan dengan kegiatan wisata budaya.

Peran Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Surakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat lebih dominan sebagai fasilitator dalam bentuk fisik. Sedangkan untuk non fisik kegiatan lebih terfokus pada sektor swasta, sehingga tidak adanya keseimbangan yang terjadi antara kemitraan yang dilakukan dengan swasta dan masyarakat. Peran sebagai implementor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta hanya menjalankan mandat maupun instruksi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum terlihat inovasi yang berarti bagi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Peran motivator masih minim dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta dan lebih dominan dilakukan terhadap pihak swasta sedangkan kepada masyarakat dilakukan secara insidental, begitu pula untuk peran dinamisor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta lebih banyak melakukan upaya dinamisasi terhadap pihak swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bidang pariwisata melalui usaha jasa pariwisata.

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Surakarta mencakup pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata (dinamisator). Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang sangat menunjang pertumbuhan industri pariwisata. Sarana dan prasarana dapat menjadi salah satu penunjang agar daya tarik wisata di kawasan ini diminati oleh wisatawan. Kemitraan (*partnership*) membangun hubungan penting antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Pengembangan potensi pariwisata pemerintah daerah dapat mengembangkan sebuah kerjasama atau bermitra dengan pihak lain, (swasta) dengan didasarkan sebuah pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

Reproduksi kebudayaan dilatarbelakangi oleh perubahan wilayah tempat tinggal, latar belakang sosial, latar belakang kebudayaan, yang pada akhirnya akan memberikan warna bagi identitas kelompok dan identitas kesukubangsaan. Tari mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan berbagai manfaat, seperti sebagai hiburan dan sarana komunikasi. Mengingat kedudukannya itu, tari dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sepanjang zaman sesuai

dengan perkembangan kebudayaan manusianya. Perkembangan maupun perubahan yang terjadi pada tari sangat ditentukan oleh kepentingan dan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Seni sebagai hasil kreativitas manusia merupakan proses simbolis untuk memaknai realitas. Dalam memaknai realitas, kreativitas seni sangat ditentukan oleh perubahan sosial dalam masyarakat. Kreativitas merupakan kemunculan ide baru secara terus menerus, sebagai hasil interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Seni pertunjukan tari tradisional Surakarta memiliki potensi besar sebagai wahana wisata edukasi-ekonomi dalam kancah industri kepariwisataan Surakarta. Sepanjang dikelola, dikemas, dan digarap secara serius, seni pertunjukan tradisional tari Surakarta adalah modal ekonomi kreatif yang berspektif cerah bagi kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan PedesaanPerkotaan*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Bisri, Moh Hasan, 2007, *Perkembangan Tari Ritual Menuju Tari Pseudoritual di Surakarta*, *Harmonia Journal Of Arts Research and Education*, Vol. 8, No. 1.
- Bousmpouras, Aggelos. 2018. *Perceiving patterns of ratios when they are converted from relative durations to melody and from cross rhythms to harmony Vol.8(1), pp. 1-12, January 2018*. Diambil dari: <http://www.academicjournals.org>. (02 September 2018).
- Bruce. 1965. *Dance and Dance Drama in Education*. Pergamon Press. Diambil dari: <http://www.sciencedirect.com>. (02 September 2018).
- Damayanti, Maya. 2015. *Strategi Kota Pekalongan Dalam Pengembangan Wisata Kreatif Berbasis Industri Batik*. *Jurnal Pengembangan Kota*, Vol. 3, No. 2, hal 100-111.
- DenzindanLincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Dermatoto, Argyo. 2013. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Surakarta: UNS Press
- Dermatoto, Argyo. 2014. *Habitus Pengembangan Pariwisata*. Surakarta: UNS Press
- Fandeli, Chafid. 2000. *PengusahaEkowisata*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Fashri, Fauzi. 2007. *PenyingkapanKuasaSimbol: ApropriasiReflektifPemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Hadi, Sumandiyo. 2005. *Sosiologi Tari*. Yogyakarta: Pustaka.
- Indriyanto, 2001, *Kebangkitan Tari Rakyat di Daerah Banyumas*, *Harmonia Journal Of Arts Research and Education*, Vol. 2, No. 2.
- Ingles, Palma. 2002. *Performing Traditional Dances for Modern Tourists in the Amazon Pages 143-159*, Oktober 2008. Diambil dari: <http://www.tandfonline.com>. (02 September 2018).
- Iskandar. 2009. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Jakarta: GaungPersada Press.
- Jazuli, Muhammad. 2008. *Paradigma Kontekstual Pendidikan Seni*. Surabaya: UNESA University Press.
- Karyono, Hari. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta: Grasindo.
- Khairuddin. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *MetodologiPenelitianKomunikasiFenomenologi*. Bandung:WidyaPadjajaran.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Liliweri, Alo. 2003. *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Marsam, Leonard D. 1983. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Utama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Ohridska-Olson, Rossitza., and Ivanov Stanislav. 2011. *Creative Tourism Business Model And Its Application In Bulgaria*. Bulgaria: Vizantia Enterprises.
- Pendit, Nyoman S. 2003. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PradnyaParamita.
- Pitana, I Gededan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pitana, I. Gededan Gayatri, Putu G. 2007. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pujiwiyana. 2010. *Pembinaan Paguyuban Seni Tradisional*. Yogyakarta: Elmatara.
- Prasetya, Tri Joko. 2011. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rakib, Muhammad. 2017. *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penunjang Daya Tarik Wisata*. *Jurnal Kepariwisataaan, Vol. 01, No. 02, hal. 54-69*.
- Rahmi, Siti Atika, 2016, *Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal, Jurnal Reformasi, Vol. 6, No. 1, hal. 76-84*.
- Ranjabar, Jacobus. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, Mohamad. 2012. *Perencanaandan Pengembangan Pariwisata*. Medan: Sofmedia.
- Rohidi. 2000. *Ekspresi Seni Orang Miskin*. Bandung: Nuansa.
- Sellers, Alethea. 1998. *The influence of dance music on the UK youth tourism market Vol. 19*, December 1998. Diambil dari: [http:// www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com). (02 September 2018).
- Sjarkawi. 2008. *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Spillane, James J. 2002. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, LintangPraharyaning; Astuti, Winny; dan Rahayu, Murtanti Jani. 2016. *Tingkat Kesiapan Komponen Wisata Kreatif Jayengan Kampoeng Permata Berdasarkan Stakeholder. Region, Vol. 1, No. 1, hal. 43-53*.
- Sutopo, Heribertus. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS. Press.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thornquist, Clemens. 2018. *The potential of dance: Reducing fashion consumption through movement therapy Vol. 183*, May 2018. Diambil dari: [http:// www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com). (02 September 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Widagdo, Djoko. 2001. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widyastutiningrum dan Wahyudiarto. 2014. *Pengantar Koreografi*. Surakarta: ISI Press Surakarta.
- Wilson, Bangun. 2008. *Intisari Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Wojowasito dan Poerwadarminta, WJS. 1980. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.

Wulandari, Lastiani Warih. 2014. *Pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif Desa Wisata Berbasis Budaya Sebagai Niche Market Destination(Studi Kasus Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sleman)*. Aplikasi Bisnis, Vol. 16, No. 9, hal. 2140-2167.

Yoeti, Oka Adlis. 2008. *PerencanaanPengembanganPariwisata*. Jakarta: PradayaParamita.

Literasi Masjid

(Studi Kasus Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta)

Ahmad Sugeng Riady, ahmadsugengriady@gmail.com

Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email:

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang literasi masjid. Pada umumnya, masjid hanya digunakan sebagai tempat beribadah. Segala sarana dan prasarana yang disediakan oleh takmir masjid kebanyakan hanya untuk mendukung sisi peribadatan. Akibatnya, ada sisi-sisi lain yang tidak dimaksimalkan dengan baik di dalam masjid, salah satunya sisi literasi. Menurut data dari Sistem Informasi Masjid milik Kementerian Agama Republik Indonesia, Provinsi Yogyakarta memiliki 7935 masjid yang tersebar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pengamatan penulis, dari 7935 masjid tersebut hanya sedikit masjid yang memaksimalkan sisi literasi. Salah satu masjid yang memaksimalkan sisi literasi yaitu Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Teori dari Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam buku *Setangkai Bunga Sosiologi* (1964) mengenai konsep kebudayaan yang berisi tentang produk dari karya, rasa, dan cipta masyarakat digunakan penulis, sebagai pisau analisis dalam studi kasus ini. Produk karya yang dimaksud berbentuk kebendaan, produk rasa berupa nilai-nilai yang hendak diwujudkan, sedangkan produk cipta berupa kemampuan mental dan berpikir. Namun dalam konteks ini, produk yang dimaksud merupakan hasil sisi literasi yang dimaksimalkan oleh takmir Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil studi kasus ini ditemui beragam upaya yang dilakukan oleh takmir masjid untuk memaksimalkan sisi literasi masjid. Mulai dari mengadakan kajian, membuat website, memproduksi buletin Jum'at, membuat perpustakaan, dan membentuk penerbitan masjid. Sisi literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta ini bertujuan untuk mewadahi jamaah yang berkeinginan untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama.

Kata kunci: budaya, literasi, masjid

Pendahuluan

Masjid sebagai tempat yang sering dikunjungi umat Islam pada umumnya hanya digunakan sebagai tempat beribadah. Sederhananya, masjid adalah tempat untuk orang-orang yang hendak bersembahyang (Gazalba, 1964: 112). Fasilitas yang disediakan pun juga hanya untuk mendukung sisi peribadatan. Sehingga banyak sisi-sisi lain dari masjid yang tidak tergarap secara maksimal.

Jika ditelisik dari sisi historis, masjid pada masa Nabi Muhammad ternyata tidak hanya sebagai tempat beribadah. Tapi juga digunakan untuk tempat berkumpul membicarakan problem umat. Semisal untuk membahas problem hukum, memupuk solidaritas, dan kesejahteraan umat Islam. Selain itu, juga digunakan untuk tempat pengajaran dan mengembangkan pemikiran umat Islam pada masa itu (Gazalba, 1964: 27-134).

Di Indonesia sendiri, Masjid Demak pada masa Kesultanan Demak bisa dijadikan contoh masjid yang tidak hanya bergerak pada sisi peribadatan. Karena pada masa itu, Masjid Demak juga mengakomodasi problem sosial disamping problem peribadatan (Handyant, 2010: 39). Namun pada era sekarang, jarang ditemukan ada masjid yang memperhatikan sisi lain selain peribadatan seperti halnya masjid pada masa lalu.

Data dari Sistem Informasi Masjid milik Kementerian Agama Republik Indonesia, di Provinsi Yogyakarta sendiri ada sekitar 7935 masjid yang tersebar di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Pada umumnya masjid-masjid tersebut hanya terkonsentrasi untuk memaksimalkan sisi peribadatan. Hanya beberapa masjid yang bergerak tidak hanya di sisi peribadatan, tapi juga sisi sosial, politik, kebudayaan, dan literasi. Salah satu masjid yang dimaksud adalah Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta.

Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta ini berbeda dengan masjid-masjid lain di Yogyakarta yang pernah penulis temui. Karena masjid ini ternyata juga bergerak di sisi literasi, selain sisi peribadatan seperti masjid pada umumnya. Melalui literasi, Masjid Jendral Sudirman ingin mengakomodasi siapa pun yang berkeinginan untuk mencari ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas perihal sisi literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Pembahasan akan penulis bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan disajikan konteks historis yang melatarbelakangi munculnya literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Sedangkan bagian kedua akan membahas produk-produk yang dihasilkan dari sisi literasi Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta.

Sedangkan teori yang penulis gunakan diambil dari gagasan Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam karyanya *Setangkai Bunga Sosiologi* (1964) perihal kebudayaan. Menurut beliau, kebudayaan merupakan semua hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Produk karya yang dimaksud berbentuk kebendaan, produk rasa berupa nilai-nilai yang hendak diwujudkan, sedangkan produk cipta berupa kemampuan mental dan berpikir. Dalam hal ini, konteksnya adalah literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta.

Kajian Pustaka

Ada beberapa riset terdahulu yang mengkaji Masjid Jendral Sudirman, diantaranya skripsi dari Meita Nur Pratiwi Iskandar tentang 'Manajemen Masjid Jendral Sudirman Demangan Baru Yogyakarta' (2014). Riset tersebut fokus dan membahas perihal fungsi manajemen Masjid Jendral Sudirman yang terbagi dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Riset ini menyimpulkan bahwa Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta telah menggunakan fungsi manajemennya dengan baik, meski pun masih cukup sederhana.

Selain itu, ada juga skripsi dari Sunarjo yang membahas tentang 'Peran Masjid Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta' (2016). Riset ini dilatarbelakangi dari masjid yang tidak apresiasi terhadap kehadiran budaya. Sampai-sampai budaya dianggap sebagai produk kafir. Sehingga peran masjid hanya fokus pada peribadatan, dan mengesampingkan budaya. Hasil riset ini menunjukkan bahwa Masjid Jendral Sudirman merupakan masjid yang mengapresiasi kebudayaan. Terbukti dengan adanya komunitas Kadang Muslim, Ngaji Serat Jawa Kuno, dan Ngaji Filsafat yang membahas gagasan tokoh nusantara.

Dari kedua riset tersebut, penulis belum menemukan ada yang membahas dan fokus pada sisi literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis rasa perlu untuk membahas topik ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa masjid juga layak digunakan sebagai tempat untuk berliterasi.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik yang memungkinkan peneliti untuk melihat langsung kejadian apa adanya yang ada di lapangan (Moleong, 2014: 174). Observasi

yang dilakukan penulis meliputi peninjauan langsung ke lokasi penelitian serta turut berpartisipasi dalam kegiatan literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta.

Sedangkan wawancara menurut Moleong merupakan percakapan yang memiliki tujuan tertentu (Moleong, 2014: 186). Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan bertemu narasumber secara langsung untuk menanyakan perihal literasi. Dalam konteks ini adalah pengurus atau takmir Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Dan terakhir dokumentasi untuk mempermudah penjelasan sekaligus sebagai bukti adanya literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Dokumentasi ini berbentuk foto yang diambil penulis sewaktu observasi maupun wawancara.

A. Sejarah Literasi Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta

Literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta mulai digarap secara serius pada tahun 2013. Saat itu pengurus takmir diketuai oleh M. Yasser Arafat. Setidaknya ada dua macam kegiatan yang menjadi awal kegiatan literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta, yakni kajian dan buletin.

Kajian di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta sebenarnya sudah ada sebelum tahun 2013. Namun bentuknya masih pengajian seperti pada umumnya. Sasarannya pun ditujukan kepada warga di sekitar masjid. Acara diselenggarakan setiap Jum'at malam Sabtu, dimulai sehabis sholat magrib dan diakhiri ketika masuk waktu sholat isya'. Konten yang disampaikan seputar ibadah umat Islam sehari-hari dan membahas problem-problem aktual di masyarakat.

Kemudian di tahun 2013, ranah kajian mulai diperluas melalui inisiasi dari kepengurusan takmir Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Menurut penuturan dari Ariq Nazar (Ketua Takmir Masjid Jendral Sudirman 2016 - sekarang. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 08 November & Sabtu 10 November 2018), kajian ini diadakan untuk mengisi kekosongan waktu takmir masjid di luar jam kuliah. Selain itu, pengurus takmir juga ingin membuat kegiatan yang berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya. Didukung dengan letak geografis yang cukup strategis, maka bukan hal yang sulit untuk mengadakan kegiatan semacam kajian yang menasar para mahasiswa-mahasiswi di Yogyakarta. Sebab letak Masjid Jendral Sudirman tidak terlalu jauh dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Maka muncullah kajian filsafat di tahun 2013.

Sedangkan buletin yang dimiliki oleh Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta sudah ada sejak tahun 2007. Nama buletin yang dipilih adalah Buletin Jendral Sudirman. Pada tahun-tahun awal lahirnya buletin ini, masih banyak problem yang harus dihadapi. Mulai dari bentuk konten, kekurangan personil untuk mengurus, dan distribusinya kemana juga belum jelas. Meski pun demikian, keberadaan buletin ini masih bisa bertahan dari gempuran persoalan.

Memasuki tahun 2013, buletin ini mulai digarap secara serius. Diawali dari penataan manajemen sampai persoalan kecil seperti *layout* sudah ditentukan. Buletin Jendral Sudirman sekarang bisa ditemui hampir di empat puluh masjid yang tersebar di Kota Yogyakarta dan sekitarnya di setiap Jum'atnya.

Kedua sebab itulah yang menjadi awal kemunculan literasi di Masjid Jendral Sudirman. Dari kajian dan buletin yang telah digagas pada tahun 2013, sekarang sudah berkembang dan merambah ke berbagai sisi lain dari literasi. Diantaranya kajian dan buletin itu sendiri, website, penerbitan, dan perpustakaan masjid.

B. Produk Literasi Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta

Produk literasi di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta sekarang sudah berkembang. Berdasarkan data dari observasi dan wawancara dengan Nur Wahid (Direktur Literasi Masjid Jendral Sudirman 2015 - sekarang. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu-Rabu, 03-07 November 2018), sisi

literasi Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta dilaksanakan oleh MJS Project. MJS Project merupakan komunitas yang beranggotakan para santri ngaji di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta.

E.1 Kajian

Kajian di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta sekarang sudah berkembang. Perkembangan yang dimaksud bisa dilihat dari banyaknya kajian dan konten yang beragam dari setiap kajian. Kajian bisa dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Kajian yang diselenggarakan setiap minggu sekali diantaranya ngaji filsafat yang diampu oleh Dr. Fahrudin Faiz setiap hari Rabu dimulai jam 20.00-22.00, serta ngaji setiap Selasa dan Jum'at yang dimulai sehabis sholat magrib dan diakhiri ketika memasuki waktu sholat isya'.

Kemudian setiap dua minggu sekali ada ngaji tasawuf yang diampu oleh Kyai Kuswaidi Syafi'i dengan kitab Tarjumanul al-Asywaq dan Rubaiyat Rumi, diselenggarakan di hari Kamis setelah sholat Isya sampai selesai. Biasanya diambil minggu pertama dan ketiga di setiap bulannya. Selain itu, ada juga yang per bulan diantaranya ngaji Al-Hikmah yang diampu oleh KH Imron Jamil, pasca-kolonial yang diampu oleh Katrin Bandel, dan studi Qur'an pendekatan materialisme-historis yang diampu oleh Muhammad al-Fayadl.

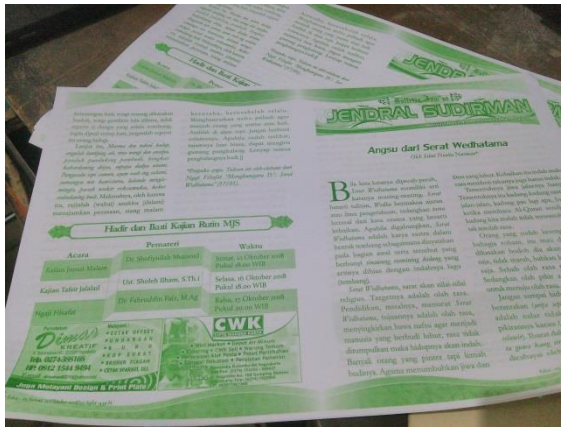


(Foto Ngaji Filsafat 14 November 2018)

E.2 Buletin

Buletin Jendral Sudirman yang terbit setiap Jum'atnya sekarang sudah mengalami kemajuan, minimal bisa dilihat dari aturan baku yang diterapkan pada Buletin Jendral Sudirman. Aturan baku tersebut diantaranya, isi tulisan menceritakan tentang Agama Islam yang dipahami oleh penulis di kesehariannya atau tulisan apapun yang memuat hikmah-hikmah, tulisan sebisa mungkin tidak memuat ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, tulisan sangat melarang bahasa-bahasa ilmiah yang sukar dimengerti oleh orang awam, tulisan minimal 1000 kata, dan tidak memuat unsur yang menyinggung SARA.

Buletin Jendral Sudirman juga sudah pernah dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk buku. Judul buku yang dimaksud yakni *Apa Kabar Islam Kita?; Esai-Esai Kaweruh Jumatan Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta (2014)* yang di editori oleh M. Yaser Arafat. Buku tersebut berisi tulisan-tulisan yang pernah dimuat di Buletin Jendral Sudirman melalui pemilahan dari tahun 2007-2013.



(Buletin Jendral Sudirman edisi 05, Jum'at, 12 Oktober 2018/03 Safar 1440 H)

E.3 Website

Website Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta ini mulai ada pada tahun 2016. Website ini difungsikan sebagai media untuk publikasi tulisan, rekaman, video, dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. 'mjscolombo.com' merupakan website yang dimaksud. Tujuan diadakannya website ini adalah untuk mengakomodasi permintaan teman yang tidak bisa berkunjung langsung ke Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta secara langsung. Selain itu, juga sebagai media distribusi gagasan literasi yang berbasis masjid.

E.4 Penerbitan

Penerbitan Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta, bisa dikatakan sebagai ciri khas dari masjid ini. Karena jarang sekali ada masjid yang memiliki penerbitan dan mampu memproduksi buku yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nama penerbitan Masjid Jendral Sudirman ini adalah MJS PRESS. Berdiri secara resmi pada Mei 2016. Sampai sekarang sudah menerbitkan lima buku. Buku-buku yang sudah diterbitkan berasal dari bahan ngaji di Masjid Jendral Sudirman. Dua buku yang telah terbit berasal dari pengampu ngaji filsafat, Dr. Fahrudin Faiz. Dan tiga buku lainnya berasal dari tulisan para santri ngaji di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta.

E.5 Perpustakaan

Perpustakaan Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta merupakan sisi literasi terbaru yang mulai digarap oleh pengurus masjid. Berdasarkan rapat bulanan sebelum Bulan Ramadhan, para pengurus berniat untuk mendirikan perpustakaan masjid. Fungsinya untuk menyediakan bahan bacaan bagi para mahasiswa dan anak-anak. Selain itu juga sebagai wadah buku-buku yang sudah tidak digunakan lagi dari para pengurus yang sudah lulus kuliah dan kembali ke kampung halaman. Perpustakaan ini juga menyediakan buku-buku terbitan dari MJS PRESS, baik untuk dijual maupun untuk dibaca di tempat.



(Perpustakaan Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta, gambar diambil pada tanggal 05 November 2018)

C. Budaya Literasi Masjid Jendral Sudirman

Literasi menurut *Education Development Center* (EDC) merupakan kemampuan manusia untuk menggunakan potensi yang dimiliki, dan tidak hanya sebatas membaca dan menulis. Dari definisi ini, literasi bisa juga meliputi kajian, pengadaan buku, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, literasi juga bisa membentuk nilai maupun norma pada manusia. Sebab potensi yang dimiliki oleh manusia tidak terbatas. Panca indera, pikiran, jiwa, tubuh, dan segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan manusia juga merupakan potensi.

Budaya literasi ini seringkali dipahami oleh masyarakat awam hanya berada pada dunia kampus dan sekolah. Membaca, menulis, perpustakaan, buku, dan kajian memang menjadi bagian dalam dunia kampus dan sekolah. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa budaya literasi juga dimiliki dan dikembangkan di tempat ibadah. Seperti yang telah diwujudkan oleh takmir Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta.

Selain itu, adanya budaya literasi yang semacam ini juga bisa menjadi filter bagi umat muslim. Karena banyak beredar kabar, baik di media sosial maupun media cetak bahwa masjid hari ini telah digunakan sebagai arena politik untuk menjatuhkan lawannya, untuk menjustifikasi mana aliran yang benar dan mana aliran yang salah. Oleh karena itu, budaya literasi ini perlu dan penting untuk ditumbuhkembangkan di masjid. Minimal sebagai respon dan upaya untuk memperkuat daya tahan umat muslim.

Melalui karya seperti buletin, perpustakaan, dan website diharapkan mampu merubah cara pandang umat muslim yang berkenaan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya, sampai peribadatan. Selain itu, kajian beragam yang diselenggarakan oleh takmir Masjid Jendral Sudirman juga memiliki orientasi untuk merubah mental dan cara berfikir umat muslim agar lebih baik. Terlebih lagi menuju kepada nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh umat muslim. Misalnya kejujuran, kerukunan, kesabaran, keshalehan, kedermawanan, dan sebagainya.

Dalam konteks budaya literasi Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta ini, karya, rasa, dan cipta saling berkaitan. Takmir masjid Jendral Sudirman Yogyakarta membuat produk karya melalui penerbitan berupa buku, buletin, website, dan perpustakaan yang bahannya didapat dari hasil kajian. Kesemuanya ini diselenggarakan untuk merubah mental dan cara berfikir umat muslim yang kurang baik agar lebih baik. Sehingga nilai-nilai keislaman bisa diwujudkan melalui produk karya tersebut.

Kesimpulan

Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta selain memaksimalkan fungsi peribadatan juga bergerak pada sisi literasi. Budaya literasi ini yang menjadi pembeda dengan masjid-masjid lainnya. Pada mulanya, literasi yang ada di masjid ini hanya dalam bentuk pengajian dan buletin. Pengajian yang diselenggarakan kurang bervariasi, begitu pun buletin yang dicetak belum ada ketentuan aturan yang pasti.

Namun sekarang, budaya literasi dari masjid ini sudah berkembang. Ada buku, buletin, website, perpustakaan yang menjadi produk karya yang diterbitkan dari MJS Press dari masjid ini. Produk karya ini memperoleh bahannya dari kajian untuk memperbaiki mental dan cara berfikir umat muslim. Lebih jauh lagi, untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman yang hari ini sudah bergeser.

Daftar Pustaka

- Arafat, M. Yaser(ed). 2014. Apa Kabar Islam Kita?; Esai-Esai Kaweruh Jumatan Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Yogyakarta: MJS Press
- Gazalba, Sidi. 1964. Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Antara
- Handyant, Aisyah Nur. 2010. Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat. Malang: UIN Maliki Press
- Iskandar. 2014. Manajemen Masjid Jendral Sudirman Demangan Baru Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Skripsi
- Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/7930/?provinsi_id=15
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Sunarjo. 2016. Peran Masjid Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Skripsi

Narasumber:

1. Nama : Ariq Nazar, S.Si
Umur : 25 tahun
Jabatan di masjid : Ketua Takmir Masjid Jendral Sudirman 2016- sekarang
Pekerjaan : mahasiswa S2 di UGM
2. Nama : Nur Wahid, S.Sos
Umur : 26 tahun
Jabatan di masjid : Direktur Literasi Masjid Jendral Sudirman 2015- sekarang
Pekerjaan : mahasiswa S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pergeseran Nilai Kebudayaan Jaranan Kediri

(Konstruksi Budaya Indang Jaranan Putra Ronggo Wijoyo Kota Kediri)

Ratih Himamatul Azizah Tannisyafolia, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Sosial, IAIN Kediri. Ratihlucu23@gmail.com:

Miya Nur 'Aida, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Sosial, IAIN Kediri. Miyanuraida23@gmail.com:

Azie Noreza, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Sosial, IAIN Kediri. Azienoreza12@gmail.com:

Abstrak

Tradisi indang dalam budaya jaranan sudah menjadi rahasia umum bagi para pemain dan penikmat kesenian jaranan. Kota Kediri, kesenian jaranan masih melekat di kehidupan masyarakat sebagai wujud pelestarian dan hiburan. Seiring perkembangan zaman, kini jaranan mengalami pergeseran nilai-nilai. Tidak lagi memanggil roh-roh halus, wanita dilibatkan dalam permainan jaranan, dan tanggapan orang modern sudah tidak melihat unsur mistis budaya jaranan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pergeseran nilai kebudayaan jaranan di kota Kediri. Penelitian ini menggunakan teori P. Berger mengenai Konstruksi sosial.

Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus Instrumental. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, dan keperpustakaan. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data manusia. Peneliti menggunakan sistem triangulasi metode dan sumber data. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan tidak hanya pemain laki-laki yang memainkan jaranan tetapi ada pemain jaranan wanita. Pencitraan budaya jaranan di masyarakat sangat eksis, di masa ini indang tidak dimasukkan dalam ritual kesenian jaranan. Peran yang dimainkan pemain jaranan tidak seperti yang terlihat, melainkan hanya aktor yang dilibatkan dalam skenario jaranan. Jaranan Putra Ronggo Wijoyo mampu menghasilkan kesenian jaranan modern dengan variasi berbeda. Jaranan ini termasuk salah satu dari beberapa jaranan di Kota Kediri yang memiliki penari jaranan wanita. Jaranan Putra Ronggo Wijoyo tidak sekedar kesakralan namun ada nilai estetika hiburan. Pemain diarahkan minum air yang telah di doakan, sehingga tidak ada ritual indang. Respon masyarakat memandang jaranan bukan sesuatu yang ditakuti namun hanya hiburan, wujud pelestarian budaya. Lahirlah persepsi masyarakat Kediri yang akan membawa pergeseran pemikiran tentang nilai-nilai yang ada pada jaranan.

Kata kunci : Budaya, Jaranan, Masyarakat, Pergeseran.

Pendahuluan

Menurut E.B. Taylor “budaya suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat”. Menurut Koentjaraningrat (2009:165) menegaskan “Budaya adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia. Setiap budaya didunia memiliki isi pokok yang meliputi tujuh unsur yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian”.

(Elizabeth:1996) Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan karena masyarakat sebagai wadah dan pendukung dari kebudayaan yang ada. Berbagai macam bentuk pola tingkah manusia dalam menjalankan kebudayaan, seperti halnya masyarakat Jawa yang mengenal berbagai macam kebudayaan. Jenis-jenis kesenian tradisional yang berkembang di dalam

kehidupan bermasyarakat, merupakan kesenian yang sejak nenek moyang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

Jaranan salah satu unsur kebudayaan Jawa dan Indonesia yang mengandung nilai etis dan estetika yang sangat berharga. Jaranan suatu tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Menurut Sugiarto (1990:30) “Keberadaan seni Jawa yang didukung oleh masyarakat Jawa yang masih mempunyai keyakinan dua berlatar belakang pada konsep etis, sabar, dan sareh yang mengandung makna bahwa segala sesuatu dilakukan tidak tergesa-gesa, tetapi pasti terselesaikan”. Konsep nilai yang etis dan estetika tarian ini dapat terlihat saat ritme gerakannya, yaitu agak terlambat melangkah, menampakkan kaki pada lantai yang pada umumnya dilakukan setelah jatuh dan hitungan genap. Pertunjukan jaranan juga mempunyai nilai-nilai seperti mistisme, pemanggilan roh halus, dan ritual upacara sakral. Mencermati kata ritual berarti telah dikenal dengan suasana magis dalam melaksanakan pertunjukan.

Pada perkembangannya, pertunjukan jaranan mulai mengalami pergeseran yang lebih cenderung pada budaya modern mengutamakan unsur praktisnya, maka hal ini juga berdampak dengan kesenian jaranan di daerah Kediri. Terbukti bahwa nilai-nilai ritualitas dalam kesenian jaranan telah mengalami pergeseran sehingga nilai-nilai tersebut sudah tidak nampak. Sekarang kesenian jaranan tidak ada unsur mistisme dimana sudah tak ada ritual pemanggilan roh halus dan hanya sebagai pertunjukan untuk melestarikan budaya. Jaranan sekarang juga muncul banyak variasi dengan adanya tari kepangan, tari seterewe, dan tari celengan.

Kajian Pustaka

Peran Dan Fungsi Paguyuban Jaranan Wahyu Kridha Budhaya Di Kota Kediri Jawa Timur, fungsi manajerial paguyuban yang membawahi induk jaranan di Kota Kediri, Hasil Penelitian Pengorganisasian, Perencanaan, Pengarahan, Pengendalian Jaranan Di Kota Kediri, Teori yang digunakan Fungsionalisme Struktural Oleh Robert K Merton, Peneliti Nisa’u Fadilah

Metodologi Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan jenis data kualitatif. Penelitian menggunakan metode lapangan studi kasus instrumental kejadian atau peristiwa, bisa sangat sederhana bisa pula kompleks. Karenanya, peneliti memilih salah satu saja yang benar-benar spesifik. Peristiwanya itu sendiri tergolong “unik”. “Unik” artinya hanya terjadi di situs atau lokasi tertentu. Dengan prioritas objek yang bersumber pada kehidupan masyarakat, menggunakan dua metode yakni pengumpulan data lapangan dan data pustaka. Penelitian dilakukan di Jaranan Putra Ronggo Wijoyo karena memiliki ke khasan yang berbeda dengan jaranan lainnya yakni dengan adanya jaranan perempuan dan sudah tidak memakai indang. Informan yakni Bopo Sutris selaku pendiri Jaranan Putra Ronggo Wijoyo, Tyas selaku pemain dan pelatih jaranan perempuan, Ibu Jumiati selaku pengelola *suguhan*, serta Masyarakat penikmat jaranan. Studi kepustakaan melalui sumber sejarah jaranan. Teknik analisis data menggunakan triangulasi metode dan sumber data dari paparan data yang di dapat dari narasumber dan pengamatan peneliti serta mengambil kesimpulan dari data.

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Jaranan Kediri

Jaranan merupakan kesenian khas Kediri, jaranan muncul pada tahun 1401. Kerajaan Kediri memiliki raja bernama Raja Airlangga memiliki putri yang sangat cantik dan putra yang sangat tampan dan trengginas yang bernama Tubagus Putut. Kecantikan putrinya terkenal di seluruh jagad yaitu Dewi Songgolangit, banyak raja yang ingin melamar, seperti Prabu Kelana Suwandana dari kerajaan Bantarangin dengan patihnya pujangga Anom dan Prabu Singo Barong dari lodoyo dengan patihnya singo kumbang.

Tubagus Putut meninggalkan kerajaan, ia berkelana dan mengabdikan diri di Kerajaan Bantarangin, ia diangkat menjadi Patih Pujangga Anom. Raja Kelana Suwandana mendengar kecantikan Dewi Songgolangit, ia berniat untuk melamar dengan mengutus Patih Pujangga Anom untuk menyampaikan lamaran kepada Dewi Songgolangit di Kediri, agar tidak diketahui oleh ayahnya dan kakaknya maka Patih Pujangga Anom memakai topeng di wajahnya, namun Dewi Songgolangit mengetahui bahwa Pujangga Anom adalah adiknya sendiri dan langsung memberitahu pada ayahnya, dengan sikap marah yang berfikir bahwa Dewi Songgolangit dilamar oleh saudaranya sendiri, maka keluarlah sabda atau sumpah raja Airlangga kepada Pujangga Anom bahwa topeng yang dipakai itu selamanya akan melekat pada wajahnya.

Melihat kejadian itu Dewi Songgolangit langsung mengadakan sayembara siapa yang dapat membuat pertunjukan seni yang belum ada di Kediri dan dapat meramaikan jagad maka pemenangnya akan menikah dengan Dewi Songgolangit, sejak saat itu Patih Pujangga Anom langsung memberitahukan kepada Rajanya Kelana Suwandana.

Prabu Kelana Suwandana dan Patih Pujangga Anom bertapa, ia mendapatkan wangsit berupa batang bambu, lempengan besi dan pecut Samandiman, Prabu Kelana Suwandana berfikir bagaimana mengolah barang tersebut untuk dijadikan seni, batang bambu digunakan untuk kuda kepeng dan lempengan besi digunakan untuk bunyi tetabuhan dan jika dimainkan akan meramaikan jagad. Dari sini Prabu Kelana Suwandana mampu memenuhi syarat yang diajukan oleh Dewi Songgolangit, dengan diiringi empat prajurit penunggang kuda dari Bantarangin menuju Kediri dan musik tetabuhan serta perlatan kesenian yang digunakan dalam pertunjukan yang akan digelar di kerajaan Kediri, disisi lain Raja Singo Barong dengan marah merasa kedahuluan oleh Raja Kelana Suwandana maka terjadilah perang antara Prabu Kelana Suwandana dan Singo Barong namun berkat Pecut Samandiman Singo Barong berhasil ditaklukkan. Dan bersedia menjadi pelengkap dari pertunjukan tari jaran tersebut. Dengan bergabungnya Singo Barong atau reog dan patihnya Singo Kumbang atau celeng maka lengkaplah anggota tari jaranan tersebut. Dan akhirnya Dewi Songgolangit pun diboyong ke kerajaan Bantarangin.

Dimana sejatinya bambu yang digunakan sebagai kuda kepeng adalah melambang prajurit kerajaan yang mengawal Rajanya, Singo Barong yang kalah dalam peperangan melawan Kelana Suwandana sekarang menjelma sebagai Reog, patihnya Singo Kumbang menjelma sebagai celeng dalam tari jaranan, dan patih Pujangga Anom menjelma sebagai Ganongan atau biasa disebut pentul dalam tari jaranan.

B. Pergeseran Jaranan Dan Variasi Jaranan Putra Ronggo Wijoyo

Menurut Sztompka (2004:67) Dalam arti sempit tradisi ialah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi pun akan mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu jika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Sedangkan cara kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

Tradisi indang dalam budaya jaranan dahulu sangat sakral dan dipakai dalam segala pementasan jaranan. Indang adalah ritual atau *sesembahan* untuk pemanggilan roh-roh halus. Fungsi indang sendiri ialah untuk memasukkan arwah roh-roh halus ke tubuh pemain jaranan dengan hasil

mereka *Ndadi (trance)*. Dengan kemasukan arwah yang telah diundang pemain bisa melakukan hal-hal yang mungkin diluar nalar manusia. Pemanggilan arwah sesuai dengan yang akan ditampilkan oleh pemain jaranan.

Jaranan merupakan kesenian Khas di kota Kediri. Menurut walikota Kediri abubakar (antara news jawa timur:2016) budaya jawa merupakan salah satu budaya nasional yang tinggi nilai sosialnya, penuh dengan ajaran tentang menjalani kehidupan, memiliki jati diri, dan jaranan merupakan bagian dari kesenian khas kediri. Kesenian jaranan adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah Negara, termasuk kesenian jaranan tersebut. Kesenian jaranan merupakan bagian dari budaya nasional yang selalu membawa pesan. Nurmuhyar (antaranews jawatimur:2016) mengatakan perkembangan kesenian jaranan semakin lama menunjukkan perkembangan yang positif. Saat ini di Kota Kediri kesenian jaranan memiliki paguyuban yang membawahi 120 kelompok jaranan. Pemerintah Kota Kediri juga memerhatikan kesenian jaranan salah satunya mengadakan pagelaran, tari 1000 barong, tari 1000 topeng panji, kirab budaya, tari kolosal 1000 jaranan dan tari festival lainnya. Selain itu pemerintah juga meminta terus adanya regenerasi agar kesenian ini bisa dilestarikan. Jaranan Kediri tentunya memiliki ciri khas sendiri akan tetapi tidak berkuat pada ciri khas itu dan memberikan kebebasan bagi pemain seni untuk terus berkolaborasi dan lebih kreatif mengembangkan kesenian jaranan. Sebagai bentuk dari identitas kota Kediri pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian jaranan sesuai variasi jaranan namun tidak keluar dari kisah jaranan. Tarian jaranan diambil dari kisah Prabu Kelana Sewandana yang akan melamar Dewi Songgo Langit. Dalam kisah pelamaran ada Syarat untuk melamar, yakni membuat kesenian yang belum ada di Kediri dan meramaikan Jagad, maka terciptalah jaranan kesenian khas Kediri. Jaranan asli Kediri atau bisa disebut *kediren* masih memunculkan nilai-nilai mistis dan tradisi indang yang masih melekat di dalam permainan jaranan.

a. Jaranan Jowo (Jaranan kediren)

Jaranan Jowo memiliki karakteristik yang sederhana, baik peralatan maupun busananya. Jaranan jowo terkenal dengan adanya unsur magis/mistis dalam tariannya. Pada puncak pertunjukan, penari akan mengalami *Trance (ndadi* dalam bahasa jawa) atau kerasukan roh halus sehingga membuat penari melakukan atraksi yang menegangkan.

Prosesi pertunjukan jaranan jowo dalam indang atau pemanggilan roh halus masih menggunakan tradisi. *Sajen* atau sesaji disiapkan sebelum acara dimulai untuk persembahan, pemanggilan, dan makan roh halus. Jogetan dalam Jaranan jowo asli Kediri mengisahkan prosesi iring-iringan prajurit Prabu Kelana Sewandana melamar Dewi Songgolangit. Pakaian khas yang digunakan yakni celana kolor hitam, sarung penutup celana, tidak memakai makeup, dan memakai udeng. Pemain jaranan harus laki-laki umur 45 tahun. Indang atau pemanggilan roh-roh halus benar-benar di praktikkan, dan *Ndadi(Trance)* benar-benar ada karena setiap pemain mempunyai *cekelan/media* yang membuat dia bisa kemasukan roh halus. Jaranan Jowo merupakan kesenian Jaranan yang mengandung unsur magis dalam tariannya. Dimana pada puncaknya penari akan mengalami *Ndadi(trance)* dan melakukan aksi berbahaya yang terkadang di luar akal manusia. Alat peraga yang digunakan hanyalah Jaran kepang berukuran besar. Setiap alat dan pemain yang digunakan dalam permainan dimasuki roh-roh halus. Roh-roh halus sudah dipilih oleh *bopo* atau tetua jaranan dan memiliki kemampuan masing-masing. Ada yang memakan kaca, ada yang makan *kembang setaman* atau bunga khas jawa yang digunakan untuk menghormati orang yang sudah mati.

b. Jaranan variasi Putra Ronggo Wijoyo

Prosesi permainan jaranan yakni, *suguhan* atau meminta izin kepada sesepuh, *gladen* atau prosesi permainan jaranan, *kondangan* atau bersyukur. *Suguhan* disini memiliki makna yang berbeda dari *suguhan* yang dilakukan pada jaranan jowo. *Suguhan* memiliki makna meminta izin

kepada sesepuh desa untuk melaksanakan acara disana. Dipimpin oleh sesepuh desa dan *bopo jaranan*. Dilakukan sebelum permainan jaranan dimulai agar diberi keselamatan dari awal sampai akhir acara. Perlengkapan dalam *suguhan* meliputi Suguhan Ayam ingkung, Ayam angkrem hidup, Pisang raja setangkep, Cok bakal (nasi, telur, kembang komplit) ditaruh di tempat sajen (seperti orang nikahan biasanya ditaruh di tempat-tempat yang dianggap keramat), Kembang setaman (ditaruh di bokor dan dikasih air), Kembang boreh (mawar, melati, kenanga, kuning), Kembang telon (mawar, kenanga, kantil) 2 bungkus, bungkus yang pertama dikasih di bokor dan diberi air dan disajikan dengan kopi pahit panas, tembakau, sirih, rokok klobot, minyak fambo, Kembang wangi (mawar, melati, kenanga, minyak wangi, Rujak legi, Dawet, Kopi pahit, badeg atau ketan hitam yang telah di fermentasi). Saat pementasan siang dan malam harus ada pergantian, Kelapa gading, Kemenyan atau dupa.

Prosesi permainan jaranan memakai pakaian seni jaranan keindahan tata rias terdapat dalam ketebalan dan warna mencolok dalam pemakaian riasan, sehingga memunculkan karakter penari jaranan. Pemakaian pensil alis mengandung makna kegagahan. Pemerah pipi bermakna keindahan dan kerapian seorang prajurit. Penambahan godeg dengan pensil hitam mengandung maksud untuk menambah ketampanan kegagahan. Adapun keindahan pada celana, artinya ketelitian seorang prajurit dalam bertindak. Keindahan pada jarik, stagen dan sumpur aksesoris seperti gelang kaki, gelang tangan, klat lengan, kalung, dan ikat kepala, yang berarti menggambarkan kewibawaan dan kegagahan seorang ksatria atau prajurit. Keindahan properti kuda kepong baik ditunggangi maupun digerakkan. Simbol kuda menggambarkan suatu sifat keperkasaan yang penuh semangat, pantang menyerah, berani dan selalu siap dalam kondisi serta keadaan apapun.

Jogetan jaranan Gladen

Siang :

1. jaranan jowo : Tidak memakai makeup, memakai celana kolor hitam, sarung penutup celana. Namun disini sudah tidak ada unsur ndadi hanya sandiwara karena para pemain sudah tidak ada yang mempunyai media masuk roh halus. Saat ini dimainkan oleh orang paruh baya usia 30 tahun. Menggunakan kuda kepong ukuran besar.
2. Jaranan cilik cilik : Gerakan sesuai kreativitas sanggar jaranan dan penari jaranan. Dimainkan anak usia 8 sampai 12 tahun. Gerakan mengikuti alunan gamelan yang dimainkan.
3. Rampak barong : dimainkan oleh pemuda laki-laki dengan adegan merampok barongan atau mencuri singo barong. Dengan gerakan dan music yang sudah di modifikasi.

Malam :

1. Senterewe : Kreativitas penari dilakukan oleh perempuan usia 15 sampai 25 tahun, 6 sampai 8 pemain. Permainan Mengikuti alunan musik gamelan yang dimainkan.
2. Kepang biasa : Dilakukan oleh 6 pemain putri mengikuti alunan musik. Adegan hanya menari kepong jaran biasa.
3. Perang celeng: dilakukan oleh 6 pemain kepong dan 2 celeng laki-laki 1 celeng perempuan. Adegan memerankan kisah celeng yang dimiliki oleh singo barong yang berperang dengan kepong jaran milik prabu kalasewandono. Di jaranan putra ronggo wijoyo menggunakan pemain campuran laki-laki dan perempuan.
4. Ganongan : 1 pentulan, 1 kucing, 1 ketek/monyet. Mengisahkan seperti rampok barong diatas dimainkan oleh pemain laki-laki. Sebagai acara penutupan, mengisahkan bagaimana patih pujangganong memakai pentulan dan menari diikuti ketek dan kucing.

Irangan musik dalam jaranan seperti penabuh gamelan terdiri dari laki-laki yang memakai pakaian serba hitam dan celana sebatas lutut. Keindahan instrumen alat musik tradisional (angklung, kendhang, gong) dibunyikan atau dimainkan secara bersama-sama dapat menimbulkan perpaduan alunan musik yang indah, jika dinikmati dengan indera pendengar. Keindahan syair atau lagu, syair yang digunakan pada pertunjukan adalah lagu-lagu Jawa yang indah dan mengandung nilai sastra yang luhur dan tinggi. Proses terakhir yang dilakukan ialah kondangan bersama serta makan bersama ingkung dan cok bakal yang di suguhkan pada awal acara.

Pergeseran yang terlihat yakni dalam prosesi pementasan jaranan putra ronggo wojoyo tidak menggunakan unsur magis atau memanggil roh-roh halus, namun hanya menghormatinya. Disetiap gerakan ada unsur Ndadi (trance) akan tetapi indang tidak ada. Sebelum permainan dimulai setiap pemain dibagikan peran masing-masing. Ada yang bertugas ndadi dan ada yang tidak begitupun ndadi juga sesuai dengan kreativitas penari sendiri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bopo jaranan pun memberikan air putih yang di doakan saat suguhan dilakukan agar diberi keselamatan saat ndadi. Begitupun dengan campur tangan wanita dalam tarian merupakan pergeseran yang sangat jelas, hakikat wanita dahulu hanya diam dirumah sekarang sudah bisa berinovasi dan mengekspresikan bakat mereka dalam tarian jaranan. Setiap peguyuban jaranan memiliki variasi tersendiri dan menjadi identitas bagi paguyuban jaranan tersebut. Begitupun dengan jaranan putra ronggo wijoyo yang khas dengan jaranan perempuan dan esensi keindahan jaranan.

C. Konstruk Sosial Terhadap Masyarakat Mengenai Pergeseran Nilai Budaya Jaranan

Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan karena masyarakat sebagai wadah dan pendukung dari kebudayaan yang ada. Seiring dengan perkembangan jaman struktur dalam perkembangan budaya jaranan ini telah mempengaruhi terhadap masyarakat. Menurut Teori Konstruk Sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger bahwa Konstruk Sosial terjadi melalui beberapa tahap yaitu adanya Internalisasi, Eksternalisasi dan Obyektifikasi. Dari teori Konstruk Sosial ini mencoba mengkaitkan dengan penilaian masyarakat terhadap budaya jaranan yang sekarang.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa masyarakat telah mempercayai adanya pergeseran. Nilai pergeseran jaranan yang sekarang sudah tidak ada unsur magis, hanya sebagai sandiwara (*ndadi*) dan sebagai pertunjukan seni semata. Konstruk Sosial ini terjadi karena ada tiga tahap yaitu Internalisasi, dimana masyarakat ini mendapat pengaruh dari pemain jaranan dengan cara pemain jaranan mempengaruhi masyarakat bahwa jaranan bukan sesuatu yang magis lagi namun hanya sandiwara saja. Eksternalisasi, Masyarakat mulai mempercayai terhadap apa yang dikatakan oleh pemain, kemudian masyarakat mulai terpengaruhi oleh perkataan pemain jaranan dan memberanikan diri menonton jaranan untuk mencari kepastian bahwa benarkah jaranan sudah tidak ada unsur magis, karena kebanyakan masyarakat mengetahui bahwa jaranan ada unsur magis ternyata hanya sandiwara. Obyektifikasi, Masyarakat mulai terkonstruk dan meyakini bahwa pergeseran nilai-nilai ini benar terjadi dalam pertunjukan jaranan sekarang. Akibat dari adanya pergeseran ini masyarakat yang awalnya takut terhadap kesenian jaranan saat adanya adegan *ndadi/ trance*, sekarang sudah ada keberanian untuk menonton, dan konstruk baru tersebut diyakini serta merubah pemikiran masyarakat luas bahwa jaranan hanya sebatas seni.

Kesimpulan

Jaranan adalah kesenian khas kota Kediri yang berasal dari kisah prabu kelana sewandana dan Dewi Songgolangit dimana sejatinya dalam kesenian ini bambu yang digunakan sebagai kuda kepang adalah melambang prajurit kerajaan yang mengawal Rajanya, Singo barong yang kalah dalam peperangan melawan Kelana Suwanadana sekarang menjelma sebagai Reog, patihnya Singo kumbang menjelma sebagai celeng dalam tari jaranan, dan patih Pujanngga Anom menjelma sebagai Ganongan atau biasa disebut pentul dalam tari jaranan. Seiring perkembangan zaman, ritual indang dalam jaranan tidak lagi eksis seperti dahulu, dimana sekarang pemain jaranan hanya sebagaia aktor dalam

skenario. Dengan ini masyarakat mulai mengetahui bahwa kesenian jaranan yang dulunya dianggap mistis sekarang hanya sebagai hiburan belaka.

Referensi

Maryaeni. 2005. Metode Penelitian Kebudayaan. Jakarta: PT Bumi Aksara

Nottingham, Elizabeth. 1996. Agama Dan Masyarakat. Jakarta: PT Raja Grafindo persada

Sztompka, Piotr. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta : Prenada Media Group

Poloma, Margaret. 2010. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Ratna, Kutha Nyoman. 2010. Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Koentjaraningrat. 1990. Sejarah Teori Antropologi. Jakarta : Universitas Indonesia UI Press

Kehampaan Spiritualitas dan Ekonomi Komunitas :
Ekspresi Perubahan Sosial-Budaya di Komunitas Perempuan Muslim Jogokariyan,
Yogyakarta

Ahmad Arrozy, Pasca Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. E-Mail:

ahmadmj_arrozy@student.uns.ac.id

Mahendra Wijaya, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. E-Mail:

wijayamahendra60@gmail.com

Drajat Tri Kartono, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. E-Mail:

uns.drajat@gmail.com

Abstrak

Terminologi kehampaan spiritual dan ekonomi komunitas merupakan temuan empirik pada tindakan sosial komunitas perempuan muslim yang memiliki gerakan sosial keberlanjutan (*sustainability*) pada ranah kampung-kota Yogyakarta. Kehampaan spiritual didasarkan pada tindakan ketergantungan keteladanan terhadap suatu figur publik, sedangkan ekonomi komunitas berdasarkan pada tindakan sosial yang mempertukarkan (*exchange*) jasa, edukasi maupun distribusi produksi kelas muslim urban. Dalam artikel ini berusaha melakukan investigasi perubahan sosial-budaya dalam komunitas perempuan muslimah. Riset ini menggunakan metode riwayat sejarah (*life-history*) berupa dokumentasi sejarah, observasi, dan hasil wawancara. Output utama dari artikel ini adalah pengamatan perubahan sosial-budaya dari pendekatan teori sosiologi klasik Max Weber dan Norbert Elias. Status dan aspek prestisius berupa penempuhan sekolah teladan, pendidikan tinggi dan penyelenggaraan acara-acara gathering hijabers sekaligus agama hanya menjadi etos panggilan spirit untuk berusaha menghasilkan modal dan profit. Sedangkan dalam perspektif Elias menyatakan bahwa pengekan diri sendiri (*self-restraint*) secara komunal merupakan pewarisan moral (*moral legacy*) yang diwujudkan melalui penampilan busana muslimah dan tata krama (*manners*) komunitas. Hal ini mengungkapkan suatu tata peringatan etiket bekerja pada moral komunitas. Dari kajian ini menunjukkan bahwa komunitas perempuan muslimah di Kampung Jogokariyan mengalami proses homogen dalam moralitas publik pada lingkup pluralitas masyarakat kota Yogyakarta.

Kata Kunci: *komunitas, perempuan muslimah, perubahan sosial-budaya*

Pendahuluan

Dalam sejarah kota-kota di Jawa, akulturasi menjadi pertautan hubungan antar kelompok kebudayaan. Hal ini terjadi pada wilayah swapraja yang diatur oleh pemerintah koloni Hindia Belanda termasuk jaringan Kota Surakarta dengan Kota Yogyakarta pasca perjanjian Giyanti (1755). Dari pertautan tersebut menimbulkan pluralitas penduduk yang tidak dapat dipungkiri adanya interaksi komunal antar berbagai jenis perbedaan profesi, kesukuan, dan kepercayaan yang mewarisi generasi dan menetap di kampung-kota (Margana, 2010).

Pluralitas Kota Yogyakarta berdasarkan akulturasi budaya masyarakat Yogyakarta yang berasal dari Jawa, Bugis, Madura, Tionghoa, dan strata agama. Di antara pluralitas yang disepakati secara universal terdapat partikularitas berupa komunitas-komunitas yang menyokong komposisi corak plural suatu masyarakat Kota Yogyakarta.

Dalam berbagai kampung tersebut terkadang memiliki eksisting ruang peribadatan seperti langgar, masjid kampung, gereja kristen Jawa dan pura di mana menjadi rumah ibadah bagi tiap-tiap pemeluk agama. Akan tetapi dalam perubahan sejarahnya terdapat perluasan gerak dari inisiatif

kelompok pemeluk sehingga menimbulkan komunitas agama berbasis rumah ibadah. Dalam hal ini komunitas masjid kampung yang berasal dari Jogokariyan.

Dalam komunitas masjid kampung Jogokariyan telah ada komunitas muslimah yang berdiri selama 13 tahun, dan dimulai sejak tahun 2002. Bagi komunitas masjid kampung, pembentukan komunitas muslimah sangat penting karena berperan dalam mendidik anak-anak dan keluarga. Komunitas muslimah ini membuka kesempatan bagi muslimah lain dari warga kampung setempat untuk bergabung dalam forum muslimah. Komunitas muslimah ini disebut *Ummi-ummi muda masjid Jogokariyan* atau disingkat Ummida. Kata “ ummi “ berasal dari bahasa Arab yang berarti ibu atau bunda.

Gerakan komunitas Ummida yaitu melakukan tata laksana kepengurusan dari periode setahun. Lalu dari salah satu bagian pengurus Ummida yaitu menerbitkan buletin untuk melakukan penyiaran perempuan dalam Islam. Kemudian mengadakan forum yang disebut *majelis muslimah* , di mana merupakan kajian rutin tiap hari Ahad (Minggu). Kajian ini dapat berupa ceramah dan peningkatan manajemen diri (*upgrading*) yang bertema hubungan suami istri dalam mendidik anak dan membangun rumah tangga. Kajian ini memiliki beberapa mentor dalam bidang agama yaitu Ustadzah Dini Istianah, Ibu Indra Welly, dan Ustadz Salim Afillah (Bulif-Jogokariyan, 2015). Dalam kolom muslimah, komunitas ini menggaungkan moral bagi diri sendiri seperti menjaga kehormatan diri (*iffah*) serta berbagi ilmu dengan saudaranya. Bagi komunitas Ummida, tindakan penegakan hukum agama Islam lebih penting daripada terus menerus menyuarakan gerakan emansipasi wanita atau feminisme zaman modern (Bulif-Jogokariyan, 2015). Maka dari itu, riset ini berusaha menguji pernyataan komunitas dengan realitas historis-sosiologis di lapangan beserta rekam jeaknya dalam sejarah. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah bagi penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana ekspresi perubahan sosial-budaya dalam komunitas muslimah Jogokariyan ? Bagaimana preferensi kolektif agenda komunitas ini dalam ekspresi budaya muslim urban ?

Kajian Pustaka

Subjek yang akan diteliti yaitu berupa suatu komunitas keagamaan. Definisi komunitas dalam kajian sosiologi ini berupa kelompok persaudaraan berbasis keagamaan yang mempunyai ritual tahunan (Burke,2001 : 83). Fokus kajian sosiologi-sejarah berupa perubahan sosial berupa struktur masyarakat, sedangkan perubahan budaya meliputi beberapa identifikasi sebagai berikut : 1. Akulturasi penggunaan perubahan bahasa antara bahasa Jawa, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Akulturasi dapat dilacak kembali melalui idiom dan kosakata bahasa keseharian. 2. Perubahan pada ekspresi-simbolik tindakan manusia, penampilan atau makna bersama (*shared meaning*) yang mempengaruhi praktik kehidupan sehari-hari (Burke, 2001 : 178). 3. Perubahan praktik bersama berupa ritual atau hal-hal seremonial, pagelaran, dan acara peringatan (*memorial*) yang dimaknai suatu komunitas, termasuk bagaimana memperlakukan bahan-bahan materi dan kelompok-kelompok dalam praktik bersama tersebut. 4. Perubahan cara memperlakukan atau menghasilkan materi juga termasuk dalam perspektif budaya ekonomi (Wijaya, 2012).

Masyarakat Islam mengalami pendangkalan atas penampilan yang diutamakan sebagai simbol (Jati, 2017). Ruang masyarakat Islam menjadi mata rantai atas konsumsi tekstil yang sebetulnya tidak terlalu mewakili hakikat dari spiritualitas. Hal ini diwujudkan dalam kelompok kelas menengah konformis yang sangat antusias terhadap pasar dan festival barang-barang muslim di mana hal tersebut menjadi hukum industrial di Indonesia. Kelas muslim urban menjadi fenomena baru sehingga menciptakan publik figur bagi komunitas muslimah dalam narasi keteladanan (Jati, 2017 : 96). Fenomena ruang dan festival muslim dicontohkan seperti “ Hijrah Fest 2018 “, Andika “ First Travel “ dengan agensi umrohnya, dan kelompok-kelompok hijab sebetulnya tidak mewakili aspek-aspek spiritualitas Islam tetapi hanya perluasan dari konsep ekonomi komunitas. Dari fenomena ini, dua pakar keserjanaan Islam yakni Nurcholish Madjid dan Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa Islam

hanya menjadi suatu kemasan walaupun spiritnya digunakan sebagai energi untuk berusaha lebih baik (*ikhtiyar*).

Dalam langkah selanjutnya orientasi prestasi diwujudkan pada taraf kebendaan yang menjadi acuan dan ukuran keberhasilan sehingga menimbulkan dampak pendangkalan keseimbangan hidup (Hidayat, 2000 : 98). Keseimbangan itu bermuasal dari pandangan dan cara menanggapi situasi apakah dengan aspek-aspek keagamaan, praktik teknologi, praktik ekonomi, penerapan ilmu pengetahuan, artikulasi seni, atau kepekaan terhadap kelestarian ekosistem alam. Jika terjadi kehilangan keseimbangan tersebut maka dapat dipastikan nilai solidaritas yang plural dihabiskan oleh pengorbanan diri dalam mencapai orientasi kebendaan. Dalam hal ini timbul konsep “ kehampaan spiritualitas “ yang merupakan dampak dari agama modern. Kehampaan spiritual itu juga diucapkan ekonom E.F. Schumacher yang mengatakan fungsi agama yang tidak bersumber spiritualitas akhirnya tidak berasal dari sumber kerohanian melainkan dari kecemasan materialistik berupa krisis tindakan terhadap permasalahan lingkungan (Schumacher, 1987).

Tabel.1. Batasan Konsep

Status Dan Prestige	Orientasi pencapaian prestisius dan kehormatan sosial, atau popularitas dalam masyarakat. Weber mencatat status individu seseorang. Sebagai contoh tokoh agama sebagai publik figur dapat memberikan konsep keteladanan (Weber, 1978).
Kehampaan Spiritualitas	Fungsi agama tidak bersumber dari hakikat kerohanian melainkan dari kecemasan materialistik dan perwujudan ego-spiritual dalam orientasi prestasi (Schumacher, 1987).
Revivalisme Islam	Gerakan kebangunan agama berdasarkan reaksi terhadap tekanan politik dan budaya populer Barat (Rahmat, 2008).
Ekonomi Komunitas	Organisasi sosial yang melakukan tindakan pertukaran jasa, edukasi, maupun distribusi produksi komunitas (Ife and Tesoriero, 2014).
Figurasi Sosial	Keseimbangan yang dapat tegang dan kendur karena fluktuasi ekonomi dan tekanan eksternal (Elias, 1978, 131).
Emosi Politik	Kecemburuan karena dipersalahkan dalam ranah publik dapat menimbulkan reaksi gerakan politik (Nussbaum, 2013).
Prestasi	Prestasi muncul dari hasil penelitian psikologi sosial David McClelland yang memulai riset penelitian komunitas keagamaan seperti inspirasi dari Weber (McClelland, 2012)

Metode Riset

Riset ini berdasarkan logika induktif atau artinya fakta-fakta berdasarkan temuan observasi dan analisa dokumen sebagai bukti sejarah (*historical evidence*). Metode ini disebut sebagai metode riwayat sejarah (*life-history*). Metode ini melakukan pelacakan dan penggabungan antara bukti sejarah dan analisis sosiologi adalah melakukan metode sistematis berupa pengambilan tiga langkah data lapangan yaitu : observasi, koleksi ulang (*recollection*) dokumen sejarah, dan perekaman (Denzin, 2006 : 244). Materi data riwayat sejarah mencakup semua catatan dan dokumen, termasuk rekam jejak institusi sosial, yang menyoroti tindakan subjektif individu atau kelompok (Denzin, 2006:

205). Metode riwayat sejarah merupakan salah satu metodologi dari kajian sosiologi-sejarah (*historical-sociology*). Penelitian sosiologi-sejarah dilakukan di Komplek Masjid Jogokariyan, Kampung Jogokariyan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Kegiatan observasi dan korespondensi dilakukan pada tanggal 10 Mei hingga 29 Juli 2018. Informan dari penelitian ini berupa tiga orang dengan rincian sebagai berikut : Dwi (25 tahun), Ayin (28 tahun), dan Wasiyo (70 tahun). Peneliti mulai melakukan telaah dokumen tersebut yang berupa majalah untuk kalangan terbatas yang berisi dokumentasi kegiatan dan penyiaran masjid kampung terhadap warga Yogyakarta, terdapat jenis konten yang dipublikasikan dalam majalah ini yaitu berupa : periklanan donatur masjid kampung, rubrik kegiatan masjid kampung, laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah, rubrik profil anggota dan pengurus komunitas, berita lelayu, berita kelahiran, dan kata sambutan dari ketua takmir dan remaja masjid. Dokumen itu tertanggal 12 Juni 2015, dengan edisi nomor 121.

Analisis Life-History

Metode yang dipergunakan adalah metode analisis induktif dengan melakukan seleksi berdasarkan topik riwayat sejarah yang bergantung secara kronologis (Denzin, 1978 : 218). Pengambilan data riwayat sejarah berdasarkan dua kategori yaitu : *public archival records* dan *private archival records* (Denzin, 1978 : 219-221). Dalam riset ini menggunakan arsip publik dengan mengambil dari akun media (*media accounts*) yang berjenis majalah periklanan suatu badan usaha komunitas (Denzin, 1978 : 219). Dalam media periklanan tersebut memuat berbagai macam bukti-bukti (*evidences*) laporan kegiatan dan aktivitas komunitas masjid kampung Jogokariyan. Tindakan budaya diturunkan dari warisan generatif dan semakin lama berkembang karena terdapat ketrampilan baru yang dikombinasikan dengan penciptaan teknologi baru (Riyono, 1996). Pada pokok gagasan utama ini, pengamatan sejarah mulai diberlakukan secara seksama. Dalam melakukan validasi internal dan eksternal maka kemampuan observasi menjadi bagian penting dalam melakukan seleksi data. Validasi eksternal dapat diatasi melalui pembatasan waktu dan lokasi (Denzin, 2006 : 236). Kemudian melakukan jenis perbedaan antara deskripsi aktivitas budaya dengan terpaan kondisi sejarah yang sedang berlangsung (Denzin, 2006). Validasi internal berupa perbedaan kategori antara arsip privat dengan arsip publik (komunitas) sehingga tidak dapat melakukan triangulasi dalam proses ini. Maka triangulasi dilakukan kepada pengakuan informan atas keterangan informan lain. Kemudian faktor sejarah berupa pengakuan perspektif subjek perlu disediakan jika subjek mendefinisikan situasi tertentu sebagai ungkapan reaktif yang dianggap penting ataupun mengganggu bagi keberlangsungan komunitas maka memerlukan pencatatan atas reaksi tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Asal usul komunitas ini berdiri tahun 2010 dengan inisiatif dari kalangan istri-istri kalangan istri-istri dari pengurus takmir masjid kampung Jogokariyan, sekaligus dukungan para manula yang ingin mengabdikan kehidupannya pada orientasi spiritual. Pada periode 2010 hingga 2012, komunitas mengembangkan sosialisasi komunitas tentang wacana “ Kedudukan Perempuan dalam Islam “terutama pasca-reformasi, berupa penyebaran opini komunitas disalurkan melalui berbagai media sosial yaitu aplikasi media sosial dan penyebarluasan buletin cetak. Ummida juga menyusun anggaran partisipatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bertema perempuan dalam Islam. Kelompok istri-istri dari seorang pemuka agama (*ustadz*) memegang peranan penting dalam sosialisasi wacana keagamaan ini. Komunitas Ummida memberikan kesempatan dan pelatihan untuk berjualan makanan, jajanan, dan minuman di Pasar Ramadhan Jogokariyan. Salah seorang anggota komunitas yang berjualan ialah Siti Layinah atau akrab disapa Ayin, ia merupakan pemudi yang berusia 28 tahun dan memulai berjualan *risoles mayo* dan *coklat lumer* sepanjang lapak pasar ramadhan. Tindakan untuk berjualan risoles karena dukungan mentor dari kakak-kakak perempuannya yang telah menikah di komunitas Ummida. Selain itu karena dukungan sesama teman-temannya yang sebaya di kampungnya.

Dalam kajian rutin, komunitas Ummida memiliki cara unik dalam usaha mempertemukan jodoh. Tindakan komunal saling menjodohkan di ruang-ruang pengajian (*liqo'*) yang membentuk jaringan komunitas keluarga (*usrah*). Sang murabbi atau ustadz menjodohkan tatkala *liqo'* tersebut. Rizki Rahim yakni seorang anak dari pengusaha kayu Bapak Khamid (atau tokoh dari komunitas tersebut) menjodohkan putranya dengan seorang anak politisi Partai Keadilan (PKS) melalui perantara murabbi. Istrinya Rizki Rahim akhirnya menjadi anggota komunitas Ummida dan jika ada kesempatan mendengar permintaan dari anggota komunitasnya yang lebih muda, maka ia tidak segan untuk menjodohkan kemudian dikonsultasikan kepada ustadz (*murabbi*).

Pada pengembangan antara tahun 2013 hingga 2015, komunitas Ummida sebagai perkumpulan istri-istri dari jamaah masjid Jogokariyan mengadakan peningkatan keterampilan dalam berjualan busana muslimah dan makanan seperti kue-kue beserta jajanan model baru. Komunitas membuat akun resmi di media komersial berbasis internet (*online*) seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Komunitas Ummida juga menjual bahan-bahan obat herbal dan mainan anak yang dianggap mengandung nilai Islami seperti alat karaoke Al-Quran dan ensiklopedia kisah-kisah nabi. Dalam pagelaran bulan Ramadhan 2018, komunitas ini mengadakan buka puasa bersama dengan pengunjung pasar sore dan warga setempat. Kalangan ibu-ibu Jogokariyan yang diorganisasi melalui komunitas mampu menyiapkan konsumsi buka bersama (*takjil*) sebanyak 3.000 hidangan porsi takjil (Liputan TV One : 26 Mei 2018). Dalam perspektif Weber (1978) mengamati berbagai usaha komunal tersebut terdapat kompetisi antar individu dalam komunitas apalagi jika mampu menghasilkan keuntungan bagi kelompok pengusaha, sedangkan “ prestasi pendidikan “ bagi kelompok pelajar dan mahasiswi. Agama dipersepsikan sebagai etos panggilan kerja (*calling*) untuk menghasilkan pencapaian kebendaan dan gelar akademis. Atas berbagai pencapaian tersebut maka se usai itu melakukan selebrasi dalam pagelaran gathering pada tema arisan mengenai hijabers.

Dalam konsepsi figurasi sosial perspektif Elias (1978) terdapat beberapa dimensi yang perhatian dalam kajian ini yaitu dimensi fisik berupa komunitas sebagai kelembagaan menjadikannya berjarak dengan realitas struktur masyarakat lainnya. Dengan kata lain, perempuan muslimah mengalami suatu proses homogen. Lalu dimensi makna bersama komunitas yaitu, semakin berkembangnya waktu, maka ide komunitas semakin praktis dan reaktif terhadap realitas. Kemudian dimensi sosial berupa peran dari istri-istri yang berusia lanjut memberikan kekuatan pengaruh bagi perempuan muslimah yang baru saja berkeluarga. Adanya komunitas menjadi perantara dalam tipe relasi antara senior-junior. Pada tahapan selanjutnya berupa dinamika sejarah yakni terdapat perubahan komunitas muslimah selalu berpangkal pada kekuatan kepemimpinan tokoh muslim yang menjadi figur kekuatan sosial. Pewarisan sosial berupa moral dan norma dalam perspektif Elias (1978) merupakan tipe relasi antara kalangan tua dengan kalangan muda yang terlibat dalam komunitas. Perantara dalam pergeseran nilai ialah tokoh muslim yang diakui memiliki sumber kekuatan berdasarkan pengetahuan agama, usia, dan dorongan manajerial untuk memastikan kemakmuran di lingkungan masjid kampung.

Dari beberapa hasil kajian ini yang tercatat makna bersama sebagai berikut “ Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang lebih baik “ (Majalah Bulif-Jogokariyan : 2015). Untuk menjaminnya perlakuan yang baik antara laki-laki dan perempuan terutama dalam keseharian. Maka norma-norma yang dikemukakan dalam komunitas ini berupa penjagaan kehormatan. Tindakan pengamalan dimulai penutupan aurat dengan mengenakan busana muslimah seperti jilbab, kerudung, dan hijab. Bagi komunitas Ummida, mengenakan busana muslimah membuat orang lain menjadi hormat kepada perempuan. Atribut busana muslimah menjadi bagian simbolisasi fisik bagi komunitas Ummida sekaligus bagian dari penyiaran Islam dan pertukaran komoditi ekonomi komunitas. Premis penutupan aurat menjadi risiko perempuan dalam sosialisasi diri sebagai upaya eksibisi dalam

lingkungan masyarakat (Jati, 2017 : 155). Dari pertanda tindakan komunal, menurut Weber (1978) menimbulkan makna sosial yang secara tidak langsung menyatakan kesalehan agama dalam suatu konsep takdir yang dipahami secara bersama meski pengembangan aktualisasi secara individual.

Anggota komunitas masing-masing memiliki kepercayaan diri dalam mengutarakan perasaan spiritual. Di sisi lain, persaingan individual dalam mencapai jenjang pendidikan cukup dipahami secara antusias. Dengan adanya komunitas Ummida sebagai wadah sosial maka kelembagaan komunitas menjadi ruang organisasi diri satu sama lain dengan mengejar kemandirian ekonomi sebagai tanda kesuksesan sekaligus keselamatan. Masing-masing dari anggota komunitas terkadang membandingkan prestasi ekonomi rumah tangga, prestasi anak-anak, dan pencapaian status suami.

Komunitas Ummida mengundang para publik figur tersebut sebagai pembicara dan motivator melalui forum-forum upgrading. Komunitas Ummida juga mengundang isu hijrah dari kalangan selebriti menjadi muslimah yang baik. Mereka mengundang selebriti muslimah seperti Oki Septiana Dewi dan Ghaita putrinya K.H. Abdullah Gymnastiar. Dalam kajian Ummida ini telah dicontohkan kisah sukses (*success story*) dalam memutuskan pernikahan dan bagaimana menjalani rumah tangga hingga mengalami tantangan dalam berkeluarga. Dari titik utama ini, konsep keteladanan telah dipraktikkan pada aktivitas komunitas ini. Keteladanan disini bermaksud untuk mengikuti publik figur dari kalangan muslim yang senantiasa mencontohkan pelajaran bermoral baik dalam berkeluarga maupun dalam menjalani ekonomi rumah tangga. Perbincangan mengenai perubahan sosial-budaya komunitas Ummida di masjid Jogokariyan merupakan asal muasal moralitas nilai etik anjuran agama terkadang mengalami distorsi menjadi anjuran konsumsi, atau hanya sekadar persoalan tindakan mengenakan dan jual beli busana muslimah (tekstil). Bagi perempuan muslimah menjadi subjek pasif akan aktualisasi kebutuhan batin (spirit) menjadi motif bagi tindakan komunal berupa ekonomi moral yang terkemas dalam ruang komunitas Ummida.

Komunitas Ummida berusaha mengatur hal tersebut melalui ruang pendidikan dan ruang perjodohan secara aturan yang dikehendaki komunitas muslim pada umumnya. Seusai seorang muslimah menjadi istri dan menjadi bagian dari komunitas Ummida maka ia wajib mendukung suaminya selama suami masih berpedoman aturan yang dikehendaki komunitas muslim. Berdasarkan rubrik-rubrik majalah Jogokariyan (2015) yang tercatat berupa ajakan dan motivasi untuk menempuh jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Dengan adanya konsekuensi logis tersebut maka komunitas Ummida juga mengadakan forum bimbingan belajar (bimbel) bagi adik-adik yang sedang menempuh sekolah menengah umum atau sedang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pada aktivitas lainnya terdapat jaringan kerja usaha komunitas di mana target-target penjualan dari anggota Ummida yang membuka lapak atau usaha rumahan. Dalam bisnis online berperan menjadi reseller utama dalam promosi busana muslimah. Orientasi target penjualan berupa konsep franchise (buka cabang) menjadi suatu prestasi tersendiri bahkan ada yang dari komunitas melakukan tata kelola jaringan kepada pasar-pasar “ Hijrah Fest 2018 ” di Jakarta Convention Center. Idiom “ Hijrah ” menjadi isu dan ruang pasar komunitas dalam melakukan distribusi produksi kelas menengah muslim urban. Dari interaksi sesama kepercayaan yang terus menerus dikumandangkan dalam komunitas maka mengalami proses homogen sehingga tidak mampu mengenali bagaimana komunitas Tionghoa atau komunitas keagamaan lain (Galeotti, 2010). Anggota kelompok ini hanya mengenali bagi yang beruntung menempuh sekolah negeri dan di kampus negeri atau kampus swasta yang bukan perguruan tinggi Islam. Anggota komunitas Ummida umumnya membantu suami-suami mereka walaupun dalam melakukan reaksi politik. Para ibu-ibu muda membantu suami dalam tasyakuran kekalahan Basuki Tjahaja (Ahok) dalam kontestasi politik ibukota (Merdeka.com, 22-4-2017). Para anggota Ummida membantu memasak kerbau untuk tasyakuran kekalahan Ahok di masjid Jogokariyan. Beberapa kelompok dari Ummida juga bergabung dan berangkat ke Jakarta dalam momentum aksi bela 212. Dalam menjalin sesama anggota komunitas maka forum daring media sosial menjadi sangat penting terutama adanya aplikasi telegram dan grup whatsapp. Dalam mencurahkan

hati atau ungkapan malu atau kecewa terhadap sesuatu umumnya disharingkan melalui grup aplikasi tersebut. Salah seorang informan mengatakan mengapa berkecimpung dalam komunitas ini selain rumah ibu disini :

“ Iha saya berkecimpung di Ummida karena ada teman-teman memperhatikan saya, saya sama sekali tidak pernah dibantu oleh pemerintah sini mas, anak saya melamar pns juga tidak diterima, saya juga pengen sugih tapi yo pengen mlebu swargo tur dagangane laris “. (red- Saya juga ingin kaya tapi juga ingin masuk surga tetapi barang dagangan saya juga laris).

Tabel.2. Konseptualisasi Temuan Kajian

Status dan Prestige	Bersaing untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri merupakan ajang status dan prestisius tersendiri bagi anggota Ummida terutama kampus-kampus UGM, UNDIP, dan UNS. Hal ini ditunjang dengan kedekatan lokasi kampung. Terjebak pada simbol dan titel akademis seperti S1, S2, dan Doktor.
Kehampaan Spiritualitas	Persaingan prestasi jenjang pendidikan dan profit usaha. Realita ketergantungan terhadap keteladanan para figur publik yang baru mengalami proses hijrah. Dalam hal ini tidak percaya diri terhadap spiritualitas individu tetapi lebih percaya pada kisah-kisah religiusitas Islam orang lain. Disisi lain terjebak pada simbol dan titel keagamaan seperti Haji dan Umroh.
Revivalisme Islam	Reaksi komunitas dengan keikutsertaan berbagai agenda dalam kampanye “ Anti-Ahok “.
Ekonomi Komunitas	Ruang pertukaran jasa seperti bimbingan belajar (bimbel) dan ruang penjualan produk-produk muslim seperti busana muslimah dan pengobatan herbal baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
Prestasi	Orientasi franchise dalam usaha reseller online maupun offline seperti adanya berbagai lapak. Determinasi dalam menempuh pendidikan tinggi.
Emosi Politik	Emosi dalam hal ini berhubungan dengan partisipasi suami dalam lingkup komunitas masjid kampung Jogokariyan yang antusias kepada publik figur seperti Abdul Shomad, Salim Afillah dan sangat anti kepada figur-figur seperti Ahok, Rieke Dyah Pitaloka, dan Eva Kusuma Sundari. Bergabung untuk berangkat ke Jakarta dalam momentum aksi bela 212.

Kesimpulan

Dari berbagai temuan lapangan penelitian maka ekspresi perubahan sosial budaya komunitas Ummida Jogokariyan memiliki hubungan emosional dengan suami-suami yang menjadi anggota jamaah dan pengurus komunitas masjid kampung Jogokariyan. Komunitas ini juga menjadi ruang perjodohan bagi perempuan muslimah yang lajang. Disamping itu, komunitas ini menjadi kelompok motivator untuk menempuh pendidikan tinggi atau berwirausaha dari skala menengah baik secara *online* maupun *offline*. Komunitas ini menjadi ruang sharing strategi berwirausaha sekaligus bertukar dan bersaing dalam berbagai distribusi produk kelas menengah muslim urban. Komunitas menjadi ruang edukasi Islam sekaligus mengadakan bimbel untuk menuju jenjang pendidikan berikutnya. Dengan berbagai fasilitas yang didukung oleh pertukaran “ bagi hasil “ dari ekonomi komunitas maka komunitas ini aktif dalam melakukan penyiaran Islam terutama kepada perempuan muslimah. Inisiatif

adanya ekonomi komunitas yang berdampak homogen merupakan cara memperlakukan kebijakan publik dampak dari pemerintah provinsi atau negara yang tidak menjamin kesejahteraan sosial dan gagal melakukan distribusi keadilan sosial.

Referensi ASA (Double-Spaced)

- Bakrie, A. 2018. *Semarak Kampung Ramadhan 2018* [Liputan TV One]. Indonesia : Viva Group.
- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. Terjemahan Mestika Zed. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Denzin, Norman. 2006. *The Research Act* . Chicago: Aldine Publishing.
- Denzin, Norman. 1978 . *The Research Act : A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York, NY : McGraw-Hill Company.
- Elias, Norbert. 1978. *The Civilizing Process*. Oxford : Blackwell.
- Hidayat, Komaruddin. 2000. “ Agama dan Kegagalan Masyarakat Modern “. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern* . Amin Akkas & Hasan Noer (ed). Jakarta : Media Cita.
- Ife, Jim. Tesoriero, Frank. 2014. *Community Development*. Terjemahan Sastrawan Manulang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galeotti, Anna. 2010. “ Respect as Recognition : Some Political Implications “. *The Plural States of Recognition*. Seymour (ed). London : Palgrave.
- Jati, Wasisto. 2017. *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia* . Jakarta: LP3ES.
- Jogokariyan, 2015. *Bulif-Jogokariyan* [Majalah Terbitan Masjid Jogokariyan]. Vol. 121, 38-39.
- Madjid, Nurcholish, et al. 2000. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*. Jakarta: Media Cita.
- Margana, Sri, ed. 2010. *Kota-kota di Jawa : Identitas, Gaya Hidup, Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- McClelland, David. 1967. *Achieving Society*. New York, NY: Simon and Schuster.
- Nussbaum, Martha. 2013. *Political Emotions*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Merdeka. Com 2017. “ Syukuran Kekalahan Ahok, Masjid Jogokariyan Sembelih Kerbau “. Retrieved April 2017 (<https://www.merdeka.com/peristiwa/syukuran-kekalahan-ahok-masjid-jogokariyan.html>
- Rahmat, Imdadun. 2008. *Ideologi Politik PKS : Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta : LKIS.
- Riyono, Bagus.1996. “ Peranan Orientasi Nilai Budaya Pada Kepuasan Kerja “. *Jurnal Psikologika*. 1 (1) : 65-75.
- Schumacher, E.F. 1987. *Kecil itu Indah*. Terjemahan Supomo. Jakarta: LP3ES.
- Sumartono, I. 2016. “ Strategi Membangun Ummat dari Masjid “. *Laporan Praktik KKL Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga*, 10-14.
- Weber, Max. 1978. *Economic and Society*. Roth & Wittich (ed). Berkeley: The University of California Press.
- Wijaya, Mahendra. 2012. “ Demokrasi Ekonomi Lokal “. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 1(1): 76-85.

PERGESERAN RUANG TRADISI RELIGI MASYARAKAT BETAWI DI WILAYAH JAKARTA (STUDI KASUS MASYARAKAT KELURAHAN DUREN TIGA)

Nur Laily Romadhotul Husna, Program Studi Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. E-Mail: nur.laily51@ui.ac.id

Nina Khairunnisa, Program Studi Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. E-Mail: ninakhairunnisa99@gmail.com

Abstrak

Menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan Kawasan metropolitan membuat Jakarta memiliki daya tarik bagi para imigran untuk melakukan urbanisasi. Pada tahun 1971 jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 4 juta jiwa dan pada tahun 2016 jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 10 juta jiwa (BPS). Dengan kedatangan 6 juta jiwa migran dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, membuat pembangunan pemukiman semakin pesat. Arus urbanisasi yang tinggi dan modernisasi di Kawasan perkotaan akan mendesak terjadinya pergeseran budaya. Pergeseran budaya tersebut bisa saja terjadi di wilayah kota Jakarta. Menurut Rowland B. F. Pasaribu, Masyarakat dan kebudayaan di mana pun selalu dalam keadaan berubah, ada dua sebab perubahan: 1) Sebab yang berasal dari masyarakat dan lingkungannya sendiri, misalnya perubahan jumlah dan komposisi. 2) Sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dan kebudayaan lain cenderung untuk berubah secara lebih cepat. Dengan pendekatan ilmu geografi kebudayaan, akan dapat dijelaskan bagaimana pergeseran ruang budaya dapat terjadi. Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah metode kualitatif yakni wawancara serta observasi dengan bantuan analisis deskriptif spasial. Wilayah yang menjadi studi penelitian adalah Kelurahan Duren Tiga, yang letaknya berada di tengah kota. Budaya yang dilihat dalam hal ini adalah tradisi religi masyarakat Betawi. Suku Betawi adalah sebutan untuk para warga yang tinggal di Jakarta. Hasil yang didapatkan adalah bahwa terjadinya pergeseran ruang budaya pada tradisi religi masyarakat Betawi yang masih ada hingga kini keberadaannya. Pergeseran ruang tradisi religi tersebut dapat dilihat pada kegiatan pernikahan, sunatan, pengajian dan kesenian qasidahan.

Kata Kunci: modernisasi, pergeseran, ruang, tradisi, urbanisasi

Pendahuluan

Suku Betawi ialah salah satu suku di Indonesia yang berada atau tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Menurut Sagiman (dalam Bayu, 2015) diperkirakan keberadaan suku Betawi telah ada pada sekitar zaman Neolithicum yakni sekitar pada tahun 1500 SM (Mita, 2010). Betawi merupakan salah satu suku atau etnis yang merupakan hasil dari akulturasi dan asimilasi beberapa kebudayaan diantaranya yakni Belanda, Cina, Arab, India, Portugis, dan Sunda. Salah satu contoh asimilasi budaya yang terjadi yakni dalam musik keroncong. Musik keroncong merupakan asimilasi budaya antara perpaduan musik portugis dan musik arab yang menghasilkan seni musik baru. Sehingga dapat dikatakan, bahwasannya suku yang berasal dari percampuran berbagai suku bangsa dan bangsa-bangsa asing (Shahab 2008, dalam Mita, 2010).

Secara umum masyarakat Betawi dibedakan menjadi masyarakat Betawi Tengah dan masyarakat Betawi Ora (Pinggir/Udik). Masyarakat Betawi yang tinggal di Kelurahan Duren Tiga termasuk kedalam etnis Betawi Tengah. Etnis Betawi Tengah merupakan masyarakat etnis Betawi yang tinggal di wilayah pusat atau wilayah *urban* Jakarta. Karena tinggal di pusat kota, maka orang Betawi Tengah sangat merasakan arus urbanisasi yang tinggi dan modernisasi. Masyarakat Betawi Tengah sangat kental akan pengaruh kuat kebudayaan Melayu atau Islam (Mita, 2010). Menurut Mita

(2010), masyarakat Betawi Tengah menganut gaya hidup tempo lama, yakni misalnya dengan perayaan upacara perkawinan, khitanan, tradisi lebaran dan sangat memegang teguh agama serta adat istiadat seperti mengaji. Dalam bidang kesenian, masyarakat Betawi Tengah menikmati Keroncong Tugu, Musik Gambus, Qasidah, Orkes Rebana.

Mengingat tradisi religi agama sangat kuat keberadaannya di masyarakat Betawi Tengah sehingga akan terciptanya ruang tradisi religi agama yang terbentuk. Ruang tradisi religi adalah wujud fisik dan wadah bagi masyarakat Betawi dalam melaksanakan tradisi religi agama yang ada. Kelurahan Duren Tiga berada dekat dengan pusat kota sehingga menyebabkan terjadinya modernisasi, globalisasi serta pembangunan yang cepat dan akan mempengaruhi kebudayaan Betawi. Hal itu pula yang akan mempengaruhi perkembangan ruang tradisi religi yang ada di Kelurahan Duren Tiga. Sehingga, di dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pergeseran ruang yang terjadi dalam tradisi religi masyarakat Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Kajian Pustaka

Kebudayaan adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Para ahli umumnya sepakat bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari/learning behavior. Kebudayaan juga dapat dipahami sebagai suatu sistem ide/gagasan yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 1996).

Kebudayaan memiliki unsur-unsur dimana menurut Malinowski, kebudayaan mempunyai tujuh unsur diantaranya bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian dimana unsur tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Dalam geografi terdapat cabang ilmu yang mempelajari kebudayaan. Geografi kebudayaan merupakan suatu ilmu yang mengkaji proses-proses kebudayaan yang berhubungan dengan konteks keruangan karena kebudayaan yang terdapat di suatu wilayah merupakan sebuah cerminan dari kondisi wilayah dan penduduk yang berada di sana (Yani, Ruhimat dan Beni, 2007).

Suku betawi merupakan sebutan untuk penghuni asli daerah Jakarta. Masyarakat betawi secara geografis terbagi menjadi dua yaitu bagian tengah dan pinggiran. Bagian tengah berada pada radius kurang lebih 7 km dari Monas (Monumen Nasional) sedangkan bagian pinggiran berada di bagian selatan dan utara Jakarta. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak terjadi perpindahan penduduk terlebih perpindahan menuju pusat ibu kota Republik Indonesia yang langsung memberikan dampak juga terhadap keberlangsungan budaya pada suku betawi. Modernisasi zaman mengubah keberadaan suku Betawi asli dan membawa dampak yang besar terhadap suku Betawi diantaranya adat dan tradisi yang lebih cepat berubah seiring perkembangan Kota Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.

Menurut Rowland B. F. Pasaribu, Masyarakat dan kebudayaan di mana pun selalu dalam keadaan berubah, ada dua sebab perubahan:

1. Sebab yang berasal dari masyarakat dan lingkungannya sendiri, misalnya perubahan jumlah dan komposisi
2. Sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dan kebudayaan lain, cenderung untuk berubah secara lebih cepat.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan analisis keruangan dan deskriptif. Analisis deskriptif adalah penjabaran mengenai suatu fenomena yang berdasarkan dengan fakta.

Sedangkan analisis keruangan bertujuan untuk mendeskripsikan fakta yang berkaitan dengan unsur ruang dan spasialnya. Dalam penelitian kualitatif biasa dilakukan dengan bantuan wawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan mendalam. Penentuan informan dalam penelitian ini snow ball informan dengan mewawancarai informan pembuka yang merupakan masyarakat asli Betawi yang dianggap mengetahui tradisi religi masyarakat Betawi dari 20 tahun yang lalu hingga saat ini. Setelah wawancara, dilakukan observasi mengenai site dan situation pada lokasi yang menjadi ruang tradisi religi yang dipilih secara khusus dan juga dilakukan dokumentasi lokasi. Untuk dapat memvalidasi data dilakukan dengan melakukan koding dari hasil jawaban informan dan melakukan wawancara pada Tokoh yang dianggap mengetahui mengenai Budaya Tradisi Religi Masyarakat Betawi di Kelurahan Duren Tiga. Hasil dianggap tervalidasi jika hasil koding wawancara dan diperkuat dengan jawaban tokoh memiliki jawaban yang sama.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Betawi yang berada di Kelurahan Duren Tiga digolongkan menjadi Etnis Betawi Tengah. Etnis Betawi Tengah sangat kental dalam hal religi sehingga unsur religi sangat menonjol dibanding dengan unsur lainnya. Hal tersebut dapat terlihat dari penuturan informan dalam penelitian ini. Dalam penuturan informan tradisi religi yang masih sering mereka lakukan yakni pernikahan, sunatan, pengajian, dan qasidahan.

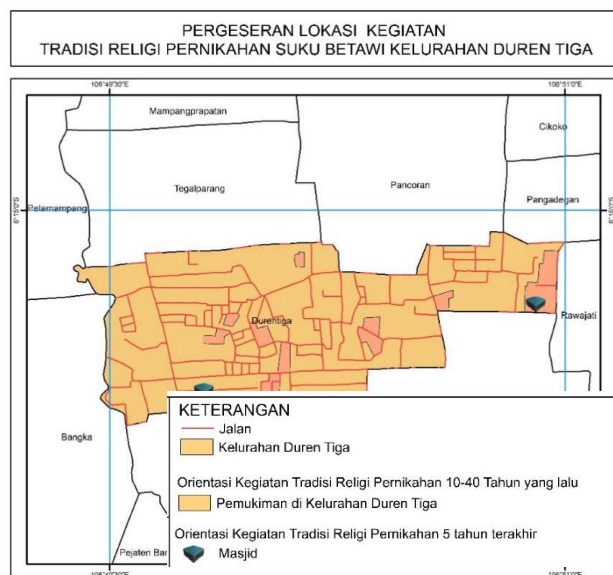
"kebiasaan yang masih dilakuin sampe saat ini ya ada nikahan, tapi kalo nikahan gak semua pake adat kaya palang pintu, cuman beberapa aja yang pake gak seperti dulu. Ada juga pengajian, sunatan, qasidahan, hadrahan." - Bu Hj. Yan Mulyana.

Setelah melakukan wawancara terhadap tokoh/ informan inti yang dianggap mengetahui mengenai budaya tradisi religi masyarakat Betawi yakni Ibu Hj. Yana Mulyana. Beliau sudah tinggal di Kelurahan Duren Tiga kurang lebih selama 40 tahun. Dari hasil penuturan beliau bahwasannya terjadi pergeseran ruang tradisi religi masyarakat Betawi di Kel. Duren Tiga. Yakni pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Dari penuturan beliau, didapatkan beberapa informan yang dianggap beliau mengetahui mengenai pergeseran tradisi ini. Dari penuturan informan-informan dan tokoh inti didapatkan jawaban yang sama yakni terdapat pergeseran ruang tradisi religi di Kel. Duren Tiga. Sehingga jika kita kaitkan dengan teori yang dikatan Rowland B. F. Pasaribu, bahwa budaya dapat bergeser dan hal itu dapat dilihat juga pada ruang tradisi religi masyarakat Betawi. Karena budaya yang bergeser sehingga menyebabkan terjadinya pula pergeseran ruang budaya seperti pergeseran ruang tradisi religi. Pergeseran tersebut disebabkan oleh perubahan fisik dan alam tempat mereka hidup seperti semakin banyak pemukiman lahan yang terbangun. Serta disebabkan perubahan dari masyarakat dan lingkungannya seperti kemajuan teknologi.

Pergeseran Ruang Tradisi Religi Pernikahan

Setelah melakukan wawancara dengan informan di dapatkan bahwasannya terdapat pergeseran ruang tradisi religi pernikahan masyarakat Betawi di Kelurahan Duren Tiga. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pernikahan sudah sangat jarang dilakukan di rumah. Pernikahan-pernikahan yang ada lebih sering ditemui yang dilaksanakan di gedung ataupun aula masjid. Akan tetapi, terhitung sebelum waktu tersebut (6 hingga 40 tahun yang lalu) masyarakat Betawi di kelurahan tersebut melakukan pernikahan di rumah. Pergeseran tersebut terjadi dikarenakan rumah-rumah masyarakat Betawi sudah semakin berkurang luasannya. Dan juga dikarenakan pemukiman yang semakin padat dan jalan di sekitar pemukiman yang sudah semakin sempit yang menyebabkan lahan kosong sudah tidak ada dan tidak dapat digunakan lagi untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan pernikahan. Sehingga mereka

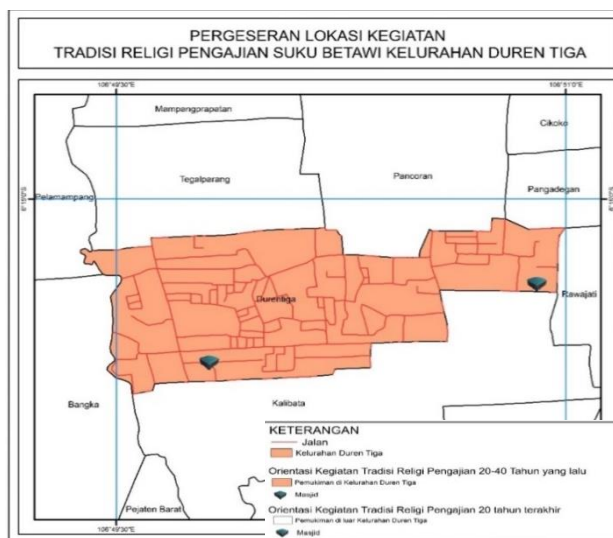
pada kurun waktu 5 tahun terakhir memilih mengadakan pesta pernikahan di gedung atau aula seperti aula Masjid Bait Ar-Rahman yang memiliki daya tampung pengunjung yang lebih banyak karena memiliki halaman yang dapat dijadikan tempat duduk pengunjung serta aksesibilitas untuk mencapai lokasi yang mudah dengan terdapatnya jalan selebar 7m di depan lokasi dan terletak 100m dari Jalan arteri yakni Jl. Warung Jati Barat.



Gambar 1. Peta Pergeseran Ruang Tradisi Religi Pernikahan

Pergeseran Ruang Tradisi Religi Pengajian

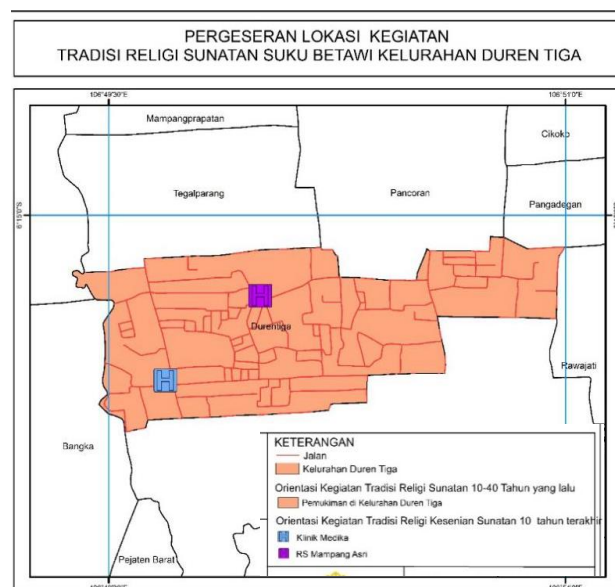
Setelah melakukan wawancara dengan informan, didapatkan bahwasannya terjadi pergeseran ruang tradisi religi pengajian di Kelurahan Duren Tiga. lima belas tahun yang lalu, pengajian yang ada di Kelurahan Duren Tiga hanya berada di Masjid dan sekitar pemukiman yang berada di Kelurahan Duren Tiga. Namun, seiring berkembangnya transportasi dan teknologi pada kurun waktu beberapa waktu terakhir, yang memudahkan jamaah untuk pergi dan mendapatkan informasi sehingga pengajian yang diikuti oleh masyarakat Betawi Duren Tiga sudah sampai ke luar Kelurahan Duren Tiga. Seperti, Kelurahan Kalibata, Pancoran dan Rawa Jati.



Gambar 2. Pergeseran Ruang Tradisi Religi Pengajian

Pergeseran Ruang Tradisi Religi Sunatan

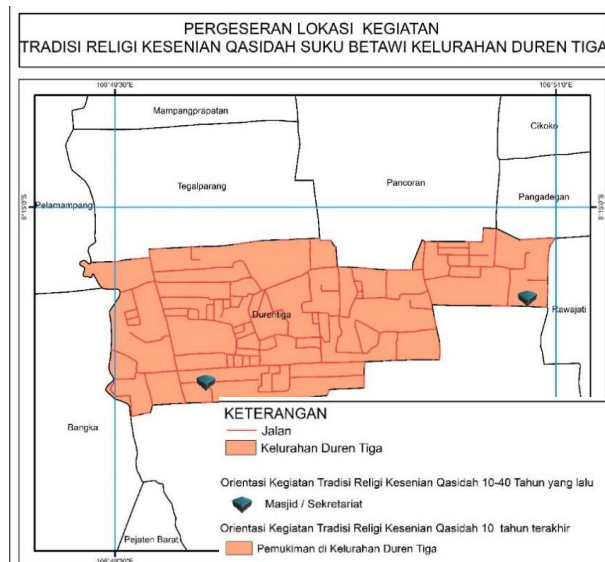
Informasi yang didapatkan dari informan dalam pergeseran ruang tradisi sunatan di Kelurahan Duren Tiga dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kegiatan sunatan di Kelurahan Duren Tiga tidak lagi dilakukan dengan bantuan Tukang Sunat/Bengkong melainkan sudah menggunakan bantuan medis yang ditandai dengan kegiatan sunatan yang dilakukan di rumah sakit. Sedangkan, sepuluh hingga 40 tahun yang lalu, kegiatan sunatan di Kelurahan Duren Tiga dilakukan dengan bantuan Tukang Sunat/Bengkong ditandai dengan kegiatan sunatan yang diadakan di rumah masyarakat Betawi Kelurahan Duren Tiga. pergeseran tersebut terjadi karena dengan menggunakan bantuan medis dapat mempercepat penyembuhan bagi yang disunat, lebih higienis serta efisien dibandingkan dengan menggunakan jasa Bengkong.



Gambar 3. Pergeseran Ruang Tradisi Religi Sunatan

Pergeseran Ruang Tradisi Religi Qasidah

Berdasarkan hasil wawancara informasi yang didapatkan dalam pergeseran ruang tradisi religi qasidah di Kelurahan Duren Tiga dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tempat latihan qasidah Kelurahan Duren Tiga dilakukan di rumah anggotanya secara bergantian. Sedangkan dalam kurun waktu sepuluh hingga empat puluh tahun terakhir, latihan qasidah Kelurahan Duren Tiga hanya dilakukan di sekretariat taklim atau masjid. Pergeseran terjadi karena pada kurun waktu sepuluh tahun lalu daerah tersebut belum terdapat penerangan di sekitarnya sedangkan sepuluh tahun terakhir hingga sekarang sudah terdapat penerangan di setiap jalan dan sudah ramai akan penduduk sehingga sudah mudah untuk berpindah tempat latihan qasidah.



Gambar 4. Pergeseran Ruang Tradisi Religi Qasidah

Kesimpulan

Tradisi religi masyarakat Betawi yang masih berlangsung hingga saat ini yakni pernikahan, pengajian, sunatan dan kesenian qasidahan. Seiring berjalannya waktu ruang untuk wadah tradisi religi tersebut mengalami pergeseran ruang akibat urbanisasi dan modernisasi di Jakarta.

Referensi

- Bayu Andrian Pamungkas. (2015). "Suku Betawi. ; Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1996). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mita Purbasari. (2010). "Indahnya Betawi."; HUMANIORA Vol.1 No.1: 1-10.
- Rowland B.F. Pasaribu. "Kebudayaan dan Masyarakat."
- Yani, A., Ruhimat, M., Beni, A.S. (2007). Geografi Menyingkap Fenomena Geosfer. Jakarta : Grafindo Media Pratama.

IDENTITAS

Identitas Sosial *Abdi Dalem Garap* Keraton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat
(Sebuah Kajian Sosiologis Tentang Pengabdian *Abdi Dalem Garap*)

Ely Kristanti, Sosiologi, Pascasarjana UNS. Email: ellychristy@gmail.com

Bagus Haryono, Sosiologi, FISIP UNS. Email: bagusharyo10@gmail.com

Drajat Tri Kartono, Sosiologi, FISIP UNS. Email: uns.drajat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identitas sosial *Abdi Dalem Garap* Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dalam pengabdianannya menjadi seorang *Abdi Dalem Garap*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. *Abdi Dalem Garap* menjadi informan utama dalam penelitian ini secara holistic. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah semua kata-kata dan tindakan dari *Abdi Dalem Garap*, selebihnya berupa data sekunder yaitu dokumen berupa riset terdahulu, foto maupun video, klipng dan data statistik. *Snowball sampling* menjadi teknik dalam pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Untuk validitas datanya digunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini teori identitas sosial menggunakan *group identification* Richard Jenkins. Identitas tidak hanya kesan terhadap diri sendiri, tetapi kesan kita terhadap orang lain dan kesan orang lain tentang kita. Identitas dibentuk di dalam proses sosialisasi. Hasil dari penelitian menunjukkan, dalam perannya, *Abdi Dalem Garap* memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima sekaligus dilaksanakan selama menjadi *Abdi Dalem Garap*, salah satunya menerima gelar. Gelar bagi memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai identitas yang membedakannya dengan anggota masyarakat lainnya sekaligus sebagai identitas yang menunjukkan pekerjaan atau tanggung jawab yang sedang ia lakukan. Dengan memiliki gelar, maka *Abdi Dalem Garap* secara penuh menjadi bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setiap *Abdi Dalem Garap* mengalami proses kenaikan pangkat setiap 3 atau 4 tahun sekali. Sedangkan hak lainnya adalah menerima *tulah* dan *pepancen*. *Tulah* diartikan sebagai pemberian dari Raja atau keluarga Raja yang sifatnya personal. Sedangkan *pepancen* adalah upah yang diberikan oleh pihak Keraton sesuai dengan pangkat dan lama pengabdian. Sedangkan kewajiban *Abdi Dalem Garap* adalah mentaati semua aturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis seperti memakai pakaian adat, memakai samir, menggunakan bahasa Jawa dengan baik serta menjunjung tinggi loyalitas terhadap Keraton.

Kata Kunci : Identitas sosial, *Abdi Dalem Garap*, Pengabdian

Pendahuluan

Urban heritage merupakan objek-objek dan kegiatan di perkotaan yang memberi karakter budaya yang khas bagi kota yang bersangkutan. Keberadaan bangunan kuno dan aktivitas masyarakat yang memiliki nilai sejarah, estetika dan kelangkaan biasanya sangat dikenal oleh masyarakat dan secara langsung menunjuk pada suatu lokasi dan karakter kebudayaan suatu kota (Hardianti, dkk, 2005 : 112). Surakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang terkenal akan kentalnya budaya Jawa pada kehidupan masyarakatnya. Budaya tersebut dapat terlihat dari tingkah laku dan pola pikir masyarakat Surakarta yang berbeda dari daerah lainnya. Keraton Surakarta adalah sebuah warisan budaya Jawa yang wujudnya berupa fisik bangunan Keraton, benda artefak, seni budaya dan adat tata cara Keraton (Maliyana, 2015 : 1).

Sejak berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta sudah terdapat sistem perubahan stratifikasi sosial di Jawa, terutama Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dibedakan dalam tiga kurun waktu, yaitu

masa tradisional, masa kolonialisasi Belanda dan masa pasca kolonialisasi Belanda. Perbedaan utama dari ketiga kurun waktu tersebut terletak pada dimensi dasar yang menentukan pola sistem stratifikasi sosial, dimana pada masa masyarakat Jawa lama (tradisional) hanya dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu Raja (Pangeran), Bangeawan dan Petani (Kartono, 1995 : 5).

Dalam rumah tangga Keraton Kasunanan Surakarta sendiri terdapat stratifikasi yang dibagi menjadi tiga kelas sosial, diantaranya pertama *Sentana Dalem* atau Kerabat Raja penguasa yang digolongkan sebagai kelompok bangsawan dan Raja. Kedua, terdapat para *Abdi Dalem* yaitu para pegawai dan birokrat Raja. Ketiga, ada para *Kawula Dalem*, ialah masa atau mereka yang diperintah. Kedua kelas yang tersebut pertama dianggap sebagai kelas penguasa. Sedangkan kelas yang ketiga adalah kelas yang dikuasai. Dengan memperhitungkan ketiga kelas tersebut, orang dapat mengerti totalitas masyarakat swapraja di Jawa Tengah (Soejatno, 1974 : 79). Satu hal yang menarik dalam pola stratifikasi Keraton Kasunanan Surakarta adalah adanya perubahan posisi status Keraton secara politik yang sedemikian mendasar, serta kondisi kehidupan yang telah mengalami transformasi budaya dan globalisasi yang begitu besar, spirit doktrin keagungan Raja masih tertanam dan dihayati betul oleh sebagian besar para *Abdi Dalem*. Kemerosotan nama besar dan eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai pemegang kekuasaan tidak melunturkan keteguhan dan semangat *Abdi Dalem* untuk tetap mengabdikan pada Rajanya.

Pola hubungan "*kawulo-gusti*" (rakyat-raja), semangat pengabdian serta kesetiaan *kawulo* terhadap *gusti* tetap dihayati dan dijalani. Sikap dan keyakinan para *Abdi Dalem* tersebut seakan tidak tergoyahkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di dunia luar. Mereka tetap setia menjalani tugas-tugasnya di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan penuh pengabdian walaupun imbalan yang mereka terima sangat jauh dari memadai. Mereka tetap tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan keinginan Raja beserta keluarganya. Pada hakekatnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mengalami perubahan termasuk kehidupan di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yang menjadi menarik adalah adanya *Abdi Dalem* yang masih setia dengan perintah Raja dan keluarganya meskipun dengan segala keterbatasan terutama secara ekonomi dan juga kenyataan bahwa Kasunanan Surakarta sudah tidak memiliki kekuasaan politis dalam kehidupan masyarakat Surakarta.

Kajian Pustaka

Identitas Sosial

Identitas personal disusun oleh atribut-atribut yang lebih spesifik seperti cara-cara berhubungan dengan orang lain, karakteristik psikologis, kemampuan intelektual, selera pribadi, dan lain-lain. Ciri-ciri personal tersebut umumnya lebih merepresentasikan siapa diri individu sebenarnya, sehingga identitas personal berkontribusi lebih besar bagi terciptanya hubungan interpersonal yang intim dan tahan lama dengan individu lain daripada identitas-identitas yang lain (Ellemers dalam Afif, 2015: 14). Teori identitas sosial berasumsi bahwa individu-individu yang tergabung dalam kelompok senantiasa membutuhkan *self image* yang positif, terlebih lagi ketika dia sedang berhadapan dengan individu-individu dengan kelompok lain (Brown dalam Afif, 2015: 17). Bedanya dengan *self image* dengan identitas sosial adalah *self image* ini diperoleh dari keanggotaan individu dalam kelompok, sehingga ia merupakan representasi dari ciri-ciri kelompok. Identitas sosial individu akan menguat ketika dia mempersepsikan kelompoknya lebih baik dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain.

Menurut Turner dan Ororato, perbedaan antara identitas personal dan identitas sosial terletak pada proses terbentuknya kedua identitas tersebut. Sementara identitas personal terbentuk dari interaksi sosial antara satu individu dengan individu lainnya (*dyadic relationship*) antara 'Saya' dan 'Kamu'- dimana masing-masing pihak lebih menekankan ciri-ciri, atribut-atribut dan kepentingan subjektif mereka, maka identitas sosial terbentuk dengan cara yang sebaliknya, yaitu kepentingan

kelompoklah yang lebih diutamakan sehingga hubungan yang terbangun mengambil bentuk antara 'Kami' atau 'Kita' dengan 'Mereka' (Turner dan Onorato dalam Afif, 2015 : 14).

Dalam tulisannya Brewer (2001) menyebutkan ada 4 tipe identitas sosial individu; (1) Identitas sosial berbasis *person*, merefleksikan bagaimana karakteristik atau properti kelompok diinternalisasikan oleh anggota-anggota kelompok ke dalam konsep diri mereka. (2) Identitas sosial relasional, merefleksikan bagaimana identitas diri terbentuk melalui interaksi dengan orang lain namun dalam konteks hubungan antar kelompok. (3) Identitas sosial berbasis kelompok, merefleksikan identitas kelompok dalam pengertian yang lazim diterima dalam teori identitas sosial. (4) Identitas kolektif, merefleksikan proses dimana anggota-anggota kelompok tidak hanya berbagi atribut-atribut yang menggambarkan diri mereka tetapi juga terlibat dalam aksi-aksi sosial untuk mencitrakan identitas kelompok mereka serta bagaimana ia ditampilkan dan dipersepsikan oleh orang atau kelompok lain (Brewer dalam Afif, 2015 : 19).

Abdi Dalem

Abdi Dalem merupakan kelompok sosial yang bekerja atau mengabdikan pada seorang Raja. Tugas dari para *Abdi Dalem* adalah menjaga dan merawat seluruh kompleks Keraton baik berupa bangunan maupun budaya yang ada dan perkembangan di Keraton. Pada dasarnya tidak semua orang dapat menjadi *Abdi Dalem*. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang *Abdi Dalem* yaitu memiliki sopan santun, tanggung jawab dan mampu menguasai Bahasa Jawa dengan baik.

Menurut sebuah pustaka di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (*Sasoso Pustoko*) yang disebut dengan *Abdi Dalem* yaitu setiap orang (siapa saja) yang bekerja di Keraton atau yang mengabdikan kepada sang Raja "*kang sinebut Abdi Dalem yaiku pawongan sapa bae kang makarya ing keraton utowo ngabdikan marang ratu*". Lebih lanjut *Abdi Dalem* adalah siapa saja yang sanggup menjadi *abdinya* budaya Surakarta Hadiningrat serta ditetapkan dengan surat keputusan pemberian pangkat oleh Raja. *Abdi Dalem* Keraton digaji kurang lebih Rp.40.000,00 sampai Rp. 600.000,00 setiap bulannya. Namun gaji tersebut tidak dapat dipastikan diberikan setiap bulan. Dengan penghasilan yang sangat sedikit, *Abdi Dalem* Keraton masih setia dan masih selalu mengabdikan kepada Keraton dengan sepenuh hati. Para *Abdi Dalem* mempercayai bahwa sebagai manusia apabila tersedia mengabdikan kepada Keraton maka akan memperoleh anugerah, kebahagiaan dan ketenangan hidup dalam kehidupannya kelak (Purbosari, 2013 : 3).

Abdi Dalem Garap bekerja setiap hari Senin-Jumat di Keraton Surakarta Hadiningrat dan memiliki peran masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugas dari masing-masing golongan. Peran *Abdi Dalem Garap* tersebut terkait dengan pelestarian budaya yang ada di Keraton Surakarta Hadiningrat. Jumlah keseluruhan dari *Abdi Dalem* Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak dapat dipastikan. *Abdi Dalem Garap* jumlahnya dapat diketahui yakni berjumlah 518 orang. Dari jumlah *Abdi Dalem Garap* tersebut dibagi ke dalam sembilan departemen yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Tugas dan kewajiban *Abdi Dalem* Keraton seperti menjaga pusaka-pusaka yang dimiliki Keraton, membersihkan bagian-bagian ruangan Keraton, menyiapkan sesajen setiap harinya, meronce bunga yang digunakan untuk keperluan Keraton, menjadi pawang hujan dan sebagainya (Purbosari, 2013: 2).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. *Abdi Dalem Garap* menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Penggunaan studi kasus sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif ini memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah dapat menyajikan pandangan dari *Abdi Dalem Garap* dalam menjalani kehidupannya untuk selamanya mengabdikan kepada Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pendekatan studi kasus ini menjadi sarana efektif untuk

menunjukkan hubungan antara peneliti dengan *Abdi Dalem Garap* Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata atau tindakan dari *Abdi Dalem Garap*. Selain dari itu semuanya merupakan data tambahan, seperti dokumentasi berupa sumber data tertulis, foto dan data statistik yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan *Abdi Dalem Garap*.

Dalam penelitian ini, pengambilan sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui sosiogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau menunjukkan hubungan antar *Abdi Dalem Garap* atau antar kasus terkait identitas sosial, dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan yang lainnya, dengan menggunakan metode ini peneliti mampu menjelaskan pola-pola konstruksi identitas sosial *Abdi Dalem Garap* dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), kegiatan observasi ini peneliti lakukan dengan cara mengamati dan mendengar (*listening*) tentang perilaku *Abdi Dalem Garap* tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis. Selanjutnya wawancara mendalam (*in-depth interview*), peneliti menggunakan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) dalam menggali data secara langsung kepada *Abdi Dalem Garap* Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Peneliti mengajukan pertanyaan secara terbuka dan tidak terstruktur sehingga informan tetap merasa nyaman karena kegiatan wawancara ini dilakukan layaknya orang dengan orang melakukan percakapan sehari-hari. Sehingga informasi dan data yang muncul dari informan keluar secara natural, jujur dan apa adanya. Langkah terakhir adalah dokumentasi yang dilakukan dengan cara melihat, mencatat, mengambil foto (gambar), merekam video maupun merekam suara percakapan (*recording*) selama kegiatan observasi, kegiatan wawancara berlangsung hingga terselesainya proses pengumpulan data selesai dilakukan.

Dalam penelitian ini, validitas data yang diperoleh melalui model triangulasi sumber dan menggunakan bahan referensi guna mendukung data yang telah terkumpul agar dapat diuji kebenarannya. Triangulasi sumber dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat informatif mengenai konstruksi identitas sosial *Abdi Dalem Garap* Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yang diperoleh langsung dari *Abdi Dalem Garap* Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Analisis data yang sudah diperoleh di lapangan dari keterangan-keterangan informan yaitu *Abdi Dalem*, kemudian dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis data kualitatif, data yang muncul berupa gagasan-gagasan informan. Proses analisis data merupakan proses menyeleksi data reduksi yang dilakukan.

Proses analisa data sekaligus menyeleksi data, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyederhanakan keterangan yang ada. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data diantara reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan ini ditetapkan ke dalam penelitian ini, berarti data dikumpulkan dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian direduksi dengan cara menyederhanakan dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan. Setelah melalui proses reduksi, data yang sudah terseleksi peneliti sajikan dan analisis dalam penyajian data. Data yang terakhir setelah data tersusun rapi dan dianalisis dengan benar kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

***Abdi Dalem Garap* di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat**

Menurut sebuah pustaka di Keraton (Sasono Pustoko) yang disebut sebagai *Abdi Dalem* yaitu setiap orang (siapa saja) yang bekerja di Keraton atau yang mengabdikan kepada Raja.

“kang sinebut Abdi Dalem iku pawongan sopo bae kang makaryo ing kraton, utawa ngabdikan marang Ratu”.

Lebih lanjut *Abdi Dalem* adalah siapa saja yang sanggup menjadi abdinnya budaya Surakarta Hadiningrat serta ditetapkan dengan surat keputusan pemberian pangkat oleh Raja, dimana yang bekerja ada sangkut pautnya dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Widodo dkk (2001) menyatakan bahwa *Abdi Dalem* adalah punggawa Keraton, *priyayi bodining Ratu* (priyayi sebagai bawahan Raja), sedangkan Houben (2002) berpendapat bahwa *Abdi Dalem* adalah pembantu Kerajaan atau pembantu Istana. Pada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat *Abdi Dalem Garap* merupakan *Abdi Dalem* yang terus aktif di lingkungan Keraton.

Identitas *Abdi Dalem* Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Identitas merupakan perasaan memiliki yang muncul dari persamaan dengan sebagian orang dan dari perbedaan dengan orang lain. Identitas adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, kelompoknya serta lingkungannya. Secara umum, identitas sebuah komunitas, atau kelompok berasal dari individu-individu yang ada di dalamnya. Identitas juga dapat membentuk orang lain, artinya orang lain dapat terbentuk oleh identitas yang telah ada dalam suatu kelompok secara sosial maupun kultural. Erving Goffman (1959) menyebutkan bahwa *“a performance can be defined as the sum of activity of a given participant which seeks to influence the audience in any way”.*

Menurutnya setiap individu pada dasarnya mereka melakukan konstruksi identitas dirinya dengan cara menampilkan diri. Penampilan diri inilah yang menjadi keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial tentang identitasnya ini. Identitas juga merupakan suatu esensi yang dapat dimaknai melalui selera kepercayaan, sikap dan gaya hidup. Dengan demikian identitas dapat dimaknai sebagai penanda bahwa kita berbeda atau sama dengan yang lainnya. Identitas bukan merupakan sesuatu yang tetap dan statis, tetapi ia merupakan sesuatu yang tumbuh dan berkembang.

Di dalam mengkaji proses pembentukan identitas sosial *Abdi Dalem Garap* Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terdapat tiga konsep untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya identitas sosial dalam diri *Abdi Dalem Garap* sehingga melekat dan menjadi pembeda antara mereka dengan anggota masyarakat lainnya. Ketiga konsep tersebut yaitu *the individual order*, *the interaction order*, dan *the institutional order*. Berikut ini merupakan analisis proses pembentukan identitas sosial berdasarkan tiga konsep tersebut :

1. *The Individual Order*

Konsep tersebut menunjukkan identitas individu yang melekat pada masing-masing individu dan perubahannya dipengaruhi secara psikologis. Kaitannya dalam penelitian ini, interaksi dan komunikasi yang terjalin antara pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan *Abdi Dalem Garap* telah sedikit banyak merubah kehidupan *Abdi Dalem Garap* itu sendiri. *Abdi Dalem Garap* dalam penuturan informan menjelaskan bahwa pada awalnya bukan bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat melainkan berasal dari anggota masyarakat biasa. Dalam pemahaman masyarakat Jawa, sosok Raja dipandang tidak hanya sebatas sebagai pemimpin tetapi juga merupakan pencerminan sosok Tuhan. Sehingga pengabdian yang dilakukan oleh *Abdi Dalem Garap* tidak berorientasi pada kepentingan materi tetapi lebih kepada pemenuhan akan kebutuhan spiritual. *Abdi Dalem Garap* percaya bahwa jika pengabdian tersebut dijalani dengan penuh

keikhlasan maka, mereka akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan bathin yang tidak mereka dapatkan ketika bekerja pada umumnya. Di samping itu, pengabdian yang mereka lakukan secara tidak langsung adalah wujud mereka dalam beribadah kepada Tuhan.

2. *The Interaction Order*

Konsep ini dipahami sebagai wujud interaksi diantara individu yang memiliki kesamaan kepentingan dan lantas memunculkan identitas pada hubungan tersebut. Para informan meyakini bahwa sesama *Abdi Dalem Garap* harus menjunjung nilai nilai kerukunan. Sebab, pada awalnya tujuan mengabdikan adalah untuk mencari kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan bathin. Sehingga jika terdapat konflik dengan sesama *Abdi Dalem Garap* maka, hal tersebut sangat kontradiktif dengan tujuan mengabdikan yang sebenarnya. Sebaliknya, baik di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat maupun di luar lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sesama *Abdi Dalem Garap* tetap menjaga hubungan. Peran *Abdi Dalem Garap* yang juga menjadi ujung tombak dalam pelestarian budaya, menuntut mereka agar selalu menjunjung tinggi nilai nilai budaya khususnya yang berasal dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Oleh karena itu, setiap sikap yang mereka tunjukkan, selalu menjadi ciri identitas dari *Abdi Dalem Garap* seperti bersikap sopan, maupun menggunakan bahasa Jawa yang baik dengan sesama *Abdi Dalem Garap*.

3. *The Institutional Order*

Konsep ini menunjukkan terbentuknya identitas yang terorganisir atau diakui secara kolektif dan menjadi *ways of doing thing* bagi yang menerimanya. Institusi yang dimaksud oleh Jenkins di atas merupakan apa yang biasa disebut dalam literatur-literatur sosiologi adalah organisasi. Pada penelitian ini, organisasi tersebut adalah golongan *Abdi Dalem Garap*. Golongan tersebut masing-masing memiliki berbagai macam peraturan yang sangat mengikat terhadap para *Abdi Dalem* yang ada di dalamnya sehingga sistem yang berlaku adalah sistem kerajaan. Golongan tersebut memiliki suatu budaya organisasi yang kuat sehingga memiliki "*force*" kepada anggotanya untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada pada organisasi. *Abdi Dalem Garap* sebagaimana dalam fungsinya untuk menjalankan sistem administrasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki beberapa aturan yaitu bersikap sopan santun, baik sesama *Abdi Dalem Garap*, keluarga Raja, maupun masyarakat umum yang menjadi pengunjung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. *Abdi Dalem Garap* dituntut memiliki kemampuan berbahasa Jawa yang baik khususnya krama inggil yang menjadi sarana berkomunikasi baik dengan sesama *Abdi Dalem Garap* maupun keluarga Raja. Dalam kesehariannya, *Abdi Dalem Garap* juga mengenakan pakaian adat maupun mengenakan *samir* ketika bertugas. *Abdi Dalem Garap* juga diwajibkan memiliki gelar atau pangkat. Gelar atau pangkat yang disematkan pada *Abdi Dalem Garap* secara tidak langsung menunjukkan suatu jenis pekerjaan atau tugas yang ia emban, sehingga untuk mengetahui tugas mendasar dari seorang *Abdi Dalem Garap* dapat dilihat dari nama gelar yang diberikan. *Abdi Dalem Garap* berfungsi menjalankan administrasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Kesimpulan

Abdi Dalem Garap memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima sekaligus dilaksanakan selama menjadi *Abdi Dalem Garap*. *Abdi Dalem Garap* memiliki beberapa hak salah satunya menerima gelar. Gelar bagi *Abdi Dalem Garap* memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai identitas yang membedakannya dengan anggota masyarakat lainnya sekaligus sebagai identitas yang menunjukkan pekerjaan atau tanggung jawab yang sedang ia lakukan. Dengan memiliki gelar, maka *Abdi Dalem Garap* secara penuh menjadi bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setiap *Abdi Dalem Garap* mengalami proses kenaikan pangkat setiap 3 atau 4 tahun sekali. Sifat dari kenaikan pangkat tersebut adalah tidak wajib. Artinya, seorang *Abdi Dalem Garap* bebas untuk mengajukan atau menagguhkan kenaikan pangkat tersebut jika yang bersangkutan belum siap untuk menerima gelar

tersebut. Sedangkan hak lainnya adalah menerima *tulah* dan *pepancen*. *Tulah* diartikan sebagai pemberian dari Raja atau keluarga Raja yang sifatnya personal. Sehingga tidak setiap *Abdi Dalem Garap* menerimanya. Sedangkan *pepancen* adalah upah yang diberikan oleh pihak Keraton kepada *Abdi Dalem* sesuai dengan pangkat dan lama pengabdian. Sedangkan kewajiban *Abdi Dalem Garap* adalah mentaati semua aturan baik tertulis maupun tidak tertulis seperti memakai pakaian adat, memakai samir, menggunakan bahasa Jawa dengan baik serta menjunjung tinggi loyalitas terhadap Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Wujud pengabdian *Abdi Dalem* adalah berupa munculnya sikap sabar, ikhlas dan *nrimo* yang diimplementasikan dalam berbagai hal. *Abdi Dalem* meyakini bahwa Raja merupakan media atau sarana penghubung antara (alam semesta, alam supranatural) dengan mikrokosmos (alam manusia, dunia nyata) yang menjadi tempat tinggal manusia. Oleh sebab itu, jika seorang Raja mampu menjaga keselarasan antara kedua dunia tersebut, maka akan tercipta kerajaan yang adil, tentram, makmur, bertahan lama, serta jauh dari gangguan hal-hal yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

- Afif, Afthonul. 2015. *Teori Identitas Sosial*. Yogyakarta : UI Press.
- Hardianti, dkk. 2005. Studi Perkembangan Dan Pelestarian Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta. *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur, Volume. 33, Nomor 1*.
- Jenkins, Richard. 2008. *"Social Identity"*. Routledge
- Kartono, Drajat Tri. 1995. *Distribusi Pelayanan Umum Di Kota: Analisa Statifikasi*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Purbosari, Sekar. 2013. *Kesejahteraan Subjektif Pada Abdi Dalem Keraton Kasunanan Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Vape Sebagai Identitas Baru Bagi Vapers

Gunawan, Magister Sosiologi, FISIP, UNS. panegunawan76@yahoo.co.id

Dr. Argyo Demartoto, M.Si, Dosen Sosiologi, FISIP, UNS. Argyodemartoto_fisip@staff.uns.ac.id

Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., DEA, Dosen Sosiologi, FISIP UNS. a.zuber@staff.uns.ac.id

Abstrak

Rokok elektrik atau *Vape* adalah sebuah varian baru dalam berkembangannya rokok saat ini. *Vape* dimaksudkan mampu membantu para pecandu rokok (rokok tembakau) untuk mulai mengurangi, berhenti serta bebas dari ketergantungan mengkonsumsi rokok. Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa para penikmat rokok elektrik atau biasa disebut *Vapers*, saat ini justru menjadikan rokok elektrik tersebut sebagai sebuah identitas baru bagi mereka. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat bagaimana *Vapers* memaknai keberadaan *Vape* itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan wawancara, serta *Purposive sampling* sebagai metode penentuan informannya. Informan dalam penelitian ini adalah *vapers* yang ada di Kota Yogyakarta. Teori yang dipakai adalah teori identitas sosial dari Jhon Turner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Vape* telah menjadi identitas baru bagi para *Vapers* di Kota Yogyakarta. Bagaimana kemudian *Vapers* menunjukkan identitasnya dengan berdasarkan jenis *Vape* yang dikonsumsinya. Hasil analisis yang terlihat adalah bahwa ketika *Vapers* mengkonsumsi *Vape* yang mahal dan keren, maka itu akan semakin menunjukkan kelas sosialnya di mata para *Vapers* lainnya. Selain itu *Vape* juga sudah menjadi gaya hidup bagi *Vapers* di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Gaya Hidup, Identitas, *Vape*, *Vapers*

Pendahuluan

Bagi sebagian orang rokok hanya sekedar benda yang dihisap dan menjadi sesuatu yang tidak memiliki keuntungan, namun hal itu berbeda bagi seorang perokok aktif. Bagi mereka yang merupakan perokok aktif, rokok menjadi suatu hal yang setara dengan hiburan maupun pelepas stress. Bahkan rokok saat ini juga menjadi sebuah barang konsumsi wajib bagi sebagian masyarakat Indonesia. Saat ini dari 260 juta lebih penduduk Indonesia, 36% diantaranya merupakan konsumen rokok (BPS 2017). Seiring dengan kemajuan zaman, rokok juga mengalami perkembangan. Dahulu orang hanya mengenal rokok sebagai sebuah barang yang cara mengkonsumsinya yaitu dengan membakar salah satu ujungnya, dan dihisap pada ujung yang lainnya. Namun saat ini rokok telah mengalami perkembangan dengan adanya rokok elektrik (*e-cigarette*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Vape*. *Vape* sekarang sedang memiliki daya tarik tersendiri di Indonesia. Banyak anak muda yang berpindah dari merokok kretek menjadi rokok elektrik. Kebanyakan dari kalangan usia muda yang menggunakan rokok elektrik, dikarenakan rokok elektrik terbilang sedang naik daun atau menjadi sebuah tren yang memang menjadi kebanggaan tersendiri ketika mengkonsumsinya (Putri 2016).

Vape sebenarnya menjadi sebuah angin segar bagi sebagian besar pecandu rokok (rokok tembakau). *Vape* diharapkan mampu membebaskan para pecandu rokok tersebut dari ketergantungan mereka terhadap rokok. Namun yang terjadi justru berbeda, tidak sedikit para pengguna *Vape* yang justru menjadikan rokok elektrik tersebut sebagai sebuah symbol untuk menunjukkan identitas mereka di tengah-tengah lingkungannya (Istiqomah 2016). *Vapers* (sebutan bagi pengguna *vape*) menganggap bahwa dengan penggunaan *vape* yang semakin keren, akan semakin menempatkan kelas sosial mereka di atas para *vapers* lainnya. *Vape* yang sebenarnya hanya sebuah barang konsumsi biasa, akhirnya berubah menjadi sebuah identitas yang kemudian turut menentukan posisi penggunanya di

tengah kelompoknya (Damayanti 2016). Bahkan tidak sedikit pula yang akhirnya menjadikan *vape* sebagai sebuah gaya hidup baru, yang kemudian diusahakan untuk dapat terpenuhi (Istiqomah 2016). Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian penelitian ini dilakukan, yaitu untuk melihat bagaimana kemudian *vapers* di Kota Yogyakarta memaknai keberadaan dari *vape* atau rokok elektrik tersebut.

Kajian Pustaka

Rokok Elektrik (*Vape*)

Rokok elektrik atau yang biasa dikenal dengan istilah *Vape*, saat ini menjadi sebuah alternatif atau pengganti dari produk rokok tembakau. *Vape* adalah perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis nikotin hirup yang dapat memberikan efek sama seperti merokok konvensional (Damayanti 2016). Rokok elektrik ini mampu memberikan sensasi fisik yang hampir sama dengan sensasi yang dihasilkan oleh asap rokok tembakau. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa rokok elektrik adalah solusi atas berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok kretek. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2017), Rokok elektrik merupakan sebuah produk yang dirancang untuk dapat memberikan semacam nikotin atau zat lain ke penggunaannya dalam bentuk uap, yang terdiri dari tempat isi ulang, baterai untuk mengoperasikan bagian pemanas, serta alat penyemprot yang ketika dipanaskan mengubah cairan menjadi uap.

Vape memiliki sejarah yang cukup panjang dalam proses perkembangannya di dunia. *Vape* pertama kali ditemukan atau diciptakan oleh Hon Lik di Negara China (Pradana 2017). Hon Lik kemudian mengungkapkan bahwa ide untuk menciptakan rokok elektrik bermula saat ia bermimpi telah mati dan terdampar di pulau indah dan ia melihat air laut mengeluarkan uap yang wangi. Sejak saat itu Hon Lik berusaha keras untuk dapat mewujudkan mimpinya menciptakan inovasi baru dari rokok agar dapat menjadi solusi bagi penyakit yang ditimbulkan oleh rokok tembakau (V-Premiere 2017). *Vape* secara bentuk dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *Pen*, *Portable*, *Dekstop* (Veratamala 2017). Jenis *Pen* memiliki ukuran yang paling kecil dibanding yang lainnya, sehingga sangat mudah untuk dibawa. Kemudian jenis *Portable* memiliki bentuk yang relative lebih besar namun masih tetap bisa untuk dibawa (dimasukkan kedalam saku). Namun jenis *Dekstop*, memiliki bentuk yang cukup besar, sehingga tidak dimungkinkan untuk dibawa-bawa.

Identitas Sosial

Identitas sosial merupakan salah satu bagian dari konsep diri atau individu yang berasal dari akibat adanya persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial (Turner, Oakes dan Penny 1986). Identitas sosial adalah sebuah rasa keterkaitan, peduli, serta rasa bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai jenis keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang cukup dekat, mengetahui atau mempunyai berbagai minat (Hogg dan Abram 2004). Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa identitas sosial adalah sebuah bagian dari konsep diri seseorang yang bersumber dari pengetahuan atas keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial tertentu, yang mana kemudian di dalamnya disertai dengan nilai-nilai, tingkat keterlibatan, emosi, rasa peduli serta rasa bangga terhadap keanggotaannya dalam kelompok tersebut.

Dalam teori identitas sosial seseorang berupaya untuk kemudian mengkategorikan diri dan orang lain dalam suatu kelompok untuk mendapatkan citra atau label. Teori identitas sosial dijelaskan sebagai sebuah teori yang memberikan kemungkinan perbedaan perilaku antar individu atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan status kelompok yang dipersepsikan akibat adanya perbedaan status tersebut (Tajfel dan Turner 1979). Identitas diri sebenarnya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial seseorang dalam konteks komunitasnya. Selain sebagai

seorang makhluk individual yang membangun identitas dirinya berdasarkan konsep atau gambaran dan cita-cita diri, seorang manusia sekaligus juga merupakan makhluk sosial yang dalam membangun identitas dirinya tidak dapat melepaskan diri dari norma yang mengikat semua warga masyarakat tempat ia hidup dan peran sosial yang diembannya dalam masyarakat tersebut (Sumampouw 2018).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung serta bertatap muka dengan para informan. Lokasi penelitian ini berada di Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengguna rokok elektrik di Kota Yogyakarta. Teknik penentuan informannya adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian (Denzin and Lincoln 1997). Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap tujuh orang informan yang memiliki pengetahuan tentang rokok elektrik, dan mereka juga merupakan konsumen dari rokok elektrik tersebut. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, yang diawali dengan membuat transkrip wawancara, lalu membuat koding. Hal itu perlu dilakukan agar peneliti dapat memilah dan memilih data-data yang dianggap perlu untuk penulisan laporan.

Hasil Penelitian

Budaya mengonsumsi rokok yang selama ini kerap menyasar para anak muda, lambat laun akhirnya mulai berubah. Hal tersebut bukan dikarenakan persoalan rasa takut terhadap dampak negatif terhadap kesehatan, melainkan bagi sebagian dari mereka untuk mengikuti perkembangan zaman dan tertarik untuk kemudian melakukan inovasi dalam hal merokok, yaitu dengan menggunakan rokok elektrik atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan *vape*. Fenomena transisi budaya ini juga terjadi di kota yang mendapat sebutan kota pelajar, yaitu Yogyakarta. Kalangan anak muda yang tinggal di kota pelajar ini mulai banyak yang kemudian menikmati *vape*, bahkan sebagian dari mereka sudah ada yang mencoba untuk berhenti menggunakan rokok kretek. *Vape* pertama kali masuk ke Indonesia sekitar tahun 2013 dan kemudian mulai banyak dikonsumsi pada awal pertengahan 2014, dan menjadi ramai di Jogja usai ada kampanye 'Indonesia Support Vaping' (brilio.net 2017). *Vape* kemudian menjadi populer di kalangan anak-anak muda karena bentuknya yang trendi dan bisa menghasilkan banyak asap yang bagi kalangan *vapers* mereka menyebutnya sebagai uap.

Vape telah menjadi sebuah fenomena baru di kalangan para pecinta rokok. Bahkan tidak sedikit konsumen rokok tembakau yang akhirnya mengonsumsi *vape*. Salah satu alasan awal yang menjadi penyebabnya adalah bahwa rokok elektrik dianggap lebih hemat dari rokok tembakau. Di sisi yang lain *vape* juga dianggap sebagai solusi atas polusi yang diakibatkan oleh rokok tembakau, hal itu dikarenakan yang keluar dari *vape* bukanlah asap, melainkan uap. Namun demikian seorang *vapers* tidak serta merta meninggalkan rokok tembakau. Sebenarnya kedua jenis rokok tersebut masih dikonsumsi, akan tetapi ada waktu dan juga moment yang membedakannya. Para *vapers* kerap kita jumpai di perkumpulan-perkumpulan *vapers* di tempat-tempat tongkrongan, seperti café maupun warung kopi. Mereka berkumpul dengan *vapers* lain dan kemudian saling menceritakan atau membanggakan "inovasi" dari *vape* mereka. Ketika perkumpulan sudah selesai dan mereka kembali ke rumah atau kost, mereka kerap kembali menghisap rokok tembakau. Salah seorang *vaper* (Mas AS) mengatakan bahwa ia hanya menggunakan rokok elektrik tersebut kalau berkumpul dengan teman-teman sesama *vapers*.

....Nggak mas, nek aku jarang-jarang sih makenya. Mung kalau mau ketemuan sama temen-temen aja, kalau gk lagi bareng-bareng yak au ngerokok biasa. Rada eman mas kalau lagi sendiri juga ngevape....

Tidak sedikit sebenarnya pengguna rokok elektrik yang memiliki kesamaan dengan mas AS. Informan lain (Mas SA) mengatakan bahwa awalnya ia mengkonsumsi rokok elektrik tersebut dikarenakan adanya keinginan untuk coba-coba terhadap jenis rokok modern tersebut. Namun dalam perjalanannya ternyata ada “gengsi” yang juga menjadi salah satu pertimbangan ketika mengkonsumsi rokok elektrik tersebut.

Awale dulu sekitar 2 tahun yang lalu saya coba-coba pakai vape, lama-lama kok enak, trus saya ketagihan, malah makin banyak temen juga, tapi kalo ketemu atau lagi ngumpul, suka nunjukin vapenya masing-masing, suka saling cerita tentang vape yang dipakai, mulai dari harganya, rakitannya, sama liquidnya. Nah sejak itu saya juga ikut-ikut, akhirnya jadi boros (informan tersenyum-senyum).

Sebagian besar pengguna rokok elektrik yang ada di Jogja dulunya merupakan perokok aktif (rokok kretek). Namun saat ini mereka juga mengkonsumsi rokok elektrik. Para *vapers* mengonsumsi *vape* hampir sama seperti ketika mereka mengkonsumsi rokok kretek, bercengkerama di kafe ataupun warung kopi dengan sama-sama menghisap rokok elektrik. Beberapa kalangan anak muda mengaku suka dengan rokok elektrik ini oleh karena mampu menghasilkan uap yang banyak, ketimbang asap rokok kretek.

Pembahasan

Perilaku mengkonsumsi rokok sebenarnya telah menjadi perilaku yang “membudaya” di republik ini. Rokok memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia, mulai dari rokok tembakau yang sudah puluhan tahun lalu diakui keberadaannya, hingga rokok elektrik yang mulai eksis dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Berbeda dengan rokok tembakau, rokok elektrik atau *vape* hanya menasar penikmat rokok di kawasan perkotaan. Hal itu dikarenakan ketersediaan *vape* yang memang lebih dipasarkan di daerah perkotaan daripada pedesaan. Dunia perkotaan tentu sangat erat kaitanya dengan gaya hidup yang modern. Bahkan masyarakat perkotaan kerap menjadikan sesuatu yang lagi trenn menjadi sebuah gaya hidup, sebagai upaya untuk menciptakan sebuah identitas baru bagi mereka. Senada dengan hal tersebut, *Vape* awal kehadirannya adalah menjadi sebuah sarana membantu para pecandu rokok tembakau untuk terlepas dari ketergantungan atau kecanduan mereka terhadap rokok. Namun yang terjadi justru penggunaan *vape* tersebut menjadi trend di kalangan anak muda. Banyaknya bermunculan berbagai cafe dan toko *vape* menunjang eksistensi *vape* itu sendiri. Bahkan bagi sebagian anak muda, memakai *vape* menjadi gaya hidup dan parameter disebut anak gaul. Umumnya para pengguna rokok elektrik adalah mereka yang telah memiliki rasa candu terhadap rokok tembakau.

Eksistensi dari identitas diri atau identitas sosial sebenarnya sangat dipengaruhi oleh media. Bagaimana kemudian media menggambarkan sebuah barang atau produk sedemikian rupa untuk kemudian menarik minat dari para konsumen (Mahameruaji 2014). Artinya adalah bahwa konstruk yang dibuat oleh media terhadap sebuah produk ternyata menjadikan barang tersebut menjadi memiliki dua nilai, yaitu nilai guna dan nilai symbol. Begitu halnya dengan *vape*, bagaimana kemudian cintra yang melekat pada rokok elektrik tersebut adalah sebuah barang konsumsi yang mampu memberikan 2 kegunaan bagi penggunanya. Yaitu *pertama*, dapat memberikan kepuasan ketika mengkonsumsinya layaknya mengkonsumsi rokok pada umumnya, *kedua*, dapat menunjukkan identitas dan kelas sosial penggunanya ketika mampu mengkonsumsi jenis *vape* yang “tinggi”

(wawancara dengan Mas MN). Oleh karena alasan yang kedua tersebut, maka tidak heran jika kemudian para *vapers* akhirnya berlomba-lomba untuk memiliki dan mendesign rokok elektrik mereka, menjadi yang terbaik diantara *vapers* lainnya. Hal itu dilakukan adalah untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman yang lain, sebagai sebuah identitas yang melekat pada dirinya.

Pengakuan dari orang lain menjadi salah satu tujuan dari upaya seseorang untuk menunjukkan identitas diri atau identitas sosialnya. Setiap orang berupaya untuk menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah lingkungannya. Penikmat rokok tembakau misalnya, mereka juga memiliki rasa gengsi tertentu dalam mengkonsumsi rokoknya, hal itu dapat kita lihat dari jenis rokok yang mereka konsumsi. Jenis dari sebuah rokok tertentu memiliki kelas tersendiri dalam lingkungan perokok, yang paling menentukan adalah tingkat kelangkaan maupun harga dari rokok itu sendiri (Selna 2017). Tidak banyak perokok yang menggunakan rokok jenis *camel* misalnya, selain dikarenakan harganya yang mungkin mahal, juga turut dipengaruhi oleh ketidaktersediaan jenis rokok tersebut di semua pedagang rokok. Pilihannya tidak sekedar dipengaruhi oleh harga, akan tetapi juga bicara rasa, kualitas, serta lingkungan yang juga turut mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi jenis rokok tertentu.

Identitas sebenarnya merupakan sesuatu yang bersifat cair, dalam artian dapat berubah-ubah (Sari 2018). Maksudnya adalah bahwa situasi dan kondisi dari sebuah lingkungan turut mempengaruhi identitas seseorang. Identitas menjadi sesuatu yang penting bagi setiap orang untuk menunjukkan keberadaannya dalam suatu kelompok tertentu. Selain itu, keberadaan media sosial atau media massa juga sangat mempengaruhi dalam proses pembentukan identitas seseorang (Sumampouw 2018). Begitu halnya dengan rokok elektrik atau *vape*, bagaimana kemudian citra yang dimuat oleh media tentang *vape* tersebut, telah menjadikannya sebagai sebuah tren yang harus dimiliki oleh anak muda untuk terus mengikuti perkembangan zaman (Lazuardi 2017). Konsumsi *vape* yang dilakukan oleh *vapers* di Kota Yogyakarta, telah menjadi sebuah gaya hidup bagi mereka. Di mana konsumsi tidak lagi terbatas pada nilai guna, melainkan juga symbol yang ada pada barang itu sendiri (Lazuardi 2017). Hal itu yang kemudian menjadikan *vape* menjadi sebuah identitas baru bagi mereka. Bagaimana kemudian kelas sosial mereka akan semakin terlihat dari jenis *vape* yang digunakan ketika sedang berkumpul dengan kelompoknya.

Kesimpulan

Vape awal kehadirannya adalah sebuah sarana membantu para pecandu rokok tembakau untuk terlepas dari ketergantungan atau kecanduan terhadap rokok. Namun yang terjadi justru penggunaan *vape* tersebut menjadi trend di kalangan anak muda. Bahkan bagi sebagian anak muda, memakai *vape* menjadi gaya hidup dan parameter disebut anak gaul. *Vape* dikonsumsi tidak hanya sekedar pada barangnya saja, melainkan juga symbol yang ada pada barang tersebut. Konsumsi symbol yang dilakukan tersebut adalah untuk menentukan posisi kelas sosial mereka di tengah-tengah kelompoknya. Para *vapers* akan merasa hebat atau keren, bilamana *vape* yang mereka konsumsi merupakan *vape* dengan jenis terbaik, baik itu dari segi racikan maupun alat-alatnya. Inilah yang kemudian menjadi alasan utama rokok elektrik atau *vape* akhirnya menjadi sebuah identitas baru bagi para penggunanya. Para *vapers* kerap kita jumpai di perkumpulan-perkumpulan vapers di tempat-tempat tongkrongan, seperti café maupun warung kopi. Mereka berkumpul dengan *vapers* lain dan kemudian saling menceritakan atau membanggakan “inovasi” dari *vape* mereka. Ketika perkumpulan sudah selesai dan mereka kembali ke rumah atau kost, mereka kerap kembali menghisap rokok tembakau.

Daftar Pustaka

- Damayanti, Apsari. 2016. Penggunaan Rokok Elektronik Di Komunitas Personal Vaporizer Surabaya. *Jurnal Berkala Epidemiologi* 4(2):250-261.
- Denzin, N., K. Lincoln, Y., S. 1997. *Handbook Of Qualitative Research*. . Amerika Serikat: Sage Publication.
- Hogg, Michael, A. Dominic, Abram. 2004. *The Social Identity Perspective: Intergroup Relations, Self-Conception, and Small Groups*. Amerika Serikat: Sage Publication. Diunduh pada 12 November 2018 (https://www.researchgate.net/publication/44279493_The_Social_Identity_Perspective)
- Istiqomah, Delima Rahayu. 2016. Gaya Hidup Komunitas Rokok Elektrik Semarang Vaper Corner. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4(2):1-10.
- Lazuardi, Aditya Iqbal. 2017. *Gaya Hidup Penggunaan Vape (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Universitas Airlangga Kampus B)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Lorensia, Findry Rafsanjani Herwansyah, dan Ananta Yudianto. 2017. Persepsi, Efektifitas Dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (E-Cigarette) Oleh Perokok Aktif Sebagai Terapi Dalam Smoking Cessation: Mixed Methods Dengan Pendekatan Studi Kuantitatif Dan Kualitatif. *Journal Of Tropical Pharmacy And Chemistry* 4(2). Diunduh pada 12 November 2018 (https://www.researchgate.net/publication/322207406_Persepsi_Efektifitas_Dan_Keamanan_Penggunaan_Rokok_Elektrik_ECigarette_Oleh_Perokok_Aktif_Sebagai_Terapi_Dalam_Smoking_Cessation_Mixed_Methods_Dengan_Pendekatan_Studi_Kuantitatif_Dan_Kualitatif)
- Mahameruaji, Jimi N. 2014. Fenomena Konstruksi Identitas Pada Foto Pre-Wedding. *Jurnal Kajian Komunikasi* 2(1):44-52
- Pradana, NG. 2018. *Perancangan Media Komunikasi Visual Tobato Vapor untuk Meningkatkan Daya Tarik Vaporizer Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Mercu Buwana.
- Putri, Mustika. 2016. *Selera Kaum Muda dalam Konsumsi Rokok Elektrik (Studi Kuantitatif di Kalangan Mahasiswa Fisipol UGM Angkatan 2013)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sari, Inez Kartika. 2018. *Transformasi Identitas Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Studi Deskriptif Transformasi Identitas Sosial TKI Pasca Migrasi di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Karangmlang, Kabupaten Sragen)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Selna. Adesiyani. 2017. *Konstruksi Identitas Diri Mahasiswi Perokok Dalam Membangun Hubungan Dengan Lingkungan Sosial (Studi Kasus pada Mahasiswi Perokok S-1 Non Reguler Ilmu Komunikasi Angkatan 2015 Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sumampouw. N.S.A. 2018. *Menjadi Manado: torang samua basudara, sabla aer, dan pembentukan identitas sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tajfel, H., Turner, J., C. 1986. The social identity theory of intergroup behaviour. Dalam S. Worchel and W. G. Austin. *Psychology of Intergroup Relations*. Chicago, IL: Nelson-Hall. hlm. 7-24.
- Tanjung, Agib. 2017. *Mengamati fenomena Vape dan Kretek, ketika gaya hidup 'melawan' budaya*. Diunduh pada 24 November 2017 (<https://www.brilio.net/serius/mengamati-fenomena-vape-dan-kretek-ketika-gaya-hidup-melawan-budaya-1704229.html>)
- Turner, J., C. Penelope, J. Oakes and Penny. 1986. The significance of the social identity concept for social psychology with reference to individualism, interactionism and social influence. *British Journal of Social Psychology*. 25 (3): 237-252.

- Vape Terbaik, 2017. *Sejarah Vape Pertama Kali Ditemukan di Dunia*. Diunduh pada 23 November 2018. (<http://vapeterbaik.com/sejarah-vape-didunia/>)
- Veratamala, Arianda. 2017. *3 Jenis Vape (Rokok Elektrik), Mana yang Lebih Baik?*. Diunduh pada 12 November 2018 (<https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/berbagai-jenis-vape-rokok-elektrik/>)

Pemuda Dan Gerakan Sosial Budiman Sujatmiko Dalam Bayang-Bayang Partai Rakyat Dekokrat (PRD)

A. Zahid, *Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Sosial, IAIN Kediri, azahidwaris19@gmail.com*
Muhammad Kamalurrozzak Jauharuddin, *Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Sosial, IAIN Kediri, muhammadkemal1998@gmail.com*

Abstrak

Kata pemuda sudah menjadi saksi bisu perubahan gerakan dalam sektor yang sangat sentral, dari ekonomi, agama, sosial bahkan politik. Salah satu *nubuat* yang bisa kita ingat, sumpah pemuda sebagai sentral semangat kepemudaan. Tetapi di jaman orde lama, sosok Budiman Sujatmiko tentu menjadi salah satu *underdog* perubahan arus perpolitikan bangsa. Pemuda yang banyak menjadi tumbal politik dari yang terbunuh hingga yang sengaja dihilangkan adalah salah satu bukti kecil kerasnya politik kekuasaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, dalam menganalisis data, menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam mengukur keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori gerakan social Tarrow. Teori ini menjelaskan tentang perlawanan dari masyarakat terhadap elite politik yang tidak sesuai dengan kebijakan sehingga diperlukan gerakan, inilah yang mendasari gerakan perubahan Budiman dalam melengserkan orde baru. Dapat disimpulkan bahwa temuan ini lantaran adanya gesekan antara kebijakan yang terjadi ditubuh elite orde baru sehingga terjadi gejolak pergerakan yang basisnya adalah massa, salah satunya penggagas dari gerakan sosial ini adalah Budiman Sudjatmiko hingga kelahiran Partai Rakyat Demokratik sebagai alat pergerakan yang sah dengan dua program utama adalah pembukaan ruang demokrasi yang ditandai dengan kediktatoran Suharto, yakni 5 UU Politik 1985 dan Dwifungsi ABRI.

Kata Kunci: *Budiman Sujatmiko, Gerakan Sosial, Partai Rakyat Demokrat*

Pendahuluan

Kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bukti dari spirit perjuangan rakyat Indonesia yang gigih berani mengusir penjajah. Tidak sedikit yang dikorbankan, dari harta benda bahkan nyawa menjadi taruhannya. Setelah kemerdekaan tercapai, bangsa kita tidak lagi disibukkan dengan perjuangan yang harus menguras darah dari masyarakat Indonesia, tetapi lebih pada penguatan idealisme kebangsaan. Salah satunya adalah penanaman sifat nasionalisme bagi kaum pemuda.

Perubahan adalah salah satu sumber sentral dari keberhasilan perjuangan yang berada dipunggu pemuda bangsa Indonesia seperti halnya Soekarno katakana, "*Beri aku sepulu pemuda maka akan aku rubah dunia*". Tidak hanya jargon belaka, dari mozaik kesejarahan bangsa Indonesia, pemuda berperan penting menoreh sejarah seperti sejarah pemuda yang sering diperingati pada tanggal 28 Oktober yang dikenal sebagai "Sumpah Pemuda".

Bentuk komitmen serta tanggung jawab atas perubahan bangsa, pemuda bangsa bersatu bukan hanya sebatas afiliasi politik, tetapi sebagai bentuk kesamaan ideologi untuk sampai pada Indonesia Merdeka. Semangat kesejarahan inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran sosok pemuda yang mengambil ruh perjuangan para pemuda tempo dulu, maka sosok Budiman Sudjatmiko sebagai salah satu tokoh yang menjadi cerminan bagi pemuda Indonesia lebih-lebih para aktifis pergerakan sebagai sentral perubahan di tangan para pemuda.

Budiman adalah salah satu penggagas pintu utama dari transparansi demokrasi di Indonesia, iadengan Partai Rakyat Demokratik menggagas tentang transparansi demokrasi yang selama ini dipenggal oleh kediktatoran rezim Soeharto. Maka, perjuangan Budiman dan PRD berhasil mengupayakan persatuan oposisi dalam gerakan Mega-Bintang-Rakyat yang merintis kerjasama antara unsur-unsur anti-Orde Baru dalam partai yang ada, terutama PDI dan PPP hingga pada akhirnya di tahun 1999 digelar pemilu pertama sejak 1955 yang dilangsungkan secara bebas (www.prd.or.id).

Dari refleksi inilah, sangat menarik untuk dikaji peran Budiman dan PRD dalam gerakan social perjuangan untuk memberi kebebasan dalam berdemokrasi, sehingga peran pemuda sebagai *agent of change and agent of control* dapat dirasakan sampai saat ini. Dari sinilah dapat menjadi pelajaran serta contoh sprit perjuangan peran pemuda seperti Budiman di era milenial agar pemuda saat ini mengambil ruh perjuangan dalam menempatkan diri sebagai agent perubahan.

Kajian Pustaka

Berdasar pada sejarah, pemuda merupakan unsur yang menarik dan esensial dalam suatu gerakan perubahan, maka menarik untuk dikaji. Karena di dalam jiwa pemuda terdapat kerelaan berkorban demi cita-cita. Di dalam pemuda terdapat api idealisme yang tidak menuntut balasan, baik berupa uang atau kedudukan. Di dalam pemuda terdapat semangat yang selalu membara. Bersama pemuda kita menentang segala kekuasaan yang tiran. Bersama pemuda, kapal yang bernama Indonesia akan ditentukan maju, diam atau tenggelam (Widyanto, dalam Jurnal “Pemuda dalam Perubahan, 2010, 5).

Pemuda sebagai garda terdepan dari sebuah perubahan social, dari ekonomi, Pendidikan dan bahkan politik. Giddens (1993: 64) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Definisi senada dirumuskan oleh teoritis tekemuka Sydney Tarrow (1998: 4) gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang. Dari dua definisi ini, gerakan sosial merupakan gerakan kolektif yang bersifat menantang untuk mencapai tujuan kolektif pula (Sukarno, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, “Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani, Vol, 10, no 1 Juli 2006).

Pada tanggal 2 Mei 1994 dideklarasikan Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) yang di ketuai Sugeng Bahagijo, akan tetapi PRD di bawah kepemimpinan Sugeng Bahagijo ternyata memiliki kecenderungan seperti politisi elit Indonesia, menyampaikan kritik terhadap pemerintah Orde Baru melalui retorika verbal melalui media, bukan dengan aksi masa rakyat yang tersandarkan, hal ini kemudian mengundang ketidakpuasan anggota PRD lain. Maka diadakanlah kongres Luar Biasa (KLB) PRD di bulan April 1996, kongres itu berlangsung secara rahasia, karena tidak mungkin sebuah kekuasaan oposisi berkongres secara terbuka di bawah kekuasaan rezim Orde Baru, salah satu keputusan terpenting dalam kongres yaitu merubah bentuk PRD dari organisasi “persatuan” menjadi “partai politik”, Budiman Sujatmiko terpilih sebagai Ketua Umum PRD. (Argenti, dalam Jurnal Wacana Politik, “Trasformasi Gerakan Sosial ke Partai Politik Kiprah Politik Partai Rakuat Demokratik di Masa reformasi, Vol, 1, no 2 Oktober 2016, 142-138).

Mengingat pada era 1980-an sampai 1990-an banyak sekali kasus agraria seperti sengketa lahan yang melibatkan masyarakat sipil dengan militer terjadi di Indonesia. Budiman meyakini perubahan nasib rakyat hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan perubahan pada sistem pemerintahan. Namun, karena pemerintahan yang otoriter, maka Budiman memutuskan untuk melakukan upaya

perubahan dari luar sistem, sejak awal saya percaya bahwa jalur harus politik, harus demokratis. Sehingga peneliti disini menggunakan Teori Gerakan Sosial oleh Tarrow.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Nasution, 1988;18), dengan metode deskriptif, karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban yang terkait dengan persepsi, serta pendapat sehingga memerlukan pembahasan yang terperinci secara kualitatif yang berdasarkan pada pembahasan Budiman Sudjatmiko dan PRD. Dalam menganalisis data, menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam mengukur keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat, para pemimpin bangsa berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Sistem pemerintahan politik pada saat itu masih dalam masa pencaharian atau sering disebut dengan masa percobaan demokrasi. Masa percobaan demokrasi adalah satu tahapan ketika Indonesia masih mencari format pemerintahan dan sistem politik yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia (Undang, Dkk, tt, 42).

Teras perjuangan tidak selesai pada hengkangnya kaum penjajah di tanah air, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Sperti, ekonomi, kesejahteraan, undang-undang dan politik yang menjadi bahan untuk berdirinya sebuah bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tugas inilah yang perlu diemban oleh pemuda pada masanya, hingga sampai pada saat dimana pergolakan politik memuncak di era peralihan Soekarno di tangan Soeharto. Bermula dari mozaik inilah gerakan sosial mulai muncul lantaran adanya disintegrasi antara cita-cita bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai garda terdepan perubahan sosial semenjak rezim Soeharto menjadi boomerang kritik atas kebijakan perpolitikan *ala* Soeharto.

Tepatnya 1970-an, protes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sampai pada penolakan masuknya modal asing Jepang yang berujung pada Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) menjadi aksi bangkitnya mahasiswa, di tahun 1978 mahasiswa menolak tentang pencalonan kembali Soeharto untuk yang ketiga kalinya.

Akibat aksi senada yang dilancarkan oleh mahasiswa terhadap penolakan pencalonan kembali Soeharto, rezim ini menduduki kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) sampai pada pembekuan terhadap aktivis kampus yang dilakukan oleh rezim Soeharto sebagai balasan atas aksi para mahasiswa pada masa itu. Di tahun 1988 perlawanan kembali dilancarkan pada kasus pembangunan Waduk Kedung Ombo, dan pelarangan atas mahasiswa untuk berpolitik.

Rentetan sekelumit gerakan mahasiswa memunculkan inisiatif mahasiswa untuk berkumpul untuk mendirikan Persatuan Rakyat Demokratik, yang nantinya berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik. Sebagai payung untuk para aktivis mahasiswa, buruh, dan tani dalam berpolitik. Lahirnya Partai Rakyat Demokratik menjadi awal dari mendekamnya ketua PRD, Budiman Sudjatmiko yang dituduh sebagai makar oleh pemerintah Orde Baru. (Catatan Seorang Aktivis: PRD dan Penggulingan Soeharto (<https://historia.id/modern/articles/catatan-seorang-aktivis-prd-dan-penggulingan-soeharto-1-Dr978>)).

Gerakan sosial Budiman senada dengan pandangan Tarrow (1998:4) yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang. Sepertihalnya Budiman yang mengusung akan transparansi demokrasi agar pemilihan

presiden serta kebijakan dalam politik selalu berorientasi pada masyarakat, cita-cita agar menjadi negara yang demokratis Budiman dengan PRD membangun gagasan kontradiktif terhadap pemerintahan era Soeharto yang menjadi bukti solidaritas masyarakat yang merindukan akan perubahan.

Menurut Budiman Sudjatmiko, beberapa program politik PRD diantaranya adalah (1) Mengangkat kembali wacana pencabutan paket atas lima Undang-Undang, yaitu UU Tentang Pemilihan Umum, UU Tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/MPR, UU Tentang Referendum dan UU Tentang Organisasi Massa. Kelima undang-undang itu bagi PRD menjadi penghalang terbesar proses demokratisasi (Budiman Sujdatmiko, 2013:421). (2) Mencabut Undang-Undang Subversif PNPS No. 11 Tahun 1963, yang dinilai mematikan sikap kritis warga negara terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. (3) Menuntut supremasi sipil dengan pencabutan dwifungsi ABRI, mengembalikan institusi militer kembali ke barak. (4) Dihentikannya semua bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. (5) Meminta pengadilan Internasional untuk mengadili pemerintah Orde Baru atas pembantaian massa ketika tahun 1965. (6) Menekan pemerintah Orde Baru untuk mempertanggungjawabkan invasi serta pendudukan Timor-Timur dan melaksanakan referendum di bawah pengawasan badan-badan dunia. (7) Mendesak MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa (SI) menurut pertanggungjawaban Soeharto selama memimpin negara Republik Indonesia (Gunawan, 1999: 85-88).

Budiman sebagai aktor dari gerakan sosial perubahan yang mewakili mahasiswa, dari rentetan aksi dan pertentangan dari masyarakat, mahasiswa dan petani menjadi sejarah baru bahwa, gerakan sosial Budiman sebagai saksi kejadian sejarah yang nantinya melahirkan gerakan sosial (Putra, dkk. 2016:1). Tarrow ini adalah dia lebih memfokuskan pada aspek sosial politik dimana dalam pernyataannya gerakan sosial, ia definisikan sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Tarrow, tindakan yang didasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan (*contentious collective action*). Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembaga atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang tergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu seringkali merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang awam dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat seperti negara.

Gerakan sosial bisa beroperasi dalam batas-batas legalitas suatu masyarakat, namun bisa juga bergerak secara ilegal atau sebagai kelompok bawah tanah (*underground groups*).

Dalam gerakan sosial mengandung beberapa komponen-komponen yang harus ada dalam definisi gerakan sosial:

1. Kolektivitas orang yang bertindak bersama.
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama.
3. Kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal

4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tidak terlembaga dan bentuknya tidak konvensional (Syarbini, 2013:156).

Kesimpulan

Pemuda sebagai penentu masa depan bangsa, peran-peran pemuda sebagai *agent of change and agent of control* tidak akan pernah dihilangkan dari setiap diri pemuda. Budiman adalah salah satu bukit dari pemuda yang berhasil merubah arus politik serta sebagai aktor dari gerakan sosial perubahan yang mewakili mahasiswa, dari rentetan aksi dan pertentangan dari masyarakat, mahasiswa dan petani menjadi sejarah baru bahwa, gerakan sosial Budiman sebagai saksi kejadian sejarah yang nantinya melahirkan gerakan social baru.

PRD sebagai basis penyambung lidah masyarakat dirasa menjadi tonggak dalam maju mundurnya system perpolitikan yang didalamnya terdapat mahasiswa, buruh, tani sebagai basis pergerakan. Meminjam Bahasa Marx dictator proletariat PRD adalah basis dari masyarakat kecil dan mahasiswa, salah satunya Budiman sebagai promotor sekaligus agen dalam perubahan arus masa depan bangsa.

Referensi

www.prd.or.id

Nasution, Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988)

Undang A. Kamaluddin, Muhammad Alfian, *Dinamika Politik Indonesia* (Bandung: CV ustaka Setia)

Widyanto, dalam Jurnal "Pemuda dalam Perubahan, Program studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Santadarma Yogyakarta, 2010, 5

Sukarno, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, "Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani, Vol, 10, no 1 Juli 2006

Fadilah putra dkk, gerakan social, (Malang, averors, 2016;)

Syahrial Syarbini, dasar- dasar sosiologi, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2013)

Gunawan, FX Rudy, 1999. Budiman Sudjatmiko Menolak Tunduk : Catatan Anak Muda Menentang Tirani. (Jakarta : Grasindo).

Warung Kopi dan Identitas yang Hilang

(Studi Kritis pada Warung Kopi di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri)

Rista Aulia Sholikhah, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Iain Kediri. Email : auliarista27@gmail.com

Azkiyatul Afia Amaelinda, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Iain Kediri. Email : Azkiyaafia98@gmail.com

Bagus Ridlo Hidayatullah, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Iain Kediri. Email : bagusridlo26060@gmail.com

ABSTRAK

Warung kopi is a kind of restaurant or bar that sells Coffeee, hot drinks, cold drinks, tea, cakes, or other snacks. But it feels different than warung. Sometimes ago, people came to Warung Coffee to enjoy the taste of Coffeee. But now, because of globalization there is different purpose when people come to Warung Kopi is to use the free internet connection. Coffeee shops now have a way to attract people as their consumers, not only by providing Coffeee and various foods, but they have completed their place with wifi networks. It's really works to attract young people especially College Students to visit Warung Kopi. This research was conducted in 'Green Coffeee', Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri. Research is done by observation, interviews and documentation. So, the conclusion is there are difference meaning of Warung Kopi a while with this time, people tend to go to Warung Kopi to use free internet connections according to what they needed.

Kata Kunci: Warung Kopi, Technological Era , Identity

Latar Belakang

Perubahan zaman merupakan hal yang tidak akan habis jika diperbincangkan. Karena berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Perubahan zaman akan membawa serta dampak positif maupun negatif. Apalagi ketika perubahan zaman dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi, yang saat ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah tanpa adanya sesuatu yang harus dikritisi oleh masyarakat awam. Hal ini terjadi pula pada perubahan identitas warung kopi dimana konsumen memaknai warung kopi menjadi berbeda, bahwasannya dahulu warung kopi digunakan oleh orang untuk menikmati cita rasa kopi sambil berdiskusi dan bertukar informasi. Seperti yang kutipan dari novel filosofi kopi di bawah ini :

“Pak Seno titip salam, dia juga titip pesan kita tidak bisa menyamakan kopi dengan air tebu. Sesempurna apapun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin Kamu sembunyikan.”

Saat ini, warung kopi sudah mengalami pergeseran identitas, dimana dahulu warung kopi adalah tempat berkumpulnya orang untuk berdiskusi sambil menikmati secangkir kopi. Bahkan sampai pada tataran kopi dianggap memiliki suatu filosofi tertentu bagi orang yang menikmatinya.

Kopi merupakan minuman tradisional yang sampai saat ini tetap exis dan di gemari oleh seluruh kalangan, baik kalangan tua maupun muda, oleh karena itu tidak sulit menemukan warung kopi di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun di daerah perkotaan. Sama halnya dengan warga kelurahan Ngronggo warung kopi menjadi tempat favorit bagi seluruh kalangan baik kalangan muda maupun kalangan tua, setiap harinya warung kopi tidak sepi dari pembeli. Intensitas pembeli tidak pernah surut mulai dari pagi hari bahkan sampai malam hari. Warung kopi di wilayah Kota Kediri sebenarnya ada beberapa tipe, warung kopi kecil yang memang hanya menyediakan kopi saja dan beberapa camilan-camilan kecil disambi dengan rokok, seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin,

mahasiswa IAIN Kediri. Selanjutnya ada warung kopi yang berbasis tempat yang cozy dan nyaman untuk berkumpul dengan teman sejawat tanpa menitik beratkan pada wifi. Kemudian yang terakhir adalah yang menjadi titik fokus penelitian yakni warung kopi berbasis wifi yang juga menyediakan tempat yang nyaman, hanya saja memang orientasi dari konsumen sendiri adalah untuk mencari fasilitasnya yakni koneksi internet gratis untuk berbagai keperluan, misalnya mencari referensi tugas, untuk game online, menggunakan sosial media dan lain sebagainya.

Ditanggapi oleh teknologi yang maju dan mapan dihati para konsumen, warung kopi sebagai tempat yang sering dikunjungi publik ini memperbarui desainnya dengan menambahkan fasilitas yang berupa wifi sebagai daya tarik dan bertujuan meraup untung banyak. Tetapi disadari atau tidak terdapat perubahan Transformasi esensi warung kopi. Tidak dapat dielakkan lagi yang dulunya warung kopi didatangi karena kopinya dan juga manfaat sosialnya. Perubahan makna pada warung kopi disini diawali dari terbentuk kecenderungan sikap individu sebagai konsumen dimana individu memiliki kecenderungan terhadap teknologi dan teknologi saat ini menjadi kebutuhan utama bagi manusia, disisi lain warung kopi saat ini menyediakan fasilitas-fasilitas teknologi yang mensupport kebutuhan individu sebagai konsumen tersebut.

Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Penelitian digunakan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi (Gunawan, 2013: 82).

Metode kualitatif ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengungkapkan data dari informasi yang peneliti lakukan, rasakan dan peneliti alami terhadap fokus penelitian. Sedangkan jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian studi kritis. Sejalur dengan pendekatan penelitian yang dipakai adalah studi kritis. Metode kritis merupakan model penelitian yang berkembang dari adanya teori kritis. Dalam studi kritis ini peneliti mencoba untuk mengidentifikasi juga melakukan prediksi secara kritis terhadap fenomena sosial.

Peneliti akan mengadakan sendiri pengamatan dan wawancara terhadap objek dan subyek penelitian. Oleh karena itu, peneliti sendiri akan terjun ke lapangan dan terlibat langsung untuk mengadakan observasi dan wawancara mengenai fokus penelitiannya. Dalam melaksanakan penelitian penentuan informan dilakukan dengan menitik beratkan pada pengunjung warung kopi *Green Coffee* yang dirasa mampu menjawab pertanyaan peneliti agar mendapat informasi secara mendalam, cara ini biasa disebut dengan *purposive sampling* atau didasarkan pada pertimbangan kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di warung kopi *Green Coffee* kota Kediri, dengan melakukan wawancara terhadap konsumen warung kopi terdapat 4 informan yang akan diteliti habitus dari masing-masing mereka. 4 informan tersebut adalah Muzakia Amy Nur Imama, Firly Khofifah, Syaiful Anwar dan Amir Syarifuddin. Kesemuanya informan tersebut berstatus sebagai mahasiswa IAIN Kediri. Adapun Kriteria informan adalah Konsumen aktif di warung kopi *Green Coffee*, Orientasinya adalah koneksi internet sebagai kebutuhan utama yang dicari ketika mereka datang ke warung kopi tersebut.

Kajian Pustaka

1. Judul : Habitus *Cangkruan* Mahasiswa Bawean Di Surabaya Dalam diskursus Pembangunan
Penulis : Miftahol Khair

- Hasil : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori habitus dari Pierre Bourdieu yang memusatkan perhatian pada hubungan dialektika antara struktur obyektif dan fenomena subyektif melalui habitus sebagai struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Selain itu peneliti juga menggunakan teori diskursus Michel Foucault. Cangkruan yang dilakukan oleh mahasiswa bawean disurabaya adalah cangkruan solidaritas mekanis yaitu lebih mengedepankan persaudaraan. Cangkruan yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa bawean di surabaya didasarkan pada silaturrahi dan agar dapat saling melindungi antara mahasiswa bawean. Diskursus pembangunan yang menjadi bahan diskusi oleh mahasiswa bawean dalam hal ini adalah diskursus pembangunan yang ada di bawean yang mencakup enam poin, yaitu jalan lingkaran Bawean, Transportasi laut yaitu Kapal, Bandara Perintis, POM Bensi, PLN dan pembangunan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).
2. Judul : Habitus Buruh (Studi Kasus Struktur Subjektif Keagamaan Buruh PT Maya Muncar Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)
 Penulis : Hadi Wijaya
 Hasil : Buruh pada dasarnya bukannya tanpa pengetahuan dalam melakukan tindakan. Tindakan *nrimo* dan diam yang dipilih saat berelasi dengan perusahaan, merupakan pengaruh atas pengalaman yang terjadi dan memicu timbulnya pengetahuan. Sehingga pada akhirnya pengetahuan di internalisasi dijadikan sebagai konstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan tersebut dinamakan habitus. Habitus buruh PT. Maya Muncar terbentuk tidak sepenuhnya saat terjadi relasi industri antara buruh dan perusahaan. Akan tetapi ada serangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh buruh di luar pekerjaannya, misalnya aktivitas keagamaan.
3. Judul : Pergeseran Budaya *Ngopi* Di Kalangan Generasi Muda Di Kota Tanjungpinang
 Penulis : Rani Sartika
 Hasil : Penelitian ini menggunakan konsep habitus dari Bourdieu untuk membedah fenomena tersebut. Maka hasil penelitian menyatakan bahwa, fungsi kedai kopi pada umumnya mengalami pergeseran dari nilai guna setelah munculnya kedai kopi di kota Tanjungpinang. Karena semula konsumen mengunjung kedai kopi guna mendapatkan secangkir kopi untuk dikonsumsi, akan tetapi dengan munculnya kedai kopi yang menyajikan kesan modern, telah bergeser kearah kepentingan lain. Perubahan yang terjadi pada informan adalah gaya hidup meliputi kebiasaan nongkrong. Kondisi demikian terjadi karena proses pergeseran budaya dari daerah yang cenderung sederhana menjadi budaya kota yang identik dengan kehidupan mall dan nongkrong, sehingga menimbulkan tempat-tempat nongkrong yang sesuai dengan kondisi anak muda sekarang khususnya di kota Tanjungpinang. Kedai kopi memberi efek positif karena kedai kopi tersebut telah banyak terjadi interaksi antar manusia, sering menjadi tempat pertemuan dan diskusi.

Sedangkan posisi penelitian ini adalah untuk membedah bagaimana identitas warung kopi yang berubah jika dibandingkan dengan dahulu sebelum adanya teknologi informasi yang berkembang seperti saat ini, pun tujuan seseorang untuk pergi ke warung kopi bukan lagi untuk sekedar ngopi, tapi juga ada kepentingan lain yang sepertinya sepele hanya saja sangat mendasar yakni menggunakan fasilitas berupa koneksi internet gratis yang tersedia di warung kopi untuk berbagai kepentingan tineliti.

Pembahasan dan Hasil

Mengenal Warung Kopi *Green Coffee* di Ngronggo

Warung kopi layaknya seperti rumah yang menjadi tujuan akhir ketika seseorang membutuhkan rekreasi, inovasi, atau inspirasi. Mengapa demikian? Karena warung kopi, di zaman fenomenal ini menjadi yang paling dicari oleh semua kalangan. Seperti warung kopi yang ada di Ngronggo kota

Kediri ini terlihat sangat berperan dalam aspek keidupan manusia khususnya para remaja yang sebagian besar adalah pengunjung warung kopi. Secara sadar maupun tidak mereka lebih sering pergi ke warung kopi untuk sekedar berbincang-bincang, diskusi, bahkan berburu teknologi yang diperoleh secara cuma-cuma. Dengan membeli satu gelas kopi, mereka bisa menikmati fasilitas yang sudah tersedia hingga berjam-jam. Penggambaran ini, membuktikan bahwa saat ini tujuan mereka pergi ke warung kopi bukan semata untuk bisa menikmati kopi, akan tetapi dengan dijumpai oleh teknologi yakni wifi, mereka mengabaikan kopi sebagai identitas warung kopi itu sendiri.

Di Ngronggo, terdapat banyak sekali warung kopi. Untuk penelitian ini, peneliti hanya mengambil satu warung kopi yakni “*Green Coffee*” dengan alasan beberapa hal antara lain: *pertama*, warung kopi *Green Coffee* lebih banyak diminati oleh anak-anak muda khususnya remaja ketimbang warung kopi yang lainnya. *Kedua* warung kopi *Green Coffee* memiliki menu kopi utama yaitu kopi hijau, yang tidak semua warung kopi di Ngronggo memiliki menu utama. *Ketiga* tempatnya lebih luas dari pada warung kopi lainnya dan desain arsitektur yang membuat orang nyaman dan enggan beranjak. *Keempat* konsep dari warung kopi ini adalah out door. *Kelima* menyediakan fasilitas teknologi berupa wifi secara gratis. *Keenam* warung kopi *Green Coffee* terletak diantara; lain kediri, MAN 1 Kota Kediri, Mts 02 Kota Kediri, kos-kosan mahasiswa, beberapa pondok pesantren, serta rumah warga.

Warung Kopi dan Identitas yang Hilang

Rumus generative Praktik Sosial oleh Pierre Bourdieu

$$\text{Praktik} = (\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Arena}$$

Praktik	Arena / ranah	Modal	Habitus
Dulu tujuan utama pergi ke warung kopi adalah cita rasa kopi, sekarang bergeser menjadi fasilitas teknologi berupa wifi. Untuk fenomena yang dikaji kali ini adalah bagaimana tinjauan bagaimana tinjauan mempertimbangkan aspek fasilitas wifi gratis sebagai penunjang untuk pergi ke warung kopi. Perilaku ini sendiri dilakukan oleh semua informan yang diteliti, mereka pergi ke warung kopi dengan tujuan utama pada akses internet, ada beberapa hal yang mereka lakukan seperti berselancar di internet, misalnya untuk mencari referensi tugas kuliah, untuk streaming	Warung kopi “ <i>green coffe</i> ” di identifikasikan sebagai tempat atau ranah yang memiliki pengaruh besar untuk memunculkan potensi-potensi individu pada posisinya masing-masing. <i>Green Coffee</i> menjadi wadah bagi individu untuk melakukan praktik sosial, untuk melakukan berbagai kepentingan dengan bertempat di <i>Green Coffee</i> . Arena ini sebagai penunjang kepentingan mereka. Berbeda dengan habitus, ranah berada terpisah dari	Budaya <i>ngopi</i> adalah sebagai modal seseorang untuk membentuk sebuah kecenderungan-kecenderungan sikap atau perilaku yang di motori oleh adanya arena dan didukung dengan teknologi. Borju memperluas gagasan tentang modal kedalam beberapa kategori, seperti modal simbol, sosial budaya dan ekonomi. Modal merupakan sebuah konsentrasi kekuatan suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Setiap ranah menuntut individu untuk memiliki	Produk yang dihasilkan dari interaksi ini serasa menjadi hal yang lumrah dan alamiah. Produk yang tercipta bisa disebut sebagai sistem perilaku yang di dapat dari suatu objek ke objek yang lainnya. Seperti, konsumen berinisial A warung kopi <i>green coffe</i> . Dia memiliki kecenderungan akan kebutuhannya terhadap wifi untuk mengakses internet. Hal ini ia dapatkan dari salah satu temannya yang pertama kali mengajak ke warung kopi <i>green coffe</i> . Sehingga setiap kali A membutuhkan akses internet dia mendatangi <i>green coffe</i>

<p>youtube, untuk eksis di dunia sosial media, atau untuk para gamers adalah game online. Seperti yang dikatakan Amir Syarifuddin, ia mengatakan ketika datang ke warung kopi, memesan minuman dan makanan kemudian menanyakan password dan langsung memainkan game-nya, negatifnya adalah kemudian ia melupakan sekelilingnya karena terlalu sibuk dengan game yang dimainkan tanpa bersosialisasi dan berinteraksi dengan pengunjung Green Coffee yang lain. Sedangkan ada informan yang memang datang bersama dengan kawannya bertujuan menggunakan koneksi internet untuk mencari tambahan referensi tugas kuliah, kemudian menggunakan tempat sebagai wadah diskusi serta menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini menjadi positif adanya pergeseran identitas warung kopi ini. Pergeseran identitas yang di jadikan sebuah praktik atau bukti nyata perlakuan dari relasi antara ranah modal dan habitus. Praktik merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk sejarah dan ranah yang juga merupakan prodak sejarah.</p>	<p>kesadaran individu yang secara objektif berperan menata hubungan individu-individu (Fashri; 2014,105). Sehingga ranah fungsinya untuk menyatukan individu-individu dengan berbagai kepentingan, membutuhkan satu hal yang sama yakni koneksi internet gratis. Pun melatarbelakangi munculnya praktik yang secara tak sadar sudah mengubah posisi individu. Praktik kegiatan yang dilakukan oleh individu secara tidak sadar sudah membuat pergeseran pada makna identitas yang selama ini melekat pada warung kopi. Yang saat ini disebut sebagai warung kopi belum tentu hanya menyediakan berbagai macam kopi, bisa saja menyediakan berbagai macam minuman dingin, jus, camilan bahkan makanan berat seperti nasi dan lauknya. Seperti halnya Green Coffee sendiri, memang yang menjadi ciri khas adalah kopi hijau yang disediakan oleh warung, hanya saja hal ini sudah bukan menjadi titik fokus pembeli ketika mereka memiliki niat untuk datang ke</p>	<p>modal-modal khusus agar dapat hidup secara baik dan bertahan di dalamnya. Bourdieu memperluas gagasan tentang modal kedalam beberapa kategori, seperti modal sosial dan modal budaya. Modal simbol yang terdapat dalam konsumen adalah bahasa (kopi), dimana bahasa ini menjadi hal yang sangat mempengaruhi konsumen,dimana ketika individu itu menyebut kata kopi maka banyak pemaknaan dari kata kopi tersebut tak jarang juga yang mendengar kata kopi, "ayo ngopi" orientasinya bukan lagi kopi atau minum kopi. Tapi lebih pada fasilitas teknologi yang disediakan disana, yakni wifi. Modal kedua adalah modal budaya dimana saat ini memasuki era teknologi, dan teknologi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia, budaya teknologi menjadi melembaga bagi kehidupan manusia terutama bagi konsumen kopi. Teknologi dijadikan sebagai alasan para konsumen untuk mengunjungi warung kopi. Sehingga budaya</p>	<p>dengan tujuan mencari fasilitas wifi. Hal ini secara tak sadar di alami oleh A, dan mulai berpengaruh pada posisinya yang tidak suka pergi ke warung kopi sekarang malah semakin sering datang ke warung kopi. Habitus yang mulai ia dapatkan dari temannya ini, membawa A semakin bebas dan tidak terkontrol akan aksesnya terhadap internet melalui wifi yang disediakan secara gratis di warung kopi tersebut. Bourdieu menyatakan bahwa habitus merupakan "<i>the mental structures through which they apprehend the sosial world, are essentially the product of an internalization of the structures of the sosial wprld</i>". Atau bila dipahami secara dialektis-relasional, habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia, atau struktur sosial yang dibatinkan yang diwujudkan (Fashri; 2014,105). Habitus yang dipahami sebagai kecenderungan sikap atau perilaku yang bisa didapat dari lingkungan hidup dan interaksi antar sesama melahirkan kecenderungan baru kepada orang lain. Atas pernyataannya informan berinisial A</p>
---	---	--	--

<p>Pada saat bersamaan, habitus dan ranah juga merupakan produk dari medan daya-daya yang ada di masyarakat (Harker, dkk; 1990,xx). Praktik ini sudah mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan tujuan terdahulu untuk ke warung kopi adalah menikmati cita rasa kopi yang khas, namun sekarang sudah beralih kepada ada tidaknya fasilitas internet untuk mereka merealisasikan kepentingan-kepentingan yang mendasari mereka untuk mendatangi sebuah warung kopi "Green Coffee".</p>	<p>warung tersebut. Karena ada banyak menu yang disediakan mulai dari macam-macam kopi, macam-macam minuman panas atau dingin, kemudian berbagai macam camilan serta berbagai macam makanan berat seperti mie seduh, mie goreng atau bahkan nasi beserta lauknya. Seperti kata Bourdieu. Ranah merupakan Jaringan relasi antara posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individu (Bourdieu & Eagleton, dalam Zizek, ed., 1994), Ranah mengisi ruang sosial. istilah ruang sosial mengacu kepada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial.</p>	<p>yang dulunya hanya kopi sekarang menjadi budaya ngopi yang di pengaruhi oleh teknologi. Apalagi sebagian besar dari warung kopi di ngronggo sudah memiliki akses internet sebagai pendukung atas kebutuhan konsumen. Kemudian modal selanjutnya adalah modal sosial dimana sang individu pada saat bertemu individu lain maka terbentuklah interaksi dan interaksi inilah yang akan menimbulkan hal-hal baru. Dan modal yang terakhir adalah modal ekonomi dimana individu atau konsumen memiliki modal materi untuk membentuk dan menjalankan. Komponen inilah yang menjadi modal untuk terbentuknya habitus.</p>	<p>berkata: "dulu saya jarang kewarung kopi, setelah saya diajak oleh teman saya pertama kali untuk nongkrong di warung kopi, dari situlah saya merasa nyaman berada diwarung kopi apalagi bisa menikmati wifi dibarengi kopi. Saya jadi betah berjam-jam berada disini" Dari pernyataan ini disimpulkan, bahwasannya informan A mendapat kecenderungan sering ke warung kopi dari temannya yang pertama kali mengajakannya ke warung kopi. Dari sinilah habitus itu ia dapat. Hingga sampai sekarang, bahkan informan juga mengajak teman-temannya saat akan pergi kewarung kopi. Jelas bahwa tujuan pertamanya bukan kopi akan tetapi wifi. Kopi adalah sebagai tiketnya untuk mendapatkan wifi itu berjam-jam.</p>
--	--	---	---

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa saat ini identitas warung kopi sudah berbeda jika dibandingkan dengan zaman dahulu, dimana orang datang ke warung kopi tentunya untuk menikmati rasa kopi, namun sekarang ketika seseorang pergi ke warung kopi ada hal lain yang lebih utama yaitu menggunakan internet untuk berbagai keperluan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hal ini sesuai dengan Praktik Sosial yang dikatakan oleh Bourdieu, bahwasannya praktik sosial akan terjadi apabila ada aspek yang terpenuhi, yakni habitus yang tertanam atau merupakan suatu ide dari seseorang yang mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu hal, hal ini berhubungan dengan *ngopi* di Green Coffee. Selanjutnya adalah arena atau ranah, sudah jelas bahwasannya ada tempat yang menjadi arena bagi seseorang untuk melakukan praktik sosial, dalam hal ini warung Green Coffee. Kemudian terdapat modal budaya yakni teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna oleh setiap individu mengenai warung kopi. Yang pada akhirnya akan menuju pada suatu makna yakni pergeseran identitas warung kopi yang dimaknai oleh setiap

individu bahwasannya ketika mereka datang dan duduk di warung kopi bukan berarti mereka hanya akan memesan kopi saja, melainkan untuk maksud dan tujuan lain, misalnya menggunakan teknologi informasi berupa fasilitas wifi gratis yang disediakan untuk melakukan banyak hal sesuai dengan kebutuhan individu tersebut.

Daftar Pustaka

- Fashri, Fauzi. (2014). *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herlyana, Elly. "Fenomena Coffee Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda". *THAQAFIYYAT* (2012) Vol. 13, No. 02 pp. 1-15. Diakses tanggal 16 Oktober Melalui ejournal.uinsuka.ac.id
- Khair, Miftahol. 2015. "Habitus *Cangkruan* Mahasiswa Bawean Di Surabaya Dalam diskursus Pembangunan" *Paradigma* Volume 03 Nomor 03, Hlm 1-7.
- Maizier, Pipit. (1990). *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Terjemah *An Introduction To The Work Of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*. Yogyakarta: Jalasutra
- Mutahir, Arizal. (2011). *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu. Sebuah Gerakan Untuk Melawan Dominasi*. Purwokerto : Kreasi Wacana Offset
- Sartika, Rani. 2017. Pergeseran Budaya *Ngopi* Di Kalangan Generasi Muda Di Kota Tanjungpinang. Skripsi ini tidak diterbitkan. Tanjungpinang : Universitas Mataram Raja Ali Haji
- Wijaya, Hadi. 2107. "Habitus Buruh (Studi Kasus Struktur Subjektif Keagamaan Buruh PT Maya Muncar Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)" Skripsi ini tidak diterbitkan. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

EKONOMI

Dilema Prostitusi dan Ekonomi Dalam Pembangunan DKI Jakarta

Zainun Nur Hisyam Tahrus, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. E-Mail: zainun.tahrus99@gmail.com

Audi Previo, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. E-Mail: audi.previo71@ui.ac.id

Abdurrahman, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. E-Mail: emailnyaaman@gmail.com

Abstrak

Prostitusi sudah menjadi masalah kuno yang masih belum terselesaikan sampai sekarang. Prostitusi didefinisikan sebagai pekerjaan yang di dalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari, yakni para pengasuh dari pekerja seks itu sendiri. Wanita yang dipekerjakan seringkali adalah wanita dengan keterampilan dan pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan prostitusi biasanya menempati kantong-kantong kemiskinan di wilayah kota. Berkembangnya prostitusi diindikasikan sejalan dengan perkembangan kota. Di Jakarta, prostitusi mulai muncul pada tahun 1950 beriringan dengan bertumbuhnya kota Jakarta dan pesatnya urbanisasi. Sampai sekarang prostitusi telah mengisi beberapa sudut kota Jakarta, bahkan bertransformasi ke dalam hotel-hotel mewah. Meskipun dianggap negatif oleh masyarakat, tetapi prostitusi di Jakarta pada kenyataannya menjadi wadah perekonomian bagi ribuan kaum marjinal yang tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan ikut menyumbangkan uang ke kas pemerintah DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dinilai sebagai suatu fungsi yang dimiliki oleh prostitusi sebagai subsistem dalam sistem perekonomian DKI Jakarta. Tulisan ini akan membahas dilema yang terjadi terkait berkembangnya prostitusi. Pada satu sisi, prostitusi memiliki posisi dan peran dalam perekonomian DKI Jakarta. Namun, prostitusi tersebut dianggap sebagai suatu hal yang melanggar hukum formal serta sistem moralitas yang dominan di DKI Jakarta. Secara hukum formal, menurut KUHP pasal 296 prostitusi merupakan tindak pidana. Sistem moralitas yang dominan di DKI Jakarta – yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama – menganggap prostitusi sebagai tindakan yang menyimpang. Maka dari itu, tulisan ini juga akan memberikan kelengkapan analisis dalam memandang prostitusi sehingga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Kata Kunci: Dilema Ekonomi, Hak Atas Kota, Pembangunan Kota, Prostitusi, Struktural-Fungsionalisme.

Pendahuluan

Prostitusi sudah menjadi masalah sosial yang kuno tetapi sekaligus langgeng melintasi zaman. Nanik, dkk (2012) menyebutkan bahwa prostitusi adalah pekerjaan yang di dalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari. Wanita-wanita yang bekerja sebagai pelacur biasanya merupakan wanita dengan keterampilan rendah dan kemampuan ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, keberadaan lokalisasi prostitusi dapat diindaksi dari kantong-kantong kemiskinan yang ada di kota. Menurut data dari DepKes dalam Nanik, dkk (2012) di Indonesia terdapat sebanyak 99.105 pekerja prostitusi. Artinya, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggantungkan kebutuhan ekonominya pada kegiatan prostitusi.

Meskipun kenyataan ekonomi mengatakan demikian, kegiatan prostitusi dilarang oleh pemerintah, yaitu melalui KUHP pasal 296. Pelarangan prostitusi sebagai tindakan pidana ini tentu tidak bisa semata-mata diterima begitu saja tanpa ada solusi lain. Apalagi prostitusi itu sendiri, secara sosial, merupakan konsekuensi linier atas urbanisasi dan perkembangan industri kota. Di Jakarta, prostitusi mulai muncul sejak tahun 1950, seiring dengan mulai ramainya Jakarta sebagai kota

metropolitan dan tujuan migrasi masyarakat desa. Terhitung sejak 1950-1960 muncul beberapa lokalisasi di Jakarta, yaitu di Stasiun Senen, Kramat Tunggak, Antara Manggarai dan Blok M, Prumpung dan lain-lain (Lamijo, [Tanpa Tahun]). Kemunculan prostitusi tersebut seringkali berasosiasi dengan tempat tinggal para buruh petani maupun industri.

Dilema atas prostitusi muncul karena, selain linier dengan pembangunan kota, pada kenyataannya prostitusi memiliki peran besar dalam perputaran perekonomian kota. Sesuai dengan definisi dalam KBBI bahwa dilema adalah "*situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi yang sulit dan membingungkan*" (kbbi.web.id, 24 November 2018). Dilema terjadi karena bagaimanapun prostitusi seringkali menjadi berkah bagi para pedagang untuk membuka warung-warung dan usaha di sekitarnya. Bahkan, keberadaan prostitusi dapat memberikan dampak positif perekonomian suatu daerah. Pada satu sisi, prostitusi memberikan dampak negatif secara budaya maupun kesehatan seperti penyebaran HIV/AIDS. Namun, adanya prostitusi merupakan alternatif ekonomi bagi kaum-kaum marginal perkotaan, terutama wanita dengan kemampuan ekonomi rendah. Selain itu, perputaran ekonomi yang dihasilkan prostitusi terhitung sangat besar. Di awal tahun 1990an saja, prostitusi di Indonesia dengan harga rata-rata rendah menghasilkan perputaran finansial sebanyak 1.180 juta dollar, sedangkan prostitusi dengan harga rata-rata tinggi menyumbang perputaran finansial sebanyak 3.300 juta dollar. Jumlah tersebut setara dengan 0.8 sampai 2.4 persen GDP Indonesia tahun 1990 (Sciortino, 1999). Data ekonomi tersebut adalah contoh bahwa sumbangan prostitusi terhadap perekonomian negara ternyata cukup signifikan.

Selain itu, hasil perekonomian prostitusi tidak sepenuhnya hanya dinikmati si pelacur, tetapi juga untuk keluarga dan pekerja-pekerja lainnya semisal tukang parkir dan satpam. Terdapat semacam sistem *profit-sharing* informal dari kegiatan yang dianggap sebagai penyimpangan tersebut yang bersifat terpaksa ataupun sukarela. Kemudian, dapat dimaknai juga bahwa penghapusan kegiatan prostitusi tidak hanya mempengaruhi sang pelaku prostitusi tetapi juga sistem *profit-sharing* informal ini. Sciortino (1999) menyebutkan penelitian dari 100% hasil perekonomian prostitusi dibagi setengah untuk si pelacur, 25% untuk keluarga, dan 25% untuk satpam dan germo. Hal ini mengindikasikan bahwa prostitusi juga melibatkan pihak-pihak lain yang bersifat mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Kegiatan perekonomian prostitusi di zaman sekarang bahkan lebih kompleks dan luas. Munculnya berbagai model prostitusi yang lebih mewah, seperti apartemen di Kalibata City dan hotel-hotel mewah semacam Alexis, Emporium, ataupun Malio, bahkan berperan dalam menyumbangkan sejumlah uang ke kas APBD DKI Jakarta dan memperluas cakupan kegiatan perekonomian prostitusi.

Sebagai perbandingan, kajian mengenai prostitusi di berbagai negara sebelumnya pernah dilakukan oleh Shin, dkk pada artikel berjudul *Social Impacts of Legalization Of Drugs And Prostitution* (2017). Shin dkk melakukan studi terkait dampak prostitusi di negara-negara yang melegalkan bisnis tersebut, yakni negara di kawasan Amerika Latin dan Eropa. Legalnya prostitusi memberi dampak secara ekonomi dan sosial, kedua aspek ini memiliki pengaruh besar dalam pembangunan di tiap negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Dampak sosial yang ditimbulkan terbagi kedalam beberapa kategori, semua kategori sosial ini tetap mendapat pengaruh dari dampak ekonomi yang timbul dari adanya bisnis prostitusi.

Berdasarkan studi Shin dkk (2017), prostitusi yang mulai marak dilegalkan sejak tahun 1980an turut menyumbang peran besar dalam negara yang melegalkan bisnis ini, salah satunya dalam peran pembangunan kota. Negara yang melegalkan prostitusi diantaranya adalah Belanda. Berkat kebijakan tersebut, Belanda menjadi negara dengan tingkat aborsi dan kehamilan remaja terendah. Negara lain yang memiliki kebijakan serupa adalah Nevada yang pada selanjutnya menjadi negara dengan angka penyebaran AIDS dan HIV sebesar 0%, sebab hubungan seks yang sehat menjadi syarat dari adanya

bisnis ini. Prostitusi yang dilegalkan juga menurunkan angka perdagangan manusia, sebab para geromo bisa merekrut pekerja domestik yang tidak memakan banyak biaya ketimbang harus mengimpor tenaga kerja manusia dari lain daerah. Para pekerja seks itu sendiri juga mendapat perlindungan hukum dan hak asasi manusia, sehingga intensitas kekerasan dan kejahatan seksual juga berkurang.

Meskipun semua dampak diatas terkesan positif, prostitusi tetap menjadi bisnis yang meninggalkan noda hitam pada wilayah yang dijangkitkan. Di Belanda misalnya, adanya kebijakan tersebut membuat prostitusi anak dibawah umur meningkat drastis pada tahun 1990an (Shin dkk, 2017: 30). Dalam beberapa kasus juga, perdagangan manusia dalam ruang lingkup regional semakin marak dengan dilegalkannya prostitusi. Dari segi kesehatan, wanita yang semakin lama menjadi pekerja seks akan rentan terhadap AIDS & HIV meskipun telah menggunakan pengaman, sehingga pelegalan prostitusi tidak menjamin berkurangnya penyebaran penyakit meskipun telah digunakan beragam alat pengaman. Oleh karena itu, prostitusi telah terbukti memiliki peran yang berdampak pada aspek-aspek penunjang pembangunan kota, baik secara positif maupun negatif. Hal serupa juga dapat terjadi dan dialami Jakarta sebagai kota yang dalam beberapa kurun waktu masih direpotkan dengan masalah prostitusi.

Berdasarkan paparan tersebut, tulisan ini akan membahas perkembangan prostitusi di Jakarta, dampaknya terhadap ekonomi, dilema yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang pernah dan perlu diterapkan. Perkembangan prostitusi yang akan penulis bahas dimulai dari tahun 1960an dengan mengkaji perubahan model sosial ekonomi atas bisnis prostitusi tersebut dalam konteks pembangunan DKI Jakarta.

Kajian Pustaka

Prostitusi dan Ekonomi

Prostitusi merupakan kegiatan yang selalu melibatkan relasi kontraktual. Relasi kontraktual itu tidak dapat dipungkiri memunculkan relasi ekonomi yang juga melebur pada sistem ekonomi makro (Davis, 1937: 7). Dalam artikel berjudul *Sociology of Prostitution* (1937), Kingsley Davis menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan kegiatan prostitusi menjadi salah satu kegiatan komersial yang meluas dalam bidang ekonomi, yaitu 1) penyebab adanya prostitusi itu sendiri, 2) penyebab maraknya prostitusi, dan 3) penyebab orang-orang bekerja dalam prostitusi. Jika kita menilik ketiga penyebab tersebut, maka dapat ditemukan bahwa prostitusi ada, menjadi marak, dan dimasuki oleh para pekerjanya karena alasan ekonomi.

Kebijakan Terhadap Prostitusi

Kebijakan menghadapi prostitusi merupakan kebijakan yang tidak mudah diterapkan. Wagenaar, dkk (2017) dalam bukunya yang berjudul *Designing Prostitution Policy* menjelaskan bahwa kebijakan terhadap prostitusi seringkali bersifat paradoks. Mengekang dan melarang keras prostitusi dapat menyebabkan stigma buruk semakin melekat pada para pekerja seks sehingga membuat mereka mengalami *identity ascription* atau anggapan atas identitas mereka sebagai pekerja terlarang sehingga membuat mereka justru semakin menerima identitas tersebut dan tidak peduli pada pelanggaran norma yang berlaku. Namun, legalisasi prostitusi juga bukan langkah yang sempurna karena legalisasi prostitusi dapat berimplikasi pada tumbuhnya fasilitas-fasilitas lain yang mendukung tumbuh dan berkembangnya prostitusi.

Struktural Fungsionalisme Robert K. Merton

Beranjak dari kritik-kritik terhadap postulat Parsons, Robert K. Merton menawarkan perspektif struktural fungsionalisme yang dapat dinilai lebih cukup sesuai dalam mengkaji sistem sebuah masyarakat. Menurut Ritzer (2011), Merton melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dapat memiliki subsistem dan/atau nilai sosial serta kebudayaan yang tidak selalu memiliki fungsi yang positif

terhadap sistem atau dalam kata lain bersifat disfungsional. Fungsi itu sendiri bagi Merton merupakan hasil dari adaptasi sebuah sistem yang dilakukan oleh subsistem yang dapat diobservasi. Sedangkan disfungsi dinyatakan sebagai sebuah fungsi dari subsistem yang memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan sebuah sistem secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan menggali fenomena prostitusi di kota Jakarta, hubungannya dengan kegiatan ekonomi, dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi literatur dan studi dokumen. Studi literatur yang penulis lakukan berusaha untuk menelusuri sejarah perkembangan prostitusi di Jakarta sejak tahun 1960an dengan menggunakan disertasi Alison J. Murray yang berjudul *No Honey, No Money: A Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta* (1987). Penulis juga menggunakan buku investigasi Moammar Emka yang berjudul *Jakarta Undercover: Sex & City* dalam menggali informasi mengenai perkembangan model prostitusi di era modern di Jakarta. Studi dokumen yang penulis gunakan adalah skripsi berjudul *Lokalisasi Kramat Tunggak Pada Masa Gubernur Ali Sadikin: 1971-1977* (2011) oleh Fikri yang mendeskripsikan lokalisasi prostitusi di Jakarta, khususnya Kramat Tunggak, sebagai langkah pencegahan meluasnya dampak buruk pekerjaan seks komersil, sekaligus medium rehabilitasi serta resosialisasi para pekerja seks.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Awal Prostitusi di Jakarta

Dijadikannya Jakarta sebagai pusat pemerintahan di zaman kolonial memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kota Jakarta pasca kemerdekaan. Jakarta setelah merdeka dikenal sebagai pusat dari kebudayaan dan perekonomian yang menarik masyarakat desa untuk bermigrasi mencari penghidupan. Migrasi besar-besaran terjadi sekitar tahun 1950-1960an. Murray (1987: 29) merinci perkembangan jumlah imigran pada kurun waktu tersebut, yaitu 2,9 juta jiwa pada tahun 1961, 4,6 juta jiwa pada tahun 1971, dan 6,5 juta jiwa pada tahun 1981 hingga 7,8 juta jiwa pada tahun 1985. Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut mengakibatkan terjadi dikotomi dalam struktur kelas masyarakat yaitu kebudayaan metropolitan dan masyarakat kelas bawah. Kantong-kantong perkotaan tempat masyarakat kelas bawah ini kemudian diberi istilah sebagai kampung perkotaan.

Pada tahun 1960an sampai 1990an, prostitusi berkembang pada daerah kampung perkotaan tersebut, seperti Kramat Tunggak, Manggarai, Bangka-Blok P, Pasar Senen, dan beberapa daerah kampung yang lain. Prostitusi di daerah kampung tersebut merupakan salah satu penggerak roda perekonomian. Misalnya, di kompleks Kramat Tunggak pada tahun 1978 sudah terdapat 1.767 pelacur dan 231 germo sehingga menjadi salah satu kompleks dengan kegiatan ekonomi ilegal paling sibuk saat itu (Murray, 1987: 139). Lamijo (Tanpa Tahun) memaparkan perputaran ekonomi di Kramat Tunggak pada tahun 1960 selama setahun prostitusi di sana menghasilkan Rp 4,5 Milyar Rupiah. Kondisi perekonomian tersebut kemudian memaksa pemerintah saat itu untuk mengeluarkan kebijakan lokalisasi. Setelah diresmikan menjadi lokalisasi sudah memiliki 348 germo dan pada tahun 1980an memiliki lebih dari 2000 pekerja seks.

Lokalisasi prostitusi tidak lepas dari campur tangan pemerintah di kala itu, tepatnya pada masa pemerintahan Ali Sadikin. Dalam membangun Jakarta, Ali menggunakan rencana induk yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya (Fikri, 2011: 56). Rencana induk mengatur penggunaan lahan di Jakarta termasuk memperkirakan perkembangan penduduk dalam jangka panjang. Dari sekian masalah yang berusaha dituntaskan, prostitusi mendapat perhatian sebagai bentuk cerminan dari perekonomian Jakarta yang buruk. Oleh karenanya, Ali Sadikin membuat kebijakan lokalisasi prostitusi demi memperbaiki citra Jakarta sebagai ibu kota.

Lokalisasi dilakukan di Kramat Tunggak dengan pertimbangan tempatnya yang terpencil dekat pelabuhan Tanjung Priuk, serta jumlah pekerja seks dikala itu dominannya tersebar di Jakarta Utara. Menurut Fikri (2011: 15), faktor anggaran dana Jakarta yang hanya sebesar Rp266.000.000 pada masa pemerintahan Ali membuat kebijakan lokalisasi menjadi tindakan paling efektif dalam meminimalisir dampak buruk prostitusi. Pendirian Kramat Tunggak sudah dimulai pada tahun 1969 dengan memberikan sosialisasi kepada para mucikari dan pekerja seks komersil agar pindah ke Kramat Tunggak. Mereka yang pindah akan menyewa lahan dan membangun tempat usaha sesuai ketentuan. Kegiatan ini terus berjalan secara bertahap hingga Kramat Tunggak diresmikan oleh pemerintah pada 1971.

Ali Sadikin tidak hanya melokalisasi prostitusi, Kramat Tunggak juga memiliki tujuan sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi (Fikri, 2011: 58). Kegiatan yang diusahakan adalah pemberian pemahaman agama secara rutin, pelatihan keterampilan semisal menjahit, serta pendidikan baca tulis. Kesehatan para penghuni lokalisasi juga diperhatikan lewat puskesmas di dekat wilayah lokalisasi, hal ini demi mencegah penyebaran penyakit kelamin dan menjamin kualitas hidup para pekerja seks untuk kedepannya. Dengan segala perbekalan yang diterima, diharapkan nantinya mereka siap kembali dan hidup mandiri di masyarakat.

Pendirian Kramat Tunggak tentu menuai respon beragam dari masyarakat. Mereka yang setuju menganggap lokalisasi sebagai langkah dalam mengurangi dampak buruk prostitusi, sebab hanya mereka yang benar-benar ingin menyewa jasa pekerja seks yang bisa pergi ke Kramat Tunggak. Bagi mereka yang hanya setengah-setengah tentu enggan untuk pergi ke wilayah terpencil di Jakarta Utara. Sedangkan bagi mereka yang kontra, lokalisasi dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Kebanyakan para penentang berasal dari tokoh agama yang menentang pelegalan perzinaan di sudut ibu kota. Akan tetapi, mereka yang menentang pun tidak memiliki solusi dalam memberantas prostitusi sehingga Kramat Tunggak tetap berjalan.

Selain di Kramat Tunggak, praktek prostitusi juga berjalan di daerah Bangka-Blok P, Kebayoran Baru. Saat itu, Blok P merupakan daerah luas yang terdiri dari berbagai rumah di pinggir jalan, perumahan para ekspatriat sekaligus beberapa pelacur di gang-gang kecil (*alleyside*) yang sering disebut sebagai 'Cewek-Cewek di de Club' (Murray, 1987: 143). Sebagai tempat prostitusi yang dikelilingi perumahan ekspatriat, tarif di sana cukup mahal pada saat itu (20 ribu sampai 50 ribu rupiah per malam). Persaingan pun menjadi konsekuensi yang wajar untuk memperebutkan pelanggan. Namun, solidaritas di antara para pekerja seks tetap terjaga karena dengan solidaritas itulah mereka mampu bertahan dalam ganasnya kota Jakarta.

Perubahan Model Sosial-Ekonomi Prostitusi

Di zaman sekarang prostitusi di Jakarta berpindah ke wilayah yang lebih mewah. Jika pada tahun 1960an-1980an prostitusi masih marak di rumah-rumah pelacuran (*brothels*), mulai tahun 1990an muncul prostitusi yang melebur dalam *venue-venue* tertentu seperti tempat karaoke, tempat pijat, apartemen ataupun hotel. Beberapa tempat prostitusi itu biasa disebut sebagai *clubs*. Salah satu yang terbesar dibuka pada tahun 1997 di Mangga Besar berupa *venue* dengan lima lantai yang menyediakan fasilitas semacam *dance floor*, karaoke, tempat pijat, dan kafetaria. Pada tahun 2000, *clubs* yang menawarkan prostitusi mulai terakomodasi dengan para pengguna narkoba yang menjualnya di *venue* tersebut. Tempat-tempat tersebut sebagian besar dikuasai oleh pebisnis-pebisnis China yang kemudian mengembangkan bisnis mereka menjadi *real estate* di berbagai tempat (Permanadellie dan Tadie, 2014: 478-479). Bukan hanya pada tempat diskotik atau karaoke, prostitusi juga berkembang di apartemen dan hotel, misalnya di apartemen semacam Kalibata City dan hotel Alexis. Meskipun prostitusi dilarang, tetapi pemerintah tanpa segan memakan hasil pajak hiburan darinya. Tempo (28/1/2018) melansir prostitusi Alexis menyumbang pajak hiburan sebanyak Rp769,5 miliar pada tahun 2016. Lina Novita dari Legal and Corporate Affairs Grup Alexis mengatakan

bahwa prostitusi tersebut telah menyumbang Rp30 miliar setiap tahunnya ke kas DKI. Selain Hotel Alexis, masih ada beberapa hotel di Jakarta yang menjadi tempat prostitusi, yaitu di Hotel Emporium, Hotel Malio, dan Classic.

Beberapa fasilitas prostitusi yang mewah dan mahal pun menjadi tawaran baru. Penawaran *high-class* tersebut juga diikuti dengan pelayanan yang semakin bervariasi. Sebut saja, \$40 untuk pelayanan bernama *cat bath* (pelayanan tanpa penetrasi), \$500 untuk pekerja seks dalam mobil Pajero, atau \$700 untuk pekerja seks dalam mobil Range Rover (Emka, 2005: 49). Berbagai transaksi *high-class* tersebut ditambah dengan prostitusi-prostitusi *low-class* yang masih bertahan tidak heran jika prostitusi menjadi salah satu transaksi ekonomi ilegal yang terbesar. Rama dalam Republika (15 Mei 2015) menyebutkan bahwa transaksi prostitusi di Indonesia selama sebulan berjumlah sekitar 5,5 triliun rupiah atau sekitar 65 triliun rupiah per tahun, jumlah yang lebih besar dari penghasilan Bank Syariah Mandiri yang hanya 63 triliun rupiah per tahun.

Perkembangan pelayanan dan model prostitusi juga berkembang di kalangan elite. Emka (2005) menyebutkan beberapa contoh kemewahan model prostitusi di kalangan kelas atas di Jakarta. Sebuah panti pijat seks di Jakarta Utara menyaratkan member sejumlah 50 juta rupiah dan 3 juta rupiah setiap kali masuk, atau seperti GM artis dan model yang memberikan tarif puluhan juta untuk sekali transaksi. Perubahan model prostitusi tersebut menunjukkan bahwa prostitusi saat ini tidak hanya menjadi transaksi ekonomi di kalangan kelas bawah seperti pada tahun 60-90an, melainkan juga sebuah bisnis kelas atas yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya dan pekerja seks dengan latar belakang tertentu.

Berdasarkan pemaparan fenomena prostitusi tersebut, tim penulis menggunakan perspektif sosiologi yaitu struktural fungsionalisme Merton sebagai alat analisis kasus prostitusi di DKI Jakarta untuk menguak sebuah realita yang seringkali kurang dilihat oleh masyarakat pada umumnya. Prostitusi di Jakarta seringkali dinilai sebagai suatu hal yang disfungsi terhadap keberlangsungan sistem sosial Jakarta itu sendiri. Namun, apabila kita melihat lebih dalam, paparan di atas memperlihatkan bahwa prostitusi memiliki dua aspek yang menurut penulis bertolak belakang dengan asumsi bahwa prostitusi bersifat sebagai hal yang disfungsi. Pertama, prostitusi di Jakarta merupakan sebuah subsistem yang mengemban fungsi positif. Fungsi positif yang diberikan berupa kontribusi terhadap perekonomian di DKI Jakarta dengan skala yang cukup besar terutama melalui prostitusi yang bersifat *high-class*. Kemudian, fungsi positif berikutnya juga berkaitan dengan reaksi terhadap disfungsi yang muncul dalam sistem perekonomian DKI Jakarta yaitu minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Prostitusi menjadi sebuah subsistem yang menampung mereka yang memiliki *skill* dan *resources* yang minim dan tidak dapat berkompetisi dalam lapangan kerja yang sangat terbatas.

Aspek kontribusi prostitusi sebagai sebuah subsistem dalam sistem DKI Jakarta dalam perihalekonomi terwujudkan dalam bentuk sumbangan yang berupa pajak hiburan. Dalam kasus Alexis - salah satu hotel yang dikenal sebagai tempat prostitusi yang sekarang telah ditutup, - dapat menyumbang Rp769,5 miliar kepada perekonomian DKI Jakarta. Mengingat bahwa terdapat banyak tempat yang serupa dengan Alexis dan masih beroperasi, maka dapat disimpulkan bahwa tempat-tempat hiburan malam yang didalamnya terdapat praktek prostitusi walaupun secara ilegal memiliki fungsi yang positif dan dalam jumlah yang cukup signifikan kepada keberlangsungan sistem perekonomian DKI Jakarta. Kemudian seperti yang dipaparkan di atas, penghasilan yang diperoleh oleh seorang prostitusi tidak hanya diterima 100% oleh dirinya melainkan penghasilan tersebut didistribusikan kepada pihak-pihak lain. Hal ini juga turut mendukung fakta bahwa prostitusi berkontribusi pada penyebaran kekayaan di masyarakat DKI Jakarta.

Kemudian, secara historis, prostitusi berfungsi sebagai praktek yang menggerakkan perekonomian kampung-kampung yang terdiri dari orang-orang yang bermigrasi ke Jakarta semenjak

tahun 1950. Dalam kasus ini mereka yang tergolong dalam masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki *skill* dan *resources* yang mencukupi untuk berkompetisi dalam lapangan pekerjaan menemukan bahwa prostitusi menjadi tempat untuk tetap mendapatkan penghasilan demi menjalin kehidupan esok hari.

Kesimpulan

Uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa masalah prostitusi bukan hanya permasalahan moralitas individual. Perkembangan prostitusi di kota Jakarta merupakan konsekuensi dari citra Jakarta sebagai pusat ekonomi sekaligus permasalahan kemiskinan di desa yang memicu migrasi besar-besaran. Namun, lapangan kerja yang tidak memadai justru menjadikan beberapa imigran untuk mencari nafkah dari bisnis gelap yang bernama prostitusi. Kondisi ketimpangan di kota Jakarta yang linier dengan perkembangan prostitusi tidak bisa dianggap sepele. Meskipun memiliki dampak negatif dan seringkali dianggap disfungsi, tetapi peran positif prostitusi dalam menghidupkan fungsi ekonomi tidak dapat diabaikan. Apalagi sumbangan prostitusi terhadap APBD Jakarta yang cukup besar sebagaimana sumbangan lokalisasi Kramat Tunggak tahun 60-70an dan hotel Alexis yang menyumbang hingga ratusan miliar rupiah. Data-data yang menunjukkan berbagai sumbangan prostitusi tersebut terhadap perekonomian Jakarta dan perkembangan prostitusi dengan model-model yang lebih mewah serta beragam adalah fakta bahwa prostitusi tidak bisa begitu saja ditutup atau dihentikan.

Solusi untuk mengatasi dilematika dengan tergesa-gesa, seperti yang pernah digemborkan oleh mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang menargetkan menutup seluruh prostitusi di Indonesia pada tahun 2017, bukan kebijakan yang matang. Kebijakan lokalisasi di zaman Ali Sadikin bisa saja menjadi salah satu alternatif kebijakan. Namun, kebijakan semacam itu tidak mampu menyelesaikan masalah prostitusi secara luas. Selain itu, kekhawatiran lokalisasi sebagai awal dari legalisasi prostitusi menjadi halangan besar bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini.

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa kebijakan terbaik dalam menghadapi prostitusi adalah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah. Memperluas kesempatan kerja, pelatihan keterampilan terhadap wanita, upaya meningkatkan kesetaraan di kalangan wanita, dan melakukan pemerataan ekonomi demi menghambat arus migrasi yang tidak terkendali. Adapun lokalisasi baru dapat diterapkan pada prostitusi *high-class* yang notabene hanya digunakan untuk pemuas nafsu. Solusi semacam itu, penulis kira menjadi solusi terbaik untuk mengatasi dilema ekonomi prostitusi baik di kelas bawah maupun kelas atas. Pada akhirnya, penulis menegaskan bahwa menghadapi prostitusi tidak cukup dengan perintah sederhana 'menutup' ataupun 'membiarkan'. Melainkan perlu mekanisme kebijakan untuk 'menata', baik menata perekonomian kelas bawah agar memiliki alternatif pekerjaan yang lebih layak, atau menata kelompok elit atas agar prostitusi tidak menjadi ancaman moralitas bagi masyarakat kota.

Referensi

Buku dan Skripsi

Emka, M. 2005. *Sex & City: Jakarta Undercover*. Jakarta: Gagas Media.

Fikri. 2011. *Lokalisasi Kramat Tunggak Pada Masa Gubernur Ali Sadikin: 1971-1977*. Skripsi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Murray, A. J. 1987. *No Money, No Honey: A Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta*. Tesis pada Australian National University.

Ritzer, G. 2011. *Sociological Theory*(8th ed.). New York: McGraw-Hill.

Artikel Jurnal

Lamijo. Tanpa Tahun. *Prostitusi di Jakarta Dalam Tiga Kekuasaan, 1930-1959. Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Penelitian Suberdaya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSR-LIPI).

Nanik, S. dkk. 2012. *Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feniminisme*. Jurnal Wacana, Vol. 15, No. 4, Hal. 23-29.

Permanadeli, R. dan Tadie, J. 2014. *Night and the City: Clubs, Brothels and Politics in Jakarta*. Urban Studies Journal, Vol. 52, No. 3, Hal. 471-485.

Sciortino, R. 1999. *The Morality and Economics of Prostitution in Indonesia*. Filipina: Mahidol University.

Koran dan Website

Anonim. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.web.id/dilema>, Diakses pada 24 November 2018, pukul 14.00 WIB,

Rama, A. 2015. *Ekonomi Prostitusi*. Jakarta: Republika.

TEMPO, 28 Januari 2018. *Alexis yang Terus Eksis*. <https://majalah.tempo.co/read/154818/alexis-yang-terus-eksis>, Diakses pada 10 Oktober 2018, pukul 23.53 WIB.

Williams, L. 2017. *Inside Jakarta's Strange, Racy Red-Light Scene*. <https://www.news.com.au/travel/world-travel/asia/inside-jakartas-strange-racy-red-light-scene/news-story/27ec0e272fa400cdd8429e08f2b47e10>, Diakses pada 11 November 2018 pukul 23.00 WIB.

Kajian Permasalahan Kemiskinan Di Ibu Kota Jakarta

Imambang Eka Sulistya, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, E-mail: sulistya125@student.uns.ac.id

Novita Budirahayu, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, E-mail: novita.budirahayu@student.uns.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial-ekonomi masyarakat yang melanda berbagai ibu kota negara di dunia, tak terkecuali Ibu Kota Jakarta. Kemiskinan di Ibu Kota Jakarta disebabkan berbagai macam faktor, di antaranya yaitu tingginya arus urbanisasi penduduk dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan akses permodalan, dan lain-lain. Berbagai macam faktor penyebab kemiskinan tersebut haruslah segera dicarikan solusi yang tepat. Selain itu, berbagai macam kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah haruslah ditinjau kembali agar dapat sesuai dengan kondisi perkembangan permasalahan sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara umum dan meningkatkan harkat martabat sebagai ibu kota negara. Oleh sebab itu diperlukan sebuah kajian permasalahan dan kebijakan agar tercipta sebuah kebijakan yang harmoni. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder, adapun teknik analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini adalah terciptanya sebuah bentuk analisis harmonisasi antara permasalahan kemiskinan yang terjadi dan pola penerapan kebijakan yang tepat. Diharapkan hasil kajian ini dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menjadi referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada guna menciptakan sebuah kondisi masyarakat adil dan makmur yang terbebas dari belenggu kemiskinan.

Kata Kunci: *Akses pendidikan, Akses Permodalan, Arus Urbanisasi Penduduk, Kemiskinan, Sosial-Ekonomi,*

Pendahuluan

Menurut Arsyad (2010) kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan, dan tidak memiliki rasa bebas serta bersifat multidimensional. Kemiskinan juga merupakan sebuah persoalan kemanusiaan dimana adanya kemiskinan membawa tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan orang yang hidup di dalam kemiskinan (Ishartono, 2016). Selain itu, kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial-ekonomi yang sedang dihadapi dan mendapat perhatian dari negara-negara dunia. Permasalahan kemiskinan sering kali melanda negara-negara berkembang, terutama di kawasan Benua Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara juga sebagian besar wilayahnya mengalami kemiskinan. Hal ini membuat pemerintah turut berkomitmen dalam mendeklarasikan *Sustainable Development Goals* untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun yang pelaksanaannya diatur dalam Perpres No.59 Tahun 2017 sekaligus menjadi sasaran dalam RPJMN 2015-2019.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2017 sebanyak 26,58 juta jiwa atau sebesar 10,12%. Oleh sebab itu, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh maka pemerintah diharapkan dapat membuat program strategis dalam menangani masalah kemiskinan supaya angka kemiskinan dapat ditekan serendah-rendahnya. Selain itu, masalah kemiskinan perlu diperhatikan secara serius mengingat tujuan utama pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (Arsyad, 2010).

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Widodo, dkk:2015). Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta tak lepas dari masalah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Jakarta pada bulan Maret 2018 sebanyak 372.120 jiwa atau sebesar 3,57%. Kemiskinan di Jakarta disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya yaitu tingginya arus urbanisasi penduduk dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan akses permodalan, dan lain-lain.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan perkotaan (*Urban Crisis*) yang melilit kota-kota metropolitan seperti Kota Jakarta. Berbagai macam faktor penyebab kemiskinan di Kota Jakarta tersebut haruslah segera dicarikan solusi yang tepat. Selain itu, berbagai macam kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah juga harus ditinjau kembali agar dapat sesuai dengan kondisi perkembangan permasalahan sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara umum dan meningkatkan harkat martabatnya sebagai ibu kota negara. Oleh sebab itu diperlukan sebuah kajian permasalahan dan kebijakan agar tercipta sebuah kebijakan yang harmoni. Atas dasar itu, penulis bermaksud melaksanakan sebuah kajian yang berjudul “Kajian Permasalahan Kemiskinan di Jakarta”.

Kajian Pustaka

1. Urbanisasi

Konsep urbanisasi menurut Sarungu (2009) dibedakan menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pada dasarnya urbanisasi dikaitkan dengan perpindahan penduduk ke daerah perkotaan (*urban area*). Sedangkan dalam arti luas, urbanisasi tidak hanya dikaitkan dengan perubahan struktur demografis secara spasial, akan tetapi juga meliputi perubahan dalam struktur produksi (ekonomi), sosial, politik, dan budaya. Dalam kaitannya dengan transformasi perekonomian pedesaan ke perekonomian perkotaan, proses urbanisasi didorong oleh dua faktor yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Faktor pendorong urbanisasi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan, bertambahnya kemiskinan akibat meningkatnya jumlah penduduk, transportasi desa-kota yang semakin lancar, lebih tingginya upah buruh di kota dari pada di desa, semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat desa, dan beragam tata cara serta adat istiadat yang kadang kala dianggap sebagai beban oleh masyarakat desa. Adapun faktor penarik urbanisasi antara lain yaitu kesempatan kerja yang lebih luas dan bervariasi di daerah kota, adanya tingkat upah yang lebih tinggi di daerah kota, tersedianya lebih banyak kesempatan kerja (diferensiasi pekerjaan dan pendidikan dalam segala bidang), tersedianya barang-barang kebutuhan yang lebih lengkap di daerah kota, terdapatnya berbagai kesempatan dan wahana untuk rekreasi guna pemanfaatan waktu luang. Adapun Proses urbanisasi menurut Goldberg and Chinloy dalam Sarungu (2009), diklasifikasikan ke dalam tiga tahap yaitu urbanisasi agraria/pertanian, urbanisasi metropolitan berbasis industri, dan konter urbanisasi bukan metropolitan paskah industri.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan, dan tidak memiliki rasa bebas serta bersifat multidimensional (Arsyad, 2010). Menurut penyebabnya, kemiskinan dibedakan menjadi 2 yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat dan budaya suatu daerah yang membelenggu sekelompok masyarakat sehingga tetap lekat dan terlilit dengan kemiskinan. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang terjadi yang disebabkan oleh ketidakberdayaan seseorang terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil atau dengan kata lain “sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Kemiskinan relatif standar penilaiannya merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan kemiskinan absolut standar penilaiannya adalah standar kebutuhan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan baik makanan maupun non makanan yang kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Apabila dilihat dari aspek ekonomi, kemiskinan pada dasarnya memperlihatkan adanya suatu kesenjangan antara lemahnya daya beli dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi, kemiskinan secara implisit adalah sebagai berikut: (a) kemiskinan mencerminkan keadaan rendahnya permintaan agregat sehingga dapat mengurangi insentif untuk mengembangkan sistem produksi, (b) kemiskinan berhubungan dengan penggunaan rasio modal atau tenaga kerja yang rendah sehingga mengakibatkan produktivitas tenaga kerja yang rendah pula, dan (c) kemiskinan berhubungan dengan keadaan misalokasi beragam sumber daya baik alam maupun manusia (Nugroho, 2004). Lebih lanjut Nugroho (2004) juga menjelaskan penyebab kemiskinan yang menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yaitu :

a. Kemiskinan Alami

Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebagai akibatnya, sistem produksi beroperasi tidak optimal dengan efisiensi rendah. Beberapa ciri penting tentang kemiskinan alami yaitu (a) menggunakan teknologi yang rendah, (b) tingkat surplus produksi rendah sehingga beralih kepada rendahnya investasi, (c) tingkat ekonomi rendah dengan pengeluaran konsumsi untuk pangan di atas 70 persen, (d) kepadatan agraris rendah karena daya dukung lahan lemah, dan (e) wilayah mengalami proses keterbelakangan, yaitu perpindahan sumber daya kualitas ke luar wilayah.

b. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh berbagai kebijakan, peraturan dan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan umumnya ditandai ketimpangan seperti kepemilikan sumber daya dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan ketimpangan struktur sosial.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan seperti sikap hidup boros, ketidakcakapan bekerja, dan adanya tingkat tabungan yang rendah.

Metode Penelitian

Perubahan sosial dalam perspektif sosiologis merupakan sebuah isu yang tidak akan pernah selesai untuk diperdebatkan (Samsudin, 2017). Menurut Martono dalam Samsudin (2017:23), kajian ilmu sosial dalam perubahan sosial meliputi tiga dimensi waktu yang berbeda yaitu dulu, sekarang, dan masa akan datang. Oleh karena itu, dalam mengkaji perubahan sosial ada tiga aspek penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, objek, dan waktu.

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumen. Wilayah penelitian ini adalah Kota Jakarta dengan memfokuskan pada permasalahan kemiskinan sebagai akibat dari besarnya arus urbanisasi. Dalam menentukan lokasi penelitian, penulis melakukan studi pra-

penelitian melalui studi dokumentasi di Badan Pusat Statistik Kota Jakarta dan beberapa dokumentasi terkait yang mendukung kajian ini.

Hasil dan Pembahasan

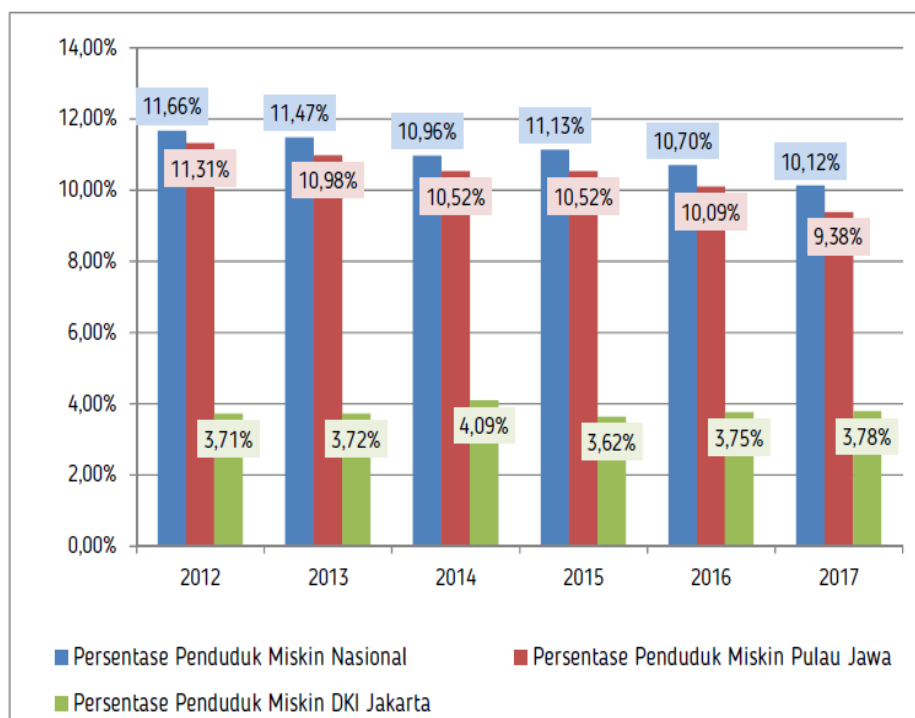
Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala sektor. Pada umumnya pelaksanaan pembangunan di Indonesia tersebut terfokus di daerah perkotaan daripada di pedesaan, sehingga menimbulkan gejolak sosial-ekonomi. Gejolak sosial-ekonomi yang terjadi biasanya yaitu ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain yang terjadi di daerah yang pelaksanaan pembangunannya relatif tertinggal. Hal tersebut dalam jangka waktu tertentu menimbulkan daya tarik masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan cara melakukan urbanisasi.

Menurut ensiklopedi nasional Indonesia, urbanisasi merupakan sebuah proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa urbanisasi merupakan perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang berdampak pada pembentukan masyarakat baru yang dilatarbelakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Di Indonesia, persoalan urbanisasi telah terjadi sejak lama. Arus urbanisasi yang tidak terbandung akan menimbulkan permasalahan baru di perkotaan. Urbanisasi yang berlangsung secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan kawasan kumuh (*Slum Area*) di perkotaan, meningkatnya pengangguran di perkotaan karena adanya arus perpindahan tenaga kerja tak terdidik dari desa dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya sektor informal yang tidak tertata yang berdampak akan meningkatnya masalah sosial di daerah perkotaan. Urbanisasi yang berlangsung secara terus menerus akan menghasilkan kota mega (*mega cities*) dan terjadinya aglomerasi perkotaan (*urban agglomeration*) yang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan-permasalahan baru tersebut misalnya polusi, kawasan kumuh, kemacetan, *urban crime*, dan kemiskinan. Adapun permasalahan baru yang di timbulkan bagi daerah asal (desa) yaitu berkurangnya sumber daya manusia karena penduduknya telah pergi ke kota yang pada akhirnya desa tidak mengalami perkembangan yang nyata.

Urbanisasi secara besar-besaran juga berdampak pada terbentuknya kota baru yang pembangunannya lebih unggul daripada kota-kota lain di sekitarnya. Kota baru tersebut sering diidentikkan dengan kota metropolitan. Salah satu kota yang mengalami permasalahan urbanisasi tersebut adalah Kota Jakarta. Oleh sebab itu, Kota Jakarta mengalami berbagai masalah sosial-ekonomi dan kependudukan. Guna mengatasi hal tersebut, campur tangan pemerintah sebagai salah satu pemegang kebijakan sangatlah diharapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut melalui perumusan kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada.

Masalah sosial-ekonomi dan kependudukan yang terjadi di Jakarta sebagai dampak dari meningkatnya arus urbanisasi setiap tahun yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Secara umum, pengangguran yang berlebihan akan memicu ketimpangan pendapatan dan akhirnya memperbanyak masyarakat yang terjerat kemiskinan. Sejak tahun 2014, capaian indeks Gini DKI Jakarta sudah menunjukkan ketimpangan yang melebihi rata-rata nasional. Lebih daripada itu, kemiskinan pada hakikatnya tidak hanya mengenai kesenjangan pendapatan melainkan juga bersifat multidimensi yang sangat berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Tren presentasi penduduk miskin di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian, peningkatan presentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2012-2017 tidak mencapai 1%, yaitu presentase penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 3,71% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 3,78%.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta, Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2012-2017



Sumber: BPS, 2018

Sesuai tabel 1, presentase penduduk miskin di DKI Jakarta dari tahun 2012-2017 cenderung meningkat namun masih lebih rendah dibandingkan presentase penduduk miskin tingkat nasional dan presentase penduduk miskin di Pulau Jawa. Pada hakikatnya, saat ini DKI Jakarta masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak. Hal tersebut dibuktikan oleh masih adanya penduduk miskin dan rentan miskin yang belum mendapat akses air bersih sebesar 94,9 persen, permukiman yang layak sebesar 90,1 persen, sanitasi yang layak sebesar 65,5 persen, dan bayi miskin dan rentan miskin yang belum memperoleh nutrisi yang cukup sebesar 55,6 persen. Persoalan pembangunan daerah tersebut lama kelamaan dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Anies-Sandi pada saat awal pelantikan membuat beberapa program pengentasan kemiskinan melalui dua pendekatan. Adapun pendekatan pengentasan kemiskinan tersebut adalah meliputi:

1. Mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin
Berupa pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kelompok Masyarakat Miskin dan Rentan, memperluas cakupan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, program pengendalian harga komoditas pangan pokok, subsidi pangan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi murid PAUD dan SD, keterjangkauan akses hunian, perluasan cakupan air bersih, subsidi transportasi menggunakan program OK Otrip, dan lain-lain.
2. Meningkatkan produktivitas warga, khususnya produktivitas masyarakat miskin dan rentan
Peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri, melahirkan wirausahawan baru melalui One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM melalui penataan regulasi (perizinan, zonasi usaha, dan sebagainya) beserta penguatan implementasinya, mendorong formalisasi usaha dari sektor-sektor usaha informal, pendampingan sekaligus perluasan akses terhadap modal dan pasar melalui kolaborasi bersama sektor swasta, pembuatan komitmen penggunaan produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha binaan Pemerintah Daerah,

pemberian pelatihan kerja pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD), serta peningkatan kapasitas berwirausaha bagi kelompok masyarakat termiskin.

Adapun guna menjamin efektifitas serangkaian program-program dalam mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan ketepatan sasaran program melalui penggunaan Data Terpadu yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari data nasional misalnya Basis Data Terpadu (BDT) dalam rangka mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
2. Memastikan tata kelola yang baik atas mekanisme setiap program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasinya.

Berkat adanya berbagai program yang pro terhadap kemiskinan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menurunkan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di DKI berhasil mencapai angka terendah selama empat tahun terakhir. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di DKI Jakarta dari September 2017 sampai Maret 2018 tercatat sebesar 3,57% atau sebanyak 373.120 jiwa. Jumlah penduduk miskin DKI mengalami penurunan secara signifikan apabila dibandingkan dengan September 2017 yang sebesar 3,78% atau sebanyak 393.130 jiwa. Hal ini berarti bahwa selama enam bulan jumlah warga miskin di Ibu Kota mengalami penurunan sebanyak 20.010 jiwa atau sebesar 0,21%. Angka kemiskinan yang telah tercapai tersebut merupakan angka kemiskinan yang paling rendah sejak sensus BPS pada Maret 2014 yang menunjukkan angka sebesar 3,92 persen dari jumlah penduduk. Namun pada fase berikutnya, angka kemiskinan pada Maret 2017 sebesar 3,77% atau sebanyak 389.690 jiwa. Pada semester berikutnya naik 0,01 persen atau 3.440 jiwa.

Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu terjaganya inflasi dan mulai tersedianya lapangan pekerjaan. Guna menurunkan angka kemiskinan pada masa berikutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggalakkan dan mengoptimalkan berbagai program yang dapat mendorong pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga akan intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan bantuan sosial yang tepat sasaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus berupaya dalam pengendalian harga, terutama komoditas-komoditas penyumbang garis kemiskinan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan BUMD.

Kesimpulan

Sesuai analisis pembahasan yang telah dilaksanakan, dapat dipahami bahwa permasalahan kemiskinan di DKI Jakarta semakin kompleks sehingga diperlukan upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan berbagai macam penyebabnya. Oleh sebab itu, Anies-Sandi pada saat awal pelantikan membuat beberapa program pengentasan kemiskinan melalui dua pendekatan. Adapun pendekatan pengentasan kemiskinan tersebut adalah mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitas warga, khususnya produktivitas masyarakat miskin dan rentan. Berkat adanya berbagai program yang pro terhadap kemiskinan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menurunkan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di DKI berhasil mencapai angka terendah selama empat tahun terakhir. Sesuai dengan kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan kondisi permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Namun alangkah baiknya, program-program tersebut dapat dioptimalisasi lagi agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga serendah-rendahnya. Penulis berharap bahwa pemerintah daerah di seluruh Indonesia dapat meniru langkah pengentasan kemiskinan tersebut agar angka kemiskinan di seluruh

Indonesia dapat diturunkan secara masif. Selain itu, penulis juga berharap agar hasil kajian ini dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menjadi referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada guna menciptakan sebuah kondisi masyarakat adil dan makmur yang terbebas dari belenggu kemiskinan.

Referensi

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta
- Boediono. 2013. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE.
- Ginting, Carisa KS., Irsad Lubis, dan Kasyful Mahalli. 2008. "Pembangunan Manusia di Indonesia". *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, vol 04, no 0, Wahana Hijau.
- Gilbert, Alan dan Josef Gugler. 2007. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. (Diterjemahkan Oleh: Anshori dan Juanda).
- Hatnanto, Khoiril Tri. 2018. *Era Anies-Sandi, Angka Kemiskinan Jakarta Terendah 4 Tahun Terakhir*. iNews.id dalam <https://www.inews.id/news/read/183061/era-anies-sandi-angka-kemiskinan-jakarta-terendah-4-tahun-terakhir> (Diakses: 10 November 2018, Pukul 05:48 WIB).
- Ishartono dan Raharjo, Santosa Tri. (2016). Sustainable Development Goals dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal* Vol.6 No.2, Hal.154-272. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/13198/6032> . (Diakses: 10 November 2018, Pukul 08:39 WIB).
- Ismani. 1991. *Pokok-Pokok Sosiologi Perkotaan*. Malang: Pusat Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Brawijaya.
- Jhingan, M.L., 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Depok : PT. Rajagrafinfo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2012. *Perencanaan daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat.
- Leibo, Jefta. 1986. *Sosiologi Pedesaan: Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mankiw, M. Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nanga, Muana. 2001. *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Pertama*. Jakarta : Rajawali Press.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nugroho
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri . 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES Indonesia.
- Rizki, Ulul Azmi Afrizal. 2018. SDG's dan Upaya Penurunan Kemiskinan di Indonesia. Detiknews dalam <https://news.detik.com/kolom/4313874/sdgs-dan-upaya-penurunan-kemiskinan-di-indonesia> . (Diakses: 10 November 2018, Pukul 07:58 WIB).
- Rohmad Zaini. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Samsudin. 2017. *Sosiologi Perkotaan: Studi Perubahan Sosial dan budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Bengku Press.
- Sarungu, Julianus Johnny. 2009. *Ekonomi Urbanisasi dan Pertumbuhan Pusat Perkotaan: Konsep, Model, dan Hasil Penelitian*. Surakarta: CV. Lintang Trans Media
- Sastra, Eka. 2017. *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan keadilan sosial di Indonesia*". Jakarta: PT. Mizan Republika.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. Jakarta : UI-Press.
- Sukirno, Sadono. 1997. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta : PT. Raja Gravindo Perkasa.
- Taringan, Robinson. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Widodo, Tri dkk. 2015. *Menuju Negara Maju : Apakah Indonesia Bergerak ke Arah yang Benar?*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Pola Keruangan Harga Tanah di Kota Banjarmasin

Ahmad Fakhruddin, Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia.

E-Mail: ahmadfakhruddin10@gmail.com

Widni Nispu Pratiwi, Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. E-Mail: widninispu@gmail.com

Abstrak

Banjarmasin merupakan salah satu kota di Kalimantan Selatan. Kota ini menjadi pusat atau Ibukota dari provinsi Kalimantan Selatan yang wilayahnya berhadapan langsung dengan sungai Barito yang dimanfaatkan sebagai jalur penghubung dengan laut Jawa. Dari sungai ini juga maka pada tahun 1965 dibangunlah pelabuhan Trisakti untuk mendukung kegiatan ekonomi Pulau Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan teori difusi spasial bahwa kejadian disuatu tempat akan berdampak dan merubah karakteristik suatu ruang. Dengan teori difusi spasial ini semakin menguatkan bahwa keberadaan pelabuhan trisakti akan berdampak pada sekitarnya. Mulai dari hubungan sosial masyarakat hingga kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini melihat bagaimana pola keruangan harga tanah terhadap pelabuhan Trisakti yang akan dijadikan titik pusat pertumbuhan. Variabel yang akan digunakan, Fasilitas, Utilitas, Penggunaan Tanah, Jarak dengan Pelabuhan Trisakti dan Aksesibilitas yang kemudian akan di analisis secara deskriptif dan spasial. Penelitian ini diharapkan dapat melihat pola harga tanah di Kota Banjarmasin yang ditarik dari titik pusat pertumbuhan berupa pelabuhan Trisakti. Setelah melakukan survey lapangan dan analisis, penelitian ini menghasilkan bahwa pola keruangan harga tanah di Banjarmasin ditentukan oleh pusat perekonomian yang berada di Jalan Achmad Yani. Keberadaan pelabuhan Trisakti tidak berpengaruh dikarenakan ada pusat perekonomian baru yaitu jalan Ahmad Yani. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa semakin jauh dari jalan Ahmad Yani maka akan semakin murah harga tanah.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Harga Tanah, Kota Banjarmasin, Penggunaan Tanah.

Pendahuluan

Tanah merupakan suatu sumber daya yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan manusia akan ruang membuat manusia selalu menginginkan membuka ruang baru. Pembukaan ruang baru yang intensif dan sejalan dengan pertumbuhan manusia yang terus meningkat (PBB, 2017). Keadaan ini akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan atau tidak seimbang supply and demand.

Kebutuhan dan ketersediaan ini tidak mengikat pada kebutuhan manusia untuk tinggal. Namun lebih lanjut manusia selalu berusaha untuk memanfaatkan tanah sebagai tempat untuk mempertahankan hidup. Mulai dari dimanfaatkan untuk industri, pertanian dan lain sebagainya yang pada ujungnya dimanfaatkan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Keadaan ini akan memaksa manusia untuk bersaing memperebutkan ruang yang tersisa sehingga membuat nilai suatu tanah menjadi tinggi (Sandy, 1995).

Nilai tanah dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu nilai nilai keuntungan, nilai sosial dan nilai kepentingan umum (Chapin, 1965). Nilai keuntungan sering dikaitkan dengan harga tanah. Pembentukan harga tanah yang terjadi diakibatkan dengan pemanfaatan tanah yang tinggi sehingga meningkatkan nilai tanah sekaligus harga tanah (Sandy, 1995). Peningkatan harga tanah yang terjadi akan membentuk harga baru yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Pembentukan harga tanah selalu berkaitan dengan kematangan tanah itu sendiri dengan didukung oleh fasilitas dan aksesibilitas. Fasilitas dan aksesibilitas berperan sebagai penunjang untuk

kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lokasi tanah. Semakin banyak kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lokasi tanah tersebut maka semakin tinggi harga tanah yang ada di wilayah tersebut. Hal ini berkaitan dengan nilai ekonomi atau harga tanah yang diakibatkan oleh kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat.

Peningkatan kebutuhan akan tanah terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di setiap daerah, fasilitas penunjang seperti aksesibilitas dan infrastruktur yang semakin maju. Peningkatan aksesibilitas di Indonesia sedang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada periode kepemimpinan presiden Joko Widodo. Pembangunan yang berbasis Indosentris, membuat pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas berlandaskan pada wilayah Indonesia sebagai negara Maritim sehingga pembangunan pelabuhan dan peningkatan kapasitas pelabuhan menjadi fokus utama dalam pembangunan aksesibilitas di Indonesia.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota di Kalimantan Selatan yang dapat terhubung secara langsung dengan Alki II Indonesia melalui Laut Jawa yang diteruskan menuju sungai Musi dan berakhir di pelabuhan Trisakti. Keberadaan sungai Musi di kota Banjarmasin membuat warga Kalimantan Selatan dan khususnya warga kota Banjarmasin memiliki kegiatan ekonomi yang berbasis air sungai. Kegiatan ini bisa berupa jual beli yang berada diatas air atau yang sering disebut Floating Market atau transaksi jual beli yang di kirimkan dari dan menuju luar pulau Kalimantan melalui sungai Musi. Dengan adanya ekonomi yang berbasis sungai ini membuat kota Banjarmasin bisa dikatakan sebagai pintu masuk kegiatan ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan mengingat juga kota Banjarmasin merupakan ibukota Kalimantan Selatan.

Keberadaan Kota Banjarmasin yang bisa dikatakan sebagai pintu masuk bagi kegiatan ekonomi yang ada di Kalimantan Selatan membuat kota Banjarmasin menjadi destinasi favorit bagi para pendatang dari pelbagai wilayah di Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk di Kota Banjarmasin yang sebesar 1,4% setiap tahunnya (BPS, 2017) membuat kebutuhan akan ruang dan tanah di kota Banjarmasin meningkat juga. Kebutuhan yang meningkat dan ketersediaan tanah yang tetap membuat nilai tanah khususnya pada harga tanah semakin meningkat. Perubahan harga yang terjadi inilah yang membuat penelitian mengenai perubahan harga tanah di kota Banjarmasin menjadi menarik. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran pola keruangan harga tanah di Kota Banjarmasin. Adapun dua pertanyaan masalah yang diangkat adalah; Bagaimana pola harga tanah di kota Banjarmasin dengan Pelabuhan Trisakti diambil sebagai pusat kota? Serta Bagaimana keterkaitan antara kepadatan penduduk, jumlah penduduk, penggunaan tanah, aksesibilitas dan fasilitas terhadap harga tanah?.

Kajian Pustaka

Tanah

Harga Tanah

Harga Tanah adalah ukuran harga nominal dalam bentuk satuan uang untuk luasan tertentu yang berlaku di pasaran (Subangkit, 2004). Harga tanah sering kali dikaitkan dengan nilai tanah. Hal ini disebabkan nilai tanah merupakan cerminan dari harga tanah dan secara langsung mempengaruhi harga tanah. Ini berarti nilai tanah memiliki peranan dalam penentuan harga tanah.

Harga Tanah Faktual

Harga tanah faktual adalah harga yang dihasilkan dari transaksi jual beli terbaru. Harga ini didasarkan adanya supply and demand pada tanah tersebut (Puslitbang Badan Pertanahan Nasional). Hal ini disebabkan ketika adanya permintaan yang tinggi di suatu tanah akan menaikkan nilai tanah sebagai akibat dari adanya keterbatasan dari kapasitas tanah tersebut. Keadaan ini sejalan dengan

teori dasar ekonomi yang menyebutkan bahwa kenaikan suatu harga barang diakibatkan dari adanya ketidakseimbangan dari permintaan dan penawaran. Contoh dari harga tanah faktual adalah harga tanah pasar.

Harga Tanah Taksiran

Harga tanah taksiran adalah harga yang ditentukan berdasarkan taksiran umum atau tawaran umumnya yang berlaku di suatu tempat (Northam, 1975 dalam Koestoer, 2001). Harga tanah taksiran ini di nilai berdasarkan analisa mengenai nilai suatu tanah yang dikaitkan dengan aksesibilitas, utilitas dan fasilitas di sekitar tanah tersebut. Namun penilaian ini didasarkan atas kepentingan yang menaungi badan atau pejabat resmi yang menilai harga tanah. Sebagai contoh, harga NJOP, Harga PPAT.

Teori Harga Tanah

Teori harga tanah berkembang dari waktu ke waktu yang dimulai dari munculnya teori Von Thunen. Pada teorinya disebutkan bahwa nilai suatu tanah ditentukan dari letak suatu tanah itu pada suatu wilayah yang homogeni dalam artian kesuburan, iklim serta kondisi lingkungannya, kemungkinan pergerakan ke berbagai tujuan relatif sama, biaya transportasi akan meningkat secara berbanding lurus dengan jarak tempuh, dan kota memproduksi barang – barang untuk kebutuhan pedesaan sebaliknya pedesaan memproduksi pertanian untuk kebutuhan di kota.

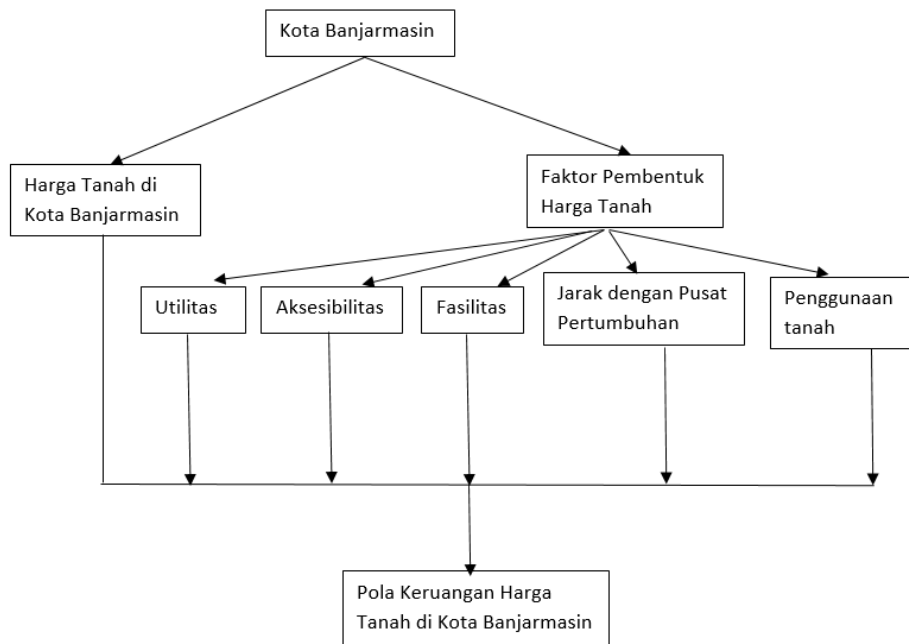
Kemudian konsep Van Thunen di modifikasi oleh William Allonso (1964) yang kemudian mengemukakan konsep Bid Rent Curve (BRC) atau disebut penawaran kurva sewa. Kemudian sebelum teori Allonso muncul ada teori Burgess (1925) yang mengemukakan tentang nilai tanah. Dalam teorinya, Burgess menyebutkan bahwa harga sewa tanah akan linier dengan jarak dari aksesibilitas terhadap kota. Semakin jauh dari pusat kota maka sewa tanahnya akan semakin murah mengingat aksesibilitas ke tanah tersebut dari pusat kota sedikit lebih rumit dibandingkan dengan tanah yang ada di pusat kota.

Metode Penelitian

Data

Dalam penelitian ini secara umum memerlukan data sebagai berikut :

Jenis Data	Data yang Digunakan	Sumber Data
Data Primer	Harga Tanah Faktual	Wawancara Langsung dengan warga
		Wawancara dengan pihak pemerintah
Sekunder	Harga Tanah Taksiran	Dispenda Kota Banjarmasin
	RTRW Kota Banjarmasin	Bappeda Banjarmasin
	Peta Penggunaan Tanah	ATR/BPN Kota Banjarmasin
	Peta Administrasi Kota Banjarmasin	Bappeda Kota Banjarmasin

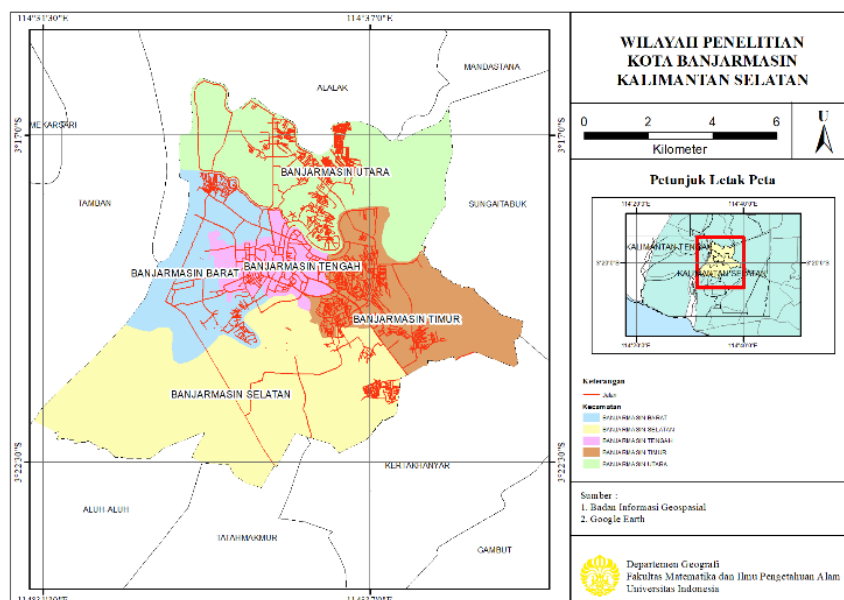


Gambar : Diagram Konsep Penelitian

Dari data yang ada di yang dihasilkan baik dari data primer maupun sekunder akan diolah menggunakan arc GIS. Dengan menggunakan Arc GIS nantinya data tersebut dapat terlihat bagaimana pola harga tanah di kota Banjarmasin. Setelah diolah menggunakan Arc GIS nantinya data tersebut beserta peta yang dihasilkan akan di bahas menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Wilayah Penelitian



Gambar 1. Lokasi Wilayah Penelitian

Kota Banjarmasin terletak pada $3^{\circ}15'$ sampai $3^{\circ}22'$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}32'$ Bujur Timur. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Tanah aluvial yang didominasi struktur lempung adalah merupakan jenis tanah yang

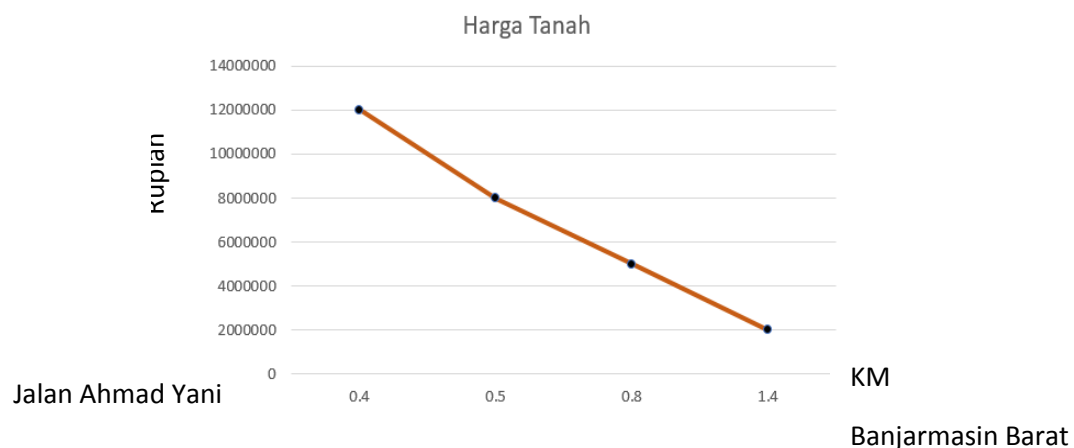
mendominasi wilayah Kota Banjarmasin. Sedangkan batuan dasar yang terbentuk pada cekungan wilayah berasal dari batuan metaforf yang bagian permukaan ditutupi oleh kerikil, pasir dan lempung yang mengendap pada lingkungan sungai dan rawa.

Kota Banjarmasin beriklim tropis dimana angin muson barat bertiup dari Benua Asia melewati Samudera Hindia menimbulkan musim hujan, sedangkan angin dari Benua Australia adalah angin kering yang berakibat adanya musim kemarau. Curah hujan yang turun rata-rata per tahunnya kurang lebih 2.400 mm dengan fluktuasi tahunan berkisar antara 1.600-3.500 mm, jumlah hari hujan dalam setahun kurang lebih 150 hari dengan suhu udara yang sedikit bervariasi, sekitar 26 °C.

Banjarmasin memiliki suku asli yang bernama Suku Banjar, selain suku banjar Banjarmasin dihuni oleh beberapa suku yang datang dari berbagai pulau di Indonesia seperti Suku Jawa, Suku Madura, Suku Bukit, Suku Bugis, Suku Sunda, Suku Bakumpai, Suku Bandar, dan lain-lain. Mayoritas mata pencaharian penduduk kota Banjarmasin adalah dagang, tani, industri dan lain-lain. Jika dilihat berdasarkan kondisi relatifnya, Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan di sebelah Utara dengan Kabupaten Barito Kuala, di sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar, di sebelah Barat dengan Kabupaten Barito Kuala, dan di sebelah Selatan dengan Kabupaten Banjar. Dengan memiliki banyak anak sungai, masyarakat Kota Banjarmasin memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada.

Pola Keruangan Harga Tanah di Kota Banjarmasin

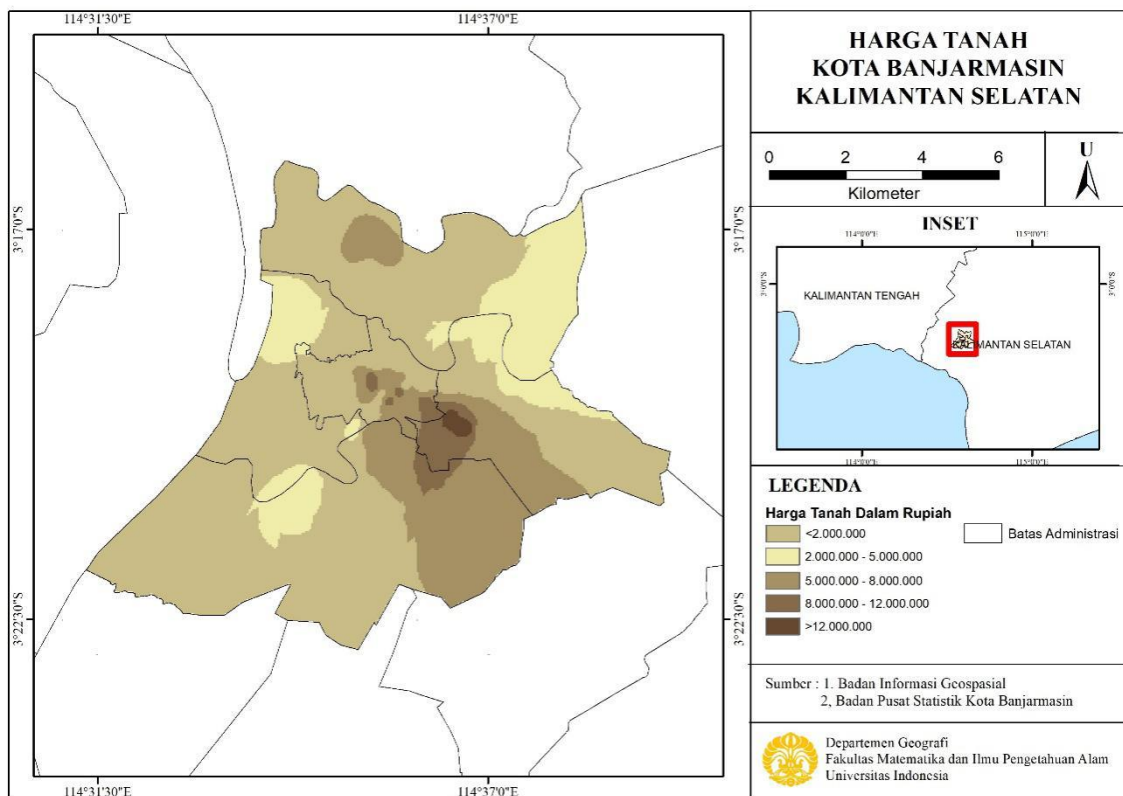
Setelah melewati survey dan pengolahan data, penelitian ini menemukan bahwa harga tanah di kota Banjarmasin tidak bergantung pada kedekatan dengan Pelabuhan Trisakti. Namun harga tanah mengikuti kedekatan dengan pusat ekonomi dalam hal ini Jalan Ahmad Yani. Dalam penelitian ini menemukan harga tertinggi berada di Jalan Ahmad Yani yang merupakan pusat perkonomian kota Banjarmasin. Hal ini tercermin data harga tanah yang tertinggi terletak di jalan Ahmad Yani. Yang kemudian semakin menurun ketika menjauh dari pusat perkonomian atau jalan Ahmad Yani.



Grafik 1. Harga Tanah di Kota Banjarmasin
(Sumber: Pengolahan Data, 2018)

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin jauh dengan jalan Ahmad Yani maka harga tanah yang didapatkan semakin turun. Pada jarak 0.4 km dari jalan Ahmad Yani harga tanah masih terlihat sangat tinggi yaitu sebesar 12 juta rupiah. Daerah ini merupakan daerah pusat perkonomian. Terdapat dua mall besar yaitu Ramayana Mall dan Mall Duta. Kemudian bergerak sedikit menjauh atau sekitar 0.5 km dari jalan Ahmad Yani harga tanah mulai turun menjadi 8 juta rupiah per meter persegi. Daerah ini mulai berubah menjadi daerah permukiman dan daerah perkonomian menengah ke

bawah. Kemudian setelah mencapai jarak 1.4 km mulai muncul pertanian sehingga harga tanahnya turun hingga di bawah 2 juta rupiah.



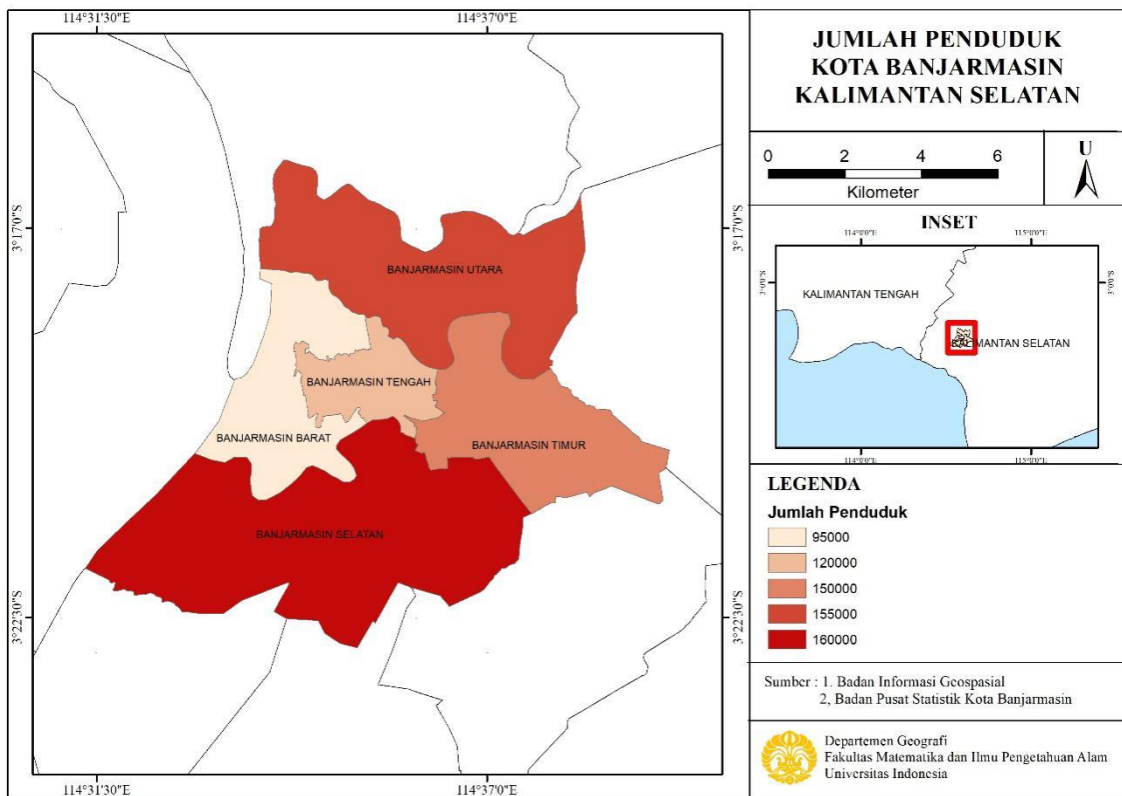
Gambar. Harga Tanah Kota Banjarmasin Tahun 2017
(Sumber: Pengolahan Data, 2018)

Peta di atas merupakan peta hasil pola keruangan harga tanah kota Banjarmasin. Harga tanah tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan warga dan juga dengan pihak pemerintah. Dari harga tersebut pada penelitian ini diolah sehingga menghasilkan peta tersebut. Semakin gelap warna yang ada dalam peta semakin mahal harga tanah yang ada dan semakin terang warna yang ada dalam peta maka harga tanahnya semakin rendah.

Harga Tanah dengan Jumlah Penduduk

Menurut Teori Ekonomi menyebutkan bahwa semakin banyak permintaan maka harga semakin rendah. Hal ini disebabkan tidak seimbang antara *supply and demand*. Keadaan ini dicerminkan dengan semakin meningkatnya penduduk maka semakin banyak kebutuhan tanah sehingga meningkatkan harga tanah sebagai akibat jumlah tanah yang sangat terbatas.

Dibawah ini merupakan peta persebaran jumlah penduduk :



Gambar 4. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin
(Sumber: Pengolahan Data, 2018)

Jika dilihat dari jumlah penduduk, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terletak pada kecamatan Banjarmasin selatan. Kecamatan ini juga yang memiliki rerata harga tanah tertinggi. Yaitu dengan interval dari 2.000.000 hingga diatas 12.000.000. Wilayah kecamatan ini dengan jumlah penduduk terbanyak menyebabkan kebutuhan akan tanah sangat tinggi.

Tabel 1. Kepadatan Penduduk

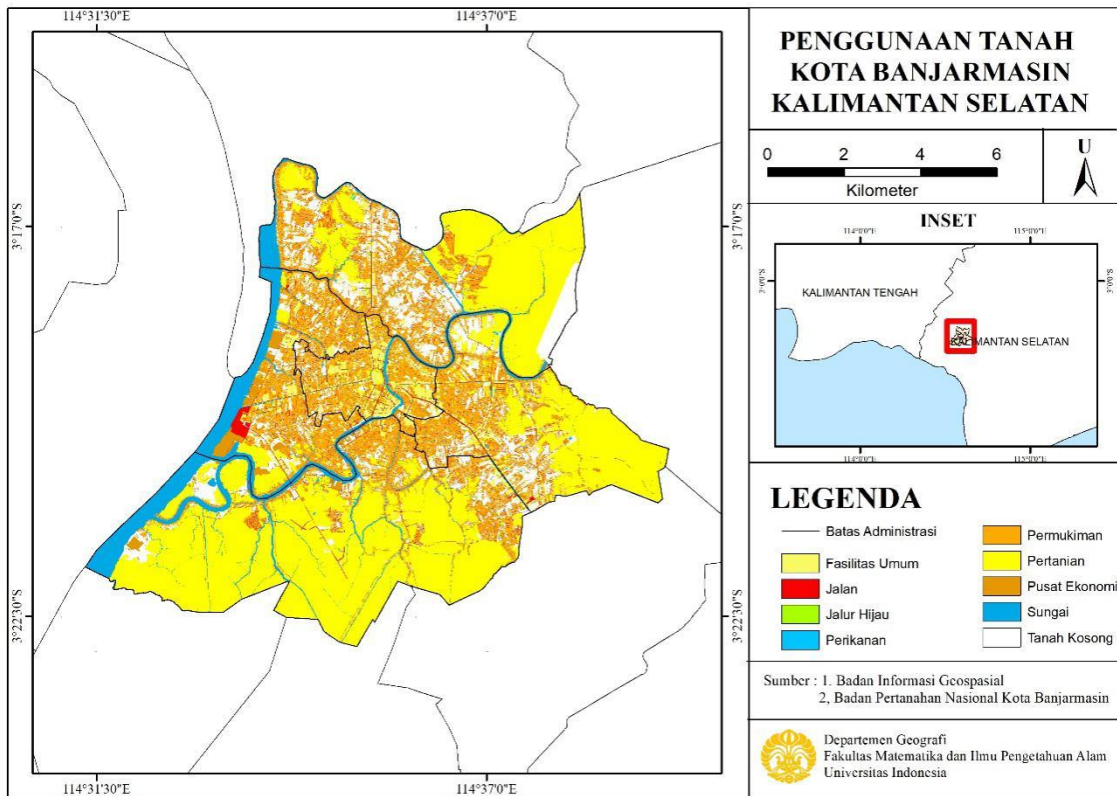
Kecamatan	Presentase Penduduk Total	Kepadatan Penduduk per KM ²
Banjarmasin Selatan	23,35	4174
Banjarmasin Timur	17,77	5097
Banjarmasin Barat	22,03	11477
Banjarmasin Tengah	13,92	14295
Banjarmasin Utara	22,94	9488
Jumlah	100,00	6949

(Sumber: BPS, 2017)

Bila dilihat dari kepadatan penduduk per kmnya terlihat kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki kepadatan paling rendah yaitu dengan 4174 penduduk per KM². Dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi ini membuat kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Hal ini akan menyebabkan *Supply* tanah yang tetap tidak mampu menampung *demand* penduduk yang terus meningkat di setiap tahunnya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya harga tanah yang cukup tinggi di wilayah Banjarmasin Selatan.

Harga Tanah Dengan Penggunaan Tanah Kota Banjarmasin

Penggunaan tanah merupakan dampak dari kehidupan masyarakat yang menempati sebuah ruang. Gambaran penggunaan tanah di suatu daerah menurut Sandy (1978) dapat memperkirakan tingkat kehidupan sosial, ekonomi, serta arah kehidupan daerah tersebut. Semakin besar kemungkinan untuk hidup yang terdapat disuatu daerah, maka makin besar manusia yang akan bermukim atau mendirikan rumah.



Gambar 4. Penggunaan Tanah Kota Banjarmasin

Penggunaan tanah Banjarmasin didominasi oleh pertanian. Hal ini terlihat dari peta tersebut yang menunjukkan banyaknya pertanian yang ada di wilayah kota Banjarmasin. Setelah pertanian dominasi penggunaan tanah yang ada di Kota Banjarmasin yaitu Permukiman dan Pusat Ekonomi. Keadaan ini akan membuat terbatasnya tanah yang bisa dimanfaatkan bagi para warga Kota Banjarmasin sebagai rumah atau permukiman.

Keadaan ini akan membuat harga tanah meningkat sebagai akibat tidak adanya lahan yang masih tersedia yang bisa dimanfaatkan untuk permukiman sebagai imbas pertumbuhan penduduk. Kemudian dari peta ini terlihat dominasi permukiman terletak di bagian pusat mulai dari wilayah selatan, barat, tengah hingga timur. Dan untuk pertanian di dominasi wilayah pinggiran kota Banjarmasin.

Bila dilihat penggunaan tanah yang memiliki harga tanah tertinggi yaitu lahan terbangun yaitu permukiman, pusat ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori Van Thunen yaitu harga tanah akan semakin tinggi bila semakin dekat dengan pusat perekonomian. Pada peta penggunaan tanah ini menunjukkan bahwa harga tanah tertinggi yaitu daerah pusat perekonomian sedangkan untuk harga tanah yang rendah berada di wilayah pinggiran kota Banjarmasin dan memiliki jenis penggunaan tanah berupa pertanian.

Kesimpulan

Pola keruangan harga tanah di Kota Banjarmasin sebagian besar mengikuti teori Von Thunen. Yaitu semakin mendekati pusat perekonomian maka akan semakin mahal. Namun yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan di Kota Banjarmasin adalah jalan Ahmad Yani sebagai pusat kegiatan ekonomi Kota Banjarmasin. Hal ini tercermin dari hasil penelitian yang menunjukkan hasil bahwa harga tanah semakin mahal ketika semakin mendekati pusat perekonomian yaitu Jalan Ahmad Yani yang berada di kecamatan Banjarmasin Tengah dan kecamatan Banjarmasin Selatan.

Jika dilihat dari penggunaan tanah semakin ramai atau semakin bernialai suatu penggunaan tanah maka akan semakin mahal. Hal ini terlihat dari harga tanah yang semakin mahal ketika harga tanah semakin mahal ketika penggunaan tanahnya berupa lahan terbangun (pusat perekonomian, permukiman dan pertokoan). Sedangkan penggunaan tanah yang berupa pertanian memiliki kecenderungan harga tanah rendah.

Tingkat jumlah atau kepadatan penduduk, aksesibilitas juga menjadi salah faktor pembentuk harga tanah di kota Banjarmasin. Sehingga harga tanah tertinggi terletak di Jalan Ahmad Yani yang terletak di kecamatan Banjarmasin Selatan yang memiliki jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan aksesibilitas tinggi.

Referensi

- Alonso, w. (1964). *Location and Land Use*. Toward a General Theory of Land Rent.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin: Kalimantan Selatan.
- Bintarto. 1977. *Pengantar Geografi Kota*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Chapin, F.S. *Urban Land Use Planning*. Urbana (III) : University of Illinois Press, 1965.
- Hartato, Emir. *Skripsi : Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) Terhadap Nilai Tanah di Kabupaten Lombok Tengah*. Universitas Indonesia, 2012.
- Goldberg, M.A., and P. Chinloy. *Urban Land Economics*. Wiley, 1984.
- Munawar, Ahmad. *Skripsi : Pola Keruangan Harga Tanah Kota Depok*. Universitas Indonesia. 2013
- Northam, R. M., 1979. *Urban Geography*. John Willey And – Sons. Canada.
- Pardamean, H. B. Skripsi : Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Pola Perubahan Harga Tanah Sawah Di Kecamatan Bogor Selatan. Universitas Indonesia, 2018
- Sandy, I. M. Republik Indonesia, Geografi Regional : buku teks. Jurusan Geografi, FMIPA Universitas Indonesia, 1985
- KBBI.kemendikbud.go.id

Menilik Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Selatan untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Bunga Aulia Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Sriwijaya University, Jl Raya Prabumulih Inderalaya, Ogan Ilir, email : Bunga6697@gmail.com

Rika Henda Safitri, Fakultas Ekonomi, Sriwijaya University, Jl Raya Prabumulih-Inderalaya, Ogan Ilir, email : rikahenda@unsri.ac.id

Rosihan Arief HS, Fakultas Ekonomi, Sriwijaya University Jl Raya Prabumulih-Inderalaya, Ogan Ilir

ABSTRAK

Pengembangan infrastruktur di Indonesia terus meningkat dengan pesat, mengingat pentingnya peran dari infrastruktur guna mengukur maju atau tidaknya suatu wilayah atau negara. Salah satu dimensi pokok dari pembangunan ekonomi yakni keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Terlebih Indonesia sekarang berada pada industri 4.0 yang mengedepankan teknologi. Akibatnya, terdapat kesenjangan/ GAP terhadap pembangunan kota dan desa, maka terjadilah tingkat urbanisasi yang tinggi. Masyarakat desa lebih memilih untuk tinggal dan bermukim di kota karena dianggap dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk (1) mengkaji dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian di Indonesia, (2) menganalisis realisasi dari pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan guna mengurangi *urban crisis*, (3) merumuskan dampak yang diakibatkan dari pembangunan jalan tol guna mengurangi *urban crisis*.

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen penelitian yakni observasi dan *interview* dengan pihak yang terkait, serta menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mengkombinasikan data sekunder yang diperoleh dari studi *literature* dan menggambarkan fakta yang ada di lapangan secara sistematis dan akurat terkait objek yang akan diteliti.

Hasil dari penulisan ini diharapkan bahwa dengan berorientasi dari metode yang telah diuji dan tepat untuk diterapkan akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan mengurangi *urban crisis* dan akan menambah angka *Gross Domestic Bruto* (GDP) Indonesia.

Kata kunci : *infrastruktur, perekonomian Indonesia, urban crisis*

Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman yang membuat perkembangan teknologi meningkat dengan cepat, dengan ditandai oleh maraknya evolusi generasi industri yang semula murni menggunakan tenaga manusia berubah menjadi penggunaan tenaga robot atau disebut *automatic system*. Hal tersebut, memiliki kelebihan dan kekurangan di setiap aspek seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Menurut Wahyudi et al. (2012) pada 2009, para gubernur dalam MPU mengeluarkan Keputusan Bersama No. 47/SK/MPU/2009 tentang Rekomendasi kepada Pemerintah, yang memuat berbagai isu/permasalahan di bidang pertanian, ketenagakerjaan, pekerjaan umum, sosial, kesehatan, perempuan, dan komunikasi. Dari sudut pandang ekonomi, hal tersebut jelas menguntungkan, karena membuat tingkat produksi barang atau jasa meningkat serta menambah nilai ekonomis, efektif, dan efisien. Tetapi, dari sudut pandang sosial atau kependudukan. Hal tersebut membuat semakin tingginya *gap* atau kesenjangan yang terjadi pada masyarakat. Timbulnya angka pengangguran yang tinggi akibat berubahnya sistem dari manual menjadi komputerisasi.

Menurut penelitian Kurniawan (2012) Proyek pembangunan pada hakekatnya masuk ke dalam relung kehidupan masyarakat dengan cara menawarkan diskursus-diskursus kritis, sekaligus menawarkan bentuk-bentuk alternatif kebijakan yang diyakini paling ampuh dan realistis menjawab persoalan-persoalan masyarakat terutama di negara-negara miskin. memasuki milenium kedua,

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penanda dimulainya era desentralisasi (baca: otonomi daerah). Otonomi daerah bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penyediaan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah menuju masyarakat sejahtera (Saksono 2012).

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari maraknya pembangunan infrastruktur yang ada. Umumnya masyarakat yang memiliki *low skill* lebih cenderung akan mencari sumber nafkah dengan menjadi buruh bangunan atau project pada infrastruktur. Menurut Nugraha (2018) pembangunan infrastruktur yang baik di suatu negara mencerminkan kemajuan dan kemantapan negara itu menjadi suatu negara yang makmur, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penelitian Juniarti, N.D.(2017) tingkat pertambahan PDRB yakni pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi yaitu : Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air bersih, Bangunan, Perhotelan dan Restoran, Perdagangan, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan sektor jasa lainnya. Atas dasar tersebut pertumbuhan ekonomi lebih di dominan oleh sektor industri, mengingat adanya revolusi industri 4.0 yang baru saja berjalan. Indonesia yang merupakan negara berkembang yang mulai maju tentu sangat sesuai untuk menggunakan ukuran ini karena melihat pembangunan dari segi ekonomi saja pada saat sekarang sudah kurang relevan (Pratomo and Sumargo 2017).

Dalam hal itu, peran pemerintah sangatlah penting untuk memulai perencanaan pembangunan negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Bathoro (2011) kebijakan tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis-administratif semata, tetapi juga sebagai persoalan politik. Karena terkait dengan penggunaan kekuasaan, yang niscaya kebijakan publik berlangsung dalam suatu setting kekuasaan tertentu. Artinya ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Biasanya, analisis kebijakan biasa dilakukan oleh yang berkuasa, namun tidak tertutup kemungkinan analisis ini dilakukan oleh pihak yang dikuasai. Dalam pemerintahan otoriter, dimana keputusan kebijakan memang cenderung memposisikan diri sebagai penguasa atau kaki tangan penguasa. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melalui kebijakan yang nantinya dianggap sebagai penyelesaian masalah yang jitu (Prayitno et al. 2016).

Hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), salah satunya Paket Kebijakan Ekonomi VI. PKE VI merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), salah satunya Paket Kebijakan Ekonomi VI. PKE VI merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat (Novandra 2010).

Akan tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh indikator jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian Hukom (2014) sebagai faktor produksi dari perekonomian daerah, secara teoritis pertumbuhan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Di Sumatera Selatan, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang semakin tinggi. Pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan yang baru diselesaikan pada tahun 2018 ini adalah pembangunan LRT guna mempermudah akses transportasi dari bandara menuju *Jabaring Sport Center* atau venue dilangsungkannya Asian Games Agustus 2018 yang lalu. Pada tahun 2018, *project* jalan Tol di Sumatera Selatan seperti Tol Palindra, tol Betung dan lainnya telah terselesaikan. Maka dari itu tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai :

1. Dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian di Indonesia
2. Realisasi dari pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan guna mengurangi *urban crisis*
3. Dampak yang diakibatkan dari pembangunan jalan tol guna mengurangi *urban crisis*.

Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peranan pembangunan infrastruktur terkhusus pada wilayah Sumatera Selatan akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan juga meminimalisir tingkat pengangguran di Indonesia.

Adapun analisis masalah mengacu pada instrumen penelitian yakni observasi dengan melakukan *interview* pada beberapa pihak terkait serta mengacu penelitian terdahulu atau studi *literature* dan analisis kasus terkait peningkatan infrastruktur.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder dengan sumber data diperoleh dari studi *literature* dan dibantu dengan observasi dan melakukan *interview* tanpa memilih narasumber.

Prosedur Penelitian

Dalam melakukan kajian mengenai permasalahan ini, pihak peneliti mencari sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, situs internet, dan lainnya. Dilanjutkan dengan teknik pemeriksaan data untuk mengecek dan membandingkan keakuratan data. Adapun tahap – tahap penelitian yakni :

1. Tahap peninjauan pustaka, pada tahap ini akan dikumpulkan data dari sumber kajian pustaka untuk ditarik dugaan sementara.
2. Pengumpulan data, pada tahapan ini untuk memperoleh data dan berbagai informasi yang diperlukan.
3. Penggolongan data dan analisa, pada tahapan ini data berupa hasil observasi dan *interview* secara langsung.
4. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini kesimpulan disempurnakan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, dengan mencari setiap makna dari verifikasi data atau kasus.

Hasil Dan Pembahasan

Infrastruktur

Dalam penelitian Bangun & Firdaus, (2009) pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah.

Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung bukti perkembangan infrastruktur di Sumatera Selatan seperti pembangunan LRT, jalan TOL, jembatan MUSI 4 yang berada di kawasan Plaju, dan jembatan MUSI 6 yang berada di kawasan Tangga Buntung. Untuk memperkuat bukti, maka dari itu dilakukan *interview* kepada salah satu karyawan yang memiliki jabatan sebagai konsultan pembangunan jalan TOL untuk wilayah Indralaya. Dari hasil *interview* diperoleh bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur, masyarakat yang pengangguran, terhusus yang

berada di sekitaran kabupaten Indralaya dapat menjadi buruh lepas. Karyawan tol berkata bahwa efek dari pembangunan jalan tol ini adalah lebih dari 100 buruh lepas yang terlibat dalam pembangunan jalan tol tersebut. karyawan tol akan di bagi *shift* dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, adanya pembangunan infrastruktur ini akan mengurangi pengangguran di Sumatera Selatan.

Pengangguran

Penelitian oleh (Hukom 2014) menyebutkan bahwa adanya penyerapan tenaga kerja pada sektor kapitalis (non pertanian) tanpa mengurangi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menyebabkan meningkatnya surplus tersebut kemudian diinvestasikan kembali ke sektor kapitalis. Hal ini menyebabkan output perekonomian semakin meningkat, dan porsi dari sektor kapitalis (non pertanian) semakin membesar sebagai akibat dari penambahan tenaga kerja. Oleh karena itu adanya pertumbuhan kedua sektor tersebut menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi.

Provin si	2013		2014		2015		2016		2017		2018
	Febru ari	Agust us	Febru ari	Agust us	Febru ari	Agust us	Febru ari	Agust us	Febru ari	Agust us	Febru ari
Sumat era Selata n	5,41	4,84	3,84	4,96	5,03	6,07	3,94	4,31	3,80	4,39	4,02

Sumber : BPS Indonesia

Menurut data diatas tingkat pengangguran di Sumatera Selatan cenderung stagnan karena kurang adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

Perekonomian Indonesia

Menurut (Hukom (2014) terdapat sepuluh jenis perubahan dalam struktur perekonomian yang terjadi dalam proses pembangunan negara-negara sedang berkembang. Perubahan-perubahan tersebut dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu (1) perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi; (2) perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber daya; dan (3) perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam ekonomi yang termasuk sebagai proses akumulasi adalah pembentukan modal atau investasi, penerimaan pemerintah, dan usaha menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk dalam proses alokasi sumber daya adalah struktur permintaan domestik, struktur produksi, dan struktur perdagangan. Selanjutnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk proses demografis, dandistributif adalah proses perubahan dalam faktor alokasi tenaga kerja dalam berbagai sektor, urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian serta distribusi pendapatan.

Model Pertumbuhan Tanpa Perkembangan Teknologi

Model ini menggunakan model fungsi produksi yang secara umum dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = f(K_t, L_t)$$

dengan :

Y = pendapatan riil

K = stok modal

L = tenaga kerja

t = subskrip untuk waktu

Bentuk spesifik dari hubungan ini dikenal sebagai fungsi produksi

Cobb-Douglas.

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^\beta$$

Dimana α dan β adalah elastisitas modal dan tenaga kerja terhadap output. Pendapatan akan meningkat bila setiap tenaga kerja mendapat modal peralatan yang lebih banyak dan proses ini disebut '*capital deepening*' namun tidak dapat terus-menerus meningkat tanpa adanya pertumbuhan teknologi karena modal (seperti juga tenaga kerja) akhirnya akan meningkat dengan pertumbuhan yang semakin berkurang (*diminishing return*) (Bangun and Firdaus 2009).

Model Pertumbuhan dengan Perkembangan Teknologi

Model Neoklasik tanpa perkembangan teknologi kurang realistik untuk membuat analisis, supaya lebih realistis maka ditambahkan faktor perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan. Cara yang paling umum adalah memasukkan perkembangan teknologi sebagai elemen dalam fungsi produksi. Modal dan tenaga kerja diasumsikan dapat mengambil keuntungan dari adanya perkembangan teknologi (Bangun and Firdaus 2009).

Fungsi produksi yang baru menjadi :

$$Y_t = f(A_t, K_t, L_t)$$

Dengan A adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat dikatakan tidak melekat dalam model karena tidak tergantung dari masukan modal dan tenaga kerja. Jika diasumsikan perkembangan teknologi meningkat secara halus sepanjang waktu (tingkat pertumbuhan tetap), maka fungsi produksi Cobb-Douglas menjadi :

$$Y_t = Ae^{\theta t} \pi r^2 K_t^\alpha L_t^\beta$$

Dengan g adalah pertumbuhan dari perkembangan teknologi per periode waktu t . Representasi ini merupakan penyederhanaan dengan mengabaikan kemungkinan terjadi perkembangan teknologi melalui investasi. Sebagai tambahan, tenaga kerja dapat juga menjadi lebih terampil sehingga dapat menaikkan efisiensi dan dalam kasus ini (seperti juga modal) dianggap bersifat tidak homogen. Asumsi lain yang digunakan model ini adalah sistem perekonomian berdasarkan pasar berkompetisi sempurna dengan faktor harga yang fleksibel serta sumber daya pada kesempatan kerja penuh.

Kesimpulan

Perekonomian Indonesia cenderung masih dianggap stabil. Indikator dalam menilai tumbuhnya perekonomian Indonesia yakni dengan mengurangi tingkat pengangguran yang dapat diatasi dengan menambah lapangan pekerjaan seperti pembangunan infrastruktur dapat mengatasi hal tersebut dan mengurasi *urban crisis* yang ada di Indonesia.

Dengan menggunakan model yang dirasa cocok untuk Indonesia, Indonesia dapat mengaplikasikan model pertumbuhan dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini model yang cocok untuk diterapkan di Indonesia yakni model pertumbuhan dengan perkembangan teknologi.

Hasil dari wawancara dengan salah satu karyawan tol sepakat jika dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi tingkat pengangguran di Sumatera Selatan.

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih spesifik dalam melakukan kajian dengan masalah tersebut, dan dapat mengembangkan metodologi lainnya untuk memecahkan masalah tersebut.

Referensi

- Bangun, Rindang And Muhammad Firdaus. 2009. "Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 2 No 2:222-36.
- Bathoro, Alim. 2011. "Embangunan Kemaritiman Dan Pesisir Studi Kasus: Analisis Kebijakan Jembatan Selat Sunda Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011." *Jurnal Selat* 3 No 2 Edi:451-62.
- Hukom, Alexandra. 2014. "Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 7 No 2(Issn 2301 8968):120-29.
- Juniarti. 2017. "Analisis Efektivitas Penerapan Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Dalam Upaya Peningkatan Pdrb Kab. Lampung Selatan." 1-163.
- Kurniawan, Borni. 2012. "Kearifan Lokal Di Tengah Arus Pembangunan." *Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1 No 2:225-38.
- Novandra, Rio. 2010. "Baseline Kondisi Sosial Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Di Tanjung Lesung: Analisis Data Sensus Penduduk 2010." *Pusat Penelitian Ekonomi Lipi* 107-20.
- Nugraha, Arga. 2018. "Politik Pembangunan Era Jokowi (Studi : Peran Pemerintah Tiongkok Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia)."
- Pratomo, Dody And Bagus Sumargo. 2017. "Sebuah Alternatif: Better Life Index Sebagai Ukuran Pembangunan Multidimensi Di Indonesia An Alternative: Better Life Index As A Measure Of Multidimensional Development In Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 16(2):123-40.
- Prayitno, Budi, Arif Kusumawanto, Didik Kristiadi, And Suryanto. 2016. "Skema Inovatif Pemenuhan Kesejahteraan Atas Papan." *Kawistara* 6(1):47-61.
- Saksono, Herie. 2012. "Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah Creative Economy: New Talents For Regional Competitiveness Triggers." *Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah* 93-104.
- Wahyudi, Andi Et Al. 2012. "Kerjasama Antarprovinsi Untuk Pembangunan Regional Kalimantan Yang Terintegrasi." *Jurnal Borneo Administrator* 8(1):31-49.

Lampiran 1



Lampiran 2



Kajian Empiris Terhadap Perspektif dan Kesiapan Mahasiswa dalam Dunia Kerja dan Wirausaha Guna Menghadapi Bonus Demografi (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Negeri Semarang)

*Ulfatun Nikmah, Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang,
ulfatunnikmah932@gmail.com;*

*Meliandayani, Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang,
meliandameli8598@gmail.com*

Abstrak

Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) memproyeksikan bonus demografi akan terjadi di Indonesia tahun 2035. Bonus demografi dapat menjadi sebuah peluang bagi suatu negara apabila pemudanya memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam dunia kerja. Sebaliknya, bonus demografi juga dapat menjadi ancaman yang cukup berbahaya apabila pemudanya tidak dapat memenuhi permintaan kompetensi dan keterampilan dunia kerja sehingga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Mahasiswa sebagai pemuda dan poros negara memiliki peran besar dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia. Salah satunya ialah dengan berperan aktif dalam dunia wirausaha dengan menciptakan lapangan kerja. Namun, sebagian besar mahasiswa lebih banyak mencari kerja dan menjadi pekerja daripada menciptakan lapangan kerja pasca lulus dari universitas. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia wirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana perspektif dan kesiapan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam memasuki dunia kerja dan wirausaha. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 56 persen mahasiswa Universitas Negeri Semarang berorientasi mencari kerja daripada berwirausaha akan tetapi tingkat kesiapan mahasiswa dalam menerjuni diantara dua objek tersebut justru lebih siap pada mahasiswa yang memilih wirausaha.

Kata Kunci: Bonus Demografi; Dunia Kerja; Mahasiswa; Wirausaha.

Pendahuluan

Bonus demografi merupakan peluang yang diperoleh oleh suatu negara yang memiliki tingkat perbandingan proporsi penduduk produktif lebih besar dalam evolusi kependudukan yang dialami (Noor, 2012). Di Indonesia, bonus demografi terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang dan dipercepat oleh keberhasilan kebijakan pendudukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, meminimalkan tingkat fertilitas serta suksesnya program pembangunan. Salah satu contohnya ialah program Keluarga Berencana (KB). Program ini telah berhasil menggeser usia penduduk di bawah 15 tahun yang pada awalnya lebih besar di piramida penduduk menjadi penduduk usia produktif. Struktur piramida mengembang ini terbilang cukup menguntungkan bagi Indonesia karena beban ketergantungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif menjadi lebih ringan.

Menurut analisis yang dilakukan oleh Faturochman (2011), Indonesia telah memasuki bonus demografi sejak tahun 2010 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Hal ini juga diperkuat dengan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPS). BPS (2013) memproyeksikan bahwa pada tahun 2035 terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang meningkat dari 66,5 persen pada tahun 2010 menjadi 67,9 persen di tahun 2035. BPS juga menyebutkan bahwa perubahan susunan penduduk tersebut mengakibatkan rasio ketergantungan turun dari 50,5 persen menjadi 47,3 persen.

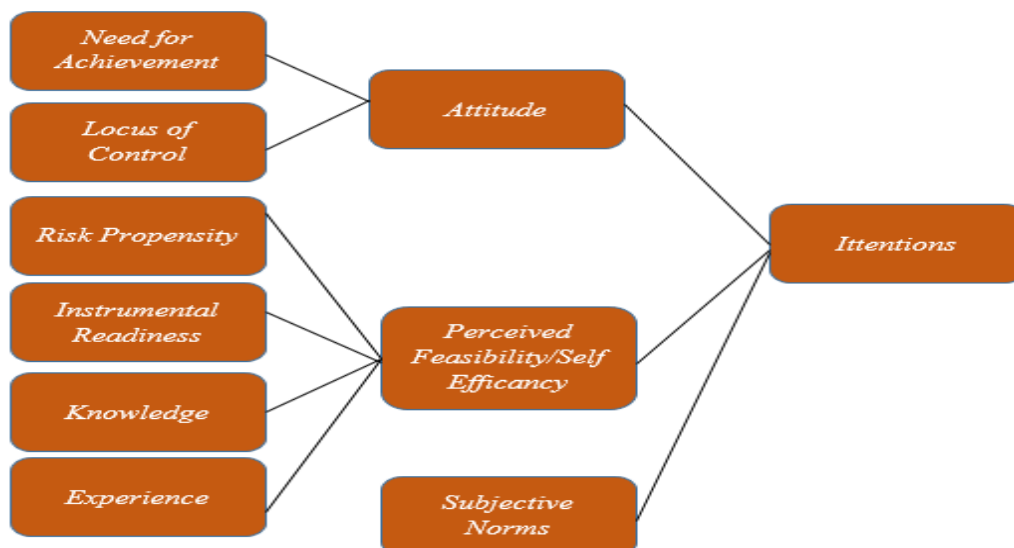
Bonus demografi ini akan menguntungkan bagi Indonesia apabila didukung dengan adanya kesiapan yang matang terutama dalam bidang kompetensi kerja pemuda. Sebaliknya, bonus demografi juga dapat menjadi ancaman bagi Indonesia apabila pemudanya tidak dapat memenuhi standar kompetensi dunia kerja sehingga dapat meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. BPS (2018) mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2018 adalah 5,13 persen dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 133,94 juta orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Februari 2018, terdapat sekitar 6,8 juta orang menganggur. Oleh karena itu, guna menanggulangi dampak negatif dari bonus demografi tersebut, pemuda sebagai poros negara harus dapat berperan aktif dalam dunia kerja dengan menciptakan lapangan kerja melalui sektor wirausaha.

Semakin tinggi pendidikan suatu negara seharusnya semakin rendah pula angka pengangguran yang dihasilkan. Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam mendorong budaya wirausaha pada mahasiswa. Akan tetapi, rata-rata orientasi mahasiswa pasca lulus justru mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja (Kasmir, 2007). Hal ini lah yang dapat mendorong faktor bertambahnya pengangguran di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam dunia kerja dan wirausaha.

Kajian Pustaka

Menurut Sarwoko (2011), niat merupakan mediator penentu berbagai faktor motivasional yang berdampak pada perilaku kedepannya. Artinya, niat juga akan berpengaruh terhadap kesiapan mahasiswa dalam berwirausaha. Salah satu indikator mahasiswa dikatakan memiliki kesiapan dalam wirausaha adalah dengan memiliki niat dan motivasi yang tinggi. Terdapat berbagai macam perbedaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya tentang motivasi wirausaha (*entrepreneur intention*). Indarti dan Roisana menyebutkan (2008) bahwa efikasi diri memiliki pengaruh besar dalam itensi mahasiswa. Sebaliknya, Wijaya (2008), justru menyebutkan bahwa efikasi diri tidak memiliki pengaruh dalam itensi mahasiswa. Indarti dan Rosiani (2008), menunjukkan bahwa faktor pengalaman memiliki andil besar dalam itensi mahasiswa. Ternyata, penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2009), justru menunjukkan hal sebaliknya. Tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dengan yang belum memiliki pengalaman kerja dalam itensi wirausaha.

Sarwoko (2011), dalam jurnalnya menyebutkan bahwa *entrepreneur intention* dipengaruhi oleh teori *planned behavior* yang mencakup tiga hal yakni *attitude*, *self efficacy*, dan *subjective norms*. Dari tiga faktor ini, dua faktor mencerminkan keinginan melalui perilaku (*attitude*) dan norma sosial (*subjective norms*). Sedangkan satu faktor berikutnya mencerminkan tingkat kompetensi diri atau efikasi (*self efficacy*). Teori ini lah yang selanjutnya digunakan untuk mengukur seberapa besar kesiapan mahasiswa baik dalam dunia kerja maupun wirausaha.



Gambar 1. Teori *Planned Behavior*

Sumber: Sarwoko, 2011

Terbentuknya kesiapan dapat dicerminkan dengan teori perilaku terencana (*Planned Behavior*) pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa manusia memiliki keniatan dan tujuan dalam berperilaku. Teori ini menjelaskan bahwa itensi merupakan fungsi dari determinan tiga elemen dasar. (1) *Attitude* (perilaku) yang merupakan dasar dalam pembentukan itensi. Ajzen (2005), menjelaskan bahwa perilaku berhubungan dengan penilaian individu dalam mengenali diri dan lingkungan sekitarnya yang dilakukan dengan cara menghubungkan tingkat kebermanfaatan dan kerugian dari tindakan yang dilakukannya. (2) *Subjective norms* (norma subjektif) yaitu keyakinan individu terhadap norma, orang sekitar, dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut. (3) *Perceived Feasibility* atau *self efficacy* (kontrol perilaku atau efikasi diri) yang merupakan faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit perilaku yang terdiri dari tingkat risiko, kesiapan, pengetahuan, dan pengalaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *ex post facto*. Penelitian *ex facto* yaitu penelitian yang mengambil dan menggali data dari peristiwa yang sudah terjadi (Wahyudin, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif dan kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja dan wirausaha. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif.

Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan kriteria pengambilan sampel mahasiswa semester 5. Jumlah sampel dihitung dengan rumus slovin pada taraf kesalahan 5 persen yang menghasilkan jumlah sampel minimum 79 mahasiswa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik survey angket. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen berupa *work itention* (Y1) dan *entrepreneur itention* (Y2); variabel moderasi berupa *attitude* (X1), dan *self efficacy* (X2); serta *subjective norms* (X4), *need for achievement* (X5), *locus of control* (X6), *risk propensity* (X7), *instrumental readiness* (X8), *knowledge* (X9), dan *experience* (X10). Berikut merupakan penjelasan dari variabel dan kriteria.

Tabel 1. Variabel dan Indikator

No	Variabel Kerja	Indikator	Variabel Wirausaha	Indikator
1	<i>Work intention</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Memilih bekerja - Suka bekerja - Keyakinan bekerja 	<i>Entrepreneur intention</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Memilih wirausaha - Suka wirausaha - Keyakinan wirausaha
2	<i>Work attitude</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Minat bekerja - Nyaman bekerja - <i>Passion</i> bekerja 	<i>Entrepreneur attitude</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Minat wirausaha - Nyaman wirausaha - Keseriusan - Pikiran positif
3	<i>Self efficacy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Percaya diri - Komunikasi - Kerja tim - Bahasa Inggris - Profesionalisme - Teknologi - Adaptif 	<i>Self efficacy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Percaya diri - Kemampuan memimpin - Manajemen - Keyakinan
4	<i>Subjective norms</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan orang tua - Dukungan teman - Dukungan orang terdekat 	<i>Subjective norms</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan orang tua - Dukungan teman - Dukungan orang terdekat
5	<i>Need for achievement</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan karir - Tanggung jawab - Mengatasi kesulitan - Performa lebih 	<i>Need for achievement</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan karir - Tanggung jawab - Mengatasi kesulitan - Performa lebih
6	<i>Locus of control</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja keras - Pantang menyerah - Percaya kemampuan 	<i>Locus of control</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja keras - Pantang menyerah - Percaya kemampuan
7	-	-	<i>Risk propensity</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berani mengambil risiko - Mencoba hal baru - Mencoba metode baru - Mengelola investasi
8	<i>Instrumental readiness</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Akses perusahaan - Jaringan informasi - Dukungan informasi 	<i>Instrumental readiness</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Akses modal - Jaringan organisasi - Dukungan informasi
9	<i>Work knowledge</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber kampus - Sumber media - Pengalaman pribadi 	<i>Entrepreneur knowledge</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber kampus - Sumber media - Pengalaman pribadi - Pengalaman orang

		- Pengalaman orang lain		lain
10	<i>Work experience</i>	- <i>Training</i> kerja - Pengalaman pribadi - Pengalaman membantu teman	<i>Entrepreneur experience</i>	- <i>Training</i> wirausaha - Pengalaman pribadi - Pengalaman membantu teman

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan statistik sederhana dengan metode penjelasan secara deskriptif. Uji prasyarat dilakukan sebelum analisis data yaitu dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas menggunakan *software SPSS* untuk menentukan apakah data sudah valid dan reliabel untuk dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

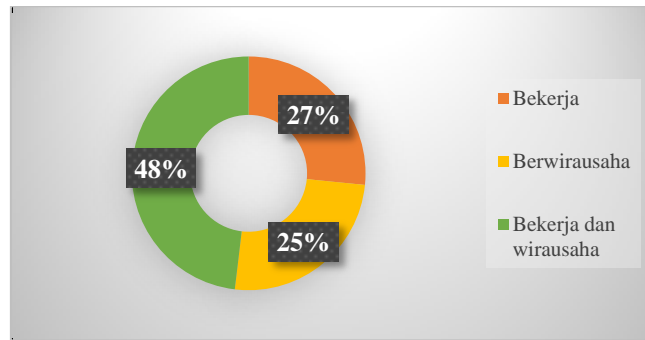
Hasil uji prasyarat menunjukkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan uji validitas pada kasus mahasiswa yang memilih bekerja terhadap 79 Responden dengan 30 Pertanyaan, maka sesuai rumus yang digunakan, yaitu ($df=n-2$) maka $df=30-2=28$ dengan signifikansi sebesar 5 persen didapatkan hasil r tabel sebesar 0,374. Dengan demikian berdasarkan ketentuan jika r hitung (hasil pengujian dari *SPSS*) lebih besar ($>$) daripada r tabel maka item pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Secara keseluruhan data penelitian valid karena berada di atas 0,374. Sedangkan pada mahasiswa yang memilih wirausaha dengan 79 responden dan 35 pertanyaan, maka sesuai rumus yang digunakan, yaitu ($df=n-2$) maka $df=35-2=33$ dengan signifikansi sebesar 5% di dapatkan hasil r tabel sebesar 0,344. Dengan demikian berdasarkan ketentuan jika r hitung (hasil pengujian dari *spss*) lebih besar ($>$) daripada r tabel maka item pertanyaan tersebut dapat dikatakan Valid. Dan sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan Tidak Valid. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa keseluruhan hasil data berada di atas 0,344 yang artinya data valid.

Pada uji reabilitas kasus mahasiswa yang memilih bekerja diperoleh hasil Berdasarkan hasil Pengujian Reliabilitas pada Kasus A, diketahui angka *cronbach's alpha* adalah sebesar 0,917, yang artinya angka tersebut lebih besar dari angka minimal *cronbach's alpha* 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel *Work Ittention* dapat dikatakan Reliabel. Sedangkan pada mahasiswa yang memilih wirausaha diperoleh angka *cronbach's alpha* adalah sebesar 0,938, yang artinya angka tersebut lebih besar dari angka minimal *cronbach's alpha* 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel *Entrepreneur Ittention* dapat dikatakan Reliable

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Mahasiswa yang Bekerja		Mahasiswa yang Wirausaha	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,917	30	,938	32

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari survey penyebaran 79 angket diperoleh hasil bahwa 21 mahasiswa memilih menjadi pekerja tetap saja, 20 memilih wirausaha berwirausaha, dan sisanya 38 mahasiswa memilih menjadi pekerja dan wirausaha.



Gambar 2. Pilihan Mahasiswa di Dunia Kerja dan Wirausaha

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebanyak 48 persen mahasiswa memilih untuk bekerja dan wirausaha. Akan tetapi, dari jumlah tersebut diperoleh hasil bahwa 60 persen mahasiswa memilih bekerja terlebih dahulu baru berwirausaha. Hal ini mengindikasikan bahwa 56 persen mahasiswa memilih untuk bekerja dan sisanya berwirausaha. Selanjutnya dari segi kesiapan, rata-rata mahasiswa menjawab pada poin 4 yang menunjukkan bahwa mahasiswa cukup siap. Berikut merupakan penjabaran dari hasil kuosioner.

Tabel 3. Tingkat Kesiapan Mahasiswa

No	Variabel Kerja	Poin	Variabel Wirausaha	Poin
1	<i>Work attitude</i>	3	<i>Entrepreneur attitude</i>	4
2	<i>Self efficacy</i>	4	<i>Self efficacy</i>	4
3	<i>Subjective norms</i>	3	<i>Subjective norms</i>	4
4	<i>Need for achievement</i>	4	<i>Need for achievement</i>	4
5	<i>Locus of control</i>	4	<i>Locus of control</i>	4
6	-	-	<i>Risk propensity</i>	3
7	<i>Instrumental readiness</i>	3	<i>Instrumental readiness</i>	3
8	<i>Work knowledge</i>	4	<i>Entrepreneur knowledge</i>	4
9	<i>Work experience</i>	3	<i>Entrepreneur experience</i>	3
	Rata-rata	3,5	Rata-rata	3,67

Tabel 2 menunjukkan bahwa mahasiswa dikatakan cukup siap di kedua posisi. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan kesiapan dari salah satunya maka kesiapan mahasiswa di bidang wirausaha lebih besar daripada bekerja. Padahal, 56 persen mahasiswa memilih bekerja terlebih dahulu. Artinya, dari segi kesiapan seharusnya mahasiswa lebih siap dalam dunia kerja daripada wirausaha. Hal ini lah yang dikhawatirkan dapat menimbulkan pengangguran karena kesiapan mahasiswa yang kurang.

Pihak universitas dalam hal ini harus berperan untuk menunjang kesiapan mahasiswa khususnya dari segi pengalaman yang masih rendah dengan memberikan *training*. Selain itu, dari segi *instrumental readiness*, pihak universitas juga dapat menunjang dengan cara membuat koneksi dan jaringan informasi kerja antara mahasiswa dan perusahaan sehingga mahasiswa dapat lebih siap dari segi jaringan dan informasi.

Kesimpulan

Bonus demografi memberikan peluang dan ancaman bagi negara. Salah satunya adalah meningkatnya kompetisi dunia kerja. Mahasiswa sebagai poros pemuda memiliki peran besar dengan berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan pada mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang menunjukkan bahwa 56 persen mahasiswa berorientasi mencari kerja untuk menjadi pekerja tetap dan sisanya berwirausaha. Penelitian justru menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki *entrepreneur intention* lebih siap daripada mahasiswa dengan orientasi *work intention*. Dengan adanya kompetisi dunia kerja yang semakin meningkat maka pihak universitas harus mempersiapkan kompetensi mahasiswa dalam dunia kerja seperti seminar profesi, *training* profesi, sertifikasi, dan lain sebagainya.

Referensi

- Ajzen. 2005. *Attitudes, Personality and Behavior*. Berkshire UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2018. "Februari 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,13 Persen, Rata-rata Upah Buruh per Bulan Sebesar 2,65 Juta Rupiah". Diakses pada 11 November 2018 (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html>)
- Faturochman. 2011. *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. Yogyakarta: Adytya Media.
- Indarti dan Rosiana. 2008. "Intensi Kewirausahaan Mahasiswa: Studi Perbandingan Antara Indonesia, Jepang, dan Norwegia". *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Indonesia* 23(4).
- Ismail. 2009. "Entrepreneurial Intention Among Malaysian Undergraduates". *International Journal of Bussnines and Management* 4(10).
- Noor, Munawar. 2003. "Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Bonus Demografi". *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*.
- Sarowoko, Endi. 2011. "Kajian Empiris Entrepeneur Itention Mahasiswa". *Jurnal Ekonomi Bisnis* 16(2):126-135.
- Wahyudin, Agus. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.
- Wijaya. 2008. "Kajian Model Empiris Perilaku Berwirausaha UKM DIY dan Jawa Tengah". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 10(2).

Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Taraf Ekonomi di Kampung Batik, Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang

*Sri Sukamti, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang:sukamtisri7@gmail.com*

*Erika Nada Arwana, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang:nadaarwana@gmail.com*

*Ifa Isnaini, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang:ifaisnaini1@gmail.com*

Abstrak

Kota merupakan daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan yang tinggi, namun memiliki fasilitas modern dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor industri. Berbagai permasalahan pun kemudian muncul sebagai akibat kepadatan penduduk. Masalah-masalah yang kemudian muncul di perkotaan dapat berupa lingkungan kumuh, polusi udara, angka kemiskinan tinggi, kriminalitas, dan permasalahan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagai sebuah kota yang besar, Kota Semarang memiliki permasalahan yang cukup kompleks salah satunya ialah banyak ditemukan tempat tinggal kumuh dan tidak layak huni. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah kota Semarang memberikan solusi alternatif berupa program inovatif bertajuk kampung tematik guna meningkatkan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar pemukiman. Selain untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan, kampung tematik ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata sehingga masyarakat didalamnya dapat diberdayakan. Di Kota Semarang terdapat puluhan kampung tematik yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Semarang sepanjang tahun 2016-2017. Salah satu dari kampung tematik tersebut yaitu Kampung Batik yang menjadi fokus dari penelitian ini. Kampung Batik terletak di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Batik yang diangkat sebagai tema kampung tematik yang sangat menarik. Wajar apabila banyak menarik minat masyarakat untuk mengunjungi kampung batik. Motif yang diproduksi oleh masyarakat di kampung batik salah satunya yaitu batik motif "Warag Endog" yang menggambarkan multi etnis di Kota Semarang. Meskipun menjadi kampung tematik yang cukup diminati pada kenyataannya belum mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Rejomulyo secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Rejomulyo belum sepenuhnya terberdayakan dengan adanya program kampung tematik tersebut. Pengunjung yang datang hanya sekedar menikmati wisata kampung batik saja, dan tidak semua pengunjung membeli produk batik yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Ekonomi, Eksistensi, Kampung Batik, Pemberdayaan

Pendahuluan

Kota dengan segala permasalahannya yang kompleks menjadikan pemerintah terus berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kota ialah semakin rusaknya lingkungan hidup, tata kelola kota yang belum maksimal, dan kemiskinan yang masih cukup tinggi sehingga menimbulkan ketimpangan sosial. Program pemberdayaan menjadi isu yang sangat sentral dalam kajian ini, mengingat kampung tematik diharapkan dapat menjadi salah satu program penguatan sosial ekonomi masyarakat berkelanjutan. Selama ini, banyak potensi masyarakat perkotaan yang belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang saling bersinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Salah satu wilayah yang dijadikan *icon* oleh pemerintah Kota Semarang dalam program pengembangan kampung tematik ialah Kampung Batik di Kelurahan Rejomulyo. Meskipun tidak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup untuk diberdayakan, akan tetapi lokasi Kampung Batik berada di sektor ekonomi yang cukup strategis, yaitu bersebelahan dengan Pasar Johar. Selama ini kita ketahui bahwa Pasar Johar merupakan salah satu pasar terbesar di Kota Semarang dan menjadi pusat perekonomian masyarakat. Dari sekian kampung tematik di Kota Semarang, terdapat satu kampung tematik yang sangat menarik perhatian masyarakat luas, yaitu Kampung Batik. Kampung ini mengembangkan sentra industri batik. Selain memproduksi berbagai jenis motif batik pada umumnya, di Kampung Batik ini juga memproduksi motif batik khas Kota Semarang seperti batik *Warag endog* yang menggambarkan multietnik masyarakat.

Untuk mengembangkan usaha yang dibangun oleh masyarakat Kampung Batik di Kelurahan Rejomulyo, Pemerintah Kota Semarang sebenarnya juga telah banyak melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam proses pembuatan batik. Upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang meliputi *FGD (Forum Grup Discussion)* dengan masyarakat biasa dan para pengrajin batik, mengadakan pelatihan membuat batik. Namun, upaya tersebut belum berjalan secara optimal. Tidak hanya itu, permasalahan lain yang kemudian muncul ialah, masih dijumpai ketimpangan yang terjadi antar pengrajin batik. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa masyarakat yang memang menguasai pangsa pasar, bahkan telah memiliki butik sendiri. Di sisi lain, ada masyarakat yang hanya mengembangkan produksi batik rumahan. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata tidak sepenuhnya berjalan. Pada awal-awal program pemberdayaan masyarakat memang terlihat sangat antusias, namun seiring berjalannya waktu antusias masyarakat tersebut semakin berkurang. Bahkan walaupun ada pelatihan atau program pemberdayaan lagi, masyarakat hanya akan datang ketika mereka memperoleh imbalan. Imbalan tersebut sebagai pengganti waktu yang telah mereka korbankan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Meskipun dinamakan Kampung Batik, tidak semua masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin batik. Oleh karena itu, batik semarangan juga tidak begitu terkenal di kalangan masyarakat luas. Tidak hanya itu, selama ini pengunjung yang datang ke Kampung Batik bukanlah untuk membeli produksi batik yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar, namun mereka hanya datang untuk sekedar berekreasi saja dengan memanfaatkan *spot photo* yang telah disediakan. Program kampung tematik seharusnya dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di kota. Namun demikian, karakteristik masyarakat perkotaan dengan sifat masyarakat yang individual, tingkat kesenjangan yang cukup tinggi juga harus ditanggapi dengan serius. Oleh karena itu, terdapat dua kajian pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu mengenai eksistensi batik semarangan dan sejauh mana keberhasilan pemberdayaan yang telah dilakukan selama ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Batik.

Kajian Pustaka

Teori yang digunakan dalam menganalisis program pemberdayaan dan eksistensi Batik Semarang di Kampung Batik Rejomulyo adalah dengan menggunakan pendekatan fungsional struktural Talcott Parsons. Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata daya yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Sedangkan kata pemberdayaan adalah suatu proses, cara, perbuatan memberdayakan. Jadi pemberdayaan adalah proses dan kemampuan dalam bertindak dan memberdayakan. Definisi lain mengenai pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Kemenkeu. 2017). Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang telah berusaha memberikan suatu pemberdayaan masyarakat melalui adanya kampung tematik. Kampung tematik merupakan bagian

dari strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman yang berada di kota tertentu. Pelaksanaan kampung tematik telah mengubah susunan upaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan pemukiman masyarakat, yang pada awalnya lebih menitikberatkan pada pemberian bantuan hingga pelibatan aktif masyarakat. Upaya pelaksanaan kampung tematik memiliki tujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi lokal yang ada di kota (Tamara dan Rahdriawan, 2018).

Teori fungsional struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons mengandung empat skema yang disingkat dengan sistem AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) (Ritzer, 2012). *Adaptation* (adaptasi) berkaitan dengan penyesuaian akan kebutuhan dengan lingkungannya. Suatu sistem harus bisa mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar, yang artinya bahwa sebuah kelompok yang di dalamnya terdiri atas berbagai individu harus dapat menyesuaikan dirinya dengan tuntutan kenyataan. Misalnya dalam pembangunan kampung tematik, masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru dimana mereka dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga eksistensi kampung tematik tersebut, mereka harus mampu mengelolanya dengan baik. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), maksudnya adalah semua tindakan anggota kelompok harus bisa diarahkan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. *Integration* (integrasi) yang berarti bahwa suatu sistem harus mengatur antarhubungan bagian dalam setiap komponen, atau dengan kata lain integrasi merupakan prasyarat yang berhubungan dengan interaksi para anggota dalam sistem sosial sehingga dapat membentuk solidaritas yang kuat antar masyarakat. Integrasi dapat dimunculkan melalui beberapa kegiatan seperti FGD (*Forum Grup Discussion*), pelatihan pembuatan batik dan sebagainya. *Latency* (pemeliharaan pola) sebagai proses mempertahankan keseimbangan pola budaya dan motivasi individu dalam sistem.

Penelitian tentang eksistensi Batik Semarang juga telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widanirmala dan Khadiyanto (2013) penelitiannya berfokus pada pelestarian Batik Semarang yang mengatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang program pelestarian Batik Semarang secara dinamis, upaya yang dilakukan ialah dengan menetapkan sentra industri batik di Kampung Batik Semarang. Akan tetapi, hingga saat ini keberadaan Kampung Batik belum dapat mewujudkan tujuan pemerintah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan Batik Semarang

Kemudian terkait dengan ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat Kampung Batik Rejomulya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketimpangan berasal dari kata timpang yang berarti tidak seimbang, ada kekurangan, dan berat sebelah. Sedangkan ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya yakni tidak adil. Dapat diketahui bahwa ketimpangan tidak hanya terhadap dalam distribusipendapatan masyarakat, akan tetapi juga terhadap pada pembangunan antar daerah didalamwilayah suatu Negara (Sirojuzilam dalam Aprianoor, 2015). Ketimpangan dapat diartikan pula sebagai adanya ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya (Mulyadi, Yad dkk. 2014). Ketimpangan ini terjadi antara pengrajin batik dengan produksi skala besar dengan pengrajin batik rumahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model studi kasus. Penelitian ini berusaha menggali permasalahan yang ada di Kampung Batik, Kota Semarang. Bahan penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data fisik, sosial, ekonomi, yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan kondisi aktual masyarakat Kampung Batik Rejomulyo, dimana data diperoleh melalui buku, jurnal, monografi Kampung Batik Rejomulyo, dan data Dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Batik Semarang

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui keberadaannya oleh UNESCO. Kain batik tidak hanya digunakan sebagai barang pemenuhan kebutuhan saja, melainkan juga memiliki peran dalam pranata sosial masyarakat. Motif batik yang dihasilkan oleh masing-masing daerah dijadikan sebuah simbol yang mengandung makna. Di Kota Semarang, terutama di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo telah banyak menghasilkan berbagai jenis motif batik. Motif-motif yang dihasilkan tidak hanya motif batik khas Kota Semarang, melainkan juga memproduksi motif batik dari daerah lain. Motif batik semarangan ialah motif bercorak flora, fauna, bangunan, *warag endog*, dan makanan khas kota semarang. Motif flora khas semarang adalah seperti motif batik asem tugu khas semarang. Motif fauna untuk batik semarang adalah seperti batik blekok. Sementara motif bangunan contohnya seperti bangunan lawang sewu, gereja blenduk dan tugu muda. Meskipun telah banyak mengasilkn berbagai jenis motif batik, namun keberadaan batik Semarang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas. Bahkan, masyarakat Kota Semarang sendiri juga kurang mengetahui adanya motif batik khas Semarang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Anisyah (2011) yang juga mengatakan bahwa Kota Semarang memiliki ciri khas motif batik sendiri, namun tak banyak orang mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi terkait dengan keberadaan batik Semarang. Jika batik Semarang ini banyak diminati maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang memproduksi batik tersebut. Secara tidak langsung akan mampu mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Batik semarangan selama ini memang kurang terkenal dikalangan masyarakat luas, karena meskipun banyak pengunjung yang datang ke Kampung Batik mereka tidak membeli batik yang diproduksi oleh masyarakat setempat. Mereka datang hanya sekedar untuk menikmati wisatanya saja, seperti memanfaatkan *spot photo* yang ada. Sehingga wajar saja jika batik semarangan menjadi kurang diminati oleh masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Kampung Batik berdiripada abad 19 di wilayah yang strategisyakni di area pangsapasar yang pada masa itu merupakan salah satu pasar terbesar di wilayah Kota Semarang yakni pasar Johar. Sehingga, kegiatan perekonomian di kampung tersebut tergolong cukup baik. Ironinya, seiring perkembangan zaman, Kampung Batik kini telah kehilangan kegiatan perekonomian sebagaimana yang dulu terjadi. Dahulu masyarakat di Kampung Batik mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang. Namun, kini hampir tidak ditemui aktivitas berdagang di area Kampung Batik. Pada tahun 2016 Kampung Batik ditetapkan sebagai kampong tematik, dengan demikian prospek yang dimiliki Kampung Batik beralih menjadi tempat wisata. Inisiasi tersebut tidak luput dari upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan dilakukan sebagai upaya untuk menata atau upaya perbaikan dari wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dengan tujuan dapat berkembang secara mandiri (Sumpeno dalam Putra dkk, 2013). Pemberdayaan yang pernah pemerintah lakukan adalah pengorganisasian dengan menciptakan Kampung Batik Rejomulyo sebagai daerah penghasil batik di Kota Semarang. Sehingga, beberapa sumber daya manusia yang ada di Kampung Batik dipilih untuk melakukan pelatihan membuat batik. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti serangkaian pelatihan tergolong baik hal tersebut terlihat kini di Kampung Batik telah berdiri beberapa kios-kios pengolahan batik dan penjual batik. Selain itu, Desperindag juga memberikan bantuan pada Kampung Batik berupa peralatan dan kepelatihan. Desperindag adalah instansi yang memiliki peran cukup besar dalam pengembangan Kampung Batik melalui kegiatan pelestarian dan pengembangan batik Semarang (Widanirmala dan Khadiyanto, 2013).

Digalakkannya kampong temati kini membuat Kampung Batik melahirkan paguyuban seperti paguyuban Kampung Batik. Pada paguyuban ini juga menitikberatkan pelestarian batik Semarang

melalui pembinaan pelatihan membuat batik. Selain paguyuban, dinas-dinas terkait juga melakukan pemberdayaan UMKM melalui bantuan pemberian modal (Purba, 2018). Akan tetapi realitasnya berbagai upaya yang dilakukan baik dari pemerintah maupun dinas-dinas terkait belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Beberapa kendala dijumpai dalam kegiatan pemberdayaan ini seperti, minimnya aktivitas membuat batik, kurangnya pengawasan dan pemantauan dari kegiatan produksi membuat batik baik dari elemen masyarakat maupun pemerintah, dan lahan yang sempit. Dengan demikian solusi yang dapat ditawarkan dalam pengoptimalan dan keberlanjutan pemberdayaan di Kampung Batik adalah dengan melakukan sosialisasi terkait pelestarian batik semarangan sebagai salah satu *icon* Kota Semarang selain tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kampung Batik. Pemerintah juga berperan dalam menumbuh kembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat, mengoordinasi kegiatan antar instansi, koordinasi skala rendah seperti tingkat RT hingga kecamatan dan tidak kalah pentingnya pemerataan bantuan peralatan membuat batik.

Dalam perspektif Talcott Parsons sistem tindakan akan menghadapi empat survival problems, yakni adaptation, goal-attainment, integration, dan latency. Perspektif ini dapat digunakan untuk melihat upaya pemberdayaan masyarakat Kampung Batik Rejomulyo sebagai suatu tindakan. pertama, *adaptation*, Kampung Batik Rejomulyo resmi dicanangkan sebagai Kawasan Cagar Budaya dalam Perda No. 14 Tahun 2011. hal ini dibarengi dengan upaya pemberdayaan masyarakat didalamnya supaya menjadi daerah sentra batik. Karena hal tersebut membuat kawasan ini unik sehingga menarik minat banyak pengunjung. Otomatis hal tersebut membuat masyarakat sekitar harus dapat beradaptasi dengan kondisi semacam ini. Masyarakat setempat harus dapat beradaptasi dengan berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang harus diikuti. Kedua, *goal-attainment*, dengan pencanangan kampung batik menjadi sentra batik dengan berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan tentunya tidak dilakukan secara sembarangan. Telah banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah terutama bagaimana supaya tujuan dapat tercapai. Tujuan pemberdayaan masyarakat kampung batik disini adalah untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di kota semarang dan untuk mengangkat potensi lokal. tujuan inilah yang harus diprioritaskan tanpa mengesampingkan keinginan-keinginan masyarakat. Ketiga, *integration*, apabila pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung batik ingin mencapai tujuan yang telah ditentukan harus terjadi kesinambungan antara pemerintah dan warga setempat. inilah yang paling penting, dikarenakan apabila pemberdayaan tidak diharapkan masyarakat dan tidak sesuai yang diharapkan masyarakat, otomatis masyarakat tidak akan menjalankannya. Keempat, *latency*, pola budaya dan motivasi individu maupun kelompok didalam kampung batik harus tetap terpelihara kaitannya dalam upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat kampung batik. pengambilan keputusan harus melibatkan aspirasi masyarakat. tujuannya agar terjadi kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan harapan masyarakat Kampung Batik Rejomulyo. Selain itu pemerintah harus dapat mengurangi ketegangan-ketegangan yang muncul.

Kesimpulan

Kampung Batik merupakan salah satu kampung tematik yang ada di Kota Semarang. Kampung Batik telah menjadi salah satu *icon* sentra industri batik yang menghasilkan berbagai macam motif batik, tanpa terkecuali batik Semarang yang menjadi identitas Kota Semarang. Meskipun memiliki motif batik sendiri, masyarakat Kota Semarang belum sepenuhnya mengetahui bahwa Kota Semarang memiliki motif batik sendiri. Hal ini disebabkan karenamasyarakat yang datang ke Kampung Batik bukan untuk membeli batik, melainkan hanya untuk menikmati wisata spot foto yang telah tersedia. Meskipun menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Semarang, pada kenyataannya masyarakat di Kampung Batik masih banyak ditemukan adanya ketimpangan sosial. Berbagai program sosialisasi yang telah dilaksanakan sebaiknya diimbangi dengan pemberian modal dan pelatihan penuh dari

pemerintah untuk warga yang non pengrajin batik dan pengrajin batik dalam skala kecil. Tujuannya agar warga non pengrajin dan pengrajin batik skala kecil tersebut dapat ikut terberdayakan dengan optimal. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menambah pendapatan warga kampung batik yaitu pemerintah sebaiknya dapat memunculkan kebijakan baru di Kota Semarang yang berkaitan dengan batik Semarang. Contohnya seperti kebijakan menjadikan batik khas Semarang menjadi seragam wajib berbagai instansi pemerintahan. dengan begitu diharapkan eksistensi batik semarang dapat terangkat dan secara otomatis juga menambah pemasukan warga kampung batik sebagai pemasok pesanan batik untuk instansi pemerintah tersebut. Selain dari pihak pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat kampung batik, juga diperlukan partisipasi dari warganya. diperlukan suatu kesadaran dari warga untuk saling bersinergi untuk mencapai tujuan. Sinergi yang dilakukan dapat berupa kerjasama yang solid antar pengusaha batik skala besar, skala kecil dan non batik dalam upaya mengurangi kesenjangan didalam kampung batik.

Referensi

- Anisyah, Yulianita. 2011. Analisis Perkembangan Industri Batik Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aprianoor. 2015. Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*. Volume 4. Nomor 4
- Kemenkeu. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mulyadi, Yad dkk. 2014. *Sosiologi SMA Kelas XIII*. Jakarta: Yudhistira.
- Purba. 2018. Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Ejournal*. FIS: Ilmu Politik Undip
- Putra, dkk. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume. 1, Nomor. 6.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamara, Anindya Putri dan Rahdriawan, Mardwi. 2018. Kajian Pelaksanaan Konsep Kampung Tematik di Kampung Hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. Volume 6. Nomor 1.
- Widanirmala, Miftahurrahma dan Khadiyanto, Parfi. 2013. Tingkat Efektivitas Program Pelestarian Batik Semarangan di Kampung Batik Semarang. *Jurnal Ruang*. Volume 1. Nomor 1.

Optimalisasi Penggunaan Internet Sebagai Solusi Modernisasi Pengusaha Kampung UKM Digital Kota Semarang dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi

Darto Wahidin, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, dartowahidin2@gmail.com

Abstrak

Adanya teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini, telah mengubah kehidupan manusia. Persyaratan utama bagi seseorang yang menggunakan teknologi secara efektif tidak hanya untuk hiburan maupun mencari berbagai informasi. Saat ini, teknologi yang ditunjang penggunaannya oleh internet telah banyak dimanfaatkan untuk transaksi penjualan dan pembelian, guna meningkatkan ketahanan ekonomi seseorang. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi penggunaan internet dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di kampung UKM digital Kota Semarang. Penelitian ini mengelaborasi dengan mengacu pada teori *digital citizenship* dan teori ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Purwosari IV Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Informan dalam penelitian ini pengusaha bandeng presto di Kampung UKM Digital. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa telah tersedianya akses digital, terjadinya transformasi perdagangan digital, dan adanya peningkatan terhadap ketahanan ekonomi. Optimalisasi penggunaan internet pada pengusaha bandeng presto di Kota Semarang ini pada dasarnya lahir dari sebuah bantuan dengan PT Telekomunikasi Indonesia dan juga adanya kesadaran dari pengusaha terhadap adanya penggunaan internet yang telah berkembang begitu pesat. Dengan adanya optimalisasi penggunaan internet tersebut sesungguhnya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi.

Kata Kunci: *Digital, Internet, Ketahanan Ekonomi, Optimalisasi, Modernisasi*

PENDAHULUAN

Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk proses mempermudah pekerjaan manusia dan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Adanya teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini, telah mengubah kehidupan manusia. Persyaratan utama bagi seseorang yang menggunakan teknologi secara efektif tidak hanya untuk hiburan maupun mencari berbagai informasi. Sebagaimana yang dijanjikan dari teknologi yaitu, (1) Teknologi menjanjikan perubahan; (2) Teknologi menjanjikan kemajuan; (3) Teknologi menjanjikan kemudahan; (4) Teknologi menjanjikan peningkatan produktivitas, dan (5) Teknologi menjanjikan ketepatan serta kecepatan (Martono, 2014:217-220).

Saat ini, teknologi yang ditunjang penggunaannya oleh internet telah banyak dimanfaatkan untuk transaksi penjualan dan pembelian, guna meningkatkan ketahanan ekonomi seseorang. Himpitan kebutuhan ekonomi keluarga, teknologi yang berkembang pesat dan persaingan dagang yang ketat saat ini menjadikan pengusaha bandeng presto melakukan berbagai macam inovasi, salah satu inovasi tersebut dengan melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan menggunakan internet. Internet dimanfaatkan oleh pengusaha bandeng presto sebagai sebuah solusi modernisasi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi.

Penelitian ini menjadi penting mengingat saat ini banyak terjadinya penyalahgunaan terhadap akses internet yang sangat besar sekali terjadi, kurangnya pemahaman sebagai warga negara terhadap penggunaan internet sehat dan positif menjadi faktor salah satunya. Namun, hal ini berbeda dari warga yang ada di Jalan Purwosari IV Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Internet disini di optimalkan penggunaannya dari warga sekitar untuk melakukan perdagangan yang

menjadi pengusaha bandeng presto, sehingga kampung ini dijuluki sebagai kampung UKM digital. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, sesungguhnya ada pertanyaan menarik terhadap tulisan ini, yakni bagaimana optimalisasi penggunaan internet dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di kampung UKM digital Kota Semarang?. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi penggunaan internet dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di kampung UKM digital Kota Semarang.

KAJIAN PUSTAKA

Digital citizenship berakar pada keprihatinan lama atas etika komputer. Untuk itu, *digital citizenship* telah memberikan kerangka kerja yang di akui dengan baik untuk mengatasi tantangan perilaku *digital* yang pantas di seluruh dunia. Menjadi *digital citizenship* merupakan hal yang lebih penting saat ini. Schuler (2002) mendefinisikan warga negara *digital* sebagai karakteristik kota digital asli. Warga negara digital umumnya di indentifikasi sebagai mereka yang menggunakan internet secara teratur dan efektif (Isman dan Gungoren, 2014:73).

Digital citizenship adalah panduan yang dimediasi untuk perilaku manusia sehingga semua dapat mengambil manfaat dalam masyarakat *digital*. Tujuan *digital citizenship* sekarang ini pada dasarnya untuk mendidik, memberdayakan, dan melindungi. Menurut Ribble dan Bailey (2011) yang mendefinisikan *digital citizenship* terdiri dari konsep tanggung jawab, hak, keamanan. Setidaknya menurut Ribble dan Bailey (2007) ada sembilan bidang perilaku untuk membentuk *digital citizenship*, yang dibagi lagi menjadi 3 kunci utama, yakni: (1) Pembelajaran siswa dan kinerja akademik yang meliputi akses digital, komunikasi digita, dan *digital literacy*; (2) Lingkungan siswa dan perilaku siswa yang meliputi *digital security*, *digital e-tiket*, serta hak dan tanggung jawab digital; (3) Kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah meliputi hukum digital, *digital health dan wellness*, dan perdagangan digital.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segenap aspek kehidupan nasional melalui pemanfaatan, kerjasama, dan pemberdayaan lingkungan. Pembidangan aspek kehidupan nasional dirumuskan dengan metode astragatra, yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Rincian aspek kehidupan nasional sebagaimana yang dapat dijelaskan oleh Suwanda dkk (2013:135-136), sebagai berikut: aspek alamiah (trigatra) yang meliputi: (1) Posisi dan lokasi geografi Indonesia; (2) Keadaan dan kekayaan alam; (3) Keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek sosial (pancagatra) yang meliputi: (1) Ideologi; (2) Politik; (3) Ekonomi; (4) Sosial budaya; (5) Pertahanan keamanan.

Aspek-aspek ekonomi dalam kontak ketahanan nasional Indonesia, meliputi (1) Ekonomi kemasyarakatan yaitu permasalahan ekonomi yang menyangkut masyarakat sebagai kesatuan dan keseluruhan; (2) Struktur dan komposisi perekonomian nasional, dimana tolok ukur untuk ketahanan nasional bidang ekonomi dapat dilihat dari struktur dan distribusi pendapatan nasional dan partisipasi dalam memproduksi pendapat nasional. Apabila sudah terjadi keseimbangan yang dirasa adil dalam distribusi dan partisipasi maka ketahanan nasional bidang ekonomi telah baik; (3) Pembangunan ekonomi nasional, yaitu dengan tujuan merombak struktur ekonomi yang bersifat kolonial menuju struktur ekonomi nasional.

Ketahanan nasional bidang ekonomi dikatakan relatif tinggi apabila terjamin pencukupan dan tersedianya barang dan jasa yang penting sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini permasalahan dalam ketahanan nasional bidang ekonomi antara lain adalah: (1) Potensi dan kondisi dinamika memperjuangkan, mempertahankan kontinuitas kehidupan ekonomi Indonesia; (2) Faktor dinamika ekstren dan intern yang tercermin dalam komposisi pendapatan nasional, komposisi ekspor dan impor. Indikator keberhasilan ketahanan nasional bidang ekonomi ditandai oleh: pendapatan nasional yang masih bergantung pada teknologi, modal, manajemen, bahan baku, pasaran, dan lain-lainnya.

Tingkat pemerataan, peranan partisipasi rakyat dalam produksi nasional, dan proses nasionalisasi perusahaan asing. Untuk meningkatkan ketahanan nasional bidang ekonomi harus dibangun sistem ekonomi yang tangguh dan kuat di atas kekuatan sendiri melalui keseimbangan antara sektor pertanian dan industri dan sejauh mungkin dihindari tiga kondisi yang bersifat negatif yaitu *free fight liberalism*, sistem etatisme, dan monopoli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2013:4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif yang merupakan pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dari berbagai sumber seperti wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang dijadikan untuk penelitian ini di Lokasi penelitian ini berada di Jalan Purwosari IV Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Alasan pemilihan di Kota Semarang tersebut karena terkenal sebagai penghasil bandeng presto dan daerah tersebut terkenal sebagai kampung UKM digital. Adapun informan dalam penelitian ini pengusaha bandeng presto di Kampung UKM Digital. Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam mengoptimalkan penggunaan internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik pengumpulan data wawancara digunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian mengenai optimalisasi penggunaan internet dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Wawancara dilakukan secara *directive* dalam artian peneliti berusaha mengarahkan pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipecahkan. Sedangkan dokumentasi diperlukan sebagai upaya untuk menunjang data-data yang telah diperoleh melalui wawancara. Setelah dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi maka dilakukan teknik analisis data dengan memilih data secara selektif serta disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini diperlukan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi. Reduksi data dalam penelitian ini diperoleh dari teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi, kemudian dipilih data yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting sehingga data menjadi jelas dan sistematis. Setelah dilakukan reduksi, maka data tersebut disajikan dalam bentuk naratif yang mendeskripsikan mengenai optimalisasi penggunaan internet dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan dihubungkan dengan teori *digital citizenship* dan teori ketahanan nasional. Kemudian setelah data disajikan dilakukan penarikan simpulan, simpulan harus dapat menghubungkan data dengan teori yang dikolaborasikan. Agar simpulan penelitian yang disajikan dalam makalah menjadi lebih bisa dipercaya maka dilakukan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa telah tersedianya akses digital, terjadinya transformasi perdagangan digital, dan adanya peningkatan terhadap ketahanan ekonomi. Data lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya internet telah digunakan secara sehat dan positif oleh para pengusaha bandeng presto di Kota Semarang. Hanya saja penggunaan internet tidak sehat ini dilakukan oleh pembeli bandeng presto itu sendiri, yang terkadang melakukan penipuan terhadap pembelian bandeng presto. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan, bahwa pernah mengalami hal negatif dari pembeli bandeng presto yang berasal dari luar Pulau Jawa. Dengan cara mengirimkan

bandeng presto dulu tanpa membayar atau mentransfer terlebih dahulu. Hal ini pun langsung disadari oleh pengusaha bandeng presto tersebut. Kesadaran terhadap adanya kemajuan dari teknologi saat ini, bukan berarti harus diambil secara positif semua, tapi positif dalam hal ini dimanfaatkan dengan baik dan juga disadari oleh para pengusaha bandeng presto.

Tabel 1 Klasifikasi Optimalisasi Penggunaan Internet

Perilaku dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi	Aspek Pendidikan	Aspek Ekonomi
Akses Digital	Akses internet di Jalan Purwosari IV Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atas kerjasama dengan pihak yang terkait	Tersedianya internet di tempat pengusaha untuk kebutuhan penjualan dan pembelian
Transformasi Perdagangan Digital	Pengusaha banyak yang diberikan pembekalan oleh para <i>star up unicon</i> bagian <i>online</i>	Terjadinya proses transformasi dan pergeseran terhadap penjualan dan pembelian, jika dulu <i>face to face</i> , saat ini pengusaha lebih banyak yang melalui media sosial
Meningkatkan Ketahanan Ekonomi	Pembekalan itu dapat meningkatkan ketahanan ekonomi bagi pengusaha	Mewujudkannya melalui transaksi penjualan dan pembelian melalui media sosial terhadap produk yang dihasilkan

Sumber: Klasifikasi Data Pribadi Peneliti

Akses Digital

Akses internet yang ada pada dasarnya untuk optimalisasi dalam penggunaan internet tersebut yang ada pada pengusaha bandeng presto di Kota Semarang, yang awal mulanya lahir dari sebuah bantuan dengan PT Telekomunikasi Indonesia dan juga adanya kesadaran dari pengusaha terhadap adanya penggunaan internet yang telah berkembang begitu pesat. Data di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya optimalisasi penggunaan internet tersebut sesungguhnya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dari para pengusaha bandeng presto tersebut sehingga hal ini sangat menguntungkan dari pengusaha itu sendiri. Dunia digital saat ini telah membuat UKM harus mampu bersaing ketat dengan UKM lainnya tanpa kecuali. Persaingan ketat tersebut yang mengharuskan pengusaha untuk mampu beradaptasi dengan teknologi yang ditunjang dengan internet, mau tidak mau harus ikut terlibat didalamnya (Wahidin, 2018:53).

Transformasi Perdagangan Digital

Sebelum menyadari adanya internet yang saat ini berkembang pesat oleh pengusaha bandeng presto, dalam melakukan transaksi penjualan dan pembeliannya pengusaha bandeng presto secara *face to face* bahkan *door to door*. Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa dengan adanya internet ini pengusaha bandeng presto mengalami transformasi perdagangan. Bahkan dalam pengelolaan bandeng presto pun tidak secara tradisional lagi melainkan sudah menggunakan teknologi atas bantuan pihak terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, maupun Dinas Usaha Kecil dan Menengah baik dari Pusat, Provinsi, maupun Kota. Optimalisasi penggunaan internet ini dilakukan guna mendukung proses transformasi perdagangan digital yang saat ini berkembang pesat. Perdagangan digital merupakan salah satu perilaku dalam mewujudkan *digital citizenship* (Ribble dan Bailey, 2011).

Peningkatan Terhadap Ketahanan Ekonomi

Proses optimalisasi dalam penggunaan internet ini dilakukan dalam peningkatan terhadap ketahanan ekonomi. Data penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya proses transformasi perdagangan digital ini telah meningkatkan transaksi penjualan dari produk bandeng presto itu sendiri. Penjualan secara *online* ini telah dibantu juga oleh *bukalapak* yang telah memberikan pembekalan dan pengarahan terhadap pengusaha bandeng presto akan kemudahan dalam pemasaran secara *online*. Bukan hanya *bukalapak* saja ternyata *Go-Jek*, *Grab* selama ini telah membantu dalam proses tersebut. Seluruh *stakeholder* dalam hal ini di ajak untuk bekerjasama guna meningkatkan penjualan dan pembelian dari bandeng presto itu sendiri. Semua informan menyatakan dengan adanya internet ini justru membantu terhadap peningkatan ekonomi dari pengusaha bandeng presto itu sendiri.

Kampung UKM digital merupakan sebuah wadah yang di inisiasi oleh beberapa *stakeholder*, hal ini dibuat sebagai wadah untuk pengembangan UKM yang berada di kampung-kampung agar tumbuh dan berkembang. Saat ini kampung UKM digital baru ada di beberapa kota besar, seperti Solo, Semarang, dan Sidoarjo (Wahidin, 2018). Bahkan akan ada kemungkinan untuk di adakan juga di kota-kota lainnya, bahkan sudah dilakukan perencanaan di kota mana saja akan dibuat sistem seperti itu. Mengingat tiap-tiap daerah mempunyai UKM-UKM yang sangat bagus dan harus dapat berkembang dengan tatanan global. Hal ini pula yang menginisiasi bahwa perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi harus dapat dipadukan dengan kegiatan ekonomi maupun usaha yang ada agar lebih modern.

Digital citizenship adalah panduan yang dimediasi untuk perilaku manusia sehingga semua dapat mengambil manfaat dalam masyarakat *digital*. Tujuan *digital citizenship* sekarang ini pada dasarnya untuk mendidik, memberdayakan, dan melindungi. Menurut Ribble dan Bailey (2011) yang mendefinisikan *digital citizenship* terdiri dari konsep tanggung jawab, hak, keamanan. Setidaknya menurut Ribble dan Bailey (2007) ada sembilan bidang perilaku untuk membentuk *digital citizenship*, dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi menjadi dua perilaku saja. Optimalisasi yang dilakukan oleh pengusaha bandeng presto terhadap penggunaan internet ini sesungguhnya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dari pengusaha bandeng presto itu sendiri.

Sebagaimana yang dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi, antara lain sifat keterbukaan dan sistem perekonomian manajemen, hubungan ekonomi luar negeri, diversifikasi pemasaran, teknologi, struktur ekonomi, infrastruktur (sarana dan prasarana), potensi dan pengelolaan sumber dana (Lemhannas, 1997). Teknologi dalam hal ini telah mempengaruhi pengusaha bandeng presto untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Bahkan teknologi juga sebagai sebuah solusi modernisasi dari pengusaha bandeng presto yang ada di kampung UKM digital tersebut. Sehingga mengutip pendapat (Anoraga dan Widiyanti, 1993), yang menjelaskan beberapa unsur yang dapat digunakan untuk melihat ketahanan ekonomi secara nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi nasional. Modernisasi yang dilakukan pengusaha bandeng presto tersebut selain meningkatkan ketahanan ekonomi pengusaha bandeng presto juga akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Optimalisasi penggunaan internet sebagai solusi modernisasi yang dilakukan pengusaha kampung UKM digital ini sesungguhnya menemukan bahwa terjadinya akses digital, terjadinya transformasi pengusaha digital, dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Pada dasarnya dari semua itu sesungguhnya adanya akses internet yang sehat dan positif memberi dampak terhadap para perilaku penggunaannya. Kesadaran terhadap penggunaan internet yang sehat dan positif ini dapat mewujudkan

digital citizenship sebagaimana pembahasan penelitian mengelaborasikannya dengan teori tersebut. UKM yang ada saat ini sangatlah penting bahkan diharuskan melakukan sebuah inovasi untuk bisa bertahan dan mampu bersaing ditengah gempuran arus digitalisasi saat ini.

REFERENSI

- Anoraga, P dan Widiyanti, N. 1993. *Dinamika Koperasi*. Bandung: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, & Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isman, Aytakin dan Gungoren, Ozlem Canan. 2014. "Digital Citizenship". *Journal of Educational Technology* 13 (1): 73-77.
- Lemhannas, 1997. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka Lemhannas.
- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ribble, M. and Bailey, G. 2007. *Digital Citizenship in School*. Washington DC: International Society for Technology in Education (ISTE).
- Ribble, M. and Bailey, G. 2011. *Digital Citizenship in School*. Washington DC: International Society for Technology in Education (ISTE).
- Schuler, D. 2002. "Digital Cities and Digital Citizens". *Digital Cities II: Computational and Sociological Approaches Lecture Notes in Computer Science*. 2362: 71-85.
- Suwanda, I Made dkk. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Surabaya: Unesa University Press.
- Wahidin, Darto. 2018. "Kampung UKM Digital: Solusi Modernisasi dalam Pembangunan Usaha Nasional di Era Ekonomi Digital" dalam *Suara Akademisi: Pembangunan Indonesia Optimalisasi Peran Peneliti Muda Pascasarjana dalam Membangun Negara*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

RUANG KOTA

Meninjau Harmonisasi Alam dan Fungsi Ruang pada Bentang Lanskap Budaya Jawa Kuno di Lembah Kali Brantas

Chairul Maulidi, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, E-Mail: c.maulidi@yahoo.co.id

Abstrak

Tolok ukur kapital dalam capaian pembangunan kota-kota di Indonesia menghantarkan pandangan bahwa alam adalah komoditi yang 'wajar' dieksploitasi. Hiruk pikuk pembangunan ekonomi telah menjalar dari perkotaan ke pedalaman. Kota Batu yang menjadi magnet wisata di Provinsi Jawa Timur, tak lagi identik dengan lanskap pegunungan Kawi yang sejuk, berganti dengan riuh wisata buatan dan property berkelas untuk investasi. Perkembangan kota-kota di sekeliling Gunung Kawi dan Lembah Kali Brantas dimulai pada masa Mpu Sindok di abad ke-10. Terlebih lagi ia dipercaya sebagai peradaban mengkota pertama dalam rentang sejarah peradaban Jawa Kuno, dengan penggunaan istilah 'kerta' dan 'pura' dalam beberapa prasasti dari Periode Jawa Timur. Masyarakat Jawa Kuno yang memandang lingkungannya sebagai mikrokosmos senantiasa mengupayakan keharmonisan prilakunya dengan alam semesta. Hal ini sebagai dasar hipotesis bahwa mungkin ada model harmonis antara alam dan pola pemanfaatan ruang pada lanskap Jawa Kuno di Lembah Kali Brantas. Untuk membuktikan hipotesis tersebut penelitian konstruktifism dilakukan untuk menemukan pola fungsi ruang pada lanskap di Lembah Kali Brantas, melalui pemetaan data artefaktual dan naskah kuno. Ditemukan bahwa terdapat pola hirarkhis radial pada ruang lanskap dengan Gunung Kawi sebagai porosnya. Terdapat tiga zona, yakni: zona lembah, zona transisi dan zona atas. Zona lembah untuk lokasi kadatwan; zona transisi untuk lingkungan dharma ipas dan dharma haji; dan zona atas sebagai lokasi bagi mandala. Pola pemanfaatan ruang dan aktivitas di ketiga zona dipahami dengan informasi dari naskah Nagarakrtagama. Diperoleh gambaran bahwa setiap zona dimaknai dan difungsikan spesifik. Zona Lembah kental dengan aktivitas politik dan ekonomi. Zona Transisi untuk aktivitas ziarah dan mengasingkan diri mencari ketenangan lahir batin. Sedangkan zona Atas adalah lokasi kedewaguruan, yang disucikan dari pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi. Pemaknaan ruang dan pola pemanfaatan ruang ala Jawa Kuno kiranya dapat menjadi model sandingan bagi literasi pembangunan kota saat ini yang memandang seluruh bentang lanskap sebagai aset kapital dan mengancam kelestariannya.

Kata Kunci: *Brantas, budaya, jawa, lanskap*

Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2019 mengamanatkan 9 program prioritas pembangunan nasional (Nawacita) salah satunya adalah Pengembangan sumber daya "kebudayaan" dalam rangka penguatan karakter dan jati diri bangsa dan pelestarian nilai-nilai sejarah dan warisan budaya. Keragaman suku, budaya, dan kekakyaan sejarah menjadi sumber daya berharga dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang inklusif. Terdapat 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan memberikan warna bagi wujud kota, permukiman, bangunan, dan bentang lanskap peradaban nusantara.

Lanskap budaya di Indonesia dikenal pula dengan terminologi 'saujana,' merupakan hasil rekayasa manusia yang ragawi pada bentang lahan atau lanskap, mewujudkan antara lain kelompok permukiman, jalan, rumah, sawah, dan ladang, yang tersusun atas dasar situasi geomorfologi dan nilai-nilai ekologi yang diharapkan. Secara eksplisit, dalam perspektif ini tatanan lanskap manifestasi fisik dari sejarah dan tradisi budaya setempat, yang kemudian dipahami sebagai pusaka tak-ragawi. Budaya-budaya yang dimaksud adalah tradisi dengan kedalaman, kompleksitas, dan hubungan-

hubungan yang luas dengan lingkungan; dan juga budaya yang berhubungan dengan kepercayaan serta kebiasaan-kebiasaan tradisional dan artistik yang mencerminkan hubungan spiritual khusus antara manusia dengan Tuhan dan alam. Lanskap budaya juga dipandang sebagai produk dari proses alami, interaksi antara manusia dan alam, dalam tempo waktu yang panjang (UNESCO, 2015). Sebagai hasil dari reorganisasi kontinyu oleh komunitas lokal kepada bentang alam dalam rangka mengadaptasikan penggunaan lahan dan struktur spasial untuk mencapai pemenuhan kebutuhan manusia yang senantiasa berubah dari masa ke masa. Oleh karenanya lanskap budaya semakin disadari mengandung informasi yang dapat menjadi referensi berharga, sebagai model interaksi yang lebih harmonis antara manusia dan alam (Campolo dkk, 2016). Salah satunya adalah tatana lanskap persawahan terasiring di Bali yang terkelola lestari di melalui tradisi Subak. Subak adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dengan khusus mengatur dan mengelola lahan berlereng dan pengelolaan sumber mata air dan sistem distribusi berkadiliran. Subak didasari filosofi "Tri Hita Karana" yang artinya 3 buah penyebab kebahagiaan, yakni: menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan sesamanya, dengan alam dan lingkungannya, dan dengan Tuhan.

Peradaban Jawa Periode Jawa Timur yang berkembang di wilayah Lembah Brantas Provinsi Jawa Timur, adalah masa di mana Peradaban Jawa Kuno mulai mengenal kehidupan 'urban/kota' (Rahardjo, 2011). Menurut Kulke penggunaan kata pura, nagara, atau kata-kata lain yang mempunyai arti 'kota' baru dikenal dalam prasasti-prasasti dari Masa Jawa Timur, dari Abad ke-10 hingga 15. Data arkeologi berupa situs, prasasti, dan naskah kuno banyak berasal dari periode ini. Disebutkan beberapa titik lokasi peradaban di Lembah Brantas, yakni: Janggala/ Jiwana; Panjalu/ Kadiri; Kutaraja/ Singhasari; dan Wilwatikta atau Majapahit (Rahardjo, 2011). Modifikasi lanskap alami untuk pembangunan infrastruktur ke-airan pernah tersebut dalam Prasasti Kamalagyan (1115 M), ketika Airlangga memerintahkan pengelolaan luapan Kali Brantas untuk irigasi dengan dibangun bendungan Kamalagyan.

Vastu Shastra menjadi landasan filosofi masyarakat Jawa kala itu demi mencapai keselarasan antara alam dan manusia di lingkungan hidup (Kumar, 2005). Venugopal (2012) menyatakan bahwa Vastu Shastra untuk setiap situs dan negara berbeda sesuai dengan berbagai faktor regional tempat itu. Lembah Kali Brantas, menunjukkan bahwa peradaban ini tumbuh berkembang di daerah dataran tinggi, dikelilingi oleh Tengger, Kawi dan Gunung Penanggungan, dengan pemandangan lanskap yang menawan dan kaya akan sumber daya air. Menurut literatur, tata ruang peradaban Jawa kuno erat kaitannya dengan karakter alam dan khususnya dalam rangka pengelolaan sumber daya air untuk mencapai kemakmuran (Rahardjo, 2011). Namun demikian, hasil kajian sejarah masih terbatas pada narasi dan belum ada yang merekonstruksi bagaimana model tata ruang lanskap Jawa Kuno yang harmonis tersebut. Oleh karenapenelitian ini dimaksudkan untuk merekonstruksi model tersebut dalam bentuk tata ruang Lanskap Jawa Kuno di Wilayah Lembah Kali Brantas dengan memanfaatkan data data arkeologis.

Kajian Pustaka

Peneliti pertama yang menyinggung soal karakter peradaban Jawa adalah Michael D. Coe (1961). Berdasarkan kajian yang dilakukannya terhadap peradaban Maya dan peradaban Khmer, Coe menduga bahwa peradaban Jawa Kuno yang menghasilkan candi Borobudur memiliki ciri-ciri peradaban unilateral. Menurutnya ada dua jenis peradaban yang dapat tumbuh di wilayah hutan-tropis, yakni unilateral dan organic.

Ciri masyarakat pendukung peradaban unilateral adalah pola hubungan antar anggota masyarakatnya yang bersifat solidaritas mekanis. Pola ini ditandai oleh bentuk hubungan yang mementingkan nilai-nilai keseragaman, sistem sanksi yang bersifat memaksa dan cenderung setia pada tradisi. Agama yang digunakan sebagai sumber moral dan dasar pengendali sosial diterapkan

sebagai hukum yang cenderung bersifat menekan (represif). Dari sudut lingkungan fisik, peradaban unilateral umumnya tumbuh dalam wilayah yang dikelilingi oleh hutan lebat yang sulit ditembus dari luar sarana transportasi yang kurang berkembang. Sumber ekonomi pertanian umumnya seragam di semua wilayah, baik dalam jenisnya maupun siklus panennya. Kondisi serupa ini dianggap tidak mendorong tumbuhnya kehidupan kota karena kegiatan perekonomian yang permanen dan terkonsentrasi tidak terkondisikan. Oleh karena itu, peradaban unilateral juga dikenal sebagai peradaban tanpa kota.

Kulke (1991) berpendapat peradaban kota di Jawa Kuno mulai tumbuh pasca periode Jawa Tengah. Konsep kota tercermin dalam prasasti-prasasti dari periode Jawa Timur melalui penggunaan kata-kata *pura*, *nagara*, atau kata-kata lain yang mempunyai arti "kota" mengindikasikan akan adanya orientasi kehidupan berkota. Sedangkan prasasti yang berasal dari abad ke-8 tidak mengenal konsep tersebut.

Pusat Pemerintahan

Lazimnya setiap kerajaan didukung oleh sarana-sarana fisik yang memungkinkan kerajaan berjalan dengan normal dan dapat bertahan dari kemungkinan serangan musuh. Diantara sarana-sarana itu, yang paling utama adalah pusat kegiatan pemerintahan dan sekaligus hunian para elite politik di samping sarana pertahanan sebagai bagian dari sistem perlindungannya. Dalam kasus Jawa, sumber-sumber arkeologis yang menunjukkan adanya sarana fisik semacam itu sedikit sekali yang masih tersisa sehingga sulit dibuat suatu rekonstruksi, terlebih lagi bila tanpa bantuan sumber tertulis. Kecuali ibukota Majapahit, pengetahuan tentang kota-kota pusat pemerintahan dari periode Jawa Kuno sangat sedikit.

Pada umumnya dianggap bahwa ibukota sekaligus juga digunakan sebagai negara. Sebab itu, nama-nama Kahuripan, Kadiri, Singhasari dan Wilwatikta sering dipahami dalam dua arti tersebut sekaligus. Meski demikian dugaan itu tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan. Satu-satunya dukungan yang memungkinkan dapat diandalkan adalah dalam hal nama Wilwatikta (bahasa Sansekerta dari Majapahit), karena nama tersebut disebut baik sebagai nama kerajaan dan juga nama ibukota.

Nama Kadiri dalam sumber sezaman adalah Panjalu, sedangkan ibukotanya adalah Daha. Nama Singhasari agaknya hanya berlaku untuk menyebut nama negara. Persoalan menjadi lebih rumit karena nama-nama tersebut dikenal juga dengan sebutan yang lain. Kahuripan, misalnya, dikenal juga dengan nama Jiwana dan Janggala. Panjalu dikenal juga dengan sebutan Khadiri atau Daha. Singhasari, yang sebelumnya bernama Kutharaja, dikenal juga dengan sebutan Tumapel dan Sengguruh. Sedangkan Wilwatikta adalah bentuk Sansekerta dari nama Majapahit.

Dari segi periodenya, nama-nama Tamwlang, Wwatan mas dan Kahuripan, diketahui muncul pada tahun 929 – 1048 masehi. Dengan demikian, dalam kurun waktu 106 tahun diketahui ada tiga lokasi yang pernah menjadi pusat pemerintahan. Kecuali Kahuripan yang diduga terletak di daerah delta Kali Brantas, percabangan Kali Mas dan Kali Porong. Tempat-tempat lainnya tidak diketahui lokasi persisnya karena memang tidak ditemukan data arkeologi sebagai pendukungnya.

Satu-satunya keterangan mengenai pusat pemerintahan yang paling lengkap hanyalah ibukota Majapahit. Ada tiga sumber yang memberitakan keterangan mengenai ibukota ini, yakni data arkeologi, sumber berita Cina dan kitab Nagarakrtagama. Situs Majapahit yang diduga sebagai bekas ibukota adalah Trowulan yang terletak di Mojokerto. Hasil peneltian arkeologi di situs ini menghasilkan temuan-temuan penting, antara lain: pintu gerbang (*gapuro*), Pagar, Bangunan keairan, Candi, Permukiman, dan Pemakaman. Sumber berita Cina dan kitab Nagarakrtagama memiliki kecocokan dalam hal keraton dikelilingi oleh tembok, sedangkan kotanya tidak. Selain itu keduanya menyebutkan adanya pelabuhan di sebelah utara ibukota.

Lingkungan Keagamaan

Kitab Nagarakrtagama dan Arjunawijaya menyebutkan bahwa pada masa Majapahit dikenal adanya tiga macam lingkungan suci, yakni dharmahaji, dharmahipasa dan mandala. 1) Dharmahaji adalah lingkungan suci yang diperuntukkan bagi raja dan keluarganya. Setiap lingkungan suci jenis ini dikelola oleh seorang staphaka dan seorang biku keraton dan secara keseluruhan dharmahaji diawasi oleh seorang dharmadhyaksa. 2) Dharmahipasa didirikan di atas tanah yang telah dihibahkan kepada orang-orang miskin, pendeta siwa, buddha dan rsi. Ada tiga pejabat kerajaan yang mengawasi lingkungan ini sesuai dengan sifat keagamaannya. Dharmadhyaksa ring kasyaiwan mengawasi tempat-tempat suci agama siwa, dharmdhyaksa ring kasogatan mengawasi tempat suci agama Buddha, dan dharmdhyaksa ring karsyan mengawasi lingkungan suci agama rsi. 3) Mandala atau wanasrama tidak secara tegas disebutkan dalam Nagarakrtagama-oleh Pigeud diduga berasal di luar kewenangan ketiga pejabat kerajaan, dan memiliki tingkat kemandirian terletak di dalam hutan, lereng gunung, puncak bukit, atau tepi laut. Kitab Rajapatigundala menyebutkan jumlah mandala sangat banyak dan tersebar di seluruh Jawa, dipimpin oleh seorang dewaguru karenanya juga dikenal dengan sebutan kadewaguruan. Di mandala-mandala ini pula mengembangkan tradisi penulisan sastra yang berbeda dengan corak sastra yang berkembang di lingkungan kraton

Lingkungan Desa

Masyarakat desa disebut dengan istilah anak wanua atau anak thani, daoat dianggap mewakili lapisan terbawah dari masyarakat kerajaan yang lebih besar. Berbeda dengan masa Jawa Tengah, pada masa Jawa Timur pimpina keagamaan di tingkat desa tidak begitu menonjol perannya. Nagarakrtagama menyebutkan adanya pimpinan komunitas keagamaan di tengah kalangan pengrajin yang disebut dengan istilah staphaka. Di lingkungan desa juga dikenal profesi janggan sebagai ahli pengobatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah constructivism dilakukan dengan pendekatan naturalistic inquiry, yang ditujukan untuk membangun model hipotetik tentang konstruksi tatanan spasial lanskap Jawa Kuno dari sebaran artefak di wilayah lembah Kali Brantas. Penelitian bersifat deskriptif eksploratif dengan metode Content Analysis dan Cluster Analysis.

Analisis Konten dilakukan secara sistematis untuk mengolah pesan dalam data (Bungin, 2012). Analisa Konten di penelitian ini untuk menggali 'pesan' berupa informasi lokasi kota kuno dan tipe pemanfaatan ruangnya yang dinarasikan atau ditunjukkan dalam artefak dan informasi penunjukan lokasi kuno oleh sejarawan dan/atau arkeolog. Informasi dibaca sebagaimana adanya (Moleong, 1999) sebagaimana prinsip-prinsip dalam analisis konten. Prinsip-prinsip analisis konten antara lain: 1. Sistematis, perlakuan prosedur yang sama pada semua data artefak; 2. Objektif, hasil kategorisasi fungsi ruang apa adanya dikeluarkan oleh prosedur, bukan keinginan peneliti; 3. Kuantitatif, mencatat nilai-nilai bilangan frekuensi untuk melukiskan berbagai komponen yang didefinisikan; 4. Isi Yang Nyata, yang dianalisis hanyalah isi yang tersurat data peta dan narasi tentang artefak, bukan makna yang dirasakan oleh peneliti (Subiakto, 1995). Nama-nama lokasi kuno yang terkumpul dipetakan di atas peta morfologi lanskap lembah Kali Brantas, dan ini dipergunakan sebagai input bagi analisis klaster.

Analisis Klaster dipergunakan setelah analisis konten untuk mengklasifikasikan pola spasial, ke dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen (Supranto, 2010), hingga tersusun pola hirarkhi ruang pada skala lanskap horisontal dan vertikal. Selanjutnya, model yang terumuskan didiskusikan. Diskusi ini memusatkan diri secara intensif pada satu pola pemanfaatan ruang Kali Brantas pada masa Jawa Kunosebagai salah satu data kasus Data tersebut disandingkan dengan data literatur tentang

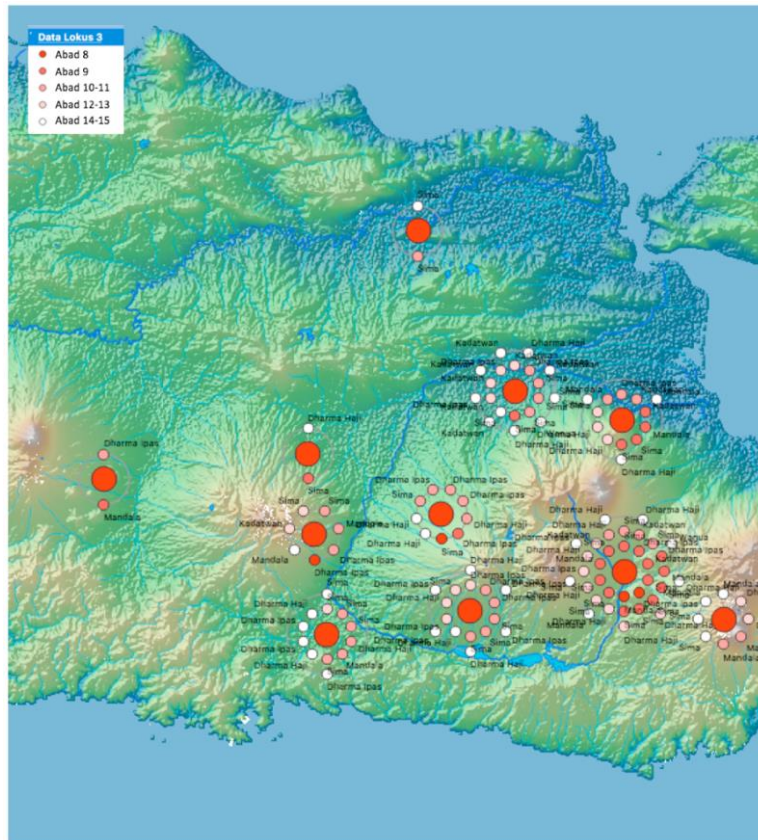
kondisi sosial peradaban yang berkembang di masa Jawa Kuno. Proses ini adalah untuk mereview bagaimana relevansi pola pemanfaatan ruang di peradaban Jawa Kuno dan kembali dikomparasikan dengan pola pemanfaatan ruang di wilayah lembah Kali Brantas.

Hasil dan Pembahasan

Data-data artefaktual dan kontennya dikumpulkan melalui data sekunder, dari buku dan jurnal terpublikasi tentang sejarah dan peradaban Jawa Kuno periode Jawa Timur. Ditehahi bahwa terdapat 3 jenis data artefaktual yang mengandung monten naratif tentang situasi dan lokus yang ada pada masa Jawa Kuno, yakni Situs artefak kuno, candi, prasasti, dan naskah kuno. Setidaknya pada tiap situs terkandung informasi mengenai lokasi desa/dusun dan dapat ditelusuri tidak ordinatnya, fungsi ruang atau aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut pada masa lalu, dan asal tahun dari situs. Lokasi candi, situs, dan lokasi penemuan prasasti diasumsikan sebagai lokasi yang tetap atau sama dengan lokasi di masa Jawa Kuno. Namun, jika ada informasi bahwa artefak atau prasasti tersebut telah dipindahkan dari tempat asalnya, maka ditelusuri lokasi semula situs tersebut berasal. Konten penyebutan lokus juga ditelusuri dari hasil terjemahan prasasti yang mengandung penyebutan lokasi-lokasi dan penafsiran lokasi berdasarkan kemiripan topinimi dan menurut sejarawan dalam buku-buku dan hasil penelitian sejarawan. Namun demikian, naskah kuno tidak disertakan dalam penelitian ini karena penafsiran lokasi ke lokasi saat ini belum banyak yang bisa dipastikan. Nama lokasi yang disebutkan dalam naskah kuno bisa ditafsirkan dengan cukup kuat jika telah ada temuan artefak di lokasi terduga.

Keseluruhan data terkumpul lokus sejumlah 126 titik, yang disarikan dari konten informasi lokus di 47 candi, 60 prasasti dan 19 situs. Seluruhnya didata pada tabel 1 di bawah. Dengan memahami fungsi lokasi dan fungsi artefak yang ditemukan di tiap lokasi kemudian seluruh titik lokasi diklasifikasikan ke dalam 5 tipe lingkungan Jawa Kuno, yakni kadatwan, wenua/sima, dharma haji, dharma ipas dan mandala.

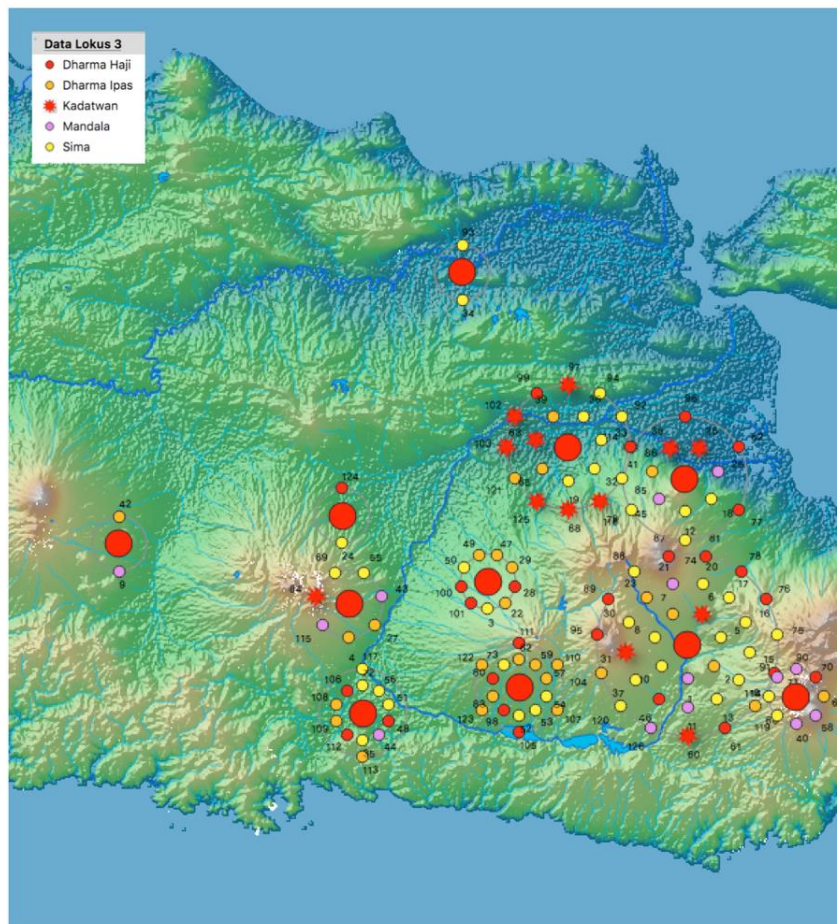
Analisis kluster diaplikasikan pada data lokus dengan menggunakan tool spatial analysis secara kuantitatif di Sistem Informasi Geografis. Analisis kluster diujikan untuk melihat kemungkinan kebenaran dari hipotesa: Hipotesa Pertama adalah adakah pola kluster pertumbuhan peradaban di setiap masa yang berbeda. Di mana telah diketahui bahwa masa Periode Jawa Timur mengalami pergantian politik kesesuaian dalam 5 abad. Sepanjang abad ke-10 hingga abad ke-15 pusat kerajaan berpindah jadi dimungkinkan adanya pergeseran spasial pada perkembangan peradaban Jawa Kuno Periode Jawa Timur. Hipotesa Kedua adalah, ada pola pengelompokan spasial dari kelima tipe lingkungan (Kadatwan, Sima, Dharma Ipas, Dharma Haji dan Mandala) pada bentang lanskap lembah kali Brantas.



Gambar 1

Klaster spasial menurut periode masa

Pertumbuhan peradaban mengklaster di sekeliling kompleks gunung kawi dan ke arah barat hingga gunung Wilis. Kepadatan klaster paling tinggi ada di sisi timur gunung kawi, yakni di wilayah Kabupaten Malang saat ini. Klaster terpadat berikutnya ada di sebelah utara (Kabupaten Mojokerto) dan sebelah selatan gunung Kawi (Kabupaten Blitar). Menurut komposisi warna, dapat dilihat bahwa hampir seluruh klaster memiliki gradasi warna merah tua hingga hingga merah muda. Hal ini menunjukkan bahwa situs dari abad ke-10 (merah tua) hingga situs dari abad yang paling muda (abad ke-15) tersebar merata di semua klaster. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa perkembangan peradaban di lembah kali Brantas terus tumbuh kontinyu di seluruh posisi klaster (lihat Gambar 1). Meskipun ibukota kerajaan berpindah dari sisi timur (Tumapel) ke utara (Kahuripan), dan berpindah lagi pada periode berikutnya ke barat (Daha) dan selatan (Jenggala) gunung Kawi, namun keseluruhan peradaban Jawa kuni di Lembah Kali Brantas tumbuh secara kontinyu di lokasi yang sama selama 5 abad tersebut. Dengan demikian hipotesa pertama tertolak, di mana tidak ada kecenderungan pola spasial lanskap mengikuti masa atau periode kekuasaan politik.



Gambar 2
Klaster spasial menurut jenis lingkungan

Klaster persebaran berbagai tipe lingkungan dapat diamati pada gambar 2 di atas. Terlihat bahwa komposisi warna tersebar merata di semua klaster. Hal ini berarti di setiap klaster spasial memiliki keragaman tipe lingkungan, baik kadatwan, dharma haji, dharma ipas, sima dan mandala. Meski demikian dapat ditangkap bahwa ada kecenderungan pada dua tipe lingkungan, Kadatwan dan Mandala. Tipe lingkungan Kadatwan cenderung berlokasi di klaster yang bersentuhan langsung dengan aliran Kali Brantas. Kecenderungan kedua ada pada tipe lingkungan Mandala yang mana cenderung berada di klaster yang dekat dengan gunung Penanggungan, gunung Semeru, gunung Kelud, gunung Kawi dan gunung Arjuna. Dengan demikian hipotesa kedua tidak sepenuhnya terbukti, dengan kata lain tidak ada pola spasial dalam sebaran kelima tipe lingkungan Sima, Dharma Haji dan Dharma Ipas. Meski demikian dapat ditangkap ada kecenderungan pola spasial sebaran lingkungan Kadatwan dan Mandala. Kadatwan cenderung di tepi dasar lembah di sisi Kali Brantas dan lingkungan Mandala cenderung berlokasi dekat dengan puncak gunung.

Kadatwan sebagai ibukota kerajaan berperan sebagai pusat politik dan ekonomi. Akses yang mudah dengan dunia luar menjadi sangat penting untuk mengokohkan fungsi tersebut. Kali Brantas yang pada masa Jawa Kuno memiliki fungsi sebagai jalur mobilisasi barang dan orang tentunya akan menguntungkan bagi posisi strategis ibukota kerajaan untuk mengontrol politik wilayah sekitarnya dan juga sebagai jalur perdagangan di lembah kali Brantas. Terkait hal ini Kadatwan Majapahit menjadi kasus yang memenuhi, dimana lokasi kadatwan 7 km dari Kali Brantas dan tepat di sebelah utaranya terdapat pelabuhan (Kota Mojokerto saat ini). Kali Brantas juga kerap dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan alami. Ibukota Tumapel dan Daha berposisi di pertemuan Kali Brantas-Bango dan Kali Porong-Mas. Kedua ibukota tersebut dibangun dalam situasi peperangan dan mendapat ancaman dari kerajaan lain. Keberadaan sungai di ketiga sisi kadatwan mempersulit pasukan musuh untuk

menembus kadatwan. **Sima** sebagai lingkungan wenua permukiman di luar kedaton yang memiliki peran signifikan bagi kerajaan dan mendapatkan penghargaan sebagai desa otonom. Dihuni oleh masyarakat umum yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, karenanya disebut juga anak thani. Desa sima memiliki peran bermacam-macam, dinatarnya sebagai penjaga tanggul dan saluran air irigasi, pengelola pelabuhan angkutan sungai di tepi kali brantas, sebagai penjaga tempat suci di lingkungan dharma haji, dharma ipas, dan dmandala. Oleh karena itu, wajar sima tersebar di semua level elevasi lanskap, dari tepi kali brantas, sebagai desa pelabuhan, hingga ke kaki gunung sebagai desa yang turut merawat dan melaksanakan ritual di mandala. **Dharma Haji dan Dharma Ipas**, sebagai dua lingkungan yang kental dengan aktivitas rohani. Dharma haji biasa menjadi tempat pendharmaan abu jenasah raja dan bangsawan sekaligus sebagai monumen keluarga. Kerap didatangi bangsawan untuk ziarah mengenang leluhur dan beristirahat dan aktivitas menenangkan diri. Lokasi berada pada perbukitan dengan elevasi tinggi juga memiliki pemandangan pegunungan dan udara yang relatif lebih sejuk dibandingkan kadatwan di dasar lembah. Begitupula dharma ipas yang dianugerahkan menjadi tempat tinggal bagi pendeta, rsi dan pengikutnya, lebih cenderung suka dilokasi yang lebih tenang di pedalaman kaki gunung. **Mandala** adalah tempat memperdalam ilmu keagamaan. Lokasi yang relatif sepi dan khusyuk banyak ada di dekat puncak gunung. Masyarakat hindu meyakini bahwa puncak gunung sebagai tempat bermayam para dewa, dan dianggap sakral.

Peradaban Jawa Kuno tampak memiliki sistem pengklasifikasian ruang yang tertuang dalam pemanfaatannya. Wilayah lembah dimanfaatkan untuk aktivitas yang profan dan dataran tinggi untuk aktifitas sakral. Pensakralan wilayah atas tampak dari penggunaannya sebagai ruang Dharma Haji, dimana mereka biasa mendirikan candi dan berziarah mencari ketenangan dari hiruk pikuk aktivitas keduniaan di zona lembah profan. Pensakralan zona atas berimplikasi pada pelestarian zona atas sebagai tempat yang dekat dengan alam. Zona atas juga identikkan dengan lokasi dengan pemandangan alam memukau dan membawa ketentraman jiwa bagi bangsawan. Candi bukur sebagai tempat peristirahatan keluarga raja ditempatkan di atas sini. Pembatasan aktivitas hingar bingar di zona atas dapat terpantau dari sisi beberapa prasasti yang mengatur pembatasan aktivitas di zona atas. Lebih lanjut dapat dihipotesiskan pelestarian nuansa alami bisa menjadi indikasi akan adanya upaya konservasi alam pada zona ini. Pola ini bertolak belakang dengan pola pembangunan modern saat ini, yang mengedepankan pembangunan wisata buatan di wilayah atas, seperti Kota Batu. Upaya konservasi pemandangan alam dan ketenangan berubah menjadi hiruk pikuk wisata dan riuhnya investasi properti di wilayah dataran tinggi.

Kesimpulan

Keseluruhan data terkumpul lokus sejumlah 126 titik, yang disarikan dari konten informasi lokus di 47 candi, 60 prasasti dan 19 situs. Seluruhnya didata pada tabel 1 di bawah. Dengan memahami fungsi lokasi dan fungsi artefak yang ditemukan di tiap lokasi kemudian seluruh titik lokasi diklasifikasikan ke dalam 5 tipe lingkungan jawa kuno, yakni kadatwan, wenua/sima, dharma haji, dharma ipas dan mandala. Keseluruhan model spasial ini konsentrasi radial dengan pusat di kompleks Gunung Kawi dan gunung Arjuna. Sebagai tempat sakral dibuktikan dengan adanya situs peribadatan yang kompleks di puncak gunung Arjuna dan penanggungan. Pada level zona transisi tempat bagi dharma haji dan dharma ipas. Dan terakhir pada dasar lembah kali brantas sebagai lokasi bagi lingkungan profan untuk politik dan perdagangan. Menyikapi lanskap topografi yang kembali naik lebih tinggi karena adanya perbukitan dan pegunungan, kembali terdapat zona transisi dan diikuti zona profan hingga ke puncak gunung Kelud dan Semeru.

Referensi

- Bungin, Burhan. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Campolo, D. et.al. (2016). Cultural Landscape and cultural routes: infrastructur role and indigenou knowledge for sustainable development of inland. *Proceedia Social and Behavioral Sciences*, 223:576-582.
- Coe, M.D. (1961). Social Typology and The Tropical Forest Civilization. Dalam *Studies in Society and History*, 4 (1): 65-85.
- Kulke, Herman. (1991). Epigraphical References to the "City" and the "State" in Early Indonesia. Dalam *Indonesia*, 52 (Oktober 1991): 3-22
- Kumar, A. (2005). *Vaastu: The Art And Science Of Living*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Moleong, Lexi. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Rahardjo, Supratikno. (2011). *Peradaban Jawa Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Robert, Page, dkk. (1998). *A Guide to Cultural Landscape Reports: Contents, Process, and Techniques*. Washington: US Department of the Interior National Parks Services.
- Sedyawati, Edi. (1994). *Pengarcnaan Ganes Masa Kadiri dan Singhasari*. Jakarta, Leiden: EFEO-LIPI-Rijksuniversiteit te Leiden.
- Sedyawati, Edi., dkk. (2013). *Candi Indonesia: Seri Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.
- Soepomo, S. (1977). *Arjunawijaya, A Kakawin of Mpu Tantular*. Bibliotheca Indonesica 14. Tha Hague.
- Subiakto, Henry. (1995). *Metode Content Analysis, dalam Basis Susilo & Yanyan Cahyana, eds., Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Supranto, Johanes. (2010). *Analisis Multivariat, Arti dan Interpretasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- UNESCO. (2015) *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. UNESCO World Heritage Centre. Paris. 8 July 2015.
- Venugopal, Jayadevi. (2012). *Vastu Purusha Mandala : A human ecological framework for designing living environments*. *Advances in Architecture and Civil engineering*, Bonfring, Bangalore, India.
- Young, Greg. (2008). *Reshaping Planning With Culture*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited

Pembangunan Kota Yogyakarta Berbasis *Sustainable City*

Anita Syafitri, Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. E-Mail: anitasyafitri@mail.ugm.ac.id

Hanifa Wulan R, Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. E-Mail: hanifawulan@gmail.com

Oliver JM Turnip, Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. E-Mail: oliverturnip14@gmail.com

Abstrak

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang tergolong memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata, budaya, dan pendidikan. Potensi yang dimiliki tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan di Kota Yogyakarta. Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan (*Sustainable City*) saat ini tengah menjadi isu strategis di seluruh dunia. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pembangunan yang berbasis *sustainable city* untuk mempertahankan eksistensi Kota Yogyakarta di masa kini dan mengantisipasi ancaman di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana pembangunan kota yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta, serta bagaimana peran dan kolaborasi *multistakeholder*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan *indepth interview* terhadap pemerintah kota, akademisi, dan *Civil Society Organization* (CSO). Penelitian ini menggunakan Teori Manusia Modern oleh Alex Inkles sebagai pisau analisis. Untuk melihat pelaksanaan pembangunan berbasis *sustainable city* di Kota Yogyakarta, maka peneliti mengacu pada karakteristik yang dirumuskan oleh Bappenas (2015) yaitu *Liveable City*, *Green City*, dan *Smart City*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sudah masuk ke dalam kategori *Liveable City* dan *Green City*. Namun demikian, Kota Yogyakarta masih memiliki tantangan untuk menuju *Smart City*. *Smart City* menjadi salah satu isu utama yang sedang dibahas oleh Pemerintah dalam menghadapi *disruption era* dan tantangan bonus demografi tahun 2030 yang akan datang.

Kata Kunci: pembangunan, sustainable, liveable city, green city, smart city.

Pendahuluan

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Provinsi DI Yogyakarta. Luas wilayah Kota Yogyakarta hanya 1,02% dari luas DIY yaitu 32,50 km². Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dengan persentase penggunaan lahan tertinggi yaitu perumahan sekitar 65%. Kondisi ini menyebabkan angka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta mencapai 13.007 per Km² (BPS, 2018). Padatnya Kota Yogyakarta disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk. Perlu menjadi fokus pemerintah bahwa naiknya jumlah penduduk akibat dari tingginya angka migrasi masuk di Kota Yogyakarta. Jumlah migran di Kota Yogyakarta sebesar 181.946, sedangkan jumlah non migran adalah 230.401 jiwa (BPS, 2016). Hanya perlu sekitar 22% lagi agar jumlah penduduk migran menyamai jumlah penduduk non migran di Kota Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tarik Kota Yogyakarta terhadap migran cukup besar.

Citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan juga kota pariwisata menjadi konsekuensi penduduk dari berbagai daerah untuk datang ke Yogyakarta. Adanya mobilitas penduduk tentu akan berpengaruh pada pembangunan di suatu wilayah. Mobilitas penduduk dan pembangunan memiliki hubungan yang berbanding lurus dimana semakin maju pembangunan baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan, maka semakin tinggi pula intensitas migrasi (Mantra, 2004; Todaro, 1998; Sunarto, 1993). Pembangunan di suatu wilayah harus berkelanjutan sesuai dengan

Sustainable Development Goals. Konsep pembangunan kota yang berkelanjutan merupakan pengaplikasian dari goals SDGs ke 11 Pembangunan kota yang berkelanjutan memiliki arti bahwa pembangunan kota tidak hanya dinikmati untuk saat ini tetapi juga untuk hari esok sehingga memungkinkan generasi mendatang untuk merasakan dan menikmati manfaat pada pembangunan saat ini.

Pembangunan kota yang berkelanjutan merupakan salah satu isu strategis saat ini mengingat tingginya ketimpangan antara wilayah kota dan desa. Data dari Bappenas (2015) menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk di kota naik sebesar 2,75% tiap tahunnya dan pada tahun 2045 diproyeksikan sebesar 82% penduduk akan tinggal di perkotaan. Terdapat lima pilar dari pembangunan kota yang berkelanjutan yaitu *Liveable City*, *Green* dan *Resilient City*, serta *Smart* dan *Competitive City*. Bappenas (2015) menargetkan kota pada tahun 2025 sebagai *liveable cities* pada tahun 2035 sebagai *green cities*, dan pada tahun 2045 sebagai *smart and competitive cities*.

Pembangunan Kota Yogyakarta yang berkelanjutan memerlukan penilaian terhadap *liveable city*, *green city*, dan *smart city*. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) menjelaskan bahwa Kota Yogyakarta memiliki tingkat indeks kenyamanan tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 66,52% dimana persepsi masyarakat Kota Yogyakarta pada semua kriteria di atas 30%, kecuali untuk kriteria ketersediaan lapangan pekerjaan (Kementerian PUPR, 2011). Salah satu indikator untuk menilai *green city* adalah adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kota Yogyakarta sudah menerapkan RTH sebesar 30% dari luas wilayahnya sesuai dengan amanat UU No 26 Tahun 2007 dimana pada tahun 2014 Kota Yogyakarta telah memiliki 35 lokasi RTH di 14 kecamatan (Rai, 2017). Konsep *smart city* bertujuan untuk menciptakan kota yang mampu memenuhi kualitas hidup masyarakatnya dengan memanfaatkan teknologi informatika. Kota Yogyakarta pernah menerima penghargaan sebagai kota cerdas kategori kota sedang dalam *Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI)* dan hingga saat ini masih terus berupaya dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai kota cerdas (Suara Pemuda Jogja, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, Kota Yogyakarta memiliki peluang untuk membangun kota yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, penilaian lebih lanjut terhadap pilar *livable city*, *green city*, dan *smart city* untuk mewujudkan pembangunan Kota Yogyakarta yang berkelanjutan akan dianalisis dalam penelitian ini.

Kajian Pustaka

Sustainable City

Istilah "Pembangunan Berkelanjutan" secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV /MPR/1999 tentang GBHN. Makna dari pembangunan berkelanjutan menurut para pakar meliputi Sofyan Effendi dalam Abdurrahman (2003); Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya, dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Menurut Bappenas (2015), terdapat lima pilar dalam membangun kota yang berkelanjutan yang terbagi menjadi 3 pilar besar, yaitu:

1. *Livable city* dengan enam indikator yaitu *strong neighborhoods*, *walkable*, *affordable*, *comfortable*, *cultural*, dan *connectivity*.
2. *Green* dan *Resilient City* dengan indikator berupa *green openspace*, *green waste*, *green transportation*, *green water*, *green energy*, dan *green building resilience*.
3. *Smart* dan *Competitive City* dengan indikator *smart economy*, *smart people*, *smart governance*, *smart mobility*, *smart environment*, dan *smart living*.

Teori Manusia Modern

Teori manusia modern memiliki keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru yang berorientasi kepada masa sekarang dan masa depan, memiliki kesanggupan untuk merencanakan dan percaya bahwa manusia dapat mempengaruhi alam. Menurut Alex Inkeles, terdapat sembilan ciri manusia modern yaitu memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru dan terbuka terhadap perubahan, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat mengenai lingkungan sendiri atau yang jauh dari lingkungannya secara demokratis, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu, memiliki perencanaan dan pengorganisasian, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi suatu sikap dimana imbalan yang diterima harus sesuai dengan prestasi masyarakat. Alex Inkeles dan David H. Smith tentang manusia modern menjelaskan penekanan lingkungan material, dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun (Kartono & Nurcholis, tanpa tahun).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan *indepth interview*. Studi literatur merupakan pencarian referensi-referensi teori yang relevan dengan tujuan penelitian. Studi literatur dapat diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dan situs-situs internet. *Indepth interview* merupakan salah satu cara menggali data dengan wawancara secara mendalam terhadap informan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi DI Yogyakarta. Berdasarkan berbagai sumber literatur, Kota Yogyakarta memiliki predikat sebagai *liveable city*, *green city*, dan *smart city*. Kondisi itulah yang mendasari pemilihan lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan aktor pemerintah dalam bidang lingkungan yaitu, Sekber Kartamantul dan Bappeda, serta dari pihak praktisi-akademisi dalam bidang pembangunan kota yaitu *Housing Resources Center* (HRC) Caritra. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber yang terkait pembangunan kota berkelanjutan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan konsep Sustainable City dan Teori Modernisasi. Konsep *sustainable city* memiliki 3 pilar utama yaitu *livable city*, *green* dan *resilient city*, serta *smart dan competitive city*.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan kota berbasis *Sustainable City* merupakan topik yang sedang hangat dibahas terutama di daerah perkotaan. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sedang berupaya untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan secara menyeluruh, terlebih untuk mendukung daya tarik Kota Yogyakarta. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2015), pembangunan *Sustainable Urban Governance* dapat dilihat dari 3 konsep utama yaitu *Liveable City*, *Green City* dan *Smart City*.

Liveable City

Liveable City merupakan gambaran atas lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek fisik (fasilitas, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll) (IAP, 2011). Menurut pemberitaan *online* yang ada pada *website* resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018), hasil survei yang pernah dilakukan oleh *Instituatioal Analysis & Planning* (IAP) tentang *Most Liveable City Index* (MLCI) mengungkapkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki indeks kenyamanan tertinggi di Indonesia yaitu sekitar 66,52%. Survei tersebut menggunakan 26

indikator yang dikelompokkan ke dalam 9 kriteria utama, yaitu aspek lingkungan, tata ruang, transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur dan utilitas, ekonomi, sosial (interaksi warga) dan juga keamanan. Sehingga, berdasarkan hasil survei tersebut dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta merupakan *Most Liveable City*. Tidak hanya itu saja, Yogyakarta masuk pada kategori *liveable city* bersama dengan kota lain seperti Balikpapan, Surakarta, Malang, Palembang, Makasar, dan Bandung (Christi, 2014). Kepala Bidang Fisik Bappeda Kota Yogyakarta selalu optimis bahwa Kota Yogyakarta masih menjadi kota yang layak huni.

“Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya melakukan perbaikan fasilitas fisik, gedung, penambahan taman, penyediaan lapangan kerja serta tata ruang kota. Pada tahun 2011, Kota Yogyakarta m/endapat kan peringkat pertama dengan predikat *The Most Liveable City*. Meskipun pada tahun 2013 tidak berada posisi pertama, tetapi masih berada di deretan teratas dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia. Survey ini dilihat berdasarkan persepsi dari masyarakat Kota Yogyakarta sendiri bukan masyarakat dari wilayah lain” (Kabid Fisik Bappeda, 2018).

Predikat *liveable city* yang diterima oleh Kota Yogyakarta tentunya semakin menambah daya tarik tersendiri. Selain untuk berwisata, masyarakat dari kota lain juga banyak yang memilih untuk menetap lebih lama dengan berbagai alasan. Berdasarkan data statistik migrasi Yogyakarta, sebanyak 60.827 jiwa tercatat sebagai migrasi yang masuk di Kota Yogyakarta (BPS, 2016). Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sebagai *liveable city* diterima oleh banyak masyarakat dari kota lain. Sehingga, banyak masyarakat yang memilih untuk bermigrasi ke Kota Yogyakarta. Namun, di sisi lain ada dampak yang cukup krusial dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya angka kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta. Angka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2017 mencapai 13.007 per Km² (BPS, 2018). Meningkatnya angka kepadatan penduduk berimplikasi pada kemacetan Kota Yogyakarta terlebih pada hari libur. Sehingga, untuk mewujudkan pembangunan Kota Yogyakarta yang berkelanjutan tidak hanya cukup dalam konteks *liveable city*, namun dibutuhkan juga pemenuhan 2 konsep lainnya yaitu, *green city* dan *smart city*.

Green City

Green City merupakan satu bagian dari *Sustainable City* yang menjadi salah satu fokus dari pembangunan Kota Yogyakarta yang berkelanjutan. Menurut KPPN/Bappenas (2015), ada 7 indikator dari *Green City* yaitu: Ruang Terbuka Hijau (RTH), *Green Waste*, Transportasi Ramah Lingkungan, Air Bersih, Hemat Energi, Bangunan Ramah Lingkungan, dan Ketahanan Kota. *Green Waste* di Yogyakarta sudah mulai diterapkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Mulai dari pemerintah, LSM/NGO, hingga masyarakat yang peduli lingkungan turut memberikan perhatian lebih kepada lingkungan. Di tingkat pemerintahan, ditunjukkan dengan keseriusan membangun lembaga fungsional yang menangani tentang sampah dan lingkungan. Lembaga fungsional tersebut bernama ‘Sekber Kartamantul’ yang merupakan singkatan dari Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.

"Kartamantul merupakan lembaga yang kini sudah dipegang oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang fokus pada penyelesaian masalah lingkungan, yang salah satunya adalah pengelolaan sampah. Sekretariat bersama berada di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) berada di Piungan, Bantul. Selain kelompok yang berada dibawah pemerintah, ada banyak pula kelompok yang peduli lingkungan seperti Walhi Yogyakarta. Kelompok-kelompok tersebut memberikan contoh upaya Kota

Yogyakarta dalam mewujudkan *Green Waste* dan mengurangi permasalahan sampah di Kota Yogyakarta” (Pengelola Kartamantul, 2018)

Salah satu indikator untuk menentukan sebuah kota layak dikatakan sebagai *Green City* adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus 30% dari luas wilayahnya. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Fisik Bappeda, RTH di Kota Yogyakarta telah melebihi angka 30%.

“RTH di Kota Yogyakarta saat ini sebesar 31,65% dan setiap tahun pemerintah terus mengupayakan untuk menambah RTH dengan membeli lahan milik swasta untuk dijadikan RTH dan tentu saja dapat dimanfaatkan oleh warga.” (Kabid Fisik Bappeda, 2018)

Pernyataan tersebut didukung upaya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam rencana menyiapkan tanah untuk RTH publik pada tahun ini di Karangwarung, Purbayan, Mantrijeron, dan Muja Muju dengan luas yang bervariasi antara 300 hingga 800 meter² (Antara, 2018). Selain penambahan RTH yang dilakukan setiap tahun, Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus menambah jumlah taman, penggantian tanaman ke tanaman keras, pembangunan talut sebagai upaya normalisasi sungai agar tidak terjadi degradasi serta upaya-upaya lain agar dapat mewujudkan salah satu Visi Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan (Kabid Fisik Bappeda, 2018).

Smart City

Konsep *smart city* atau yang biasa disebut dengan kota pintar muncul karena adanya peningkatan jumlah populasi yang ada di daerah perkotaan (Supangkat, 2015). Konsep *smart city* merupakan pendekatan dalam mengembangkan perkotaan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (Nallari dkk, 2012; Rachmawati, 2014; Albino dkk, 2015). Keberadaan *smart city* diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan perkotaan secara terintegrasi, seperti permasalahan lingkungan, transportasi umum, sosial, krisis ekonomi, pelayanan publik, kemacetan, penumpukan sampah, dan keamanan warga kota, dan lain sebagainya. Sebuah kota bisa dikatakan *smart* apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota didalamnya, memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap permasalahan. Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2015), *Smart City* dapat diidentifikasi pada 6 (enam) dimensi utama yaitu, *smart government*, *smart economy*, *smart society*, *smart mobility*, *smart environment*, dan *quality of live*. Dari 6 dimensi tersebut, dalam penerapannya setiap kota dapat memfokuskan pada salah satu dimensi saja yang tergantung dari karakteristik kota dan urgensi permasalahan kotanya bahkan akan lebih baik jika mampu menjangkau semuanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta sedang berupaya untuk mewujudkan semua indikator tersebut. Salah satu produk dari upaya mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi *Smart City* adalah adanya aplikasi *Jogya Smart Service* (JSS) yang dirilis pada bulan Juni 2018 lalu. *Jogya Smart Service* (JSS) merupakan upaya untuk mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi kota cerdas (Rusqiyati, 2018). Selain JSS ada juga Sistem Informasi Si-Warga (Sistem Warga) yang merupakan sistem informasi kependudukan berbasis aplikasi. Aplikasi itu berasal dari Kampung *Cyber* yang berada di Kampung Patehan dan saat ini sudah didukung oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk direplikasi di daerah lain dan sudah disosialisasikan juga ke 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Dengan aplikasi ini, pengurusan surat dan administrasi kependudukan dapat lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Selain itu, Kota Yogyakarta juga memiliki aplikasi E-Retribusi di pasar. Pembayaran retribusi oleh pedagang tidak lagi secara tunai. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mengurangi peredaran uang tunai, transparansi pelayanan, mengurangi tindak KKN, dan dapat mengetahui uang retribusi yang masuk secara *real time*. Di samping itu, Malioboro yang merupakan salah satu *icon* Kota Yogyakarta juga akan diubah menjadi kawasan bebas kendaraan bermotor. Pengunjung hanya dapat menaiki sepeda yang disediakan oleh pemerintah Kota

Yogyakarta yang disediakan dalam sistem aplikasi *Jogja Bike* untuk membuka kunci sepeda. Sejak Oktober 2018, Malioboro sudah memiliki sepeda yang disediakan di titik tertentu. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta semakin ramah lingkungan dan mengurangi potensi kemacetan.

Kota Yogyakarta memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi *Smart City*. Hal itu didukung dari peran aktor lain selain pemerintah yang cukup kuat. Berdasarkan hasil wawancara kepada praktisi dan juga akademisi yang bergerak dibidang pembangunan perkotaan di lembaga *Housing Resources Center (HRC)* (2018) mengatakan bahwa Kota Yogyakarta memiliki peluang karena adanya peran akademisi yang cukup besar di Yogyakarta, peran masyarakat yang dinamis, dan juga peran lembaga-lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta. Terlebih sudah didukung oleh peluang lainnya seperti kekayaan budaya, alam, dan pendidikan. Seperti halnya menurut IBM (2009) banyak faktor yang membuat *smart city* menjadi sukses di beberapa negara berkembang, yaitu manajemen dan organisasi, teknologi, pemerintahan, kebijakan, masyarakat, ekonomi, infrastruktur, dan juga lingkungan. Adanya sumber daya yang cukup optimal dapat meningkatkan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Meskipun demikian, ternyata masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Kota Yogyakarta dapat dikatakan sebagai kota yang berkelanjutan. Seperti misalnya masalah Ekonomi. Saat ini Kota Yogyakarta mengalami masalah ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi walaupun angka kemiskinan di Kota Yogyakarta masih di bawah angka kemiskinan pada daerah lain di Provinsi DIY (Kur, 2018). Selain itu, Direktur HRC Caritra (2018) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan Kota Yogyakarta masih cukup tinggi terhadap pemimpin pusat sehingga beberapa kebijakan masih bersifat *sentralistis-top down*. Sehingga, sangat dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar aktor yang terlibat untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai *smart city*.

Kota Yogyakarta memiliki konsep *smart city* yang mengacu pada inovasi-inovasi dalam bidang teknologi informasi (IT) agar bisa memberikan manfaat serta kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat (RPJMD 2017-2022). Berdasarkan laporan penelitian Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM (2016) yang berjudul '*Road Map Kota Yogyakarta Menuju Smart City*', dikembangkan model *smart city* yang akan dibangun berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan teknologi pendukung yang akan digunakan. Dalam *road map* tersebut, ada lima tahap pengembangan *e-government* Pemerintah Kota Yogyakarta menuju Kota Yogyakarta sebagai *smart city* yaitu, penguatan infrastruktur jaringan dan pusat data, penguatan infrastruktur sistem informasi, integrasi data dan pengembangan aplikasi terintegrasi, data *warehouse*, dan implementasi kebijakan menuju *smart city*. Kelima tahap itu menjadi tangga untuk mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi *smart city* seperti yang dicita-citakan.

Pembangunan Berkelanjutan Yogyakarta

Kota Yogyakarta memiliki peluang besar dalam pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktornya adalah SDM yang ada di Kota Yogyakarta. Aktor-aktor kebijakan yang ada di Kota Yogyakarta seperti masyarakat, pemerintah, akademisi, dan aktor lainnya dapat dikatakan memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam katagori manusia modern yang dikemukakan oleh Alex Inkeles. Hal itu terwujud dari:

- 1) Kemauan aktor-aktor tersebut menerima hal baru, pembangunan berbasis *liveable city*, *green city*, dan *smart city* merupakan hal baru di Indonesia. Kemauan aktor-aktor yang ada di Kota Yogyakarta mengikuti kemajuan tersebut dapat digolongkan pada pemenuhan karakteristik pada indikator pertama.
- 2) Menerima hal baru, banyak hal yang baru yang akan diterima oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan kota yang berbasis *liveable city*, *green city*, dan *smart city*. Tiga

konsep besar tentang *liveable city*, *green city*, dan *smart city* merupakan inovasi yang berasal dari luar dan diaplikasikan di Indonesia. Menurut salah satu informan, ketiga hal tersebut sebenarnya merupakan inovasi pembangunan kota yang diinisiasi internasional yang kemudian dinasionalkan. Untuk itu, perlu dilihat bagaimana daerah merespon dengan pelaksanaan program tersebut (Direktur HRC, 2018).

- 3) Terbuka terhadap perubahan. Poin ketiga yang dikatakan oleh Alex Inkeles adalah terbuka terhadap perubahan. Semua aktor di Kota Yogyakarta dianggap terbuka dengan perkembangan zaman. Mulai dari pemerintah hingga masyarakat menerima adanya perubahan baik yang bersifat teknis maupun tidak.
- 4) Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat mengenai lingkungan sendiri atau yang jauh dari lingkungannya secara demokratis. Melalui aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) dan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), masyarakat Kota Yogyakarta secara tidak langsung didorong untuk memiliki keberanian dalam hal menyatakan pendapat mengenai lingkungannya sendiri atau yang jauh dari lingkungannya. Karena melalui aplikais tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
- 5) Menghargai waktu. Aplikasi yang ada diaplikasikan dengan tujuan untuk menghemat waktu agar lebih efisien. Artinya Kota Yogyakarta sudah mulai menerapkan sistem untuk menghargai waktu.
- 6) Lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Semua proses pembangunan harus berkelanjutan dilakukan karena adanya orientasi masa depan. Bagaimana pembangunan Kota Yogyakarta dapat dilakukan secara terus menerus.
- 7) Memiliki perencanaan dan pengorganisasian, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain. Semua tahap yang dilakukan pada proses mewujudkan Kota Yogyakarta berbasis *Sustainable City* dilakukan dengan perencanaan dan pengorganisasian yang penuh pertimbangan dalam hal menghargai waktu bahkan lingkungan sekitar.
- 8) Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Uraian diatas cukup menggambarkan bahwa SDM yang ada di Kota Yogyakarta mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 9) Menjunjung tinggi suatu sikap dimana imbalan yang diterima harus sesuai dengan prestasi masyarakat. Hal ini juga tergambar dari pelaksanaan pembangunan Kota Yogyakarta. Kampung *Cyber* misalnya, prestasi masyarakat menciptakan aplikasi dihargai oleh pemerintah dan dikembangkan ke wilayah lainnya di Kota Yogyakarta.

Kesembilan ciri tersebut menggambarkan bahwa aktor-aktor yang ada di Kota Yogyakarta memiliki ciri manusia modern. Hal itu terlihat jelas pada manusia masa kini di Yogyakarta yang terus berupaya untuk membangun Kota Yogyakarta menjadi kota yang berkelanjutan. Alex Inkeles dan David H. Smith mengatakan bahwa manusia modern mampu untuk membangun (Kartono & Nurcholis, tanpa tahun). Sehingga, Kota Yogyakarta memiliki peluang yang cukup besar untuk terus maju dan berkembang, terlebih didukung oleh SDM yang ada yang memiliki karakteristik sebagai manusia modern.

Kesimpulan

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang berpotensi menjadi kota yang berkelanjutan. Hal itu dapat dilihat dari 3 aspek yaitu *liveable city*, *green city*, dan *smart city*. Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari data primer dan sekunder, diperoleh kesimpulan bahwa Kota Yogyakarta sudah dapat dikatakan sebagai *liveable city* dan *green city*. Sedangkan untuk menuju *smart city*, Kota Yogyakarta masih harus berupaya untuk mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi *smart city*. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan seperti *Jogja Smart Service* (JSS), Unit Pelayanan Informasi

dan Keluhan (UPIK), SI-Warga, *Jogja Bike* di Malioboro, dan penerapan E-Retribusi di pasar. Upaya tersebut terus diupayakan dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Namun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pembangunan Kota Yogyakarta berkelanjutan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh z tentang manusia modern, Kota Yogyakarta sebenarnya dapat dikatakan memiliki sumber daya manusia (SDM) modern yang cukup berkualitas. Kesembilan ciri manusia modern yang dikemukakan oleh Alex Inkeles ternyata dimiliki oleh penduduk Kota Yogyakarta baik dari pemerintah, akademisi, pebisnis hingga masyarakat. Pemerintah khususnya, terus berupaya melakukan pembangunan Kota Yogyakarta agar tetap mendapat predikat *liveable city*, *green city*, dan juga *smart city*. Di samping itu, ternyata seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta mengambil peran yang cukup besar untuk ketercapaian agar dapat menjadikan Kota Yogyakarta sebagai *liveable city*, *green city* dan *smart city*. Ketiga konsep itu akan bermuara pada terwujudnya Kota Yogyakarta melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil riset, maka ditarik beberapa saran yang cukup penting yaitu, perlunya penguatan kerjasama antar aktor yaitu pemerintah, akademisi, pebisnis, dan masyarakat (*quadruple helix model*). Tanpa adanya kerjasama yang kuat, maka Kota Yogyakarta akan mengalami kendala yang cukup besar untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Referensi

- Abdurrahman. (2003). *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Albino, V., Berardi, U., and Dangelico, R. M., (2015). *Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives*. *Journal of Urban Technology*, 22(1) , 3-21.
- Antara (2018). *Yogyakarta Siapkan Tiga Ruang Terbuka Hijau Publik*. <https://www.antaranews.com/berita/679312/yogyakarta-siapkan-tiga-ruang-terbuka-hijau-publik>. diakses pada tanggal 14 November 2018.
- Direktur HRC. (8 November 2018). *Pembangunan Kota Yogyakarta* (Recorded by Anita Syafitri). Yogyakarta, Indonesia.
- Kabid Fisik Bappeda. (21 November 2018). *Sustaibale City* (Recorded by Anita Syafitri). Yogyakarta, Indonesia.
- Bappenas. (2015). *National Urban Development Policy*. Jakarta: Bappenas
- BPS. (2016). *Statistik Migrasi di Yogyakarta*. Yogyakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Kota Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: BPS.
- Christi (2014). *Indo's Most Liveable City*. <https://thehoneycombers.com/jakarta/most-livable-cities-indonesia/> diakses pada tanggal 14 November 2018.
- IAP (2011). *Indonesia Most Liveable City Index*. https://issuu.com/iapindonesia/docs/mlci_2011 diakses pada tanggal 14 November 2018.
- IBM. (2009). *New York 2009*. Retrieved Juni 2016, from http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/article/newyork2009.html
- Kabid Fisik Bappeda. (21 November 2018). *Wawancara Lansia* (Recorded by Anita Syafitri). Yogyakarta, Indonesia.

- Kartono, D. &. (n.d.). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Retrieved November 15, 2018, from Pustaka ut: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>
- Kementerian PUPR. (2011, May 26). *Yogyakarta, Indonesia Most Liveable City*. Retrieved November 15, 2018, from PU-net Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.pu.go.id/berita/view/6532/yogyakarta-indonesia-most-liveable-city> .
- Kemertrian PUPR (2018). *Yogyakarta, Indonesia Most Liveable City*. <https://www.pu.go.id/berita/view/6532/yogyakarta-indonesia-most-liveable-city> diakses pada tanggal 14 November 2018.
- Kemertrian PPN / Bappenas (2015). *Pembangunan Kota Cerdas di Indonesia*. Jakarta: Bappenas
- Kur (2018). *Angka Kemiskinan Kota Yogya dibawah di DIY*. <http://jogja.tribunnews.com/2018/04/14/angka-kemiskinan-kota-yogya-di-bawah-diy>. diakses pada tanggal 14 November 2018.
- Pengelola Kartamantul. (9 November 2018). *Pengelolaan Sampah Di Yogyakarta* (Recorded by Zenny). Yogyakarta, Indonesia.
- Mantra, I. B. (2004). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nallari, R., Griffith, B., and Yusuf, S., (2012). *Geography of Growth Spatial Economy and Competitiveness*, Bank Dunia, Washington.
- Rachmawati, R., (2014). *Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rai. (2017, March 17). *Yogyakarta Jadi Kota Paling Hijau di Indonesia*. Retrieved November 15, 2018, from Okezone Finance: <https://economy.okezone.com/read/2017/03/17/470/1645503/yogyakarta-jadi-kota-paling-hijau-di-indonesia>
- Rusqiyati, Eka Arifa. (2018). *Yogyakarta Luncurkan Aplikasi "Jogja Smart Service"*. <https://jogja.antaranews.com/berita/357400/yogyakarta-luncurkan-aplikasi-jogja-smart-service>
- Suara Pemuda Jogja. (2017, December 11). *Yogyakarta Raih Predikat Kota Cerdas Indonesia 2017*. Retrieved November 15, 2018, from Suara Pemuda Jogja: <http://suarapemudajogja.com/2017/12/11/yogyakarta-raih-predikat-kota-cerdas-indonesia-2017/>
- Sunarto, H. S. (1993). *Mobilitas Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian IKIP Yogyakarta bekerjasama dengan Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda.
- Supangkat, S. H., & dkk. (2015). *Pengenalan dan Pengembangan Smart City*. Bandung: e-Indonesia Initiative dan Institut Teknologi Bandung(ITB).
- Tim PSPPR UGM. (2016). *Road Map Kota Yogyakarta Menuju Smart City*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Community Action Plan (CAP) Dan Kampung Improvement Program (KIP): Studi Komparatif Kebijakan Inklusif Tata Ruang Permukiman di Surabaya dan Jakarta

Rusydan Fathy, PMB LIPI. E-Mail: rusydanfathy@gmail.com
Jalu Lintang Yogiswara Anuraga, PMB LIPI, Email: jalulintang44@gmail.com

Abstrak

Eksklusi sosial menjadi ciri masyarakat perkotaan yang menghuni kantung-kantung permukiman kumuh. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan tata ruang permukiman yang inklusif terus diupayakan oleh pemerintah. *Community Action Plan*, (CAP) di Jakarta dan *Kampung Improvement Program* (KIP) di Surabaya merupakan bentuk pendekatan kebijakan tata ruang yang inklusif. Namun demikian, upaya pelibatan komponen masyarakat dalam skema kebijakan inklusif tersebut mengalami masalah tersendiri. Di sisi lain, ruang kota merupakan konektivitas berbagai aspek baik kehidupan maupun penghidupan. Hal tersebut semakin kompleks jika melihat konteks masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang permukiman tidak bisa digeneralisir begitu saja tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik setiap daerah. Bagian awal artikel ini mendeskripsikan eksklusi sosial serta konstelasinya dengan implementasi kebijakan tata ruang permukiman yang inklusif. Bagian inti artikel ini melihat sejauh mana CAP dan KIP sebagai kebijakan tata ruang permukiman yang inklusif diterapkan pada konteks masyarakat tertentu. Sebagai penutup, artikel ini mengkomparasikan kedua kebijakan tata ruang permukiman tersebut serta menawarkan paradigma inklusif kebijakan tata ruang permukiman yang lebih komprehensif. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan terhadap studi literatur terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema artikel ini.

Kata Kunci: Eksklusi Sosial, Kebijakan Inklusif, Tata Ruang Permukiman, CAP, KIP

Pendahuluan

Secara substansi, eksklusi sosial sebenarnya tertuju pada melemahnya kapasitas masyarakat. Eksklusi sosial mencakup semua elemen masyarakat yang mengalami deprivasi. Dalam perjalanannya, konsep eksklusi sosial menggambarkan kondisi ketidakberdayaan dan keterpinggiran (marjinalisasi) masyarakat. Warga yang tidak beruntung secara ekonomi tidak jarang menghuni kantung-kantung permukiman kumuh dengan tingkat kepadatan tinggi dan sanitasi yang buruk. Selain itu, permukiman tersebut juga rentan kebencanaan seperti banjir dan kebakaran. Di sisi lain, permasalahan seperti kemacetan, kesemrawutan, pemagaran taman, penyelewengan tata ruang dan komersialisasi tata ruang menjadi sebuah kewajaran yang ditemui di Jakarta (Susanti et al. 2007). Sementara itu, mengenai permukiman warga Jakarta, ternyata masih belum sesuai dengan perencanaan tata ruang kota (Ambarwati et al. 2016). Akibatnya, permukiman kumuh yang dihuni oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah masih banyak ditemui pada banyak titik di Jakarta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab lingkungan menjadi kumuh adalah faktor ekonomi, dimana lingkungan kumuh dihuni oleh masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap (BPS Jakarta, 2013). Tingkat kekumuhan sebuah permukiman di Jakarta berhubungan erat dengan tingkat ekonomi warganya dimana karakteristik permukiman kumuh yaitu dihuni oleh masyarakat yang bekerja pada sektor informal seperti PKL, tukang ojek, buruh dan kuli bangunan (Fitria et al. 2014). Permukiman kumuh dan kemiskinan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Kemiskinan masih menjadi masalah serius di perkotaan termasuk di Jakarta dan Surabaya. Tak pelak, kemiskinan tidak jarang justru diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Dibutuhkan paradigma pembangunan

inklusif dengan mengedepankan upaya pelibatan komponen masyarakat dalam implementasi kebijakan permukiman berbasis partisipasi masyarakat.

Namun demikian, di Surabaya, beberapa masalah seperti yang disebutkan di atas dapat ditangani dengan beberapa kebijakan. Salah satu contoh penanganan permukiman yang cukup berhasil adalah penataan kampung Gundih. Kampung ini mampu bertransformasi dari kampung preman menjadi kampung teladan melalui Kampung *Improvement Program* (KIP). Program ini berparadigma pembangunan inklusif berkelanjutan yang melihat faktor ekologisnya. KIP berhasil menjadikan bukan hanya kampung Gundih tetapi juga kampung Bratang Binangun, kampung Genteng dan kampung Maspati sebagai kampung percontohan. Bagaimana tidak, keempat kampung di Surabaya tersebut menjadi cermin permukiman layak huni yang berketahanan, baik ketahanan bencana maupun ketahanan sosial.

Keberhasilan implementasi kebijakan inklusif dalam menangani persoalan permukiman dan kemiskinan belum dijumpai di perkampungan yang serupa di Jakarta. Padahal Pemprov DKI telah menata kembali 16 kampung kumuh melalui program *Community Action Plan* (CAP) yang diklaim sebagai program yang merangkul masyarakat marjinal – meliputi masyarakat miskin, pedagang kaki lima (PKL) dan tukang becak. CAP merupakan aksi Pemprov DKI yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan kelompok kerja untuk menciptakan kampung berkualitas yang lestari dan sejahtera (Laporan Kegiatan Deputy Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2018). Meskipun program tersebut telah dimulai, kampung kumuh masih menjadi persoalan serius di Jakarta. Alih-alih mencontoh KIP di Surabaya yang menunjukkan keberhasilan, CAP justru banyak memunculkan perdebatan.

Bagaimana tidak, salah satu agenda dalam CAP adalah menjadikan kembali becak sebagai moda transportasi umum. Kebijakan ini tentu sangat bias daerah dimana di Jakarta kesenjangan antara si kaya dan si miskin cukup tajam. Kalangan kelas atas melihat kebijakan ini akan menjadi persoalan baru jika diterapkan. Berbeda halnya dengan Surabaya, dimana karakter masyarakat antara si miskin dan si kaya tidak begitu menjadi masalah. Tentunya melalui perbandingan kasus ini kita dapat melihat adanya kontekstualisasi pembangunan di setiap daerahnya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan inklusif tidak sesederhana yang terpikirkan. Hal itu disebabkan, eksklusi sosial merupakan masalah yang kompleks. Di sisi lain, ruang kota merupakan konektivitas berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. Kompleksitas tersebut juga mencakup perbedaan aspek fisik, sosial dan budaya masyarakatnya dimana setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Pada dasarnya, KIP dan CAP merefleksikan prinsip-prinsip inklusifitas sebagai program penataan permukiman. Untuk itulah, ada harapan dari masyarakat dalam program-program tersebut sebagai program penataan permukiman khususnya kampung yang dianggap mampu mengembalikan keadilan, memberdayakan dan meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di perkotaan.

Kajian Pustaka

Penelitian terkait kebijakan inklusif telah banyak dilakukan. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan yang secara khusus menyorot tentang implementasi kebijakan inklusif tata ruang permukiman khususnya penataan kampung kumuh. Terkait dengan program CAP, apa yang ditulis oleh Levitan (1969), *“The Community Action Program: A Strategy to Fight Poverty”*, merupakan pembekalan konseptual tentang hakikat dari CAP yang sangat berguna dalam memahami CAP sebagai pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan untuk KIP, rujukan utama adalah apa yang digagas oleh United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).

Penelitian terdahulu terkait lokus penelitian ini yaitu Jakarta dan Surabaya juga telah banyak dilakukan termasuk isu penataan lingkungannya. Penelitian-penelitian tersebut berfokus kepada peran aktif (partisipasi) masyarakat dalam menata lingkungan kampung di Surabaya sebagai bentuk pemberdayaan (Lailia, 2014; Hayati et al. 2017; Mahardika, 2015; Mustofa dan Soedjarwo 2017). Untuk Jakarta beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini di antaranya membahas tentang penataan kawasan kumuh yang berfokus pada identifikasi dan karakterisasi tingkat kekumuhan (Fitria et al. 2014; Ambarwati et al. 2016).

Namun demikian, dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang spesifik membahas mengenai implementasi CAP dan KIP dalam penataan permukiman kampung kumuh. Penelitian ini menjadi penting karena secara spesifik mengkaji implementasi CAP di Jakarta dan KIP di Surabaya sebagai kebijakan inklusif tata ruang permukiman kampung kumuh. Selain itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini paling tidak adalah berupaya melakukan komparasi implementasi kedua program tersebut serta mengaitkannya dengan perbedaan karakteristik masyarakatnya.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Penelitian ini menjadi menarik karena membandingkan dua Kota yaitu Jakarta dan Surabaya dalam hal implementasi kebijakan tata ruang permukiman inklusif. Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang menuai banyak prestasi terkait tata ruang permukiman. Jakarta merupakan kota metropolitan sekaligus sebagai Ibu Kota Indonesia. Menganalisis implementasi kebijakan tata ruang permukiman inklusif di kedua kota tersebut akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *desk review* melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber yang relevan. Argumentasi dirumuskan menggunakan kerangka berpikir kebijakan inklusif dengan melakukan analisis perbandingan terhadap implementasi kebijakan tata ruang permukiman yang inklusif di Jakarta dan Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Eksklusi Sosial dan Upaya Menciptakan Lingkungan Sosial yang Inklusif

Eksklusi sosial merupakan proses (dan juga outcome), individu atau kelompok terpisah dari hubungan sosial yang lebih luas – ditandai dengan tidak berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat seperti konsumsi, menabung, produksi, politik dan aktivitas sosial lainnya (Sirovatka dan Meres, 2008). Konsep eksklusi sosial menjadi paradigma baru dalam melihat fenomena kemiskinan dengan lebih komprehensif. Sementara kemiskinan hanya melihat deprivasi ekonomi, maka keunggulan konsep eksklusi sosial adalah melihat devriparasi dari berbagai aspek. Dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa kemiskinan itu sendiri adalah multidimensi, maka menggunakan konsep eksklusi sosial menjadi pilihan bijak. Silver (2007) melihat eksklusi sosial dalam tiga sudut pandang: solidaritas; spesialisasi dan monopoli. Paradigma solidaritas melihat melemahnya ikatan sosial antar individu dalam masyarakat. Paradigma spesialisasi melihat bahwa eksklusi sosial adalah konsekuensi dari spesialisasi yang terjadi di masyarakat. Paradigma monopoli melihat eksklusi sebagai akibat dari monopoli kelompok – menyorot dominasi suatu kelompok terhadap kelompok tertentu

Solidaritas antara orang kaya dan miskin di Jakarta dapat dikatakan lemah. Masyarakat kota Jakarta belum sepenuhnya memiliki kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesama. Hal tersebut tentu saja akan berimplikasi kepada sulitnya membangun nuansa kerja sama antar dua kelas sosial tersebut. Hal demikian pada gilirannya akan menjadi hambatan dalam implementasi CAP yang coba diinisiasi Pemprov DKI. Kondisi lemahnya solidaritas semakin diperburuk dengan spesialisasi di segala aspek. Spesialisasi pada masyarakat termasuk dalam aspek spasial semakin memperburuk

ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Tersegmentasinya lingkungan permukiman kumuh dan perumahan elit menjadi indikasi adanya eksklusi sosial dalam hal tata ruang permukiman. Hal tersebut semakin didukung dengan spesialisasi pekerjaan yang membedakan lingkungan tempat kerja dua kelas sosial tersebut seperti kawasan perkantoran elit dan pabrik-pabrik. Dengan demikian, eksklusi sosial pada masyarakat Jakarta juga terlihat dari monopoli - dominasi ekonomi oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain.

Eksklusi sosial tertuju pada melemahnya kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek yang disebabkan oleh melemahnya ikatan (kohesi) sosial. Di sisi lain, kondisi demikian erat hubungannya dengan modal sosial masyarakat. Pada prinsipnya, modal sosial berbicara mengenai kohesi sosial. Gagasan modal sosial tentang kohesi sosial adalah bahwa jaringan merupakan aset yang sangat bernilai - dasar bagi kohesi sosial karena mendorong iklim kerja sama untuk memperoleh manfaat (Field, 2010). Pada kenyataannya, menggunakan relasi untuk bekerja sama membantu dalam memperbaiki kehidupan (Putnam, 2000 dan Woolcock, 1998 dalam Field, 2010).

Terdapat benang merah dalam upaya mereduksi eksklusi sosial dan meningkatkan modal sosial masyarakat yaitu dengan menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bappenas (2017) telah menetapkan arah kebijakan dan strategi perkotaan di Indonesia yang diantaranya dinilai mencerminkan prinsip inklusifitas yakni (Warsilah, 2018): (1) Mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan; (2) Membangun kota yang aman, nyaman dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan; dan (3) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional. Inklusi sosial pada dasarnya menunjukkan keadaan sebuah lingkungan yang mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang tanpa terkecuali sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Warsilah, 2018). Lingkungan yang inklusif menurut Lenoir (1974) dalam Warsilah (2018) adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka dan menyenangkan serta merangkul semua perbedaan. Inklusifitas kemudian dijadikan sebagai paradigma di dalam pembangunan yaitu sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisa suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik dengan cara mendukung keberlanjutan umat manusia dan ekologis (Warsilah, 2018).

Pembangunan inklusif sangat condong mendekati kerangka sosial demokratik dan mencakup masalah kesejahteraan dalam kaitannya untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan (Prasetyantoko et.al. 2012).

“Pembangunan inklusif mensyaratkan peran aktif masyarakat, baik melalui sistem demokrasi perwakilan maupun demokrasi langsung seperti bentuk-bentuk mekanisme yang partisipatif. Pembangunan inklusif mendukung peran aktif masyarakat sipil dan mengandalkan suara dan reformasi dari bawah.” (Prasetyantoko et.al. 2012).

Melihat kembali hubungan antara eksklusi sosial dan modal sosial, pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif sangat dibutuhkan modal sosial. Modal sosial benar-benar mempengaruhi inklusi sosial, kualitas hidup individu, dan penguatan kapasitas secara personal, pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang demokratis dan kohesi sosial pada tingkatan makro level (Sirovatka dan Mares, 2008). Menurut Sirovatka dan Mares (2008), keterkaitan antara dimensi modal sosial dengan inklusi sosial adalah sebagai berikut:

Modal Sosial	Inklusi Sosial (Partisipasi)
	Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Pasar tenaga kerja (pengangguran atau tidak) • Konsumsi (Deprivasi material)
<ul style="list-style-type: none"> • Didukung oleh jaringan informal (Keluarga, tetangga dan teman) • Didukung oleh jaringan formal (Asosiasi, sektor, sipil) • Efek inklusif dari norma bersama dan iklim kepercayaan 	Sosial <ul style="list-style-type: none"> • (tidak) berpartisipasi dalam jaringan informal • (tidak) berpartisipasi dalam masyarakat sipil (jaringan sukarela formal) • (tidak) menghargai norma dan moral perilaku
	Politik <ul style="list-style-type: none"> • (tidak) melibatkan proses politik • (tidak) masuk dalam keanggotaan partai politik serta aktivitasnya

Sumber: Sirovatka dan Mares, 2008: 535

Dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang inklusif khususnya pada permukiman kumuh dan miskin di perkotaan dapat dimanifestasikan melalui pendekatan CAP. CAP menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh masyarakat, kegiatan apa yang diperlukan selama waktu tertentu dan sumber daya apa (uang, orang dan materi) yang diperlukan untuk berhasil (<https://www.sswm.info/category/glossary/community-action-planning>). CAP memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri (<https://www.sswm.info/category/glossary/community-action-planning>). Kelebihan CAP di antaranya: (1) Partisipasi kuat dari komunitas lokal; (2) Dengan mengimplementasikan CAP, solusi atas masalah datang dari dalam komunitas oleh karenanya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka; (3) Menjamin bahwa semua kelompok yang relevan berpartisipasi dalam kegiatan, terutama perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang sering dilupakan; (4) Menjamin penerimaan dan mendukung solusi oleh masyarakat setempat. Sedangkan kelemahan CAP meliputi: (1) Membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengintegrasikan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam prosesnya; (2) Menemukan konsensus antara semua anggota komunitas dapat sangat memakan waktu; dan (3) CAP tidak akan berkembang tanpa motivasi dan dorongan kuat dari komunitas lokal.

Bagi Levitan (1969), CAP bukan hanya merupakan sebuah program melainkan sebuah strategi untuk melawan kemiskinan. CAP merupakan sebuah program yang berarti: (1) Memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya baik publik atau swasta, atau area geografis dalam melawan kemiskinan; (2) Menyediakan layanan, bantuan, dan kegiatan lainnya untuk memberikan janji kemajuan menuju penghapusan kemiskinan; (3) Dikembangkan, dilakukan, dan dikelola dengan partisipasi maksimal yang layak dari masyarakat dan anggota kelompok yang dilayani; dan (4) Dilakukan, dikelola, atau dikoordinasikan oleh lembaga nonprofit baik publik atau swasta (selain dari partai politik), atau kombinasi daripadanya (Levitan, 1969). CAP memiliki prinsip-prinsip inklusifitas sehingga tepat dijadikan sebagai strategi kebijakan penataan permukiman inklusif dengan berbasis pada partisipasi masyarakat. Selain partisipasi, pada dasarnya paradigma pembangunan inklusif menitikberatkan pada aksesibilitas dan kebebasan masyarakat.

Sebagaimana CAP, KIP berupaya untuk menciptakan lingkungan sosial inklusif melalui penataan kampung. Secara historis, KIP merupakan rangkaian dari upaya peremajaan kampung di Surabaya dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal akademisi dan UN-Habitat. KIP terperiodisasi sebagai berikut: (1) Masa penjajahan Belanda yang berfokus pada perbaikan kualitas sanitasi; (2) Masa kemerdekaan berfokus memperbaiki fisik kampung akibat kerusakan oleh perang; (3) Masa Orde Baru diberi nama KIP WR Supratman dan (4) Masa akhir orde baru diberi nama KIP Komprehensif (KIP-K) berfokus bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga menggalang sumberdaya dan memberdayakan masyarakat untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. KIP adalah program lingkungan yang komprehensif yang tidak hanya menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi keluarga berpenghasilan rendah tetapi juga, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam prosesnya, memastikan keberlanjutan jangka panjang dan perbaikan yang berkelanjutan (<https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/the-kampung-improvement-programme-surabaya/#award-content>).

CAP dan KIP Sebagai Kebijakan Tata Ruang Permukiman yang Inklusif: Kasus Jakarta dan Surabaya

Program penataan 16 kampung di Jakarta yang dirancang oleh Gubernur Anies baswedan yaitu berbasis CAP. CAP merupakan salah satu kontrak politik Gubernur Anies Baswedan saat melakukan kampanye. Kontra politik ini di tujukan pada 16 kampung, perkumpulan pedagang kaki lima dan serikat tukang becak jakarta (<http://kampungkota.net/2018/01/17/program-peluncuran-cap-2018/>). Pada akhirnya program yang dijanjikan ini direalisasikan dalam bentuk pembangunan kembali kampung-kampung yang telah digusur seperti kampung Akuarium dan kampung Kunir, selain itu Anies juga akan menghidupkan kembali moda transportasi becak sebagai transportasi lingkungan. Program ini berisi tentang perencanaan tata ruang yang melibatkan masyarakat. Sejauh ini program CAP yang telah terlihat adalah pelibatan warga kampung akuarium dalam perencanaan tahap awal di kampungnya tersebut. Perencanaan pembangunan kampung tidak sepenuhnya dibuat oleh pemerintah namun ada suatu regulasi musyawarah untuk mengakomodasi usulan-usulan dari para warga. Usulan dari warga kemudian didiskusikan, untuk beberapa hal memang tidak dapat diakomodasi. Usulan-usulan yang tidak terakomodasi tersebut bisa diterima dengan pemberian pengertian mengenai tata ruang kampung yang ideal, apalagi kampung akuarium berdekatan dengan wilayah cagar budaya.

Di Surabaya pembangunan dengan pendekatan inklusif yakni menggunakan KIP. ada beberapa kampung miskin yang dianggap sebagai zona merah yang kemudian dibangun berdasarkan program tersebut. Pada KIP surabaya ini, peran dalam membangun sebuah kampung di distribusikan dengan merata, sehingga peran pemerintah bukan hanya sebagai pendana tunggal. Ia mempunyai peran untuk merangsang masyarakat terlibat aktif. Sedangkan peran masyarakat bukan hanya sebagai pelaku pasif dari program pemerintah namun sebagai pendana sekaligus ikut terlibat dalam praktik pembangunan kampung. Sasaran dari KIP ini bukan saja menghasilkan tata ruang kampung fisik yang ideal namun juga kesejahteraan masyarakat. Penataan tata ruang fisik yang ideal hanya menjadi sarana pencapaian output.

Secara fisik, kampung Gundih mencanangkan diri sebagai kampung ekologis. Jargon kampung ekologis ini menggambarkan arah pengembangan kampung yang asri. Terdapat sebuah kebijakan yang mengharuskan setiap rumah tangga untuk menyumbangkan satu pohon mangga pada setiap penambahan anggota dalam KK. Selain itu pengelolaan drainase menjadi salah satu program yang disorot dari kampung ini. Ruang publik pun menjadi salah satu prioritas perhatian kampung yang tampak dari peraturan yang tidak memperbolehkan kendaraan atau gerobak-gerobak di parkir sembarangan di sepanjang jalan-jalan kampung yang berefek jalan-jalan di kampung tidak lagi terlihat penuh sesak dengan berbagai kendaraan atau gerobak yang terparkir. Kekuatan utama kampung Maspati adalah dalam hal penerapan konsep *smart environment*. Sebagai salah satu kampung tertua di

Surabaya, pemerintah kota dan komunitas lokal berupaya untuk menjaga warisan budaya terutama arsitektur kampung untuk mengadopsi konsep *smart city*. Partisipasi penuh dari warga sangat membantu dalam menjaga warisan situs kota bersejarah. Kesadaran warga kampung Maspati diwujudkan dengan inovasi-inovasi lokal sebagai bentuk potensi lokal untuk melestarikan lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Sementara itu di kampung Genteng, warga dengan bijak melakukan pengelolaan bak sampah. Partisipasi penuh dari masyarakat dalam mengelola sampah tersebut memberikan manfaat ekonomi. Dengan pengelolaan sampah yang dilakukan di kampung Genteng, warga mampu menciptakan kemandirian usaha. Implikasinya tentu saja adalah peningkatan pendapatan warga kampung Genteng. Ketiga kampung di Surabaya tersebut (ditambah satu kampung yaitu kampung Bratang Binangun) didaulat sebagai kampung terbersih dan berhasil menjadi pemenang dalam kompetisi *green and clean* di Surabaya.

Sementara itu, CAP di Jakarta justru menemui beberapa hambatan-hambatan yang bersifat mendasar. Kendala utama adalah terkait kegagalan fasilitator dalam hal menggali ide-ide penataan. Hal tersebut terjadi karena konsultan CAP Jakarta dianggap gagal memandu warga dan melibatkan mereka dalam dialog-dialog bersama untuk membangun kampung mereka. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat CAP harus secara maksimal melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan. Partisipasi masyarakat yang maksimal sangat dibutuhkan dalam keberhasilan CAP karena berupaya mengidentifikasi masalah dan menghadirkan solusi secara *bottom up*.

Selain itu, dilaporkan oleh Rujak *Center for Urban Studies*, kebijakan tata ruang permukiman dan penataan kampung kumuh di Jakarta justru menghasilkan masalah-masalah baru seperti meningkatnya marjinalisasi terhadap masyarakat (<https://rujak.org/penataan-kampung-kota-oleh-warga-dan-untuk-warga-press-release-diskusi-tantangan-pembangunan-kawasan-kumuh-dki-jakarta/>). Tidak dapat dipungkiri, konflik lahan seperti penggusuran paksa di Jakarta kerap menuai pro kontra karena dianggap melanggar HAM. Terlebih mengingat lokasi penggusuran berisikan rumah-rumah sewa sehingga warga relokasi tidak mampu lagi untuk menjangkau hunian baru. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam hal penyediaan hunian layak justru berwujud pemiskinan sendiri untuk warganya. Diperlukan upaya pengintegrasian kebijakan yang lebih serius terkait hal ini. Dalam CAP, alangkah lebih bijak memperbaiki masalah-masalah yang telah teridentifikasi di dalam tahap perencanaan. Lebih jauh, terkait dengan pemiskinan warga Jakarta yang direlokasi seharusnya tidak terulang dengan sinergi berbagai pihak terutama UMKM terkait penyediaan lapangan pekerjaan baru untuk memberdayakan masyarakat.

Keberhasilan program-program dengan pendekatan inklusif ini mau tidak mau tentu tergantung dengan masyarakat yang dilibatkan. Sehingga perlu dalam pelaksanaan program melihat karakteristik dari masyarakat menengah kebawah tersebut. Tentu jika kita melihat kedua lokus penelitian yakni Jakarta dan Surabaya, karakter masyarakat tersebut memiliki perbedaan yang perlu dipertimbangkan. Masyarakat menengah Jakarta kebanyakan adalah pendatang yang menghuni daerah-daerah pinggiran sungai atau tempat-tempat publik lainnya. Secara lingkungan fisik saja lingkungan pemukiman masyarakat menengah kebawah kota tersebut rentan bencana yang selalu membayangi. Ancaman banjir misalnya, dampaknya akan berpengaruh pada terganggunya pekerjaan masyarakat, hilangnya aset dan meningkatnya resiko kesehatan. Belum lagi status kependudukan warga miskin Jakarta yang secara administrasi tidak memiliki kartu tanda penduduk Jakarta yang menambah beban mereka terhadap akses-akses ke pemerintah. Tantangan secara kultural pun muncul dengan latar belakang masyarakat pendatang yang datang dari berbagai daerah dan memiliki pola pikir dan kebiasaannya sendiri.

Sedangkan apa yang ditemukan di Surabaya memiliki karakter yang berbeda. Masyarakat menengah ke bawah Surabaya relatif pendatang yang memiliki latar belakang budaya yang tidak begitu jauh berbeda, bahkan banyak juga yang merupakan penduduk asli setempat. Belum lagi jika

kita lihat dari faktor tantangan lingkungannya bahwa resiko yang dialami oleh masyarakat miskin Surabaya tidak terlalu beresiko seperti masyarakat Jakarta. Tentu dengan fakta yang demikian program CAP dan KIP memiliki tantangan yang berbeda. CAP bukan saja harus menjawab tantangan peremajaan atau memperindah tata ruang kampung dalam pembangunan lingkungan seperti KIP di Surabaya. CAP harus dapat memecahkan persoalan ekologis yang alami di tengah kompleksitas latar belakang sosial budaya masyarakatnya, yang terkadang faktor ekologis yang demikianlah yang menyokong kegiatan ekonomi mereka sehari-hari.

Kesimpulan

CAP maupun KIP sebagai konsekuensi program dengan pendekatan inklusif tidak bisa serta merta diterapkan dengan sama persis antara satu daerah dengan daerah lain. Kekuatan inklusif yang menitikberatkan peran aktif masyarakat akan memberikan dampak pada pertimbangan karakteristik masyarakat yang ada. Perlu hati-hati dalam mencontoh KIP daerah lain yang sudah berhasil, apakah program KIP atau CAP di daerah lain tersebut dapat juga diterapkan di daerahnya. Selain itu, penataan ruang yang akan berdampak pada pola hidup masyarakat dan memberikan *outcome* kesejahteraan juga perlu melihat faktor resiko alami dari suatu lokasi. Pengetahuan keruangan masyarakat dengan pengetahuan teoritik dari berbagai *stakeholder* perlu disinkronkan agar kebijakan tepat sasaran.

Referensi

- Ambarwati, Sugandi dan Sungkawa. 2016. "Tingkat Kekumuhan Permukiman di Kecamatan Tambora Jakarta Barat". *Jurnal Pendidikan Geografi* 4(2). (<http://antologi.upi.edu/index.php/main/antologi/B035>).
- Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. 2018. "Laporan Kegiatan Bulan Februari 2018" Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.
- Field, John. 2010. *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Fitria., Niken, dan Rulli Pratiwi Setiawan. 2014. "Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat". *Jurnal Teknik Pomits* 3(2)2337-3539.
- Hayati, Arina et al. 2017. "From Smart Living into Smart City: A Lesson from Kampung of Surabaya". (http://www.uia2017seoul.org/P/papers/Full_paper/Paper/Oral/PS3-51/O-0864.pdf).
<http://jakarta.bps.go.id>
- Lailia, Anita Nur. 2014. "Gerakan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup: Studi tentang Upaya Menciptakan Kampung Hijau di Kelurahan Gundih Surabaya". *Jurnal Politik Muda* 3(3)282-302.
- Levitan, Sar. A. 1969. "The Community Action Program: A Strategy to Fight Poverty". (<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271626938500107>).
- Mahardika, M.Alif. 2015. "Hubungan Agen dengan Struktur dalam Perubahan Sosial Kelurahan Gundih menjadi Kampung Gundih Berseri: Studi Kasus pada Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya". *Jurnal Mahasiswa Sosiologi* 1(2) 1-28.
- Muslim, Rohman. 2018. "Program Peluncuran CAP" Jakarta: Kampung Kota. Diakses pada 1 November 2018. (<http://kampungkota.net/2018/01/17/program-peluncuran-cap-2018>).
- Mustofa, Alfi Bisri dan Soedjarwo. 2017. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah Untuk Meningkatkan Kemandirian Usaha Di Kampung Genteng Candirejo Surabaya". *Jurnal Plus UNESA* 6(3) 1-11.
- Prasetyantoko, A. Setyo. Budiantoro dan Sugeng Bahagijo. 2012. *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rujak Center for Urban Studies. 2018. "Penataan Kampung Kota Oleh Warga dan untuk Warga: Press Release Diskusi Tantangan Pembangunan Kawasan Kumuh DKI Jakarta" Jakarta: Rujak Center for Urban Studies. Diakses pada 1 November 2018. (<https://rujak.org/penataan-kampung>)

[kota-oleh-warga-dan-untuk-warga-press-release-diskusi-tantangan-pembangunan-kawasan-kumuh-dki-jakarta/](#).

- Silver, Hillary. 2007. "Social Exclusion: Comparative Analysis of Europe and Middle East Youth" *The Middle East Youth Initiative Working Paper*. Dubai: Dubai School of Government.
- Sirovatka Thomas dan Petr Mares. 2008. "Social Exclusion and Forms of Social Capital". *Czech Sociological Review* 44(3)531-555.
- Susanti, Dewi et al. 2007. *Mendengarkan Kota: Studi Perbandingan Kota dan Komunitas Miskin antara Jakarta – Bangkok*. Jakarta: Institute for Ecosoc Rights.
- Sustainable Sanitation and Water Management (SSWM). 2018. "Community Action Planning" Willisau: Sustainable Sanitation and Water Management (SSWM). Diakses pada 8 Mei 2018. (<https://www.sswm.info/category/glossary/community-action-planning>).
- UN HABITAT. 1992. "The Kampung Improvement Programme, Surabaya" UK: UN HABITAT. Diakses pada 1 November 2018. (<https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/the-kampung-improvement-programme-surabaya/#award-content>).
- Warsilah, Henny et al. 2018. "Pembangunan Inklusif Luar Jawa: Kasus Padang Pariaman Sumatera Barat dan Tanjung Benoa Bali" *Makalah Rancangan Penelitian*. Disampaikan dalam Seminar Riset Desain PMB LIPI 20-22 Februari 2018.

Penataan Ruang Terbuka Publik (PS) dan Fasad Depan Komersial (CFF) di Koridor Utama Jl. Letjen S. Parman Jakarta Barat

Nilam Atsirina Krisnaputri, Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Agung Podomoro. E-Mail: nilam.k@podomorouniversity.ac.id

Carolina, Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Agung Podomoro. E-Mail: carolina.setiawan@podomorouniversity.ac.id

Abstrak

Jalan Let. Jend. S. Parman Jakarta Barat merupakan jalan arteri yang memiliki keragaman pola ruang/aktivitas. Keberagaman tersebut memberi dampak terhadap pola pergerakan pengguna dan bentuk serta struktur ruang publik dan jaringan pedestrian (PSCFF) yang ada. Kualitas dan kuantitas PSCFF yang tersedia dirasa belum memadai dan belum memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Dalam hal ini dilakukanlah penelitian kualitatif dengan studi pengamatan yang ditranslasikan kedalam bentuk ide penataan rancang kota berdasarkan pengukuran elemennya dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-demografi, kondisi fisik dan ekonomi pengguna.

Berdasarkan hasil analisa, diketahui bahwa ruang sisi utara Jalan Let. Jend. S. Parman memiliki karakter aktivitas yang lebih beragam dengan penggunaan mayoritas *single-used* sehingga penataan yang dilakukan adalah dengan menitikberatkan pada konektivitas dan desain ruang pada jaringan pedestrian. Sedangkan ruang sisi selatan Jalan Let. Jend. S. Parman memiliki karakter aktivitas yang merupakan area *mix-used development* sehingga penataan yang dilakukan adalah menitikberatkan pada ketersediaan dan desain ruang pada publik area.

Kata Kunci: ruang terbuka publik, fasad komersial, karakteristik penduduk, rancang kota.

Pendahuluan

Jakarta Barat merupakan Kota Administrasi di DKI Jakarta dengan pusat pemerintahan berada di Krebangan. Selain terkenal dengan peninggalan masa kolonial Belanda seperti Gedung Balai Kota yang kini menjadi Museum Sejarah DKI Jakarta, kawasan “pecinan” Glodok dan sejumlah mesjid tua serta benteng-benteng pertahanan masa awal pendudukan Belanda di Batavia, Jakarta Barat juga menjadi kawasan perdagangan dan perkantoran. Hal tersebut tercermin pada sepanjang Jalan Let. Jend. S. Parman yang hampir dipenuhi oleh aktivitas perdagangan dan perkantoran. Jakarta Barat, khususnya sepanjang Jalan Let. Jend. S. Parman juga berkembang menjadi kawasan yang cukup padat dan “prestige” dilengkapi dengan pusat hiburan, pendidikan tinggi (universitas), hotel, hunian vertikal (apartemen), bisnis dan perkantoran. Bagaikan simpul kepadatan kota, Let. Jend. S. Parman merupakan jalur sepanjang 4,2 km yang sibuk dipenuhi oleh aktivitas pusat perbelanjaan seperti Mal Ciputra, Podomoro City (Superblock), dan Mal Taman Anggrek, serta pusat pendidikan seperti Universitas Trisakti, Universitas Taruma Negara, Ukrida dan Podomoro University, pusat perkantoran seperti APL Tower, distrik dagang Jalan Tomang dan Wisma Slipi. Sehingga dengan kondisi tersebut akan menimbulkan keberagaman karakter yang berpengaruh terhadap tipologi ruang kota. Karakteristik sebuah kota akan bergantung pada aktivitas yang ada di suatu wilayah tersebut. Menurut Doxiadis (1900) kota sebagai suatu sistem yang spasial dimana memiliki faktor pembentuk serta keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lainnya yakni, faktor alam, individu manusia dan masyarakat, ruang kehidupan dan jaringan. Begitu pula dengan Hadinoto (1970), mengemukakan bahwa faktor pembentuk kota salah satunya adalah dilihat dari “Marga”, yang dimana menjelaskan sebuah jaringan pergerakan atau sirkulasi.

Namun dalam hal ini, keberagaman aktivitas yang terjadi pada sepanjang Jalan Let. Jend. S. Parman dirasa belum memberikan pengaruh yang cukup baik pada ruang kota khususnya yakni pada jaringan ruang terbuka publik (*Public Space*) dan fasad komersial (*Commercial Front Façade*) –yang selanjutnya akan disingkat PSCFF– di Let. Jend. S Parman Jakarta Barat. Berdasarkan pengamatan yang ada, kualitas dan kuantitas dari beberapa *section* PSCFF di Let. Jend. S. Parman dinilai belum layak atau belum menarik untuk dilalui pejalan kaki. Kurangnya jalur teduh, tidak ramah disabilitas, tidak meratanya *pedestrian ways*, dan ketidakseagaman ukuran *pedestrian ways* membuat pejalan kaki dan penyandang disabilitas tidak nyaman untuk melewati jalur tersebut. Ketidaknyamanan ini membuat minimnya pemanfaatan jalur pedestrian dan mengurangi keindahan sepanjang Jalan Let. Jend. S. Parman. Padahal didalam sebuah rancang kota, selain mementingkan kondisi fisik infrastrukturnya, unsur kenyamanan, keindahan serta kelayakan menjadi hal yang berperan penting untuk menghidupkan suatu kawasan atau area perkotaan. Perancangan kota selain memikirkan hal fisiknya, perancangan kota merupakan sebuah proses kolaborasi untuk menciptakan kehidupan di dalam kota yang dimana harus dapat mengakomodir unsur perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat (ras, ekonomi, sosial, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dll). Maka dari itu, dilakukanlah penelitian tentang elemen-elemen desain ruang kota yang berkaitan erat dengan keragaman karakteristik yang mempengaruhi PSCFF di Jalan Let. Jend. S. Parman serta bagaimana penataan/pengelolaannya berdasarkan karakteristik penggunaannya.



Gambar 1. Kondisi Eksisting Jaringan Pedestrian Jalan Let. Jend. S. Parman

Kajian Pustaka

Rancang Kota

Perancangan Kota (*urban design*) adalah metode yang dibuat untuk membangun sebuah lingkungan yang penuh dengan aspirasi dan merepresentasikan nilainya (Rapoport dalam Moughtin, 2003). Perancangan kota memegang peranan penting di dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan juga kesehatan pertumbuhan ekonomi yang mengarah kepada kualitas kehidupan yang baik. Perancangan kota membuka peluang untuk menciptakan ruang kehidupan kota dengan karakter khusus, aman, memudahkan pejalan kaki, dan ketersediaan ruang publik (www.colonialheightsva.gov, 2018).

Objektivitas Rancang Kota

Rancang kota memiliki objektivitas yang digunakan untuk menilai atau mengukur sebuah elemen rancang kota (London Canada, 2010) :

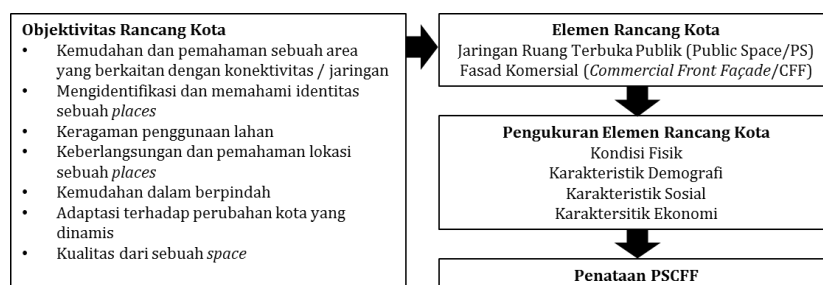
- a. *Legibility* : Pembangunan yang mengedepankan kemudahan penghuni atau pendatang dalam memahami sebuah area tersebut. Hal ini yang berkaitan dengan jaringan jalan, navigasi, konektivitas dan alternatif moda transportasi, serta bagaimana area tersebut tercipta sebagai area transit dan berorientasi pada pejalan kaki.

- b. *Characteristic* : Mengidentifikasi dan memahami identitas dari sebuah lingkungan seperti bangunan bersejarah, area publik, seni publik.
- c. *Diversity* : Keragaman penggunaan lahan dan pemilihan penggunaan bangunan. Berbicara sebuah siklus hidup dengan keaslian lingkungan yang ada atau sudah terbentuk.
- d. *Continuity* dan *Enclosure* : sebuah bentuk jalan depan (*frontage*) yang dibangun agar pengguna dengan mudah memahami dimana mereka berada, arah kemana mereka harus pergi dan menuju. Hal ini dapat disebut dengan definisi sebuah wilayah,
- e. *Ease of Movement* : Kemudahan dalam berpindah, hal ini berkaitan dengan konektivitas dan peletakan sebuah pedestrian. Kota yang kompak, struktur perkotaan, blok, dan pedestrian merupakan hal yang diperhatikan dalam perpindahan barang atau orang.
- f. *Adaptability* : Kota dan lingkungan akan berubah. Kesuksesan sebuah 'places' berhubungan langsung dari tersedianya bentuk dan pola dari pembangunan sosial, teknologi dan kondisi ekonomi.
- g. *Quality Public Realm* : keaktraktifan ruang jalan, keamanan dan kenyamanan lingkungan pedestrian. Hal ini dipengaruhi dari pengaturan fasad bangunan pada level *ground* bangunan, detail arsitektur, pola paving, shade, tempat duduk, dan fitur lain yang mempengaruhi pejalan kaki.

Rancang Kota dan Kehidupannya

Rancang kota adalah bagian dari prinsip dasar dalam mengelola sebuah area yang layak ditinggali atau dihuni. Rancang kota dibuat untuk memahami atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada didalamnya untuk menjalankan sebuah kehidupan. Kecakapan sebuah kota akan tergambar dari bagaimana kota tersebut mampu melayani orang yang tinggal di kota tersebut. Menurut Mazelan (2016) dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa untuk mengukur kota yang layak ditinggali adalah aksesibilitas lingkungan dan pendekatan sosial. Kemudian, kriteria desain yang digunakan untuk menciptakan sebuah 'tempat' / 'ruang' adalah perpindahan manusia dan barang, pengukuran gaya hidup manusia, aktivitas ekonomi, dan identitas lokal masyarakat.

Hal ini selaras dengan Kendig dan Keast (2011) bahwa sensitivitas atas karakter masyarakat lokal di dalam perancangan dan manajemen kota akan meningkatkan kualitas lingkungan bagi komunitas lokal. Jutka Terris, Nancy Vorsanger, dan Kaid Benfield di dalam buku mereka yang berjudul *Solving Sprawl* (2003), pengembangan sebuah lingkungan kota yang hebat tidak terbatas pada pengembangan skala besar dan untuk kelas atas. Terkadang lingkungan sosial masyarakat dan golongan ekonomi menengah menunjukkan ikatan dan keberlanjutan yang lebih besar dalam membentuk sebuah kehidupan yang kita sebut dengan komunitas. Komunitas ini yang sebenarnya berkontribusi besar di dalam proses revitalisasi kota. Untuk mencari karakter kota daripada masyarakat lokal maupun komunitas lokal, pertama-tama perlu dipahami dulu apakah yang dimaksud dari karakter tersebut. Karakter penting di dalam perancangan kota terdiri atas kondisi fisik, demografi, sosial, dan ekonomi yang berbeda tergantung lokasi kota tersebut (Pivo, 1992).



Gambar 2. Skema Rancang Kota pada PSCFF di Jalan Let. Jend. S. Parman, Jakarta Barat
Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan studi literatur yang digunakan, objektivitas rancang kota adalah mengedepankan sebuah pemahaman dan kemudahan pengguna dalam menjalankan kehidupan disuatu area atau kawasan. Kemudahan dan pemahaman pengguna diukur dari sebuah pola, bentuk, kenyamanan dan keamanan sebuah jaringan penghubung (aksesibilitas). Maka dari itu, dalam penelitian ini akan terfokus pada penataan PSCFF di Koridor Utama Jl. Letjen S. Parman.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini, dilakukan pengamatan keragaman karakteristik penduduk sebagai pengguna ruang kota menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kenyamanan dan kesesuaian elemen kota yang sudah ada sekarang. Adapun karakteristik yang diamati untuk diukur adalah kondisi fisik, karakteristik demografi, sosial dan ekonomi yang selanjutnya dipetakan dalam analisis pemetaan. Selanjutnya, hasil pengamatan tersebut kemudian ditranslasikan menjadi desain / penataan / rancang bangun PSCFF yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan mereka dalam menggunakan PSCFF. Ketentuan teknis perancangan kota, studi preseden, dan studi 3D model digunakan untuk menghasilkan ide perancangan yang terpadu, aman, nyaman, dan menarik bagi pengguna.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penggunaan lahan yang ada, koridor utama Jalan Let. Jend. S. Parman memiliki keragaman aktivitas dan memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Keberagaman aktivitas tersebut diantaranya adalah kegiatan kampus atau universitas, kegiatan perkantoran, kegiatan yang ada pada fungsi apartemen, sekolah, hotel, dan pusat perbelanjaan. Dengan kondisi ruang tersebut mengakibatkan tingginya variasi pengguna ruang yang disebabkan oleh perbedaan demografi dan kondisi sosial ekonomi pengguna. Setelah dilakukan pengamatan, dilakukan pemetaan aktivitas ruang yang ada di sepanjang Jalan Let. Jend. S. Parman.



Gambar 3. Tata Guna Lahan di Koridor Utama Jl. Letjen S. Parman

Sumber : Hasil survey di lapangan

Gambar 3. merupakan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Sepanjang koridor Jalan Let. Jend. S. Parman dilalui oleh Jalan Tol Dalam Kota dan memiliki jalan keluar di Sisi Utara jalan tol dan jalan masuk pada sisi selatan jalan tol tersebut. Hal ini pula yang mendorong aktifitas yang cukup beragam

di lingkungan tersebut. Jalan Let. Jend. S. Parman memiliki jalur pedestrian yang terbilang cukup aktif karena penggunaan lahan yang bercampur, mulai dari pemanfaatan *high rise building* dengan *single-used* sampai dengan *mix-used development*. Berdasarkan pada Tabel 1. diketahui dari hasil survey dilapangan bahwa pemanfaatan *single-used* mayoritas adalah penggunaan lahan kampus / universitas dan sekolah (Universitas Trisakti, Universitas Tarumanegara, SMK Penabur), perkantoran (baik pemerintah maupun swasta), hotel (FM Boutique), dan apartemen (Westpark, Mediterania dan Grand Tropic). Sedangkan pemanfaatan *mix-used development* mayoritas adalah kawasan penggunaan lahan campuran seperti Podomoro City (Mall, Kantor dan Hunian), Mall Taman Anggrek (Mall dan Hunian), serta Mall Ciputra (Mall dan Hotel).

Tabel 1. Pemetaan Ragam Karakteristik Masyarakat Lokal dan Komunitas di Koridor Utama Jl. Letjen S. Parman dari Hasil Pengamatan

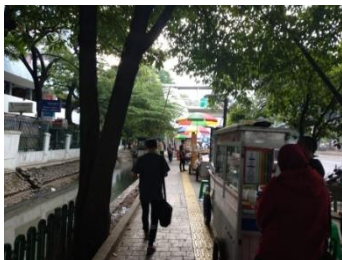
Program Ruang	Kondisi Fisik Ruang	Demografi*	Ekonomi	Sosial
1. Universitas Trisakti	<i>Single used -high rise</i>	Remaja	menengah	publik
2. Universitas Tarumanegara 1	<i>Single used -high rise</i>	Remaja	menengah	publik
3. Kantor Militer Jakarta Barat	<i>Single used -mid rise</i>	Dewasa	menengah	<i>private</i>
4. Dinas Catatan Sipil Jakarta	<i>Single used -high rise</i>	Dewasa	menengah	publik
5. Hotel FM Boutique	<i>Single used -high rise</i>	Dewasa	menengah	<i>private</i>
6. Pendidikan & Pelatihan Ekspor	<i>Single used -high rise</i>	Dewasa	menengah	<i>private</i>
7. Wisma Mandiri	<i>Single used -low rise</i>	Dewasa	menengah	<i>private</i>
8. Griya Mandiri	<i>Single used -low rise</i>	Dewasa	menengah	<i>private</i>
9. PT. Telkom	<i>Single used -mid rise</i>	Dewasa	menengah	publik
10. PT. Total Bangun Persada	<i>Single used -high rise</i>	Dewasa	menengah	<i>private</i>
11. KPP Pratama Jakarta	<i>Single used -high rise</i>	Dewasa	menengah	publik
12. Apt. Westmark	<i>Single used -high rise</i>	Campuran	Menengah atas	<i>private</i>
13. Mall & Apt. Taman Anggrek	<i>Mixed used -high rise</i>	Campuran	Menengah atas	Publik- <i>private</i>
14. Podomoro City	<i>Mixed used -high rise</i>	Campuran	Menengah atas	Publik- <i>private</i>
15. Apt. Mediterania 2	<i>Single used -high rise</i>	Campuran	Menengah	<i>private</i>
16. Neo Soho	<i>Mixed used -high rise</i>	Campuran	Menengah atas	Publik- <i>private</i>
17. Apt. Mediterania 1	<i>Single used -high rise</i>	Campuran	Menengah	<i>private</i>

Program Ruang	Kondisi Fisik Ruang	Demografi*	Ekonomi	Sosial
18. Apt. Madison	<i>Single used -high rise</i>	Campuran	Menengah atas	<i>private</i>
19. SMA Penabur & Ukrida	<i>Single used -high rise</i>	Remaja	Menengah	Publik
20. Apt. Grand Tropik	<i>Single used -high rise</i>	Campuran	Menengah	<i>private</i>
21. Universitas Tarumanegara 2	<i>Single used -high rise</i>	Remaja	Menengah	Publik
22. Hotel dan Mall Ciputra	<i>Mixed used -high rise</i>	Campuran	Menengah	Publik- <i>private</i>

Sumber : Hasil Survey, 2018

*Demografi mencakup latar belakang usia pengguna. Acuan yang digunakan adalah pembagian kelompok usia yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI (2009). Adapun kelompok usia tersebut adalah:

0-5 tahun	: Balita	26-45 tahun	: dewasa
5-11 tahun	: anak-anak	46-65 tahun	: lansia
12-25 tahun	: remaja	> 65 tahun	: manula



Gambar 4. Pedestrian yang terganggu dengan kegiatan PKL

Berdasarkan hasil pengamatan (Tabel 1.) sebagian pengguna ruang kota di koridor utama Jalan Let. Jend. S. Parman pada sisi utara Jalan Tol Dalam Kota memiliki ragam kegiatan universitas dan perkantoran adalah remaja dan dewasa. Secara karakter sosial, jika diamati, aktifitas yang dilakukan adalah aktifitas yang bersifat publik. Hal tersebut juga mendorong aktifitas publik lainnya seperti pedagang kaki lima, pedagang

keliling, jasa fotokopi dan penjiplakan, warung buku, warung makan dan kegiatan umum lainnya. Namun, di beberapa titik terdapat aktifitas publik lainnya tersebut masih menggunakan lahan yang berfungsi pedestrian sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan aktifitas penjalan kaki (Gambar 4).



Gambar 5. Jalur Pedestrian yang berada di dalam Podomoro City

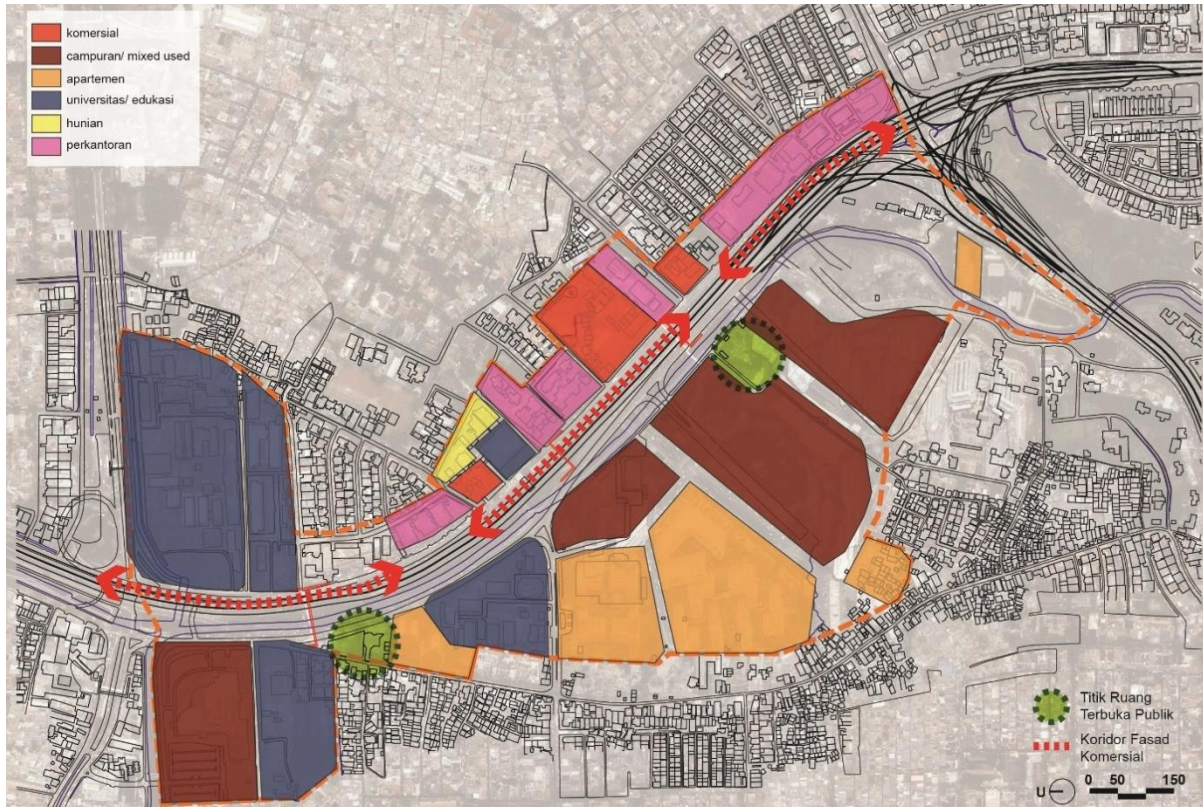
Berbeda dengan sisi selatan Jalan Tol Dalam Kota memiliki karakter pengguna dengan usia yang lebih beragam dan merupakan kombinasi dari penghuni apartemen, pekerja kantor atau retail dan pengunjung pusat perbelanjaan. Karakter dari pengguna ruang tersebut merupakan kombinasi karakteristik publik dan *private*. Selain karakteristik sosial, jika diamati berdasarkan karakteristik fisik ruang, koridor Jalan Let. Jend. S. Parman dengan sisi selatan

Jalan Tol Dalam Kota memiliki aktifitas ruang yang mayoritas adalah penggunaan lahan campuran (*mix-used*) sehingga pengaturan aktifitas jauh lebih tertata dan tidak berhimpitan langsung dengan area jalan raya. Kondisi tersebut menyebabkan minimnya penggunaan jalur pedestrian di sisi jalan raya dan jalur pedestrian yang digunakan mayoritas adalah yang berada di dalam area *mix-used* / kompleks pusat perbelanjaan seperti Podomoro City, Mall Taman Anggerek dan Kampus Ukrida (Gambar 5). Permasalahan yang ada pada sisi selatan adalah dimana kurangnya ruang publik sebagai tempat untuk mendukung kegiatan utama yang ada di lokasi penggunaan lahan campuran, adanya



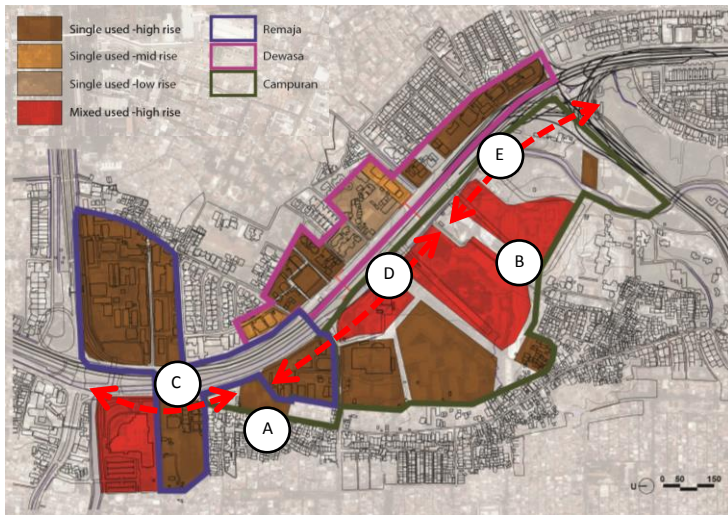
Gambar 6. Salah satu lahan kosong yang digunakan sebagai area parkir liar dan pedagang kaki lima

parkir liar dan pedagang kaki lima yang tidak terkelola berada di lahan kosong (Gambar 6). Hal ini juga terjadi pada area kampus Universitas Krida, dimana lahan-lahan kosong yang ada dikembangkan menjadi area parkir liar.



Gambar 7. Pemetaan Distribusi Aktivitas Masyarakat di Sepanjang Koridor Utama

Keberagaman aktivitas yang terjadi pada lokasi penelitian jika divisualisasikan pada peta (Gambar 7), maka kedua arus distribusi jalur baik sisi utara Jalan Tol Dalam Kota dan jalur sisi selatan Jalan Tol Dalam Kota sama-sama memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Penggunaan lahan campuran dengan karakter penggunaan yang lebih siap dan ditumpu oleh perencanaan kawasan yang sudah matang oleh pengembang (Podomoro City, Mall Taman Anggrek dan Mall Ciputra) maka karakteristik secara sosial akan lebih bertumpu pada atribut pendukung guna mengintegrasikan antar penggunaan yakni penataan kawasan ruang publik (*Public Space*). Sedangkan untuk penggunaan lahan campuran di sisi utara dengan karakter penggunaan yang cenderung ditumpu oleh masing-masing fungsi lahan, maka lebih membutuhkan konektivitas untuk menghubungkan diantaranya. Sehingga dalam hal ini, arus distribusi masyarakat akan terlihat pada titik jalur pedestrian (*front façade*).



Gambar 8. Titik Penataan PSCFF dari Hasil Pemetaan Pengguna

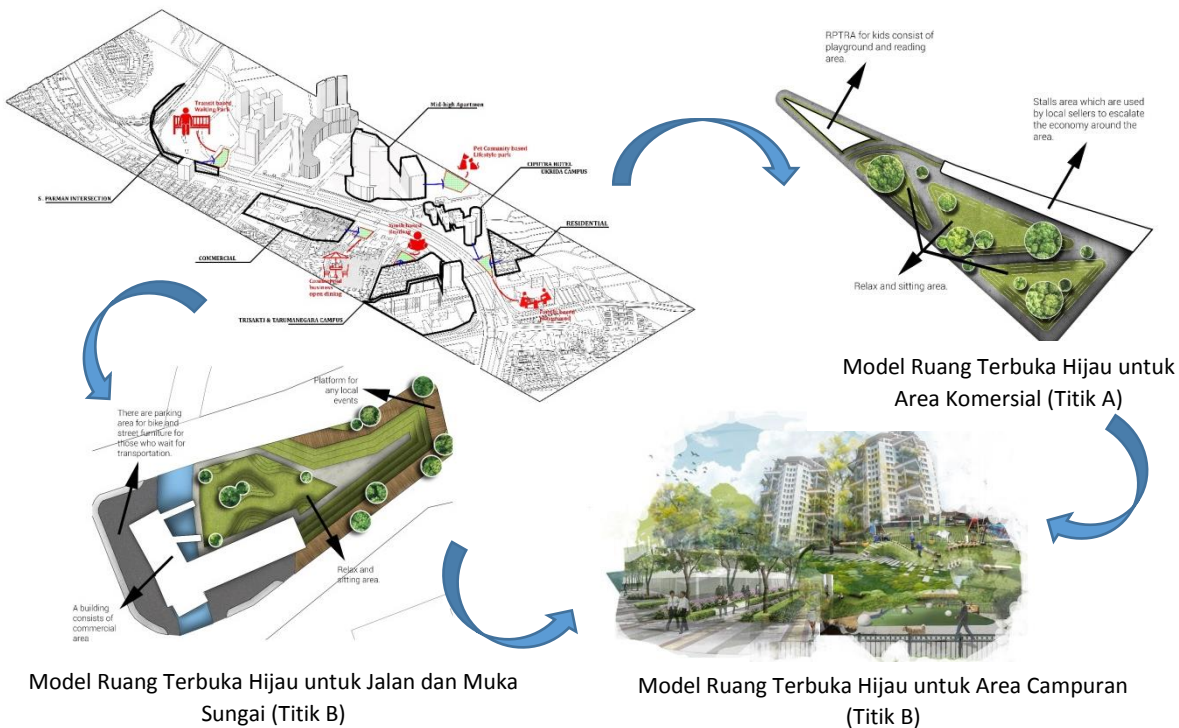
Perbedaan tipologi yang terjadi pada sisi utara dan sisi selatan pada Jalan Let. Jend. S. Parman mengharuskan terjadinya pembeda dalam penataannya. Jika berdasarkan hasil pengamatan permasalahan yang ada maka sisi utara akan dirancang dengan menitikberatkan pada penataan koridor (jalur pedestrian) sedangkan sisi selatan akan dirancang dengan menitikberatkan pada penataan ruang publik. Untuk memudahkan dalam rancang kota, wilayah penelitian dalam deliniasi wilayahnya akan dibagi menjadi 5 (lima) titik penataan PSCFF (Gambar 8). Titik penataan ini dilakukan berdasarkan

titik lokasi yang dirasa memiliki permasalahan (Tabel 2) dan perlu ditangani sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk terhadap kualitas kota.

Tabel 2. Penataan PSCFF di Koridor Jalan Let. Jend. S. Parman

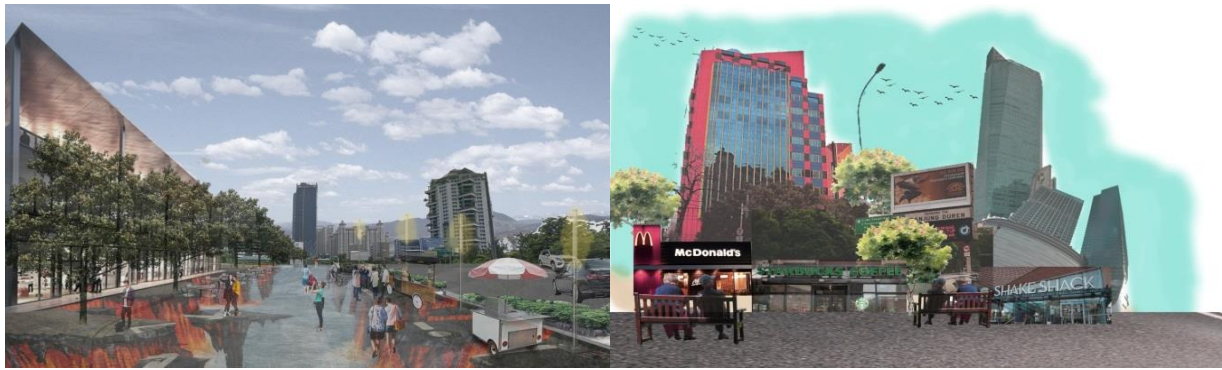
Titik	Permasalahan	Kondisi Lingkungan	Penataan PSCFF
A	Lahan hijau kosong yang digunakan sebagai area parkir liar, dan bukan merupakan lahan hijau yang hidup	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan gabungan penggunaan lahan dengan fungsi sekolah, kampus, perkantoran dan perumahan/hunian. Lahan hijau kosong sebagai lokasi parkir liar. Terdapat lokasi RTPRA 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan PS dengan konsep Transit-Based Walking Park karena area ini yang merupakan area penghubung antar fungsi bangunan. Pengembangan PS dengan tematik Pet Community Based Lifestyle Park
B	Lahan kosong yang digunakan sebagai lahan parkir liar dan pedagang kaki lima	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan lahan kosong milik pengembang yang berada ditengah Podomoro City dan Mall Taman Anggrek Menjadi area berkumpul ojek motor baik online maupun ojek konvensional. Komersial area 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan PS dengan tematik Family based playground karena area tersebut merupakan bagian dari area bermain anak
C	Area dengan penggunaan lahan mayoritas adalah sekolah / universitas sehingga mendorong kegiatan lain yang memakai jalur pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> Fasad bangunan adalah bangunan universitas Jalur pedestrian sebagai tempat berjualan dan lahan parkir 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Street Furniture dan Fasad Komersial yang bersifat aktif dan kreatif. Penambahan mural dalam jalur pedestrian agar menjadi daya tarik

Titik	Permasalahan	Kondisi Lingkungan	Penataan PSCFF
D dan E	Area dengan penggunaan lahan mayoritas adalah area komersial dan perkantoran sehingga mendorong kegiatan lain yang memakai jalur pedestrian. Akibat mayoritas bangunan single-used sehingga banyak bukaan bangunan dan menyebabkan ketidakmerataan elevasi dan lebar jalur pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> Fasad bangunan dipenuhi oleh bangunan perkantoran dan komersial Terdapat banyak bukaan bangunan yang memotong jalur pedestrian 	<p>pengguna dalam melalui jalur tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Interaksi koridor aktif yang dapat meningkatkan interaksi pengguna di sepanjang koridor fungsi campuran tersebut. Peleburan fungsi dengan menambah lokasi-lokasi ekonomi mikro yang dapat mendukung kegiatan PKL dan sentra retail lainnya.



Gambar 9. Karakter Pengguna dan Tata Guna Lahan untuk Pengembangan PS (Titik A dan B)

Sumber: Evan Tampi, Febryan Edsutan, Michael Bowijaya, Stanley Paisan



Gambar 10. Ide Pengembangan CFF untuk Area Universitas [kiri] (Koridor C) dan Untuk Area Campuran [kanan] (Koridor D)

Sumber: Silvia Marchelina, R.R. Meidina, Vegadania Mayrisky, Nethania



Gambar 11. Ide Pengembangan CFF untuk Area Perkantoran Sebelum [kiri] dan Sesudah [kanan] (koridor E)

Sumber: Silvia Marchelina, R.R. Meidina, Vegadania Mayrisky, Nethania

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, diketahui bahwa ruang sisi utara Jalan Let. Jend. S. Parman memiliki karakter aktivitas yang lebih beragam dengan penggunaan mayoritas *single-used* sehingga penataan yang dilakukan adalah dengan menitikberatkan pada konektivitas dan desain ruang pada jaringan pedestrian. Sedangkan ruang sisi selatan Jalan Let. Jend. S. Parman memiliki karakter aktivitas yang merupakan area *mix-used development* sehingga penataan yang dilakukan adalah menitikberatkan pada ketersediaan dan desain ruang pada publik area. Untuk penataan PSCFF di Jalan Let. Jend. S. Parman dilakukan pengembangan konsep *transit based walking park* sebagai penghubung bangunan, lalu area publik tematik yaitu *pet community* dan *family park*, serta penataan street furniture dan fasad komersial, penambahan mural pada jalur pedestrian, dan peleburan fungsi dengan menambah lokasi-lokasi ekonomi mikro sebagai sentra retail dan PKL.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini merupakan buah hasil karya proyek buku *City & People* yang disusun oleh mahasiswa dan dosen dari Theory of Urban Planning and Design 2 (2017/2018) Universitas Agung Podomoro yang dikembangkan menjadi artikel ilmiah. Terima kasih kepada tim penyusun buku, Prodi Arsitektur Podomoro University Batch 2 dan tim pendukung lainnya, Bapak Pratama Haditua S.

Daftar Pustaka

Bukowski, B., Boatman, D., Ramirez, K., Du, M. (2013). *A Comparative Study of Transit-Oriented Developments in Hong Kong*. Hong Kong: Hong Kong IQP

- Carmona, M., Heath, T., Oc, T., Tiesdell, S. (2003). *Public Places Urban Spaces : The Dimensions of Urban Design*. UK : Architecture Press
- Carolina, Atsirina, N. (2018). *City & People*. Jakarta : Podomoro University Press
- Cowan, R. (2002). *Urban Design Guidance : Urban design frameworks, development briefs, and master plan*. Australia : Urban Design Alliance
- Krauel, J. (2009). *Urban Spaces, Environments for the Future*. Barcelona: Carles Broto Icomerma
- Mazelan, N., S. 2016. "Urban Design Elements Pertaining to Liveable Urban Parks : A Study of Two Urban Parks in Kuala Lumpur". *1st BEURC 2016 Universiti Malaya*.
- Moughtin, C. (2003). *Urban Design : Street and Square Third Edition*. Burlington, MA 01803 : Architectural Press
- Pivo, G. 1992. *How Do You Define Community Character?*. Arizona : University of Arizona
- Kendig, L., and Keast, B. 2011. *A Guide to Planning for Community Character*. Washington D.C. : Island Press.
- Terris, J., Vorsanger, N., Benfield, K.. (2003). *Solving Sprawl*. Washington D.C. : Island Press
- www.colonialheights.gov, diakses online pada 9 November 2018
- <https://www.pps.org/article/what-is-placemaking>, diakses online pada 15 May 2018
- <https://thediplomat.com/2014/01/jakartas-troubled-infrastructure/>);
- <https://www.numbeo.com/traffic/rankings.jsp>, diakses online pada 1 Juni 2018
- <http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2014/02/28/the-importance-of-infrastructure-for-economic-growth-jobs-and-access-to-markets-and-services-in-solomon-islands>), diakses online pada 1 June 2018

Upaya Membangun Ruang Kota Melalui Perencanaan Pembangunan Wilayah Kota di Indonesia

Rezekinta Sembiring, Agroteknologi, Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Kintasembiring96@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara berkembang pada saat ini yang tengah gencarnya melakukan kegiatan pembangunan. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya wilayah tertentu untuk dijadikan pusat pembangunan wilayah yang tersebar di seluruh penjuru nusantara baik untuk pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian. Perkembangan yang terus menerus dilakukan mendorong suatu wilayah pedesaan (*rural area*) untuk menjadi wilayah perkotaan (*urban area*) yang prosesnya disebut urbanisasi. Kota dengan status sebagai wilayah otonom mempunyai tuntutan yang lebih besar dalam membangun wilayahnya, agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam penyediaan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya. Kota yang tidak berdaya saing lambat laun akan mengalami penurunan pertumbuhan wilayahnya. Perencanaan pembangunan wilayah kota menghadapi berbagai permasalahan, seperti: permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek kota (mikro), permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan program pemerintah secara keseluruhan (makro), penetapan lokasi yang tidak baik yang menyebabkan sistem prasarana menjadi tidak efisien dan sistem pembiayaan pembangunan di kota yang melampaui kemampuan dana pemerintah yang tersedia. Metode yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan wilayah kota, yaitu studi pustaka, pemetaan daya saing kota, analisis legibilitas elemen *mental map* dan model gravitasi untuk menafsirkan kecenderungan lokasi. Elemen *mental map* digunakan oleh para ahli untuk menentukan objek perencanaan pembangunan wilayah wilayah seperti *visibility* bagian yang menarik. Pemetaan daya saing kota besar dilakukan dengan menentukan klasifikasi kota berdasarkan kinerja indikator input dan indikator output. Daya saing wilayah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan wilayah. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu kota dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Sedangkan model gravitasi merupakan model yang digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada wilayah tersebut, yang mendorong berbagai kegiatan lain untuk berlokasi di dekat kegiatan yang telah ada terlebih dahulu.

Kata kunci: daya saing, gravitasi, kota, *mental map*, perencanaan

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang pada saat ini tengah giatnya melakukan pembangunan. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kawasan wilayah tertentu di Indonesia yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan masyarakat dan kawasan pemerintahan serta perekonomian industri. Kota memiliki peranan penting sesuai dengan konsep dan pengembangan kota tersebut, seperti kota industri, kota pendidikan dan kota pariwisata yang mempunyai prioritas utama dalam pengembangan kota (Sharpe and Wallock 1987, p 1-16).

Pertambahan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan hidup masyarakat perkotaan juga meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan kemajuan yang terjadi di berbagai sektor seperti: sosial, ekonomi dan teknologi (Ashworth 2009). Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat maka kegiatan usaha juga mengalami peningkatan, peningkatan berbagai bentuk usaha yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas untuk hasil output seperti barang dan jasa yang beranekaragam dalam jangka panjang lebih besar bagi masyarakat sebagai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang dapat diukur dengan

pendapatan per kapita penduduk. Permasalahan perkotaan yang dihadapi pada saat ini, yaitu: keadaan lingkungan fisik kota yang kurang memadai, perencanaan dan program pembangunan kota serta koordinasi pelaksanaannya yang menghadapi berbagai kendala, sarana dan prasarana perkotaan yang masih terbatas, partisipasi masyarakat (*social participation*) dari berbagai lapisan belum optimal dalam mendukung pembangunan kota dan norma tata tertib pergaulan sosial, tertib hukum dan tertib kemasyarakatan kurang efektif (Hariyanto dan Tukidi 2007, p. 1-10.)

Sebuah kota mempunyai pusatnya masing-masing yang berpusat pada kegiatan penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi dengan berbagai kemudahan fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial yang lengkap, sehingga menjadi daya tarik kota semakin kuat untuk mengundang lebih banyak masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Penyediaan sarana dan prasarana di wilayah kota ditujukan pada fungsi kota dengan mengutamakan pengadaan tempat tinggal, tempat bekerja, sistem transportasi dan rekreasi. Kebutuhan dalam penyediaan sarana dan prasarana pada beberapa kota besar dirasakan terlalu besar karena lahan kota untuk pembangunan sarana dan prasarana terbatas dan anggaran pembangunan yang tersedia juga sangat terbatas, sedangkan perkembangan kota berlangsung semakin pesat (Adisasmita 2010).

Rencana pembangunan kota harus mampu mengembangkan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh kota tersebut dengan penyesuaian pada pembangunan masa lalu dan berorientasi pada masa yang akan datang (Simonds 1961) dengan memperhatikan dan melihat sejarah pembangunan wilayah kota agar tercipta kesatuan ruang yang berkarakter khas pada kota sebagai elemen dari ruang kota. Menurut Lynch (1960) elemen ruang kota yang perlu diperhatikan, yaitu: jalur sirkulasi, batas wilayah, bagian wilayah kota, pusat aktivitas kota dan mercu tanda. Menurut Porteous (1977) pemanfaatan elemen ruang kota dapat berguna sebagai navigator yang membawa setiap orang untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Sistem navigasi tersebut timbul dari rasa kesan (*image*) setiap orang terhadap lingkungannya yang disebut dengan *mental map*. Apabila elemen *mental map* tersebut mampu dibayangkan bahkan diingat kembali maka elemen *mental map* dapat dikatakan sebagai *imageable*.

Salah satu model yang banyak digunakan dalam perencanaan pengembangan wilayah kota adalah model gravitasi. Model ini dapat membantu perencanaan wilayah kota untuk memperkirakan daya tarik suatu lokasi di kawasan perkotaan dibandingkan dengan kawasan lokasi lainnya dan dapat dimanfaatkan untuk simulasi apakah suatu fasilitas yang dibangun pada kawasan kota dapat menarik cukup masyarakat untuk berkunjung. Sehingga dapat memperkirakan apakah perlu atau tidak fasilitas tersebut dibangun di kawasan kota dibangun atau sebaliknya mencari lokasi lain yang sesuai dengan fasilitas tersebut.

Kajian Pustaka

Kota besar di Indonesia mempunyai peran penting dalam pembangunan wilayah walaupun dengan sumber daya alam yang terbatas, tetapi kota sebagai pusat produksi barang dan jasa mampu memberikan layanan yang kompetitif. Kota dengan status wilayah otonomi mempunyai tuntutan yang lebih besar dalam membangun kawasan kota. Agar kota dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan maka kota harus mampu bersaing dalam penyediaan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya begitu juga sebaliknya (Santoso 2010, p.1-13).

Kapasitas kota untuk bersaing dengan kota lainnya dibentuk dari hubungan yang saling mempengaruhi antara atribut kota dengan memberikan penilaian yang obyektif dan berimbang, seperti lokasi, kekuatan dan kelemahan perusahaan serta pelaku ekonomi aktif didalamnya. Daya saing wilayah menjadi salah satu permasalahan yang paling utama dalam perencanaan pembangunan wilayah untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional,

mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, kemampuan kawasan kota dalam menciptakan lapangan pekerjaan (Gardiner 2003).

Perencanaan ruang kota merupakan kegiatan perencanaan yang berfokus pada keserasian hubungan antara berbagai kegiatan di dalam kota untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan dan kebutuhan masyarakat yang datang dari luar kota (Tarigan 2005). perencanaan wilayah kota pada pembangunan fisik harus memperhatikan prinsip ekologi terhadap perubahan lahan alami yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan. Konsep struktur kawasan yang berwawasan lingkungan harus sesuai dengan *social use values*, *market values* dan *ecological value*. Pendekatan model manajemen perubahan tata guna lahan perkotaan dilakukan dengan mengintegrasikan vitalitas dan aktivitas perkotaan terhadap segala aspek melalui ciri-ciri lingkungan, sebagai sebuah sistem yang dapat menjaga keberlangsungan ekosistem kawasan pada saat ini dan masa mendatang (Staley 1999).

Model gravitasi merupakan model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi yang mendorong berbagai kegiatan lain untuk berlokasi di dekat kegiatan yang telah ada terlebih dahulu yang berkaitan terhadap potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar (Lloyd and Dicken 1977).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah dengan menggunakan studi pustaka, pemetaan daya saing kota, analisis elemen *mental map* yang terdapat pada studi pustaka dan model gravitasi untuk menafsirkan kecenderungan perencanaan pembangunan wilayah kota untuk pembangunan ruang kota.

Hasil dan Pembahasan

Persoalan perencanaan pembangunan ruang kota di Indonesia pada dasarnya dimulai dari pelaksanaan pembangunan ruang kota yang dilakukan seringkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah disusun. Ketidaksihesuaian antara rencana tata ruang yang telah disusun dengan pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan suatu pengendalian. Dalam mewujudkan pengendalian pengembangan wilayah yang memiliki tujuan dan sasaran dengan sifat kewilayahan di Indonesia dapat dilakukan melalui penataan ruang, yaitu: perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), proses pemanfaatan ruang dengan wujud operasionalisasi rencana tata ruang dan proses pengendalian pemanfaatan ruang. Di Indonesia penataan ruang telah ditetapkan melalui UU No 24/1992 yang diikuti oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Hariyanto dan Tukidi 2007). Pertumbuhan kawasan perkotaan pengaruh oleh perkembangan faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan dan mendorong pertumbuhan kawasan di sekitarnya (Santoso 2009, p.1-6). Kota memberikan pengaruh terhadap kekuatan ekonomi yang berbeda-beda dalam perekonomian regional maupun nasional sehingga terjadi proses transformasi untuk kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan dengan melibatkan banyak sektor (Yunus 2006). Dikotomi terjadi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam tingkat produktivitas ekonomi menyebabkan akumulasi investasi pembangunan yang mengutamakan kawasan perkotaan dibandingkan kawasan perdesaan (*urban bias*) (Rustiadi et al. 2009).

Peningkatan daya saing wilayah dapat dilakukan melalui pengembangan potensi unggul setiap wilayah, baik secara komparatif dan kompetitif yang difokuskan pada sektor ekonomi dalam pergerakan ekonomi wilayah (*regional economic prime mover*) dengan memberikan efek ganda

(multiplier effect) terhadap perekonomian wilayah. Faktor produksi dalam pembangunan wilayah mendorong pertumbuhan ekonomi dan peran sumberdaya masyarakat sebagai subjek utama penentu roda produksi yang berfokus pada pemerataan, pertumbuhan dan keberlanjutan wilayah tersebut (Adisasmita 2010). Kemampuan daya saing wilayah menjadi faktor utama dalam jangka panjang yang bersifat dinamis. Salah satu unsur yang mendukung daya saing wilayah, yaitu lokasi geografis dengan memberikan akses terhadap faktor-faktor input kinerja untuk pertumbuhan wilayah yang berorientasi pada keunggulan sektor ekonomi (Porter 2000). Perkembangan wilayah (*resources endowment*) yang berlimpah cenderung mengikuti pendekatan teori keunggulan komparatif model Ricardian (1817) dengan mendorong spesialisasi wilayah dalam memproduksi barang dan jasa sehingga memiliki produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Keterbatasan sumberdaya alam pada suatu wilayah cenderung menggunakan pendekatan keunggulan kompetitif model Porter (1996). Pertimbangan struktur ekonomi dan sumber daya manusia perlu dilakukan untuk pengembangan daya saing wilayah sehingga sumber daya manusia yang diharapkan sesuai dengan perkembangan perekonomian di wilayah tersebut (Webster dan Muller 2000).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu adalah dengan menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB). Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan besarnya pendapatan per kapita. Kondisi pendapatan per kapita di wilayah Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017 menempatkan provinsi DKI Jakarta pada posisi unggul dan diikuti oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, sedangkan pada provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara berada pada tingkatan bawah dalam pendapatan per kapita. Kesenjangan pendapatan per kapita yang tinggi antarwilayah di Indonesia menimbulkan mobilitas penduduk antarwilayah sehingga terjadi kekuatan daya tarik (*gravitasi*) wilayah yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi. Tingkat kesejahteraan yang tinggi menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan arus urbanisasi. Daya saing wilayah di Indonesia yang semakin kuat tidak dapat dipisahkan dari peningkatan produktivitas ekonomi yang terjadi walaupun tingkat daya saing setiap wilayah di Indonesia berbeda-beda (Gambar 1).

PROVINSI/ PROVINCE	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	111 756	113 490	112 666	116 384	121 263
2. Sumatera Utara	398 727	419 573	440 956	463 775	487 531
3. Sumatera Barat	125 941	133 341	140 719	148 134	155 964
4. Riau	436 188	447 987	448 992	458 997	471 420
5. Jambi	111 766	119 991	125 037	130 501	136 557
6. Sumatera Selatan	232 175	243 298	254 045	266 854	281 544
7. Bengkulu	34 326	36 207	38 066	40 080	42 080
8. Lampung	180 620	189 797	199 537	209 814	220 657
9. Kepulauan Bangka Belitung	42 191	44 159	45 962	47 851	50 008
10. Kepulauan Riau	137 264	146 325	155 131	162 924	166 198
Sumatera	1 810 953	1 894 170	1 961 112	2 045 315	2 133 223
11. DKI Jakarta	1 296 695	1 373 389	1 454 564	1 540 078	1 635 856
12. Jawa Barat	1 093 544	1 149 216	1 207 232	1 275 528	1 342 953
13. Jawa Tengah	726 655	764 959	806 765	849 313	894 050
14. DI Yogyakarta	75 627	79 536	83 474	87 688	92 301
15. Jawa Timur	1 192 790	1 262 684	1 331 376	1 405 561	1 482 148
16. Banten	331 099	349 351	368 377	387 824	409 960
Jawa	4 716 410	4 979 136	5 251 789	5 545 993	5 857 268
17. Bali	114 104	121 788	129 127	137 286	144 964
18. Nusa Tenggara Barat	69 767	73 373	89 338	94 538	94 645
19. Nusa Tenggara Timur	51 505	54 108	56 771	59 705	62 788
Bali & Nusa Tenggara	235 375	249 269	275 235	291 529	302 397
20. Kalimantan Barat	101 980	107 115	112 347	118 193	124 307
21. Kalimantan Tengah	69 411	73 725	78 891	83 909	89 565
22. Kalimantan Selatan	101 851	106 779	110 863	115 738	121 864
23. Kalimantan Timur	438 533	446 029	440 676	439 088	452 847
24. Kalimantan Utara	44 092	47 696	49 316	51 165	54 535
Kalimantan	755 866	781 344	792 093	808 093	843 118
25. Sulawesi Utara	62 422	66 361	70 425	74 771	79 495
26. Sulawesi Tengah	68 219	71 678	82 787	91 053	97 552
27. Sulawesi Selatan	217 589	233 988	250 803	269 423	288 909
28. Sulawesi Tenggara	64 269	68 292	72 993	77 748	83 038
29. Gorontalo	19 368	20 776	22 069	23 508	25 093
30. Sulawesi Barat	22 227	24 196	25 964	27 525	29 362
Sulawesi	454 095	485 290	525 042	564 027	603 449
31. Maluku	22 101	23 568	24 859	26 284	27 812
32. Maluku Utara	18 209	19 209	20 380	21 557	23 211
33. Papua Barat	47 694	50 260	52 346	54 711	56 907
34. Papua	117 119	121 391	130 312	142 221	148 824
Maluku & Papua	205 123	214 428	227 898	244 773	256 753
JML 34 PROV./TOT. OF 34 PROV.	8 177 822	8 603 636	9 033 169	9 499 730	9 996 207
INDONESIA (PDB)/(GDP)	8 156 498	8 564 867	8 982 517	9 434 632	9 912 749

Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Tahun 2013-2017 (Sumber: Badan Pusat Statistika 2018)

Penentuan peringkat daya saing wilayah dapat dilakukan berdasarkan faktor input seperti: perekonomian wilayah, sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, lingkungan usaha produktif, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, serta perbankan dan lembaga keuangan, sedangkan faktor output seperti: produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita dan tingkat kesempatan kerja. Berdasarkan hasil peringkat daya saing wilayah di Indonesia pada tahun 2015-2016 menunjukkan tiga provinsi di Indonesia yang masuk dalam kelompok peringkat teratas, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah, sementara daya saing wilayah terendah terdapat pada provinsi Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daya saing wilayah di Indonesia sangat berbeda (Gambar 2) (PPSK BI dan LP3E FE Unpad 2008).

Faktor input dinilai berdasarkan keunggulan dan kelemahan daya saing wilayah yang dimiliki pada masing-masing provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk dan angkatan kerja, rasio ketergantungan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, tenaga kerja, lingkungan usaha produktif yang berkaitan dengan Perda menjadi keunggulan bagi setiap provinsi di Indonesia. Keunggulan dalam infrastruktur, sumberdaya alam, perbankan dan lembaga keuangan menjadi faktor pendukung peningkatan produktivitas perekonomian pada setiap provinsi di Indonesia. Kelemahan perekonomian wilayah di Indonesia berkaitan dengan rendahnya total pengeluaran pemerintah dibandingkan dengan PDRB.

Peringkat		Provinsi	Skor	Peringkat		Provinsi	Skor
2015	2016			2015	2016		
1	1	DKI Jakarta	3,201	19	17	Kalimantan Barat	-0,280
2	2	Jawa Timur	2,082	25	18	Lampung	-0,306
5	3	Jawa Tengah	1,464	26	19	NTB	-0,336
4	4	Jawa Barat	1,331	30	20	Bangka Belitung	-0,434
3	5	Kalimantan Timur & Kalimantan Utara	0,996	27	21	Gorontalo	-0,447
10	6	Sulawesi Selatan	0,966	17	22	Sumatera Selatan	-0,449
12	7	Bali	0,670	22	23	Sumatera Barat	-0,488
8	8	Kalimantan Selatan	0,648	15	24	Sumatera Utara	-0,558
11	9	Sulawesi Utara	0,549	23	25	Bengkulu	-0,651
6	10	DI Yogyakarta	0,397	24	26	Aceh	-0,691
9	11	Banten	0,258	28	27	Papua Barat	-0,729
7	12	Kepulauan Riau	0,093	27	28	Jambi	-0,767
13	13	Kalimantan Tengah	-0,002	29	29	Maluku	-0,848
20	14	Sulawesi Tengah	-0,077	18	30	Sulawesi Barat	-0,993
16	15	Riau	-0,184	31	31	Maluku Utara	-1,306
21	16	Sulawesi Tenggara	-0,195	32	32	NTT	-1,393
				33	33	Papua	-1,519

Gambar 2. Peringkat Daya Saing Provinsi Indonesia Tahun 2015-2016
(Sumber: ACI 2016 dalam Raimanu, 2016)

Strategi pengembangan daya saing perkotaan di Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi faktor input. Perbedaan peran dan fungsi perkotaan di Indonesia dapat menimbulkan kompetisi maupun kolaborasi antar kawasan perkotaan yang bersifat dinamis dan bertumpu pada inovasi strategi. Pertimbangan strategi pengembangan perkotaan yang berdaya saing perlu dilakukan secara spesialisasi wilayah dengan terbentuknya *resources endowment*, keunggulan dan kelemahan daya saing wilayah serta konsep perkotaan yang ingin dikembangkan. Strategi pengembangan perkotaan yang dapat diterapkan di wilayah Indonesia, yaitu: upaya diversifikasi dan pengembangan sektor basis, peningkatan lingkungan usaha, pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia; inovasi pengetahuan ekonomi dan pemanfaatan ICT; optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif; pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan lingkungan usaha produktif (Porter 2000).

Hubungan antara perencanaan ruang kota dari pembangunan wilayah kota dan tindakan sosial selalu satu menjadi pusat pembahasan dalam perencanaan urbanisasi. Perencanaan pembangunan

wilayah kota adalah perencanaan pembangunan untuk ruang ekonomi, sosial, budaya dan kebijakan sosial (Gottdiener 1997). Kegiatan perencanaan pembangunan wilayah kota untuk ruang kota bertujuan untuk memastikan secara optimal pelaksanaan dari fungsi ruang kota tersebut dengan menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat yang menjadikan pengaruh sikap mereka terhadap lingkungan kota. Pengetahuan mengenai pembahasan wilayah persepsi dan berhubungan terhadap wilayah telah mengakar dalam Investigasi Kevin Lynch, yaitu teori *mental map*, teori Space Syntax dalam analisis geometri dan pengetahuan geografi (Lynch, 1960; Casey and Wright 2008).

Pemetaan penduduk (*mental map*) adalah sarana pengamatan (instrumen) yang digunakan secara visualisasi untuk pemetaan yang berbeda baik individu ataupun kelompok dengan memiliki karakteristik spesifik untuk menggambarkan suatu wilayah melalui aktivitas masyarakat (Tversky 1992, p.131-138). Melalui *mental map*, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan untuk melakukan urbanisasi dengan identitas wilayah yang lebih kolektif dan memahami fungsi umum dari wilayah perkotaan tertentu secara spesifik yang mempunyai peranan penting dalam menarik keputusan mengenai manajemen ruang kota (Gertner 2011, p.112-131.) dan dapat membantu dalam penilaian untuk wilayah yang menarik (*topophile*), wilayah yang ditolak (*topophobe*) atau wilayah yang netral (Ianos 2004). Gambaran dari *mental map* tidak mempunyai nilai yang sederhana tetapi gambaran *mental map* berhubungan dengan sebuah konsep yang lebih luas (*space management philosophy*) yang menghubungkan antara ukuran fisik dan kegiatan manusia menyebabkan daya gravitasi untuk masyarakat kota (Holmén 2017, p. 46-74.).

Pengamat WSA dari benua Eropa mengembangkan sebuah sarana dengan menggunakan metode khusus yang didasarkan pada perencanaan *mental map*, yaitu "*Identity and Branding*" yang bertujuan untuk mengembangkan visi, misi dan tujuan pada pembangunan wilayah kota tersebut. Perencanaan *mental map* merupakan bagian spesifik dari tahapan pengamatan mengenai identitas suatu daerah yang ada dengan menggunakan peta topografi sebagai referensi area dalam skala dan gambar untuk membantu orientasi pada peta topografi. Dalam penggambaran dan ukuran *mental map* seperti jenis garis dan simbol yang berbeda dapat menghasilkan jawaban setiap pertanyaan masyarakat dalam penggunaan untuk pembangunan *mental map* yang berbeda (Sharpe and Wallock 1987, p.1-16). Perbedaan antara aspek dari pembangunan wilayah, yaitu pemahaman terhadap indikator sosial yang dipengaruhi oleh pergerakan urbanisasi dan saling berhubungan antara pergerakan urbanisasi dengan pembangunan wilayah sehingga menyebabkan *gravitasi* untuk masyarakat (geometri urbanisasi dan pembangunan wilayah) (Haryanto 2006, p.21-25).

Pada dasarnya pengembangan wilayah mempelajari proses pembangunan dalam lingkup wilayah dan tata ruang. Pentingnya dimensi spasial dalam pembangunan wilayah menyangkut pada beberapa persoalan utama, yaitu persoalan penentuan tata pandan ekonomi (*economic landscape*), subsistem spasial dari ekonomi nasional, analisis interaksi antar daerah, kebijakan regional (Webber 1964). Studi ilmu yang dilakukan dalam pemahaman *mental map* dan *gravitasi* dalam perencanaan pembangunan wilayah kota untuk ruang kota, yaitu kota Pekanbaru, Pontianak dan Kericin.

Kota Pekanbaru mempunyai beberapa elemen *mental map* yang menonjol dan mudah dikenali dengan jarak penglihatan (*visibility*) pada bagian yang memiliki daya tarik (*gravitasi*) bangunan sekitarnya dengan menggunakan skala sebagai penghubungan nilai sejarah dan intensitas penggunaan umum untuk jalur sirkulasi; kondisi fisik geografis dengan skala yang berbeda terhadap keragaman bangunan, kesatuan ruang kota, nilai sejarah dan intensitas penggunaan untuk batas wilayah dan bagian wilayah kota; keunikan skala yang digunakan untuk nilai sejarah dan intensitas penggunaan *visibility* pada bagian yang memiliki *gravitasi* terhadap letak yang strategis dan kesegaran untuk melihat aktivitas pusat kota; keunikan skala yang tinggi dengan letak strategis signifikan terhadap nilai sejarah yang bersymbolisme dan sebagai orientasi untuk mercu tanda (Wahyuni dan Munandar 2007).

Perencanaan dan pengembangan kawasan wisata budaya di tepi sungai Kapuas kota Pontianak menggunakan konsep suatu koridor wisata yang memberikan gambaran tentang sejarah dan budaya lokal terhadap keberadaan sungai Kapuas (Gunn 1994). Penilaian tapak sungai kapus sebagai kawasan budaya dalam aspek sosial budaya mencapai 91% dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata budaya (Umar, Nurisjah, dan Avenzora 2010). Menurut Inskeep (1991) melalui pengembangan budaya lokal yang ada dengan menghubungkan keberadaan budaya terhadap lingkungan (*vernacular culture and landscape*) yang akan menambah objek dan atraksi budaya lokal dalam perencanaan pengembangan wilayah kota untuk ruang kota di Pontianak. Melalui upaya pelestarian obyek dan atraksi wisata budaya dapat memberikan kenyamanan visual dalam berwisata untuk ruang kota dengan keberadaan sungai Kapuas secara potensial (Gambar 3).



Gambar 3. Peta Deliniasi Hasil Overlay (sumber: Umar, Nurisjah dan Avenzora 2010)

Konsep dasar pengembangan dan pengelolaan ruang kota kawasan objek wisata danau Kerinci (KOWDK) adalah menciptakan KOWDK sebagai pusat rekreasi untuk masyarakat Kerinci dengan mempertahankan kelestarian alami lingkungan dan mengoptimalkan potensi budaya, pertanian dan perikanan yang dilengkapi dengan sarana penunjang wisata dengan penyesuaian tapak KOWDK. KOWDK melibatkan peran masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia (Miandy dan Arifin, 2007). Perencanaan pengembangan ruang kota untuk tapak di KOWDK, yaitu pengaturan ruang untuk membatasi aktivitas rekreasi dengan keterbatasan sumberdaya alam dengan memperhatikan kaidah perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Kerinci. Lokasi rekreasi darat dapat dialokasikan sebagai kegiatan rekreasi yang intensif, semi intensif dan pasif yang dapat dikembangkan pada jarak 45 meter dari badan air danau (Gambar 4) (Douglass 1982).



Gambar 4. Konsep Sirkulasi Kawasan Objek Wisata Danau Kerinci

Kesimpulan

Peningkatan daya saing wilayah dapat dilakukan melalui pengembangan potensi unggul setiap wilayah, baik secara komparatif dan kompetitif yang difokuskan pada sektor ekonomi dalam pergerakan ekonomi wilayah dengan memberikan efek ganda terhadap perekonomian wilayah. Melalui *mental map*, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan untuk melakukan urbanisasi dengan identitas wilayah yang lebih kolektif dan memahami fungsi umum dari wilayah perkotaan tertentu secara spesifik.

Referensi

- Adisasmita, R. 2010. *Pembangunan Kota Optimum, Efisien Dan Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ashworth, G. 2009. *Selling The City: Marketing Approaches In Public Sector Urban Planning*. London: Belhaven Press.
- Asia Competitiveness Institute (ACI), (2016). *Competitiveness Analysis of ASEAN-10 Countries and Indonesian Provinces*. Singapore: LKY
- Badan Pusat Statistika. 2018. *Produk Domesti Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut lapangan Usaha*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Casey, S. and Wright, J. 2008. *Mental maps in the era of two world wars*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Douglass, R. W. 1982. *Forest Recreation*. New York: Pergamon Press. New.
- Gardiner, B. 2003. "Regional Competitiveness Indicators for Europe–Audit, Database Construction and Analysis." *Regional Studies Association International Conference*.
- Gertner, D. 2011. A tentative meta-analysis of the "place marketing" and "place branding" literature. *Journal of Brand Management* 19(2):112–131.
- Gottdiener, M. 1997. *The Social Production of Urban Space*. Texas: The University of Texas Press
- Hariyanto dan Tukidi. 2007. "Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia Di Era Otonomi Daerah" *Jurnal Geografi* 4(1):1-10.
- Haryanto, A. 2006. Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota (Studi Kasus: Kabupaten Subang). *Jurnal PWK Unisba* 21 – 51.
- Ianoş, I. 2004. *Dinamica urbana; aplicatii la orasul si sistemul urban românesc*. Bucuresti: Editura Tehnica.
- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning. An Integrated and Sustainable Development Approach*. VNR Tourism And Commercial Recreation Series. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Lloyd, P.E and P. Dicken. 1977. *Location in Space: A Theoretical Approach to Economic Geography*. London: Harper and Row Publishers.
- Lynch, K. 1960. *The Image of The City*. Mass. Cambridge: M. I. T. Press.
- Miady, F dan H.S.Arifin. 2007. Rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Lanskap Kawasan Obyek Wisata Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi *Jurnal Lanskap Indonesia* 3(1):46-52.
- Porteous, J.D. 1977. *Environment and Behaviour Addison-Wesley Publishing*. Philippines: Company, Inc.
- Porter, M.E. 2000. "Location, Competition, and Economic Development" *Local Clusters in a Global Economy, Economic Development Quarterly* 14(1):15 – 34.

- PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE Unpad . 2008. *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rustiadi, E., S Saefulhakim, dan D.R. Panuju. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Santoso, E.B. 2009. "Daya Saing Kota-Kota Besar di Indonesia" *Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS*. Surabaya. p.1-6
- Santoso, E.B. 2010. "Strategi Pengembangan Perkotaan di Wilayah Gerbangkertosusila Berdasarkan Pendekatan Daya Saing Wilayah" *Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS*. Surabaya. p.1-13
- Sharpe, W. and Wallock, L. 1987. *From "Great Town" to "Non-place Urban Realm": Reading the Modern City*. In: *W. Sharpe and L. Wallock. Visions of the Modern City*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, p.1-16.
- Simonds, J.O. 1983. *Landscape Architecture*. New York: Mc Graw-Hill Book Co.
- Staley, S.R. 1999. "The Sprawling of America: In Defence of the Dynamic City" *Reason Public Policy Institute*. Los Angeles, California.
- Tarigan, R. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tversky, B. 1992. Distortions in Cognitive Maps. *Journal of Geoforum* 23(2):131–138.
- Umar, F., Siti Nurisjah, Ricky Avenzora. 2010. "Identifikasi Dan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Koridor Sungai Kapuas-Kota Pontianak" *Jurnal Lanskap Indonesia* 2(1):1-6.
- Wahyuni, E dan Aris Munandar. 2010. "Studi Elemen Mental Map Lanskap Kota Pekanbaru" *Jurnal Lanskap Indonesia* 2(1):53-58.
- Webber, M. 1964. The Urban Place and Nonplace Urban Realm. In: M. Webber et al. *Explorations into Urban Structure*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. p.79-153.
- Webster, D. and L. Muller. 2000. Urban Competitiveness Assessment in Developing Country Urban Regions: The Road Forward. *Paper prepared for Urban Group, INFUD*. Washington, DC: The World Bank.
- Yunus, H.S. 2006. *Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Junkspace: Pasal Kematian Ruang dalam Ihwal Toko *Online* versus Toko *Offline*

Faudyan Eka Satria, Program Sarjana Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah
Mada. E-Mail: fesdio@gmail.com

Abstrak

Dentuman level penggunaan internet tempo hari ini menjadi poin mendasar atas fenomena elektronisasi aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk dalam hal ini berbelanja. Kalau dahulu manusia harus menembus padatnya arus jalan demi sampai ke pasar, kini, mereka dapat meminimalisir pergerakannya untuk merengkuh barang yang dikehendaknya cukup dengan memanfaatkan platform toko *online*. Kemudahan ini kian didukung dengan hadirnya fitur pembayaran elektronik serta layanan jasa kurir yang mampu mempertemukan kepentingan penjual dan pembeli tanpa harus terikat ruang. Internet dan kekuatannya untuk mengefisiensi, syahdan, mesti diakui semakin memanjakan manusia dalam bertransaksi. Tetapi jika mau lebih cermat, aktivitas berbelanja melalui toko *online* akan membawa kita pada fenomena *junkspace*. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Koolhaas (2001), *junkspace* adalah ruang atau bangunan yang hadir di lingkungan kita, namun memiliki fungsi yang tidak maksimal –bahkan boleh dikatakan nihil. Fenomena *junkspace* dapat menimpa suatu ruang atau bangunan seiring dengan keberadaan teknologi mutakhir yang menggeser fungsi ruang atau bangunan tersebut. Tidak berlebihan jika Koolhaas kemudian meramal, ke depan, ruang-ruang yang berdiam di sekitar kita hanya akan menjadi repertoar etalase. Di sini, efisiensi transaksi yang ditawarkan toko *online* tak ayal boleh didefinisikan sebagai detik-detik kematian toko *offline* –misalnya pasar atau minimarket. Untuk itulah penelitian ini akan mencoba mendedah lebih dalam perihal reproduksi konsep ruang yang menjadi dalang di balik kemunculan *junkspace*. Reproduksi ini pada taraf teraktual akan berimbas pada pemahaman manusia akan marwah “citra” dalam konstelasi relasi sosialnya di era digital.

Kata Kunci: Internet, *Junkspace*, Ruang, Teknologi, Toko.

Pendahuluan

Sebermulaanya, internet hanya dipandang secara makroskopis sebagai penyedia informasi serta layanan koneksi komunikasi antarmanusia. Syahdan, manakala internet kian bertumbuh hingga mampu digenggam setiap orang dalam gawai-gawainya, proyeksi akan fungsi internet pun berkembang seturut. Internet tempo hari ini tidak hanya berasosiasi dengan media sosial atau search engine, tetapi ia juga menjadi tonggak lahirnya apa yang kita sebut dengan toko *online*.

Baru-baru ini, ShopBack, sebuah platform toko *online*, melakukan riset terhadap 1.000 warganet terkait kehadiran toko *online*. Hasilnya, didapat data bahwa sebanyak 70,2% responden mengaku keberadaan toko *online* menjadi determinan utama atas preferensi mereka untuk berbelanja di toko *online* dibandingkan di toko *offline* (grid.id, 2018). Soalan ini, analisa katadata.co.id (2018) menyebut jika kemenarikan itu merupakan imbas dari pengalaman baru yang diperoleh para konsumen –ketika sebelumnya harus ke pasar untuk membeli suatu barang (*offline*), kini mereka hanya cukup menjangkaunya lewat situs toko *online*. Di lain sudut, merunut pada data ShopBack berikutnya, dominasi toko *online* tidak terlepas dari jua dari pengakuan 83,1% responden yang berkehendak ke toko *offline* hanya untuk melihat barang –untuk kemudian membelinya lewat platform *online* lantaran adanya promo yang selalu ditawarkan di sana (grid.id, 2018).

Lantaran itu, pergeseran gaya hidup digital masyarakat memang akan menjadi bibit yang menjanjikan bagi keberlanjutan bisnis *e-commerce* di masa mendatang. Tapi kemenangan ini tentu

akan menjadi distopia bagi keberadaan bangunan-bangunan fisik yang direnggut posisinya oleh toko *online*. Kontestasi eksistensi ruang inilah yang kemudian mengantarkan kita pada terminologi *junkspace* yang diperkenalkan Rem Koolhaas, yang menurutnya telah dominan terlihat pada banyak kota di dunia. *Junkspace* merupakan ruang yang mengharuskan kita senantiasa bergerak di antara barang dagangan. Ruang-ruang ini didesain untuk membuat bingung sehingga manusia harus selalu bergerak mencari kebutuhan yang telah berubah menjadi sekedar keinginan. Pada level termutakhir, *junkspace* akan mengubah wajah kota menjadi etalase untuk memenuhi syahwat semu konsumerisme (Koolhaas, dalam Maharika, 2018). Dalam konteks tulisan ini, toko *online* menjadi dalang dalam jejak-jejak kematian ruang yang tengah melanda bangunan toko *offline*. Lantaran kemenarikan konsep transaksi yang ditawarkan toko *online*, masyarakat lantas secara tak langsung turut terlibat dalam pembunuhan fungsi bangunan toko *offline* yang sempat dirayakan kehadirannya. Tulisan ini lantas secara khusus akan mempertajam konsep *Junkspace* yang dibawa Rem Koolhaas dengan mendedah kasus kontestasi ruang antara toko *online* versus toko *offline*.

Kajian Pustaka

Apa yang disebut *junkspace* oleh Rem Koolhaas, seorang arsitek kelahiran Belanda, adalah bermula dari esainya yang juga berjudul *Junkspace* (2001). Konseptualisasi Koolhaas ini sebetulnya ditujukan sebagai perspektif baru teruntuk ilmu arsitektur dalam memandang pengelolaan dan desain ruang di era modern. *Junkspace*, hemat Koolhaas, adalah tipologi ruang yang termanifestasikan pada bangunan seperti mal atau *big box retail stores* –misalnya minimarket. Pada dasarnya, *junkspace* adalah struktur banal yang didirikan secara cepat dan berdasar pada logika produksi massal dan standarisasi tren global –seperti halnya *junk food*. Seiring dengan pesatnya teknologi untuk mengkonstruksi *junkspace-junkspace* baru, di sini, Koolhaas lebih dalam menyiratkan ada indikasi *hyperdevelopment* hingga menumbuhkan bangunan-bangunan yang kelak hanya akan menjadi sampah atau *junkspace*. Pendek kata, *junkspace* adalah produk modernisme arsitektur yang mengeksploitasi pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan lingkungan surealis.

Namun tulisan Koolhaas tentang *junkspace* harus diakui belum memuaskan kita akan analisa dari *junkspace* itu sendiri. Maksud saya, di sini, Koolhaas lebih banyak menarasikan bagaimana praktik riil *junkspace* saat ini berkembang di sekitar kita. Koolhaas belum mampu mengkomprehensifkan pemaparan mengapa *junkspace* dapat mengganggu stabilitas fungsi ruang di tengah gempuran teknologi yang ia sebut mampu membahayakan ruang itu sendiri. Poin yang ia tekankan di tulisannya adalah modernitas –berikut dengan implikasi yang dibawanya yakni perkembangan pengetahuan dan teknologi- merupakan biang “penyimpangan” standar arsitektur era klasik –yang memiliki pengaruh pada penciptaan kesia-siaan fungsi sebuah ruang atau bangunan. Menurutnya, ini tidak terlepas dari pragmatisme konstruksi bangunan yang hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan ekonomis. Kematian ruang lantaran pragmatisme visi konstruksi semacam ini membuat Koolhaas menarik kembali kasus yang terjadi pada bangunan piramid. Dalam analisa Koolhaas, piramid merupakan sebetulnya kreasi termutakhir masyarakat Mesir kala itu dalam mengejawantahkan teknologi konstruksi bangunan. Namun, yang ia sayangkan, keterbatasan visi bangunan yang hanya ditujukan untuk pengagungan jasad sang raja yang telah wafat, pada ujungnya menghempas fungsi piramid menjadi sekedar *junkspace*. Inilah yang menyebabkan Koolhaas menuliskan: "*Continuity is the essence of Junkspace; it exploits any invention.*"

Baiklah, secara normatif, apa yang dikatakan Koolhaas tentang piramid memang telah memenuhi syarat agar bangunan-bangunan tersebut layak disebut sebagai *junkspace*. Bahwa impotensi ruang niscaya terjadi kalau-kalau ada keterbatasan dalam membangun visi ruang tersebut. Namun sayangnya sebagaimana yang kita lihat, piramid justru bereproduksi sebagai destinasi pariwisata (Rady, 2002). Reproduksi ruang yang dialami oleh piramid menandakan bahwa fenomena *junkspace* tidak semata-mata dimainkan oleh kontinuitas visi ruang itu sendiri. Dalam arti, ada peran

manusia untuk merekonstruksi pemaknaan atas sebuah ruang sehingga eksistensi ruang tersebut tidak serta merta mati –ia hanya mengalami reorientasi.

Perluasan konsepsi Koolhaas atas junkspace tersebut akan menjadi menarik jika kita mengaplikasikannya pada kasus kontestasi toko *online* versus toko *offline*. Sebab, sejumlah dugaan bernada pesimisme muncul perihal keberlanjutan eksistensi toko *online*, tepat setelah pertumbuhan penggunaan internet kian memupuk euforia toko *online* di tengah masyarakat. Dugaan ini utamanya mengarah pada fenomena efisiensi prosedur dalam mendapatkan barang yang dibawa toko *online*, yang membuat toko *offline* berada dalam ancaman serius (Sari, dalam Hargiyanti, 2016; Iriyaningsih, 2016). Padahal, tutur Zukin (dalam Epifania, 2011), manusia baru saja merayakan masa-masanya dalam menjadikan kota sebagai lanskap konsumsi visual lewat tren pembangunan gedung-gedung. Namun dalam tempo waktu yang tak berselang lama, lahir fenomena digitalisasi aktivitas yang berjalan beriringan dengan membludaknya penggunaan internet, sehingga artefak-artefak perayaan tersebut menjadi terbelengkalai. Demikian halnya yang terjadi pada bangunan-bangunan toko *offline* yang kini mulai terancam eksistensinya lantaran fungsinya sebagai ruang transaksi lambat-lambat direbut oleh toko *online*. Lewat kasus ini, karenanya, saya akan mencoba untuk menguak pemaknaan ruang secara teoritis yang menjadikan toko *offline* mengalami detik-detik kematian fungsinya.

Metode Penelitian

Dengan berangkat sebagai penelitian deskriptif kualitatif, saya akan memfokuskan penelitian ini untuk mengembangkan diskursus konsep Junkspace yaitu dengan mengumpulkan beberapa konsep terkait filsafat teknologi, sosiologi ruang, dan antropologi visual untuk kemudian saya analisis. Maka dari itu, pembahasan tentang junkspace yang saya bawa akan lebih banyak berangkat dari kajian keruangan berikut dengan implikasi yang dibawanya dengan data yang saya ambilkan dari hasil riset-riset sebelumnya yang relevan. Kajian teoritis ini harap-harap dapat menjadi basis untuk memahami proses kematian ruang yang melanda toko *offline* di tengah pertumbuhan toko *online*.

Hasil dan Pembahasan

Menarik bagi kita untuk memulai pembahasan tentang konsepsi ruang dengan mengupas profil toko offline semisal pasar. Riwayat pasar diawali pada zaman prasejarah, ketika di dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan sistem barter –suatu sistem yang diterapkan antara dua individu dengan cara menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya. Proses penukaran barang tersebut menimbulkan masalah akan tempat di mana tempat sendiri berkaitan dengan jarak dan waktu tempuh. Maka muncullah ide untuk memudahkan memindahkan barang-barang yang tidak jauh dari lingkungan kediaman mereka sehingga terbentuklah sebuah tempat pertukaran barang-barang yang disebut pasar (Bastian dan Yusuf, 2017). Hingga berjalannya waktu ke detik ini, merujuk pada Schulz (1977), secara umum, pasar jamak dimaksudkan untuk mewadahi fungsi komersial sekaligus ruang pengembangan nilai sosial.

Berbicara soal poin pengamatan Schulz yang disebut terakhir, setiap ruang pengembangan nilai sosial pastilah dibentuk oleh tindakan sosial yang berlangsung secara kolektif. Pada tahap berikutnya, tindakan sosiallah yang memberi “makna” pada bagaimana suatu ruang spasial dikonsepsikan oleh mereka yang mengisi dan menghidupkan ruang tersebut (Nuzzella, 2017). Dengan demikian, kohesi sosial atas suatu ruang ditentukan oleh derajat kompetensi dan tingkat kinerja atas pemakaian ruang (fisik atau material) –termasuk yang terjadi pada pasar atau sebutlah toko *offline* dalam tulisan ini. Mengutip yang ditulis Pamungkas (2016), praktik spasial semacam ini mafhum dipahami sebagai “ruang yang hidup” atau *lived space*. Lebih lanjut, konsep *lived space*, menurut Henri Lefebvre, secara langsung berkaitan dengan berbagai bentuk pencitraan serta simbol yang terkait dengannya. Hal ini termasuk bagaimana para penghuni ruang atau orang-orang yang menggunakannya saling

berinteraksi melalui praktik dan bentuk visualisasi di dalam suatu ruang. Dengan kata lain, konsepsi atas ruang muncul berdasarkan berbagai pengalaman nyata yang dialami oleh setiap orang sebagai sebab-akibat dari suatu hubungan yang bersifat dialektis antara praktik spasial dan representasi ruang. Ruang menjadi sesuatu yang secara khusus dipersepsikan oleh individu, kelompok, atau suatu masyarakat (dalam Pamungkas, 2016).

Hatta, seperti yang dipertajam Urry (2017), ruang –yang menjadi anasir dari “tempat”- terlalu naif untuk sekadar diperuntukkan sebagai “objek yang dilihat” –baik secara fisik maupun fungsi fitrahnya- sebagaimana yang terbingkai dalam rezim “penglihatan.” Tapi ruang diterima melalui beragam perasaan, yang menurut Tjahjono (1999), akan membangkitkan kesan tertentu bagi warganya. Maka ruang pada hakikatnya melibatkan proses serangkaian relasi sosial yang terus meluas. Begitupun pada kasus keruangan yang ada dalam toko *offline* seperti pasar. Hasil riset Marlina et al (2015) di Bantul mengukuhkan bahwa pasar nyatanya juga berfungsi sebagai ruang perbincangan dan perluasan sosial. Implikasinya, intimitas yang terbangun antarsubjek di dalamnya, menjadikan pasar berhasil melampaui fungsinya sebagai ruang ekonomi; bahwa pasar adalah tempat terbangunnya *pareduluran* atau kekeluargaan. Inilah yang kemudian membawa pengajaran bahwa kita tidak hidup dalam sebuah ruang kosong –melainkan dipenuhi oleh makna-makna (Foucault, 2017). Bila kita tinjau dari pernyataan Goffman, dinamika tersebut juga tidak terlepas dari imbas bertumbuhnya konsep *personal front* dalam sebuah ruang di mana individu-individu di dalamnya beradu menampakkan citra dirinya secara langsung yang akhirnya menstimulasi mereka untuk saling mendapatkan informasi tentang lawan bicaranya (Simangunsong, 2010). Citra yang dihadirkan secara riil pada ruang fisik inilah yang kemudian membangun pengelolaan kesan masing-masing subjek, yang pada level selanjutnya menjadi benih relasi sosial yang lebih dalam.

Melangkah lebih jauh, kita dihadapkan pada kefenomenalan internet yang tak lagi berfungsi sebagai alat pertukaran informasi. Sebagai sebuah produk mampu mengkoneksikan manusia dari berbagai belahan dunia, internet bereproduksi menjadi ruang-ruang komunikasi baru. Meminjam komentar Maharika (2018), tersebut proses reteritorialisasi kapital dunia yang tidak kasat mata ke ruang kita, “ruang siap saji” yang menubuh dalam internet mengisyaratkan ada fenomena intervensi ruang global ke dalam konteks lokal. Walhasil, inilah yang kemudian membolehkan internet untuk mendigitalisasi aktivitas manusia hingga ke luar batas ruang nyata mereka, yang dalam konteks permasalahan ini, diwujudkan lewat hadirnya toko *online* –yang mampu menjamah seluruh lapisan tempat lagi masyarakat. Bagi Irmawati (2011), toko *online* bahkan menjadi pilihan terapik bagi masyarakat dalam melakukan proses jual beli –dibandingkan ketika mereka melakukannya melalui toko *offline*. Sebab, toko *online* –sebagai model *e-commerce*- mengizinkan segala layanan yang diinginkan oleh para pelanggan dapat segera ditindak lanjuti dengan secepat mungkin –sejalan dengan karakter internet yang memangkas keterbatasan waktu dan keberjarakan. Kasus ini membuat Manuel Castells (dalam Tjahjono, 1999) mengakui jua, jika gejala peniadaan batas wilayah yang berpokok pada kebangkitan masyarakat jaringan, mengakibatkan keberikatan konsep ruang –sebagai bagian dari “tempat”- menjadi usang. Hal inilah yang membuat Harvey berpendapat bahwa manusia seakan dipaksa untuk mengubah cara merepresentasikan dunia pada dirinya ketika mobilitas telah dibawa pada ujung-ujung ekstrem –yang membuat waktu dan ruang tampak secara literal terkompresi (dalam Urry, 2017). Menariknya, di tahun 1950 silam, Heidegger bahkan sudah mencium makadam pengerdilan jarak, waktu, dan ruang lewat fenomena instanisasi informasi yang pada saat itu dihadirkan radio dan televisi –yang berekses pada peniadaan jarak antara manusia dan benda (Zimmerman, dalam Urry, 2017).

Sampai di sini, kesuburan pertumbuhan toko *online*, harus diakui tidak terlepas dari proses pengotaan di era global –yang tak lain adalah imbas dari pengerdilan ruang yang dibawa teknologi internet. Internet –yang membawahi toko *online*- menawarkan karakter komunikasi simplistik nan menyeragamkan bagi seluruh masyarakat dunia. Di sini, konsep komunikasi dalam bertransaksi tidak

sekompleks dahulu lagi. Ruang yang betul-betul mempertemukan secara fisik, dapat digantikan dengan ruang virtual, karena sebagaimana karakter masyarakat kota, simplisitas dalam memenuhi tujuan komunikasilah yang utama. Ini dapat kita rujuk dari pernyataan George Simmel (dalam Prasetyo, 2013) lewat tulisannya, *Metropolis and the City*. Di situ, Simmel mengembangkan beberapa argumen yang lebih spesifik tentang karakter kota yang mengarah pada simplifikasi komunikasi manusia. Pertama, karena kekayaan dan keragaman seperangkat rangsangan di kota, manusia harus mengembangkan suatu sikap acuh tak acuh. Bagi Simmel, tanpa mengembangkan sikap semacam itu, orang-orang tidak akan bisa bertahan mengalami beragam peristiwa yang dipicu oleh tingginya kepadatan penduduk. Kedua, secara simultan, kota memaksakan pada individu suatu jenis kebebasan pribadi yang beragam. Dibandingkan dengan komunitas skala kecil, kota modern memberi ruang bagi setiap individu dan bagi pelbagai kebiasaan aneh yang terbentuk dari dalam dan dari luar dirinya. Ini adalah bentuk spasialitas kota besar yang memungkinkan pengembangan keunikan setiap individu yang ditaruh dalam keragaman kontak yang sangat luas. Ketiga, manakala spasialitas “kota” telah berwujud paripurna, sumber dan ekspresi rasionalitas dan kecerdasan bagi kota akan berbasis pada ekonomi uang. Uang dan kecerdasan menyediakan sebuah perilaku yang sangat penting bagi manusia dan benda. Uang menghasilkan sebuah perasaan dan sikap yang bertingkat. Jika kita maknai lebih dalam pada studi kasus tulisan ini, berkembangnya toko *online* secara eksponensial, adalah buah proses komunikasi dalam transaksi toko online yang terjebak pada pragmatisme materiil –baik pada pihak penjual pun pembeli. Orang tidak akan peduli dengan ruang dan bejibun subjek yang hadir di dalamnya, sebab potensi untuk mengintensifkan komunikasi antarsubjek telah dimatikan “pengotaan” ruang internet yang memang melahirkan kuantitas subjek yang kian meningkat –meski itu hanya bersifat imaji. Inilah yang membuat arah komunikasi manusia terbimbing pada visi “sebutuhnya saja.”

Melampaui pembahasan itu, merujuk pada hasil analisis Ridwan, et al (2018), dalam transaksi toko *online*, setidaknya ada tiga tahapan yang perlu dilewati para subjek yang terlibat di dalamnya. Pertama *presence* atau kehadiran yang merupakan aspek krusial berlangsungnya transaksi secara e-commerce untuk menghadirkan penjual dan pembeli dalam dunia belanja virtual –meskipun terbatas pada pertemuan fisik. Kedua, interkativitas. Maksudnya, ada penghubungan sejumlah aktivitas dalam beberapa tahapan. Berawal dalam pemesanan barang memanfaatkan situs jejaring sosial lalu mentransfer dana sesuai pemesanan dan penjual mengirimkan barang yang dipesan lalu pembeli atau pemesan mengkonfirmasi kembali ketika barang sudah sampai ke konsumen. Hal tersebut memperlihatkan proses komunikasi melalui transaksi secara *online*. Kedua poin itu pada akhirnya disempurnakan dengan berjalannya transaksi –yang dipresentasikan pada saat berlangsungnya proses komunikasi (Ridwan, 2018).

Perihal itu, melalui teori post-Marxist tentang waktu dan ruang, Giddens menyumbang pikiran bahwa pergerakan individu-individu melalui waktu dan ruang menjadi ditangkap melalui interpenetrasi kehadiran dan ketidakhadiran, yang dihasilkan dari lokasi tubuh manusia dan perubahan cara pertukaran dengan masyarakat yang lebih luas (dalam Urry, 2017). Dinamika soal keotentikan dalam ruang *cyber* ini kemudian mendapat tanggapan dari Hubert L. Dreyfus. Baginya, tubuh memberi informasi pada entitas yang tak tercerap seperti jiwa, sedangkan teknologi memberi informasi pada tubuh sebagai yang selalu berada dalam perspektif. Diskursus tentang kehadiran dan ketidakhadiran tubuh –yang selanjutnya ia beri terma *telepresence*- tersebut dalam hal ini memang tereduksi dalam ruang layar. Tapi dengan mediasi teknologi, realitas virtual ini justru menjadi nyata seturut dengan proses amplifikasi yang melampaui ruang dan waktu kebertubuhan (Hartanto, 2013). Kalau merujuk pada apa yang dikatakan Don Ihde, setiap entitas informatif dalam ruang teknologis internet merepresentasikan keberadaan dunia tubuh (*world of bodies*) baik itu manusia sebagai tubuh atau pun realitas sesungguhnya (Hartanto, 2013).

Berangkat dari pemahaman itu, platform bernama toko *online* pun –yang menjadi anasir dari media komunikasi di era internet- pada akhirnya akan memulangkan kita jua pada gagasan Piliang

(2001) tentang upaya untuk meredefinisikan apa yang disebut 'kebenaran' dalam masyarakat. Meski tidak semua citra yang ditampilkan dan dikomunikasikan di toko *online* merupakan representasi dari yang sesungguhnya –seperti barang jualan hingga identitas pembeli dan penjual, akan tetapi masyarakat terus digiring untuk mempercayainya sebagai sebuah kebenaran. Padahal, seperti yang diulas Goffman (dalam Simangunsong, 2010), ketika kita berinteraksi dengan individu lain di ruang virtual, maka bentuk interaksi yang terjadi bukan lagi interaksi tatap muka, tetapi interaksi yang sifatnya *hyper-interaction* –suatu fantasi interaksi yang hanya bergantung pada ekspektasi tentang lawan bicara kita mengingat terbunuhnya konstruksi citra secara nyata.

Yang selanjutnya terjadi adalah manipulasi informasi seperti itu justru menggiring masyarakat ke arah ketidakpastian (Piliang, 2001). Pernyataan ini bisa kita indikasikan dari pengamatan yang dinarasikan Suriyanto (2017) melalui risetnya. Pertama-tama, ia menggambarkan permasalahan tersebut lewat fenomena peningkatan daya saing pelapak-pelapak *online* yang berbanding lurus dengan kompetisi integritas para pelapak dalam menjaga kualitas barang dagangannya. Amatannya, calon konsumen hanya akan tertarik membelanjakan uangnya kepada pemilik toko *online* yang memiliki kualitas dan diakui oleh konsumen yang pernah bertransaksi dengan mereka atau yang malah telah menjadi pelanggan. Dengan mengangkat studi kasus yang ada pada situs bukalapak.com, Suriyanto kemudian mendeskripsikan adanya tanda dengan badge (emblem) sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh bukalapak.com dalam memediasi kepentingan transaksi pemilik lapak *online* maupun calon pembelinya. Sistemisasi penandaan ini memiliki ketentuan baku yang diterapkan untuk menghitung sejauh mana pelapak menunjukkan kualitasnya dengan hasil perhitungan yang ditunjukkan dengan *badge* (emblem). Keuntungan yang diperoleh konsumen dengan adanya *badge* (emblem) adalah mereka diberi pilihan yang banyak akan mana saja pemilik lapak yang berkualitas dengan cara memperhatikan tingkatan *badge* (emblem) yang melekat pada pelapak. Sedangkan bagi pelapak kehadiran *badge* (emblem) akan membawa mereka pada proses persaingan sehat dengan pelapak lain karena kualitas pada lapak mereka ditentukan oleh feedback yang diberikan oleh konsumen. Mereka juga secara langsung dipaksa oleh sistem yang diterapkan oleh bukalapak.com untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya. Semakin bermutu pelayanan akan semakin tinggi level *badge* (emblem) mereka (Suriyanto, 2017).

Dilihat dari perspektif Jean Baudrillard, fenomena tersebut membuat kita sepakat bilamana masyarakat ujungnya digiring pada simulasi konsumsi. Di sini, hemat Baudrillard, kita hidup dalam era di mana konsumsi masyarakat bergantung pada kesepakatan yang terangkum dalam bentuk kode atau tanda. Hiperrealitas komunikasi yang demikian, seperti yang dikatakan Piliang (2001), pantas hanya menciptakan massa yang tidak memperoleh apa-apa dari media, selain kehampaan. Massa telah disuguhkan berjuta tanda dan makna: namun, yang mereka dapati hanya tontonan permainan tanda-tanda. Massa yang dikepung oleh berjuta tanda, citra, dan informasi tidak mampu lagi menginternalisasikan dan menyublimasikan makna yang dihasilkannya. Piliang pun tidak mengelak, kegairahan dalam memperhebat penampilan tanda, meningkatkan daya sensualitas citra, eskalasi percepatan komunikasi, ekstasi permainan bebas tanda dan citraan. Segala sesuatu berkembang ke arah sifat superlatif, ke arah yang 'melampaui' –melampaui sistem representasi, melampaui dialektika (Piliang, 2001).

Kembali pada konteks "kematian" ruang toko *offline* lantaran berjebahnya toko *online*, penerasi teknologi digital ke dalam peradaban manusia telah membawa konsepsi ruang ke tingkat yang mutakhir. Di era posmodern ini, manusia telah meninggalkan mekanika zaman modern yang terstruktur dan empiris –yang menjadi elemen vital dari sebermulaanya konsep ruang- demi menggantinya dengan mesin intelegensia yang memproduksi ruang virtual sebagai "realitas baru." Dalam pemahaman Roland Barthes, kejadian era posmodern semacam ini adalah buntut lahirnya spesies baru tanda yang dinamakan sebagai *hypersign*, yang menyebabkan pemahaman manusia akan realitas terdekonstruksi oleh tanda yang tak mewujudkan nyata (Renaningtyas, 2013). Kalau mengulang

problematisasi yang sebelumnya telah disuguhkan Piliang tentang konsep 'kebenaran' dalam ruang virtual, saat berada dalam lingkaran hidup toko *online*, kita justru akan mengalami paradoks. Sebab, seperti yang disarikan dari Urry (2017), tatkala ruang toko *online* dikonstruksi sebagai ruang baru yang menjadikan kepercayaan (trust) sebagai loncatan kualitatif manusia untuk menutup ketidakhadirannya dalam ruang dan waktu yang nyata, justru menjadikan manusia terjebak pada permainan tanda yang begitu manipulatif. Lewat kasus virtualitas aktivitas di toko *online*, ada warna kegagalan manusia untuk mendefinisikan ruang baru mereka berikut dengan realitas yang dijanjikan di dalamnya –setelah sebelumnya mereka telah menggadaikan fungsi ruang yang nyata yang termaktub dalam bangunan semisal pasar. Meski demikian, mesti diakui jika optimalisasi toko online telah menghantarkan fungsionalisasi toko offline sebagai ruang transaksi ekonomi pada senjakalanya –hingga berujung sebagai *junkspace*.

Kesimpulan

Keengganan masyarakat untuk menggapai barang kebutuhannya dengan prosedur yang panjang –naik kendaraan, pergi melewati jalan, sampai di tempat tujuan- sebenarnya merupakan dampak dari adanya permainan tanda yang dihasilkan dalam ruang virtual. Masyarakat cukup percaya dengan tanda-tanda –semisal foto, video suatu barang- yang ditawarkan dalam ruang virtual. Inilah yang kemudian mendasari kokohnya kehadiran simplifikasi prosedur yang ditawarkan ruang virtual, yang mengarahkan manusia untuk dapat mengefisiensi gerak mereka. Dunia virtual mengajak masyarakat untuk memenuhi konsumsi tanda. Di dunia riil mungkin ini juga terjadi. Bahwa manusia mengonsumsi sesuatu karena sebelumnya telah mengonsumsi tanda yang telah dimanipulasi lewat media-media lain. Namun di sini, konteks konsumsi tanda dalam ruang virtual jauh lebih parah. Selain karena terpengaruh tanda yang termanipulasi dalam ruang virtual –dalam hal ini toko *online*), manusia tidak lagi peduli akan realitas barang itu yang sesungguhnya. Realitas absolut tergantikan oleh realitas imajiner. Ini tentu berbeda, ketika di dunia riil, manusia masih mampu untuk menganalisis realitas tersebut. Bila kita refleksikan pada kasus kontestasi ruang toko *online* versus toko *offline*, akan kita temukan bahwa simplisitas transaksi menjadi poin yang mendasari kekalahan toko *offline*, sehingga mengizinkan ruang-ruang virtual berupa toko *online* kian bertumbuh. Dalam arti yang lebih jauh, kematian fungsi “ruang” dalam bangunan toko *offline* sebetulnya merupakan buah dari transformasi transaksi citra yang sebelumnya melulu berupa fisik, berubah menjadi virtual –yang termanifestasikan dalam bentuk foto, video, ataupun teks yang diberikan subjek-subjek yang hidup dalam toko *online* tersebut.

Referensi

- Bastian, A., dan Yusuf, Y. 2017. *Fungsi Sosial Pasar Rakyat Bagi Masyarakat Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(1), h. 1-12.
- Epifania, P. 2011. *Gaya Hidup Kaum Urban Jakarta Dan Kecenderungan Peminatan Pariwisata Urban Di Jakarta: Sebuah Diskusi Awal*. Prosiding Seminar Nasional Scan#2 : 2011 Life Style And Architecture
- Foucault, M. 2017. *Tentang Ruang yang Lain (atau Heterotopia)* terj. Anton Novenanto. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 37-48.
- Grid.id. 2018. *Inilah Tren E-Commerce 2018 di Indonesia, Menurut Toko Online Ini*. <http://nextren.grid.id/read/0124363/inilah-tren-e-commerce-2018-di-indonesia-menurut-toko-online-ini?page=all>. Diakses tanggal 10 November 2018.

- Hargiyanti, H. E. 2016. *Identifikasi Aspek-Aspek Belanja Online Dengan Technology Acceptance Model*. Disertasi Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Hartanto, B. 2013. *Posfenomenologi Ruangcyber: Menelaah Realitas Visual Internet dan Konsep "Ruangcyber" dalam Ilmu Antropologi*. Jurnal Ultima Humaniora, Vol. I, Nomor 2 September 2013, h. 137-148.
- Iriyaningsih, A. R. 2016. *Online Shopping Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Melek Gadget*. Skripsi Universitas Gadjah Mada.
- Irmawati, D. *Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis*. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis Edisi Ke-VI, November 2011, h. 95-112.
- Katadata.co.id. 2018. *2022, Penjualan e-Commerce Indonesia Mencapai US\$ 16 Miliar*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/2022-penjualan-e-commerce-indonesia-mencapai-rp-16-miliar>. Diakses tanggal 10 November 2018.
- Koolhaas, R. 2002. *Junkspace*. *Obsolescence*, Vol. 100. (Oktober, 2002).
- Maharika, I. F. 2018. *Umranisme, Penjelajahan Niat Arsitektur untuk Membangun Adab*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nuzzella, S. 2017. *Kajian terhadap Skywalk Cihampelas sebagai Assemblage Pasar dan Wisata dalam Perspektif Ruang*. Tesis Institut Teknologi Bandung.
- Pamungkas, A. S. 2016. *Produksi Ruang dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henri Lefebvre*. <https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre>. Diakses tanggal 9 November 2018.
- Piliang, Y. A. 2001. *Posmodernisme dan Ekstasi Komunikasi*. Jurnal Mediator. Vol. 2 No. 2, 2001, h. 165-176.
- Prasetyo, H. 2013. *Sociology of Space: Sebuah Bentangan Teoritik*. Jurnal Sejarah dan Budaya VII Nomor 2, Desember 2013, h. 63-78.
- Rady, A. 2002. *Tourism and Sustainable Development in Egypt*. http://planbleu.org/sites/default/files/publications/livreblanc_egy.pdf. Diakses tanggal 13 November 2018.
- Renaningtyas, L. 2013. *Ruang Virtual dan Ruang Realitas*. DGI Indonesia, 2013.
- Ridwan, H., dkk. 2018. *Komunikasi Digital pada Perubahan Budaya Masyarakat E-Commerce dalam Pendekatan Jean Baudrillard*. Jurnal Riset Komunikasi Vol. 1 No. 1 Februari 2018, h. 99-108.
- Simangunsong, B. A. 2010. *Konstruksi Diri dan Pengelolaan Kesan pada Ruang Riil dan Ruang Virtual*. Jurnal Vol. 1, No. 1, Juli 2010, h. 26-40.
- Suriyanto, A. D. *Komunikasi Tanda Badge (Emblem) Antara Konsumen dan Pemilik Toko Online pada Marketplace*. Jurnal Komunikasi, Volume VIII Nomor 1, Maret 2017, h. 49-55.
- Tjahjono, G. 1999. *Peran Arsitektur dan Antropologi dalam Tata Ruang Kota Indonesia Abad ke-21*. Jurnal Antropologi Indonesia Vol. 59, 1999, h. 80-94
- Urry, J. 2017. *Sosiologi Ruang dan Tempat* terj. Anton Novenanto. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 17-35.

Konsep Kota Layak Anak di Indonesia

Nadya Fatrah Balqis, Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Lanskep Teknik Lingkungan, Universitas Trisakti . E-Mail: nfbalqis@yahoo.com

Abstrak

Kota layak anak adalah suatu langkah untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak, yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak. Di Indonesia, kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak semakin banyak terjadi khususnya kasus kekerasan terhadap anak sebesar 3% anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan dalam berbagai bentuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana konsep ruang kota layak anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teorisasi induktif. Peneliti menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi konsep program kota layak anak ini dengan beberapa faktor. Antara lain faktor internal dan faktor eksternal yaitu faktor sumber daya, faktor komitmen pemimpin, faktor pelaksana kebijakan, faktor komunikasi, faktor masyarakat, dan faktor dunia usaha. Hasil penelitian konsep ruang kota layak anak ini adalah terdapat potensi-potensi dan hambatan suatu wilayah untuk dijadikan kota layak anak. Aspek-aspek yang ditinjau seperti aspek sumber daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, aspek komunikasi antara para pelaksana kebijakan belum terjalin dengan baik dan informasi belum seluruhnya disampaikan, serta komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan juga masih rendah.

Kata Kunci: Hak anak, Implementasi, Program Kota Layak Anak, Rencana Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Bangsa Indonesia masih bisa dikatakan kurang peduli terhadap perkembangan dan masa depan anak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus kekerasan, dan tindak pidana terhadap anak. Selain banyaknya kasus eksploitasi serta kekerasan terhadap anak hal ini diperparah dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak di Indonesia cenderung meningkat. Di Indonesia masih banyak dijumpai anak berusia 10-14 tahun bekerja dan turut mencari nafkah mereka juga tidak mendapat peluang pendidikan yang seharusnya bisa memberikan mereka masa depan lebih baik. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, menyebutkan dalam 4 bulan pertama di tahun 2011 telah terjadi 435 kasus kekerasan terhadap anak. Dari laporan yang masuk, kekerasan kebanyakan dilakukan oleh orang dekat korban. Lokasinya di rumah, sekolah, dan lingkungan pergaulan. Dari data sebagaimana di atas, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi anak, dengan cara memberikan tempat yang layak bagi anak sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak, pemerintah Indonesia mulai tahun 2006 melaksanakan program Kabupaten/Kota Layak Anak atau bisa disebut KLA. Keberadaan KLA akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak sehingga anak bisa belajar dengan baik agar tidak terjebak kepada pelanggaran-pelanggaran HAM Anak, serta terpenting anak mendapatkan hak-haknya seperti perlindungan dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat membahayakan anak.

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi focus dalam penelitian ini antara lain:

1. Seperti apa konsep ruang Kota Layak Anak di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi program Kota Layak Anak di Indonesia?
3. Apa solusi untuk mengatasi kendala penerapan Konsep Kota Layak anak di Indonesia?

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep Kota Layak Anak di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi Program Kota Layak Anak yang dilaksanakan di Indonesia.
3. Untuk memberikan solusi untuk mengatasi kendala penerapan Kota Layak Anak di Indonesia.

Batasan masalah dalam penelitian ini, penulis meneliti implementasi konsep kota layak anak di 5 Kab/Kota Layak Anak di Indonesia yaitu Kab Sleman DIY, Kudus, Bekasi, Pekanbaru, Padang.

Kajian Pustaka

Kota layak anak adalah kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Dari pengertian kota layak anak diatas dapat disimpulkan KLA bertujuan untuk:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/ Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hal ,kebuttuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak anak.
3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui rumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Peran para pihak dalam kota layak anak sebagai berikut

1. Lembaga Legislatif
DPRD Provinsi mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi
2. Lembaga Yudikatif
Kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan pengadilan tinggi berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA
3. Organisasi Non-pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi non-pemerintah dan orfganisasi kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA
4. Dunia Usaha
Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari alokasi corporate social responsibility untuk mendukung pelaksanaan KLA.
5. Masyarakat
Masyarakat bertanggung jawab mengaktifkan untuk turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif. (PPID Bukittinggi, 2012)

Prinsip dari Kota Layak Anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Non-diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik untuk anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- Penghargaan terhadap pendapat anak
- Tata pemerintah yang baik. (Rudi,2012)

Konsep kota layak anak sendiri memiliki beberapa indicator untuk menjadi ukuran Kabupaten/kota layak anak. Berikut indicator-indikator konsep kota layak di Indonesia

No	INDIKATOR	UKURAN
KELEMBAGAAN		
1	jumlah peraturan prudangan dan kbijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA)	ada dan diimplementasikan
2	presentase anggaran PHPA	meningkat setiap tahun
3	SDM terlatih konvensi hak anak (KHA)	meningkat setiap tahun, terutama tenaga layanan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum
4	keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam PHPA	ada, dan meningkat setiap tahun
5	keterlibatan dunia usaha dalam PHPA	ada, dan meningkat setiap tahun
6	jumlah kegiatan inovatif	meningkat setiap tahun
KLASTER 1: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
7	Presentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	semua anak 100%
8	tersedia fasilitas informasi layak anak	tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlah fasilitas meningkat setiap tahun
9	presentase forum anak, termasuk kelompok anak, yang ada di Kabupaten/kota, kecamatan dan desa atau kelurahan	meningkat setiap tahun, dan harus ada forum anak kabupaten/kota
10	jumlah kegiatan peningkatan kapasitas forum anak, terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan	minimal 1 kegiatan perbulan, dan meningkat setiap tahun
KLASTER 2: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK		
11	persentase usia perkawinan pertama diatas 18 tahun	dibawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun

12	tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak	tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlah fasilitas meningkat setiap tahun
13	tersedia program pengasuhan berkelanjutan	tersedia, dan dimanfaatkan semua anak didalam dan diluar asuhan keluarga
KLASTER 3: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
14	angka kematian bayi	dibawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
15	prevalensi kekurangan gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lbih pada balita	dibawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
16	presentase air susu ibu (ASI) eksklusif	diatas angka rata-rata nasional, dan meningkat tiap tahun
17	presentase imunisasi dasar lengkap	diatas rata rata nasional, dan meningkat tiap tahun
18	pelayanan ramah anak di puskesmas (PRAP)	jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak, meningkat tiap tahun
19	jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kespro remaja, penanganan NAPZA, HIV/ AIDS, kesehatan jiwa anak dan remaja dan disabilitas	tersedia dan meningkat tiap tahun
20	jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	diatas angka rata-rata nasional, dan meningkat tiap tahun
21	presentase rumah tangga dengan akses air bersih	diatas rata rata nasional, dan meningkat tiap tahun
22	kawasan tanpa rokok	tersedia dan meningkat tiap tahun
KLASTER 4: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG		
23	pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI)	ada PAUD-HI, dan meningkat tiap tahun minimal 1 desa-kelurahan 1 pendidikan anak (PAUD) angka partisipasi PAUD diatas rata-rata Nasional, dan meningkat tiap tahun
24	persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	100%
25	presentase sekolah ramah anak (SRA)	minma 1 SRA di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun
26	jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	ada rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS), dan meningkat tiap tahun

27	tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di laur sekolah, yang dapat diakses semua anak	tersedia ruang kreatif anak, dan dapat diakses / dimanfaatkan oleh semua anak.
KLASTER 5: PERLINDUNGAN KHUSUS		
28	persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100%
29	jumlah proses diversi yang diupayakan bagi anak yang berhadapan dengan hukum	jumlah penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif, dan meningkat setiap tahun
30	adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	tersedia dan berfungsi
31	persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	100%

Metode Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian dalam penelitian Konsep Kota Layak Anak di Indonesia ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif karena penulis beremaksud untuk mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan konsep kota layak anak (KLA) di Indonesia, guna memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode ilmiah berupa deskriptif kuantitatif. metode deskriptif menurut Nazir (1985:65) adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan system pemikiran pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu bagaimana variasi pada satu factor berkaitan dengan variasi pada factor lainnya. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan ini diharapkan mampu mengungkapkan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi konsep kota layak anak di Indonesia

Hasil dan Pembahasan

Dari indikator dan ukuran Kabupaten/Kota layak anak diatas beberapa implementasi Program Kota Layak Anak di Indonesia sebagai berikut:

INDIKATOR	IMPLEMENTASI				
	Kab Slman, DIY	Kudus	Bekasi	Pekanbaru	Padang
anak teregistrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran	semua anak 100%	semua anak 100%	semua anak 100%	semua anak 100%	semua anak 100%

persentase perkawinan pertama diatas 18 tahun	dibawah angka grata-rata nasional	dibawah angka rata-rata nasional	masih banyak dijumpai perkawinan anak dibawah 18 tahun	dibawah angka rata-rata nasional	masih dijumpai perkawinan anak dibawah 18 tahun
tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/pengasuh anak	tersedia, namun belum diakses oleh semua orang tua anak	tersedia, namun belum diakses oleh semua orang tua anak	tersedia, namun belum diakses oleh semua orang tua anak	tersedia, namun belum diakses oleh semua orang tua anak	tersedia, namun belum diakses oleh semua orang tua anak
angka kematian bayi	dibawah angka rata-rata nasional	dibawah angka rata-rata nasional	angka kematian bayi masih tinggi	dibawah angka rata-rata nasional	dibawah angka rata-rata nasional
prevelensi kekurangan gizi buruk	dibawah angka rata-rata nasional	dibawah angka rata-rata nasional	dibawah angka rata-rata nasional	dibawah angka rata-rata nasional	dibawah angka rata-rata nasional
persentase ASI eksklusif	diatas angka rata-rata nasional	diatas angka rata-rata nasional	diatas angka rata-rata nasional	diatas angka rata-rata nasional	diatas angka rata-rata nasional
imunisasi dasar lengkap	diatas angka rata-rata nasional	diatas angka rata-rata nasional	diatas angka rata-rata nasional	diatas angka rata-rata nasional	diatas angka rata-rata nasional
pelayanan ramah anak di puskesmas (PRAP)	jumlah puskesmas banyak	minimnya jumlah puskesmas	jumlah puskesmas banyak	jumlah puskesmas banyak	minimnya jumlah puskesmas
kawasan tanpa rokok	tersedia	tersedia	belum tersedia	belum tersedia	belum tersedia
wajib belajar 12 tahun	100%	100%	banyak dijumpai anak berusia 10-14 tahun bekerja dan mencari nafkah	100%	banyak dijumpai anak berusia 10-14 tahun bekerja dan mencari nafkah
tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	tersedia dan berfungsi	tersedia dan berfungsi	tesedia namun belum berfungsi	tersedia dan berfungsi	tersedia namun belum berfungsi

Saran dalam mengatasi masalah yang ditemukan pada implementasi program kota layak anak di Indonesia berdasarkan terkait klaster hak anak:

1. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif agar dapat menyampaikan aspirasi anak.
2. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak
3. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif
4. Pemerintah perlu membuat data khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu agar setiap anak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan
5. Pemerintah kota mengikut sertakan kepentingan anak pada proses pembangunan.

Kesimpulan

Konsep program Kota Layak Anak dalam implementasinya di Kabupaten/Kota di Indonesia belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kendala yang ditemui pada pemenuhan hak-hak anak yang di lihat melalui 5 klaster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui pada pelaksanaan program Kota Layak Anak di Indonesia. Berbagai factor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan program kota layak anak di Indonesia yakni, sumber daya manusia, dan sumber daya financial, factor komitmen pemimpin dan pelaksanaan kebijakan, serta factor komunikasi. Berbagai factor tersebut masih menjadi kendala pada implementasinya. Pada factor pendukung, sumber daya fasilitas sarana prasarana telah menunjang kinerja implementor pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam mengatasi masalah yang menjadi factor penghambat pada implementasi program kota layak anak di Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pelaksana
2. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak anak khususnya dalam memenuhi berbagai fasilitas yang ramah dan layak anak
3. Penguatan komitmen pemerintah Kabupaten/kota dan para pelaksana kebijakan
4. Memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.

Referensi

- Anonim, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf> Jakarta 2018
- Anonim, <http://bp3akb.jabarprof.go.id> Jakarta 2018
- Anonim, <https://ppid.bukittinggikota.go.id/front/dokumen/download/30360000239>
- Elizabth, Andriani. 2012. Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak di Kota Bekasi
- Erwin, Muhammad. 2015. Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Malaiha, Siti. 2013. Transformasi Kudus sebagai Kota Layak Anak (Tinjauan atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi)
- Nissa, Faradila. 2013. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya
- Rachmania, Anindya. 2015. Implementasi Program Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kecamatan Gayamsari
- Subiyakto, Rudi. 2012. Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah
- Ummul, Mustiqowati. 2017. Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru

Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Pekanbaru Tahun 2017

*Novi Nur Setianingsih, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. E-mail:
novinursetianingsih@gmail.com*

*Soviyana Retnaningsih, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. E-mail:
sretnan07@gmail.com*

*Suwartiningsih, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. E-mail:
suwartiningsih98@gmail.com*

Abstrak

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota dari Provinsi Riau yang memiliki peningkatan dalam pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Salah satu permasalahan akibat bertambahnya jumlah penduduk adalah kesenjangan antardaerah. Pemerintah harus mampu menetapkan pusat pertumbuhan agar mampu menopang daerah sekitar. Pusat permukiman penduduk dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Pusat permukiman penduduk dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang merupakan pusat pelayanan permukiman dan pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru melalui kelengkapan fasilitas yang tersedia yang disesuaikan dengan kawasan pusat kota yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis skalogram. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Tampan memiliki tingkat orde yang paling tinggi. Kecamatan yang telah diproyeksikan sebagai pusat kota dalam rancangan RTRW Kota Pekanbaru tahun 2007-2026 ternyata belum sesuai dengan hasil analisis skalogram. Kecamatan yang ditetapkan memiliki fasilitas yang kurang lengkap.

Kata Kunci: Analisis skalogram, fasilitas, pusat kota

Pendahuluan

Kota adalah suatu areal dimana terdapat atau menjadi pemusatan penduduk dengan kegiatannya serta merupakan tempat konsentrasi penduduk dan pusat aktivitas perekonomian (seperti industri, perdagangan dan jasa). Untuk mendukung aktivitas perekonomian penduduk, kota perlu menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas yang lengkap dan memadai. Fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya digunakan oleh penduduk di perkotaan itu sendiri, namun juga bermanfaat bagi daerah terbelakang di sekitar kota tersebut. Beberapa fasilitas yang diperlukan antara lain fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, industri, komunikasi, dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas ini akan mendukung daerah terbelakang untuk berkembang.

Kota akan terus tumbuh dan hal itu tidak dapat dihindari. Perencanaan kota yang baik mengenai pengembangan infrastruktur dan pengelolaan kota merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan perkotaan. Masalah pertumbuhan penduduk, lingkungan, ekonomi, dan spasial sosial harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan kota karena hal tersebut dapat mempengaruhi pengembangan dan lingkungan pada masyarakat perkotaan. (Asoka et al. 2013)

Pusat permukiman penduduk dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup tidak di dalam kawasan lindung, seperti kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat masyarakat tinggal terkonsentrasi dan hidup berdampingan dalam lingkungan tersebut untuk mempertahankan,

melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Permukiman kota merupakan permukiman yang mempunyai ciri khas yaitu daerah tersebut sebagian besar berisi lingkungan terbangun (infrastruktur, bangunan, dan fasilitas). (Utari 2014)

Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan perampasan di suatu negara dapat dikurangi dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui dominasi peran infrastruktur. Pemerataan pembangunan dan pemberdayaan sosial membutuhkan akses dari masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, air dan sanitasi, jaringan jalan, dan listrik yang lebih besar. (Srinivasu 2013)

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota dari Provinsi Riau telah berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan saat ini. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang dan pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Kelengkapan fasilitas akan mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas ke wilayah perkotaan. Peningkatan mobilitas akan menjadi tugas pemerintah untuk menetapkan bagaimana strategi dan kebijakan dalam mengatur perkembangan suatu wilayah. Fasilitas yang memadai juga menjadi daya tarik masyarakat untuk menetap tinggal disuatu wilayah dan melakukan kegiatan ekonomi. Wilayah perkotaan juga akan lebih berkembang apabila ditetapkan dengan penentuan pusat kotanya karena pembangunan akan lebih terfokus.

Menurut data yang dilihat dari rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru tahun 2007-2026 ditetapkan 2 kelompok permukiman yaitu pusat kota dan sub pusat kota. Pusat kota yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail dan Kecamatan Limapuluh. Sub pusat kota meliputi Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Damai, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2017 mencapai 1.091.088 jiwa (Pekanbaru dalam Angka tahun 2018). Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 559.917 jiwa dan perempuan sebanyak 531.171 jiwa. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2016 mencapai 1.091.088 jiwa dan mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 2,49% ke tahun berikutnya. Dengan luas wilayah 632,6 km persegi kepadatan penduduk Kota Pekanbaru tahun 2017 mencapai 1.726 jiwa per km persegi. Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi, penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Tampan yakni 4.731 jiwa per km persegi, dan paling jarang penduduknya ada di Kecamatan Rumbai Pesisir yakni 463 jiwa per km persegi dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,49%. Sedangkan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk mencapai 20,82%.

Kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya sehingga perlu adanya peningkatan dalam segi fasilitas-fasilitas dalam mendorong adanya kegiatan ekonomi. Setiap daerah di Kota Pekanbaru pasti memiliki fasilitas yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi perkembangan wilayahnya. Adanya fasilitas yang paling memadai di suatu kecamatan akan menjadikan kecamatan tersebut sebagai pusat pelayanan. Wilayah tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum terlalu berkembang.

Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi dapat dimulai dari beberapa sektor yang dinamis dan mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas (Sukesi 2010). Pusat pertumbuhan ekonomi atau pusat kota yang terlihat dari segi fasilitas dapat dihitung dengan menggunakan alat analisis skalogram.

Dari penelitian sebelumnya oleh Endang Sri Utari (2014) mengemukakan bahwa kecamatan yang telah diproyeksikan sebagai pusat kota dalam RTRW Kota Pekanbaru tahun 2010 ternyata belum sesuai dengan hasil analisis skalogram. Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian mengenai analisis pusat sistem pelayanan permukiman di Kota Pekanbaru dengan menggunakan alat analisis skalogram.

Kajian Pustaka

Teori Pusat Pertumbuhan

Pemikiran awal tentang pusat pertumbuhan dicetuskan oleh Francois Perroux (1949) yaitu tentang adanya konsentrasi kegiatan industri pada daerah tertentu yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian berkembang menjadi konsep pusat pertumbuhan yang dalam bahasa Prancis dinamakan sebagai *pole de croissance*.

Menurut Tarigan (2009:49) *Growth Pole* dapat diartikan dengan 2 cara yaitu:

1. Secara Fungsional, adalah suatu konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya).
2. Secara Geografis, adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disuatu tempat tanpa adanya hubungan antara usaha usaha tersebut.

Analisis Skalogram

Analisis skalogram pertama kali diperkenalkan oleh Guttman (1950) sehingga analisis ini sering disebut sebagai analisis skala Guttman. Analisis skalogram didefinisikan oleh Guttman sebagai salah satu skala satu dimensi yang menggambarkan respon subyek terhadap obyek tertentu menurut tingkatan yang sempurna, orang yang mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik akan lebih baik dibandingkan dengan yang mampu menjawab sebagian saja.

Analisis skalogram mengelompokkan klasifikasi kota berdasarkan pada tiga komponen fasilitas dasar yang dimilikinya yaitu:

1. *Differentiation* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja
2. *Solidarity* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*benefit oriented*)
3. *Centrality* adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomipolitik/ pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hierarki dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolahan, kantor pemerintahan dan sejenisnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2018 oleh Badan dan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan kajian pustaka, dimana

penulis mengumpulkan data dari buku-buku yang ada, skripsi, jurnal, dan artikel yang terkait. Data yang dikumpulkan yaitu jumlah fasilitas yang tersedia dalam masing – masing kecamatan di Pekanbaru (fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, dan industri perekonomian). Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan metode dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis skalogram. Analisis skalogram adalah analisis yang digunakan untuk mengelompokkan satuan pemukiman berdasarkan tingkat kompleksitas fungsi pelayanan yang dimilikinya, serta menentukan jenis dan keragaman pelayanan dan fasilitas yang terdekat pada pusat – pusat pelayanan dengan berbagai tingkatan.

Hasil dan Pembahasan

Pada tahun 2017 Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.091.088 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 559.917 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 531.171 jiwa. Dari jumlah tersebut , konsentrasi penduduk secara kewilayahan berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tampan sebanyak 285.932 jiwa, Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 162.530 jiwa dan Kecamatan Bukit Raya sebanyak 131.362 jiwa. Sedangkan Kecamatan Senapelan, Pekanbaru Kota, dan Sail merupakan tiga kecamatan urutan terbawah dalam hal jumlah penduduk dengan jumlah penduduk masing-masing berjumlah 37.459 jiwa, 25.719 jiwa, dan 22.719 jiwa.

Pada tahun 2017 Kota Pekanbaru memiliki rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.726 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Sukajadi merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 12.911 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu Kecamatan Rumbai Pesisir dengan kepadatan penduduk 463 jiwa per kilometer persegi.

Struktur Ruang Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta untuk melaksanakan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru yaitu pengembangan dan pembangunan daerah.

Wilayah harus dapat dikelompokkan atau dibagi ke dalam satu kesatuan dalam hal perencanaan wilayah agar dapat dibedakan dengan kesatuan yang lain. Hal tersebut berlaku juga untuk Kota Pekanbaru, dalam hal perwilayahan perlu adanya suatu perencanaan untuk mengembangkan struktur ruang kewilayahannya. Perencanaan merupakan usaha dalam menetapkan suatu tujuan serta menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan 2005)

Oleh karena itu di dalam rencana tata ruang wilayah kota Pekanbaru memuat macam-macam strategi pengembangan kota dan konsep struktur ruang kota. Salah satu strategi pengembangan kota tersebut adalah pengembangan struktur kota melalui pembangunan kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail, dan Kecamatan Limapuluh. Kawasan pusat kota berfungsi sebagai pusat pengembangan utama kota dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Penentuan hierarki pelayanan fasilitas sarana dan prasarana di Kota Pekanbaru dapat dilakukan melalui analisis skalogram. Perhitungan skalogram dilakukan melalui penjabaran fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana setiap kecamatan dalam suatu tabel. Setiap kecamatan yang memiliki suatu fasilitas sarana dan prasarana ditandai dengan angka “1” sedangkan kecamatan yang tidak memiliki fasilitas sarana dan prasarana ditandai dengan angka “0”. Tabel tersebut dijumlahkan secara mendatar dan menurun, kemudian diurutkan dari angka tertinggi sampai terendah. Angka tertinggi diletakkan paling atas dan paling kiri. Nilai kesalahan (error) dan hirarki dapat diketahui setelah data diurutkan. Untuk mengetahui kelayakan analisis skalogram perlu dilakukan pengujian COR (Coeffisien of

Reproducibility) melalui rumus COR. Skalogram dianggap layak apabila memiliki nilai koefisien COR (Coeffisien of Reproducibility) antara 0,9 - 1. Dengan perhitungan menggunakan rumus tertentu akan didapatkan hirarki yang menunjukkan banyaknya kelas atau orde fasilitas sarana dan prasarana. Semakin tinggi nilai orde (orde I) maka tingkat hirarki juga semakin tinggi.

Pada umumnya analisis Skalogram digunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman yang secara spesifiknya adalah hirarki atau orde pusat-pusat permukiman. Analisis skalogram berfungsi untuk memberikan gambaran adanya pengelompokan permukiman sebagai pusat pelayanan dengan mendasarkan pada kelengkapan fungsi pelayanannya. Fungsi pelayanan yang dimaksud yaitu ketersediaan fasilitas-fasilitas dalam setiap kecamatan. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat digunakan dalam analisis apabila mencirikan fungsi pelayanan dengan kriteria obyek tunggal dan terukur serta minimal memiliki karakteristik hirarkis atau berjenjang. Tahapan pertama dalam analisis skalogram yaitu memilih jenis fasilitas yang digunakan sebagai variabel dalam matriks skalogram. Berikut ini merupakan tabel jenis fasilitas yang tersedia di berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru:

Pada tabel 6 tentang data olahan analisis skalogram yang terdapat dalam lampiran, terdapat 16 jenis fasilitas di Kota Pekanbaru yang telah dipilih, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, industri, perhotelan, transportasi dan komunikasi, serta fasilitas ekonomi. Dilihat dari tabel tersebut bahwa Kecamatan Tenayan Raya merupakan kecamatan dengan jumlah unit fasilitas tertinggi yaitu sebanyak 1.508 unit. Sedangkan Kecamatan Sail berada diposisi terendah dengan jumlah unit fasilitas sebanyak 297 unit. Tahapan kedua dalam analisis skalogram adalah mengkonversi semua fasilitas yang ada ke dalam angka (1) dan angka (0) untuk fasilitas yang tidak ada, lalu menjumlahkan semua fasilitas berdasarkan baris dan kolom. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan total kesalahan (error) dan menghitung persentasenya.

Penentuan jumlah kelas atau orde menggunakan rumus sebagai berikut: $1 + 3,3 \log n$, dengan n merupakan jumlah kecamatan. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 \text{ Log } n$$

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 \text{ Log } 12$$

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 (1,079)$$

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,5607$$

$$\text{Jumlah Orde} = 4,5607 \text{ dibulatkan menjadi } 5 \text{ orde.}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan 5 kelas (orde) pada Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah menghitung nilai range pada masing-masing orde untuk mengurutkan orde kecamatan di Kota Pekanbaru sesuai hirarkinya. Rumus dan perhitungan range adalah sebagai berikut:

$$\text{Range} = \frac{(\text{data tertinggi} - \text{data terendah})}{\text{jumlah orde}} = \frac{(1508 - 297)}{5} = 242,2 \text{ dibulatkan menjadi } 242$$

Tabel 1. Range Orde

Range	242
Orde 1	$\geq 1266-1508$
Orde 2	$\geq 1024-1265$

Orde 3	≥ 782-1023
Orde 4	≥ 540-781
Orde 5	≥ 297-539

Sumber: Penulis, 2018

Tahap terakhir dari analisis skalogram yaitu menghitung tingkat kesalahan (error) yang disebut COR (Coefficient of Reductibility) dengan menggunakan rumus:

$$COR = 1 - (\sum e) / N \times K$$

Keterangan:

e = jumlah kesalahan

N = jumlah subyek/kecamatan

K = jumlah obyek/unit fasilitas

Dalam hal ini, koefisien dianggap layak apabila bernilai 0,9 - 1. Perhitungan COR Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

$$COR = 1 - (\sum e) / N \times K$$

$$COR = 1 - 8 / (12 \times 8021)$$

$$COR = 1 - 8 / 96252$$

$$COR = 1 - 0,0008$$

$$COR = 0,9992$$

Dari perhitungan COR di atas maka dapat diketahui nilai koefisiennya sebesar 0,9992 yang berarti bahwa analisis skalogram Kota Pekanbaru dianggap sudah layak. Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Perbandingan antara RTRW dan hasil analisis skalogram

Menurut data yang dilihat dari rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan 2 kelompok permukiman yaitu pusat kota dan sub pusat kota. Pusat kota yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail dan Kecamatan Limapuluh. Sub pusat kota meliputi Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Damai, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Hasil dari analisis skalogram membagi Kecamatan-kecamatan menjadi 5 orde kelas. Dari hasil perbandingan antara analisis skalogram dan rancangan rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru pada tahun 2007-2026 mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Pada analisis skalogram menemukan bahwa Kecamatan-kecamatan yang diproyeksikan sebagai pusat kota oleh Rancangan tata ruang wilayah Kota Pekanbaru merupakan daerah pada hirarki IV dan V. Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, dan Kecamatan Pekanbaru Kota Masuk dalam hirarki V. Kecamatan Senapelan masuk dalam hirarki IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki jumlah fasilitas yang tidak berada di kelas atas.

Dalam analisis skalogram ini juga menunjukkan bahwa Kecamatan Tenayan Raya masuk dalam hirarki I dan Kecamatan Tampan masuk dalam hirarki II, yang artinya kecamatan-kecamatan tersebut memiliki banyak unit dan kelengkapan fasilitas yang mendukung untuk menjadi kawasan pusat kota.

Tabel 2. Hasil Analisis Skalogram

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Jumlah Unit	Presentase	Orde / Hirarki
-----------	--------------------	----------------	------------	-------------------

		Fasilitas		
1. Tampan	285.932	1.224	15,2	II
2. Payung Sekaki	90.902	585	7,2	IV
3. Bukit Raya	103.722	631	7,8	IV
4. Marpoyan Damai	131.362	757	9,4	IV
5. Tenayan Raya	162.530	1.508	18,8	I
6. Limapuluh	42.469	314	3,9	V
7. Sail	22.015	297	3,7	V
8. Pekanbaru Kota	25.719	354	4,4	V
9. Sukajadi	48.544	483	6,0	V
10. Senapelan	37.459	607	7,5	IV
11. Rumbai	67.570	655	8,1	IV
12. Rumbai Pesisir	72.864	606	7,5	IV

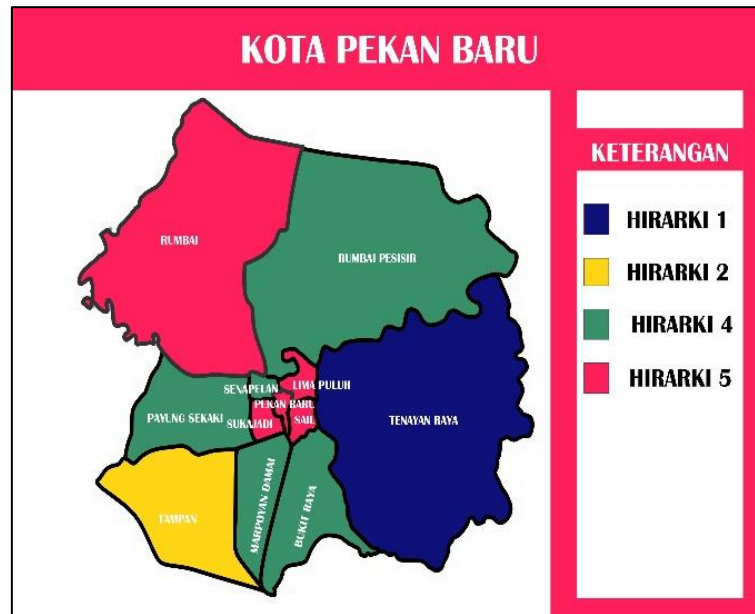
Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018 (diolah)

Tabel 3. Perbandingan kedua analisis tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut

Kecamatan	Pengelompokan hirarki RTRW 2014	Hasil Analisis Skalogram
1. Tampan	Sub Pusat Kota	II
2. Payung Sekaki	Sub Pusat Kota	IV
3. Bukit Raya	Sub Pusat Kota	IV
4. Marpoyan Damai	Sub Pusat Kota	IV
5. Tenayan Raya	Sub Pusat Kota	I
6. Limapuluh	Pusat Kota	V
7. Sail	Pusat Kota	V
8. Pekanbaru Kota	Pusat Kota	V
9. Sukajadi	Pusat Kota	V
10. Senapelan	Pusat Kota	IV
11. Rumbai	Sub Pusat Kota	IV
12. Rumbai Pesisir	Sub Pusat Kota	IV

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018 (diolah)

Gambar 1. Peta Hirarki Kota Pekanbaru



Sumber: Penulis, 2018

Kecamatan-kecamatan yang diteliti dapat dibagi berdasarkan hirarki atau fasilitas-fasilitas yang ada untuk menjadi pusat kota. Menurut teori *Growth Pole*, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail dan Kecamatan Limapuluh belum terlalu optimal apabila dijadikan sebagai pusat kota. Dalam Kecamatan tersebut, pemusatan penduduk ataupun industri tidak terlalu signifikan dan belum mampu membantu daerah-daerah sekitar untuk menjadikan kecamatan tersebut sebagai pusat kota. Dilihat dari letaknya, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan aksesibilitas sehingga menjadi pusat daya tarik (*place of attraction*) yang membuat berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di tempat itu dan mendorong masyarakat untuk bermobilisasi dan memanfaatkan fasilitas yang ada di kota itu, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha – usaha tersebut. Dengan demikian, lokasi tersebut akan lebih cepat berkembang menjadi pusat kota. Dalam peta hirarki pada gambar 1 dapat diketahui bahwa penentuan pusat kota dalam rancangan RTRW Kota Pekanbaru hanya melihat letak geografis dimana kecamatan-kecamatan yang ditunjuk sebagai pusat kota terletak ditengah-tengah Kota Pekanbaru, kurang melihat kelengkapan fasilitas yang ada.

Kesimpulan

Dalam rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru tahun 2007-2026 masih belum sesuai jika dilihat dari analisis skalogram. Kecamatan-kecamatan yang dijadikan sebagai pusat kota dalam rancangan RTRW belum tepat dari segi fasilitas sehingga kurang mendukung dalam hal daya tarik masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di kecamatan tersebut.

Dilihat dari analisis skalogram, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Tampan memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan lainnya meskipun kecamatan tersebut bukan prioritas untuk menjadi pusat kota. Saran penulis dari penelitian yang telah dilakukan adalah (1) Diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk menentukan pusat kota; (2) diperlukan adanya perancangan kembali dalam hal penentuan lokasi-lokasi yang memenuhi fasilitas-fasilitas, (3) diperlukan penambahan fasilitas-fasilitas baru bagi kecamatan yang ditunjuk sebagai pusat kota untuk menunjang perkembangan kota.

Referensi

- Asoka, Gilbert W.N. et al. 2013. "Effects of Population Growth on Urban Infrastructure and Services: A Case of Eastleigh Neighborhood Nairobi, Kenya". *Journal of Anthropology & Archaeology*. June 2013 pp. 41-56
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kota Pekanbaru Dalam Angka. BPS : Kota Pekanbaru. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 (http://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2018/08/16/79b0025f1290a0536af3d9ab/kota-pekanbaru-dalam-angka-2018.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9456699990).
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Rancangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru. Pekanbaru tahun 2007-2016.
- Tarigan, Robinson. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Srinivasu, B. 2013. "Infrastruktur Development and Economic Growth: Prospects and Perpective". *Journal of Bussinnes Management & Social Science Research*. Vol. 2 No.1 Januari.
- Utari, Endang Sri. 2014. "Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014". *JEJAK Journal of Economics and Policy* 8 (1) (2015): 1-88

Lampiran

Tabel 4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2017

Kecamatan (1)	Luas (km ²) (2)	Penduduk (jiwa) (3)	Kepadatan(jiwa/km ²) (4)
1. Tampan	59,81	285.932	4.781
2. Payung Sekaki	43,24	90.902	2.102
3. Bukit Raya	22,05	103.722	4.704
4. Marpoyan Damai	29,74	131.362	4.417
5. Tenayan Raya	171,27	162.530	949
6. Limapuluh	4,04	42.469	10.512
7. Sail	3,26	22.015	6.753
8. Pekanbaru Kota	2,26	25.719	11.380
9. Sukajadi	3,76	48.544	12.911
10. Senapelan	6,65	37.459	5.633
11. Rumbai	128,85	67.570	524
12. Rumbai Pesisir	157,33	72.864	463

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018

Tabel 5. Data Jumlah Fasilitas pada masing-masing Kecamatan

Kecamatan	Jml Pddk	Pendidikan					Kesehatan			Tempat Ibadah	
		TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	RS	Puskesmas	Posyandu		Klinik
1 Tampan	285,932	65	58	27	11	17	7	3	76	37	326
2 Payung Sekaki	90,902	31	27	16	7	6	0	1	38	8	135
3 Bukit Raya	103,722	27	27	12	5	5	1	1	58	16	159
4 Marpoyan Damai	131,362	50	39	17	11	9	8	2	74	25	250
5 Tenayan Raya	162530	41	39	25	10	7	0	2	88	8	291
6 Limapuluh	42,469	18	23	10	4	1	1	1	30	9	80
7 Sail	22,015	8	8	5	5	4	3	1	23	8	57
8 Pekan Baru Kota	25,719	8	11	3	1	0	3	1	33	6	72
9 Sukajadi	48,544	19	27	12	7	4	3	2	46	11	89
10 Senapelan	37,459	9	16	6	4	3	2	1	37	6	80
11 Rumbai	67,570	16	21	14	2	1	0	3	51	3	212
12 Rumbai Pesisir	72,864	20	28	13	5	1	1	2	68	9	155
Jumlah	1,091,088	312	324	160	72	58	29	20	622	146	1906

Tabel 5. Lanjutan

	Kecamatan	Panti Sosial	Industri Industri Kecil	Hotel	Transportasi&Komunikasi Kantor Pos	UMKM	Koperasi	Jml Fasilitas	Jml Unit	Rangking
1	Tampan	5	18	16	3	446	109	16	1,224	2
2	Payung Sekaki	4	39	7	0	204	62	14	585	4
3	Bukit Raya	2	9	16	2	180	111	16	631	4
4	Marpoyan Damai	5	13	20	2	97	135	16	757	4
5	Tenayan Raya	5	11	0	1	861	119	14	1,508	1
6	Limapuluh	0	3	13	1	50	70	15	314	5
7	Sail	2	1	7	0	99	66	15	297	5
8	Pekan Baru Kota	0	6	31	1	92	86	14	354	5
9	Sukajadi	3	19	9	1	107	124	16	483	5
10	Senapelan	0	4	18	1	364	56	15	607	4
11	Rumbai	2	11	2	2	275	40	15	655	4
12	Rumbai Pesisir	1	3	1	0	237	62	15	606	4
	Jumlah	29	137	140	14	3012	1040	181	8,021	

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018

Tabel 6. Data Olahan Analisis Skalogram

	Kecamatan	Jml Pddk	Pendidikan					Kesehatan			Tempat Ibadah	
			TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	RS	Puskesmas	Posyandu		Klinik
1	Tampan	285,932	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Payung Sekaki	90,902	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
3	Bukit Raya	103,722	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Marpoyan Damai	131,362	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tenayan Raya	162,530	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
6	Limapuluh	42,469	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Sail	22,015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Pekan Baru Kota	25,719	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
9	Sukajadi	48,544	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Senapelan	37,459	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Rumbai	67,570	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
12	Rumbai Pesisir	72,864	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	1,091,088	12	12	12	12	11	9	12	12	12	12

Tabel 6. Lanjutan

	Kecamatan	Panti Sosia I	Industri Industri Kecil	Hotel	Transportasi &Komunikasi Kantor Pos	UMKM	Koperasi	Jml Fasilitas	Jml Unit	ERROR	Persentase
1	Tampan	1	1	1	1	1	1	16	1,224	0	15,2
2	Payung Sekaki	1	1	1	0	1	1	14	585	1	7,2
3	Bukit Raya	1	1	1	1	1	1	16	631	0	7,8
4	Marpoyan Damai	1	1	1	1	1	1	16	757	0	9,4
5	Tenayan Raya	1	1	0	1	1	1	14	1,508	2	18,8
6	Limapuluh	0	1	1	1	1	1	15	314	1	3,9
7	Sail	1	1	1	0	1	1	15	297	0	3,7
8	Pekan Baru Kota	0	1	1	1	1	1	14	354	2	4,4
9	Sukajadi	1	1	1	1	1	1	16	483	0	6,0
10	Senapelan	0	1	1	1	1	1	15	607	1	7,5
11	Rumbai	1	1	1	1	1	1	15	655	1	8,1
12	Rumbai Pesisir	1	1	1	0	1	1	15	606	0	7,5
	Jumlah	9	12	11	9	12	12	12	12	8	100

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018 (diolah)

Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan untuk Mewujudkan Mamuju *Green City*

Ichsan Caesar Pratama, *Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.*
Ichsancaesaricp@gmail.com

Muhammad Irfan, *Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.*
Vanirvan03@gmail.com

Abstrak

Mamuju merupakan kota baru yang memiliki permasalahan ruang kota yang sangat minim. Tujuan utama Kota Mamuju yaitu menjadikan kota yang ramah lingkungan dengan menerapkan konsep *Green City*. Salah satu fokus penerapan konsep *green city* di Kota Mamuju yaitu elemen ruang terbuka hijau (RTH). Pengembangan ruang kota dengan menerapkan elemen ruang terbuka hijau dengan presentase 30% tidak terbangun sesuai dengan Permen PU No.5 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung luas Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk, proyeksi jumlah penduduk 30 tahun mendatang, dan presentase luas wilayah perkotaan. Melalui penelitian ini juga dilakukan identifikasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ada di wilayah perkotaan Mamuju.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kecamatan perkotaan melalui proyeksi jumlah penduduk, perhitungan matematis sederhana dan presentase luas wilayah, serta analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengolah presentase luas RTH yang tersedia. Hasil analisis akan menjadi dasar kajian dalam menentukan luas area dan kategori yang dibutuhkan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan membandingkan pada luas RTH yang tersedia.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan Kota Mamuju yang ada saat ini adalah seluas 26,19 Ha atau sekitar 1,65 % dari total luas wilayah perkotaan. Sedangkan kebutuhan RTH berdasarkan pada presentase luas wilayah yaitu 477,72 Ha. Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2017 adalah 37,99 Ha (2,8 % luas wilayah) dan tahun 2037 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk seluas 81,79 Ha (5,14 % luas wilayah) serta 500 unit berdasarkan jenis RTH.

Kata Kunci: *Green City*, Optimalisasi, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sistem Informasi Geografis (SIG)

Pendahuluan

Kota Mamuju juga mengalami hal yang sama, yakni suhu udara yang makin tinggi khususnya pada siang hari sehingga memerlukan upaya pengendalian. Perkembangan kawasan Kota Mamuju dengan berbagai aktifitas dan pola kehidupan penduduknya menuntut kebutuhan lahan yang sangat tinggi sebagai wadahnya. Adanya keterbatasan luas lahan di pusat perkotaan Kota Mamuju mengakibatkan optimalisasi fungsi lahan sebagai lahan terbangun sehingga cenderung mengabaikan pembangunan ruang terbuka hijau. Disamping itu terjadi pula perubahan fungsi yang semula berupa lahan terbuka menjadi terbangun, terutama di daerah perbukitan yang ada disekitar pusat kota yang saat ini telah banyak berubah menjadi permukiman penduduk padahal daerah hijau diperbukitan merupakan ruang terbuka hijau alami berfungsi lindung sebagai ruang ekologis area tangkapan air (*catchment area*) yang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor serta menjaga kualitas udara.

Mamuju merupakan kota baru yang memiliki permasalahan ruang kota yang sangat minim. Tujuan utama Kota Mamuju yaitu menjadikan kota yang ramah lingkungan dengan menerapkan konsep *green city*. Salah satu fokus penerapan konsep *green city* di Kota Mamuju yaitu elemen ruang terbuka hijau (RTH).

Wilayah perkotaan Mamuju yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat setiap tahunnya sehingga akan berdampak pada Masalah polusi udara, rendahnya kualitas udara dan berkurangnya estetika suatu kota. Hal ini akan berdampak buruk jika tidak dilakukan penanganan sedini mungkin, Sehingga dibutuhkan pengendalian dalam optimalisasi kebutuhan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan Mamuju *green city*.

Green city sebagai salah satu konsep pembangunan kota yang memiliki elemen perencanaan yang kompleks mulai dari *green planning and design, green open space, green waste, green transportation, green water, green energy, green building dan green community*. Pada aspek *green open space*, kebutuhan akan tersedianya ruang terbuka hijau sangat penting untuk diperhatikan (Norwono Joga 2017).

Kajian Pustaka

Green city merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan system transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menghemat energi, air dan makanan, serta mengurangi buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air (Norwono Joga dan Bayu Wardana 2017).

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Prinsip dasar dari *smart green open space* adalah mewujudkan RTH sebesar 30% dari luas kota/kawasan yang ada.

Standar kebutuhan fasilitas RTH adalah sebagai pedoman PUPR No. 5/PRT/M/2008 di Kawasan Perkotaan sebagaimana yang tercantum pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Type RTH	Luas Minima/unit (M2)	Luas Minimal/kapita (M2)	Lokasi
1	250 Jiwa	Taman RT	250	1,00	Ditengah lingkungan RT
2	2.500 Jiwa	Taman RW	1.250	0,50	Dipusat Kegiatan RW
3	30.000 Jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,30	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 Jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,20	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	Di sesuaikan	1,20	Tersebar
5	450.000 Jiwa	Taman Kota	144.000	0,30	Di Pusat Wilayah/Kota
		HuTan Kota	Disesuaikan	4,00	Di Dalam/Kawasan Pinggiran
		Untuk Fungsi-Fungsi tertentu	Disesuaikan	12,50	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Permen PU No. 5/PRT/M/2008

Jumlah penduduk adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang. Hal ini perlu diketahui karena penduduk merupakan salah satu faktor penentu dalam perencanaan RTH. Hasil dari proyeksi jumlah penduduk digunakan sebagai acuan standar perhitungan

RTH. Proyeksi jumlah penduduk dilakukan dengan menggunakan metode analisis bunga berganda sebagai berikut :

$$P_{t+x} = P_t (1 + r)^x$$

Dimana :

P_{t+x} = Jumlah Penduduk pada tahun $t + X$

P_t = Jumlah Penduduk pada Tahun

r = Rata-Rata Persentase Pertumbuhan Jumlah Pendudu Penduduk

x = Selisih Tahun.

Ratarata persentase pertambahan jumlah penduduk dicari dengan menggunakan rumus :

$$r = \frac{t1 - t2}{t2}$$

Keterangan :

T1 = Jumlah Penduduk Tahun ke 1

T2 = Jumlah Penduduk Tahun ke 2

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengukuran RTH yang tedapat di Kota Mamuju. Metode observasi untuk melihat secara langsung kondisi lokasi penelitian. Metode wawancara digunakan untuk mengetahui status kepemilikan RTH dan pengembangan tentang RTH terkait.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis kuantitatif, dan analisis pemetaan (*mapping*). Analisis deskriptif kondisi wilayah dan ketersediaan prasarana RTH publik yang terdapat di Kota Mamuju. Analisis deskriptif kuantitatif kebutuhan ruang terbuka hijau pada kecamatan perkotaan melalui proyeksi jumlah penduduk, perhitungan matematis sederhana dan presentase luas wilayah. Analisis pemetaan (*mapping*) menggunakan Sistem Informasi Geografis untuk mengolah presentase luas RTH yang tersedia.

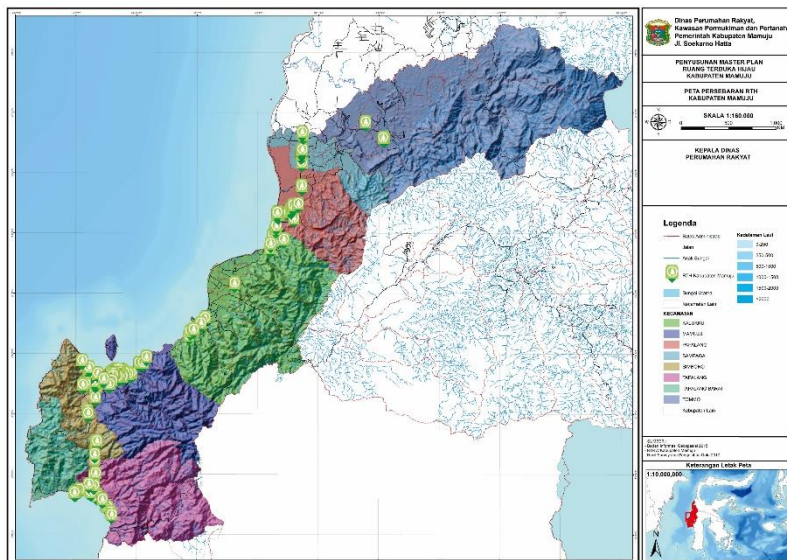
Hasil dan Pembahasan

Kondisi eksisting luas Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*) di Kota Mamuju adalah 26,19 Ha atau sekitar 1,65 % dari total luas wilayah perkotaan 1.592,4 Ha.

Tabel 2. Sebaran RTH Di Kota Mamuju

No	Nama Taman Kota	Luas (Ha)	Penanggung Jawab
I.TAMAN KOTA			
1	Taman Karema	0.20	Pemkab
2	Taman Manunggal	0.16	Pemkab
3	Taman Kompleks Rumah Adat Mamuju	1.90	Pemkab
4	Taman Pantai Manakarra	2.00	Pemkab
5	Taman Lalu Lintas	1.30	Pemkab
6	Taman Pelabuhan Mamuju	0.53	Pemkab
7	Taman Stadion Manakarra	4.90	Pemkab
8	Taman RSUD Prov. Sulbar	1.59	Pemkab
9	Taman Pelabuhan Simboro	0.3	Peng. Pelabuhan
10	Belakang Kantor Bupati Mamuju	2.00	Pemkab
11	Taman Patung Ahmad Kirang	0.1	Pemkab
12	Taman Pojok Satu	0.6	Pemkab
13	Taman Depan Kantor Bupati	1.09	Pemkab

No	Nama Taman Kota	Luas (Ha)	Penanggung Jawab
14	Taman Depan Rujab (Pendopo)	0.9	Pemkab
15	Taman Jembatan Bonepass (Pojok II)	0.4	Pemkab
16	Taman Pelti	0.6	Pemkab
17	Taman Depan SMP 2 Mamuju	0.1	Pemkab
18	Taman Jembatan Rimuku	0.4	Pemkab
19	Taman Jalur Simpang Lima	0.1	Pemkab
20	Taman RSUD Mamuju	0.5	Pemkab
21	Taman Masjid Suhada	0.2	Pemkab
22	Taman D'Maleo Hotel	0.2	Pemkab
23	Taman Komplek Pemda	0.12	Pemkab
24	Taman Jalur Dua Menuju Kalukku	0.3	Pemkab
25	Taman Depan Toko Family	0.7	Pemkab
26	Taman Pintu Gerbang Simbuang	0.4	Pemkab
Jumlah I		21.59	
II TAMAN LINGKUNGAN			
1	Lapangan Sepak Bola	0.7	Pemerintah Desa/Kel.
2	Lapangan Sepak Bola	0.6	Pemerintah Desa/Kel.
3	Lapangan Bola Taludu	0.7	Pemerintah Desa/Kel.
4	Lapangan Sepak Bola	0.5	Pemerintah Desa/Kel.
5	Lapangan Sepak Bola	0.7	Pemerintah Desa/Kel.
6	Lapangan Sepak Bola	0.7	Pemerintah Desa/Kel.
7	Lapangan Sepak Bola	0.7	Pemerintah Desa/Kel.
Jumlah II		4.6	
Jumlah I + II		26.19	



Sumber: Hasil Survey 2017

Gambar 1 Peta Identifikasi Sebaran RTH Di Kota Mamuju

Jumlah penduduk Mamuju tahun 2017 sebesar 50.529 jiwa maka, proyeksi jumlah penduduk selama 20 tahun perencanaan yaitu pada tahun 2017 hingga 2037.

Tabel 3. Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Mamuju tahun 2017-2037

Tahun	Wilayah Perkotaan				Jumlah
	Simboro	Rangas	Mamunyu	Binanga	
2015	9418	4305	6188	22780	44706
2016	9815	4461	6497	24829	47618
2017	10212	4616	6805	26878	50529
2022	12198	5395	8348	37124	65088
2027	14184	6174	9891	47370	79646
2032	16170	6953	11434	57616	94204
2037	18156	7731	12977	67861	108763

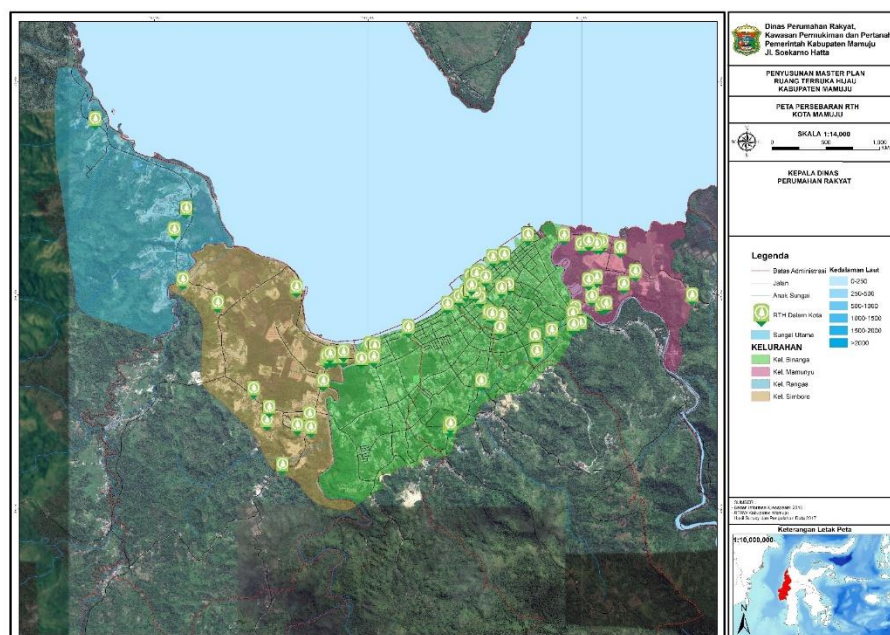
Sumber: BPS Mamuju Tahun 2016 dan Hasil Perhitungan Proyeksi 2017

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada table 3, perhitungan kebutuhan RTH kawasan perkotaan Kota Mamuju berdasarkan Permen PU No. 5/PRT/M/2008, maka dihasilkan RTH sesuai hierarki sebagai berikut :

Tabel 4. Analisa Jumlah RTH yang dibutuhkan Kota Mamuju Tahun 2037

No.	Jenis RTH	Jumlah Unit	Luas Minimal (m ²)	Luas Minimal (ha)
1	Rukun Tetangga	435	108.763	10,88
2	Rukun Warga	44	54.381	5,44
3	Kelurahan	4	32.629	3,26
4	Kecamatan	1	21.753	2,18
5	Taman Kota	1	34.804	3,48
6	Hutan Kota	1	435.051	43,51
7	Pemukaman	15	130.515	13,05
Total RTH		500	817.895	81,79

Sumber Data : Hasil Analisa, 2017



Gambar 2 Peta Rencana Sebaran RTH Di Kota Mamuju

Berdasarkan hasil analisis dari luas wilayah perkotaan 1.592,4 Ha dengan menggunakan standar 30 % dari luas wilayah Perkotaan Kabupaten Mamuju, maka luas RTH yang dibutuhkan pada kawasan Perkotaan Mamuju seluas 477.72 ha yang terdiri dari RTH Publik seluas 318.48 ha yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dan RTH Privat seluas 159.24 ha yang harus disediakan oleh masyarakat.

Tabel 5. Estimasi kebutuhan standar RTH di Kawasan Perkotaan Kabupaten Mamuju

No	Jenis Pemanfaatan	Proporsi (%)	Luas (Ha)
1	RTH Publik	20	318,48
2	RTH Privat	10	159,24
Jumlah Total RTH		30	477,72
Kawasan Perkotaan Kabupaten Mamuju		1.592,40	Ha

Sumber Data : Hasil Analisis Berdasarkan Luas Lahan, 2017

Tabel 6. Rekapitulasi Kebutuhan RTH Kota Mamuju

No	Kebutuhan RTH	Proporsi (%)	Luas (Ha)
1	Luas Eksisting	1,65	26,19
2	Luas Wilayah (30%)	30	477,72
3	Jumlah Penduduk 2017	2,8	37,99
2	Proyeksi Penduduk 2037	5,14	81,79
Rekapitulasi RTH			
Eksisting - Luas Wilayah 30%			451,53 Ha
Eksisting - Jumlah Penduduk 2017			11,80 Ha
Eksisting - Proyeksi Penduduk 2037			55,60 Ha

Sumber Data : Hasil Analisis Kebutuhan RTH Kota Mamuju, 2017

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan RTH Kota Mamuju, digunakan rekapitulasi terhadap pembangunan RTH yang bersifat *sustainable* untuk menjadi landasan pemerintah dalam melakukan pengembangan dan optimalisasi RTH. Optimalisasi dilakukan berdasarkan tiga kategori pengembangan RTH yaitu berdasarkan luas wilayah sebesar 451,53 Ha, jumlah penduduk 2017 sebesar 11,80 Ha, dan berdasarkan proyeksi penduduk 2037 sebesar 55,60 Ha.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan perhitungan kondisi eksisting RTH pada tahun 2017 sebesar (26,19 Ha/ 1,65%), berdasarkan jumlah penduduk tahun 2017 adalah 37,99 Ha (2,8 % luas wilayah) dan perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah pada tahun 2037 sebesar (81,79 Ha/ 5,14% dari luas wilayah perkotaan) dan kebutuhan RTH berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2037 sebesar 500 unit menurut hierarki jenisnya. Sehingga pemenuhan RTH di kawasan perkotaan Mamuju dibutuhkan sebesar (318,48 Ha atau sebesar 20% RTH Publik dengan kebutuhan 500 unit dan sebesar (159,24 Ha

atau 10% untuk RTH Privat. Dengan demikian, pemenuhan RTH di Kawasan Perkotaan Mamuju dapat mendukung perwujudan Mamuju *green city*.

Rekomendasi yang diusulkan untuk pemenuhan RTH di Perkotaan Mamuju diantaranya penyediaan lahan oleh pemerintah/swasta untuk pembangunan RTH Publik dan penyediaan RTH privat oleh masyarakat, sekolah, kantor dll. Implementasi pemenuhan RTH sangat dibutuhkan sehingga harus dibuatkan regulasi oleh pemerintah bersama DPR dalam bentuk Perda sehingga implementasi pemenuhan RTH Mamuju dapat mendukung Mamuju *green city* dalam hal *green open space*.

Referensi

- Joga, Nirwono. 2017. *Mewariskan Kota Layak Huni*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Joga, Nirwono dan Bayu Wardhana. 2017. *Kota Cerdas Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Nugroho, Dwi Suryadi dan Ernady Syadiah. 2013. "Strategi Peningkatan Kualitas Empat Atribut Green City Di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol 13 (2) : 1-9.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2008. "*Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Permen PU no. 05/PRT/M/2008)*". Departemen Pekerjaan Umum. Diakses 09 November 2018. (http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_peraturan_uu/permenPU5-2008.pdf)
- Kementrian Dalam Negeri. 2007. "*Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri no. 01 tahun 2007)*". Diakses 09 november 2018. (ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/permen/permen_1_2007.pdf)

Menggagas Kampung Kota Berkelanjutan

Wisnu Saputra, Arstektur, Teknik, Universitas Muslim Indonesia. E-Mail: Wsaputra1596@gmail.com

Muhammad Rizal, Arstektur, Teknik, Universitas Muslim Indonesia. E-

Mail:muhammadridzal96@gmail.com

Abstrak

Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan merupakan sebuah fenomena yang kita temukan hari ini, berdasarkan data dari badan pusat statistik Indonesia, pada tahun 2017 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 261.890,9 juta jiwa, angka yang cukup besar untuk sebuah Negara berkembang. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia memberikan dampak terhadap kebutuhan hidup masyarakat, termasuk kebutuhan tempat tinggal, salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi, masyarakat membutuhkan ruang yang cukup humanis untuk menjalani kehidupan dengan kesesakan penduduk pada setiap ruang kota. kampung kota merupakan salah satu kawasan pada perkotaan yang jarang di perhatikan dalam perencanaan pembangunan kota, gedung - gedung tinggi dan perencanaan kota baru (New Urbanism) menjadikan kampung kota semakin Termarginalkan dari pembangunan. Banyak aspek yang belum maksimal dalam perencanaan suatu kawasan, ruang publik, sarana kreativitas masyarakat, sanitasi, dan sistem mitigasi bencana merupakan unsur penting dalam merencanakan suatu kawasan. Oleh karena itu perencanaan kawasan dengan konsep berkelanjutan merupakan salah satu landasan penting dalam merencanakan sebuah permukiman, dalam perencanaan kampung kota berkelanjutan mempertimbangkan aspek sosial serta kearifan lokal yang nantinya di interpretasikan melalui perencanaan sarana dan prasaranan permukiman yang menunjang aktifitas maupun kegiatan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data, menganalisis data, serta menginterpretasi data untuk mengambil kesimpulan serta memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang diangkat.

Kata Kunci: Berkelanjutan, Kampung Kota, Urbanisasi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbesar asia tenggara, berdasarkan data dari badan pusat statistik Indonesia pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mencapai 261.890,9 juta jiwa, jumlah yang cukup besar untuk sebuah Negara berkembang. Peningkatan jumlah penduduk tentu memberikan sumbangsi tersendiri bagi perkembangan pembangunan di Indonesia. Salah satunya yaitu peningkatan jumlah penduduk atau sumber daya manusia untuk menghadapi gelombang arus globalisasi dan tantangan pembangunan kedepanya. Namun peningkatan jumlah penduduk secara signifikan menimbulkan pertanyaan terhadap kemampuan suatu bangsa dalam menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk mendorong meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, salah satunya adalah pemenuhan hunian atau lingkungan tempat tinggal yang baik dan sesuai dengan standar sebuah permukiman untuk menunjang seluruh aktifitas masyarakat kota, baik aktifitas privat maupun aktifitas sosial masyarakat.

Hunian atau tempat tinggal merupakan tempat bernaung seseorang untuk hidup dan melanjutkan kehidupanya, sebagian besar kehidupan seseorang dihabiskan di lingkungan tempat tinggal, oleh karena itu lingkungan tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi manusia, khususnya pembentukan pola hidup masyarakat komunal yang berada di perkotaan. Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang,

Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum yang berisi tentang fasilitas permukiman yaitu sarana dan fasilitas yang menunjang aktifitas sosial masyarakat sehingga terciptanya lingkungan binaan yang kondusif dan berkelanjutan adapun fasilitas yang dimaksud yaitu sarana pendidikan, kesehatan, keamanan, utilitas dan ruang publik. Berdasarkan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Oleh Karena itu perencanaan kampung kota yang berkelanjutan diinterpretasikan dengan pemenuhan fasilitas dan prasarana permukiman yang sesuai dengan standar dengan tujuan memenuhi kebutuhan aktifitas maupun kegiatan sosial masyarakat.

Kajian Pustaka

Pengertian kampung kota yang dapat disepakati semua pihak belum terumuskan. Beberapa pakar mendefinisikan kampung kota sebagai berikut; Kampung merupakan kawasan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik kurang baik. (Budiharjo, 1992); Kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut 'slum' atau 'squater' (Turner, 1972); Kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, ditandai ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat Kampung kotor yang merupakan bentuk permukiman yang unik, tidak dapat disamakan dengan 'slum' dan 'squater' atau juga disamakan dengan permukiman penduduk berpenghasilan rendah. Menurut Hendrianto (1992) perbedaan yang mendasari tipologi permukiman kumuh adalah dari status kepemilikan tanah dan Nilai Ekonomi Lokasi (NEL).

Infrastruktur (perkotaan) adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Adisasmita, 2012). Infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Elemen dasar lingkungan perumahan menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam infrastruktur fisik, antara lain:

Jaringan jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air.

Sistem drainase

Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

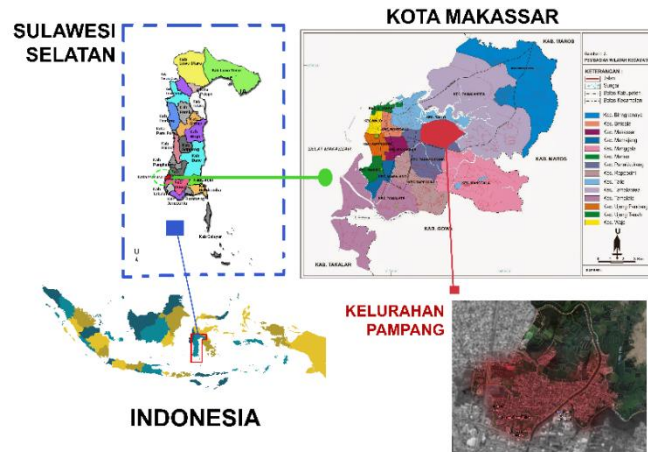
Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena – fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel – variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi bisa individual atau menggunakan angka – angka, Sukmadinata (2006 : 5).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu, pengumpulan data, menganalisis data, dan menginterpretasi data serta mengambil kesimpulan dari hasil analisis pembahasan, metode pengumpulan data dilakukan dengan survei primer dengan cara turun langsung

ke lokasi penelitian serta selanjutnya menggunakan survei sekunder atau metode pengumpulan data yang terdapat pada buku, data statistik, artikel ilmiah, jurnal dan instansi yang berkaitan.

Objek pengamatan dilakukan pada kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar. Kelurahan Pampang memiliki luas wilayah 2.71 km², dan memiliki sebanyak 8 RW dan 41 RT. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang luas pada kecamatan Panakukkang, dengan jumlah penduduk sebanyak 16.809 jiwa, terdiri dari 8.328 jenis kelamin laki – laki dan 8.481 jenis kelamin perempuan. Pengamatan terfokus pada ketersediaan sarana dan fasilitas permukiman yang sesuai dengan standar yaitu sarana dan fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, utilitas, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan fasilitas pejalan kaki.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Sumber : Analisis Pribadi

Analisis dan Pembahasan

Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yaitu kota Makassar, kota dengan luas kawasan 175.77 km² dengan kepadatan penduduk sebesar 1.449.401 jiwa pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 1,36 persen dari tahun sebelumnya, salah satu kota yang menjadi pintu gerbang Indonesia Timur yang, salah satu kota yang mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga berdampak pada seluruh aktifitas penduduk kota termasuk aktifitas pembangunan, atau hunian masyarakat yang harus menjawab persoalan yang ada di kota. (BPS Kota Makassar, 2016).



Gambar 2. Peta Kota Makassar

Sumber : Dinas Tata Ruang Kota Makassar

Tinjauan Khusus Lokasi Penelitian

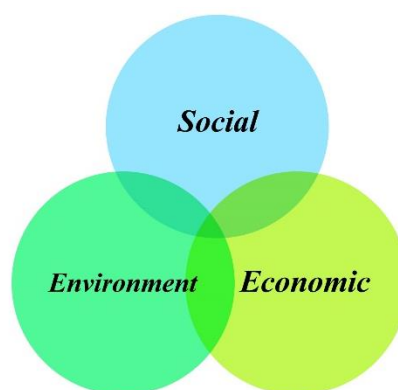


Gambar 3. Peta Kelurahan Pampang
Sumber : Analisis Pribadi

Kelurahan Pampang memiliki luas wilayah 2,71 km², dengan jumlah 8 RW dan 41 RT, Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tamamaung, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panaikang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sinrijala, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karuisi Utara, Secara keseluruhan Kelurahan Pampang memiliki luas 2,71 Km². Kelurahan ini adalah kelurahan yang luas pada kecamatan panakukang, dengan jumlah penduduk sebanyak 16,809 jiwa, adapun rincianya 8,328 jenis kelamin laki-laki dan 8,481 jenis kelamin perempuan.

Sustainable Urban Development

Sustainable Development merupakan sebuah gagasan yang muncul hari ini dalam melakukan perencanaan suatu pembangunan, dalam hal ini gagasan tersebut bertolak pada isu keberlanjutan lingkungan binaan. *Sustainable Urban Development* memiliki tiga pilar utama yaitu, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang kemudian diimplementasikan dalam sebuah perencanaan pembangunan sebuah kawasan.



Gambar 4. Analisis tiga pilar Sustainable Development
Sumber : Arsitektur Hijau dalam Inovasi Kota, 2014

Setiap permukiman dilengkapi dengan fasilitas kawasan yang diantaranya fasum atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas umum terdiri dari prasarana yang menunjang kegiatan masyarakat berupa ketersediaan akses jalan, ruang publik dan infrastruktur kawasan lainnya. Sedangkan fasilitas

sosial terdiri dari prasarana atau fasilitas yang menunjang kegiatan sosial masyarakat setempat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Pilar utama pada kajian *sustainable urban development* yaitu pilar sosial yang diterjemahkan dalam kondisi sosial masyarakat setempat dan pengadaan fasilitas yang menunjang di dalamnya. Penelitian terfokus pada sarana dan fasilitas kawasan tersebut, adapun kondisi kawasan tersebut berdasarkan masing – masing tiga kategori pendekatan *sustainable urban development* yaitu :

Kategori Pilar Sosial

Kategori	Existing Condition	Gambar
Kondisi Interkasi Sosial Masyarakat	Kondisi interaksi sosial pada masyarakat terjalin dengan baik, hal tersebut ditandai dengan adanya ruang – ruang komunal yang dihasilkan oleh masyarakat dalam membangun interaksi dalam kehidupan sehari – hari, baik dalam sebuah kegiatan formal maupun informal.	
Ketersediaan Ruang Publik	Pada umumnya ruang publik merupakan salah satu fasilitas yang harus ada pada sebuah permukiman, namun ruang publik dapat dikatakan berfungsi secara maksimal apabila terdapat sebuah ruang yang disediakan untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan sosial masyarakat. berdasarkan hasil pengamatan langsung kurangnya fasilitas ruang publik yang ada sehingga masyarakat lebih membentuk ruang tersendiri pada lingkungan permukiman, baik dalam ruangan dan luar ruangan.	
Ketersediaan Akses Pejalan Kaki	Permukiman yang padat dan luas jalan yg terbatas menjadikan kebutuhan akan akses pejalan kaki dalam hal ini trotoar tidak diadakan, serta masih minimnya akses untuk fasilitas pejalan kaki berupa trotoar yang tersedia.	
Ketersediaan Fasilitas Parkir Kendaraan	Tidak tersedianya fasilitas parkir yang memadai sehingga kendaraan masyarakat meletakkan kendaraanya pada jalan yang mengakibatkan kemacetan pada kawasan tersebut.	




Kategori Pilar Lingkungan

Ketersediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Berdasarkan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30%. Menurut Eckbo (1964), untuk mengakomodasikan kebutuhan antara 100-

300 orang, paling sedikit diperlukan 40.000 m² luasan ruang terbuka hijau, dimana luasan ini di distribusikan menjadi areal sebagai berikut :

1. Taman lingkungan ketetanggaan (*neighbourhood park*) seluas 4.000 m² dengan jangkauan pelayanan 10-200 m.
2. Taman lingkungan komunitas seluas 100.000 m² dengan jangkauan pelayanan 625-900 m.
3. Taman kota atau taman regional dengan luasan yang lebih besar dan berada pada daerah yang strategis.

Kategori	Existing Condition	Gambar
- Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Minimnya ruang terbuka hijau pada kawasan, sehingga untuk memnuhi standar 30 % ketersediaan RTH Kawasan belum terpenuhi.	
- Kondisi Drainase atau Saluran air	Kondisi drainase tergolong baik namun belum berfungsi secara maksimal, dalam waktu tertentu drainase tidak dapat menyalurkan air	
- Ketersediaan Tempat Sampah	Fasilitas tempat sampah yang kurang baik menimbulkan pencemaran pada area permukiman.	

No	Hierarki Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Luas Terbuka (m ² /1.000 Jiwa)	Penggunaan Ruang Terbuka
1	Ketetanggaan / Neighbourhood	1.200	4.320	12.000	Lap. Bermain, areal rekreasi, taman
2	Komunitas	10.000	36.000	20.000	Lap. Bermain, taman lingkungan
3	Kota			40.000	R. Terbuka umum, taman, areal bermain (termasuk R. Terbuka Komunitas)
4	Wilayah Regional			80.000	R. terbuka umum, taman, areal rekreasi, tempat berkemah (termasuk R. Terbuka Kota)

Gambar 5. Luasan Ketersediaan RTH Untuk Umum



Sumber: Permen PU No. 05/PRT/M/2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap 250 penduduk membutuhkan taman dan tempat bermain anak dengan luasan sekitar 250 m² atau dengan standar 1m²/penduduk. Untuk setiap kawasan dibuthkan tempat bermain anak ruang publik dan setiap 2.500 penduduk disediakan sebuah taman bermain dan olah raga seluas 1.250 m² dengan standar 0,5 m²/penduduk. Besaran standar untuk jalur hijau adalah 15 m²/penduduk. Lokasinya bisa menyebar dan sekaligus merupakan filter

dari daerah industri atau daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya polusi. Perhitungan ketersediaan RTH pada sebuah kawasan dapat di hitung dari jumlah penduduk dan luasan kawasan dan ketersediaan lahan.

Kategori Pilar Ekonomi

Tujuan dari pilar ekonomi yaitu untuk mewujudkan economic sustainability atau sebuah pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan masyarakat untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2002). Adapun kondisi ketersediaan fasilitas perniagaan pada kawasan tersebut yaitu :

Kategori	Existing Condition	Gambar
- Ketersediaan Fasilitas Perniagaan	Fasilitas perniagaan hanya terdapat di titik tertentu wilayah	
- Ketersediaan Pedagang / usaha	Jumlah pedagang/usaha membuat kebutuhan lahan menjadi meningkat sehingga banyak mendirikan lapak usaha secara illegal.	

Rekomendasi

Berdasarkan hasil identifikasi ketersediaan fasilitas dan prasarana penunjang kawasan kelurahan pampang kota Makassar, maka adapun rekomendasi terhadap perencanaan fasilitas kawasan yaitu sebagai berikut :

Kategori	Pengembangan / Perencanaan
Fasilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas jalan raya dan trotoar serta drainase kawasan yaitu dengan pelebaran jalan dan pembuatan akses pejalan kaki (trotoar) pada kawasan tersebut. - Peningkatan kualitas tempat pembuangan sampah pada kawasan.
Fasilitas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan ruang terbuka hijau dan yang sesuai dengan standar permukiman. - Penyediaan sarana dan fasilitas penunjang perekonomian pada kawasan.



Gambar 6. Rekomendasi Desain Perencanaan Fasilitas Kawasan
 Sumber : Analisis Pribadi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka untuk menggagas kampung kota berkelanjutan dibutuhkan sarana dan fasilitas yang sesuai dengan standar sebuah permukiman kota untuk menunjang seluruh aktifitas maupun kegiatan sosial masyarakat. perencanaan kampung kota terdiri dari penrencanaan fasilitas umum yang terdiri dari perencanaan jalan, utilitas kawasan, drainase, dan fasilitas trottoar yang ramah terhadap pejalan kaki. Adapun perencanaan fasilitas sosial yaitu perencanaan ruang publik, sarana dan prasarana sosial lainnya berupa sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian pada sebuah permukiman. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau pada sebuah kawasan yang berfungsi sebagai resapan air serta sebagai penghijauan pada kawasan kota.

Referensi

- BPS Kota Makassar. 2016. *Makassar City In Figures 2016*. BPS-Statistics of Makassar City.
- Haryati, Kampung Kota Sebagai Bagian Dari Permukiman Kota (Studi kasus Tipologi Permukiman RW 01 RT 02 Kelurahan Limba B dan RW 04 RT 04 Kel. Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo), 2011, INOVASI, Volume 8, Nomor 3, Halaman 102.
- Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Eckbo, G. 1964. *De Urban Landscape Design*. New York :Mc Graw Hill Book Company.
- Permen Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2018 *Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*, Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.
- Kusmawanto Arfi, Budi Astuti Zulaikha. 2017. *Arsitektur Hijau Dalam Inovasi Kota*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Tongkrongan: Fenomena Ruang Kenakalan dalam Perspektif Kriminologi Budaya

Muhamad Bill Robby, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia. E-Mail: muhamadbillr@gmail.com

Abstrak

Artikel ini didasari pada fenomena bahwa beberapa anak pada tingkat sekolah menengah atas di Jakarta setidaknya memiliki satu tempat yang didefinisikan sebagai “tongkrongan” bersama teman sebaya yang letaknya tidak jauh dari lingkungan sekolah mereka. “Tongkrongan” tersebut dijadikan tempat untuk bersosialisasi usai jam belajar mengajar berlangsung. Namun, “tongkrongan” menjadi ruang di mana berbagai bentuk kenakalan terjadi dan ditransmisikan dari satu individu kepada individu lain. Sehingga, terdapat hubungan antara ruang yang bersifat *criminogenic* dengan perilaku kenakalan yang sifatnya trajektori. Dengan menggunakan pendekatan sosio-kriminologis ditambah pendekatan lingkungan dalam disiplin kriminologi, tulisan ini bertujuan untuk mengenali fenomena “tongkrongan” melalui perspektif kriminologi budaya dan cara terbaik untuk mencegah “tongkrongan” menjadi tempat yang *criminogenic* melalui *crime prevention through environmental design* (CPTED). Tulisan ini adalah hasil telaah dari berbagai sumber ilmiah yang dilengkapi wawancara dengan dua informan yang memiliki intensitas tinggi terlibat dalam “tongkrongan”. Hasil temuan dari tulisan ini adalah “tongkrongan” dapat dikategorikan sebagai *crime as culture* dalam perspektif kriminologi budaya yang menghasilkan subkultur menyimpang berupa kenakalan pada siswa sekolah menengah atas. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menghentikan hal ini terus berlangsung diperlukan desain fisik lingkungan di sekitar “tongkrongan” dengan mengedepankan empat prinsip CPTED, mencakup: (1) *natural surveillance*; (2) *natural access control*; (3) *territorial reinforcement*; dan (4) *maintenance and management* dengan pendekatan *designation*, *definition* dan *design* melalui usaha pelibatan kapasitas komunitas disekitar “tongkrongan”.

Kata Kunci: CPTED, *criminogenic*, kenakalan, kriminologi budaya, tongkrongan

Pendahuluan

Masalah kenakalan anak sudah menjadi isu yang sering dikemukakan oleh para kriminolog, khususnya di Amerika Serikat sejak abad ke-20 (lihat Reckless 1961; Sykes dan Matza 1957; Cohen 1955; Cloward dan Ohlin 1961; Miller 1958; Hirshi 1969).

Dari perkembangan khazanah keilmuan tentang kenakalan anak, beberapa kriminolog memusatkan perhatian pada proses sosial dan interaksi yang terjadi di masyarakat. Karena mereka percaya bahwa kebanyakan orang dibentuk bukan melalui produk lingkungan atau struktur sosial yang ada, melainkan melalui interaksi dengan berbagai institusi sosial seperti keluarga, teman, sekolah dan teman sebaya. Ketika seseorang berinteraksi maka terjadi proses sosialisasi yang dapat bersifat positif atau disfungsi bahkan destruktif (Siegel 2011, hlm. 168).

Sosialisasi yang bersifat disfungsi dan destruktif tersebut—khususnya pada anak—dapat menimbulkan perilaku kenakalan, seperti kekerasan, perundungan dan penyalahgunaan narkoba (Siegel 2012, hlm. 231). Dan sosialisasi ke arah destruktif itu sebagian besar bermula dari ruang bernama “tongkrongan” yang hampir selalu ada di setiap sekolah menengah atas di Jakarta. Tongkrongan yang tidak sehat cenderung sebagai katalisator atau bahkan variabel prediktor untuk mentransmisikan perilaku kenakalan dari satu individu terhadap individu lainnya. Sehingga kenakalan menjadi suatu alternatif tindakan bagi seorang anak (Steketee 2012, hlm. 238). Penyimpangan dan

kenakalan banyak terjadi ketika anak bersama-sama dengan kelompok sosial di mana mereka berada (Bynum dan Thompson 2007, hlm. 333).

Fenomena tongkrongan menjadi hal yang unik untuk dikembangkan menjadi kajian teoretis baik secara kultural maupun secara spasial. Untuk itu, dalam artikel ini, penulis akan membahas fenomena tongkrongan dalam perspektif kriminologi budaya dan cara mencegah serta menanggulangi dengan model CPTED. Perspektif kriminologi budaya menjadi relevan dalam menganalisis fenomena kenakalan karena kriminologi budaya adalah salah satu perspektif yang secara utuh membahas hubungan antara kultur dan ruang, khususnya ruang yang ada di perkotaan (lihat Hayward 2004; Ferrel 2004; Alvelos 2004; Fenwick 2004). Selain itu, kriminologi budaya memandang bahwa subkultur—dalam hal ini budaya tongkrongan—adalah suatu proses penciptaan budaya yang bersifat kreatif dan mampu bertahan (resisten) terhadap budaya dominan yang terus dilestarikan secara simbolik oleh kelompok *outsider* untuk menentang budaya dominan itu sendiri (Ferrel, et al. 2008, hlm. 4). Sementara itu, model CPTED menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan berbagai pencegahan serta penanggulangan terhadap kenakalan, karena CPTED didasari pada intervensi konteks fisik suatu ruang yang relatif lebih mudah dilakukan dibanding intervensi atau manipulasi melalui konteks sosial (Reynald dan Elffers 2009, hlm. 26). Pengembangan model CPTED berpotensi untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan anak yang sering terjadi dalam tongkrongan.

Kajian Pustaka

Secara ringkas, kriminologi budaya adalah suatu perspektif yang berusaha memahami 'budaya' sebagai sesuatu yang memiliki makna dan identitas kolektif (Ferrel et al. 2008, hlm. 2). Kriminologi budaya secara historis adalah hasil dari sintesis dua teoretisi besar, yaitu antara aliran studi budaya yang berasal dari Britania Raya dan kriminologi interaksionisme simbolik yang berasal dari Amerika Serikat (Ferrel 1999, hlm. 397). Kriminologi budaya sangat menekankan pada sensitivitas terhadap gambaran, arti, dan representasi dari suatu tindak kejahatan, yang pada akhirnya, berbagai gambaran, arti dan representasi tersebut diciptakan dan dikonsumsi oleh para pelaku kejahatan, aktor subkultur, agen pengendalian sosial, media dan audiens, sehingga menciptakan apa yang disebut *media loops and spirals* mengenai gambaran suatu kejahatan (Ferrel 1999, hlm. 396-397).

Kriminologi Budaya kokus pada dua dinamika: (1) *crime as culture*, yaitu cara di mana perilaku kriminal menggabungkan komponen-komponen budaya seperti mode, gaya berpakaian, dan bahasa; dan (2) *culture as crime*, cara di mana produk kebudayaan seperti seni dan musik sering dikriminalisasikan oleh otoritas legal dan *moral entrepreneurs* (Ferrel 1999, hlm. 403-406).

Salah satu aspek penting yang muncul dalam kriminologi budaya, khususnya tentang tema perkotaan adalah tentang *parafunctional places* yang dikemukakan oleh Nikos Papastergiadis (Hayward 2004, hlm. 452) yaitu ruang kota yang terlupakan, terabaikan atau mungkin tak berguna. Ruang-ruang yang demikian tidak berjalan sesuai dengan aktivitas yang semestinya terjadi, baik dari segi bentuk dan peruntukannya. Hayward (2004) menyebutnya sebagai *functionless place*. Tempat-tempat yang dikatakan sebagai *parafunctional places* tidak hanya kekurangan berbagai pengawasan, juga karena ruang-ruang yang demikian menjadi ruang yang terlupakan dan tak bertuan, dan sering dimetaforakan sebagai *places on the edge of socieity*. Oleh karena itu, muncul usaha pencegahan kejahatan situasional untuk megembalikan ruang yang fungsinya telah menghilang, agar tertata sesuai rencana. Hal ini dilakukan melalui usaha untuk menghubungkan antara "ruang" dan "penggunaan" melalui disambiguasi semotika. Sehingga menurut Hayward (2004), mengendalikan kejahatan menjadi sesederhana memetakan suatu tempat, fungsi dan maknanya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, kriminologi budaya sangat menyarankan agar suatu tempat memiliki fungsi dan peruntukkan yang jelas, sehingga tidak menjadi *parafunctional places* yang

berpotensi menimbulkan berbagai tindak kejahatan dan kenakalan. Salah satu pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang dapat diterapkan adalah model *crime prevention through environmental design* atau populer dengan sebutan CPTED yang pertama kali diperkenalkan oleh Clarence Ray Jeffery (1971). Dasar dari CPTED adalah desain yang tepat dan penggunaan yang efektif dari suatu lingkungan dapat mengurangi insiden dan rasa ketakutan terhadap kejahatan. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup suatu komunitas (National Crime Prevention Council, 2003, hlm. 1-3).

Empat prinsip utama CPTED mencakup: (1) *natural surveillance*, yaitu pengawasan untuk tetap menjaga para pelaku berada di bawah kontrol komunitas; (2) *natural access control*, yaitu membatasi akses masuk pada orang yang tidak berkepentingan, dengan berbagai hal seperti pintu, pagar, semak, pencahayaan, maupun penghalang psikologis (*psychological barrier*), namun, dengan prinsip tidak membatasi atau bahkan menyulitkan mobilitas; (3) *territorial reinforcement*, yaitu pendefinisian yang jelas mengenai batas ruang publik dan ruang privat, dengan batas dan pendefinisian yang jelas, maka pemeliharaan ruang memiliki lansekap untuk mengekspresikan kepemilikan; dan (4) *maintenance and management*, yaitu rasa “kebanggaan” terhadap teritori atau lingkungan yang dimiliki, melalui kohesi sosial, pengembangan identitas dan ciri suatu komunitas sehingga dapat diterima oleh orang lain di luar komunitas yang bersangkutan (National Crime Prevention Council 2003, hlm. 4-5).

Secara konseptual, empat prinsip CPTED diterapkan melalui *3-D approach*, yaitu, *designation*, *definition*, dan *design*. *3-D approach* adalah panduan sederhana untuk mengevaluasi ruang yang membantu pengguna dalam menentukan kesesuaian bagaimana ruang dirancang dan digunakan. Konsep *3-D approach* didasarkan pada tiga fungsi atau dimensi ruang manusia: (1) semua ruang yang digunakan manusia memiliki beberapa tujuan yang sudah ditentukan peruntukannya; (2) semua ruang yang digunakan manusia memiliki definisi sosial, budaya, hukum atau fisik yang membatasi perilaku yang diinginkan dan dapat diterima; (3) semua ruang yang digunakan manusia dirancang untuk mendukung dan mengendalikan perilaku yang diinginkan.

Metode Penelitian

Dalam artikel ini, penulis menggunakan desain penelitian kualitatif sederhana, dengan melakukan wawancara tipe *semi-structured interview* (Bryman 2012, hlm. 470). Dalam memilih subjek penelitian, penulis membatasi pada subjek yang telah dikenal sebelumnya, agar penggalan informasi mudah dilakukan, karena tidak memerlukan pendekatan khusus seperti subjek yang baru pertama kali ditemui. Penulis berbincang kepada dua subjek yang berasal dari dua sekolah menengah atas di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Perbincangan tersebut dilakukan sebanyak dua kali untuk masing-masing subjek. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder dari berbagai jurnal ilmiah serta buku yang dianggap relevan untuk membantu melengkapi temuan data.

Hasil dan Pembahasan

Dari wawancara yang dilakukan terhadap dua informan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, ada beberapa informasi yang sekiranya penting dan menjadi temuan yang sangat menarik untuk dibahas. Pertama, adalah mengenai inisiasi saat masuk ke dalam tongkrongan. Informan pertama mengatakan untuk mendapatkan predikat sebagai anggota tongkrongan, ia harus melalui sejumlah proses inisiasi yang ditentukan oleh senior. Inisiasi yang harus dilakukan adalah dengan berkelahi satu sama lain, baik antar teman dalam satu sekolah atau antar dua sekolah yang berbeda. Menyediakan sekolah lain untuk jadi lawan bertanding sepenuhnya ditentukan oleh senior. Sementara itu, informan kedua mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam suatu tongkrongan, tidak ada proses inisiasi sebagaimana yang dialami oleh informan pertama. Setiap siswa boleh ikut terlibat dalam tongkrongan tanpa proses inisiasi sebelumnya.

Kedua, adalah aktivitas yang sering dilakukan dalam tongkrongan. Untuk dimensi ini, antara informan pertama dan informan kedua memiliki kesamaan aktivitas. Mereka mengatakan bahwa di dalam tongkrongan merokok adalah hal yang sudah sangat lazim terjadi. Begitupun dengan mengonsumsi minuman keras jenis ciu atau anggur merah yang harganya relatif terjangkau, yang dilakukan rutin hampir setiap minggu. Untuk membeli minuman keras, mereka biasanya kolektif agar bisa dikonsumsi bersama-sama. Cukup mengejutkan—bagi penulis—bahwa dalam tongkrongan di dekat lingkungan sekolah, konsumsi ganja adalah hal yang biasa terjadi, maupun konsumsi jenis narkoba lainnya, salah satunya adalah “tembakau super cap gorila” yang menurut informan kedua memiliki efek yang lebih hebat dibanding mengonsumsi ganja. Biasanya, narkoba yang digunakan oleh mereka didapatkan dari para alumni yang masih sering datang dan ikut menongkrong.

Dan aktivitas lain yang sering dilakukan adalah berkelahi yang biasa disebut dengan *partai*, yaitu berkelahi satu lawan satu dengan tangan kosong antar siswa di dua sekolah yang berbeda. Untuk melakukan *partai*, biasanya ada satu sekolah yang mengajak sekolah lain untuk berkelahi. *Partai*, biasanya dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan, lahan kosong atau taman kota. Menurut informan pertama, alasan seseorang mengikuti *partai* adalah untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah yang terhebat soal berkelahi, sehingga dirinya dikagumi oleh satu sekolah. Sementara itu, menurut informan kedua, alasan seseorang melakukan *partai* adalah untuk mengimplementasikan seni bela diri *Muay Thai* yang sudah ia pelajari.

Dalam kriminologi budaya, salah satu fokus yang menjadi perhatian utama adalah *crime as culture* yang membahas bagaimana sebuah tongkrongan dan individu yang terlibat di dalamnya dapat dilihat selalu melakukan usaha merepresentasikan dan mengaktualisasikan diri mereka lewat tongkrongan yang ada. Ferrel (1999) menyebutnya sebagai *stylized representation of self*; di mana kehadiran seseorang dalam suatu kelompok subkultur dipandang untuk menguatkan keberadaan serta eksistensi mereka, baik dalam lingkungan subkultur tersebut, maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Selain itu, tongkrongan memiliki sejumlah *collective meaning* atau simbol yang secara kolektif selalu digunakan untuk memberikan batas yang jelas mengenai anggota dan bukan anggota melalui sejumlah ritual inisiasi maupun penggunaan tanda identitas lain seperti jaket yang seragam untuk para anggotanya.

Secara kolektif, tongkrongan pun aktif melakukan adopsi berbagai budaya yang ada di masyarakat lalu dimodifikasi untuk menjadi ciri khas tersendiri dalam suatu subkultur (*crime as culture*) (Ferrel 1999, hlm. 403). Salah satu contohnya mengenai kegiatan *partai* yang dilakukan. Mereka mengadopsi sesuatu yang sesungguhnya merupakan produk budaya (*Muay Thai*) lalu dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga tujuan *Muay Thai* sebagai olahraga dan seni bela diri dikaburkan untuk tujuan berkelahi dan menunjukkan representasi mereka di dalam subkultur tersebut. Selain itu, adanya partisipasi pada aktivitas *partai* dapat dikatakan sebagai partisipasi yang dapat “memacu adrenalin”, sangat berisiko, berbahaya dan memerlukan keahlian yang tinggi. Hal ini sering dijadikan pengalaman untuk memahami (*verstehen*) aktivitas tersebut lewat kerangka yang disebut dengan *edgework*.

Dalam kriminologi budaya yang membicarakan tentang perkotaan, maka salah satu istilah yang sering muncul adalah *parafunctional place* yang telah dijelaskan pada bagian kajian pustaka sebagai tempat yang terlupakan, terabaikan atau mungkin tak berguna (Hayward, 2004 hlm. 157). Tongkrongan yang ada di sekitar sekolah seringkali menjadi tempat yang *parafunctional*. Karena, menurut dua informan tersebut, tempat untuk menongkrong adalah tempat yang relatif sepi dan tidak ada rumah penduduk disekitarnya. Hal ini dimanfaatkan oleh para siswa untuk melakukan sejumlah kenakalan baik itu merokok, minum minuman keras, berkelahi, atau bahkan mengonsumsi narkoba.

Mengulik lebih dalam soal *partai*, biasanya mereka melakukan perkelahian tersebut di lapangan terbuka yang sepi dan jauh dari keramaian. Lapangan terbuka yang digunakan pun bukan berarti

tempat yang benar-benar tidak memiliki fungsi, tetapi karena fungsi dan peruntukkan tempat tersebut yang tidak jelas, maka timbul penyalahgunaan ruang untuk aktivitas perkelahian. Menurut informan pertama, *partai* seringkali terjadi di taman-taman kota dengan kondisi pepohonan rindang. Sementara informan kedua mengatakan *partai* sering terjadi di kawasan yang disebut “Jambore” di kawasan Bumi Perkemahan Cibubur. Taman dan tempat perkemahan tersebut kekurangan pengawasan, terlupakan, dan tidak bertuan, sehingga hubungan yang jelas antara “ruang” dan “penggunaan” tidak tersampaikan dengan baik.

Untuk itu, menanggulangi dan mencegah fenomena ruang kenakalan yang sudah disebutkan di atas dapat dilakukan dengan memaksimalkan CPTED pada lingkungan disekitar tongkrongan maupun tempat yang sering dijadikan lokasi berkelahi. Keempat prinsip yang dibicarakan merupakan saran yang dapat digunakan kepada pihak terkait. Pertama, *natural surveillance*, yaitu pengawasan secara alami dan normal dari komunitas di sekitar jika melihat aktivitas-aktivitas yang dapat mengarah pada kenakalan, karena asumsi dari *natural surveillance* adalah *potential offender* tidak suka jika mereka diamati. Dengan membuka seluas-luasnya suatu daerah untuk diakses oleh publik, maka anggota komunitas (khususnya pejalan kaki yang lewat) dapat memberikan pengawasan alami karena mereka menambah jumlah *eye on the street* secara signifikan (Desyllas et al. 2003, hlm. 244).

Kedua, *natural access control*, yaitu menempatkan berbagai penghalang untuk menghentikan siswa melakukan berbagai aktivitas kenakalan seperti pagar maupun penghalang psikologis lain. Karena menurut informan kedua, jalur untuk masuk ke wilayah Bumi Perkemahan Cibubur sangat banyak selain pintu resmi yang memang dijaga petugas. Menutup akses masuk juga dapat dipandang sebagai usaha menegaskan *sense of territoriality* (Sorensen et al. 2013, hlm. 72). Membatasi akses terhadap suatu area adalah cara yang efektif untuk menghalangi aktivitas kenakalan, contohnya dengan menetapkan satu pintu masuk dan satu pintu keluar saja (Sorensen et al. 2013, hlm. 70), serta penggunaan rambu penanda masuk dan keluar serta pencahayaan yang memadai (Atlas 2013, hlm. 702). Sehingga menghasilkan kesan integritas dan unik pada suatu lingkungan (National Crime Prevention Council 2003, hlm. 4).

Ketiga, *territorial reinforcement*, kesalahpahaman publik mengenai taman dan ruang terbuka hijau sejatinya adalah *no-man's land*, padahal setiap taman pasti punya pemilik, entah itu pemerintah provinsi, pemerintah kota, atau milik perseorangan (Atlas 2013, hlm. 699). Miskonsepsi tersebut dapat diatasi dengan *territorial reinforcement* yang dapat dilakukan dengan cara menguatkan *sense of territoriality*. *Sense of territoriality* yang baik dapat menjadi peringatan pertama bagi *potential offender* bahwa mereka bukanlah anggota dalam suatu area, sehingga mereka merasa mudah dilihat dan diidentifikasi. Hal ini dapat ditingkatkan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan adanya pos penjagaan (Sorensen et al. 2013, hlm. 72). *Territorial reinforcement* juga berarti dimensi penguatan definisi antara area publik, semi-publik, semi-privat, dan privat, sehingga ambiguitas suatu ruang untuk menjadi ruang kenakalan dapat diminimalisir.

Terakhir, adalah *maintenance and management*, yaitu dengan mengoptimalkan perawatan dan manajemen pendukung suatu area, seperti pencahayaan, pagar, dinding, dan sejumlah rambu penanda di sekitar tongkrongan dan area yang digunakan untuk melakukan *partai*. Pengelolaan properti sangat penting untuk memastikan pemeliharaan dijaga sesuai standar perawatan. Jika properti tersebut terpelihara dengan baik, hal itu menunjukkan bahwa komunitas memiliki perhatian dan rasa *pride of place* (National Crime Prevention Council 2003, hlm. 5). Karena, perlengkapan area yang tidak dijaga dengan baik dapat meningkatkan aktivitas kriminal di dalamnya (Sorensen et al. 2013, hlm. 75).

Perlu diingat bahwa mengimplementasikan CPTED tidak mensyaratkan untuk mendesain ulang suatu area secara besar-besaran, mengubah lanskap awal dengan desain yang ramah terhadap pencegahan lingkungan. Untuk mengimplemmentasikan CPTED ke dalam desain lingkungan fisik, hanya

perlu melakukan evaluasi mengenai penggunaan ruang oleh manusia melalui *3-D approach*. Pertama, *designation*, apa maksud dan tujuan penggunaan dari suatu ruang? Kedua, *definition*, bagaimana suatu ruang didefinisikan? Bagaimana definisinya secara sosial, budaya, hukum, dan psikologis ruang didefinisikan? Ketiga, *design*, apakah ruang didefinisikan untuk mendukung perilaku yang ditentukan atau dimaksudkan? Ketiga pendekatan itu dapat digunakan oleh komunitas untuk meninjau ulang manajemen suatu ruang, yang tujuan akhirnya dapat meminimalisir perilaku kenakalan di dalam tongkrongan.

CPTED dapat menjadi kontrol sosial informal melalui pelibatan kapasitas komunitas yang tentunya lebih efektif dibanding upaya kontrol sosial formal (Dermawan 2013, hlm. 205). Yang di Indonesia sendiri dikenal dengan konsep “keamanan swakarsa”, di mana masalah keamanan tumbuh dan berkembang atas keinginan, kemampuan, dan kepedulian masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan terhadap peristiwa kenakalan yang terjadi (Dermawan 2013, hlm. 208).

Kesimpulan

Fenomena tongkrongan dengan segala aktivitas kenakalan yang ada di dalamnya dapat terjadi karena aktivitas-aktivitas tersebut mengisi berbagai ruang yang tidak jelas definisi dan peruntukannya (*parafunctional places*), sehingga ruang yang demikian menjadi ruang yang bersifat *criminogenic*. Melalui kriminologi budaya, aktivitas menongkrong dapat dilihat sebagai *crime as culture*, karena berbagai adopsi budaya umum untuk diterapkan pada budaya subkultur. Untuk mencegah atau setidaknya menghentikan ruang yang *criminogenic* ini dapat dilakukan dengan model *crime prevention through environmental design*, yang dengannya kenakalan dapat diminimalisir melalui desain lingkungan yang tepat dan tentunya dilakukan dengan partisipasi aktif komunitas. Model CPTED yang ada dapat menjadi evaluasi dan implementasi desain lingkungan yang realistis, alami, sederhana dan berbiaya murah. Komunitas dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam melindungi diri sendiri dari kejahatan dan aktivitas kenakalan dengan mengintegrasikan prinsip dan pendekatan CPTED ke dalam desain dan pengelolaan lingkungan fisik.

Referensi

- Atlas, Randall I. 2013. *21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. 4. Oxford: Oxford University Press.
- Bynum, Jack E. dan William E. Thompson. 2007. *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*. New York: Pearson Education.
- Dermawan, Mohammad Kemal. 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Depok: Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Desyllas, Jake, Philip Connoly, dan Frank Hebbert. 2003. “Modelling Natural Surveillance.” *Environment and Planning B: Planning and Design*, 30: 643-655.
- Ferrel, Jeff. 1999. “Cultural Criminology.” *Annual Review of Sociology*, 25: 395-418.
- Ferrell, Jeff, Keith Hayward, dan Jock Young. 2008. *Cultural Criminology*. Los Angeles: Sage Publications.
- Hayward, Keith. 2004. “Space – The Final Frontier: Criminology, the City and the Spatial Dynamics of Exclusion.” Dalam *Cultural Criminology Unleashed*, oleh Jeff Ferrel, Keith Hayward, Wayne Morrison dan Mike Presdee, 155-166. London: Glasshouse Press.

- National Crime Prevention Council. 2003. *Crime Prevention through Environmental Design: Guidebook*. Singapore: National Crime Prevention Council.
- Reynald, Danielle M., dan Henk Elffers. 2009. "The Future of Newman's Defensible Space Theory: Linking Defensible Space and the Routine Activities of Place." *European Journal of Criminology*, 6(1): 25-46.
- Siegel, Larry J. 2012. *Criminology*. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
- Sorensen, Severin L., John G. Hayes, dan Randall I. Atlas. 2013. "Understanding CPTED and Situational Crime Prevention." Dalam *21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention*, oleh Randall I. Atlas, 59-90. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Steketee, Majone. 2012. "The Lifestyles of Youth and Their Peers." Dalam *The Many Faces of Youth Crime: Contrasting Theoretical Perspectives on Juvenile Delinquency across Countries and Culturei*, oleh Josnie Junger-Tas, Ineke Haen Marshall, Dirk Enzmann, Martin Killias, Majone Steketee dan Beata Gruszczynska, 237-256. New York: Springer.

GENDER

Ngucing; Gay Online Prostitution (Studi Kasus pada Tiga Pelacur Gay di Kota Bandung)

Nikodemus Niko, Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. E-Mail: nikodemusn@outlook.com dan nicoeman7@gmail.com

Abstrak

Jasa prostitusi yang disediakan melalui dunia maya hari ini semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Keterbukaan akses komunikasi dan informasi hari ini tidak saja menyajikan dampak positif pada pembangunan nasional, melainkan juga dampak negatif utamanya pada kehidupan sosial. Salah satu dari dampak negatif keterbukaan komunikasi dan informasi pada masyarakat di kota besar yaitu adanya ketersediaan jasa prostitusi online, baik di kalangan heteroseksual maupun homoseksual. Prostitusi sebagai penyakit sosial (stigma) dan pilihan hidup bergulir pada kalangan akademisi itu sendiri, sehingga pada tulisan ini penulis memaparkan analisis dengan pendekatan feminisme. Pada tulisan ini memaparkan tentang aksesibilitas dan ketersediaan jasa prostitusi online di kalangan Gay di Kota Bandung. Metode kualitatif sebagai dasar atas penelitian ini, dengan cara pengumpulan data yaitu melalui observasi *online* dan *offline* dan wawancara dengan penyedia jasa privat prostitusi di kalangan Gay. Informan penelitian ini terdiri atas tiga pria yang merupakan penyedia jasa privat prostitusi Gay. Penelitian ini menemukan bahwa prostitusi online di Kota Bandung bersifat privat dan tersembunyi. Bisnis prostitusi online Gay ini lebih banyak dijumpai berkedok pijat *plus-plus*. Kemudahan akses mendapatkan prostitusi Gay melalui aplikasi Grindr, Hornet, Instagram, Twitter dan Blued. Di Kota Bandung profesi sebagai prostitusi Gay digeluti oleh laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa prostitusi online di kalangan Gay di Kota Bandung digeluti oleh laki-laki *stright* yang memiliki wajah tampan, bertubuh macho dan memiliki pekerjaan yang sudah cukup mapan. Pada tataran alasan mereka menggeluti profesi ini karena *life style* dan kemiskinan.

Kata Kunci: *Gay, Pelacur Laki-laki, Prostitusi Online*

Pendahuluan

Dewasa ini jaringan prostitusi tidak hanya menyasar kepada perempuan-perempuan muda, melainkan juga menyasar pada laki-laki muda. Niko (2016) menyebutkan bahwa eksistensi pelacur laki-laki yang menjual jasa seks untuk laki-laki (gay) disebabkan oleh kemiskinan dan juga gaya hidup. Gaya hidup kemudian menjadi satu diantara permasalahan hidup di perkotaan atau *urban life crisis* yang penting dikaji. Termasuk didalamnya tentang pelacuran di wilayah urban, baik pelacuran perempuan maupun pelacuran laki-laki.

Pada beberapa fenomena, banyak diantaranya orang-orang yang berasal dari desa berpindah ke kota dengan harapan memperoleh kehidupan lebih baik di kota. Artinya bahwa perpindahan orang dari suatu wilayah (pedesaan) ke wilayah lain (perkotaan) justru akan berpotensi untuk membludakan tenaga kerja di wilayah kota. Kesenjangan antara kehidupan di wilayah pedesaan dan perkotaan turut menjadi faktor penarik masyarakat desa untuk merantau ke kota mencari pekerjaan, selain itu pengaruh perubahan sosial dan budaya telah mengubah struktur sosial, ekonomi dan politik. Sebagai akibat, orang akan melakukan pekerjaan apa saja untuk survival atau bertahan hidup.

Pada tataran kehidupan di perkotaan, prostitusi (pelacuran) bukan merupakan sesuatu yang baru dijumpai di abad milenium ini. Pada era globalisasi dan kehidupan modern hari inipun prostitusi Gay bukan merupakan sesuatu hal yang baru (Coupland 2010). Pada dasarnya prostitusi, baik prostitusi laki-laki dan prostitusi perempuan menyisahkan kisah pilu bagi para pelaku pekerja seks,

dalam perjalanan menjalani peran sebagai pelacur mereka acapkali mengalami kekerasan dan bahkan dibunuh (lihat studi Svanstrom 2006; Farley 2006; Stransky & Finkelhor 2012).

Prostitusi Gay menurut Elifson, Boles, & Sweat (1993) adalah laki-laki Gay atau Biseksual yang menyediakan jasa seks untuk laki-laki yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Gay atau Biseksual pula. Weitzer (2012) menyebutkan bahwa aktivitas prostitusi adalah pertukaran jasa seksual dengan kompensasi materi, termasuk didalamnya aktivitas kontak langsung fisik antara pembeli dan penjual jasa, maupun kontak tidak langsung seperti *stripping*, *phone sex*, *live sex show*, maupun *erotic webcam*.

Adanya prostitusi terjadi sebagai akibat dari ketidakmerataan ekonomi pada wilayah perkotaan (McKeganey 2006), artinya bahwa faktor ekonomi serta pengaruh urbanisasi yang tak teratur merupakan penyebab seseorang kemudian memilih untuk menjadi pelacur. Pada negara-negara di Asia Tenggara, prostitusi merupakan kegiatan ilegal yang melanggar aturan hukum, termasuk di Indonesia pelaku prostitusi dapat dipidana. Berbeda dengan di Kota Tijuana atau di Kota Meksiko yang melegalkan prostitusi, meski demikian terdapat banyak aktivitas prostitusi yang tidak terdaftar, seperti di Kota Meksiko tahun 2007 terdapat sekitar 40.000-50.000 orang pekerja seks yang tidak teregistrasi (Hemmingson 2008). Hal serupa juga terjadi di Kota Amsterdam, meskipun prostitusi legal namun pada beberapa red light district banyak terjadi aktivitas prostitusi ilegal (Gibly 2012).

Sondhi (2010) menyebutkan bahwa seseorang tidak mendapatkan pilihan lain selain menjadi pelacur untuk mendapatkan makanan, meski mereka sendiri mengetahui akibat yang akan muncul; kriminalisasi yang mereka hadapi sebagai seorang prostitusi. Bahkan setiap hari mereka mengalami pelecehan dan kekerasan seksual (Person 2015). Berdasarkan studi Niko (2016) juga menyebutkan bahwa pelacur laki-laki di Kota Pontianak dan Kota Bandung mengaku mengalami pelecehan dan kekerasan seksual dari *klien*.

Pada studi Cotter (2009); Jones (2010); Hall (2011); and Syamsuddin & Azman (2014) menyebutkan bahwa anak laki-laki kerap kali dijumpai sebagai korban prostitusi yang menyediakan jasa seks untuk laki-laki dewasa. Industri prostitusi yang semakin hari semakin banyak permintaan ini kemudian dijadikan sebagai bisnis yang menjanjikan, sehingga anak-anak laki-laki yang dilacurkan untuk laki-laki dewasa merupakan korban perdagangan orang. Tidak hanya terjadi pada anak laki-laki, eksploitasi seksual ini juga terjadi pada anak perempuan, laki-laki dewasa dan perempuan dewasa (Lyneham & Larsen 2013).

Kota Bandung yang merupakan salah satu kota tujuan turisme, hal ini berpengaruh besar terhadap aktivitas turis yang berkunjung ke Bandung, terlebih didalam aktivitasnya terdapat permintaan jasa seks. Pada beberapa kota di Kenya, permintaan jasa seksual turis yang berkunjung meningkat setiap tahun, bahkan banyak permintaan terhadap pekerja seks anak laki-laki (Hope 2013). Atraksi seks menjadi sesuatu hal yang semakin menarik turis asing untuk berkunjung di suatu daerah, di wilayah Asia Tenggara selain Thailand, Indonesia juga merupakan salah satu destinasi kunjungan wisata seks (Scheyvens 2002).

Prostitusi Gay online di Kota Bandung eksis seiring perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi hari ini. Aplikasi *chatting* dan *dating online* menjadi sarana bagi mereka untuk mempromosikan jasanya. Aktivitas prostitusi ini kemudian disebut "*Ngucing*", sedangkan penyedia jasa seksual Gay disebut sebagai "*Kucing*". Sebenarnya tidak hanya prostitusi Gay saja, bahkan prostitusi heteroseks secara *online* lebih dahulu eksis menjadi objek penelitian ilmiah.

Kajian Pustaka

Praktik Prostitusi sebagai Jalan Negosiasi *Coming Out*

Praktik prostitusi sendiri memiliki banyak definisi, diantaranya menurut Peršak dan Vermeulen (2014) yang menyebutkan bahwa prostitusi seringkali diimajinasikan sebagai lipstik merah, pakaian yang seksi dan *make-up* tebal, eksotis, dan lain sebagainya. Kemudian Hodgson (1997) juga mengamini bahwa prostitusi erat berkaitan dengan perempuan nakal, binal dan menyukai materi (uang). Namun, pada tulisan ini penulis membantah bahwa prostitusi tidak melulu tentang seksi, eksotis dan tidak melulu tentang perempuan. Prostitusi yang dilakoni laki-laki untuk seks laki-laki, bahkan sama sekali tidak melibatkan perempuan didalamnya. Artinya bahwa prostitusi tidak dapat dilihat berdasarkan imajinasi semata, dimana di sana terdapat ketertindasan, ketidakberdayaan dan penderitaan, siapa yang tahu!

Sementara itu, Outshoorn (2001) berpendapat bahwa prostitusi merupakan transaksi dimana laki-laki membeli layanan seksual (*sexual service*) dari perempuan, dimana pada relasi sosial antara perempuan dan laki-laki tidak setara dalam *social power*. Peneliti mengasumsikan *social power* yang dimaksud oleh Outshoorn ini adalah suatu keadaan dimana pihak yang membayar akan dominan (menguasai) pada transaksi seksual yang terjadi, dan penyedia jasa bisa saja menjadi budak karena di bayar.

Menurut Svanstrom (2006) prostitusi selalu berkaitan dengan aturan-aturan sosial dan hukum, sebab belum ada yang beranggapan bahwa menjadi prostitusi merupakan pekerjaan baik, yang ada adalah disebut sebagai tak bermoral, *psychopathology* dan penyakit sosial. Pada konteks Scotland, McKeganey (2006) justru menegaskan bahwa prostitusi adalah pekerjaan yang dilindungi di Scotland, terdapat *prostitute tolerance zone* yang mana pekerja seks komersial mendapatkan hak-hak yang sama dengan masyarakat biasa. Jadi, pada zona tertentu prostitusi adalah hal yang biasa saja dan legal.

Praktik prostitusi Gay yang dilakukan secara online merupakan satu diantara kegamangan seorang laki-laki mengidentifikasi identitas seksualnya. Dalam upaya menjelaskan percampuran antara konstruktivisme dan esensialisme identitas seksual ini bukan perkara mudah. Adanya serangkaian wacana moralitas yang mengukuhkan materialitas tubuh yang berjenis kelamin ke dalam penyederhanaan konstruksi gender, bahwa jenis kelamin laki-laki pasangannya dengan jenis kelamin perempuan. Konstruksi yang timpang ini kemudian mengakar menjadi kultur yang tidak dapat kita elakkan.

Prostitusi *online* merupakan pilihan pintas seseorang untuk mendapatkan material berupa uang, tanpa memikirkan kepuasan, konsekuensi kekerasan verbal dan non-verbal, maupun kesakitan-kesakitan psikologis. Menjadi prostitusi adalah "jalan lain" bagi seorang Gay untuk "*coming out*", tidak semua orang mengetahui identitas seksualnya sebagai seorang Gay. Namun, dengan menjadi prostitusi online, klien-klien yang menggunakan jasa seksual dengannya akan mengetahui bahwa ia seorang Gay atau Biseksual. Negosiasi semacam ini adalah realitas yang normal.

Pekerja Seks Gay: Moralitas yang Terpasung

Banyak tulisan-tulisan mainstream yang menyebutkan bahwa Gay merupakan bagian dari atau berkorelasi dengan *mental disorder*, penyakit sosial dan menyimpang (Reisman 2002). Kemudian ditambah dengan prasangka buruk dan stigma bahwa Gay merupakan pembawa virus mematikan HIV dan AIDS (Siegel, Lune & Meyer 1998). Hukum sosial yang berpayung moralitas dan stigma negatif terhadap seorang laki-laki Gay kemudian merupakan politik kultur di Indonesia yang paling menyengsarakan. Sekuat apapun gagasan dan argumentasi menyatakan bahwa seorang Gay bukan

manifestasi penyakit mental, penyakit sosial dan rentetan stigma lain yang merendahkan dan menjatuhkan kemanusiaan seseorang.

Stigma liar yang tidak dapat di *manage*; berpayung pada moralitas kultur, agama dan spiritualitas, kemudian memberikan batasan-batasan atas tubuh yang tertampil. Butler (1990) pernah menyebutkan bahwa tubuh hanya hidup dalam batasan-batasan produktif dari skema regulasi tertentu; sangat digenderkan dan maskulin. Menghadapi situasi yang sangat pelik; stigma, apakah kita berpikir bahwa seorang laki-laki Gay yang melakukan prostitusi dapat *coming out* atas identitasnya—baik identitas seksualitas maupun identitas pekerjaan yang dilakoni?

Bukan perkara mudah untuk menentang kekuatan performativitas yang sangat maskulin, bahwa laki-laki harus tampil gagah dan tidak boleh berpola tingkah seperti perempuan dan lain sebagainya. Gender yang dipahami masyarakat didasari dan dibatasi pada pemahaman mengenai seks/jenis kelamin biologis (Butler 1990). Perlu ruang perdebatan khusus untuk menyingkap prinsip-prinsip performativitas yang maskulin. Baiocco, Laghi, Pomponio & Nigito (2012) menyebutkan butuh teman yang tepat untuk bercerita tentang diri sendiri. Artinya bahwa seorang laki-laki Gay memerlukan waktu dan orang yang tepat untuk menginternalisasikan dirinya, dengan kata lain bahwa menjadi prostitusi adalah bagian dari internalisasi diri.

Pada banyak kasus prostitusi yang terorganisir dan tidak terorganisir menghancurkan hidup seseorang, namun pada lain kasus menjadi prostitusi adalah awal bagi kehidupan seseorang. Kedua latar ini tidak dapat diabaikan dalam meneropong pekerja seks. Studi Dewey, Zheng & Orchard (2016); Farley, Golding, Matthews, Neil & Jarrett (2015); dan Stoddard (2013) tentang prostitusi yang didalamnya termasuk prostitusi laki-laki, semestinya cukup membuka mata kita bahwa prostitusi merupakan realitas yang ada di tengah-tengah ruang kehidupan.

Masyarakat yang sebagian besar mempertahankan pemahaman gender yang biner, masih akan tetap men-stigma dan mengeksklusi seksualitas yang diluar hetero. Seksualitas yang semestinya bersifat privat, kemudian menjadi standard moral dalam penentuan pola tingkah seseorang. Kemudian lagi, moral yang dikaitkan dengan ajaran agama tertentu, yang semakin menyudutkan kelompok Gay, terlebih merupakan seorang pekerja seks (prostitusi).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Kasus pada penelitian ini adalah studi terhadap 3 Gay penyedia jasa prostitusi online. Studi ini bersifat eksploratif karena sampai saat ini belum diketahui secara jelas jumlah Gay, penyedia jasa prostitusi, serta permasalahan yang mereka dihadapi. Eksplorasi yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada laki-laki Gay penyedia jasa prostitusi online.

Wilayah penelitian ini mencakup Kota Bandung, dimana eksplorasi dilakukan secara acak terhadap pekerja seks laki-laki. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) melakukan observasi di lapangan melalui sosial media Twitter, Blued, Grindr, Hornet dan Instagram; (b) melakukan wawancara dengan penyedia jasa prostitusi Gay dengan membuat janji terlebih dahulu; (c) menganalisis data, dan (d) membuat laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Studi Kasus Mr. D

Mr. D adalah nama inisial samaran seorang laki-laki berusia 27 tahun yang berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Barat. Mr. D merupakan lulusan sarjana dari salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung. Saat ini ia bekerja di bidang bisnis properti di Bandung, dan memulai menggeluti 'kerjaan sampingan' sebagai pelacur laki-laki sejak tiga tahun terakhir ini (tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017). Kemudian, berdasarkan penuturan Mr. D klien yang biasanya menggunakan jasanya adalah laki-laki umur 30 tahun ke atas, kadang juga ada yang berumur 20-an tahun.

Kesehariannya sebagai karyawan swasta pada umumnya sama seperti pegawai lainnya. Mr. D juga berperilaku seperti laki-laki pada umumnya, dan selalu menjaga penampilannya. Bagi Mr. D menjaga penampilan adalah hal utama karena tuntutan pekerjaannya yang juga seringkali bertemu klien-klien yang menjadi calon pembeli properti dari tempat dia bekerja. Sedangkan intensitas MR. D dalam melayani pelanggan tergantung daripada pesanan atau *booking* yang sudah diperjanjikan. Mr. D mengaku biasanya ia melayani pelanggan tiga kali dalam satu minggu.

Alasan Mr. D menjadi pelacur laki-laki dikarenakan gaji sebagai karyawan pas-pasan untuk menopang kehidupan sehari-hari, sementara kebutuhan sekunder lainnya seperti *hang out*, liburan, dan perawatan tubuh (fitnes, treatment wajah, dan lainnya). Mr. D biasanya menawarkan jasa pijat plus-plus kepada pelanggannya dengan bayaran sekitar Rp.800.000-Rp.1.200.000, biaya tersebut sudah termasuk servis plus-plus. Mr. D biasanya menawarkan jasanya melalui Grindr, Blued dan Hornet, yang merupakan sosial media chatting dan dating khusus Gay. Selama menjadi prostitusi, Mr. D mengaku pernah mengalami kekerasan seksual.

Studi Kasus Mr. R

Mr. R adalah nama inisial samaran seorang laki-laki *stright* berparas tampan dan berumur 22 tahun. Mr. R bukan asli berasal dari Bandung, bahkan tidak berdomisili di Kota Bandung. Biasanya ia ke Bandung sekali dalam sebulan, bisa jadi pula tiga bulan sekali, tergantung urusan kantor dan waktu libur akhir pekan. Mr. R berasal dari Jakarta dan tinggal di Jakarta. Mr. R bekerja di bidang perbankan di ibu kota. Mr. R adalah seorang lulusan sarjana ekonomi. Mr. R menyediakan jasa prostitusi privat sejak lama dan move dari kota ke kota, tidak hanya di Jakarta dan Bandung, tetapi juga biasa ke Bali, Medan dan Surabaya.

Alasan Mr. R menjadi pekerja seks untuk kepuasan diri, iseng dan "daripada kosong" buat *fun* tanpa menghasilkan. Kebutuhan pribadi dan lainnya Mr. R tidak pernah kekurangan, namun biasanya buat perawatan tambahan perlu modal juga. Terlebih Mr. R menyukai traveling yang biayanya besar. Mr. R mengaku pernah beberapa kali mengalami kekerasan seksual yang dilakukan klien-kliennya, namun menurutnya itu justru menjadi sensasi tersendiri. Biasanya yang menggunakan jasa seks dari Mr. R adalah laki-laki umur 30 tahun ke atas, pernah juga 40 tahun ke atas, kadang juga ada yang berumur 20-an tahun.

Mr. R menawarkan jasanya melalui Grindr, twitter dan instgram. Menurutnya dia tidak open di media sosial twitter dan instgram, namun beberapa klien didapatkan dari medsos tersebut. Kemudian Mr. R mengaku biasanya melayani pelanggan tergantung pada permintaan klien, biasanya setiap hari ada, namun biasa juga satu minggu hanya dua-tiga kali saja. Sedangkan tarif yang Mr. R tawarkan adalah Rp.300.000-Rp.700.000 sekali booking. Mr. R langsung menawarkan jasa seks secara *outcall*, tanpa embel-embel pijat atau massage plus-plus. Bagi Mr. R menjadi seorang pekerja seks bisa saja untuk mencari kesenangan diri sendiri, bisa saja adalah cara mengekspresikan diri.

“Menjadi begini (pekerja seks) bagaimanapun tujuan akhirnya adalah mendapatkan uang ya, persoalan uangnya digunakan untuk apa itu sudah urusan masing-masing orang”, (Wawancara Mr. R, 18 April 2018).

Studi Kasus Mr. W

Mr. W adalah nama inisial samaran seorang laki-laki bertubuh kekar dan *sickpack* berumur 23 tahun. Mr. W berasal dari salah satu daerah kabupaten di Jawa Barat, ia sudah lama berdomisili di Kota Bandung. Mr. W bekerja sebagai karyawan swasta di rumah makan. Mr. W tamatan SMA yang sudah beberapa tahun merantau di Kota Bandung. Sebagai perantau yang membiayai hidup sendiri, menuntut Mr. W menjalani pekerjaan sampingan sebagai pekerja seks laki-laki. Mr. W juga menyediakan jasa pijat dan massage privat yang merupakan paket dari jasa prostitusi yang ia tawarkan. Mr. W menawarkan jasanya melalui Grindr, Hornet dan Blued, dimana jasa yang ditawarkan adalah pijat atau massage plus-plus khusus untuk laki-laki.

Mr. W mengaku bahwa ia menjadi pekerja seks karena ikut temannya yang juga menjadi pekerja seks laki-laki. Mr. W juga menuturkan bahwa ia pernah mengalami kekerasan seksual dari klien-kliennya, dan ia juga mengaku pernah menjadi *slave* bagi kliennya, untuk jasa itu ia biasanya dibayar lebih. Mr. W mengatakan bahwa pengguna jasa seks darinya adalah laki-laki umur 30 tahun ke atas, pernah juga 40 tahun ke atas, kadang juga ada yang berumur 20-an tahun, namun ia mengatakan pula berapapun umur kliennya bukan menjadi persoalan baginya.

Pada dasarnya Mr. W menjadi pekerja seks karena alasan ekonomi, selain untuk memenuhi kebutuhan primer seperti bayar uang sewa tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, juga untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti membeli gadget, televisi, perawatan, fitness dan lain-lain. Mr. W mengaku biasanya ia melayani klien tergantung permintaan, jika ada setiap hari *booking* maka ia akan melayani setiap hari. Mr. W menawarkan jasa melalui pijat plus-plus, yang juga sekaligus dengan jasa seks. Mr. W memberi tarif Rp.200.000-500.000, dalam sekali booking baik *incall* maupun *outcall*.

Analisis dan Diskusi

Faktor ekonomi—meski bukan satu-satunya—kemudian membuka peluang paling strategis bagi keberadaan pelacuran baik yang secara offline maupun secara online. Kondisi ini dapat dilihat dari pengakuan pada kasus tiga pelacur Gay yang bekerja dan menghasilkan uang melalui prostitusi online. Pada kasus yang dikemukakan pada bahasan terdahulu kesimpulan sederhana kita adalah keberadaan pelacur Gay karena keterbatasan ekonomi serta aktualisasi diri atau gaya hidup di perkotaan. Artinya bahwa pekerjaan menjadi pelacur (yang merupakan pekerjaan sampingan atau sambilan) merupakan pilihan mutlak pribadinya, tanpa dorongan atau paksaan orang lain. Meski dapat kita lihat pada kasus Mr. W yang awal mula menjadi pelacur karena ikut-ikutan temannya, namun bukan berarti karena dipaksa.

Kesenjangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta pembangunan dan persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan rendahnya pendidikan dan sebagian orang kemudian memilih bekerja sebagai pelacur. Menjadi pelacur karena dianggap tidak memerlukan *skill* tertentu (Svanstrom 2006). Namun, di era digital saat ini, menjadi pelacur pun memerlukan *skill* tertentu yang memadai untuk menawarkan jasanya, setidaknya sudah melek teknologi sehingga dapat menawarkan jasa prostitusi secara online.

Secara umum, prostitusi acapkali menysar perempuan dewasa dan anak-anak perempuan sebagai korbannya. Mereka yang kemudian memilih (dan/atau dipaksa) menjadi pelacur perempuan dan anak-anak perempuan ini berasal dari keluarga miskin dengan pendidikan yang rendah, tidak

memiliki pekerjaan tetap, *skill* kurang memadai, dan terbebani ekonomi keluarga. Jaringan kemiskinan keluarga kemudian menjadi alasan bagi perempuan dewasa maupun anak-anak perempuan masuk ke dalam lingkaran jaringan prostitusi. Hal ini juga terjadi pada pelacuran laki-laki, pada studi Niko (2016) menyebutkan anak laki-laki yang masuk ke dalam jaringan prostitusi (khusus Gay) adalah mereka yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Kemudian, temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa laki-laki dewasa yang masuk ke dalam jaringan prostitusi Gay (khususnya online) berdasarkan motif ekonomi dan aktualisasi diri, termasuk didalamnya adalah gaya hidup (*life style*) di wilayah perkotaan (*urban*).

Tidak lupa dalam ingatan kita bahwa pada masa kolonial, aktivitas pelacuran (khusus pekerja seks perempuan saja) berpusat di pelabuhan-pelabuhan besar yang ada, namun pada era milenium hari ini pelacuran tidak lagi tersentral pada satu tempat tertentu melainkan dapat kita jumpai dimana saja di setiap sudut-sudut dan pusat perkotaan. Situasi ini merupakan tantangan baru bagi ilmuwan-ilmuan sosial dalam penanganan persoalan prostitusi di wilayah perkotaan. Namun sayangnya, pada tataran kebijakan-kebijakan pemerintah belum ada sedikitpun menyinggung persoalan prostitusi laki-laki (khusus Gay), hal ini bisa jadi karena *mindset* kita ketika mendengar kata pelacur adalah menyangkut jenis kelamin perempuan saja.

Pada konteks Indonesia, prostitusi lebih dikenal dengan jaringan dan pelakunya adalah perempuan. Sehingga yang terjadi adalah tidak dapat disinyalir identifikasi-identifikasi seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual dan menyangkut kejahatan kemanusiaan (*trafficking*) yang terkait dengan prostitusi Gay. Penulis berspekulasi bahwa, pada dasarnya aktivitas pekerja seksual Gay ini sesungguhnya merupakan kegiatan yang tidak hanya melibatkan pekerja seks untuk memberikan pelayanan seksual, melainkan lebih luas lagi kegiatan prostitusi Gay adalah kegiatan perdagangan jasa yang melibatkan banyak pihak termasuk klien-klien yang membeli jasa seks. Jaringan perdagangan seks ini bahkan membentang pada wilayah yang lebih luas lagi, tidak hanya melibatkan komunitas-komunitas, melainkan dari berbagai negara. Dengan kata lain jaringan prostitusi ini bisa saja melibatkan beberapa negara (jaringan transnasional). Pada tataran yang lebih luas lagi, sistem dan jaringan pelacuran laki-laki sangat ketat dan bahkan terorganisir (Niko 2016).

Lebih lanjut, ternyata di dalam jaringan prostitusi Gay (bisa jadi juga pada jaringan prostitusi perempuan) dalam konteks *online* maupun *offline* terbagi ke dalam beberapa golongan yang menandakan adanya kelas-kelas dalam tingkat operasional prostitusi sebagai berikut: a) Kelas Bawah: pekerja seks komersial yang berada di kelas bawah ini biasanya tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks yang ditawarkan pun rendah dan biasanya beroperasi pada kawasan-kawasan kumuh seperti pasar, terminal, kuburan, taman kota dan rel kereta api. Terkadang berhubungan dengan pekerja seks kelas ini sangat berbahaya, mereka bisa jadi menjadi pencuri, rampok atau melakukan tindak kriminal lainnya. b) Kelas Menengah: segmentasi kelas ini dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di booking semalaman. Pada kasus Mr. W termasuk ke dalam golongan kelas ini. c) Kelas Atas: pelanggan pada kelas ini kebanyakannya berasal dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi, biasanya mereka menggunakan *night club* sebagai ajang pertama untuk mengencani pelacur atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan. Pada kasus Mr. R dan Mr. D termasuk ke dalam golongan kelas ini. d) Kelas Tinggi: kelas prostitusi dari segmen ini kebanyakan dari kalangan artis televisi, model, atau bintang iklan. Kelas prostitusi ini sangat privat dan terorganisir, super germo yang mengorganisasikan perdagangan layanan pelacur kelas atas ini.

Kesimpulan

Bentuk praktik prostitusi Gay online belum dapat ditemukenali oleh masyarakat luas maupun penegak hukum dan kebijakan. Praktik prostitusi Gay online adalah jalinan relasi antara penyedia jasa (pelacur Gay) dengan pengguna jasa (klien). Tanpa adanya relasi *take and gift* antara keduanya, maka pelacur Gay bisa saja tidak eksis, artinya dimana ada *demand* maka akan ada *supply*. Atas keseluruhan temuan pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kasus pada tiga pelacur Gay memiliki motif yang berbeda-beda dalam proses menjadi pekerja seks, meski demikian terdapat tujuan yang sama seperti mendapatkan uang.

Pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan tubuh seorang pelacur Gay seringkali ditentukan pada dominasi laki-laki pengguna jasa (klien) sehingga kekerasan seksual acapkali terjadi pada pelacur Gay. Adanya potensi *cycle of abuse* di kalangan pelacur Gay ini bukan merupakan suatu hal yang main-main. Relasi kuasa klien dalam melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pelacur Gay adalah tindakan eksploitatif terhadap tubuh, hanya karena klien membayar untuk menikmati seks bersama-sama. Menjadi Gay saja sudah acapkali mengalami penolakan, stigmatisasi dan kriminalisasi, kemudian menjadi pelacur Gay lebih kompleks mengalami tindakan eksploitasi seksual. Artinya bahwa pelacur Gay rentan mengalami reviktimisasi; sudah korban menjadi korban lagi.

Referensi

- Baiocco, Roberto., Laghi, Fiorenzo., Pomponio, Ileana Di. and Nigito, Concetta Simona. 2012. "Self-disclosure to the Best Friend: Friendship Quality and Internalized Sexual Stigma in Italian Lesbian and Gay Adolescents." *Journal of Adolescence* 35(2):381-387.
- Balsam, Kimberly F. and Mohr, Jonathan J. 2007. "Adaptation to Sexual Orientation Stigma: A Comparison of Bisexual and Lesbian/Gay Adults." *Journal of Counseling Psychology* 54(3):306-319.
- Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Cotter, Kelly M. 2009. "Combating Child Sex Tourism in Southeast Asia." *Denv. Journal International Law and Policy* 37(3):493-512.
- Coupland, Nikolas. 2010. *The Handbook of Language and Globalization*. West Sussex: Blackwell Publishing Ltd.
- Dewey, Susan., Zheng, Tiantian, and Orchard, Treena. 2016. *Sex Workers and Criminalization in North America and China: Ethical and Legal Issues in Exclusionary Regimes*. New York, Dordrecht, London: SpringerBriefs in Anthropology.
- Elifson, Kirk W., Boles, Jacqueline, and Sweat Mike. 1993. "Risk Factors Associated with HIV Infection Among Male Prostitutes." *American Journal of Public Health* 83(1):79-83.
- Farley, Melissa. 2006. "Prostitution, Trafficking and Cultural Amnesia: What We Must Not Know in Order to Keep the Business of Sexual Exploitation Running Smoothly." *The Yale Journal of Law and Feminism* 18(1):101-136.
- Farley, Melissa., Golding, Jacqueline M., Matthews, Emily Schuckman., Malamuth, Neil M. and Jarrett, Laura. 2015. *Comparing Sex Buyers with Men Who Do Not Buy Sex: New Data on Prostitution and Trafficking*. California: Hunt Alternative Fund.
- Gibly, Jess N. 2012. "Safe Sex for Sale: Is Legalizing Sex Work the Answer to Sex Trafficking in the Netherlands?" *International Journal of Undergraduate Research and Creative Activities* 4(4):1-9.

- Hall, John A. 2011. "Sex Offenders and Child Sex Tourism: the Case for Passport Revocation." *Virginia Journal of Social Policy and the Law* 18(2):153-203.
- Hemmingson, Michael. 2008. *The Post-Structural Body of Erotic Dancers and Sex Workers in Tijuana, San Diego and Los Angeles: An Auto/ethnography of Desire and Addiction*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Hodgson, James F. 1997. *Games Pimps Play; Pimps, Players and Wives-in-Law: A Qualitative Analysis of Street Prostitution*. Toronto: Canadian Scholars Press Inc.
- Hope, Kempe Ronald. 2013. "Sex Tourism in Kenya." *Tourism Analysis* 18(3):533-542.
- Jones, Samuel Vincent. 2010. "The Invisible Man: The Conscious Neglect of Men and Boys in the War on Human Trafficking." *Utah Law Review* 1143(4):1143-1188.
- Lyneham, Samantha and Larsen, Jacqueline Joudo. 2013. "Exploitation of Indonesian Trafficked Men, Women and Children and Implication for Support." *Australia's National Research and Knowledge Centre on Crime and Justice* 450(May):1-7.
- McKeganey, Neil. 2006. "Street Prostitution in Scotland: The Views of Working Women." *Drugs, Education, Prevention and Policy* 13(2):151-166.
- Niko, Nikodemus. 2016. *Boy Prostitute: Kemiskinan dan Life Style*. Yogyakarta: Deepublish.
- Outshoorn, Joyce. 2001. "Debating Prostitution in Parliament: A Feminist Analysis." *European Journal of Women's Studies* 8(4):472-491.
- Peršak, Nina and Vermeulent, Gert (Eds.). 2014. *Reframing Prostitution: From Discourse to Description, From Moralisation to Normalisation?* Belgium: Maklu-Publisher.
- Person, Katarzyna. 2015. "Sexual Violence During the Holocaust—the Case of Forced Prostitution in the Warsaw Ghetto." *Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies* 33(2):103-121.
- Reisman, Judith A. 2002. "Crafting Bi/Homosexual Youth." *Regent University Law Review* 14(2):283-342.
- Scheyvens, Regina. 2002. "Bacpacker Tourism and Third World Development." *Annals of Tourism Research* 29(1):144-164.
- Siegel,Carolynn., Lune, Howard, and Meyer, Ilan H. 1998. "Stigma Management Among Gay/Bisexual Men with HIV/AIDS." *Qualitative Sociology* 21(1):3-24.
- Sondhi, Shireen. 2010. *Are We Chasing Rainbow?: Achieving the Decriminalization of Prostitution in Canada*. Canada: A Thesis Faculty of Law University of Toronto.
- Stoddard, Thayne D. 2013. "Male Prostitution and Equal Protection: An Enforcement Dilemma." *Duke Journal of Gender, Law and Policy* 21(227):227-254.
- Stransky, Michelle L. and Finkelhor, David. 2012. *Sex Trafficking of Minors: How Many Juveniles Are Being Prostituted in the US?* Durham, NH: Crimes against Children Research Center.
- Svanstrom, Yvonne. 2006. "Prostitution as Vagrancy: Sweden 1923-1964." *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention* 7(4):142-163.
- Syamsuddin and Azman, Azlinda. 2014. "Psychosocial Needs for Child Trafficking Victims: A Case Study in Makassar, Indonesia." *Conference Proceedings the Asian Conference on Social Sciences* 0094(June):1-9.
- Weitzer, Ronald. 2012. *Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawfull Business*. New York and London: New York University Press.

Pilihan Rasional Perempuan Sebagai Buruh Angkut Pasar di Kota Surabaya

*Astri Elok Nastiti, Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Airlangga. astrinastity09@gmail.com*

Abstrak

Dewasa ini seorang perempuan bahkan perempuan pedesaan sekalipun juga berperan aktif dalam pencarian nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Karena pada dasarnya seorang perempuan adalah manusia yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya. Jika kita lihat dengan seksama, bahwa saat ini hampir tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang laki-laki yang tidak dapat dikerjakan oleh seorang perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan rasional perempuan bekerja sebagai buruh angkut di pasar Pabean Kota Surabaya. Teori pilihan rasional James Coleman sebagai dasar utama dalam melakukan penelitian ini, yaitu tentang seorang perempuan yang sudah menikah dan berkeluarga memilih untuk bekerja diluar rumah, seperti para perempuan yang bekerja sebagai buruh angkut di pasar Pabean Surabaya. Jadi, buruh perempuan sebagai aktor dan waktu kerja serta tenaga sebagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, penentuan informan dengan teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil temuan dan diskusi pada penelitian ini menjelaskan bahwa di Kota Surabaya, pasar tradisional juga merupakan salah satu aktivitas yang mendorong roda perekonomian masyarakat. Pasar tradisional Pabean Surabaya, nampak sebuah ciri khas yaitu para pekerja sebagai buruh angkut yang mengangkut karung dari dalam pasar menuju ke atas mobil pick up atau truk dengan berat mencapai puluhan kilogram diatas kepalanya, mereka adalah perempuan-perempuan yang bersarung atau memakai jarik. Mayoritas keberadaan ratusan buruh angkut perempuan tersebut, adalah datang dari wilayah Madura. Dengan kekuatan dan tenaga yang mereka miliki, mereka menjalani kehidupan sehari-harinya di pasar tersebut untuk mencari penghasilan sebagai bentuk *survive*.

Kata Kunci: *Buruh angkut, perempuan, pilihan rasional.*

Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan pada sebuah keluarga merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang laki-laki sebagai suami dan kepala rumah tangga, sedangkan seorang perempuan sebagai ibu berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pekerjaan rumah, seperti mendidik anak, melayani suami, memasak dan membersihkan rumah. Karena adanya anggapan dalam masyarakat kita bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin, dan tidak cocok menjadikannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab dari kaum perempuan (Suyanto & Narwoko, 2004: 344). Namun saat ini, seorang perempuan telah mengalami perubahan dan kemajuan dalam kehidupan di masyarakat, yaitu dari masyarakat tradisional menuju masyarakat post tradisional yakni masyarakat dengan kehidupan yang modern (Naqiyah, 2005: 3). Perempuan sudah mendapat ruang bebas untuk melakukan kegiatan diluar rumah, karena sekarang seorang perempuan juga mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh seorang laki-laki yaitu mulai dari pekerjaan ringan sampai pekerjaan yang membutuhkan tenaga.

Di Kota Surabaya, pasar tradisional juga merupakan salah satu aktivitas yang mendorong roda perekonomian masyarakat. Pasar tradisional Pabean Surabaya, yang terletak di kawasan Pabean Cantikan nampak sebuah ciri khas yaitu para pekerja sebagai buruh angkut yang mengangkut karung dari dalam pasar menuju ke atas mobil *pick up*, truk atau becak dengan berat mencapai puluhan

kilogram diatas kepalanya, mereka adalah sosok perempuan-perempuan yang bersarung atau memakai jarik. Keberadaan ratusan buruh angkut perempuan tersebut mayoritas berasal dari wilayah Madura yaitu Kota Sampang. Dengan kekuatan dan tenaga yang dimiliki, mereka menjalani kehidupan sehari-hari di pasar Pabean untuk mencari penghasilan. Pada dasarnya sebagian dari jumlah masyarakat Madura melakukan urbanisasi ke wilayah sekitarnya terutama wilayah Surabaya, dan melakukan mobilitas sosial atau merantau baik yang permanen maupun non permanen bagi orang Madura sudah merupakan kebiasaan masyarakatnya yang menjadi budaya (Anam, 2015: 179).

Tingkat pendapatan keluarga yang minim membuat seorang perempuan yang sejatinya memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yaitu mengatur segala kebutuhan dan kontrol sosial terhadap keluarganya, sedangkan peran seorang laki-laki dalam keluarga yaitu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, antara lain untuk kebutuhan makan, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga pada umumnya. Tetapi tidak sedikit juga seorang perempuan yang sudah menikah memilih untuk bekerja di luar rumah, bahkan sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang perempuan yaitu pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga kuat yang dilakukan oleh seorang laki-laki, seperti halnya ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh angkut di pasar Pabean Surabaya, meskipun dengan penghasilan yang tidak besar dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan.

Bagi seorang perempuan terutama yang sudah menikah dan berkeluarga memilih untuk bekerja selain menjadi ibu rumah tangga, karena memiliki beberapa alasan yang pada umumnya yaitu; Pertama, mereka bekerja untuk bertahan hidup, hal ini yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah untuk mempertahankan kehidupan anggota keluarganya. Kedua, mereka bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, inilah yang dilakukan oleh masyarakat kelas menengah, meskipun kebutuhan pokok keluarga sudah tercukupi, mereka berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder lainnya. Ketiga, mereka bekerja untuk berkarir dan yang demikian ini dilakukan oleh masyarakat dari kelas atas, yaitu mereka ingin mewujudkan cita-cita atau keinginannya. Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yaitu mengurus rumah tangga dan peran publik yaitu bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagi keluarga kelas bawah seperti buruh di pasar, keterlibatan seluruh anggota keluarga untuk menambah penghasilan keluarga sangat membantu, yaitu sebagai bentuk *survive* atau bertahan hidup. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana seorang perempuan yang sudah berumah tangga memilih bekerja sebagai buruh angkut di pasar sebagai pilihan-pilihan rasional mereka untuk mencapai tujuan berdasarkan teori pilihan rasional dari James Coleman.

Kajian Pustaka

Teori Pilihan Rasional dari James Coleman sebagai salah satu alat untuk melihat dan menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Fokus pilihan rasional adalah pada pelaku. Para pelaku sering dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan atau maksud dalam kehidupannya, yang memiliki arti bahwa para pelaku memiliki batas akhir atau tujuan dari segala tindakan mereka, dan yang paling utama mengenai fakta bahwa tindakan mereka dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan atau dipilih secara konsisten (Wirawan, 2012: 224).

Teori pilihan rasional Coleman menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang ia miliki untuk mencapai tujuan. Terdapat dua unsur utama dalam teori pilihan, pertama sumber daya, merupakan setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki oleh seorang aktor. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Kedua aktor, ialah

seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai sebagai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya (Ritzer, 2012: 760).

Jadi pada penelitian ini, buruh angkut perempuan sebagai aktor yang melakukan tindakan yaitu memilih bekerja di pasar, dimana mereka memilih datang ke Surabaya dan meninggalkan kampung halaman dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan tenaga dan waktu kerja sebagai sumber daya yang dimiliki oleh aktor yaitu buruh angkut perempuan untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan pilihan-pilihan yang rasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu berusaha untuk menjelaskan bagaimana pilihan rasional perempuan yang memilih bekerja sebagai buruh angkut di pasar Pabean, Kota Surabaya. Teknik pemilihan informan dengan purposive sampling, yaitu pengambilan informan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan yang ditemui sebanyak 15 orang buruh angkut perempuan dengan cara menggali informasi melalui observasi langsung dan wawancara mendalam, serta satu orang kepala kantor pasar untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan tentang aktivitas dan kondisi geografis pasar Pabean.

Data penelitian diperoleh dengan cara dua jenis yaitu, pertama data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua data sekunder yang dihasilkan dari sumber lain seperti referensi dari buku, jurnal serta website. Adapun alasan pemilihan lokasi pasar Pabean karena sebagai salah satu pasar tradisional tertua yang ada di Kota Surabaya, dimana para pedagang berasal dari beberapa etnis seperti Tionghoa, Madura, dan Jawa. Tetapi sebagian besar para pedagang tersebut berasal dari orang Madura. Selain itu, pemandangan khas dari pasar Pabean ini yaitu sebagian besar buruh angkut yang mengangkut karung dengan berat puluhan kilogram adalah para perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Perempuan dengan sifat penyayang akan merelakan waktunya untuk bekerja diluar rumah agar terpenuhi kebutuhan keluarga, terutama bagi perempuan yang sudah menikah atau berumah tangga. Jarak dan waktu yang ditempuh tidak menjadi penghalang bagi mereka, meskipun merantau ke luar Kota dan harus meninggalkan kampung halaman. Bagi sebagian perempuan Madura terutama dari wilayah Sampang juga memilih untuk meninggalkan rumah dan bertahan hidup di Kota Surabaya adalah jalan hidup yang telah dipilih oleh mereka. Dengan menjadi buruh angkut di pasar adalah pekerjaan yang dapat mereka lakukan dengan segala sumber daya yang mereka miliki. Keterbatasan kemampuan yang disebabkan oleh faktor utama yaitu pengalaman pendidikan yang tidak dimilikinya, mengharuskan beberapa perempuan dari Madura harus bekerja dengan tenaga yang mereka miliki yaitu sebagai buruh angkut. Seperti halnya salah satu dari ciri-ciri keluarga yang dijelaskan oleh Mac Iver yaitu bahwa keluarga mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi (Khairuddin, 1997: 6).

Kebutuhan ekonomi keluarga yang dihasilkan oleh suami yang tidak mencukupi mengharuskan perempuan yang sudah berumah tangga berpikir keras untuk ikut berperan dalam mengelola bahkan memenuhi kebutuhan keluarga. Karena pada dasarnya tidak ada yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan, alasan klasik dari konstruksi masyarakat yang menyatakan bahwa adanya perbedaan gender yaitu laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang tugasnya di bagian publik, dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya di bagian domestik. Tetapi pada kenyataan yang

ada seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan dalam ranah publik yaitu bekerja diluar rumah mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah dari jenis kelamin dan biologis yang tidak dapat dipertukarkan, seperti melahirkan dan menyusui. Sehingga bukan menjadi hal yang dianggap tabu lagi jika seorang perempuan harus bekerja selayaknya pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang laki-laki.

Sebagai contoh Ibu Sutinah yaitu ibu rumah tangga yang berasal dari Sampang Madura, beliau bekerja sebagai buruh angkut di pasar Pabean sudah selama 13 tahun dan tinggal di Surabaya dengan mengontrak rumah satu petak bersama suami yang bekerja sebagai tukang becak. Sebagai alasan penghasilan suami yang tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga adalah alasan yang membuat ibu Sutinah memilih untuk pergi ke Surabaya bersama suami untuk bekerja, dengan tujuan untuk sama-sama memperoleh penghasilan sehingga kebutuhan keluarga dapat tercukupi. Ibu Sutinah sendiri telah memikirkan segala resiko yang harus diterima ketika memilih bekerja dan meninggalkan tugas rumah di kampung halaman. Salah satunya yaitu jarang bertemu dengan anak-anaknya dan keluarga dekat. Selain itu, beliau juga harus menahan rasa letih yang terkadang menghampirinya setelah seharian bekerja di Pasar dari mulai pukul 06.00 pagi sampai 16.00 sore.

Seperti sebagian besar buruh angkut perempuan di pasar Pabean, ibu Sutinah dan buruh perempuan yang lainnya juga memiliki nasib yang sama yaitu berat beban yang diangkut oleh buruh perempuan tidak selalu sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Hasil upah yang mereka peroleh terkadang bukan berdasarkan dari berat beban yang diangkut, melainkan berdasarkan dari belas kasihan orang-orang yang menggunakan jasa ibu-ibu buruh angkut tersebut. Dalam sekali angkut Ibu Sutinah atau buruh angkut perempuan yang lainnya hanya mendapatkan Rp. 2.000,- sampai Rp. 5.000,- dengan beban karung mencapai sekitar 30, 50, sampai 70 kilogram. Mereka juga harus menunggu panggilan untuk menggunakan jasa angkut ketika ada pembeli yang membutuhkan bantuan untuk mengangkut barang belanjannya. Sehingga penghasilan mereka perhari juga tidak menentu, terkadang mencapai Rp. 25.000,- sampai Rp 50.000,-. Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi mereka, karena semua itu sudah pilihan yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan, yang terpenting tujuan utama mereka tercapai yaitu mendapat penghasilan dari Kota untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga di Kampung halaman.

Konsep Pilihan Rasional

Secara umum pilihan rasional perempuan memilih bekerja sebagai buruh angkut di pasar terdapat dua unsur utama, yang disimpulkan melalui penjelasan seperti berikut:

Pertama, aktor. Aktor yang dimaksud disini yaitu buruh angkut perempuan. Buruh angkut perempuan mempunyai tujuan dalam segala tindakan yang dilakukan, yaitu meninggalkan kampung halaman dan datang ke Kota Surabaya untuk bekerja di pasar. Mereka sudah mempertimbangkan dengan sadar segala resiko yang diterima ketika memilih untuk bekerja di luar rumah selain tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Memilih bekerja sebagai buruh angkut di pasar juga atas dasar pilihan yang telah disesuaikan dengan kemampuan yang ada di dalam diri mereka.

Kedua, sumber daya. Sumber daya dalam hal ini yaitu tenaga yang dimiliki oleh buruh perempuan sebagai kemampuan fisik untuk mengangkut karung dengan berat yang mencapai puluhan kilogram. Selain itu, waktu kerja juga sebagai wujud dari sumber daya yang dialokasikan oleh buruh perempuan untuk bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Mereka mengalokasikan waktu hidup mereka setiap harinya yaitu untuk bekerja didalam rumah sebagai ibu rumah tangga sebelum pukul 06.00 pagi dan setelah pukul 16.00 sore, sedangkan alokasi waktu untuk bekerja diluar rumah sebagai buruh angkut di pasar yaitu mulai dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 16.00 sore.

Jadi, dapat dipahami dengan jelas bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang buruh perempuan terutama dalam memilih bekerja sebagai buruh angkut di pasar adalah sebagai bentuk dari pilihan rasional. Mereka bekerja dengan memanfaatkan sumberdaya yang ia miliki untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh penghasilan dari hasil kerja keras mereka selama di pasar, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Kesimpulan

Peran domestik dan kekuatan fisik bukan lagi menjadi hambatan bagi seorang perempuan untuk memilih bekerja diluar rumah, selain tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Diterimanya seorang perempuan sebagai buruh angkut di pasar merupakan salah satu wujud dari penerimaan perempuan di dalam ranah pekerjaan seorang laki-laki yang identik dengan menggunakan tenaga. Hal itu sebagai bentuk keadilan gender yang memberikan kesempatan sama antara perempuan dan laki-laki dalam memilih pekerjaan. Secara rasional bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor, yaitu dalam wujud individu baik laki-laki atau perempuan mereka sama-sama memiliki tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak ada alasan untuk menghalangi setiap tindakan yang ingin mereka ciptakan, dan memperlakukan mereka dalam keadaan yang sama pula. Seperti halnya perempuan yang memilih bekerja sebagai buruh angkut di pasar.

Oleh karena itu, saat ini seorang perempuan mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pemikirannya dan mengambil keputusan penting untuk hidup mereka. Tidak lagi harus selalu bergantung dan menunggu keputusan seorang laki-laki. Perempuan mempunyai pilihan-pilihan rasional untuk mencapai tujuan hidupnya, yang salah satunya yaitu mempertahankan hidup keluarganya agar selalu tercukupi dan tidak kekurangan.

Daftar Pustaka

- Anam, Chairul. 2015. Peranan Wanita Madura Pelaku Mobilitas Non Permanen terhadap Daerah Asal. Surabaya: CV Perwira Media Nusantara.
- Khairuddin. 1997. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Naqiyah, Najalah. 2005. Otonomi Perempuan. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto & Narwoko. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Edisi Keempat. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anam, Chairul. 2015. Peranan Wanita Madura Pelaku Mobilitas Non Permanen terhadap Daerah Asal. Surabaya: CV Perwira Media Nusantara.
- Wirawan, I. B. 2012. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Street Harassment di Kota Surabaya

*Fathuzahroh, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo
Madura. E-Mail: Fathuzahroh@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini mencoba menjelaskan permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat kota Surabaya ketika beraktivitas di ruang publik yaitu *Street Harassment* atau pelecehan di jalanan yang merupakan jenis pelecehan seksual ringan yang jika dibiarkan bisa mengakibatkan terjadinya tindakan pelecehan yang lebih besar dan merugikan. Kesadaran bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelecehan, oleh perempuan belum sepenuhnya dianggap begitu serius untuk dijadikan sebuah masalah atau bagian dari pelecehan karena menurut mereka itu bagian dari pujian atau hal yang wajar. Hal ini oleh Foucault dianggap sebagai logika sensor dalam seksualitas, pembatasan seksualitas dilakukan dengan menetapkan yang normal dan tidak normal, yang sopan atau yang tidak sopan, yang baik dan tidak baik, dimana dalam proses terjadinya *street harassment* siapapun bisa menjadi korban dan bagaimana sikap masyarakat pada korban *street harassment* juga berpengaruh besar pada melanggengkan budaya *Rape Culture*. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta observasi langsung dan wawancara untuk mendapatkan data dan digunakan untuk menjelaskan fenomena *street harassment* yang terjadi di sepanjang jalan kota Surabaya.

Kata Kunci: *Logika Sensor, Rape Culture, Street Harassment*

Pendahuluan

"*Street Harassment* atau pelecehan jalanan meliputi insiden yang terjadi di depan umum, yang berarti ruang publik seperti jalan, trotoar dan taman, serta moda transportasi umum. Pelecehan di jalan mengacu pada perhatian yang tidak diinginkan di depan umum termasuk komentar verbal atau panggilan seksama, kontak fisik seperti meraba-raba atau menyentuh dan kontak non-fisik seperti *gesturing* atau melirik. Insiden dapat berevolusi, dimulai dengan komentar verbal atau melirik dan meningkat untuk memasukkan kontak fisik seperti meraba-raba. Atau insiden dapat terungkap ketika lebih dari satu pelaku *harasser* mengambil bagian" (Nina M. Flores 2014).

Menjadi masyarakat kota metropolitan Surabaya yang memiliki mobilitas tinggi tidak bisa dilepaskan dari aktivitas di jalan raya dan tempat publik lainnya seperti taman dan trotoar. Dalam perkembangannya, pemerintah kota Surabaya telah memperbanyak serta merenovasi ruang publik di beberapa tempat dan melengkapinya dengan fasilitas seperti *wi-fi* hingga *cctv*, untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat. Namun berbagai macam hal bisa terjadi di tempat umum, salah satunya adalah *street harassment*. kenyamanan dan keamanan bukan hanya diukur dari kelengkapan fasilitas infrastruktur materiil, namun juga imateriil, seperti nilai, moral dan budaya masyarakatnya. Salah satu jenis *street harassment* yang paling sering penulis jumpai langsung saat melakukan observasi langsung dengan berjalan kaki mulai dari kantor DPRD Jawa Timur hingga Taman Bungkul adalah berupa *Catcall*, jenis pelecehan tersebut meski dikategorikan ringan, jika dibiarkan dapat memicu pelecehan yang lebih berat dan membahayakan, ditambah dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang *street harassment* dan apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapinya, karena siapapun bisa berpotensi menjadi korban pelecehan dan tidak bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi, serta siapa pelaku dan korbannya. Tanggapan masyarakat terhadap segala jenis pelecehan dalam *street harassment* mampu mempengaruhi bertahannya *Rape Culture* atau *budaya perkosaan* yang menormalisasi setiap peristiwa pelecehan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Change.org menemukan bahwa 6,5% atau 1.636 dari 25.213 responden mengaku pernah diperkosa, tetapi 93% dari mereka tidak melaporkan tindakan

kriminal tersebut ke polisi karena takut terhadap stigma yang akan didapatkan dari masyarakat (Yi Lih Beh 2016).

Beberapa negara telah menerapkan undang-undang yang bisa menjatuhkan hukuman pada para pelaku *street harassment*, diantaranya adalah negara Belgia, Portugal, Argentina, Kanada, New Zealand dan Amerika Serikat, selain berupa hukum normatif, di negara tersebut di beberapa tempat di jalan raya dapat dijumpai adanya larangan melakukan *Catcall* atau *Street Harassment*. Sebuah platform www.stopstreetharassment.org, bertujuan mengajak para perempuan untuk berani menceritakan pelecehan atau perlakuan kurang menyenangkan yang ia alami dan bertujuan untuk memberikan dukungan moral bahwa ia buka satu-satunya korban. Berdasarkan hasil dari survei terhadap 811 perempuan yang dilakukan secara *online* oleh situs www.stopstreetharassment.org, 99% dari mereka memiliki pengalaman pelecehan di jalanan atau *street harassment* (Stop Street Harassment 2018).

Penulis memilih tema gender dengan penelitian mengenai *street harassment* ini karena peneliti melihat bahwa obyektifikasi perempuan di jalan merupakan salah satu konsekuensi dari adanya budaya patriarki dalam masyarakat, penulis ingin mengetahui *street harassment* apa saja yang dialami oleh masyarakat di kota Surabaya dan bagaimana respon mereka yang menjadi korban serta respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelecehan tersebut dalam melanggengkan *rape culture* karena penetapan perilaku yang baik dan buruk, sopan dan tidak sopan.

Kajian Pustaka

Logika Sensor Michel Foucault

Michel Foucault adalah seorang filosof kontemporer yang pemikirannya sulit dipahami dan sedikit aneh. Julukan *The Fox* menjadi sebutan yang diberikan karena gaya berpikirnya yang membingungkan. Ia adalah tokoh yang lahir di Politier Prancis, pada tanggal 15 Oktober 1926 (Abu Tazid 2017). Foucault juga melakukan banyak penelitian dan pembahasan mengenai "*seksualitas*", "*diri*", "*panoptikon*", "*kuasa*", "*kebenaran*", "*normal dan tidak normal*" yang telah berhasil memengaruhi banyak bidang kajian: kedokteran, psikiater, psikologi, sosiologi, kajian feminis, kajian hukum dan kajian budaya kontemporer (Akhyar Yusuf 2016). Dalam *Madness and Civilization* yang edisi plon-nya berjudul *Folie et déraison* (1961), pada masa absolutisme, nalar dan bukan nalar saling terpisah; yaitu ketika kata-kata dipisahkan dari hal-hal inderawi, jiwa orang-orang gila terselubung dan terlepas dari cahaya penalaran (Scott Lash 2004). Lewat genealogi jaringan-jaringan kekuasaan atau pengetahuannya, Foucault mengemukakan bahwa disiplin ilmu dan wacana ilmiah membentuk struktur sosial tempat kebudayaan menentukan apa yang boleh diterima dan apa yang tidak; apa yang boleh dikatakan dari suatu jabatan otoritas, oleh siapa dan dalam kondisi sosial yang bagaimana. Dalam masyarakat seperti masyarakat kita, tulis Foucault (Smart 2012).

Haryatmoko dalam presentasinya mengungkapkan bahwa "Pertaruhan kebenaran menggunakan sarana politik tubuh, artinya bahwa sasaran kekuasaan adalah tubuh. Tujuan yang ingin dicapai dengan membidik tubuh ialah kepatuhan. Kepatuhan demi produktivitas. Kekuasaan ingin membentuk individu-individu yang berdisiplin agar menjadi tenaga produktif. Maka tekanan pada normalisasi dan pendisiplinan tubuh menjadi bagian dari strategi kekuasaan dan kebenaran. Akibatnya, kekuasaan sebagai rezim wacana lebih menekankan praksis sosial. Dengan demikian, pewacanaan seks secara sistematis menandai sejarah strategi perubahan hubungan kekuasaan dan kebenaran. Maka diperlukan beberapa bentuk wacana yang bisa mengatur hubungan kekuasaan dan seks seperti larangan, penafian, atau sensor. Jadi Sejarah Seksualitas membantu memahami cara beroperasi, mekanisme, dan strategi kekuasaan" (Handayani, Christina Siwi 2013).

Pemikiran Foucault tentang logika sensor mengenai sesuatu yang dianggap normal dan tidak normal inilah yang digunakan penulis untuk mengkaji fenomena *Street Harassment* di Kota Surabaya, karena peneliti menjumpai adanya perbedaan tanggapan yang diberikan masyarakat terhadap

perilaku *Street Harassment* yang terjadi di ruang publik dan berpotensi melanggengkan *rape culture* atau *budaya perkosaan* di dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono 2012a). maka dalam tulisan ini akan diuraikan secara naratif hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai *street harassment* yang terdapat di jalanan kota Surabaya selain itu metode ini dipilih karena kelebihanannya yang bisa membantu peneliti memperoleh data terkait fokus penelitian secara eksploratif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian atau riset kualitatif, fenomenologi berusaha memberikan deskripsi, refleksi dan interpretasi serta modus riset yang menyampaikan intisari dari pengalaman kehidupan individu yang diteliti. Melalui pendekatan fenomenologi ini peneliti dapat memahami lebih mendalam pemahaman tentang perilaku, tindakan dan gagasan masing-masing individu terhadap dunia kehidupannya (kepercayaan dan nilai yang dimilikinya) melalui sudut pandang partisipannya sendiri (Akhyar Yusuf 2015), Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian *street harassment* ini melibatkan pelaku (*harasser*) dan korban dimana terdapat tindakan rasional yang mendorong terjadinya perilaku *street harassment* dan respon yang diberikan secara berbeda.

Untuk memperoleh data dari populasi masyarakat kota Surabaya, peneliti melakukan observasi langsung dengan berjalan kaki di jalanan kota Surabaya (Kantor DPRD Jawa Timur – Taman bungkul, Royal Plaza – Jl. Karah, Surabaya Town Square – Jl. Karah) serta melakukan wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik sampling. (Sugiyono 2012b) mengemukakan teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel, Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Beberapa subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Masyarakat yang menjadi korban *Street Harassment* di Kota Surabaya

Sumber data kedua yang dipilih adalah masyarakat yang pernah mengalami pelecehan di jalanan dan ruang publik di kota Surabaya, hal ini untuk memperoleh keterangan tentang bentuk apa saja pelecehan yang telah mereka alami dan bagaimana respon yang mereka berikan saat menghadapi pelecehan.

- b) Masyarakat Sipil kota Surabaya

Sumber data kedua adalah warga yang sering beraktivitas di ruang publik di Kota Surabaya yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang tanggapan mereka terhadap pelecehan yang terjadi di jalanan kota Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

“Dikotomi ruang publik/privat memanifestasikan dirinya secara diskursif di dalam dialog gender dan ruang, karena pelecehan merupakan simbol untuk membangun kembali pemisahan antara laki-laki dan perempuan” (Ilahi 2008), dalam hal ini pemerintah kota Surabaya telah bekerja keras untuk menciptakan suatu ruang publik yang aman dan nyaman untuk warganya, hal ini terlihat dari adanya revitalisasi taman dan ruang publik, trotoar dan melengkapinya dengan fasilitas kebersihan, akses internet, hingga CCTV, namun hal ini tidak bisa menjamin seratus persen bebas dari masalah *street harassment*, apalagi sebagai masyarakat yang hidup di kota dengan lalu lintasnya yang padat, semua warganya menghabiskan sebagian dari hari mereka di jalan raya atau ruang publik dengan aktivitas yang dinamis, interaksi sosial adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan di

lingkungan masyarakat, begitu juga di ruang publik kota Surabaya, karena alasan “*Guyub Rukun*” siapapun bisa mengekspresikannya melalui *street harassment*, hal ini sama halnya dengan tindakan perampasan hak terhadap seseorang untuk dapat merasakan kenyamanan dan keamanan di ruang publik. Mengutip pernyataan dari (Jamaludin 2015) bahwa Para pengelola pembangunan kota cenderung lebih mendambakan terciptanya kota yang indah dengan memanfaatkan teknologi tinggi dan perangkat keras kontemporer. Padahal, mereka harus lebih mementingkan terciptanya kota yang demokratis, manusiawi, dengan ada sentuhan rasa yang penuh kepekaan.

Obyektifikasi tubuh di jalanan dengan melakukan *street harassment* atau pelecehan yang dapat berupa verbal maupun non verbal bukanlah hal baru dalam masyarakat kita, seseorang diperlakukan sebagai objek untuk dilihat dan disentuh, dan bukan sebagai manusia yang memiliki perasaan. Berdasarkan hasil perolehan data melalui observasi langsung dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 10 informan yang mengalami *street harassment* sepanjang bulan September-November di kota Surabaya, berikut adalah bentuk-bentuk *street harassment* yang mereka alami dan tanggapan yang diberikan warga di kota Surabaya:

Tabel 3. Bentuk Street Harassment, Respon korban dan Tanggapan Warga Surabaya terhadap respon korban.

Bentuk Pelecehan	Respon yang korban berikan terhadap <i>Street Harasament</i>	Tanggapan warga Surabaya terhadap respon korban <i>Street Harassment</i>
<i>Catcall</i> (Menggoda dengan melontarkan beberapa kata)	Tersenyum	Hanya ramah tamah
<i>Path Blocked</i> (Dihadang saat sedang berjalan)	Lari meninggalkan lokasi	Jangan berjalan sendiri di tempat sepi
<i>Sexual Touching or Grabbing</i> (Menyentuh bagian tubuh; payudara, pantat dan paha)	Kaget dan Marah	Korban harusnya lebih waspada dan memakai pakaian yang sopan
<i>Stalking</i> (diikuti saat sedang berjalan, dikejar dan di pepet dengan sepeda motor)	Meningkatkan kecepatan kendaraan dan mencari keramaian	Mencari keramaian
Lirikan mata	Menyingkir dari lokasi	Bukan sesuatu yang serius selama tidak merasa terancam
<i>Target of public masturbation</i> (Memperlihatkan serta memainkan alat kelamin di ruang publik)	Menyingkir dari lokasi	Untuk keamanan lebih baik menjauhi lokasi kejadian

Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa *Street Harassment* yang terjadi di kota Surabaya berupa pelecehan ringan hingga pelecehan berat yang membahayakan, baik secara verbal maupun non-verbal. Seorang informan menceritakan pengalamannya tentang *street harassment* dan tanggapan yang diberikan orang di sekitarnya atas kejadian yang menimpanya:

“Waktu itu saya pulang dari kampus jam 8 malam pakai sepeda sendirian lewat gang, dari arah yang berlawanan ada 2 orang yang naik sepeda motor menyentuh payudara saya dengan keras, saya mendadak ngefreeze, shock, campur takut gak tahu harus ngapain. Waktu saya menceritakan

pengalaman ini ke teman saya untuk memperingatkannya supaya hati-hati jika melintas di gang tersebut, dia justru mengatakan bahwa pakaian saya kurang tertutup dan memang lagi kena apes saja karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian ini.” (Wawancara dengan Devi Rahmawati, November: 2018)

Istilah logika sensor Foucault menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, kesadaran masyarakat tentang apa yang dianggap baik atau buruk untuk kasus pelecehan ini masih rendah, perilaku menormalisasi setiap jenis pelecehan inilah yang berkontribusi dalam melanggengkan *Rape Culture* dan dapat menyebabkan meningkatnya frekuensi pelecehan dan korban yang lebih banyak akibat tidak adanya ketegasan dari masyarakat dan ketakutan korban untuk menceritakan tentang pengalaman *street harassment* yang ia alami, ketakutan ini juga diakibatkan dari adanya *rape culture*, menurut pengalaman yang diceritakan informan bahwa masyarakat cenderung menyalahkan korban (*blaming victim*) atas terjadinya peristiwa pelecehan tersebut yang disebabkan oleh cara berpenampilan; pakaian, *make up* dan aksesoris.

Seperti yang telah disampaikan Defi pada Kompas.com “*Rape culture* ini sifatnya sistemik, kita enggak sadar bahwa itu sudah ada dan bahkan dilanggengkan dalam budaya kita. Ini juga menjadi penyebab kenapa banyak kasus perkosaan atau pelecehan seksual terus terjadi dan sulit ditangani” (Azanella 2018), Maka berdasarkan klasifikasi hasil data dalam tabel di atas mengenai bentuk pelecehan, respon korban serta tanggapan yang diberikan masyarakat menunjukkan bahwa sensitivitas masyarakat terhadap apa yang terjadi di sekitarnya masih rendah hal ini dibuktikan dengan frekuensi pelecehan yang dialami oleh informan terpilih tidak mengalami penurunan namun justru lebih beragam jenis pelecehan yang mereka terima setiap beraktivitas di jalanan maupun di ruang publik di kota Surabaya. Mengutip dari situs Wikipedia “ *Rape Culture* atau budaya perkosaan adalah konsep sosiologis untuk pengaturan di mana pemerkosaan meresap dan dinormalisasi karena sikap masyarakat tentang gender dan seksualitas. Perilaku yang umumnya dikaitkan dengan budaya perkosaan termasuk menyalahkan korban, memperlakukan pelacur, obyektifikasi seksual, pemerkosaan, penolakan perkosaan; menolak untuk mengakui kerugian yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Hal ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku dalam kelompok sosial, termasuk perkosaan penjara dan di daerah konflik di mana pemerkosaan perang digunakan sebagai peperangan psikologis. Seluruh masyarakat telah diduga sebagai bagian dari adanya *rape culture* atau budaya perkosaan” (Wikipedia 2018).

“Foucault menyatakan bahwa dalam kebudayaan timur seperti masyarakat Indonesia, seksualitas tertanam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang disebutnya sebagai *ars erotica*. *Ars erotica (erotic art)*, bagi Michel Foucault, telah mendedahkan bahwa, seksualitas tidak lagi didiskusikan hanya dalam kerangka moralitas, tapi telah menjadi kajian dalam ilmu pengetahuan (*science of sexuality*), yang tak lagi bisa ditentukan hanya oleh klaim kebenaran” (Irwan M. Hidayana 2013). Semua informan yang berhasil di wawancarai mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman *Catcalling* berupa; siulan, kata-kata bernada *seksis* atau menyebutkan bagian tubuh tertentu (*body shaming*), namun mereka tidak menyadari bahwa itu merupakan sebuah pelecehan, mereka justru menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah pujian dari penampilan mereka, oleh sebab itu mereka merespon *Catcall* dengan senyuman, hingga menyapa kembali para pelaku *street harassment*, pelecehan tersebut sering terjadi di ruang publik dengan aktivitas yang ada disekitarnya, bukan di tempat yang tertutup, dan tanggapan yang diberikan oleh warga mengenai hal tersebut adalah mereka menganggap itu merupakan hal yang wajar dan hanya sebuah bentuk lain dari ramah tamah, bukan sesuatu hal yang serius untuk dianggap sebagai pelecehan. Namun hal ini bisa membuat seseorang yang mengalami *street harassment* memiliki trauma seperti yang diceritakan oleh seorang informan mengenai pengalamannya menjadi objek seksual orang asing di ruang publik:

“Saya lagi duduk sendiri di trotoar nunggu Suroboyo Bus, ada cowok duduk di atas motornya di seberang jalan ternyata dia sedang memainkan alat vitalnya dan menunjukkan pada saya dengan jelas, dia pakai buff hitam, dan helm, semuanya serba hitam, sejak saat itu saya punya trauma saat berada di tempat sepi apalagi kalo liat orang pakai baju serba hitam.” (Wawancara dengan Ratih Mayangsari, Oktober: 2018)

“Kekerasan adalah suatu tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di arena publik maupun dalam rumah tangga” (Musdah Mulia 2015). Perampasan hak perempuan di ruang publik dengan melakukan *street harassment* sangat merugikan, dan bukan merupakan perbuatan yang menyenangkan karena membatasi akses yang dibuat untuk umum. Kesadaran para korban *street harassment* untuk berani melawan pelaku dan perilaku pelecehan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari respon yang diberikan korban saat terjadi pelecehan yang menimpa mereka, mereka memiliki ketakutan bahwa jika mereka melakukan sesuatu yang bersifat melawan justru akan membahayakan mereka. Namun ada seorang informan yang memiliki keberanian saat menghadapi *street harassment*:

“Pas lagi jalan sendirian abis dari minimarket ada anak laki-laki gonceng tiga nge-catcall dan ngikutin aku, karena mereka ganggu banget jadi aku lempar pakai satu botol yakult yang baru aku beli dari minimarket” (wawancara dengan Ivana Kurniawati, Oktober 2018)

Terlepas dari rasio seksual yang sudah terkonstruksi dalam kesadaran masyarakat mengenai tanggapan tentang baik dan buruk, normal dan tidak normal atas tindakan *street harassment* yang terjadi di ruang publik kota Surabaya ini perlu diingat bahwa kita sebagai individu yang hidup dalam masyarakat memiliki emosi dan nilai yang berbeda, Diskursus mengenai moralitas ini juga disampaikan Foucault bahwa “moralitas memiliki dua elemen dasar dan bisa dihubungkan dari satu ke yang lain. Pertama adalah *kode-kode perilaku* ketika otoritas menjalankan ketentuan kode, kedua adalah *bentuk-bentuk subjektivikasi* atau praktik-praktik diri”(Ritzer 2003). Selain itu dalam bukunya Kritik Atas Akal Budi Praktis, Kant mengatakan bahwa “*Hidup* adalah kemampuan milik makhluk yang dengannya makhluk ini bertindak sesuai dengan hukum-hukum hawa nafsu. *Hawa Nafsu* adalah kemampuan yang dimiliki makhluk untuk menciptakan, melalui ide-ide, realitas objek-objek dari ide-ide tersebut. *Kesenangan (Pleasure)* adalah ide tentang kesetujuan sebuah objek atau tindakan dengan kondisi-kondisi *subjektif* hidup, yakni dengan kemampuan yang dengannya sebuah ide menciptakan realitas objeknya (atau arah energi-energi sebuah subjek menuju suatu tindakan yang akan melahirkan objek)” (Immanuel Kant 2005). Selain itu dalam masyarakat kita juga telah menetapkan sejumlah nilai dan norma yang cakupannya lebih luas, bukan hanya nilai tentang sesuatu yang baik atau buruk dalam keyakinan seseorang. Nilai dan norma tersebut memiliki kekuatan dan menjadi instrumen penting yang mengikat masyarakat untuk berperilaku sesuai norma yang telah ditetapkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat. “Tanpa norma kita akan mengalami kekacauan sosial. Norma menentukan panduan utama mengenai bagaimana kita harus memainkan peran kita dan berinteraksi dengan orang lain” (Henslin 2007).

Respon atau tanggapan yang beragam diberikan oleh masyarakat mengandung makna bahwa sebagai masyarakat kota dengan heterogenitas budaya dan kompleksitas masalah yang di hadapi menunjukkan bahwa nilai dan norma yang mengikatnya tidak begitu kuat kecuali aturan yang bersifat normatif tersebut telah di sepakati dalam bentuk hukum tertulis dan memiliki sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (Soerjono Soekanto 2014) menyebutkan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan, salah satunya adalah bahwa jalan

pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Sikap apatis terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya seperti *street harassment* di kota Surabaya Hal ini dapat menjadi salah satu faktor bertahannya *rape culture* dalam masyarakat perkotaan yang individualis.

Dalam lingkungan yang lebih global, sebagai suatu bentuk simpati atas maraknya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan dengan kondisi lingkungan dan hukum yang masih di dominasi oleh patriarki ini telah melahirkan sebuah gelombang gerakan anti kekerasan seksual yaitu "*Me Too Movement*" dan sebuah platform digital www.stopstreetharassment.org sebagai wadah bagi para perempuan agar tidak takut menceritakan pengalaman pelecehan seksual yang mereka alami dan membawa misi pada peningkatan kesadaran dan edukasi pada perempuan bahwa mereka memiliki otoritas dan kekuatan atas tubuh mereka serta apa yang seharusnya telah menjadi hak mereka, salah satunya adalah hak untuk merasakan keamanan dan kenyamanan menggunakan fasilitas umum di ruang publik tanpa adanya *street harassment*.

Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai *street harassment* di kota Surabaya yang telah dilakukan oleh peneliti sepanjang September hingga awal bulan November telah diperoleh kesimpulan berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa di kota Surabaya masih banyak terjadi kasus *street harassment* yang berupa pelecehan ringan, hingga pelecehan berat. Mulai dari melontarkan kalimat yang menggoda, hingga menyentuh bagian tubuh tertentu, terjadi dalam keramaian atau dalam kondisi sepi, Perilaku *street harassment* sangat membatasi akses dan mobilitas di ruang publik. Dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang individualis, sebuah interaksi hanya dilakukan jika dirasa bahwa hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat diatur berdasarkan hukum tertulis yang telah disepakati. Adanya perbedaan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap tindakan *street harassment* yang terjadi di kota Surabaya mampu berkontribusi mempertahankan *rape culture*, hal ini merupakan konsekuensi dari tipologi masyarakat kota Surabaya yang heterogen dan dinamis bahwa masyarakatnya cenderung memilih untuk bersikap apatis saat menjumpai pelecehan yang terjadi di jalanan atau ruang publik. Sikap menormalisasi setiap bentuk pelecehan yang belum sampai membahayakan nyawa dianggap sebagai sebuah kesialan karena mengalaminya, dengan menyalahkan korban (*blaming victim*) karena penampilan atau sikap perilaku mereka yang menyebabkan ia mengalami *street harassment*, hal ini membuat korban *street harassment* menyimpan sendiri pengalamannya tersebut dan dapat memberikan efek traumatik hingga gangguan psikologis.

Referensi

- Abu Tazid. 2017. *Tokoh, Konsep dan Kata Kunci Teori Postmodern*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish.
- Akhyar Yusuf, Lubis. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pres.
- Akhyar Yusuf, Lubis. 2016. *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Azanella, Luthfia ayu. 2018. "Akibat 'Rape Culture', Masyarakat Dinilai Berperan Langgengkan Pemerkosaan." *Kompas.com*, November 11, Nasional.
- Handayani, Christina Siwi, Dkk. 2013. *Subyek yang Dikekang*. Jakarta: Komunitas Salihara.
- Henslin, James M. 2007. *Sosiologi, Dengan Pendekatan Membumi*. 6 ed. Jakarta: Erlangga.
- Ilahi, Nadia. 2008. "You Gotta Fight For Your Right(s): Street Harassment and it's Relationship to Gendered Violence, Civil Society, and Gendered Negotiations." The American University in Cairo.
- Immanuel Kant. 2005. *Kritik Atas Akal Budi Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Irwan M. Hidayana. 2013. "Budaya Seksual dan Dominasi Laki-Laki dalam Perikehidupan Seksual Perempuan." *Jurnal Perempuan (Agama dan Seksualitas)*:61.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perkotaan*. 1 ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Musdah Mulia. 2015. *Mengupas Seksualitas*. Jakarta: Opus Press.
- Nina M. Flores. 2014. "Street Harassment Old Issue, Ongoing Struggle, New Movement." *Progressive Planning* 28–30.
- Ritzer, George. 2003. *Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Scott Lash. 2004. *Sosiologi Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Smart, George Ritzer & Barry. 2012. *Handbook Teori Sosial*. Jakarta: Nusa Media.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stop Street Harassment. 2018. "Two Online Studies by Street Harassment." *Stop Street Harassment Statistics*.
- Sugiyono. 2012a. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wikipedia. 2018. "Rape Culture." *Wikipedia.org*. Diambil 9 November 2018 (https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rape_culture&oldid=867693534%22).
- Yi Lih Beh. 2016. "Over 90 percent rape cases go unreported in Indonesia: poll." *Thomson Reuters Foundation World News*. Diambil 10 November 2018 (<https://www.reuters.com/article/us-indonesia-crime-women-idUSKCN10515C>).

Peran Perempuan Suku Tengger dalam Menjaga Tradisi Petekan Di Desa Ngadas Poncokusumo Kabupaten Malang

*Diah Maulidatun Ni'mah, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Malang. diahmaulida155@gmail.com :*

*Riski Ananda Putri, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
riski.kian29@gmail.com :*

*Luxy Pujo Sakti, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
luxysakti1@gmail.com :*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran perempuan suku tengger di desa Ngadas Poncokusumo Kabupaten Malang. Perempuan tengger menjaga kesuciannya sebagai manifestasi dari usaha untuk menghindari terjadinya wabah penyakit *pagebluk*. Fakta itulah yang mendasari tradisi *petekan* dilakukan tiap tiga bulan sekali. Tradisi tes keperawanan yang diperuntukan bagi remaja dan janda ini dilakukan sebagai pendeteksi apakah terdapat janin atau tidak pada rahim perempuan tersebut. Peran perempuan tercemar dalam tradisi *petekan* selain karena pelaksanaan tradisi ini hanya diperuntukan khusus bagi perempuan, juga bisa dilihat dari beberapa persiapan sebelum dilaksanakannya tradisi *petekan*. Tradisi yang terbentuk dari kearifan lokal bahwasannya perempuan dan alam tengger merupakan suatu keseimbangan ini akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : tradisi petekan, kearifan lokal, peran perempuan, wabah penyakit.

Pendahuluan

Suku tengger merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang berada di kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru Jawa Timur Indonesia. Suku Tengger menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang. Suku tengger biasa disebut *wong tengger* yang artinya orang tengger. Masyarakat setempat menggunakan Bahasa Tengger yang termasuk rumpun dari Bahasa Jawa. Perempuan tengger menjadi pribadi yang "Tanggung" dapat diandalkan yang merupakan fitrah perempuan Jawa. Dalam menjalankan adat dan tradisi, perempuan Jawa identik dengan pemegang teguh nilai-nilai tradisionalnya dan pekerja keras.

Masyarakat Jawa menilai perempuan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan yang ringan sehingga mereka mempunyai konstruksi berfikir bahwa perempuan sebaiknya bekerja pada ranah domestik dan laki-laki di ranah publik karena masyarakat Jawa pada umumnya menganut budaya patriarki di mana semua keputusan diambil oleh laki-laki. Itulah yang membedakan perempuan Jawa dengan perempuan suku tengger, yang mana masyarakat setempat percaya bahwa sifat atau perilaku ini merupakan warisan dari Rara Anteng merupakan nenek moyang mereka. Perilaku mereka yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat dilihat pada tradisi petekan.

Tradisi petekan merupakan tradisi yang memang masih sangat dijaga oleh masyarakat suku Tengger. Meskipun ada beberapa wilayah yang sebenarnya mempunyai tradisi yang hampir sama dengan tradisi petekan contohnya adalah pada masyarakat Nias. Tradisi yang diadakan setiap 3 bulan sekali untuk perempuan suku tengger ini begitu melekat pada diri dan menjadi bagian dari masyarakat suku tengger sehingga bagi siapapun warga tengger yang merantau akan pulang demi bisa mengikuti tradisi petekan. Dan bagi perempuan yang terbukti melanggar hukum adat melalui tradisi ini akan mendapatkan hukuman adat.

Disini terlihat bahwa perempuan tengger sangat tangguh dan benar benar menjaga tradisi mereka supaya tidak terkena hukum adat tersebut, apabila mereka melanggar mereka akan menerima semua konsekuensinya. Dengan adanya tradisi ini mencegah masyarakat untuk melakukan sex bebas di luar pernikahan. Secara tidak langsung mereka terikat peraturan tidak tertulis yang sudah disepakati bersama yang bernama hukum adat. Pemaparan diatas peneliti ingin melihat bagaimana makna tradisi petekan untuk masyarakat suku tengger khususnya perempuan. Memfokuskan pada pengamatan terhadap Peran Perempuan dalam tradisi petekan suku tenger di Desa Ngadas Poncokusumo Kabupaten Malang.

Kajian Pustaka

Tradisi Petekan terdapat di Suku Tengger Desa Ngadas Pancakusumo yang berada di kaki Gunung Bromo Jawa Timur. Pelaku yang menjalankan tradisi ini adalah kaum perempuan, Masyarakat Tengger percaya jika salah satu perempuan tidak bisa menjaga kesuciannya maka akan ada bencana alam atau penyakit menular (pagebluk). Suku Tengger biasa disebut wong tengger yang artinya orang tengger. Masyarakat setempat menggunakan Bahasa tengger yang termasuk rumpun dari Bahasa Jawa, seringkali disebut sebagai Bahasa Jawa Tengger. Suku Tengger menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang.

Peran Perempuan, peran merupakan fungsi yang tertata dalam kehidupan sebagai aktivitas baik dalam aktivitas di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dalam masyarakat Jawa tidak jarang bahwa banyak yang menyebut perempuan sebagai "*kanca ing wingking*" dari istilah tersebut menunjukkan bahwasannya posisi perempuan selalu di tempatkan setelah laki-laki. Ruang gerak perempuan kerap kali dibatasi seputar dapur, sumur, dan kasur. Dalam peran, perempuan dipandang sebagai pelaku kedua atau dalam sektor domestik.

Pendekatan teori yang digunakan yakni fungsional struktural Parsons, alasan memilih pendekatan ini karena dapat menjelaskan tradisi petekan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat suku tengger. Konsep kondisi-kondisi yang diperlukan inilah yang secara langsung ada di balik sejumlah hubungan sosial dengan status, peran, nilai norma, pengetahuan simbol yang terus disosialisasikan secara terus menerus sehingga membentuk suatu hubungan dan juga kebiasaan pada masyarakat suku tengger.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Suku Tengger di Desa Ngadas Poncokusumo Kabupaten Malang. Menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling untuk teknik penentuan subyek. Dalam pengambilan subyek, peneliti memiliki kriteria yang ingin dijadikan informan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam melakukan penelitian di desa Ngadas menggunakan tiga jenis pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi yang langsung melihat semua fenomena-fenomena yang ada di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dalam melakukan wawancara kami mewawancarai, sesepuh desa ngadas atau sering disebut sebagai mbah dukun, pak nagationo atau asisten mbah dukun, pak misbu, dan para peserta tradisi petekan. Selain itu kami juga melakukan observasi atau peninjauan langsung kelapangan pada saat dilakukannya tradisi *petekan* dilangsungkan. Serta melakukan Studi Dokumentasi guna melengkapi data sekunder penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (1994) secara umum terdapat tiga langkah analisis data kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yang dimaksud disini adalah sebuah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabsahan dan juga transformasi dari data kasar yang muncul pada saat penelitian di lapangan. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan data sudah tersusun hingga memberikan

kemungkinan akan adanya tindakan. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan yaitu dimana peneliti terus menarik kesimpulan pada saat di lapangan. Teknik yang digunakan peneliti dalam pemeriksaan atau validitas data pada penelitian ini sama seperti yang dikemukakan Moleong (2006:327), adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam penelitian tradisi *petekan*.

Pembahasan

Suku tengger merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang terletak wilayah kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru Jawa Timur Indonesia. Suku Tengger menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang. Suku tengger biasa disebut wong tengger yang artinya orang tengger. salah satu wilayah suku tengger yang masih memegang erat nilai tradisi terletak di Desa Ngadas Poncokusumo Kabupaten Malang.

Suku Tengger mempunyai banyak tradisi yang masih kental dan melekat pada masyarakat. Suku Tengger menjalankan tradisi, ibadah dan adat istiadat dengan menghayati sesanti Titi Luri, yang artinya mengikuti jejak leluhur dengan pedoman pada kepercayaan dan budaya nenek moyang. Tradisi adalah sesuatu yang khas menjadi identitas suatu suku tertentu, merupakan potensi yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus. Salah satu tradisi yang masih berjalan pada saat ini adalah Tradisi Petekan,

Tradisi Petekan merupakan tradisi untuk mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah, masyarakat suku tengger biasanya menyebut tradisi ini dengan istilah test keperawanan. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan anggota masyarakat tengger yang berjenis kelamin perempuan guna mengetahui apakah ada janin dalam rahim perempuan tersebut, legem, dukun bayi, linmas juga diperlukan untuk membantu jalannya tradisi ini. Tradisi ini untuk mencegah terjadinya pagebluk (wabah penyakit) yang menyerang semua masyarakat Suku Tengger akibat perempuan yang hamil diluar nikah.

Tradisi petekan masih sangat dijaga oleh masyarakat suku tengger dan diadakan tepatnya 3 bulan sekali yang dipimpin oleh dukun bayi, ketua linmas, Kepetengan (joyo boyo) dan legem (pembantu dukun adat). Istilah Petekan sudah menunjukkan cara yang digunakan untuk tradisi ini, yakni dengan meraba perut. Kata petek' merupakan Bahasa Jawa yang artinya ditekan. Tidak hanya dukun bayi yang berperan, tradisi ini juga digabungkan dengan dunia medis yang terdapat bidan desa untuk bekerja sama melakukan test urin.

Perempuan tengger menjadi pribadi yang "Tangguh" dapat diandalkan yang merupakan fitrah perempuan jawa. Dengan artian jika masyarakat jawa menilai perempuan maka perempuan sebaiknya bekerja di rana regional (domestik) dan laki laki di ranah publik karena di pulau jawa menganut budaya patriarki dimana semua keputusan ditetapkan oleh laki- laki. Tetapi, yang membedakan perempuan jawa dengan suku tengger ialah dalam menjalankan adat dan tradisi, perempuan tengger identik dengan pemegang teguh nilai-nilai tradisionalnya dan pekerja keras. Perilaku mereka yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada tradisi petekan. Tradisi petekan dilakukan di rumah asisten dari dukun (pak Ngationo).

Tradisi tes Keperawananan sedemikian selain terdapat pada masyarakat tengger namun terjadi juga pada masyarakat Nias . Pada masyarakat Tengger terdapat hukum ada yang berlaku bila diketahui dalam tradisi petekan yang dilakukan ditemukan perempuan hamil diluar nikah maka akan di beri sanksi berupa 50 sak semen untuk perempuan dan laki – laki- jika keduanya masih berstatus lajang, namun jika laki – laki sudah menikah maka akan dikenakan denda 100 sak semen.

Tak hanya itu mereka juga disuruh untuk membersihkan jalan. Mereka juga akan dinikahkan secara adat, jika anak yang dikandung sudah lahir maka mereka harus bercerai jika laki-laki sudah

menikah karena masyarakat suku tengger tidak mengenal yang namanya berpoligami. Terlihat jika perempuan tengger sangat tangguh dan benar benar menjaga tradisi mereka supaya tidak terkena hukum adat. Dan dengan adanya tradisi ini mencegah masyarakat untuk melakukan sex bebas di luar pernikahan. Secara tidak langsung mereka terikat peraturan tidak tertulis yang sudah disepakati bersama yang bernama hukum adat.

Peran perempuan Tengger dalam mempertahankan kebudayaan dilihat dari bagaimana perempuan tenger mengadakan tradisi petekan yang anggotanya hanya untuk perempuan saja. Perempuan tengger menjadi pribadi unik yang merupakan bagian dari perempuan jawa. Oleh karena itu, dalam menjalankan adat atau tradisinya masyarakat tengger masih memegang teguh nilai tradisionalnya, kepercayaan terhadap sosok mitologis perempuan tenger yakni Rara Anteng yang memberikan kemampuan lebih pada perempuan tengger merupakan warisan sifat untuk mengeksplor lebih dari batas ke jawa annya. Ada kepercayaan yang tertanam dalam individu perempuan tengger bahwa keseimbangan alam tenger tergantung oleh perilaku perempuan Tenger. Dengan adanya tradisi ini yang diwariskan secara turun temurun membuat beban tersebut menjadi kebiasaan (takdir) yang harus dijalani.

Analisis teori struktural fungsional

Penerapan konsep sistem menurut Parsons merujuk pada dua hal. Pertama, saling ketergantungan diantara bagian lainnya, komponen dan proses-proses yang meliputi keteraturan yang dapat dilihat. Kedua, saling ketergantungan dengan komponen-komponen lain dan lingkungan-lingkungan yang mengelilinginya. Komponen-komponen itu adalah dimensi masa (waktu), dimensi isi (materi) berupa jenis kegiatan, dan dimensi simbol yang dipergunakan (nilai, norma, dan pengetahuan). Analisis mengenai Sistem dan fungsi, dapat menjelaskan berbagai kondisi-kondisi yang ikut mendukung tradisi petekan pada masyarakat suku tengger desa Ngadas Poncokusumo, serta mendukung segala kelangsungan-kelangsungan tradisi petekan pada masyarakat suku tengger. Di sini peneliti melakukan pengamatan pada tiga aspek penting pada masyarakat suku tengger Desa Ngadas Poncokusumo; kondisi budaya, kondisi sosial, dan kondisi material.

Kondisi budaya mencakup sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat desa Ngadas Poncokusumo yaitu agama Islam, Budha, dan Hindu. Kondisi budaya lainnya meliputi tradisi adat istiadat petekan yang diperuntukan hanya pada perempuan gadis dan janda yang bertujuan untuk mendeteksi kehamilan pada perempuan desa Ngadas Poncokusumo. Kondisi sosial meliputi, struktur sosial, sistem kekerabatan, konflik, ketertiban serta hukuman. Pada sistem sosial pada masyarakat desa Ngadas Poncokusumo jika terdapat perempuan hamil diluar nikah maka mereka akan dikenakan hukuman dan juga denda, hukuman tersebut berupa semen 50 karung untuk satu orangnya baik perempuan maupun laki-laki. Kondisi material meliputi, suatu keadaan demografi, pekerjaan, serta perkawinan. Pada kondisi material masyarakat desa Ngadas Poncokusumo, memiliki pekerjaan tetap setiap harinya yaitu bertani dan berkebun. Fokus analisis pada penelitian ini terletak pada peran perempuan dalam menjaga tradisi petekan, di sini perempuan mempunyai peran yang vital dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perempuan desa Ngadas Poncokusumo dituntut untuk menjalankan tradisi petekan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Perempuan desa Ngadas harus tunduk oleh sistem yang sudah ditetapkan di desa Ngadas. Mereka wajib melakukan tradisi petekan tersebut, dan apabila mereka melanggar maka mereka akan dikenakan sanksi dan juga akan dicurigai oleh masyarakat desa Ngadas Poncokusumo.

Kesimpulan

Tradisi petekan yaitu tradisi test keperawanan yang hanya ada di suku tengger. Perilaku tangguh mereka yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat dilihat pada tradisi

petekan. Tradisi ini diadakan setiap 3 bulan sekali, dimana anggota yang mengikuti merupakan perempuan tengger. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan anggota masyarakat tengger yang berjenis kelamin perempuan guna mengetahui apakah dalam rahim perempuan terdapat janin. Legen, dukun bayi, linmas juga diperlukan untuk membantu jalannya tradisi ini. Dalam tradisi ini dapat dilihat bahwa peran perempuan suku tengger dalam tradisi ini lebih dominan dalam menjalankan tradisi yang terdapat di suku tengger.

Perempuan suku tengger yang sudah memasuki masa akhir balig wajib untuk mengikuti tradisi ini. Orang tua yang memiliki anak perempuan terutama ibu wajib membimbing anaknya, sebaliknya anak juga harus mematuhi orang tuanya. Perilaku masyarakat yang terlihat dalam tradisi petekan ini menekankan bahwa masyarakat suku tengger sejak dulu tidak mengenal sistem poligami.

Referensi

- Hefner W Robert. 1999. GEGER TENGGER Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik. Yogyakarta: LkiS
- Kresna, Rendra. 2016. Tradisi Petekan Test Keperawanan dari Negeri Kayangan. Malang : Malang Intermedia Press.
- Mathew B Miles dan A Michel Hubermas.2014. *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Suyono, R P. 2009. Mistisme Tengger. Yogyakarta : LkiSYogyakarta.

CYBER SOCIETY

Identitas Kelompok Keagamaan dalam Ruang Cyber

Wisnu Pudji Pawestri

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Kemudahan akses yang diberikan seolah memudahkan batasan-batasan ruang dan waktu, sehingga yang terjadi adalah terbentuknya dunia satu dimensi dalam sebuah ruang yang disebut *Cyber Space*. Pengaruh *cyber space* terhadap kehidupan sosial setidaknya terlihat pada tiga tingkat, yaitu individu, antar individu, dan kelompok. Sistem kelembagaan diatas seolah menciptakan sebuah relasi-relasi sosial dan identitas baru yang dibangun dalam *cyber space*. Hal yang menarik adalah ketika kelembagaan yang biasanya terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat kini justru muncul dan terbentuk dalam ruang maya. Artikel ini mengulas bagaimana kelompok kajian keagamaan membangun 'dunia baru' dalam ruang maya, serta bagaimana kelompok tersebut membangun identitasnya dalam *cyber society*. Fokus artikel ini adalah dengan melihat (a) solidaritas sosial dan identitas sosial yang dibentuk dalam kelompok kajian keagamaan "Muslim Berhijrah" pada aplikasi Whatsapp Group (WAG), dan (b) mengapa kelompok tersebut membutuhkan ruang maya untuk menyebarkan syiar idelogisnya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teori simulakra yang diusung oleh Jean Baudrillard. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas sosial dalam WAG Muslimah berhijrah sebagai sebuah simulakra dan memunculkan identitas komunal yaitu perilaku konsumsi yang adiktif terhadap informasi keagamaan dengan basis *manhaj* salaf. Budaya konsumsi terhadap informasi salaf pada akhirnya memunculkan keterlekatan diantara setiap member. Berdasarkan hal itulah sebuah solidaritas komunal itu terbentuk.

Kata Kunci: Cyber Society, Cyber Space, Identitas, Solidaritas.

Pendahuluan

Ekspansi global dunia digital dalam bentuk jaringan internet memberikan ruang baru bagi masyarakat dalam mengekspresikan dan membentuk identitasnya. Perkembangan teknologi dunia digital ini seolah menghadirkan arena dan ruang baru melalui internet dan pada akhirnya menjadi realitas kedua bagi masyarakat dalam mengkomunikasikan identitasnya yang tidak ia dapatkan dalam ruang nyata. Interaksi-interaksi yang terbangun dalam dunia digital seakan menjadi ruang interaksi dan dunia baru serta membentuk solidaritas yang baru sampai akhirnya tercipta sebuah identitas yang baru melalui ruang digital tersebut. Apalagi maraknya media komunikasi berbasis internet seperti *Whatsapp*, *Instagram*, *Facebook*, dll seolah menjadi solusi alternatif untuk mendobrak batasan ruang dan waktu yang menjadi konstruksi utama dalam kehidupan bermasyarakat di ranah nyata. Singhal, Rogers, & Brown (1993) mengatakan bahwa percepatan perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah membawa masyarakat pada sebuah tatanan jarak dan waktu yang tidak lagi menjadi permasalahan untuk berkomunikasi. Pengaburan batasan ruang dan waktu yang diakomodir oleh perkembangan jaringan internet dan media sosial justru memudahkan individu dalam berkomunikasi, pengungkapan identitas, pembentukan komunitas, dan sebagainya. Merujuk pada riset yang dilakukan oleh Nielsen Indonesia pada tahun 2013, mengatakan bahwa pengguna ponsel pintar didominasi dengan aktivitas chatting online (94%) melalui aplikasi chatting populer yaitu *Whatsapp* (60%), *Line* (35%), dan *Facebook Messenger* (10%). Berdasarkan data tersebut, bisa diasumsikan bahwa teknologi digital berbasis internet ini juga memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika masyarakat dalam berinteraksi antar sesama pengguna ponsel pintar. Tentunya hal ini juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perubahan sosial di masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang dapat dijangkau

dengan sangat praktis inipun menjadi pemicu dalam membentuk *cyber culture*. Seolah ruang *cyber* tidak hanya dimaknai sebagai sebuah alat, namun juga sebagai entitas yang dimaknai dan diinternalisasi dalam kehidupan keseharian individu dalam ruang sosialnya.

Proses-proses pemaknaan terhadap ruang *cyber* ini yang akhirnya memunculkan budaya *cyber* atau *cyber culture*. Bell (2007) menyatakan bahwa budaya *cyber* merupakan sebuah paradigma berpikir yang didapatkan dari hasil integrasi antara masyarakat dengan teknologi internet. Persinggungan masyarakat dengan internet seolah memunculkan bentuk realitas baru di tengah masyarakat. Merujuk pada Baudrillard (1981) kenyataan saat ini merupakan bentuk dari simulasi kenyataan atas simbol dan tanda. Artinya, kehidupan masyarakat dalam dunia *cyber* seolah bukan lagi sebagai bentuk representasi atau cerminan dari masyarakat, melainkan justru menjadi kenyataan itu sendiri. Selanjutnya yang terjadi adalah masyarakat tidak lagi memiliki batasan antara ruang nyata dengan ruang fantasi sehingga memicu terbentuknya realita semu yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Simulasi-simulasi ini yang pada akhirnya dianggap oleh Baudrillard bukan sebagai realita yang sesungguhnya, melainkan realitas yang dibentuk oleh kesadaran manusia melalui media massa.

Selanjutnya, yang menjadi menarik adalah ruang *cyber* tidak hanya memberikan dampak terhadap kehidupan sosial individu atau antar-individu, melainkan juga berdampak pada tingkat kelompok atau komunitas. Jika dalam kehidupan sosial di “ruang nyata” unsur teritorial sangat berperan penting dalam pembentukan komunitas atau kelompok masyarakat, hal ini tidak terjadi dalam *cyber space* yang pada akhirnya membentuk *cyber culture*. Sederhananya, kelompok masyarakat atau komunitas pastinya akan bergantung pada unsur teritorial seperti kelompok pecinta alam, kelompok ibu-ibu PKK, dan kelompok-kelompok berbasis kemasyarakatan lain. Meskipun mereka disatukan karena sebuah gerakan dan tujuan yang sama, unsur teritorial juga memegang peranan penting sampai pada akhirnya mereka membentuk sebuah ruang pertemuan bernama komunitas atau kelompok. Berbeda dengan kelompok atau komunitas dalam *cyber space*, kesamaan akan suatu hal sudah cukup kuat untuk membentuk sebuah komunitas yang tanpa mempedulikan unsur teritorial. Dimensi ruang dan waktu bukan lagi menjadi masalah besar ketika teknologi digital berbasis internet mulai banyak digunakan dan berfungsi untuk berbagai kemudahan. Dalam hal ini komunitas yang terbentuk dalam ruang *cyber* seolah memiliki keleluasaan dan jangkauan lebih dalam menunjukkan eksistensi ideologis dan identitas kelompoknya dalam *cyber society* tanpa mempedulikan lagi batasan kewilayahan.

Seperti halnya dengan kelompok keagamaan “Muslimah Berhijrah”. Pada awalnya kelompok ini hanya sebuah akun Facebook dengan followers yang cukup banyak. Namun lambat laun akun ini mulai merambah ke jejaring perpesanan instan, yaitu *Whatsapp Group* untuk memfasilitasi *followers*-nya dalam mendapatkan ilmu keagamaan secara lebih intens. Siapapun dapat tergabung dalam kelompok ini, tanpa ada batasan umur maupun kewilayahan. Artinya, setiap orang dalam grup memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan tidak saling mengenal satu sama lain. Bahkan member grup juga tidak mengetahui latar belakang pendidikan admin grup yang notabene memiliki kuasa yang besar dalam penyampaian akidah dan ilmu keagamaan. Yang menarik adalah bagaimana setiap individu yang berbeda ini (berbeda dalam hal latar belakang dan pengetahuan) dapat saling percaya dengan admin grup dan sesama anggota lainnya, dan bagaimana mereka seolah memiliki pandangan yang sama dalam tuntunan islam sehingga membentuk sebuah solidaritas dalam ruang maya. Dari sini kita dapat melihat bahwa ketakwaan beragama dengan modernitas tidak selalu bertentangan (Heryanto 2015). Bagi mereka, ketaatan beragama dan konsumsi budaya *cyber* seolah tersedia sebagai pilihan ketimbang hal yang bisa dipilih salah satu saja. Umat muslim seakan tidak mau ketinggalan jaman dalam mengosumsi budaya *cyber* dan berusaha untuk berpartisipasi secara penuh di dunia modern (digital) tanpa melepaskan keimanan mereka (Heryanto 2015). Hal ini menjadi menarik untuk dikaji bahwa persoalan terkait dunia digital dan kebutuhan atas informasi keagamaan memunculkan budaya baru dalam ruang *cyber*. Terbentuknya identitas, solidaritas dan pola interaksi dalam dunia nyata akan

berbeda dengan pola interaksi, solidaritas, dan identitas yang terbangun dalam dunia maya. Dan persoalan terkait teritorial tidak lagi menjadi unsur utama dalam pembentukan komunitas, melainkan justru mengacu pada adanya kesamaan ideologi dan eksistensi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kelompok-kelompok kajian keagamaan ini membentuk 'dunia baru' dalam ruang *cyber*. Peneliti berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana terbentuknya identitas dan solidaritas sosial dalam ruang maya, dan mengapa seolah ruang maya menjadi penting dalam syiar ideologisnya.

Kajian Pustaka

"Manipulasi tanda mengarahkan konsumsi akan gambar, fakta, dan informasi. Konsumsi menyamakan yang riil dalam tanda-tanda riil, menyamakan sejarah dalam tanda-tanda perubahan" (Baudrillard 1970)

Merujuk pada pernyataan Baudrillard, di era posmodern ini konsumsi tidak hanya dimaknai sebagai tindakan transaksional ekonomi untuk menghabiskan daya guna kebendaan saja. Justru hal tersebut lebih mengarah pada konsumsi atas sebuah obyek yang dapat dikomodifikasi. Baudrillard menggarisbawahi gambaran tersebut dengan istilah konsumsi akan gambar, fakta, dan informasi. Menurutnya kemunculan kebutuhan atas informasi dan fakta bukan lagi didorong oleh sesuatu yang kurang, melainkan hasrat untuk mengonsumsi. Berdasar atas hasrat tersebut seolah setiap individu diajak untuk terus mengikuti ritme keragaman kebutuhan-kebutuhan melalui sistem yang dinamakan manipulasi tanda. Tanda-tanda ini diciptakan bukan untuk dimaknai oleh penggunanya, melainkan diciptakan untuk mendorong hasrat keingintahuan individu. Ketika rasa keingintahuan tersebut muncul dan terus terakomodir, hal ini akan berubah menjadi kebutuhan akan pencarian pengakuan sosial karena di balik tanda terdapat hasrat untuk integrasi sosial atau pembedaan (*distinction*) (Haryatmoko 2016). Individu yang termanipulasi tanda, secara sukarela akan mengafirmasi dirinya bahwa ia memiliki kelas yang berbeda dengan yang lain (*distinction*). Sehingga ketika individu tidak menjadi bagian dari kelasnya, maka hal ini akan menumbuhkan perasaan tidak aman (Haryatmoko 2016). Disini menjadi sangat jelas bahwa masyarakat konsumeris membutuhkan obyek untuk tetap ada dan untuk mengafirmasi kelas sosialnya dengan menciptakan pembeda. Seolah tujuannya tercapai ketika dapat memenuhi tuntutan kesamaan atas bagian dari kelasnya atau menciptakan strategi untuk membedakan dirinya dari kelas lain. Inilah yang dimaksud oleh Baudrillard (1999) bahwa tanda dianggap sebagai realitas itu sendiri; tanda riil dianggap sebagai yang riil itu sendiri.

Baudrillard selanjutnya memiliki sebuah konsep dalam keterkaitan antara masyarakat konsumtif, simulasi, dan hiperrealitas. Ia menyebutnya dengan simulakra. Bagi Baudrillard simulakra merupakan proses representasi atas suatu objek yang justru kemudian berubah menggantikan objek itu sendiri (Haryatmoko 2016). Dan selanjutnya representasi/proyeksi tersebut justru menjadi lebih penting daripada objek itu sendiri. Realitas yang riil dibunuh oleh proyeksi realitas itu sendiri. Dalam bukunya *The Procession of Simulacra* (1981) Baudrillard menyatakan ciri-ciri simulakra, yaitu simulakra merupakan refleksi dari realitas sejati, simulakra menyelubungi dan mengubah realitas sejati, simulakra menyembunyikan keberadaan realitas sejati, simulakra tidak memiliki kaitan pada realitas manapun: simulakra adalah murni dari simulakranya sendiri. Baudrillard melihat bahwa tidak ada realitas yang benar-benar riil, realitas saling tumpang tindih dan itulah yang disebutnya dengan simulakra.

Pembahasan simulakra yang digagas oleh Baudrillard sebenarnya mengacu pada beberapa kata kunci, yaitu keterhubungan antara teknologi, masyarakat digital (*cyber society*) dan ekonomi (Azwar, 2014). Maka kita bisa mengerucutkan konsep tersebut dengan melihat fenomena saat ini yang

memiliki hubungan langsung dengan *cyber culture*. Pada dasarnya *cyber culture* mengacu pada individu atau masyarakat yang hidup dalam ruang maya (*cyber space*), sehingga hal ini memunculkan sebuah istilah *cyber society*. Jones (1995) mengklaim bahwa *cyber society* merupakan sebuah bentuk konstruksi masyarakat dalam memelihara solidaritas dalam ruang maya.

Apabila dikontekstualisasikan dengan subjek penelitian, seolah kelompok kajian Muslimah Berhijrah memproyeksikan ruang pengajian dalam dunia virtual (WAG). Perilaku konsumtif tiap anggota grup terhadap ruang pengajian dalam dunia virtual berdampak pada praktik kesehariannya (*hyperreality*), sehingga secara tidak langsung terbentuk pula identitas kolektif tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif (*qualitative research*). Strauss & Corbin (dalam Creswell 1998) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati secara objektif dari suatu individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan konteks bahasan tertentu dengan dikaji dari sudut pandang yang utuh, holistik, dan komprehensif. Metode pengambilan data bersumber pada observasi partisipan dalam sebuah grup pesan instan (*Whatsapp Grup*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi dengan teknik *purposive sampling*. Melalui prosedur ini peneliti dapat mengetahui terbentuknya identitas dan solidaritas oleh kelompok “Muslimah Berhijrah” dalam ruang cyber berupa situs perpesan online (*Whatsapp Group*) sehingga grup tersebut seolah menjadi tuntunan dalam berperilaku bagi setiap individu di kehidupan kesehariannya.

Hasil dan Pembahasan

Untuk memudahkan penjelasan hasil dan pembahasan penelitian maka peneliti terlebih dahulu akan mendeskripsikan gambaran umum Kelompok Kajian “Muslimah Berhijrah”. Peneliti akan menyajikan data, seperti bagaimana terbentuknya kelompok kajian, berapa jumlah anggotanya, bagaimana pola interaksi dan kesepakatan yang terbentuk dalam grup hingga bentuk-bentuk aturan yang dibentuk oleh admin grup. Selanjutnya, peneliti mulai memasuki tahap analisis penelitian. Dalam analisis penelitian, peneliti diharuskan untuk mendialogkan penyajian data dengan kerangka konseptual/teori yang telah dijelaskan di Kajian Pustaka.

Gambaran Kelompok Kajian “Muslimah Berhijrah”

Dalam perjalanannya, kelompok Muslimah Berhijrah merupakan salah satu akun *fan page* dalam media sosial *Facebook*. *Fan Page* Muslimah Berhijrah digunakan untuk melakukan dakwah dan penyampaian informasi terkait ilmu-ilmu keagamaan, seperti akidah, tauhid, dan fiqih. Seiring dengan perkembangannya, kelompok ini mulai membentuk kajian dalam grup perpesanan instan, yaitu *Whatsapp Group* (WAG). Tujuannya adalah sebagai sarana untuk sharing ilmu keislaman secara lebih intens. Dengan begitu grup ini dapat membentuk pribadi muslimah yang berakhlak mulia dengan pemahaman sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan admin yang sama, kelompok ini beranggotakan 226 peserta. Dalam forum ini, admin grup seolah memiliki modal yang lebih besar ketimbang individu lainnya. Modal ini seperti, pengetahuan keagamaan yang dianggap lebih paham dan mengerti, akses lebih untuk menambahkan anggota atau mengeluarkan anggota, dan kemampuan untuk mengorganisir jalannya dakwah/kajian dalam grup misalnya membuat aturan, jadwal, dan sebagainya.

Dalam forum ini, admin grup memberlakukan beberapa jadwal terkait kajian apa saja yang akan dilayangkan ke member grup. Seperti, pada hari Minggu, admin akan melayangkan informasi terkait

Adab dan Akhlak; hari Senin terkait dengan Aqidah, Tauhid, dan Manhaj; hari Selasa terkait dengan Sirah Nabawiyah, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, admin grup juga memberlakukan peraturan agar suasana dalam grup tetap kondusif, seperti anggota grup hanya diperbolehkan untuk memposting kajian atau artikel keagamaan yang sesuai dengan manhaj yang dianut, yaitu salaf; anggota tidak diperbolehkan untuk berjualan dalam grup; dan jika anggota grup tidak menaati beberapa peraturan maka admin berhak untuk mengeluarkannya dari grup.

Terkait dengan pola interaksi, pada awalnya grup ini memberlakukan pola interaksi yang terbuka (dua arah) antara admin dengan anggota grup. Artinya, diskusi ini hanya berlaku antara admin dengan anggota, bukan antar anggota grup. Namun lambat laun, admin mengubah peraturan terkait komunikasi dengan cara memberlakukan komunikasi satu arah (hanya admin yang dapat memposting pesan). Hal ini diberlakukan sejak adanya situasi yang kurang kondusif dalam forum ini. Yang menjadi menarik dalam pembahasan ini, bahwa setiap anggota dalam grup benar-benar meyakini informasi yang disampaikan oleh admin walaupun mereka tidak kenal dan tidak mengetahui latar belakang admin dalam hal pendidikan keagamaan. Setiap individu bahkan mempraktikkan apa yang dikatakan oleh admin dalam kehidupan kesehariannya. Selain itu, berdasar hasil wawancara dengan HM, FF, dan LL (nama samaran) pada tanggal 2 November 2018, mengatakan bahwa dia tidak memaknai dan mengimplementasikan ideologi salaf dalam kehidupan kesehariannya. Namun beberapa anggota lainnya justru benar-benar memaknai ideologi tersebut.

Identitas dan Solidaritas dalam Realitas Kedua: Gagasan *Simulacra* Jean Baudrillard

Kemunculan kelompok-kelompok kajian keagamaan dalam dunia perpesanan virtual bukan lagi fenomena baru. Banyaknya kelompok-kelompok kajian dakwah digital sebenarnya bukan didasari oleh sesuatu yang timpang, misal kurangnya momentum pengajian atau dakwah di surau-surau, masjid, atau bahkan produksi konten dalam media. Munculnya kelompok-kelompok ini justru diakomodir oleh dorongan kebutuhan akan informasi keagamaan. Perilaku konsumtif seperti ini juga terjadi dalam kelompok kajian keagamaan Muslimah Berhijrah dengan basis *WhatsApp Group* (WAG). Pada awalnya forum ini dibentuk dalam akun Facebook Page yang dibuat oleh admin grup dan tentunya bisa diakses oleh siapapun. Namun lambat laun dibuatlah jaringan komunikasi baru berupa WhatsApp Grup. Ada bentuk dan pola interaksi yang berbeda dalam konteks penggunaan platform antara *Whatsapp* dengan *Facebook* terutama dalam membangun keterlekatan subjektif di masing-masing individu yang tergabung. Jika di *Facebook* setiap member yang tergabung tidak selalu rutin untuk ikut berinteraksi atau setidaknya melihat notifikasi-notifikasi yang masuk ketika ada pembahasan, WAG justru lebih intens dalam memberikan notifikasi-notifikasi ketika ada pembahasan terkait kajian islam yang cenderung ber*manhaj* salaf. Admin pun secara rutin memposting materi kajian terkait *fiqih, aqidah atau kajian ketauhidan*. Meskipun secara umum hal tersebut hampir tidak ada bedanya dengan platform *Facebook* dimana setiap postingan yang diunggah belum tentu langsung memicu interaksi aktif, namun perbedaan mendasar adalah bagaimana setiap member di dalam WAG itu selalu mendapat notifikasi tanpa harus membuka platform tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, kita bisa melihat bahwa seolah pola konsumtif secara sengaja diciptakan oleh sebuah kepentingan yang lebih besar, melalui kebutuhan akan informasi keagamaan. Dorongan kebutuhan akan ilmu keagamaan ini seolah terus direpetisi melalui tayangan media dan media sosial lainnya (seperti WAG) sehingga memunculkan sebuah opini bahwa muslim yang ideal adalah muslim yang aktif mengkonsumsi informasi keagamaan. Apabila dikaitkan dengan Muslimah Berhijrah, pola konsumsi yang terus direpetisi melalui penggunaan perpesanan virtual WAG adalah kebutuhan informasi mengenai *manhaj* Salaf sebagai metode syiar ideologis yang diusung oleh admin grup. Sehingga ketika member grup tidak mengonsumsi pemahaman tentang salaf, seolah mereka bukanlah seorang muslim yang ideal. Misalnya ketika ada member yang memposting sesuatu yang berbeda dengan *manhaj salaf*, admin dengan sesegera mungkin mengingatkan agar setiap member

sebaiknya hanya memposting sesuatu yang merujuk pada *manhaj salaf*. Hal itu juga diikuti oleh postingan admin yang isinya merujuk pada kajian-kajian *manhaj salaf*. Berdasarkan fakta sosial tersebut, Baudrillard (1981) mengatakan bahwa dorongan kebutuhan akan suatu produk sebenarnya didasari oleh hasrat untuk mengonsumsi, dan ketika individu tidak dapat mengikuti ritme kebutuhan tersebut maka individu seolah merasa tidak aman.

Dari penjelasan ini, kita dapat mengetahui bahwa informasi tentang ilmu keagamaan bermanhaj salaf seakan menjadi sebuah produk yang diiklankan melalui dunia virtual WAG dan dikonsumsi oleh kelompok kajian Muslimah Berhijrah. Seakan dunia virtual yang menyediakan berbagai informasi terkait ilmu keagamaan adalah sebuah tatanan manipulasi tanda sehingga setiap individu dalam grup mempraktikkan dan mengaplikasikan informasi tersebut dalam kehidupan kesehariannya. Dengan begitu mereka akan terus diajak untuk mengikuti ritme kebutuhan-kebutuhan akan informasi manhaj salaf dan ketika salah seorang anggota tidak bisa mengimbanginya, maka mereka bukan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika admin grup memberlakukan sebuah aturan yaitu larangan dalam memposting artikel yang bukan seideologis, bahkan admin grup tidak segan-segan untuk mengeluarkan anggota tersebut ketika mereka tidak menaati aturan dalam grup. Dari sini terlihat bahwa seakan grup Muslimah Berhijrah adalah grup yang eksklusif dalam mengonsumsi kebutuhan informasi salaf. Seolah hal ini justru menjadi pembeda dari kelompok atau bahkan antar anggota lainnya, mengingat tidak semua anggota Muslimah Berhijrah bermanhaj salaf. Secara tidak langsung mereka menunjukkan identitas dan status sosialnya bahwa mereka adalah kelompok yang berbeda, kelompok yang “terpilih” sebagai muslim yang ideal dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunan utama selayaknya yang dilakukan Nabi Muhammad. Hal ini kemudian yang disebut oleh Baudrillard (1981) sebagai *distinction*. Ia beranggapan bahwa *distinction* muncul atas respon individu dalam memenuhi kebutuhan akan objek dan seolah menjadi pengakuan sosial bagi dirinya.

Pengakuan sosial yang akhirnya menciptakan *distinction* ini memunculkan kebutuhan-kebutuhan semu atas realitas yang sebenarnya bukan merupakan realitas yang riil. Artinya, dalam pembahasan ini, ruang dakwah virtual (Muslimah Berhijrah) hanyalah sebuah proyeksi atas kenyataan yang riil dimana kenyataan riil ini adalah ruang dakwah dalam dunia *offline*. Namun seakan member grup menganggap bahwa ruang dakwah online adalah sebuah kenyataan hingga ia benar-benar memaknai informasi salaf dan mempraktikkannya dalam dunia nyata. Mereka terjebak dan tidak mampu membedakan mana yang benar-benar riil dan imajiner. Kita dapat melihat dari bagaimana member grup merespon informasi yang disampaikan oleh admin grup. Berdasar hasil wawancara dengan salah satu informan, ia mengatakan bahwa informan tidak langsung menerima mentah-mentah informasi dari admin, melainkan ia mencoba mencari dari sumber-sumber lain berupa laman internet untuk memvalidasi kebenaran informasi. Ada yang menarik ketika member grup dalam usaha pencariannya justru kembali lagi ke perputaran ruang virtual yang merupakan proyeksi dari kenyataan yang riil. Berdasar hal tersebut kita dapat melihat bahwa kebutuhan semu atas informasi kajian keagamaan berjalan dan mengaburkan batasan riil dan imajiner.

Aktivitas ruang maya yang terjadi dalam WAG Muslimah Berhijrah ini tentunya membentuk fenomena-fenomena sosial yang pada akhirnya membentuk sebuah identitas kolektif serta solidaritas kelompok itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana sebuah identitas yang terbentuk dalam sebuah simulakra dari aktifitas sosial yang terjadi di dalamnya baik dari pola interaksi, pembahasan yang selalu dibicarakan, bahkan tingkat keaktifan WAG itu sendiri. Berdasarkan hal itu pula kita juga bisa melihat bagaimana pola-pola interaksi dan tingkat keaktifan WAG tersebut secara tidak langsung menandakan bentuk-bentuk solidaritas. Bisa disimpulkan, aktivitas sosial dalam WAG Muslimah berhijrah sebagai sebuah simulakra ini memunculkan sebuah identitas dimana dalam ruang *cyber* ini penuh dengan sebaran informasi kajian islam dan membuat mereka seakan kecanduan akan sebuah informasi kajian islam. Selain itu, pola interaksi yang searah dari admin dan beberapa aturan admin

yang tidak memperbolehkan postingan kajian selain *manhaj* salaf ini semakin menguatkan *distinction* sehingga setiap member akan memaknai itu sebagai bentuk status sosial mereka. *Distinction* yang ada dalam WAG Muslimah Berhijrah ini pada akhirnya juga bisa dikatakan sebagai bentuk kontrol atas semua aktivitas ruang maya yang mempengaruhi bagaimana solidaritas mereka terbentuk.

Kesimpulan

Fenomena kemunculan kelompok kajian berbasis keagamaan dalam jaringan digital seperti Muslimah Berhijrah seakan menjadi kenyataan yang riil dan menjadi proyeksi atas ruang sosial yang sebenarnya. Hal ini juga membentuk sebuah identitas dan karakter komunal yang tentunya tidak sama dengan ruang sosial yang sebenarnya. Identitas komunal yang terbentuk dipicu atas dorongan hasrat untuk mengonsumsi informasi keagamaan yang seakan menjadi komoditas. Komoditas yang terbungkus dalam informasi keagamaan merupakan sebuah produk yang terus direpetisi sehingga memunculkan pola-pola konsumtif dalam setiap anggota grup. Komoditas informasi keagamaan seakan menjadi kebutuhan semu yang juga memunculkan sebuah *distinction* (pembeda). Bisa disimpulkan, aktivitas sosial dalam WAG Muslimah berhijrah sebagai sebuah simulakra dan memunculkan identitas komunal yaitu perilaku konsumsi yang adiktif terhadap informasi keagamaan dengan basis *manhaj* salaf. Perilaku adiktif terhadap informasi salaf ini kemudian memunculkan *distinction* dalam anggota grup itu sendiri dan kelompok lainnya. Seolah *distinction* ini menjadi bentuk lain dari kontrol yang diakomodir dan terus direpetisi oleh admin grup sehingga mereka terbiasa serta tidak menyadari jika setiap member terjerat pada kebiasaan mengonsumsi informasi *manhaj* salaf. Pada akhirnya terbentuk eksklusifitas bahwa islam yang murni adalah islam dengan *manhaj* salaf. Budaya konsumsi terhadap informasi salaf juga pada akhirnya memunculkan keterlekatan antara setiap member yang tergabung dengan informasi yang tersebar di dalam grup tersebut. Berdasarkan hal itulah sebuah solidaritas komunal itu terbentuk.

Pemilihan ruang maya untuk mengakomodir kebutuhan atas informasi kajian islam sebenarnya tidak bersumber pada asal usul yang jelas, karena bagi kelompok ini tidak ada lagi ruang imajiner dan ruang nyata, bagi mereka kedua ruang tersebut adalah sebuah kenyataan yang riil. Mereka tetap menganggap bahwa segala informasi yang tersebar dalam ruang maya tersebut juga merupakan sebuah kajian.

Referensi

- Azwar, Muhammad. *Teori Simulakrum Jean Baudrillard dan Upaya Pustakawan Mengidentifikasi Informasi Realitas*, Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Volume 2, Nomor 1 (Mei - Agustus 2014), 39-40.
- Baudrillard, J. 1970. *La société de Consommation*. Paris: Denöel.
- Baudrillard, J. 1981. *Simulacres et Simulation*. Paris: Galilée.
- Baudrillard, J. 1999. *Simulacra and simulation* (Translated by Sheila Faria Glaser). Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Bell, D. 2007. *Cyberculture Theories: Manuerl Castells and Donna Haraway*. Routledge: London – New York.
- Cresswell, J. 1998. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian, Pemikiran Kritis Post- Strukturalis*. Kanisius. Yogyakarta.
- Heryanto, A. 2015. *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Jones, S.G. 1995. *CyberSociety: Computer-Mediated Communication and Community*. Sage Publications
- Singhal, A., Rogers, E. M., & Brown, W. J. 1993. *Harnessing the potential of entertainment-education telenovelas*. *International Communication Gazette*, 51(1), 1-18.
<http://doi.org/10.1177/001654929305100101>

Internet

- Nielson Indonesia. Pengguna smartphone meningkat belanja iklan produk selular meroket. Diakses pada tanggal 9 November 2018 (<https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2018/pengguna-smartphone-meningkat-belanjaiklan-produk-selular-meroket.print.html>)

Disruptif Inovasi dalam Akun Instagram

Khairul Syafuddin, Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. E-Mail: kayrul.syaf@gmail.com

Maysali Sudarwati, Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. E-Mail: maysalisudarwati@gmail.com

Yudha Wirawanda, MA, Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. E-Mail: yw310@ums.ac.id

Abstrak

Ics_infocegatansolo merupakan salah satu akun Instagram yang menjadi rujukan warga Solo dalam mencari informasi. Akun tersebut membagi informasi seputar kejadian lokal yang ada di Solo. Adanya akun tersebut mengubah cara masyarakat dalam mencari informasi terkait kejadian yang ada di wilayah Solo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pengguna Instagram yang menjadi *follower* dari ics_infocegatansolo dalam mendisruptif informasi yang disuguhkan terkait informasi lokal di Solo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam melihat fenomena ini yaitu disruptif inovasi dan *publicsphere*. Peneliti melihat bahwa *follower* dari akun ics_infocegatansolo lebih banyak dan cepat dalam memperoleh informasi lokal melalui Instagram. Selain itu, dengan adanya ruang komentar yang disediakan oleh Instagram, mereka juga dapat melakukan diskusi secara langsung terkait informasi yang diberikan. Peneliti kemudian melihat bahwa akun ics_infocegatansolo tidak hanya membuat para *follower* mendisruptif cara mereka dalam mencari informasi lokal, namun juga membangun sebuah ruang publik bagi masyarakat dalam menanggapi suatu informasi.

Kata Kunci: disruptif inovasi, ics_infocegatansolo, instagram, *publicsphere*, Solo

Pendahuluan

Instagram merupakan salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk berbagi foto dengan menerapkan filter digital, hingga membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri (Mahendra 2017). Dalam perkembangannya tersebut, Instagram tidak hanya digunakan berbagi foto saja, melainkan dapat berbagi video melalui halaman pengguna, *insta story*, bahkan dapat melakukan siaran langsung. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki Instagram, pengguna cenderung menggunakan kemampuan tersebut untuk mempublikasikan hobi, kegiatan, tempat, barang, hingga dirinya sendiri dalam bentuk visual.

Salah satu akun Instagram yang followers cukup banyak adalah @ics_infocegatansolo. Akun tersebut memiliki *followers* dengan jumlah 273 ribu lebih. Mengutip dari profilics_infocegatansolo (2018), akun tersebut berfokus pada penyampaian informasi tentang info Solo Raya dan sekitarnya seperti event dan razia baik dalam bentuk foto maupun video. Selain itu, mereka juga menyediakan jasa *paid promote* bagi *followers* yang ingin melakukan promosi apapun melalui akun Instagram tersebut.

Kebiasaan mereka dalam menggunakan media sosial merupakan bentuk dari *cyberculture*. Dalam hal ini, budaya yang muncul berupa interaksi antarpengguna ataupun pengguna dengan teknologi yang diperantarai oleh teknologi itu sendiri melalui jaringan internet yang telah terbentuk (Nasrullah 2016). *Cyberculture* kemudian mendorong *user* mengubah budayanya dalam mencari informasi, sehingga memunculkan sebuah inovasi baru dalam menyuplai dan menerima informasi.

Disruptif inovasi yang dilakukan oleh pengguna akun @ics_infocegatansolo juga berupa prosumsi melalui akun Instagram. Menurut Ritzer and Jurgenson (2010) prosumsi merupakan perubahan cara produksi dan konsumsi yang dilakukan secara bersamaan. Dalam konteks akun @ics_infocegatansolo ini, pengguna sudah tidak lagi mencari dan mengambil informasi untuk mereka nikmati. Akan tetapi, mereka juga dapat melakukan produksi terkait penyebaran informasi yang ingin mereka sebarkan, seperti informasi cegatan yang mereka temui di Solo, informasi mengenai *event* yang ada di Solo, dan lain sebagainya.

Konsumsi mengenai informasi lokal di Solo sebelumnya dapat mereka dapatkan melalui media lokal yang tersedia. Terdapat beberapa media lokal yang ada di Solo, di antaranya Solopos, Radar Solo, Suara Merdeka, dan lain sebagainya. Akan tetapi media sosial dapat mendisruptif perilaku *offline* masyarakat dalam mencari informasi lokal. Kini mereka lebih memilih menggunakan media sosial dalam mencari informasi tersebut karena dinilai cukup praktis dan cepat.

Cyberculture yang terbentuk dengan adanya media sosial juga mengarah ke prosumsi. Proomsi merupakan kegiatan yang melibatkan antara produksi dan konsumsi yang dilakukan secara bersamaan dengan berfokus ke dua kegiatan itu (Ritzer and Jurgenson 2010). Proomsi yang terbentuk dalam akun @ics_infocegatansolo berupa cara *followers* yang disana tidak hanya mengkonsumsi informasi saja. Namun mereka juga dapat melakukan produksi informasi dengan cara melakukan kerjasama dengan admin berupa *paid promote* dan media partner.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat and Wirawanda (2018) ditemukan bahwa adanya disruptif inovasi yang terjadi di grup facebook ICS membuat terjadi praktik baru dalam melakukan jurnalisme warga (*citizen journalism*). Praktik baru tersebut memungkinkan seluruh anggota grup dapat melakukan prosumsi dengan mensuplai informasi di grup tersebut sekaligus mengkonsumsinya. Sehingga disruptif yang terjadi berupa masyarakat yang ingin melakukan praktik jurnalisme warga tidak harus melalui media konvensional yang menyediakan program tersebut, namun mereka telah dapat melakukannya sendiri dengan berdasarkan kaidah jurnalistik yang dianut oleh setiap individu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengguna Instagram yang menjadi *followers* akun @ics_infocegatansolo dalam mendisruptif perilaku *offline* menjadi perilaku *online* terkait pencarian informasi lokal di Solo. Selain itu, peneliti juga akan melihat bagaimana *followers* dari akun @ics_infocegatansolo dalam melakukan interaksi sosial guna membangun sebuah *publicsphere* di kolom komentar yang disediakan.

Kajian Pustaka

Media Sosial dalam *Cyberculture*

Menurut Shirky (dalam Nasrullah 2016) media sosial merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk meningkatkan kemampuan *user* dalam berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*) antar pengguna, serta melakukan tindakan secara kolektif di luar kerangka institusional ataupun organisasi. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa media sosial memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai alat dalam menyalurkan informasi atau pesan dan sebagai media untuk melakukan kerjasama atau interaksi sosial antar pengguna. Sehingga dengan begitu media sosial dilihat memiliki kemampuan dalam membantu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan informasi dan juga berhubungan dengan manusia lain.

Salah satu medium dalam media sosial adalah *social networking*. *Social networking* merupakan kategori yang paling populer dalam media sosial, sebab medium ini memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan sosial secara *real time* (Nasrullah 2016). Sehingga segala konten yang

dipublikasikan melalui medium ini dapat ditanggapi secara langsung dan dapat menjadi bahan diskusi dalam satu waktu.

Instagram di era sekarang juga sangat diminati oleh banyak orang. Hal ini disebabkan Instagram merupakan jenis media sosial yang berfokus pada foto dan video yang memiliki durasi pendek dibandingkan media sosial lainnya (Manampiring 2015). Kelebihan dari Instagram tersebut menjadi nilai lebih yang membuat *platform* ini lebih banyak diminati dan dinikmati dalam mencari hiburan atau mencari informasi yang penting.

Penggunaan media sosial ini merupakan bentuk dari *cyberculture* yang tumbuh di masyarakat. Nasrullah (2016) menjelaskan bahwa kehadiran internet menjadi sebuah ruang di mana budaya diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Dalam hal ini, media sosial menjadi tempat dimana *cyberculture* dibentuk. Dalam penggunaan Instagram, budaya yang terbentuk adalah cara mereka dalam mengonsumsi dan memproduksi informasi. Instagram memiliki fasilitas untuk mengupload gambar dan tulisan sebagai *caption*. Dalam media sosial ini, pengguna tidak dapat mengupload informasi tanpa disertai dengan gambar. Sehingga gambar tersebut memunculkan budaya siber yang mencirikan informasi valid adalah informasi yang disertai dengan gambar. Apabila dalam sebuah informasi hanya berupa teks, maka informasi tersebut kurang bisa dipercaya.

Disruptif Inovasi Informasi Lokal

Disruptif inovasi dapat diartikan sebagai inovasi yang mengacau atau mengganggu. Edi Suandi Hamid menjelaskan bahwa konteks dari kata mengganggu ini memiliki makna bahwa kemunculan dari inovasi teknologi yang baru akan mengakibatkan gangguan terhadap teknologi yang lama (Azizah and Adawia 2018). Sehingga disruptif inovasi sendiri dapat dimaknai sebuah perkembangan teknologi yang mengorbankan teknologi lama untuk menciptakan sebuah inovasi yang baru. Kaitannya dengan akun Instagram @ics_infocegatansolo adalah membentuk budaya *followers* yang awalnya mencari informasi dengan cara tradisional kemudian beralih dengan cara modern dengan memanfaatkan *new media*.

Menurut Christensen dan Bower (Sariguna and Kennedy 2017) disruptif inovasi menjadi sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, memberikan kemudahan akses, kenyamanan, hingga biaya yang ekonomis. Sehingga disruptif inovasi dapat menjadikan sebuah teknologi yang baru memiliki manfaat yang lebih dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan akan informasi yang semakin mudah dan praktis untuk di akses.

Dalam konteks disruptif inovasi juga melihat bahwa kemunculan sebuah teknologi yang baru dapat menciptakan sebuah gangguan terhadap teknologi yang lama (Said and Adham 2016). Gangguan tersebut selanjutnya mengakibatkan kolapsnya teknologi yang sudah lama, sehingga teknologi yang baru ini dianggap lebih dapat diandalkan daripada teknologi yang lama. Dalam hal ini, keberadaan *social networking* mengganggu penyebaran informasi lokal yang disebarkan melalui media massa. Hal ini kemudian memunculkan inovasi baru tentang bagaimana cara masyarakat dalam mencari dan mengonsumsi informasi lokal tersebut. Awalnya sumber informasi berasal dari media massa, namun dengan adanya *social networking* mengubah cara masyarakat dalam mengonsumsi informasi lokal.

Prosumsi di Media Sosial

Prosumsi merupakan kegiatan yang melibatkan antara produksi dan konsumsi yang dilakukan secara bersamaan dengan berfokus ke dua kegiatan itu (Ritzer and Jurgenson 2010). Prosumsi tersebut muncul disebabkan adanya perubahan sosial, salah satunya dari aspek perkembangan media digital dan juga internet.

Ritzer and Jurgenson (2010) menjelaskan bahwa prosumsi digital mulai terjadi ketika memasuki era Web 2.0. Di era tersebutlah muncul berbagai media yang memungkinkan pengguna untuk

melakukan praktik prosumsi. Beberapa media yang muncul di era tersebut di antaranya Wikipedia, Facebook, Twitter, MySpace, Youtube, dan lain sebagainya. Semua aktifitas prosumsi yang dilakukan media tersebut didukung dengan adanya koneksi internet.

Bentuk prosumsi dari setiap media memiliki perbedaan. Misalnya saja Twitter yang disitu pengguna tidak hanya mengkonsumsi atau memproduksi teks semata, namun mereka juga dapat melakukan kedua hal tersebut secara bersamaan sehingga membentuk prosumsi (Wirawanda and Wibowo 2018). Berbeda dengan akun media sosial lainnya. Setiap media sosial memiliki karakter sendiri dalam membentuk perilaku prosumsi penggunanya, khususnya media sosial yang memiliki fasilitas *share* dalam bentuk audio visual. Hal tersebut tentu akan memunculkan bentuk prosumsi lain dari masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil penelitian secara deskriptif. Pemaparan yang dilakukan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan membuat sebuah narasi secara deskriptif dari hasil yang telah ditemukan oleh peneliti. Hasil tersebut kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dalam melakukan pembahasan. Objek dalam penelitian ini adalah akun Instagram @ics_infocegatansolo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling, dengan kriteria informan berupa rentan umur 17 hingga 25 tahun dan aktif mengikuti informasi di akun @ics_infocegatansolo. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan dua teori, yaitu teori disruptif inovasi dari Clayton M. Christensen dan Joseph Bower untuk melihat disruptif inovasi yang dilakukan oleh pengguna Instagram, serta teori *publicsphere* dari Jurgen Habermas untuk melihat terbentuknya ruang publik dalam kolom komentar di akun @ics_infocegatansolo. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing and verification*.

Hasil dan Pembahasan

Akun Instagram @ics_infocegatansolo telah menjadi salah satu sumber informasi lokal bagi masyarakat yang tinggal di Solo. Akun ini lebih banyak memberikan informasi terkait kondisi lalu lintas yang ada di Solo. Selain itu, terdapat pula informasi lain yang dikirimkan oleh para *followers* nya. Sampai saat ini, terhitung ada lebih dari 274 ribu *followers* serta 14.880 postingan yang telah disebar oleh @ics_infocegatansolo (berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 10 November 2018).

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pengguna Instagram melalui akun yang mereka miliki, di antaranya mencari informasi, mencari teman lama ataupun baru, *stalking* terhadap akun-akun tertentu, membentuk sebuah *public sphere* melalui kolom komentar, dan lain sebagainya. Bagi *followers* @ics_infocegatansolo, mereka disana dapat melakukan beragam aktifitas *online*, seperti mengkonsumsi informasi lokal yang diberikan oleh admin, memproduksi informasi, dan melakukan diskusi di kolom komentar.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti melihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat dalam mengkonsumsi media lokal. Selain itu, peneliti juga melihat adanya prosumsi para pengguna Instagram yang menjadi *followers* dari akun @ics_infocegatansolo.

Prosumsi Melalui Filterdi Instagram

Di era revolusi industri 4.0 masyarakat sudah tidak hanya mengkonsumsi informasi dari media saja. Akan tetapi mereka juga memiliki peluang untuk menjadi produsen. informasi tersebut. Hal ini didukung dengan kemudahan masyarakat dalam membuat konten untuk disebar di media sosial yang mereka miliki. Ritzer and Jurgenson (2010) menyebutkan bahwa produksi dan konsumsi telah dapat dilakukan masyarakat dalam satu waktu, khususnya dalam aspek penyebaran informasi.

Akun intstagram @ics_infocegatansolo juga menyediakan prosumsi yang dapat dilakukan *followers* nya, meski terdapat aturan agar produksi informasi dapat dilakukan. Hal ini membuat tidak semua informasi yang diberikan ke akun @ics_infocegatansolo dapat di posting semua. Akan tetapi terdapat penyaringan atau bentuk kerja sama sehingga admin dari akun tersebut bersedia melakukan produksi informasi dari kiriman *followers*.

“pernah mengirim informasi tentang acara pkm di kampus dan itu di post oleh ics. Sebagai feedback nya, kami mejadikan ics sebagai media partner. Proses yang kami lalui hingga itu bisa di post dengan cara, yang pertama yaitu meminta secara langsung melalui DM, kemudian admin menjelaskan apa saja yang perlu ada pada unggahan nanti. Akun ics meminta kerja sama untuk menambahkan logo ics pada gambar yang akan di unggah. Akun ics juga meminta untuk menyebutkan mereka telah menjadi media partner untuk acara tersebut”. (Dema, Informan 7)

“pernah ngirim berita tentang mobil pick up yang kelebihan muatan, tetapi tidak di post oleh admin”. (Maghfireza, Informan 2)

Peneliti melihat adanya prosumsi di akun @ics_infocegatansolo memberikan keuntungan dari kedua belah pihak. Dari sisi *followers* yang melakukan prosumsi ini mendapat keuntungan berupa kepuasan batin serta kecepatan dan kemudahan dalam penyebaran informasi yang mereka miliki. Hal ini menjadi keuntungan bagi pengirim informasi, karena dengan adanya keterkenalan dari akun @ics_infocegatansolo membuat informasi yang dikirim lebih cepat diketahui oleh khalayak. Kecepatan penyebaran dan keterkenalan ini juga mendorong khalayak untuk tertarik terhadap informasi yang diterima.

Sedangkan dari sisi akun @ics_infocegatansolo, mereka bisa mendapatkan keuntungan berupa finansial atau keterkenalan dari bentuk prosumsi yang dilakukan oleh *followers*. Hal ini diperlihatkan dalam profil akun @ics_infocegatansolo yang menjelaskan bahwa akun ini menerima kerjasama dalam bentuk *paid promote* dan media partner. *Paid promote* sendiri dapat memberikan *feedback* berupa financial yang diberikan kepada admin untuk memposting informasi yang dikirimkan oleh *followers*. Sedangkan bentuk media partner sendiri dapat digunakan oleh @ics_infocegatansolo dalam meningkatkan reputasi dan keterkenalannya sebagai sumber informasi lokal dalam akun Instagram, melihat sekarang telah banyak akun Instagram yang telah menyediakan informasi lokal yang serupa dengan ics.

Akun Instagram @ics_infocegatansolo menyediakan kolom komentar dari setiap infomasi yang di share. Kolom komentar tersebut menjadi bentuk dari ruang publik untuk saling berdiskusi terkait informasi yang telah di posting. Meski akun @ics_infocegatansolo telah membuka kolom komentar, akan tetapi tidak semua postingan terdapat komentar dari para *followers*. Hanya beberapa postingan yang terdapat komentar dari para *followers*, seperti informasi cegatan yang ada di Solo dan sekitarnya, informasi kecelakaan, informasi cuaca, dan lain sebagainya.



Gambar 1. Screenshot informasi razia akun @ics_infocegatansolo
(sumber: https://instagram.com/ics_infocegatansolo)

Meski ruang publik tersedia di kolom komentar, namun tidak semua komentar menjadi diskusi yang efektif. Habermas menjelaskan bahwa dalam konsep *publicsphere* mengutamakan konsepsi dialogis yang mengasumsikan bahwa setiap individu yang datang secara bersamaan ke lokasi yang sama dan terjadi dialog satu dengan yang lain (Pembayun 2017). Berdasarkan pengamatan peneliti dari komentar yang dilakukan di postingan @ics_infocegatansolo, syarat dari terbentuknya ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas telah tercapai. Namun peneliti melihat bahwa ruang publik yang terbentuk dalam kolom komentar di akun tersebut masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dalam kolom komentar yang disana masih sangat minim diskusi. Mereka masih cenderung mengungkapkan komentar pribadi terhadap *postingan* yang di *share*, namun tidak terjadi diskusi yang mendalam terhadap satu konten terkait.

Perubahan Cara Mengonsumsi Informasi Lokal

Di era revolusi industri 4.0 banyak sekali *platform* yang berlomba-lomba menyediakan informasi secara cepat. Salah satu *platform* yang mudah untuk diakses adalah media sosial. Instagram menjadi salah satu media sosial yang saat ini digemari oleh banyak pengguna, sebab memiliki kepraktisan dalam menyampaikan informasi. Sebagai contohnya dalam akun @ics_infocegatansolo, mereka menyuguhkan foto maupun video dengan durasi singkat dan dengan caption yang singkat. Hal ini memudahkan *viewers* dalam mencerna informasi. Selain itu, kecepatan dalam *update* informasi menjadi salah satu keunggulan dalam pemanfaatan Instagram.

“Akun @ics_infocegatansolo menjadi sumber utama mencari informasi lokal kejadian-kejadian di Solo, karena akun @ics_infocegatansolo paling up to date, lebih sering update juga”. (Maghfireza, Informan 2)

“menjadi sumber utana untuk mendapatkan informasi daripada media massa yang lain seperti koran, karena lebih sering membuka Instagram atau internet”. (Ferdiansyah, Informan 5)

Pernyataan yang diungkapkan oleh kedua informan di atas memberikan penjelasan bahwa salah satu kekuatan utama dari media sosial adalah dari aspek penyebaran (*share/sharing*). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Benkler dan Cross bahwa media tidak hanya berfokus dalam menghasilkan konten yang dapat dikonsumsi oleh pengguna saja, namun pendistribusian dari pengguna terhadap konten tersebut juga menjadi aspek penting yang dimiliki oleh media sosial (Nasrullah 2016). Akun @ics_infocegatansolo dari sisi konten, mereka cenderung berfokus dalam memproduksi konten berupa informasi lokal. Kemudian dari kekuatan penyebarannya sendiri diperlihatkan bahwa *update*-an dari @ics_infocegatansolo menarik minat masyarakat lokal untuk menjadi *followers* nya. Keinginan mereka itu didasarkan atas kecepatan penyebaran konten lokal yang dibutuhkan oleh

follower. Sehingga terjadilah perubahan cara konsumsi informasi masyarakat di era digital ini, yang awalnya dengan cara konvensional menjadi ke arah digital.

Keterbatasan media lokal dalam memproduksi berita menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi. Hal inilah yang kemudian memunculkan disruptif inovasi pengguna Instagram dalam memperoleh informasi. Mereka tidak lagi mencari informasi melalui media tradisional karena dianggap tidak memiliki kepraktisan dan kecepatan, namun mereka cenderung memilih media sosial yang memiliki kepraktisan dan kecepatan itu.

Peneliti melihat disruptif yang terjadi dengan adanya akun @ics_infocegatansolo berupa disruptif perilaku *offline* menjadi perilaku online. Perubahan perilaku tersebut terlihat dari cara pemanfaatan Instagram yang dilakukan oleh pengguna.

"Mencari informasi khususnya pada cegatan, kemacetan, kecelakaan, dan juga kejadian-kejadian di Solo". (Ferdiansyah, Informan 5)

"..., karena sebagai pengguna motor, untuk melihat situasi ada razia-razia motor atau cegatan. Kadang-kadang kalau mau pergi jauh buka akun @ics_infocegatansolo dulu, untuk jarak dekat kadang tidak. Dari rumah ke kos biasanya buka akun @ics_infocegatansolo dulu, karena sering melewati titik cegatan". (Genan, Informan 6)

Pernyataan yang diungkapkan oleh informan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku yang terjadi akibat kemunculan akun Instagram @ics_infocegatansolo. Seperti yang dijelaskan oleh Schmidt dan Druehl (2008) dalam *mapping type innovation* bahwa disruptif inovasi dapat memunculkan sebuah produk atau pasar baru dengan mengganggu pasar yang sudah ada. Dalam hal ini, pasar lama yang diganggu oleh kehadiran @ics_infocegatansolo berupa perilaku *offline* dari pengguna Instagram. Sebelum kemunculan akun ini, segala informasi lokal terkait kejadian yang diungkapkan oleh informan dapat diperoleh melalui berita lokal, seperti koran, siaran radio, atau siaran dari stasiun TV lokal. Sedangkan untuk memperoleh informasi cegatan (razia lalu lintas), masyarakat cenderung memperoleh informasi itu dari mulut ke mulut.

Namun dengan kemunculan @ics_infocegatansolo yang menawarkan konten berupa informasi cepat tentang keadaan lalu lintas yang ada di Solo membentuk sebuah pasar baru. Pasar baru ini merupakan sumber informasi *online* yang *up to date* mengenai keadaan yang ada di lalu lintas pada saat itu juga. Kecepatan *share* ini lah yang kemudian mendisruptif perilaku *offline* masyarakat menjadi perilaku *online* dalam mendapatkan informasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti melihat kehadiran dari akun Instagram @ics_infocegatansolo mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi lokal. Mereka tidak lagi mencari informasi lokal melalui media konvensional dan cara tradisional seperti dari koran, radio, televisi, pamflet, poster, atau bahkan informasi dari mulut ke mulut. Kemunculan akun tersebut telah mendisruptif perilaku *offline* masyarakat menjadi perilaku *online*. Kini mereka dalam mengkonsumsi informasi lokal di Solo lebih memilih untuk mencarinya di Instagram. Hal itu dinilai lebih praktis dan cepat, terutama bagi mereka yang memerlukan informasi seputar suasana lalu lintas yang ada di Solo.

Selain itu, Instagram juga menjadi praktik baru dalam perilaku konsumsi bagi setiap penggunanya. Praktik konsumsi ini juga ditawarkan oleh akun @ics_infocegatansolo dalam mendistribusikan informasi melalui akunnya. *Followers* dari akun tersebut dapat turut memposting

informasi yang dimilikinya, namun dengan izin dari admin, sesuai kesepakatan yang dibentuk oleh admin dan follower, seperti kerjasama *media partner* atau *paid promote*.

Dari sisi *publicsphere*, akun @ics_infocegatansolo melalui kolom komentar yang disediakan oleh Instagram juga dapat membentuk sebuah ruang publik bagi *followers* untuk melakukan diskusi. Meski diskusi dalam menanggapi konten yang telah di *share* terlihat kurang maksimal, akan tetapi *follower* diketahui telah memanfaatkan kolom komentar yang disediakan tersebut. Sehingga dari data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas *follower* dari akun Instagram @ics_infocegatansolo lebih cenderung melakukan konsumsi informasi lokal yang disediakan daripada melakukan diskusi terhadap konten tersebut.

Referensi

- Azizah, Ayu and Popon Rabia Adawia. 2018. "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online Di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)." *Seminar Nasional Inovasi Dan Tren (SNIT) B-9-B-14*.
- Hidayat, Rahmat Agus Nur and Yudha Wirawanda. 2018. "Disruptif Inovasi Terkait Citizen Journalism." *Jurnal J-IKA* 5(2).
- Ics_infocegatansolo. 2018. "Ics_infocegatansolo." Retrieved November 4, 2018 (https://instagram.com/ics_infocegatansolo).
- Mahendra, Bimo. 2017. "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)." *Jurnal Visi Komunikasi* 16(01):151-60.
- Manampiring, Randolph A. 2015. "Peranan Media Sosial Instagram Dalam Interaksi Sosial Antar Siswa SMA Negeri 1 Manado (Studi Pada Jurusan IPA Angkatan 2012)." *Acta Diurna* IV(4):1-8.
- Nasrullah, Rulli. 2016. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi*. 2nd ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pembayun, Jaduk Gilang. 2017. "Disruptif Inovasi Terkait Citizen Journalism." *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 1(1):1-14.
- Ritzer, George and Nathan Jurgenson. 2010. "Production, Consumption, Prosumption: The Nature of Capitalism in the Age of the Digital 'Prosumer.'" *Journal of Consumer Culture* 10(1):13-36.
- Said, Mohd Fuaad and Khairul Akmaliah Adham. 2016. "Is a Mobile Phone a Disruptive Innovation in the Workplace?" *Gadjah Mada International Journal of Business* 18(2):131-51.
- Sariguna, Posma and Johnson Kennedy. 2017. "Literature Review : Tantangan Terhadap Ancaman Disruptif Dari Financial Technology Dan Peran Pemerintah Dalam Menyikapinya." *FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI)* 6:171-82.
- Schmidt, Glen M. and Cheryl T. Druehl. 2008. "When Is Disruptive Innovation Disruptive?" *Journal of Product Innovation Management* 25(4):347-69.
- Wirawanda, Yudha and Tangguh Okta Wibowo. 2018. "TWITTER: Expressing Hate Speech Behind Tweeting." *Profetik Jurnal Komunikasi* 11(1):5-11.

Menakar Tren Komunikasi Politik di Instagram

Dwi Kristiawan, Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sebelas Maret. E-Mail:

dkristiawan1001@gmail.com

Galang Restu G. M., Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sebelas Maret. E-Mail:

galngrstu@gmail.com

Tiyas Nur Haryani, S.Sos M.Si, Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sebelas Maret. E-Mail:

tiyasnurharyani@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena politik yang muncul di media sosial di mana politik menjadi semakin kompleks serta merambah ke dunia maya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren yang timbul dari komunikasi politik dalam media sosial khususnya platform instagram. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana untuk menjalin hubungan pertemanan antar individu maupun kelompok kini mulai berkembang ke ranah politik yang berujung pada munculnya kelompok simpatisan dan kelompok oposisi. Masyarakat pun diresahkan dengan banyaknya informasi yang simpang siur di media sosial terutama masyarakat kota yang lebih sering menghabiskan waktunya di media sosial daripada di dunia nyata. Penelitian ini menggunakan mix metode kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan narasi. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuisioner yang menghasilkan data statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren komunikasi politik yang timbul di instagram cenderung banyak dinilai mengandung hate speech dan hoak dibandingkan pendidikan politiknya. Pengguna media sosial khususnya para generasi Z sebagai responden dalam penelitian ini belum banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai akses politiknya dan masih kurang mendapatkan manfaat pendidikan politik dari konten yang mengandung isu politik. Adapun saran untuk pengguna media sosial antara lain : (1) Meningkatkan literasi bermedia kalangan generasi muda (2) meningkatkan peran pendidikan politik dari para akun politik di instagram untuk pengguna media sosial.

Kata kunci : *generasi Z, komunikasi politik, media sosial*

Pendahuluan

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini begitu pesat terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan setiap manusia memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Salah satu wujud nyata dari hal tersebut adalah kemunculan berbagai *platform* media sosial. Media sosial dewasa ini semakin mendominasi cara bersosialisasi masyarakat. Orang-orang yang terpisah jarak ribuan kilometerpun dapat saling berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung. Hal ini membuat media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang diperlukan setiap manusia, namun di sisi lain media sosial juga menimbulkan dampak negatif apabila dalam penggunaannya tidak diikuti dengan sikap bijaksana. Pengguna media sosial dalam hal ini masyarakat seringkali mudah terpengaruh informasi-informasi yang beredar tanpa mengetahui apakah sumber informasi tersebut terpercaya atau tidak. Hal tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong guna kepentingan pribadi yang berdampak pada provokasi dan berpotensi memecah belah masyarakat.

Dalam perkembangannya, terdapat banyak platform media sosial yang mudah diterima masyarakat dalam bersosialisasi salah satunya adalah *Instagram*. *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan

filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Hal tersebut menjadikan Instagram lebih cepat dalam menyebarkan informasi daripada platform lainnya. Banyak informasi dari berbagai bidang yang cepat menyebar salah satunya adalah informasi politik. Masyarakat saat ini banyak yang penasaran dengan kinerja para pejabat politik dalam mengelola pemerintahan, di sisi lain para pejabat politik memiliki kesempatan untuk menunjukkan kinerja mereka untuk menarik perhatian masyarakat luas. Namun apabila para pejabat politik melakukan suatu kesalahan maka beritanya akan mudah menyebar di masyarakat. Di Instagram sendiri saat ini banyak akun yang cenderung menyediakan konten yang hanya mengekspos blunder para pejabat politik seperti yang sedang hangat muncul di masa Pemilihan Presiden Tahun 2019 yaitu ungkapan “politikus sontoloyo” dari bapak Jokowi dan ungkapan “tampang boyolali” dari bapak Prabowo. Hal ini menimbulkan pro kontra, dan beberapa dampak negatif dapat muncul di kalangan netizen seperti *hoax* dan *hate speech*. Seperti yang telah dijelaskan di awal, media sosial saat ini menjadi akses politik untuk mempengaruhi opini masyarakat, sehingga patut muncul pertanyaan bagaimana tren komunikasi politik yang muncul di Instagram oleh para generasi Z pada khususnya. Generasi Z merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era digital dan dirupsi. Patut menjadi perhatian masyarakat generasi Z di tengah hiruk pikuk perkotaan karena di masa yang akan datang generasi Z menjadi bagian dari pembangunan nasional dalam masa bonus demografi.

Kajian Pustaka

Politik merupakan aktivitas-aktivitas manusia dalam bermasyarakat, terutama tentang perjuangan mengangkat atau memilih penguasa yang berfungsi menetapkan kebijakan pemerintah (Arifin, 2013:10). Dengan demikian politik berkaitan dengan kerja sama yang berbentuk asosiasi. Politik pada dasarnya memiliki 4 fungsi pokok antara lain agregasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Prasetyo (2012) menjelaskan bahwa Agregasi kepentingan politik sesungguhnya berhubungan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi di depan umum yaitu penyampaian pendapat dan mempertimbangkannya secara seksama karena pada dasarnya agregasi kepentingan politik adalah penggabungan tuntutan dari kelompok yg berbeda untuk dijadikan suatu alternatif pembuatan kebijakan publik. Keseluruhan proses politik itu terjadi dalam kerangka konflik dan konsensus atau kompromi. Perselisihan dan terjadinya konsensus dalam politik merupakan aspek politik yang terjadi melalui komunikasi. Komunikasi juga meliputi dalam aktivitas politik karena hakikat aplikasi politik adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang. Arifin (2011:8) merumuskan bahwa komunikasi politik adalah "pembicaraan yang bertujuan memengaruhi dalam kehidupan bernegara". Secara konkretnya tujuan komunikasi politik yaitu untuk membentuk citra politik yang baik pada khalayak, membina opini publik agar berperan serta dalam kegiatan politik, serta memenangkan proses pemilihan umum.

Ardha (2014 :113) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kemajuan di era globalisasi akan membawa perubahan besar, terlebih munculnya jejaring sosial, seperti facebook, twitter, dan portal, sehingga masyarakat pun memanfaatkan kepentingannya, antara lain untuk strategi kampanye politik. Hal ini terjadi karena dengan menggunakan media sosial jarak, waktu, dan biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih efektif daripada menggunakan media konvensional. Menurut Lewis (2010) Media Sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan. Menurut Ardha (2014 : 108) indikator manfaat media sosial dalam aktivitas politik dapat digunakan sebagai media informasi, akses kekuatan politik dan layanan pendidikan politik. Dalam perkembangan dunia politik media sosial menjadi salah satu media komunikasi politik yang digunakan oleh para pejabat politik maupun komunitas masyarakat yang turut berpartisipasi memberikan dukungan politik. Fenomena komunikasi politik oleh para pengguna media sosial seringkali bertujuan untuk menjatuhkan citra orang lain, hal ini menunjukkan adanya pola

pemanfaatan yang dapat menimbulkan konflik (Budiyono, 2015). Munculnya komunikasi politik di media sosial saat ini menunjukkan beberapa dampak yang signifikan. Maka penelitian ini akan membahas tren komunikasi politik dalam platform Instagram. Novelty dari penelitian ini adalah kajian politik [ada platform isntagram yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya terkait politik dan media sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta, mengenai fenomena yang dikaji. Data pada penelitian ini disajikan dalam narasi dan statistik deskriptif. Data statistik deskriptif dihasilkan dari metode kuantitatif yang dikumpulkan dari kuisisioner tertutup yang didistribusikan melalui geogle form kepada 103 responden. Kuisisioner disebarakan secara purposif pada Whatsapp grup mahasiswa dan pelajar, serta Line grup mahasiswa dan pelajar. Data narasi dihasilkan dari metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara pada 2 informan yang dipilih secara purposive yakni mereka responden pada kuisisioner tertutup. dan observasi pada 2 akun instagram yakni “pinterpolitik” dan akun “politik”. Analisis dokumentasi dilakukan pada jurnal terdahulu terkait politik dan media sosial. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk membuat tren komunikasi politik yang terjadi di instragram menggunakan indikator yang sebelumnya digunakan dalam penelitian Ardha (2014).

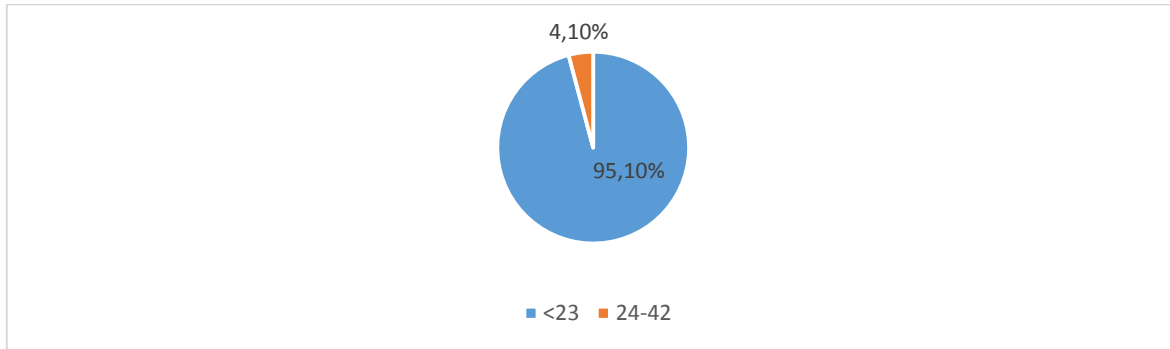
Hasil dan Pembahasan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini cukup signifikan dengan berbagai platform media sosial yang muncul dilengkapi beragam fitur yang bertujuan untuk kebermanfaatan. Seluruh bidang memanfaatkan media sosial untuk mencapai tujuan masing-masing, salah satunya adalah bidang politik. Saat ini politik adalah satu dari sekian banyak bidang di masyarakat yang paling sering muncul di media sosial. Kemunculan politik di media sosial membawa pengaruh terhadap para pengguna media sosial. Salah satu platform media sosial yang sering terintegrasi oleh keberadaan politik adalah platform media instagram. Dalam pemberitaan di media online instagram menjadi media yang paling mudah untuk melakukan sebuah tindakan provokatif (Jamaludin, 2018). Hal ini membuat kegiatan atau informasi yang berbau politik mudah untuk berkembang di masyarakat. Berbagai dampak pun muncul seiring merambahnya politik di media sosial baik positif maupun negatif, maka dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui dampak yang timbul sesuai tujuan penelitian. Berikut hasil penelitian kami:

Profil Responden

Penelitian ini mendapatkan responden sebanyak 103 responden. Profil responden pada penelitian ini diperoleh 62 orang (60,2%) responden adalah perempuan, sedangkan 41 orang (39,8%) adalah laki laki. Rentang usia para responden dapat dilihat pada diagram 1 berikut.

Diagram 1
Rentang Usia Responden



Sumber : Data diolah

Dari diagram 1 terlihat bahwa responden didominasi oleh usia <23 tahun, mereka yang berusia dibawah 23 tahun tergolong dalam generasi Z. Generasi Z memiliki karakteristik lahir saat komputer, internet, dan smartphome sedang marak, akrab dengan penggunaan teknologi, dan spontan dalam mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Sehingga generasi Z dianggap sebagai generasi yang paling terhubung, terdidik, dan termutakhir. Generasi Z dinilai sangat akrab dan aktif bermedia social dibandingkan generasi Y maupun generasi X. Pilihan platform media sosial yang mereka gunakan juga berbeda dari generasi sebelumnya.

Hasil pemetaan, responden pada penelitian ini sebagian besar masih berstatus pelajar dengan pendidikan terakhir adalah SMA. Hal tersebut dikarenakan para Generasi Z adalah mereka yang lahir mulai dari tahun 1995 sampai 2012 atau mereka pemilih pemula sampai dengan mereka yang berusia 23 tahun. Presentase responden dengan Pendidikan terakhir SMA sebesar 85,4%, berpendidikan terakhir S1 sebesar 9,7%, generasi Y yang sudah berpendidikan terakhir S2 sebanyak 3,9% dan ada yang pendidikan terakhir tercatat SMP sebanyak 1%. Para generasi Z ini terdapat 1 orang yang memilih blog sebagai media sosial utama, 4 orang memilih facebook, 10 orang memilih line, 15 orang memilih twitter, dan 73 orang memilih Instagram sebagai platform media sosial yang paling sering digunakan. Melihat tren tersebut Instagram merupakan media yang paling populer di generasi Z. Di antara mereka sebanyak 94,2% membuka media sosialnya setiap hari dari *handphone*-nya. Sebanyak 97,1% responden menggunakan *handphone*, sedangkan 2,9% responden sisanya memilih Personal Computer.

Tren Komunikasi Politik dalam Instagram

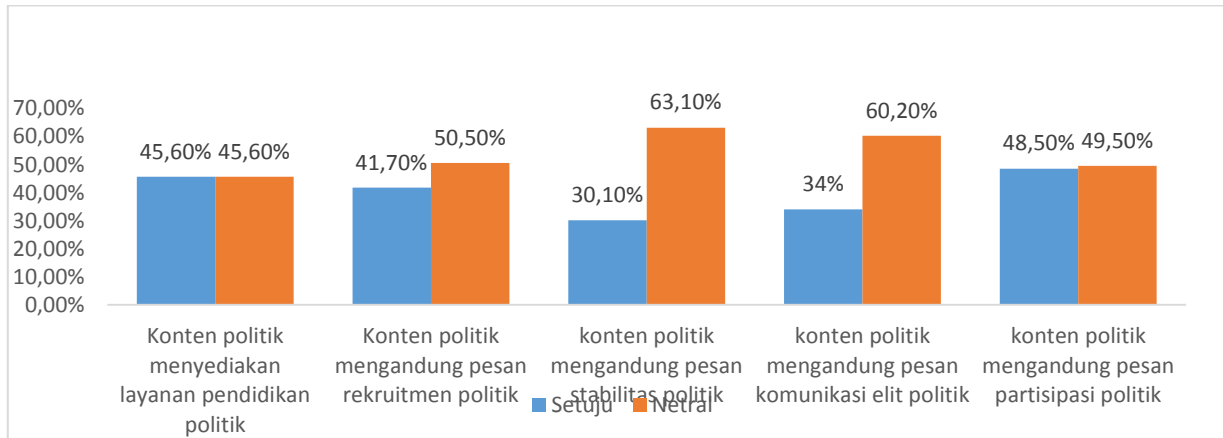
Hasil penelitian ini memotret mengenai komunikasi politik di media sosial, layanan pendidikan politik di media sosial, informasi dan akses kekuatan dan informasi di media sosial. Hasil yang didapatkan, tren komunikasi politik di Instagram dinilai responden masih cenderung memiliki dampak negatif antara lain menimbulkan perselisihan, hate speech, hoax, dan mengganggu stabilitas politik bangsa. Responden yang mengaku konten politik di Instagram memicu terjadinya perselisihan sebanyak 65%, berisi hate speech 62,1%, dan berisi hoax 45,6%. Sebanyak 65% responden setuju bahwa hate speech mengganggu stabilitas politik bangsa dan sebanyak 76,7% responden setuju bahwa hoax mengganggu stabilitas politik bangsa,

Data kuantitatif diperkuat dengan hasil observasi pada beberapa akun berbau politik menunjukkan bahwa tren komunikasi politik yang muncul di Instagram dapat menimbulkan berbagai opini publik, banyak pengguna media sosial Instagram yang menanggapi konten politik baik pro maupun kontra. Perbedaan pendapat muncul dalam komentar yang masuk dalam postingan yang berujung dengan adu argumen di kolom komentar bahkan tidak segan banyak yang menggunakan hate speech dikarenakan tidak mampu berargumen secara logis. Selain itu banyak juga pengguna media sosial Instagram yang berusaha untuk memprovokasi pihak lain agar sejalan dengan ideologi

mereka sendiri dengan menyebarkan berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini menimbulkan ketidaktahuan akan kebenaran informasi dari konten politik yang menyebar, sehingga banyak orang yang berargumen tanpa landasan yang logis.

Selain itu, banyak responden yang masih netral dalam melihat dampak positif integrasi politik di Instagram. Diagram 2 menyajikan data tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden terpilih menyatakan bahwa, “pilihan netral karena merasa tidak memiliki kepentingan di dalamnya dan tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut karena di media sosialnya terutama Instagram tidak pernah untuk mengikuti informasi dari konten yang berbau politik”.

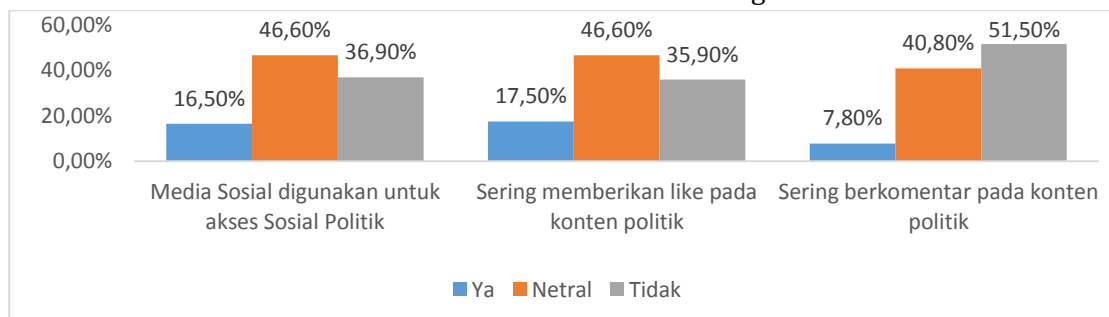
Diagram 2
Dampak Positif Integrasi Politik di Instagram



Sumber : Data diolah

Dari hasil pengumpulan data tersebut dapat dipahami bahwa rata-rata netizen atau pengguna media sosial masih belum terlalu memaksimalkan media sosial sebagai alat untuk mengakses konten politik sehingga banyak yang memilih bersikap netral. Diagram 3 menggambarkan keadaan tersebut. Hanya ada 16,5% responden yang merasa menggunakan instgram untuk akses sosial politik dan masih banyak yang memilih tidak menggunakannya untuk akses sosial politik sebanyak 46,6%. Selanjutnya hanya ada 17,5% yang berkenan ikut memberikan like pada postingan berisi isu politik dan hanya 7,8% yang berkenan ikut meramaikan kolom komentar konten berisi politik. Responden yang memilih tidak memberikan like dan komentar masih jauh lebih dominan dibandingkan yang memberikan like dan komentar maupun netral.

Diagram 3
Akses Konten Politik di Instagram



Sumber : Data diolah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saat ini politik telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari media social dan masyarakat digital. Konten yang berisi tentang politik di media sosial terutama Instagram sudah memiliki peran tersendiri di masyarakat khususnya kalangan pengguna media sosial. Respon atau tanggapan dari masyarakat pun berbeda-beda, para pengguna media sosial terutama generasi Z berdasarkan hasil penelitian masih cenderung menilai bahwa konten politik dalam instagram banyak mengandung tren negatif dibanding tren positif dalam komunikasi politik. Hasil observasi menunjukkan bahwa tren komunikasi politik di instagram masih banyak muncul hate speech dan hoax yang beredar, serta perselisihan antar netizen yang terjadi di kolom komentar. Fakta-fakta tersebut memiliki potensi berpotensi mengganggu stabilitas politik bangsa. Pada hakikatnya politik akan terus berintegrasi di kehidupan masyarakat dalam konteks ini yaitu dalam media sosial. Untuk itu seiring kemajuan teknologi, masyarakat dituntut untuk lebih pandai memilih dan memilah segala informasi yang beredar terutama informasi mengenai politik agar ketidaktahuan masyarakat tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehingga nantinya akan tercipta stabilitas politik yang sesungguhnya. Adapun saran untuk pengguna media sosial antara lain : (1) Meningkatkan literasi bermedia kalangan generasi muda (2) meningkatkan peran pendidikan politik dari para akun politik di instagram untuk pengguna media sosial.

Referensi

- Ardha, Berliani. 2014. Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi Volume 13 No 01, Mei 2014: 105-120.*
- Budiyono. 2015. Fenomena Komunikasi Politik dalam Media Sosial. *Jurnal IPTEK-KOM Vol 17 No 2, Desember 2015: 143-160.*
- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik. Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Sleman : Graha Ilmu
- _____ 2014. Politik Pencitraan-Pencitraan Politik. Sleman : Graha Ilmu
- Jamaludin, Fauzan. 2018. Mewaspada provokasi lewat medsos dan whatsapp saat Pilkada. <https://www.merdeka.com/teknologi/mewaspada-provokasi-lewat-medsos-dan-whatsapp-saat-pilkada.html> diakses pada 12-11-18
- Lewis,B.K. 2010. *Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students. Public Relations Journal,4 (3)*
- Prasetiyo, Agus. 2012. Artikulasi dan Agregasi Politik, <http://agus-prasetiyo.blogspot.com/2012/03/bab-i-pendahuluan.html?m=1> diakses pada 8-11-2018

Krisis Identitas Keagamaan Masyarakat Urban dalam Media **Sosial**

Dani Ramadhan, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Cindy Nadya Dewi Pertiwi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Syifa Ayyada Jannati, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Abstrak

Artikel ini mencoba menjelaskan mengenai krisis identitas keagamaan di era digital. Secara spesifik data ini didapatkan melalui akun @nuonline_id di media sosial Instagram. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pola relasi keagamaan yang semakin terdigitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang diperoleh dari situs akun Instagram. Penelitian ini menunjukkan relevansi antara perkembangan teknologi digital terhadap nilai-nilai keagamaan yang semakin terdigitalisasi. Sehingga unsur-unsur keagamaan semakin kehilangan kesakralannya dalam beribadah. Hal tersebut dapat terjadi karena berkembangnya teknologi digital yang semakin maju dan efektif. Nilai-nilai kesakralan yang dulu menjadi sebuah budaya fisik dalam keagamaan Islam kini mulai bergeser ke arah budaya digital. Bahkan dengan semakin canggihnya teknologi telah merubah aspek ibadah yang sifatnya sakral menjadi ibadah yang bersifat umum melalui aplikasi-aplikasi digital yang di buat oleh lembaga keagamaan tertentu. Dalam hal ini media @nuonline_id di Instagram telah memberikan gambaran dari ekspresi Islam yang telah terdigitalisasi dan dapat di telusuri melalui kolom komentar yang tersedia dalam media sosial Instagram.

Kata Kunci: Identitas, Keagamaan, Digital

Pendahuluan

Identitas sosial menurut Michael A Hogg dan Dominic Abrams (1998) adalah pengetahuan individu menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu bersama dengan beberapa makna emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok tersebut. Sedangkan menurut teori identitas sosial, identitas sosial merupakan atribut yang dimiliki oleh setiap individu dimana atribut yang dimiliki oleh setiap individu tersebut merupakan bagian dari suatu kelompok sosial dan yang menjadikan kelompok tersebut berbeda dengan kelompok yang lain. (Joevarian Hudijana, dkk 2017)

Namun, di era modern ini banyak terjadi krisis sosial hingga ke ranah identitas. Islam merupakan kata serapan berasal dari kata *salam* (Arab) yang berarti damai. Namun ironisnya kata tersebut telah salah diartikan. Islam dengan semangat kedamaian yang diajarkan di era sekarang malah saling menjatuhkan. Para pengikut agama Islam saling membenarkan ajaran kelompok masing-masing dalam hal terjadi krisis identitas Islam yang sesungguhnya. Krisis identitas dimaknai sebagai suatu ketidakjelasan yang menimbulkan sebuah permasalahan baru di masyarakat modern ini. Identitas merupakan alat pemaknaan diri yang berawal dari kesadaran akan dirinya dalam sebuah kelompok. Indonesia hari ini telah mengalami krisis identitas keagamaan Islam, identitas keagamaan Islam telah mengalami ambiguitas dalam ranah dunia virtual. Semangat keagamaan dalam kemasan modern semakin menampilkan kebebasan individu, sehingga kemurnian ajaran agama Islam kini mengalami amnesia dan menjadi sebuah logika kekinian. Fenomena tersebut juga dirasakan dalam golongan muslim Nahdatul Ulama, fenomena media sosial yang digunakan untuk menyebarkan gagasan dan nilai-nilai baru menyebabkan krisis identitas keagamaan yang terjadi dikalangan masyarakat Islam. (Taufiq 2016)

Kehidupan keagamaan masyarakat di era digital telah mengalami transisi, lembaga keagamaan Islam membuat media sosial menjadi sarana yang digunakan untuk berdakwah agar mudah di terima masyarakat secara luas. (Kellner 2010, 315) Sehingga teknologi kini telah berkembang, namun tidak dengan manusianya. Adanya teknologi identitas keagamaan masyarakat justru menjadi saling menjatuhkan satu sama lain, menuduh, melakukan *stereotypes*, bahkan menganggap pendapatnya adalah ungkapan yang paling benar. Kebebasan media sosial membuat masyarakat hidup dalam kehendaknya sendiri. (Simangunsong 2016)

Penelitian ini bertujuan menemukan krisis identitas masyarakat Islam melalui media sosial Instagram (studi kasus pada kolom komentar @nuonline_id). Di era digital ranah krisis identitas keagamaan tidak hanya ditampilkan dalam perilaku sosial secara langsung. Namun, melalui digital kini krisis identitas lebih mudah tergambarkan melalui citra-citra umat muslim yang mereka tampilkan dalam komunikasi media sosial. Dalam hal ini *gadget* menjadi sebuah tindakan komunikasi yang dapat mengilustrasikan terjadinya krisis identitas Islam. Penelusuran tersebut dapat kita lihat dalam kolom komentar di ruang virtual, khususnya pada penggunaan media sosial instagram. Adapun tulisan ini menggunakan kajian teori identitas sosial menurut Henri Tajfel, Michael A Hogg dan Dominic Abrams sebagai dasar dalam menganalisis fenomena keagamaan di era virtual ini. (Sarwono 2015)

Identitas Sosial Dalam Kajian Tajfel, Hogg Dan Abrams

Teori identitas ini dapat menjelaskan bagaimana perubahan sosial terjadi di masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh Tajfel, bahwa pada dasarnya teori ini berupaya membuktikan bahwa diskriminasi dan berbagai bentuk konflik antar kelompok adalah hasil dari anggota individu yang cenderung memberikan evaluasi positif terhadap kelompoknya sendiri. Sehingga penjelasan teori ini lebih mampu menjelaskan fenomena tersebut ketimbang penjelasan seperti kepribadian yang lebih menekankan pada pengaruh di tiap individunya. Kelompok didefinisikan oleh Tajfel sebagai sekumpulan orang yang memiliki identitas sosial sama dan berkompetisi dengan kelompok lain untuk mendapatkan evaluasi positif yang berbeda dari lainnya, dan Tajfel mencoba menjelaskan identitas sosial sebagai pengetahuan individu yang mana ia tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Sehingga menciptakan dampak emosional dan *value* yang memiliki makna bagi tiap individu tersebut.

Dalam fenomena konflik di dalam suatu kelompok Hogg dan Abrams berupaya mengkategorikan seseorang ke dalam kategori-kategori sosial tertentu, sehingga dapat memahami dan memprediksi sikap, nilai, dan perilaku seseorang tersebut. Kategorisasi yang dilakukan dapat melihat seberapa besar individu tersebut memiliki makna di dalam kelompoknya. Kepentingan pribadi menjadi dasar dari adanya kebutuhan individu untuk mempertahankan konsep diri positif. Dengan adanya kebutuhan tersebut menjadikan suatu kelompok memiliki identitas sosial yang positif.

Terdapat dua motivasi dasar yang mendorong proses terbentuknya identitas sosial yaitu peningkatan diri (*self-enhancement*) dan pengurangan ketidakpastian. Dari adanya dua motivasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk para anggotanya jika status di kelompoknya tinggi. Seseorang akan berusaha melindungi harga diri dan status kelompok mereka sendiri secara relatif dengan kelompok lain, sehingga evaluasi kelompok di perlukan dalam evaluasi diri juga untuk meningkatkan motif dalam *self-enhancement* dan *self-esteem*. Adanya ancaman terhadap identitas kelompok dapat memengaruhi penguatan identitas sosial.

Identitas sosial bersifat dinamis. Dari adanya dua motivasi diatas, tahap proses identitas sosial terbagi menjadi tiga tahap yakni kategorisasi, identifikasi, dan komparasi. Tiga tahap proses tersebut dapat menjelaskan peran anggota kelompok dalam pembentukan konsep diri. Untuk mengetahui apakah identitas sosial kelompoknya lebih unggul dari yang lain, maka perlu adanya perbandingan

sosial sehingga hal tersebut dapat mengetahui sejauh mana kualitas setiap kelompok itu dan dapat melakukan perbaikan identitas sosial kelompoknya. Cara mengubah identitas sosial dapat melalui mobilisasi sosial (berpindah ke kelompok yang lebih baik), kompetisi sosial (upaya untuk mengungguli yang lain), atau kreativitas sosial (mencari kelompok yang lebih buruk dari kelompoknya sendiri).(Joevarian Hudijana, dkk 2017)

Kajian Pustaka

Sebagaimana penelitian pada umumnya yang berlandas pada karangan ilmiah, oleh karena itu dalam upaya pengembangan penelitian maka studi pustaka dibutuhkan sebagai bahan perbandingan dan mempertegas penelitian ini, bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. *Pertama*, Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dengan media sosial dan krisis identitas keagamaan pernah ditulis oleh Benedictus A Simangunsong yang berjudul *Interaksi Antar Manusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Agama* dalam *Jurnal Aspikom, Volume 3 Nomor 1, Juli 2016* dalam penelitian ini tersebut menyatakan bahwa identitas masyarakat sekarang telah mengalami pergeseran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi terhadap interaksi yang terjadi antarpengguna melalui media sosial facebook. Selain itu, ditemukan bahwa dalam media sosial facebook yang berkaitan dengan topik keagamaan dapat dipetakan menjadi 4 kategorisasi yaitu toleransi agama, penyamaan keyakinan, ketidakpercayaan terhadap berita yang disampaikan serta egoisentrisme agama. Namun, dalam penelitian ini kurang begitu menekankan bahwa interaksi dalam masyarakat dalam media sosial facebook masih bersifat umum karena interaksi hanya didasarkan pada topik keagamaan dan tidak secara spesifik berdasar pada salah satu identitas keagamaan salah satu agama. Perbedaan penelitian milik Benedictus Simangunsong dengan tulisan ini adalah jika Benedictus menyoroti interaksi virtual pada semua agama, sedangkan tulisan ini lebih spesifik pada agama Islam. Kesamaan dengan tulisan ini yakni dalam metode dan pembahasan yang mengulas interaksi pada ruang virtual dan keagamaan.

Selanjutnya penelitian ke *dua* dari DP. Budi Susetyo dalam jurnal yang dimuat oleh psikodimensia, 2002, volume 2 halaman yang berjudul *Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia*. Dari hasil penelitian tersebut ada krisis identitas pemuda keturunan Cina. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa identitas yang dipakai oleh pemuda Cina merupakan perpaduan antara Eropa ataupun Belanda, selain itu para pemuda memobilisasi identitas dengan mengdopsi keagamaan Kristen dan Katolik serta memberikan sedikit identitas leluhur. Identitas Cina yang berkaitan dengan pribumi hanya didasarkan pada unsur ekonomi dan perdagangan. Dalam penelitian kurang jelas ditangkap makna sebenarnya dari krisis identitas ke Cina namun telah memberikan pemahaman bahwa identitas masyarakat dapat berubah atas kondisi yang mempengaruhi individu. Perbedaan tulisan Budi susetyo dengan tulisan ini adalah pada ruang lingkup kajiannya. Jika Budi Susetyo menyoroti krisis identitas etnis, dalam tulisan ini lebih kepada krisis identitas keagamaan.

Melihat kedua hasil penelitian diatas yang memiliki keterkaitan dengan kajian yang penulis kaji dan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian dengan kontek media masa dan agama ini. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul di atas karena agama dan media massa sangat berkaitan erat saat ini, bahkan agama merupakan kajian yang sangat sensitif untuk dibahas lebih dalam. Setiap media selalu menyuguhkan suatu informasi berita dengan kajian yang berbeda-beda, namun disini penulis ingin menganalisis pola masyarakat khalayak dalam merespon informasi yang disebarkan oleh akun instagram @nuonline_id yang menyebabkan kajian-kajian yang disajikan menjadi kiblat bahkan ideologi baru dalam masyarakat urban, karena masyarakat urban sendiri merupakan pengguna *gadget* tertinggi. Demikian latar belakang alasan penulis mengambil judul artikel ini.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini mencoba membahas mengenai fenomena di dalam dunia virtual. Dunia virtual hadir sebagai produk dari teknologi digital yang diciptakan sebagai konsumsi oleh masyarakat postmodern. Di era digitalisasi ini menawarkan kebebasan dan kemudahan dibalik dunia virtual yang sebenarnya manusia telah terhegemoni. Sehingga salah satunya dapat menciptakan ideologi baru yang dapat menimbulkan konflik dalam suatu golongan tertentu. Dari adanya fenomena tersebut fokus penelitian ini berupa perbincangan dalam kolom komentar yang menjadi sebuah data. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori identitas sosial. Dalam proses menciptakan identitas sosial, Tajfel mencoba mengkategorisasikan tergantung persepsi perbedaan relatif melalui perilaku. Kategorisasi ini dikembangkan oleh Hogg dan Abram yang merupakan hasil dari konteks mereka menetapkan diri dalam kelompok dengan katogeri yang relevan secara kontekstual. (Joevarian Hudijana, dkk 2017) sehingga Hogg dan Sabram mencoba mengkategorisasikan menjadi 3 tahap. Seperti beberapa contoh yang bisa di ambil oleh penulis di bawah ini:

No	Tahapan Proses	Penjabaran
1.	Kategorisasi	individu dan masyarakat luas menggolongkan baik dirinya maupun orang lain dalam kategori tertentu. Misal : orang Jawa, golongan NU, golongan Muhammadiyah.
2.	Identifikasi	Seseorang menandai dirinya sendiri dengan tanda tertentu untuk membangun rasa bangga dan percaya dirinya. Misal : saya golongan NU yang moderat dan mayoritas, saya HTI yang membela tauhid dan menanamkan ajaran tauhid dalam setiap lini kehidupan, saya santri pondok A dan kiai saya kiai yang tinggi ilmunya.
3.	Komparasi	Ketika seseorang membandingkan dirinya maupun kelompoknya dengan orang lain, mengunggulkan kelompoknya dan mencari kelemahan kelompok lain. Seperti terlihat pada gambar 02 yang menanyakan partisipasi kelompok lain terhadap suatu permasalahan namun terkesan mencibir golongan lain.

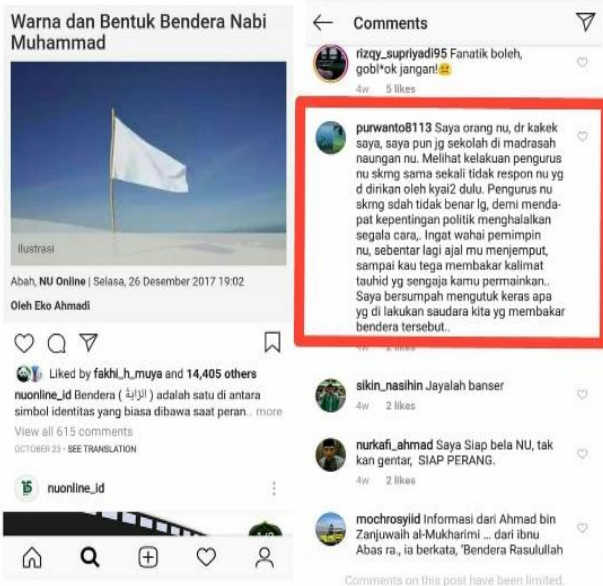
Dalam ketiga tahapan kategori tersebut, dapat mengetahui hubungan interaksi yang terbentuk melalui ketiga proses tersebut. Ketiga proses kategorisasi tersebut dapat menunjukkan beberapa kategori penting dalam kolom komentar, yaitu adanya sikap ketidakpercayaan pada gambar yang di *posting* dan adanya sikap egoisentris. Seperti pada gambar 04 yang menunjukkan sikap egoisentrisme terhadap postingan mengenai video yang dibawakan oleh KH. Moh Ali Sodikin tentang kalimat tauhid dan bendera HTI. Seperti akun @normandmaulana dan @_dho0809 yang menganggap kelompok NU lebih baik daripada HTI. Sikap egoisentrisme ini menurut Tajfel dalam teori identitas sosial merupakan proses identitas sosial pada tahap komparasi, dimana pada tahap ini pemilik akun yang mengomentari video pada gambar 03 mencoba menunjukkan identitasnya sebagai warga NU, dan kelompok NU menjadi kelompok sosial yang paling baik dari pada kelompok HTI yang menggunakan bendera tauhid sebagai identitas kelompoknya.

Maka dengan adanya analisis menggunakan teori identitas sosial oleh Tajfel, penulis menemukan kategorisasi dalam interaksi komentar yang di sampaikan oleh pengguna *instagram* yaitu sikap ketidakpercayaan pada *postingan* dan sikap egoisentrisme. Dua kategorisasi tersebut diperoleh dari hasil analisis dalam beberapa postingan akun @nuonline_id yang mengambil sampel dengan mempertimbangkan banyaknya komentar yang diutarakan oleh pengguna *instagram* dan jumlah like yang di peroleh. Pertimbangan tersebut dirasa sudah cukup mewakili seberapa banyak respon *postingan* yang dapat dijelaskan menggunakan teori identitas sosial.

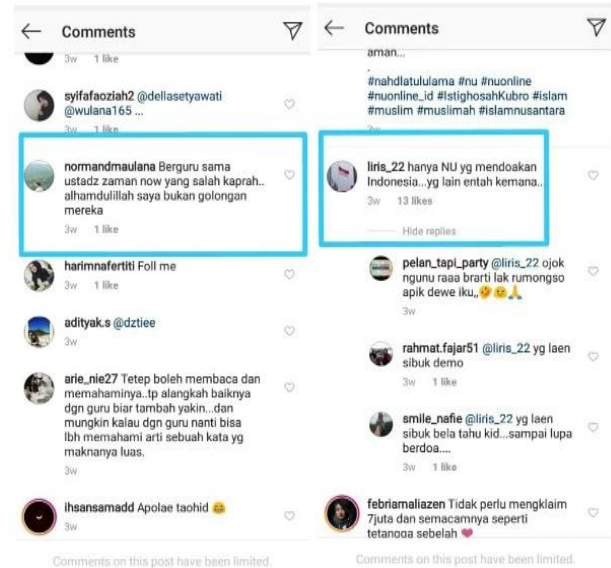
Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini mencoba melihat krisis identitas keagamaan yang terjadi pada Umat Islam pada media sosial. Pada penelusuran yang didapatkan pada kolom komentar didapati bahwa krisis identitas keagamaan islam dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu berkaitan dengan egoisentrisme agama dan ketidakpercayaan atas postingan yang merupakan akun ormas keagamaan resmi Islam di dunia digital @nuonline_id.

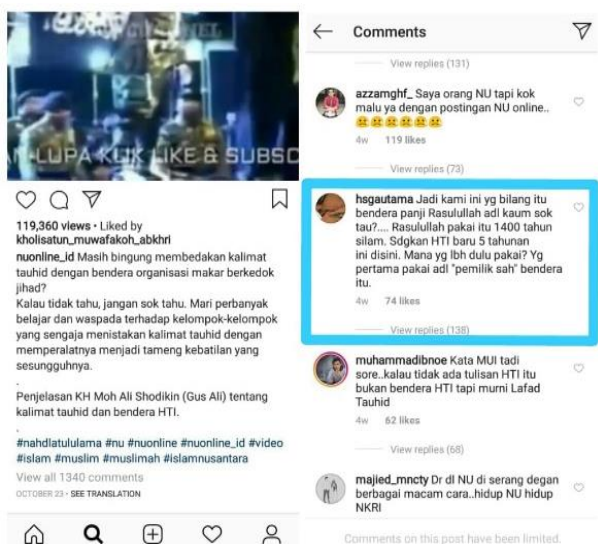
Gambar 01. Ketidakpercayaan pada Postingan



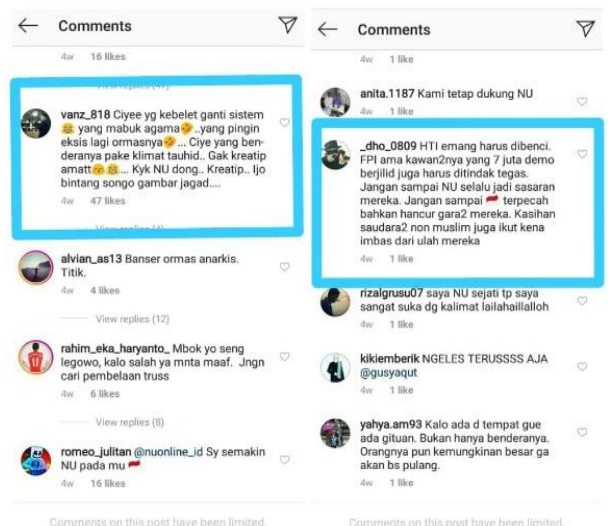
Gambar 02. Egoisentrisme



Gambar 03. Ketidakpercayaan pada Postingan



Gambar 04. Egoisentrisme



Pada penelusuran yang telah dilakukan didapati bahwa perbincangan pada kolom komentar dapat dikategorisasi sebagai tahapan krisis identitas secara lebih mendalam. Gambar 0.1 dan gambar 0.3 merupakan tahapan krisis yang dikategorikan sebagai identifikasi sosial dan gambar 0.2 dan 0.4 merupakan tahap perkembangan krisis yang dikategorikan sebagai tahap komparasi. Dalam hal ini Pengaruh media digital menjadikan individu ini yang mampu mengkategorikan dirinya sendiri. Apakah ia radikal, moderat, damai dan sebagainya. Mengacu pada tulisan (Simangunsong 2016), ada 4 kategori interaksi sosial di dunia virtual yang berdasarkan interaksinya, namun menurut analisis kami

dalam @nuonline_id terdapat 2 hal yang mencolok yakni ketidakpercayaan pada gambar yang ditampilkan dalam postingan dan egoisentrisme serta tahapan krisis yang didasarkan pada 3 tahap. Tahapan pada postingan @nuonline_id di dasarkan pada model identifikasi sosial Tajfel, Hogg dan Abram.

1. Ketidakpercayaan pada gambar yang ditampilkan

Suatu postingan dapat dikatakan menyajikan data yang bersifat faktual tetapi tidak membohongi publik. Dalam hal ini sesuai dengan pandangan (Simangunsong 2016) bahwa terdapat banyak permasalahan yang timbul terkait suatu berita yang ditampilkan pada media digital yang erat kaitannya dengan media sosial. Misalnya pernyataan dibawah ini:

*“saya orang NU, dr kakek saya, sayapun juga sekolah di madrasah NU, melihat kelakuan pengurus Nu sekarang sama sekali tidak respon, NU yang didirikan kyai” dulu. Penguasa sekarang tidak benar lg demi mendapatkan kepentingan politik menghalalkan segala cara”
“jadi kami yang bilang bendera itu panji rasul adalah kaum sok tau? Rasullah pakai 1400 tahun silam sedangkan HTI baru 5 tahun, mana yang lebih dahulu pakai. Yang pertama pakai adalah pemilik sah.”*

Pernyataan tersebut dengan memperlihatkan bahwa pergeseran dan ketidak mampuan dalam pemahaman suatu berita dapat mengakibatkan suatu krisis identitas keagamaan Islam. Identitas keagamaan dapat di petakan menjadi 3 tahap yang dikemukakan oleh Hogg dan Abram dalam (Joevarian Hudijana, dkk 2017) yaitu kategorisasi, identifikasi dan komparasi. Dalam gambar 0.1 dan 0.3 merupakan ketidak percaya pada berita dan sesuai dengan identifikasi sosial menurut Hogg dan Abram. Identifikasi sosial merupakan tahapan yang mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok. Identifikasi membuat makna agama bergeser menjadi hanya sebagai esensi pokok dari ormas dan tidak sebagai pokok dalam kehidupan beragama. Identifikasi sosial dalam hal ini mempersempit ruang gerak kegamaan dengan hanya digerakan pada ruang organisasi dan bukan pada permasalahan keagamaan itu sendiri. Merunut tulisan (Susetyo 2002) terkait identitas pribumi yang berusaha didapatkan oleh orang keturunan etnis Cina di Indonesia, maka lain ketika dilihat pada umat Islam di Indonesia yang sudah mendapatkan identitasnya namun memperkeruh suasana dengan hal-hal tersebut. Krisis identitas keagamaan Islam hadir karena pergeseran nilai yang fokus pada membenaran golongan yang memberikan pokok pada aspek kelembagaan ormas suatu agama.

2. Egoisentrisme kelompok

Menurut (Simangunsong 2016) egoisentrisme menunjukkan bahwa kebenaran suatu keyakinan harus sesuai pada keyakinan yang dipegang. Pada percakapan diatas dapatkan krisis identitas keagamaan Islam sesuai dengan konsep Tajfel dalam (Joevarian Hudijana, dkk 2017) yang menekankan bahwa *self-echancement* dan *self esteem* akan memberikan dampak positif pada penguatan kelompok karena dengan adanya kedua faktor tersebut akan memberikan peningkatan status pada kelompok namun disisi lain akan mengakibatkan krisis identitas keagamaan Islam, hal dapat dilihat dalam gambar 0.2 dan 0.4 yang diperjelas pada pernyataan dibawah ini:

*“berguru pada ustad zaman now yang salah kaprah alhamdulillah saya bukan golongan mereka”
“hanya nu yang mendoakan indonesia yang lain entah kemana”
“ciye yang kebelet ganti sistem, yang mabuk agama yang pengen eksis lagi ormasnya, ciye yang benderanya pakai kalimat tauhid gak kreatif amat kyk NU dongijo bintang songo gambar jagad. HTI harus dibenci. FPI ama kawannya yang 7 juta demo berjilid juga harus ditindak. Jangan sampai NU jadi sasaran sampai terpecah gara-gara mereka. Kasihan warga non-muslim juga ikut kena.”*

Pernyataan tersebut dapat dikatakan egoisentrisme dan krisis identitas keagamaan Islam karena dalam pernyataan diatas dapat mengilustrasikan bahwa keberagaman suatu entitas keagamaan dan tokoh akan memberikan kecenderungan menyerang identitas keagamaan sesama Islam namun berbeda ormas. Sesuai dengan pernyataan (Susetyo 2002) bahwa kecenderungan krisis dapatkan dikatakan dengan adanya kepentingan tertentu yang menyelimuti identitas suatu golongan. Dalam pandangan ini dapat dikatakan keadaan krisis terjadi keadaan dimana tindakan individu didasarkan pada *sosial comparasion* yang mana tujuan dari hal ini meningkatkan status kelompok yang diikuti dan memberikan pandangan negatif pada kelompok lain walaupun masih pada identitas keagamaan Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini mencoba melihat pola interaksi yang tergambarkan dalam kolom komentar, dan setiap komentar yang diutarakan mencoba menunjukkan identitas sosial kelompoknya dan mencoba membela bahkan mempertahankan keyakinan yang terbentuk di dalam anggota kelompoknya. Memiliki identitas sosial tertentu berarti menjadi bagian yang sama dari anggota kelompok tersebut, sehingga memandang sesuatu dengan perspektif yang dimiliki kelompok tersebut. Kelompok keagamaan menjadi contoh yang dapat menggambarkan keadaan tersebut, karena di dalam agama memberi ajaran dalam mengekspresikan tujuannya untuk memberi petunjuk dan mengatur seluruh segi kehidupan. Hal tersebut ditentukan oleh norma, nilai, dan kepercayaan memiliki nilai kebenaran yang dapat diaplikasikan dengan asumsi berlaku secara keseluruhan oleh penganut agama tersebut. (Joevarian Hudijana, dkk 2017)

Krisis identitas keagamaan dalam hal ini terkait kepentingan dari anggota suatu kelompok yang mengidentitaskan kelompoknya pada posisi paling tinggi. Krisis identitas disini dapat didasarkan pada 3 tahap yaitu kategorisasi, identifikasi dan komparasi yang mana dapat diperkecil pada 2 kategori khusus yaitu ketidakpercayaan pada berita yang merupakan media resmi dalam satu ormas dan egoisentrisme kelompok. Dalam hal ini krisis identitas keagamaan islam semakin radikal bukan hanya masalah intoleransi pada ummat beragama namun terjadi krisis antara sesama pemeluk agama. Keadaan ini terjadi karena setiap individu terlalu radikal dan tidak melihat suatu identitas keagamaan Islam sebagai identitas keagamaan yang menghargai suatu perbedaan dalam kehidupan keagamaan.

References

- Aminuddin, Ahsani Taqwim. "Instagram: Bingkai Kasus Agama di Media Sosial." *The Messenger*, 2017: 163-175.
- Ibrahim, Idi Subandy. *kritik budaya komunikasi (budaya, media, dan gaya hidup dalam peoses demokratisasi di indonesia)*. Yogyakarta: jalasutra, 2012.
- Joevarian Hudijana, dkk. *Teori Psikologi Sosial Kontenporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Kellner, Douglas. *budaya media(cultural studies, identitas, dan politik : antara modern dan postmodern)*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama." *Walisongo*, 2012: 271-304.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial (Individu dan Teori Psikologi Sosial)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Simangunsong, Benediktus A. "Interaksi Antar Manusia Melalui Media sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan." *ASPIKOM*, 2016: 65-76.
- Susetyo, DP Budi. "Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia ." *Psikodimensia*, 2002: 61-67.
- Taufiq, Imam. *Al Qur'an Bukan Kitab Teror*. Yogyakarta: Bentang, 2016.

DEMOGRAFI

Analisis Karakteristik Fertilitas Penduduk Migran dan Non Migran Provinsi Sumatera Utara

M. Ancha Sitorus, Peneliti Utama BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Email: ancha.sitorus@gmail.com

Windo Harjoin Sidabutar, Magister Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sumatera Utara. Email: harjoin09@yahoo.co.id

Abstrak

Migrasi merupakan salah satu faktor penting yang mewarnai dinamika demografi di suatu wilayah. Arus migrasi masuk dan keluar pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu akan berpengaruh besar pada pertumbuhan penduduk. Melalui penelitian ini dilihat karakteristik migran, kesertaan/pembinaan ber KB fertilitas dan kesertaan/pembinaan ber KB dan fertilitas WUS migran dan non migran. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengambilan data dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan total responden yang berpartisipasi sebanyak 500 orang yakni masing masing 250 orang untuk responden migran dan non-migran. Penentuan besarnya jumlah sampel dilakukan dengan teknik *case control* sesuai dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan angka migrasi yang terdapat pada ketiga kabupaten/kota berdasarkan hasil SUPAS 2015. Teknik pemilihan sampel dilakukan secara *accidental* dengan kriteria migran atau non-migran kemudian data diolah menggunakan SPSS dengan uji *independent sample test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ber-KB WUS migran di Provinsi Sumatera Utara lebih rendah dibanding WUS non Migran, sementara preferensi fertilitas WUS migran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan WUS non migran. Keikutsertaan ber KB serta pembinaan/akses informasi pada WUS migran dan non migran tidak ada perbedaan yang signifikan.

Kata Kunci: Karakteristik Fertilitas, Migrasi, Sumatera Utara

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 238,5 juta jiwa dan terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan mencapai 305,6 juta jiwa (BPS, 2013:20). Dari proyeksi dapat kita lihat bahwa negara Indonesia mengalami transisi demografi yang sangat dipengaruhi oleh tiga faktor antara lain fertilitas, mortalitas dan migrasi. Menurut *World Population Prospect, Economic and Social Affairs* (UN) transisi demografi di Indonesia tahun 1950–2050, tahun 2017 merupakan masa transisi demografi ketiga dan keempat, dimana terjadi perubahan demografi akibat pembangunan dan juga upaya pengendalian penduduk itu sebabnya sikap terhadap fertilitas berubah menjadi cenderung punya anak sedikit yang kemudian diikuti menurunnya tingkat kematian dan tingkat kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk menjadi lebih stabil.

Kondisi pertumbuhan penduduk yang semakin stabil ternyata berdampak pula pada peningkatan ekonomi. Namun terdapat sedikit kecenderungan yang berbeda, dimana menurut proyeksi PBB pada tahun 2050 dua pertiga populasi Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Sejak 40 tahun yang lalu Indonesia sedang mengalami sebuah proses urbanisasi yang pesat, itu sebabnya lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Proses ini menunjukkan perkembangan positif bagi ekonomi Indonesia karena urbanisasi dan industrialisasi akan membuat tumbuhnya ekonomi lebih maju dan menjadikan Indonesia negeri dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Namun dalam menganalisis masalah kependudukan kita tidak dapat

dipisahkan dari analisis fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ketiga unsur ini harus di analisis secara bersamaan karena kesemuanya saling memiliki keterkaitan. Untuk Indonesia, dinamika demografi dengan masalah jumlah penduduk yang besar dan angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, secara kuantitas juga menghadapi masalah persebaran penduduk yang tidak merata.

Migrasi merupakan salah satu faktor penting yang mewarnai dinamika demografi di suatu wilayah. Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Sebaliknya, migrasi dapat mengurangi jumlah penduduk jika jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik sifatnya permanen (bertempat tinggal di tempat yang baru paling sedikit 340 hari) atau semi permanen (hanya tinggal selama 15 hari dihitung dari awal kepindahannya ke tempat tersebut), yang melewati batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara atau daerah atau juga melampaui batas politis atau batas negara (Pratiwi, 2007: 2).

Migrasi secara umum dilakukan oleh penduduk usia produktif dan menurut Mantra bahwa motivasi utama orang melakukan perpindahan dari daerahnya ke perkotaan adalah motif ekonomi (Mantra, 1992:173). Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang akan berpindah menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Kondisi seperti inilah yang mendorong masyarakat untuk mencari daerah baru yang dianggap cocok dan bisa hidup lebih layak. Perkembangan kota demikian, sesuai dengan fungsi kota itu sendiri berupa pusat perekonomian, teknologi, pendidikan maupun pusat pemerintahan yang menjadi daya tarik daerah tujuan (Agustina, 2012: 3).

Pada kurun waktu tertentu migrasi akan berpengaruh besar pada pertumbuhan penduduk. Rata-rata usia penduduk Indonesia adalah 28.6 tahun (perkiraan tahun 2016). Ini adalah *median age* yang berarti separuh dari populasi Indonesia berusia 28.6 tahun lebih dan separuhnya lagi umurnya di bawah 28.6 tahun. Mengenai jenis kelamin, rata-rata *median age* wanita Indonesia adalah 29.1 tahun, sementara *median age* pria lebih muda setahun (28.1 tahun). Migrasi pada rentang usia ini akan berpengaruh pada dua aspek demografi lain secara langsung yaitu aspek fertilitas dan mortalitas (BPS, 2015:64)

Hasil Survei Penduduk Antar sensus (Supas) tahun 2015 menunjukkan bahwa arus migrasi lima tahun yang lalu (migrasi risen) khususnya migrasi risen keluar cukup tinggi. Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki angka migrasi keluar paling besar, sedangkan untuk migrasi risen masuk Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak menerima migran. Jika dilihat dari angka Kabupaten/Kota Sumatera Utara menurut SUPAS 2015, besarnya angka migrasi ada di beberapa Kabupaten antara lain Kota Sibolga sebanyak 7.663 jiwa (10.02%) dan status kawin migran 3.950 (51,55%) dengan jumlah PUS 12.469, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 168.706 jiwa (9.27%) dan status kawin migran 96.955 (57,47%) dengan jumlah PUS 244.214 dan Kabupaten Tapanuli Tengah 19.400 jiwa (6,27%) dan status kawin migran 10.421 (53,72%) dengan jumlah PUS 34.464. Angka migrasi jika dilihat dari angka ini sangat berpengaruh pada jumlah PUS yang secara langsung mempengaruhi fertilitas di suatu wilayah (BPS, 2015:62). Berdasarkan data supas, jumlah anak lahir hidup di daerah ini juga tinggi yaitu Sibolga (2,84), Deli Serdang (2,4) dan Tapanuli Tengah (3,52).

Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian bagaimana gambaran perbedaan pengetahuan ber-KB, fertilitas, pola pembinaan dan keikutsertaan ber KB WUS migran dan non-migran di Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga mengingat tingginya angka migran pada tiga lokasi tersebut.

Kajian Pustaka

Migrasi

Migrasi merupakan salah satu dari komponen demografi yang juga mempengaruhi dinamika penduduk disamping fertilitas dan mortalitas. Dalam teori LFR (Lewis-Fei-Rannis) disebutkan bahwa perpindahan penduduk pada dasarnya terjadi karena adanya perbedaan antara sektor kota yang modern dan sektor desa yang tradisional (Hardiani, 2009:100). Ada dua dimensi penting yang perlu ditinjau dalam penelaahan migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah. Untuk dimensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena sulit untuk menentukan berapa lama seseorang pindah tempat tinggal untuk dapat dianggap sebagai seorang migran, tetapi biasanya digunakan definisi yang ditentukan dalam sensus penduduk.

Menekankan pada dimensi daerah, Tjiptoherijanto (dalam Safrida, 2008) mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan orang dari daerah asal ke daerah tujuan. Migrasi dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi di daerah tujuan. Membatasi definisi yang ada, PBB (dalam Rangkuti, 2009) memberikan batasan migrasi sebagai bentuk dari mobilitas geografi (*geographic mobility*) atau mobilitas keruangan (*spatial mobility*) dari suatu unit geografi ke unit geografi lainnya yang menyangkut perubahan tempat kediaman secara permanen dari tempat asal atau keberangkatan, ke tempat tujuan atau tempat yang didatangi.

Terdapat empat faktor yang menyebabkan seseorang memilih untuk bermigrasi sebagaimana dikemukakan oleh Everest S. Lee (dalam Munir, 2011) yakni (a) Faktor-Faktor yang terdapat di daerah asal, (b) Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (c) Rintangan-rintangan yang menghambat, (d) Faktor pribadi. Salah satu turunan dari teori Ravenstein seperti dituturkan Andrew Heywood (2011) melalui tulisannya "*Identity, Culture and Challenges to the West*" di buku "*Global Politics*" dalam Muhamad (2012), bahwa secara umum terdapat dua teori tentang migrasi. Teori Individual menyatakan bahwa perpindahan manusia terjadi atas pertimbangan rasional individu yang didorong oleh harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Teori ini menekankan pada daya tarik ekonomi yang terdapat pada wilayah tujuan sebagai faktor penarik (*pulled*) seseorang untuk bermigrasi.

Fertilitas

Fertilitas (kelahiran) sebagai istilah demografi sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Disamping istilah fertilitas ada juga istilah fekunditas (*fecundity*) sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup (Mantra, 2006). Fertilitas biasanya diukur sebagai frekuensi kelahiran yang terjadi di dalam sejumlah penduduk tertentu. Disatu pihak mungkin akan lebih wajar bila fertilitas dipandang sebagai jumlah kelahiran per orang atau per pasangan, selama masa kesuburan. Menurut Sukarno (2010) Fertilitas merupakan jumlah dari anak yang dilahirkan hidup dengan pengertian bahwa anak yang pernah dilahirkan dalam kondisi hidup menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jika anak pada saat dilahirkan dalam kondisi hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi tetap dikatakan anak lahir hidup (ALH).

Menurut Wati (2012), indikator *fertilitas* adalah sebagai berikut:

- A. Angka Kelahiran Tahunan (*Current Fertility*) dengan indikator:
 1. Jumlah Kelahiran
 2. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate - CBR*)

3. Angka Kelahiran Menurut Umur
 4. Angka fertilitas Total
- B. Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH)
1. Anak Lahir Hidup (ALH) atau *Children Ever Born (CEB)*
 2. Anak Masih Hidup (AMH) atau *Children Still Living (CSL)*
 3. Rasio Anak-Wanita atau *Child Women Ratio (CWR)*.
- C. Paritas (Jumlah anak hidup)
- D. Keluarga Berencana
1. Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
 2. Angka tidak terpenuhinya kebutuhan KB (*Unmet-need*)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perbedaan fertilitas, pola pembinaan dan keikutsertaan ber KB Wanita Usia Subur (WUS) migran dan non-migran di Provinsi Sumatera Utara. Populasi penelitian ini adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berdomisili Kota Sibolga sebanyak 12.469, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 244.214 dan Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 34.464. Penentuan besarnya jumlah sampel menggunakan *case control* yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah PUS dan angka migrasi yang terdapat pada ketiga kabupaten/kota berdasarkan hasil SUPAS 2015. Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel yang diwawancarai di Kabupaten Deli Serdang untuk WUS migran dan non migran masing-masing 100 orang, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah reponden WUS migran dan non migran masing-masing 75 orang. Total responden yang diwawancarai masing masing 250 orang untuk responden migran dan non-migran.

Pemilihan responden yang diwawancarai ditentukan secara *accidental* dengan tujuan untuk menemukan responden migran dan non migran secara proporsional. Kepada responden yang memenuhi syarat diajukan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Waktu pengumpulan data berlangsung selama dalam kurun waktu selama 2 bulan sejak bulan Oktober hingga Desember 2017. Data hasil penelitian diolah menggunakan SPSS dengan uji *independent sample test*.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Berdasarkan analisis karakteristik pada setiap kabupaten/kota, Kabupaten Deli Serdang jelas merupakan daerah penyangga Kota Medan. Hal ini terlihat dari banyaknya migran yang bekerja di Kota Medan, memilih tinggal menetap di daerah Deli Serdang sebagai migran. Demikian pula halnya Kabupaten Tapanuli Tengah bagi Kota Sibolga, para pekerja yang bertugas di Kota Sibolga memilih tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan alasan masih mudah menjangkau Kota Sibolga, harga perumahan yang lebih murah dan berbagai faktor lainnya. Berbeda halnya dengan Kota Sibolga dimana sebagai kota yang terkenal dengan pelabuhannya, penduduk dari daerah terpencil di Tapanuli Tengah memilih 'mengadu nasib' di Kota Sibolga dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ketiga lokasi ini dinilai mampu menggambarkan karakteristik migran dan non-migran di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Wanita Usia Subur (WUS) migran yang ada di Provinsi Sumatera Utara (menikah atau pernah menikah) merupakan migran dengan usia produktif

pada usia 25–39 tahun yang sebagian besar berstatus kawin. Migran yang melakukan migrasi berasal dari Provinsi Sumatera Utara dari berbagai macam etnis (Batak, Mandailing, Jawa, Nias dan Minang) dan mayoritas beragama Islam atau Kristen. Dari segi pendidikan, mayoritas migran berpendidikan SMA, namun untuk pendidikan tinggi pada masyarakat migran jauh lebih baik dari non migran. Terdapat juga migran yang berpendidikan dibawah SMP namun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Migran sebagian besar adalah ibu rumah tangga, namun sebagian lainnya memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan karyawan dengan penghasilan mayoritas ≤RP.1.000.000,- namun bila dibandingkan dengan penduduk non migran penghasilan keluarga migran jauh lebih baik walupun ada yang masih pada tahapan pra sejahtera. Umumnya penduduk migran melakukan migrasi di usia 25 – 34 tahun dengan alasan pindah bersama keluarga dan mencari pekerjaan/dekat dengan lokasi bekerja.

Tabel 1. Perbandingan Pengetahuan Keluarga Berencana antara Responden WUS Migran dengan Non Migran di Provinsi Sumatera Utara

Group Statistics

Kelompok WUS		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pengetahuan Keluarga Berencana	Non Migran	250	19,16	6,434	,407
	Migran	250	18,88	7,097	,449

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
		Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower
Pengetahuan Keluarga Berencana	Equal variances assumed	,832	,036	,454	498	,025	,275	,606	-,915	1,466
	Equal variances not assumed			,454	493,281	,025	,275	,606	-,915	1,466

(Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian, 2017/SPSS 21.0)

Untuk mengukur pengetahuan KB responden, pertanyaan kuesioner nomor 44-46 mengenai jenis kontrasepsi, tempat layanan KB dan efek samping penggunaan KB. Perbandingan pengetahuan mengenai keluarga berencana antara WUS migran dan non-migran di Provinsi Sumatera Utara berada pada hasil *Levene's Test* adalah $F=0,832$ dengan signifikansi $0,036$ dapat disimpulkan bahwa $p < 0,05$ artinya terdapat perbedaan antara varian jawaban WUS migran dan WUS non-migran yang signifikan. Hasil uji T independen berada pada angka $0,025$ dan $t < 0,05$ sehingga disimpulkan terdapat perbedaan pengetahuan keluarga berencana antara WUS Migran dengan WUS Non Migran di Provinsi Sumatera Utara. Lebih jauh terlihat bahwa rata-rata pengetahuan keluarga berencana untuk WUS migran adalah $18,88$ dengan standard deviasi $7,097$. Sedangkan untuk responden WUS non migran rata-rata pengetahuan keluarga berencana adalah $19,16$ dengan standard deviasi $6,434$. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keluarga berencana WUS migran di Provinsi Sumatera Utara lebih rendah jika dibandingkan dengan pengetahuan keluarga berencana WUS non migran di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2 Perbandingan Keikutsertaan Keluarga Berencana antara Responden WUS Migran dengan Non Migran di Provinsi Sumatera Utara

Group Statistics

Kelompok WUS		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
KKB Non Migran		250	9,22	3,694	,234
Migran		250	9,07	3,523	,223

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
		Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower
KKB	Equal variances assumed	,023	,880	,478	498	,633	,154	,323	-,480	,789
	Equal variances not			,478	496,886	,633	,154	,323	-,480	,789

assumed									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian, 2017/SPSS 21.0)

Hasil di atas diperoleh pada kuesioner pertanyaan nomor 47-48 yang melihat keikutsertaan dalam KB dan alat kontrasepsi yang digunakan. Perbandingan kesertaan dalam keluarga berencana antara WUS migran dan non-migran di Provinsi Sumatera Utara berada pada hasil *Levene's Test* adalah $F=0,023$ dengan signifikansi 0,880 dapat disimpulkan bahwa $p > 0,05$ artinya tidak terdapat perbedaan antara varian jawaban WUS migran dan WUS non-migran dalam keikutsertaan mereka ber-KB. Hasil uji T independen berada pada angka 0,633 dan $t > 0,05$ sehingga disimpulkan tidak terdapat perbedaan kesertaan dalam keluarga berencana antara WUS Migran dengan WUS Non Migran di Provinsi Sumatera Utara. Lebih jauh terlihat bahwa rata-rata kesertaan dalam keluarga berencana untuk WUS migran adalah 9,07 dengan standard deviasi 3,523. Sedangkan untuk responden WUS non migran rata-rata kesertaan dalam keluarga berencana adalah 9,22 dengan standard deviasi 3,523. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesertaan dalam keluarga berencana WUS migran tidak berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan kesertaan dalam keluarga berencana WUS non migran di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3 Perbandingan Preferensi Fertilitas antara Responden WUS Migran dengan Non Migran di Provinsi Sumatera Utara

Group Statistics

	Kelompok WUS	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Preferensi Fertilitas	Non Migran	250	463,72	781,280	49,413
	Migran	250	537,85	837,520	52,969

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	Equal variances assumed	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
		Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower
Preferensi Fertilitas	Equal variances assumed	3,713	,045	1,023	498	,037	74,128	72,439	-68,195	216,451
	Equal variance			1,023	495,613	,037	74,128	72,439	-68,195	216,453

s not
assumed

7

(Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian, 2017/SPSS 21.0)

Preferensi fertilitas ditanyakan pada seluruh responden melalui pertanyaan nomor 26-42 berupa jumlah melahirkan, keinginan menambah anak dan juga kehamilan yang tidak diinginkan (*Unmeet need*). Perbandingan preferensi fertilitas antara WUS migran dan non-migran di Provinsi Sumatera Utara berada pada hasil *Levene's Test* adalah $F=3,713$ dengan signifikansi 0,045 dapat disimpulkan bahwa $p < 0,05$ artinya terdapat perbedaan antara varian jawaban WUS migran dan WUS non-migran namun terlalu signifikan. Hasil uji T independen berada pada angka 0,037 dan $t < 0,05$ sehingga disimpulkan terdapat perbedaan preferensi fertilitas antara WUS Migran dengan WUS Non Migran di Provinsi Sumatera Utara. Lebih jauh terlihat bahwa rata-rata preferensi fertilitas untuk responden WUS migran adalah 537,85 dengan standard deviasi 837,520. Sedangkan untuk responden WUS non migran rata-rata preferensi fertilitas adalah 463,72 dengan standard deviasi 781,280. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa preferensi fertilitas WUS migran di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi jika dibandingkan dengan preferensi fertilitas WUS non migran di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4. Perbandingan Pembinaan dan Akses Informasi antara Responden WUS Migran dengan Non Migran di Provinsi Sumatera Utara

Group Statistics

Kelompok WUS		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pembinaan dan Akses Informasi	Non Migran	233	8,11	3,051	,200
	Migran	243	8,70	3,821	,245

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Upper	Lower
	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower

Pembinaan dan Akses Informasi	Equal variance assumed	11,465	,001	-1,882	474	,060	-,598	,318	-1,222	,026
	Equal variance not assumed			-1,891	459,112	,059	-,598	,316	-1,220	,023

(Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian, 2017/SPSS 21.0)

Pertanyaan nomor 52 sampai 57 menanyakan bagaimana cara responden memperoleh informasi mengenai KB, apakah mendapat informasi rinci ataupun penjelasan dari petugas KB. Perbandingan preferensi fertilitas antara WUS migran dan non-migran di Provinsi Sumatera Utara berada pada hasil *Levene's Test* adalah $F=11,465$ dengan signifikansi 0,001 dapat disimpulkan bahwa $p < 0,05$ artinya terdapat perbedaan antara varian jawaban WUS migran dan WUS non-migran dalam mendapatkan pembinaan dan akses informasi. Hasil uji T independen berada pada angka 0,059 dan $t > 0,05$ sehingga disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara pembinaan dan akses informasi WUS Migran dengan pembinaan dan akses informasi WUS Non Migran di Provinsi Sumatera Utara. Lebih jauh terlihat bahwa rata-rata pembinaan dan akses informasi untuk responden WUS migran adalah 8,70 dengan standard deviasi 3,821. Sedangkan untuk responden WUS non migran rata-rata pengetahuan keluarga berencana adalah 8,11 dengan standard deviasi 3,051. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan akses informasi WUS migran di Provinsi Sumatera Utara tidak berbeda dengan pembinaan dan akses informasi WUS non migran di Provinsi Sumatera Utara.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Preferensi fertilitas WUS migran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan preferensi fertilitas WUS non migran di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pengetahuan ber-KB WUS migran lebih rendah jika dibandingkan dengan pengetahuan ber-KB WUS non migran di Provinsi Sumatera Utara
3. Pembinaan dan akses informasi WUS migran tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan pembinaan dan akses informasi WUS non migran di Provinsi Sumatera Utara

Daftar Pustaka

- Agustina, Ni Ketut Wiwik. 2012. *Desa Budaya Sebagai daya Tarik Kota Denpasar*. Tesis Pascasarjana Universitas Udayana
- BKKBN. 2006. *Buku Panduan Praktis Kontrasepsi*. Jakarta : PT bina pustaka.
- BPS. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS
- BPS. 2015. *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*. BPS: Jakarta
- BPS. 2015. *Profil Kependudukan Sumatera Utara Hasil SUPAS 2015*. BPS: Jakarta
- Hardiani, Junaidi. 2009. *Dasar-dasar Teori Ekonomi Kependudukan*. Jambi: Hamada Prima

- Mantra.1992. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta: PPK UGM
- Mantra, IB. 2006. *Rural Area, Urban Area and Internal Migration* Online 9 Halaman tersedia di: [Http://www.ed/mantra.HTML](http://www.ed/mantra.HTML)
- Muhamad, Ahmad. 2012. *Globalisasi dan Migrasi: Problematika Integrasi Imigran Turki ke dalam Masyarakat Jerman*. www.web.unair.ac.id
- Munir, Rozy. 2011. *Migrasi, Ed Sri Moertiningsih Adioetomo dan Omas Bulan Samosir: Dasar-Dasar Demografi Hal 133-153*. Depok: Penerbit Salemba Empat dan Lembaga Demografi FE UI
- Pratiwi, YW. 2007. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2007 (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret: Surakarta
- Safrida. 2008. *Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja Dan Perekonomian Indonesia*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Sukarno. 2010. *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Fertilitas dan Umur Kawin Pertama*. Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS BKKBN
- Rangkuti, Hasnani. 2009. *Pengaruh Kesenjangan Penghasilan Dalam Keputusan Bermigrasi Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Data IFLS 1993 dan 2000*. Tesis. Depok: Program Studi Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Program Pascasarjana FE UI

Karakteristik Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) Migran Risenke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Berdasarkan SUPAS 2015

Sri Sugiharti, Perwakilan BKKBN DIY. E-Mail: Sugihartisri@yahoo.com

Nurul Khotimah, Program Studi Pendidikan Geografi, FIS, UNY. E-Mail: nurulkhotimah@uny.ac.id

Jafar Nawawi, Badan Pusat Statistik DIY. E-Mail: jafar@bps.go.id

Sri Agustin Sutrisnowati, Program Studi Pendidikan Geografi, FIS, UNY. E-Mail: sri_agustin@uny.ac.id

Abstrak

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)ada tahun 2000 sejumlah 3.120.478 jiwa dalam Sensus Penduduk(SP) tahun 2000. Pada tahun 2015 jumlah penduduk DIY menjadi 3.675.768 jiwa dalam Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 17,8%. Migrasi penduduk antar propinsi, yaitu menjadi migran risen ke DIY dijadikan solusi sebagian orang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tjiptoherijanto (2000) menyatakan bahwa tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya dengan mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial lebih tinggi di daerah tujuan. Jumlah migran risen ke DIY yang semakin meningkat dapat menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan, seperti kepadatan penduduk, persaingan dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan, pelayanan Keluarga Berencana (KB), dan lain-lain. Untuk meminimalisir masalah kependudukan di DIY ke depan, perlu adanya kajian karakteristik wanita Pasangan Usia Subur (PUS) migran risen ke DIY. Data penelitian ini adalah hasil SUPAS 2015. Unit analisisnya adalah wanita PUS migran risen ke DIY. Adapun variabel yang digunakan adalah wilayah per kabupaten/kota, umur, tingkat pendidikan, kegiatan seminggu yang lalu, lapangan usaha/bidang pekerjaan utama tempat bekerja selama seminggu yang lalu, tempat tinggal 5 tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang, dan alasan pindah dari tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY: (1) kebanyakan tujuannya di Kabupaten Sleman (32,1%), (2) kelompok umur 25-29 tahun (29,1%), (3) berpendidikan Diploma IV/S1 (25,9%) dan SMA/MA/ sederajat (25,8%), (4) kegiatan seminggu lalu sebagai ibu rumah tangga (97,4%), (5) lapangan usaha kegiatan seminggu lalu di bidang perdagangan (25,1%), (6) tempat tinggal 5 tahun lalu adalah Provinsi Jawa Tengah (40,0%), dan (7) alasan pindah dari tempat tinggal 5 tahun yang lalu adalah ikut suami/orangtua/anak (70,3%).

Kata Kunci: DIY, migran risen, SUPAS 2015, wanita PUS

Pendahuluan

Permasalahan migrasi internal terus dihadapi Indonesia hingga saat ini. Permasalahan migrasi internal adalah terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa. Untuk mengatasi permasalahan terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa, pemerintah telah menetapkan kebijakan. Kebijakan tersebut adalah UU RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, dengan lebih menitikberatkan pada pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi, namun hingga saat ini kebijakan tersebut belum mampu mengatasi permasalahan distribusi penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah migran masuk ke Jawa dibandingkan jumlah migran keluar dari Pulau Jawa. Motif utama migrasi internal adalah alasan ekonomi. Perbedaan upah dan pendapatan antara daerah asal dan daerah tujuan merupakan pendorong migrasi masuk ke Pulau Jawa, khususnya ke provinsi yang mempunyai kesempatan kerja dan upah yang lebih tinggi. Todaro (1988) menyatakan bahwa migrasi internal adalah proses alamiah yang menyalurkan surplus tenaga kerja di desa ke kota dan memungkinkan pergeseran sumberdaya manusia dari lokasi produk marjinal sosial nol ke lokasi produk marjinal sosial positif seiring meningkatnya akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Pada tahun 2000, jumlah penduduk DIY sejumlah 3.120.478 jiwa (SP, 2000). Pada tahun 2015 jumlah penduduk DIY menjadi 3.675.768 jiwa (SUPAS, 2015) atau mengalami peningkatan sebesar 17,8%. Migran masuk ke DIY secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk DIY yang semakin besar. Migrasi penduduk antar propinsi, yaitu menjadi migran risen ke DIY dijadikan solusi sebagian orang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tjiptoherijanto (2000) menyatakan bahwa tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya dengan mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial lebih tinggi di daerah tujuan. DIY dijadikan solusi sebagian orang untuk melakukan migrasi risen dengan berbagai alasan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di DIY karena sektor pendidikan, sektor budaya dan pariwisata, serta pangsa pasar barang dan jasa merupakan penyebab meningkatnya jumlah wanita PUS migran risen ke DIY. Wanita PUS adalah Pasangan Suami Istri yang umur istrinya 15-49 tahun. Sedangkan seseorang akan dikatakan sebagai migran risen menurut BPS, yaitu apabila provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang (pada saat pencacahan).

Jumlah wanita PUS migran risen ke DIY yang semakin meningkat dapat menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan, seperti kepadatan penduduk, lapangan pekerjaan, fertilitas, dan lain-lain. Untuk meminimalisir masalah kependudukan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY. Secara teoritis, kajian karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan kajian tentang migran risen ke DIY. Secara praktis, kajian karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program kependudukan dan KB, sekaligus informasi untuk perencanaan program kependudukan dan KB ke depan.

Kajian Pustaka

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian dalam suatu negara (Munir, 2000 dalam Emalisa, 2003). Migrasi secara operasional dapat diukur menurut ruang dan waktu, seperti yang digunakan dalam Sensus Penduduk. Dalam Sensus Penduduk, seseorang disebut sebagai migran, jika orang tersebut melintasi batas wilayah provinsi dan lamanya bertempat tinggal di daerah tujuan minimal 6 (enam) bulan. Batas wilayah sejak Sensus Penduduk tahun 2000 dikembangkan hingga batas wilayah kabupaten, namun demikian dalam penelitian ini batas wilayah yang digunakan adalah batas wilayah provinsi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 terdapat 3 (tiga) jenis migran antar propinsi, yaitu: (1) migran semasa hidup (*life time migrant*), adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang atau mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di wilayah propinsi tempat kelahirannya, (2) migran risen (*recent migran*), adalah mereka yang pindah melewati batas propinsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pencacahan, dan (3) migran total (*total migrant*), adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. Berdasarkan 3 (tiga) jenis migran tersebut, maka jenis migran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis migran risen (*recent migran*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penduduk untuk bermigrasi dapat disebut sebagai determinan migrasi penduduk. Wolpert dalam Mantra (2003) mengemukakan teori determinan mobilitas penduduk menggunakan pendekatan teori kebutuhan (*need and stress*). Setiap individu mempunyai bermacam-macam kebutuhan, seperti kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi di daerah tempat tinggal mereka maka dapat terjadi tekanan atau stres. Besar kecilnya stres yang dialami seseorang berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan. Stres yang dialami seseorang mempunyai 2 (dua) akibat, yaitu: (1) jika

besarnya stres masih dalam batas-batas toleransi, seseorang tidak akan pindah dari tempatnya, tetapi menyesuaikan kebutuhannya dengan lingkungan yang ada, dan (2) jika besarnya stres sudah di luar batas-batas toleransinya, orang tersebut akan pindah ke daerah lain tempat kebutuhannya dapat terpenuhi.

Todaro dan Smith (2006) yang menggunakan pendekatan ekonomi mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi dari daerah perdesaan ke perkotaan ada 2 (dua), yaitu: (1) adanya perbedaan upah riil yang diharapkan dengan perbedaan aktual upah riil antara daerah perkotaan dan perdesaan, dan (2) kemungkinan seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan sektor modern di perkotaan. Kemungkinan seseorang mendapat pekerjaan di perkotaan berbanding lurus dengan tingkat kesempatan kerja di perkotaan, atau berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan.

Lee (1987) mengemukakan ada 4 (empat) faktor yang perlu diperhatikan dalam studi migrasi penduduk, yaitu: (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, (3) rintangan/penghalang antara, dan (4) faktor-faktor individual. Lee berpendapat bahwa di masing-masing daerah, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan terdapat keanekaragaman kondisi fisik, ekonomi, maupun sosial yang dapat dikategorikan positif (+), negatif (-), dan faktor-faktor netral (0). Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai menguntungkan jika bertempat tinggal di daerah tersebut, misalnya ketersediaan kesempatan kerja, ketersediaan fasilitas pendidikan, maupun iklim yang baik. Faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut. Faktor netral (0) adalah faktor yang tidak berpengaruh sama sekali pada ada tidaknya niat berpindah dari seseorang. Faktor berikutnya adalah rintangan/penghalang antara, bukan hanya dalam artian fisik (seperti tembok Berlin di masa lampau), namun tersedia tidaknya biaya untuk berpindah juga memegang peranan penting. Faktor yang terakhir adalah faktor-faktor individual, bahwa penilaian positif, negatif, atau netral terhadap faktor-faktor tersebut sangat ditentukan oleh individu yang bersangkutan. Diantara keempat faktor tersebut, faktor individu merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan untuk migrasi.

Norris (1972) menambahkan 3 (tiga) komponen migrasi, yaitu: (1) kesempatan antara, (2) migrasi paksaan, dan (3) migrasi kembali. Perbedaan model Lee dengan model Norris terletak pada kesempatan antara (*intervening opportunities*). Berbeda dengan penghalang antara yang cenderung menghambat terjadinya migrasi, maka kesempatan antara justru mendorong seseorang untuk bermigrasi, tempat tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dibelokkan ke tempat tersedianya kesempatan antara. Mantra (2003) memberikan contoh bahwa Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi wilayah kesempatan antara yang terletak antara Kabupaten Pasuruan dengan Kota Surabaya. Untuk meningkatkan pembangunan industri, Surabaya memiliki permasalahan terkait keterbatasan lahan, sehingga untuk pembangunan beberapa industri meluber ke Kabupaten Sidoarjo. Terkait dengan luberan tersebut telah menimbulkan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, tempat permukiman, dan prasarana kota. Kesempatan antara yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo menjadi sasaran pertama dari pekerja migran yang berasal dari daerah burit seperti Pasuruan dan daerah sekitarnya. Jika mereka sudah merasa mapan dalam artian sudah memiliki modal maka mereka akan melompat ke kota yang lebih besar, yaitu tempat memperoleh peluang usaha yang lebih luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil SUPAS 2015 dengan menganalisis karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY. Berdasarkan jenis data yang dipakai, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini unit analisisnya adalah wanita PUS migran risen ke DIY. PUS adalah pasangan usia subur dengan umur 15-49 tahun dan sudah menikah, sedangkan seseorang akan

dikatakan sebagai migran risen menurut BPS, yaitu apabila provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang (pada saat pencacahan).

Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY, dengan indikator: (1) wilayah per kabupaten/kota, (2) umur, (3) tingkat pendidikan, (4) kegiatan seminggu yang lalu, (5) lapangan usaha/bidang pekerjaan utama tempat bekerja selama seminggu yang lalu, (6) tempat tinggal 5 (lima) tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang, (7) alasan pindah dari tempat tinggal 5 (lima) tahun yang lalu.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif. Analisis gambaran umum karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY melalui statistik deskriptif dengan tabel frekuensi.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY berdasarkan data hasil SUPAS 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik wanita PUS migrant risen ke DIY berdasarkan wilayah per kabupaten/kota

Tabel 1. Jumlah wanita PUS migran risen ke DIY menurut wilayah per kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kulonprogo	5.053	11,8
2	Bantul	12.936	30,1
3	Gunungkidul	5.414	12,6
4	Sleman	13.781	32,1
5	Kota Yogyakarta	5.760	13,4
	DIY	42.944	100,0

Sumber: Analisis SUPAS (2015)

Karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY kebanyakan daerah tujuannya di Kabupaten Sleman (32,1%). Hal ini dikarenakan Kabupaten Sleman memiliki beberapa faktor pendukung, antara lain: banyaknya perguruan tinggi ternama di Indonesia, keterdapatan desa wisata alam dan budaya, variasi lapangan pekerjaan, dan adanya pangsa pasar barang dan jasa yang prospektif. Hal ini sesuai dengan teori Todaro (1998), yang menyatakan migrasi dilakukan salah satunya jika dapat memaksimalkan keuntungan.

2. Karakteristik wanita PUS migrant risen ke DIY berdasarkan umur

Tabel 2. Jumlah wanita PUS migran risen ke DIY menurut umur

No	Kelompok umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	15-19	1.178	2,7
2	20-24	9.351	21,8
3	25-29	12.507	29,1
4	30-34	9.575	22,3
5	35-39	5.818	13,5
6	40-44	2.186	5,1
7	45-49	2.329	5,4
	Total	42.944	100,0

Sumber: Analisis SUPAS (2015)

Wanita PUS migran risen ke DIY kebanyakan berada pada kelompok umur muda, yaitu 25-29 tahun (29,1%). Usia muda akan mempengaruhi motivasi wanita PUS untuk bermigrasi, baik karena sudah terikat pernikahan, ingin memperoleh kesempatan kerja lebih baik, ingin memperoleh pengalaman di daerah tujuan, maupun untuk melanjutkan studi kejenjang pendidikan lebih tinggi.

3. Karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 3. Jumlah wanita PUS migran risen ke DIY menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan tertinggi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidakpunyaijazah SD	1.091	2,5
2	SD/MI/ sederajat	2.000	4,7
3	SMP/MTS/ sederajat	7.713	18,0
4	SMA/MA/ sederajat	11.026	25,8
5	SM kejuruan	6.541	15,3
6	Diploma I/II	370	0,9
7	Diploma III	1.951	4,6
8	Diploma IV/S1	11.068	25,9
9	S2/S3	1.050	2,5
	Total	42.810	100,0

Sumber: Analisis SUPAS (2015)

Keterangan: 134 orang belum/tidak pernah sekolah

Wanita PUS migran risen ke DIY kebanyakan berpendidikan Diploma IV/S1 (25,9%) dan SMA/MA/ sederajat (25,8%). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sri Rum Giyarsih, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa migran di Kabupaten Sleman proporsi terbesar berpendidikan diploma-sarjana yaitu 47,7% dan diikuti pendidikan tamat SLTA yaitu 35,7%. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan keinginan untuk bermigrasi. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan cenderung lebih banyak melakukan migrasi dari pada mereka yang berpendidikan lebih rendah (Lincoln, 1999). Turner (1975) dalam Yunus (2008) juga menjelaskan bahwa pendatang yang menyerbu wilayah pinggiran kota adalah kaum migrant dengan status sosial ekonomi lebih baik termasuk memiliki tingkat pendidikan tinggi. Infrastruktur dan kesempatan yang lebih baik dari daerah asal membuat wanita PUS memilih menjadi migran risen ke DIY untuk bekerja dan memperoleh pendapatan lebih baik, sekaligus menyekolahkan anaknya di DIY yang merupakan kota pelajar.

4. Karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY berdasarkan kegiatan seminggu yang lalu

Tabel 4. Jumlah wanita PUS migran risen ke DIY yang melakukan kegiatan seminggu yang lalu

No	Kegiatan seminggu yang lalu	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Bekerja	18.793	43,9
2	Sekolah	1.193	2,8
3	Iburumahtangga	41.706	97,4
4	Lainnya	23.354	54,6

Sumber: Analisis SUPAS (2015)

Kegiatan seminggu lalu yang dilakukan wanita PUS migrant risen adalah variatif. Berdasarkan kegiatan seminggu yang lalu yang dilakukan adalah bekerja (43,9%), sekolah (2,8%), menjadi ibu rumah tangga (97,4%), dan lainnya (54,6%). Kegiatan seminggu yang lalu didominasi sebagai ibu

rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan alasan wanita PUS menjadi migran risen ke DIY karena mengikuti suami.

5. Karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY berdasarkan lapangan usaha/bidang pekerjaan utama tempat bekerja selama seminggu yang lalu

Tabel 5. Jumlah wanita PUS migran risen ke DIY menurut lapangan usaha/bidang pekerjaan utama tempat bekerja selama seminggu yang lalu

No	Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama tempat bekerja selama seminggu yang lalu	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pertanian	1.273	6,6
2	Industri	3.313	17,3
3	Konstruksi	222	1,2
4	Perdagangan	4.814	25,1
5	Transportasi	102	0,5
6	Akomodasi	2.717	14,2
7	Jasa keuangan	389	2,0
8	Real estate	18	0,1
9	Jasa perusahaan	116	0,6
10	Administrasi	675	3,5
11	Jasa pendidikan	1.750	9,1
12	Jasa kesehatan	2.313	12,1
13	Jasa lainnya	1.484	7,7
	Total	19.186	100,0

Sumber: Analisis SUPAS (2015)

Wanita PUS migran risen yang bekerja, kebanyakan lapangan usaha kegiatan seminggu

Yang lalu adalah di bidang perdagangan (25,1%). DIY merupakan kota pelajar, kota budaya serta pariwisata sehingga di DIY banyak dijumpai pelajar/mahasiswa yang studi lanjut serta banyak dijumpai wisatawan domestik/mancanegara yang berkunjung. Kondisi ini dapat dimanfaatkan wanita PUS untuk beraktivitas di bidang perdagangan dengan tujuane konomi.

6. Karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY berdasarkan tempat tinggal 5 (lima) tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang

Tabel 6. Jumlah wanita PUS migran risen ke DIY menurut tempat tinggal 5 (lima) tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang

No	Tempat tinggal 5 (lima) tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Aceh	298	0,7
2	Arab Saudi	111	0,3
3	Bali	254	0,6
4	Banten	1.674	4,1
5	Bengkulu	140	0,3
6	DKI Jakarta	2.979	7,3
7	Hongkong	264	0,6
8	Italia	221	0,5

9	Jambi	632	1,5
10	Jawa Barat	6.776	16,6
11	Jawa Tengah	16.382	40,0
12	Jawa Timur	2.892	7,1
13	Jepang	182	0,4
14	Kalimantan Barat	455	1,1
15	Kalimantan Selatan	419	1,0
16	Kalimantan Tengah	277	0,7
17	Kalimantan Timur	222	0,5
18	Kalimantan Utara	222	0,5
19	Kepulauan Riau	171	0,4
20	Lampung	1.255	3,1
21	Malaysia	1.869	4,6
22	Maluku Utara	98	0,2
23	Nusa Tenggara Barat	306	0,7
24	Nusa Tenggara Timur	171	0,4
25	Papua	744	1,8
26	Papua Barat	95	0,2
27	Riau	77	0,2
28	Singapura	128	0,3
29	Sulawesi Selatan	307	0,8
30	Sumatera Barat	28	0,1
31	Sumatera Selatan	1.002	2,4
32	Sumatera Utara	158	0,4
33	Taiwan	123	0,3
	Total	40.932	100,0

Sumber: Analisis SUPAS (2015)

Tempat tinggal 5 tahun yang lalu wanita PUS migran risen ke DIY adalah Provinsi Jawa Tengah (40,0%). Jarak yang relative dekat antara Jawa Tengah dan DIY menjadikan DIY lebih menarik dijadikan solusi wanita PUS untuk melakukan migrant risen ke DIY, selain factor kesamaan budaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyadi (2003) yang menjelaskan bahwa jarak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi migrasi antar provinsi di Indonesia, selain factor tingkat pengangguran, tingkat upah, proporsi penduduk daerah perkotaan, dan lain-lain.

7. Karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY berdasarkan alasan pindah dari tempat tinggal 5 (lima) tahun yang lalu

Tabel 7. Jumlah wanita PUS migran risen ke DIY menurut alasan pindah dari tempat tinggal 5 (lima) tahun yang lalu

No	Alasan pindah dari tempat tinggal 5 (lima) tahun yang lalu	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pekerjaan	3.474	8,1
2	Mencari pekerjaan	957	2,2
3	Pendidikan	1.199	2,8
4	Perubahan status perkawinan	2.357	5,5
5	Ikut suami/orangtua/anak	30.198	70,3
6	Ikut saudara kandung/family lain	278	0,6
7	Perumahan	1.375	3,2

8	Lainnya	3.106	7,2
	Total	42.944	100,0

Sumber: Analisis SUPAS (2015)

Alasan wanita PUS migran risen ke DIY kebanyakan adalah ikut suami/orangtua/anak (70,3%). Hal ini sesuai dengan teori Todaro (1998) yang menjelaskan bahwa migran wanita di negara berkembang salah satunya adalah tipe migrasi wanita sebagai pengikut. Kelompok migran ini terdiri dari para istri dan anak-anak perempuan yang mengikuti migran utama yaitu laki-laki yang menjadi suami atau ayah mereka.

Kesimpulan

Karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY, yaitu kebanyakan tujuannya di Kabupaten Sleman (32,1%), kelompok umur 25-29 tahun (29,1%), berpendidikan Diploma IV/S1 (25,9%) dan SMA/MA/ sederajat (25,8%), kegiatan seminggu lalu sebagai ibu rumah tangga (97,4%), lapangan usaha kegiatan seminggu lalu di bidang perdagangan (25,1%), tempat tinggal 5 (lima) tahun lalu adalah Provinsi Jawa Tengah (40,0%), dan alasan pindah dari tempat tinggal 5 (lima) tahun lalu adalah ikut suami/orangtua/anak (70,3%).

Untuk meminimalisir permasalahan kependudukan terkait karakteristik wanita PUS migran risen ke DIY beberapa rekomendasi yang diberikan, antara lain: (1) penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi wanita PUS migran risen ke DIY yang kebanyakan berpendidikan tinggi, (2) pengembangan program kemitraan dengan pelaku dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja, khususnya wanita PUS migran risen ke DIY, dan (3) program pemberdayaan wanita PUS migran risen ke DIY dalam usaha ekonomi produktif yang didukung oleh infrastruktur, management, akses permodalan, dan pemasaran.

Referensi

- BPS. 2000. *Sensus Penduduk*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2015. *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)*. Jakarta: BPS.
- Emalisa. 2003. *Pola dan Arus Migrasi di Indonesia*. Sumatera Utara: USU Digital Library.
- Lee, E.S. 1987. *Suatu Teori Migrasi (Terjemahan)*. Yogyakarta: PPK Universitas Gadjah Mada.
- Lincoln, Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi SDM Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Norris, R.E. 1972. Migration as Spatial Interaction. *Journal of Geography*, 71 (5).
- Sri Rum Giyarsih, Kanthi Aryekti, Muhammad Arif Fahrudin Alfana. 2015. Studi Komparatif Fertilitas Penduduk Migran dan Non Migran di DIY (Kasus di Kabupaten Sleman). *Laporan Penelitian*. Penelitian Kerjasama Fakultas Geografi UGM dan BKKBN DIY.
- Tjiptoherijanto, P. 2000. Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi. *Diakses tanggal 15 Oktober 2016, dari* <http://www.bapennas.go.id>.
- Todaro, M.P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian*.
- Yunus, H.S. 2008. *Dinamika Wilayah Peri Urban, Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bonus Demografi dan Bela Negara

Eggy Armand Ramdani, Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas
Pertahanan, E-mail: eggy.ramdani@mp.idu.ac.id

Indriana Sulistyowarni, Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas
Pertahanan, E-mail: indriana.sulistyowarni@mp.idu.ac.id

Supandi, Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, E-mail:
supandi@idu.ac.id

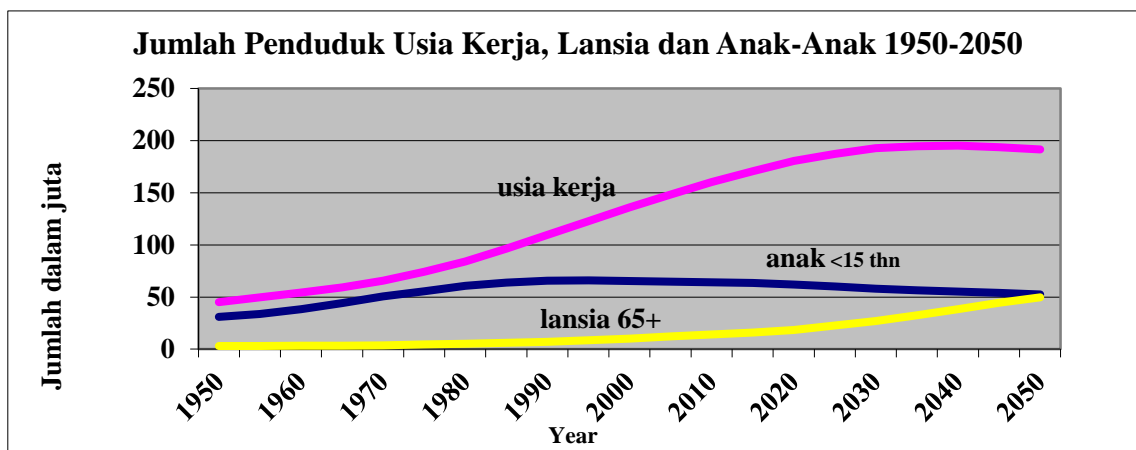
Abstrak

Indonesia tengah menikmati bonus demografi. Jumlah usia produktif yang dominan harus dijadikan sebuah peluang guna menghadapi tantangan persaingan global yang semakin kompetitif. Salah satu permasalahan yang muncul bagi usia produktif ini adalah semangat cinta tanah air dan bela negara. Turunnya semangat kebangsaan ini telah menjadi sorotan banyak tokoh Indonesia. Trauma akan program doktrinasi Pancasila era Orde Baru turut berkontribusi terhadap nilai-nilai kebangsaan yang luntur di generasi muda. Sebagai salah satu upaya penguatan kembali semangat Indonesia ini, perlu dilakukan upaya masif dari seluruh komponen bangsa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara dan pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis guna menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam menanamkan semangat cinta tanah air dan bela negara guna memaksimalkan peluang bonus demografi Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan nilai Pancasila cukup baik, namun memiliki beberapa kekurangan. Gaya penyampaian penanaman nilai Pancasila perlu dimodifikasi agar tidak terpaku pada ruang kelas yang terbatas. Pendekatan penanaman rasa cinta tanah air dan bela negara selain berfokus pada pemahaman nilai juga diarahkan dengan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan pemberian contoh nyata (role model) dalam masyarakat.

Kata Kunci: Bela Negara, Demografi, Pancasila, Pertahanan Negara

Pendahuluan

Indonesia tengah menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia kerja jauh melebihi usia lansia dan anak-anak. Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja mencapai 170,8 juta orang atau setara dengan 68,21% dari total jumlah penduduk. Bonus demografi ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan tetap berada pada posisi tinggi hingga 100 tahun Indonesia merdeka.



Sumber: BPS, UN World Population Prospects

Gambar 1. Jumlah Penduduk Usia Kerja, Lansia dan Anak-Anak 1950-2050

Jumlah usia produktif yang dominan tersebut menghadirkan sebuah kesempatan besar yang disebut dengan *the window of opportunity* (WO). Jendela peluang ini hadir sebagai efek besarnya jarak antara penduduk usia produktif dan usia non-produktif. Jendela peluang tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat empat keuntungan langsung dari bonus demografi tersebut, yakni: (1) suplai tenaga kerja yang besar sehingga meningkatkan pendapatan per kapita apabila mendapat kesempatan kerja yang produktif; (2) peranan perempuan dengan jumlah anak sedikit, memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja untuk membantu peningkatan pendapatan; (3) tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif; dan (4) *human capital* yang besar apabila terdapat investasi tepat (Adioetomo, 2018)

Namun, sebagai sebuah peluang besar, bonus demografi muncul dengan sejumlah masalah. Berdasarkan tinjauan Trigatra Geopolitik Indonesia, maka demografi merupakan salah satu gatra yang memiliki potensi ancaman. Trigatra tersebut meliputi:

Tabel 1. Potensi Ancaman Ditinjau dari Trigatra Geopolitik

TRI GATRA	POTENSI ANCAMAN
Geografis	<ul style="list-style-type: none"> • Perbatasan yang pengawasannya belum maksimal • Kejelasan hukum garis batas teritori negara
Demografi (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Lonjakan jumlah penduduk • Pembangunan tidak merata dan mudahnya imigran ilegal memasuki wilayah Indonesia • <i>Westernisasi</i> akibat globalisasi • Kurangnya pengawasan mutu melalui kualitas pendidikan karakter dan formal
Sumber Kekayaan Alam (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi minyak dan tambang oleh investor asing • <i>Illegal logging</i> pada sumber daya hutan • Efek rumah kaca yang semakin meningkat

Potensi ancaman bagi negara dengan adanya bonus demografi karena dengan bertambahnya penduduk (lonjakan penduduk), apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan menimbulkan peningkatan angka pengangguran dan berpotensi bertambahnya angka kriminalitas. Ketersediaan ruang untuk hidup semakin menyempit, persaingan ekonomi meningkat, menjadikan timbulnya golongan-golongan mayoritas dan minoritas (dari segi kekayaan hingga menguatkan eksistensi oligarki ekonomi-sebaran kekayaan tidak merata), sehingga mengancam kestabilan ekonomi dan persebaran penduduk. Potensi ancaman lain dari adanya demografi adalah pembangunan yang tidak merata serta mudahnya *illegal migrant* masuk ke wilayah Indonesia, *westernisasi* akibat globalisasi dan kurangnya pengawasan mutu melalui kualitas pendidikan karakter dan formal.

Selain itu, masalah fundamental yang tak terlihat adalah semangat cinta tanah air dan bela negara. Turunnya semangat kebangsaan ini telah menjadi sorotan banyak tokoh Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengagendakan pelaksanaan seminar di berbagai kota di Indonesia dengan fokus penanaman 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak jauh-jauh hari. Presiden RI, Joko Widodo bahkan membentuk secara khusus badan pelaksana tingkat pusat dengan nama Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang berisikan para tokoh bangsa guna membantu presiden merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Penanaman nilai-nilai Pancasila juga terkendala trauma sejarah program doktrinasi Pancasila era Orde Baru. Doktrinasi Pancasila dengan satu tafsir ini berkontribusi terhadap menjauhnya nilai-nilai kebangsaan yang luntur di generasi muda. Hal ini jika terus dibiarkan akan memberikan kontribusi perubahan *the window of opportunity* menjadi *the door to disaster*.

Sebagai salah satu upaya penguatan kembali semangat Indonesia ini, perlu dilakukan upaya masif dari seluruh komponen bangsa. Sebagai ikhtiar menanamkan kembali ciri khas ke-Indonesia-an tersebut, Kementerian Pertahanan mencanangkan program Pendidikan Bela Negara bagi masyarakat Indonesia.

Kajian Pustaka

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara dan pertahanan negara.

Teori Negara

Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Pengertian lebih komprehensif terkait negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka (Huala, 1991).

Negara memiliki 4 unsur utama, yakni wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Negara berdaulat atas keempat unsur tersebut. Kedaulatan (*sovereign*) dalam bernegara adalah hal utama. Hal ini berkaitan bahwa kedudukan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kedaulatan negara menggambarkan posisinya sebagai subjek hukum internasional (*legal personality of a state*). Kedaulatan bermakna kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan kekuasaan berakhir dimana kekuasaan negara lain dimulai. Kedaulatan memberikan akses pada negara untuk membina hubungannya dengan negara lain (Kusumaatmadja & Agoes, 2003).

Negara memiliki tiga fungsi, yakni: (1) fungsi legislasi, membuat undang-undang; (2) fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang; dan (3) fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati. Ketiga fungsi tersebut digunakan di hampir seluruh negara di dunia yang dikenal dengan *trias politika* (Soetomo, 1986).

Teori Pertahanan Negara

Ilmu pertahanan adalah studi tentang cara, makna tentang bagaimana dan mengapa terkait militer dan kepentingan politik negara. Perhatian ilmu pertahanan tidak hanya membahas ilmu dan seni perang saja pada saat terjadi perang, namun juga mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional guna menghadapi ancaman (Supriatno, 2014).

Indonesia menganut sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta), dimana pertahanan negara dilakukan bukan saja oleh alat negara (tentara), melainkan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, perihal keikutsertaan dalam bela negara disinggung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 2, yakni: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Pembangunan pertahanan negara berpedoman kepada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang dilegalisasi oleh Presiden. Rencana strategis pembangunan bidang pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan

pentahapan perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan. Pembangunan Postur Pertahanan Negara Tahap I pada tahun 2010-2014, Tahap II pada tahun 2015-2019 dan Tahap III pada tahun 2020-2024. Pembangunan Postur Pertahanan Negara memperhatikan berbagai tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar yang timbul (Kemhan, 2015).

Guna mengimplementasikan konsep Sishanta tersebut, Indonesia memiliki program Bela Negara bagi seluruh rakyatnya. Bela negara merupakan gabungan dari dua kata, bela yang bermakna menjaga baik-baik dan negara yang berarti organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat (Poerwadarminta, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa bela negara adalah upaya guna menjaga organisasi terbesar dari kumpulan rakyat.

Bela negara dalam konteks Indonesia diartikan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (Penjelasan UU No. 03 Tahun 2002).

Berdasarkan UU tersebut, maka sebagai warga negara, masyarakat dapat memilih bentuk bela negara yang sesuai dengan dirinya dan profesi yang sedang dijalankan. Sebagai upaya mempersiapkan kader bela negara terdapat 5 nilai bela negara yang diimplementasikan, yakni:

1. Cinta Tanah Air

Cinta tanah air adalah bentuk bela negara dengan mensyukuri, melestarikan dan menjaga tanah air Indonesia sebagai tempat berpijak setiap anak bangsa. Pada kenyataannya tanah air sebagai ruang hidup suatu bangsa tidak pernah lepas dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sehingga setiap warga Negara harus selalu siap untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia.

2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya, tumbuh rasa kesatuan, persatuan bangsa Indonesia, memiliki jiwa besar dan patriotisme serta memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai Warga Negara.

3. Yakin akan Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa.

Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan Ideologi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara guna tercapainya tujuan nasional. Pancasila juga menjadi sumber hukum sekaligus sebagai kerangka acuan NKRI yang mempersatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari beranekaragam agama, suku bangsa, bahasa, asal-usul keturunan. Keyakinan ini harus tertanam dalam hati agar tidak termakan hasutan pihak-pihak yang berusaha untuk memecah belah bangsa. Nilai-nilai Pancasila dapat pula dipergunakan dalam penyelesaian konflik, mematahkan setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap keutuhan bangsa berdasarkan kaidah Demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong.

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Sebagai sebuah kesatuan bangsa, seluruh warga Negara di tuntut rela berkorban dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/golongan. Hal ini diperlukan, karena tidak mungkin cita-cita bangsa dapat diraih apabila setiap warga Negara Indonesia hanya mendahulukan kepentingan pribadi/golongan saja tanpa lebih mementingkan kepentingan Bangsa dan Negara.

5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Secara psikis, setiap warga Negara dituntut untuk memiliki sikap perilaku disiplin, ulet, kerja keras, taat aturan, percaya pada kemampuan sendiri, tahan uji, pantang menyerah.

Sedangkan secara fisik (jasmani) memiliki kesehatan prima dan tangkas hal tersebut sejalan dengan pepatah kuno yaitu dalam badan sehat terdapat jiwa yang kuat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yakni penelitian suatu objek, suatu set kondisi ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2013). Penelitian ini menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam menanamkan semangat cinta tanah air dan bela negara guna memaksimalkan peluang bonus demografi Indonesia.

Objek penelitian ini adalah program pendidikan bela negara yang dilakukan oleh Pemerintah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013). Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis bahan-bahan pustaka terkait materi pendidikan bela negara, laporan-laporan program pendidikan bela negara dan sumber-sumber lain yang terkait.

Analisis data penelitian kualitatif menggunakan logika induktif abstraktif, yakni logika yang bertitik tolak dari khusus ke umum, oleh sebab itu, proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan. Proses tersebut berupa siklus, bukan linear (Faisal, 2007). Guna melakukan analisis atas program pendidikan bela negara dan capaiannya digunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Teknik ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Proses analisis data tersebut meliputi *data condensation*, *data display* dan *conclusion drawing* (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional, regional maupun global telah memberikan tantangan nyata bagi Indonesia sebagai sebuah negara. Revolusi industri 4.0 yang menghadirkan dunia tanpa batas menghadirkan akses setiap orang dapat melintasi *tembok besar perbatasan negara*. Kebudayaan dan faham dapat dengan cepat berpindah dan menyebar dalam sebuah komunitas, asimetris dan kadang kala tak memiliki bentuk namun berdampak besar.

Sebagai upaya pertahanan negara, Pemerintah telah menyadari bahwa pertahanan negara dewasa ini tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi harus pula membangun pertahanan nirmiliter. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa ancaman yang dapat berupa ancaman militer, nonmiliter dan *hybrida*. Ancaman nonmiliter dan *hybrida* inilah yang menempatkan seluruh komponen bangsa dalam membangun pertahanan nirmiliter.

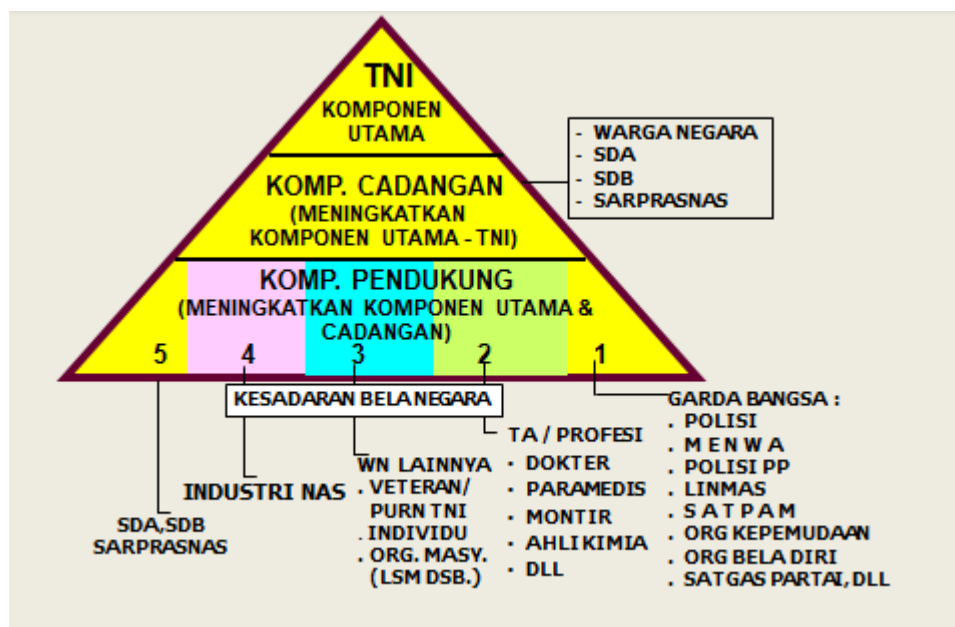
Salah satu upaya membangun pertahanan nirmiliter adalah pelibatan seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya pertahanan negara. Buku Putih Pertahanan Negara maupun Kebijakan Umum Pertahanan Negara telah menegaskan bahwa salah satu upaya pembangunan tersebut adalah pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakumhaneg 2015-2019).

Pelaksana program pendidikan bela negara adalah Kementerian Pertahanan dibantu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Program pendidikan bela negara dilakukan secara

masif dan terencana selama masa pembangunan jangka menengah 2015-2019. Bahkan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu tak segan memberikan target terciptanya 100 juta kader bela negara.

Program pendidikan bela negara yang dilakukan Indonesia berbeda dengan negara lain. Pendidikan bela negara tidak dimaknai sebagai Wajib Militer sebagaimana terjadi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, Israel, Finlandia dan negara lainnya. Hal ini berbeda pula dengan Wajib Militer yang dilaksanakan Indonesia pada masa lampau. Pendidikan bela negara diarahkan sebagai program penanaman nilai-nilai Pancasila, karakter bangsa, cinta tanah air, dan kemampuan awal bela negara.

Pendidikan bela negara adalah upaya membangun sistem pertahanan semesta di Indonesia. Indonesia memetakan kekuatan pertahanan negara terdiri dari 3 lapis pertahanan, yakni komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama menghadirkan TNI sebagai barisan terdepan dalam menghadapi ancaman militer. Sedangkan komponen cadangan dan komponen pendukung terdiri dari seluruh sumber daya nasional yang membantu pertahanan militer dan menjadi barisan paling depan menghadapi ancaman non militer. Berikut adalah ilustrasi sistem pertahanan Indonesia:



Sumber: (Yusgiantoro, 2014)
Gambar 1 Sistem Pertahanan Negara

Pendidikan bela negara yang dilakukan Kementerian Pertahanan sudah menunjukkan kemajuan berarti. Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana program telah membangun Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Bela Negara yang berkedudukan di Rumpin, Bogor. Pusdiklat dibangun di atas lahan seluas 21,33 hektar dengan berbagai fasilitas dan sarana prasarana meliputi Kantor, Mess/Barak dengan kapasitas 264 orang siswa putra dan 96 orang siswa putri, Kelas Lapangan, Aula Serba Guna, Montenering, Lapangan Sepakbola, Poliklinik, Masjid, Rumah Dinas, Rumah Makan dan Dapur. Pusdiklat Bela Negara merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara terpusat dan tersebar serta melaksanakan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan Kader Muda Bela Negara, Kader Bela Negara, Pembina Bela Negara, dan Pelatih Inti Bela Negara. Pusdiklat bela Negara berada di bawah naungan Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan RI (Kemhan, 2017).

Pembangunan Pusdiklat Bela Negara adalah wujud keseriusan Kementerian Pertahanan dalam mencapai target terciptanya 100 juta kader bela negara untuk kurun waktu 10 tahun sejak 2015 (Kemhan, 2015). Pusdiklat bela negara secara bertahap akan terus melakukan pendidikan bela negara bagi warga Indonesia secara terpusat.

Selain melakukan Pendidikan di Pusdiklat Bela Negara Rumpin, pendidikan bela negara juga dilakukan menyebar di berbagai instansi maupun lembaga. Hal ini sesuai dengan arah pembangunan kekuatan pertahanan dengan pendidikan bela negara terintegrasi di semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan komponen bangsa lainnya. Kementerian Pertahanan telah melakukan kerjasama dengan hampir seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam program pendidikan bela negara.

Sedangkan kerjasama Kementerian Pertahanan dengan komponen bangsa lain telah ditunjukkan melalui kerjasama pendidikan bela negara bagi pihak BUMN maupun swasta. Beberapa BUMN dan swasta yang telah menjali kerjasama tersebut ialah Bank Mandiri, BNI, BPJS Kesehatan, PT Petra Arun Gas, dan lainnya.

Pendidikan bela negara di lembaga pendidikan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Dikti, maupun Kementerian Agama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi kegiatan bela negara di sekolah-sekolah. Kementerian Riset dan Teknologi memfasilitasi pendidikan bela negara di perguruan tinggi sebagai bagian dari program orientasi mahasiswa baru. Adapun Kementerian Agama melakukan pendidikan bela negara di lingkungan madrasah, pendidikan tinggi Islam dan lingkungan pondok pesantren.

Selain Pusdiklat Kementerian Pertahanan, pelaksana pendidikan bela negara juga dilakukan oleh pusat pendidikan (pusdik) TNI tiap matra, dan satuan teritori maupun pangkalan TNI masing-masing matra yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Secara khusus, di tingkat perguruan tinggi, Universitas Pertahanan, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, dan UPN Veteran Jawa Timur telah menggunakan *tagline* kampus bela negara, dimana secara otomatis seluruh mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut akan menerima pendidikan dan menjadi kader bela negara.

Sebagai hasil dari sinergi di atas, sebagaimana rilis Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, pada tahun 2017 jumlah kader bela negara telah mencapai 74,3 juta orang. Pencapaian tersebut bermula dari telah dilaksanakannya pendidikan bela negara bagi 67 juta kader bela negara, sebelum program pendidikan bela negara dibuat secara khusus dan diresmikan Kementerian Pertahanan. Hal ini berarti sudah tercapai 74,3% dari target kader bela negara pada tahun 2025.

Adapun materi pendidikan bela negara dilakukan disesuaikan dengan tiga sasaran peserta, yakni pendidikan bela negara di lingkungan pendidikan (lingdik), lingkungan kerja (lingja), dan lingkungan pemukiman (linkim). Pendidikan dilaksanakan selama 5 hari dengan 50 jam pelajaran untuk kader muda, kader dan pembina bela negara. Sedangkan untuk pelatih inti, pendidikan dilaksanakan selama 1 bulan dengan 210 jam pelajaran. Jumlah jam pelajaran untuk lingdik pada tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta.

Pendidikan bela negara dilaksanakan dengan mengkombinasikan pendidikan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Pendidikan di dalam ruangan menghadirkan pengetahuan tentang cinta tanah air, karakter bangsa, makna bela negara dan sejarah Indonesia. Sedangkan pendidikan di luar ruangan meliputi latihan baris berbaris, dasar-dasar *survival*, *mountainering*, bela diri, upacara bendera, dan dasar-dasar militer lainnya.

Hal-hal yang menjadi perbaikan bagi program pendidikan ini adalah gaya penyampaian penanaman nilai Pancasila perlu dimodifikasi. Pancasila yang merupakan ideologi negara tidak hanya cukup untuk disampaikan di ruang kelas. Kombinasi dari pendidikan di dalam ruangan dan contoh

nyata dalam aplikasi kehidupan Pancasila sangat dibutuhkan dalam menanamkan Pancasila bagi para kader bela negara. *Role model* bela negara harus dihadirkan guna memberikan contoh nyata bagi para kader dalam aplikasi bela negara. Pemilihan Duta Bela Negara yang kini dilakukan Kementerian Pertahanan, baik duta pada tingkat nasional maupun wilayah, diharapkan diberikan pada sosok yang benar-benar merepresentasikan sosok kader bela negara yang sesungguhnya. Upaya untuk menjadikan pesohor sebagai kader bela negara, tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi mengutamakan integritas dan pemahaman atas Pancasila sebagai ideologi negara.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan nilai Pancasila cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sudah tersedianya Pusdiklat Bela Negara sebagai sarana pendukung utama pendidikan bela negara yang representatif disamping dukungan lembaga pendidikan TNI tiap matra, dan satuan teritori maupun pangkalan TNI masing-masing matra yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kader bela negara telah mencapai 74,3% dari target 100 juta kader bela negara pada tahun 2025. Beberapa hal yang menjadi bahan perbaikan adalah gaya penyampaian penanaman nilai Pancasila, rasa cinta tanah air dan bela negara, selain berfokus pada pemahaman nilai juga diarahkan dengan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan pemberian contoh nyata (*role model*) dalam masyarakat.

Referensi

- Adioetomo, S. M. 2018. Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanapiah Faisal. 2007. Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huala, A. 1991. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. Postur Pertahanan Negara. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.
- Miles, M, A. Hubberman, & J. Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. New York : Sage Publication.
- Nazir, M. 2013. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
- Poerwadaminta, W. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soetomo. 1986. Ilmu Negara. Surabaya: Usaha Nasional.
- Supriatno, M. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Yusgiantoro, P. 2014. Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gerakan Komunitas *Pra-Lansia* (*KOPRAL*) dalam Meminimalisir Masalah Sosial Lansia di Era Bonus Demografi

Ferina Fitri Nofitasari. Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga. Ferinafitri9@gmail.com

Ana Ulifa. Sosiologi. FISIP, Universitas Airlangga. Anaulifa432@gmail.com

Diyah Aprilia Susanti. Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga. Diyahap42@gmail.com

Abstrak

Indonesia di prediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2028-2031, dikatakan bonus demografi karena pada masa itu Indonesia akan mengalami pertumbuhan penduduk pada usia produktif (15-64, tahun) itu artinya jumlah penduduk yang siap bekerja lebih banyak dibandingkan dengan proporsi penduduk usia yang tidak bekerja atau non-produktif. Indonesia akan mengalami keuntungan jika dapat memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, seperti roda perputaran perekonomian akan meningkat sehingga angka ketergantungan penduduk akan semakin rendah. Sebaliknya akan mengalami kebuntuan jika tidak dapat memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, sehingga akan memicu munculnya masalah demografi seperti pengangguran, kemiskinan dan masalah lansia yang semakin bertambah. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan menggunakan metode studi pustaka dengan metodologi kepustakaan, pengamatan empiris dengan menekankan pada kekuatan analisis dari sumber-sumber data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data literatur agar dapat diperoleh sebuah pemecahan masalah, berupa perancangan program wirausaha makanan khusus lansia yang efektif dan efisien serta dinilai dapat memberdayakan pra-lansia sebelum memasuki usia lansianya. Teori yang digunakan sebagai acuan adalah Teori Modal Sosial dari Robert Putnam, sebagai solusi pemecahan masalah tersebut ditawarkan pembentukan **Gerakan "KOPRAL" (Komunitas Pra-Lansia) Dalam Meminimalisir Masalah Sosial Lansia Di Era Bonus Demografi**. Sehingga beberapa program yang di usulkan dalam gerakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir masalah sosial lansia di era puncak bonus demografi tahun 2028-2031, seperti bank sampah, program wirausaha makanan khusus lansia (umbi-umbian dll), penyuluhan dan pendampingan hidup sehat, serta penanaman pola pikir untuk menjadi lansia yang mandiri, tangguh, dan sejahtera. Dari gerakan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pra-lansia dalam menghadapi masa lansianya yang sejahtera dan bahagia, dengan kata lain menjadikan pra-lansia menjadi lebih mandiri.

Kata Kunci : Bonus demografi, gerakan, masalah sosial lansia

Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang memasuki suatu tahapan atau era yang sangat krusial dan menentukan dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa yang juga berada dalam masa pembangunan. Era krusial ini sering disebut sebagai bonus demografi, yang saat ini sudah dimulai dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2040. (Adietomo dan Pardede, 2018) Bonus demografi ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif dengan rentang usia (15-64 tahun) atas jumlah penduduk tidak produktif yang bisa dilihat dari angka rasio ketergantungan yang rendah. Rasio ketergantungan sendiri merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dan jumlah penduduk usia produktif. Dikatakan sebagai "bonus" karena kondisi ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dan tidak bertahan lama.

Oleh karena itu, bonus demografi dapat dijadikan suatu peluang untuk mendatangkan keuntungan yang besar bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui persiapan yang cukup matang serta investasi yang tepat, bonus demografi dapat mengubah masa depan bangsa yang sedang berkembang menjadi lebih baik, dan sejahtera dengan cara mengoptimalkan sumber daya manusia terutama penduduk yang berusia produktif.

Dalam hal ini bonus demografi menyebabkan piramida penduduk yang awalnya didominasi penduduk dibawah usia 15 tahun, namun saat ini berubah dan didominasi oleh penduduk usia produktif sehingga dengan demikian akan menambah jumlah pekerja yang menyebabkan angka ketergantungan berada dibawah 50%. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan kecenderungan bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia terlihat sangat signifikan. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai dampak dari semakin meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia, yang merupakan wujud dari keberhasilan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sosial dan terutama di bidang kesehatan (Wirawan dkk., 2010). Angka harapan hidup seseorang yang sebelumnya hanya mencapai 50 tahun meingkathampir lebih dari 71 tahun. Pembangunan sarana dan prasarana seperti rumah sakit, pelayanan kesehatan, pendidikan dan status gizi penduduk meningkat sehingga menyebabkan angka harapan hidup (*life expectancy at birth*) juga mengalami peningkatan.

Di Indonesia jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) terus mengalami perkembangan yang signifikan. Data sensus penduduk pada tahun 1971 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia yang masuk kategori lanjut usia masih sekitar 4,5% atau sekitar 5,3 juta jiwa. Pada saat yang sama jumlah balita masih sekitar 16,1%. Akan tetapi pada tahun 2000 jumlah penduduk usia lanjut sudah mencapai 3 kali lipat yakni sekitar 14,4 juta jiwa atau 7,18%. Sedangkan pada tahun 2010 penduduk lanjut usia meningkat sekitar 23,9 juta jiwa atau sekitar 9,77% dengan harapan hidup 67,4 tahun dan pada tahun 2020 diprediksi lansia akan meningkat menjadi 28,8 juta jiwa atau sekitar 11,34% dengan angka harapan hidup 71,1 tahun (Menko Kesra, 2008 dalam Effendi & Makhfudli, 2013).

Bonus demografi yang dialami Indonesia dapat mendatangkan keuntungan jika dimanfaatkan dengan baik dan benar. Pada era bonus demografi jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk non-produktif. Jumlah penduduk tersebut menjadikan angka ketergantungan Indonesia rendah, yakni dibawah 50%. Sebaliknya kondisi tersebut dapat mendatangkan kerugian jika penduduk usia produktif tidak bekerja atau menganggur. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai permasalahan pada lansia, seperti masalah ekonomi, kesehatan, psikologi, dan juga masalah sosial. Dengan kata lain jika penduduk usia produktif tidak bekerja maka lansia akan kehilangan tempat untuk bergantung. Sebagai upaya untuk meminimalisir kondisi tersebut peneliti mengajukan solusiyaitu, pembentukan kelompok pra lansia. Pembentukan kelompok tersebut difokuskan untuk mempersiapkan penduduk pra lansia dalam menghadapi kehidupan lansia dengan memberikan pemberdayaan dan pelatihan. Diharapkan dengan adanya komunitas tersebut menjadikan penduduk pra lansia lebih mandiri dan mengurangi beban ketergantungan ketika memasuki masa lansianya.

Kajian pustaka

Teori modal sosial

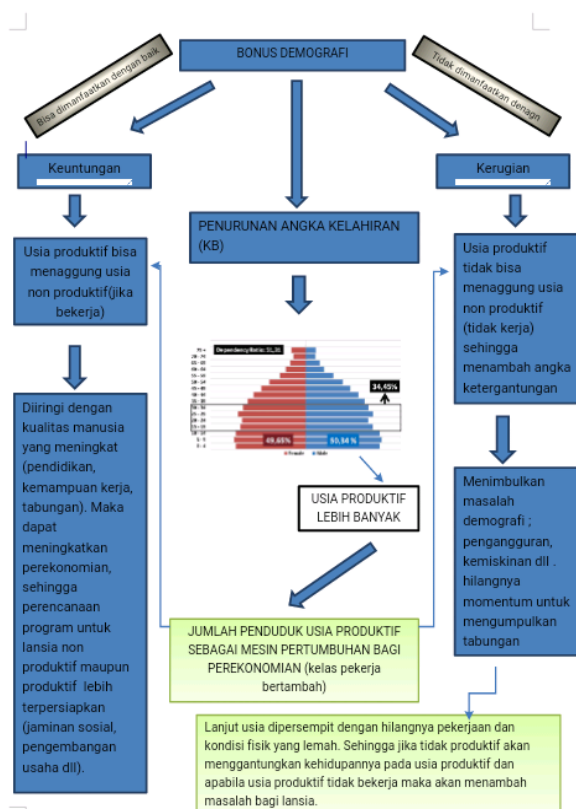
Robert Putnam (1993) mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial dalam membangun jaringan dan memberikan kepercayaan, sehingga mampu memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Teori ini digunakan untuk menganalisis modal sosial berupa jaringan atau relasi yang dimiliki gerakan "*KOPRAL*" dengan pihak-pihak yang terkait sehingga memudahkan komunitas dalam memperoleh dukungan berupa bantuan materil maupun non-materil guna memfasilitasi kelompok *pra-lansia*, sehingga dengan beragamnya dukungan untuk memperdayakan kelompok *pra-lansia*, masyarakat luas memiliki kepercayaan terhadap komunitas yang bergerak dibidang sosial dengan tujuan persiapan kelompok *pra-lansia* sebelum memasuki masa lansianya. Kerjasama antara komunitas dan kelompok *pra-lansia* memberikan dampak atau keuntungan bagi keduanya. Komunitas akan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dan pihak-pihak yang turut bekerjasama untuk mendayagunakan dan mengembangkan potensi kelompok *pra-lansia*, disisi lain kelompok *pra-lansia* juga akan mendapat pengembangan usaha dan kegiatan yang produktif untuk menunjang kesehatan, perekonomian serta sosialnya.

Setiap individu yang bergabung dalam gerakan KOPRAL memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga akan saling melengkapi dalam melaksanakan visi yaitu mempersiapkan kelompok usia pra-lansia untuk menghadapi masa lansia mendatang. Keberagaman anggota KOPRAL itu akan dipersatukan dan bergerak dibidangnya masing-masing, seperti contoh dari latar belakang kesehatan yang akan berfokus untuk menjalankan misi mengenai kesehatan lansia, juga yang berasal dari latar belakang ekonomi yang akan berfokus untuk menjalankan misi berupa pembekalan kewirausahaan terhadap sasaran yaitu kelompok pra-lansia. Dalam hal tersebut maka modal sosial yang berupa jaringan atau yang disini diartikan sebagai relasi akan digunakan untuk memaksimalkan berlangsungnya gerakan untuk mencapai tujuan utamanya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan metodologi kepustakaan, pengamatan empiris dengan menekankan pada kekuatan analisis dari sumber-sumber data yang diperoleh baik data lapangan maupun data literatur agar dapat diperoleh sebuah pemecahan masalah, berupa bank sampah, program wirausaha makanan khusus lansia (umbi-umbian dll), penyuluhan dan pendampingan hidup sehat, serta penanaman pola pikir untuk menjadi lansia yang mandiri, tangguh, dan sejahtera.

Hasil dan Pembahasan



Kenapa bisa dikatakan bonus demografi ?

Adanya bonus merupakan wujud dari keberhasilan program KB sehingga tingkat kelahiran atau fertilitas menurun. Keberhasilan program KB telah menggeser komposisi penduduk Indonesia yang awalnya di dominasi oleh penduduk usia 15 tahun kebawah, namun kini didominasi oleh penduduk usia produktif 15-64 tahun. Akibat dari kondisi tersebut membentuk struktur yang menguntungkan

bagi Indonesia yaitu piramida penduduk yang “menggembung ditengah”, artinya usia produktif meningkat dengan di iringi peningkatan kelas pekerja. Bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomi, hal ini dikarenakan dengan semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif, maka akan semakin besar pula jumlah tabungan masyarakat, sehingga dapat memicu investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini juga disebut sebagai *window of opportunity* atau jendela kesempatan. Besar kecilnya jendela kesempatan akan tergantung pada tingkat pengendalian penduduk. Dengan berhasilnya pengendalian penduduk yang dilakukan negara dapat melakukan akselerasi ekonomi dengan *menggenjot* industri manufaktur, infrastruktur maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja. Banyak negara menjadi maju dengan keberhasilan memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk memacu laju pendapatan perkapita sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Sejak tahun 2012 Indonesia telah menikmati bonus demografi dengan rasio ketergantungan penduduk dibawah 50% per 100 penduduk usia produktif. Sehingga dengan besarnya tenaga produktifnya menjadikan bangsa Indonesia dapat menguasai ekonomi dunia dengan di iringi jumlah penduduk yang besar. Bonus demografi akan memberikan dampak positif bagi kemajuan negara. Dengan catatan kelompok lansia mendapatkan pelatihan untuk tetap produktif.

Bagan diatas menjelaskan bahwa bonus demografi dapat membawa keuntungan dan juga kerugian. Jika dimanfaatkan dengan baik dapat mendatangkan keuntungan, sehingga penduduk usia produktif bisa menanggung penduduk usia non produktif. Penduduk dalam kategori produktif harus di iringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kemampuan kerja, dan tabungan). Sehingga roda perekonomian dapat meningkat dan perencanaan serta program lebih terpersiapkan dengan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, seperti jaminan sosial untuk lansia meningkat, pengembangan usaha untuk lansia dan program persiapan untuk kelompok pra-lansia. Sedangkan jika bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan angka ketergantungan sehingga dapat dikatakan penduduk usia produktif yang tidak bekerja akan menggantungkan hidupnya pada penduduk usia non produktif (lansia). Anak-anak akan menjadi usia produktif atau usia angkatan kerja dengan beberapa tahun lagi sedangkan lansia tidak akan menjadi usia yang produktif lagi dikarenakan terhambat oleh kondisi fisik yang semakin lemah, rentan dan mudah sakit sehingga jika bekerja akan kurang maksimal. Jika lansia ikut menanggung penduduk usia produktif yang tidak menguntungkan maka dari sinilah masalah-masalah lansia muncul, seperti terjadinya keterlantaran lansia, kesehatan lansia, masalah psikis lansia, dan juga permasalahan ekonomi pada lansia.

Untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang dapat dialami oleh lansia, perlu adanya suatu perkumpulan kelompok yang peduli terhadap permasalahan lansia, sehingga dalam kelompok tersebut dilakukan berbagai kegiatan untuk mempersiapkan masa lansianya. Adalah Gerakan KOPRAL merupakan suatu rancangan yang berupa komunitas yang berfokus untuk mempersiapkan penduduk usia pra lansia (49-59 th) agar dapat menjadi lansia yang mandiri, tangguh, bahagia, dan sejahtera. Sasaran dalam KOPRAL sendiri adalah penduduk perempuan dan atau laki-laki yang berusia 49-59 tahun. Dalam gerakan KOPRAL dirancang dengan berbagai kegiatan yang dapat mendukung kesejahteraan para penduduk lansia. Alasan memilih usia pra lansia yang menjadi fokus dalam komunitas karena untuk mempersiapkan masa lansianya. Selain itu penduduk yang masih berada pada usia pra-lansia masih memiliki kekuatan fisik dan juga kesehatan yang dapat dikatakan cukup baik karena belum mengalami tanda-tanda perubahan menuju lansia. Dengan kekuatan fisik dan kesehatan yang dimiliki, penduduk usia pra-lansia diharapkan mampu bergerak lebih aktif dalam mempersiapkan masa lansianya.

Gerakan KOPRAL ini terbentuk atas inisiatif para sukarelawan yang memiliki kepedulian terhadap berbagai permasalahan lansia yang ada di Surabaya. Setiap individu yang bergabung dalam gerakan KOPRAL memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga akan saling melengkapi dalam

melaksanakan visi yaitu mempersiapkan kelompok usia pra-lansia untuk menghadapi masa lansia mendatang. Keberagaman anggota KOPRAL tersebut akan dipersatukan dan bergerak dibidangnya masing-masing, seperti contoh dari latar belakang kesehatan yang akan berfokus untuk menjalankan misi mengenai kesehatan lansia, juga yang berasal dari latar belakang ekonomi yang akan berfokus untuk menjalankan misi berupa pembekalan kewirausahaan terhadap sasaran yaitu kelompok pra-lansia. Hal ini kemudian akan membentuk relasi-relasi yang dapat mengembangkan KOPRAL sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati, semakin banyak relasi dan jaringan maka peluang untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak akan semakin besar. Seperti halnya yang dikatakan oleh Robert Putnam terkait dengan modal sosial. Robert Putnam (1993) mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial dalam membangun jaringan dan memberikan kepercayaan, sehingga mampu memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Modal sosial yang berupa jaringan atau yang disini diartikan sebagai relasi akan digunakan untuk memaksimalkan berlangsungnya gerakan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya gerakan KOPRAL ini akan membentuk relasi-relasi baru yang akan memperkaya jaringan serta informasi bagi para pra-lansia. Adanya kerjasama serta jaringan yang terbentuk akan memberikan keuntungan satu sama lain, terlebih ketika mengalami suatu permasalahan dapat memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil. Diantara para anggota dapat saling bertukar pikiran sehingga akan memberikan pengetahuan baru dan pengalaman baru.

Dalam gerakan KOPRAL ini diadakan perkumpulan yang dilaksanakan selama satu minggu sekali guna membahas kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan masa lansianya. Salah satunya yaitu perubahan pola pikir bahwa menjadi lansia bukanlah akhir dari masa hidupnya. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada lansia yang merasa bahwa menjadi lansia berarti sudah tidak perlu bekerja dan menggantungkan hidupnya kepada anaknya atau istilah dalam bahasa jawa "*wes tuo wayahe melu anak, momong putu*". Pola pikir yang demikian dapat memunculkan permasalahan pada lansia, jika anaknya sedang tidak memiliki pekerjaan. Untuk meminimalisir kondisi tersebut maka diadakan kegiatan berupa bank sampah, program wirausaha makanan khusus lansia (umbi-umbian dll), penyuluhan dan pendampingan hidup sehat, serta penanaman pola pikir untuk menjadi lansia yang mandiri, tangguh, dan sejahtera

Kesimpulan

Bonus demografi akan memberikan dampak positif bagi kemajuan negara. Dengan catatan kelompok lansia mendapatkan pelatihan untuk tetap produktif. Untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang dapat dialami oleh lansia, perlu adanya suatu perkumpulan kelompok yang peduli terhadap permasalahan lansia, sehingga dalam kelompok tersebut dilakukan berbagai kegiatan untuk mempersiapkan masa lansianya. Gerakan KOPRAL merupakan suatu rancangan yang berupa komunitas yang berfokus untuk mempersiapkan penduduk usia pra lansia (49-59 th) agar dapat menjadi lansia yang mandiri, tangguh, bahagia, dan sejahtera. Dalam gerakan KOPRAL dirancang dengan berbagai kegiatan yang dapat mendukung kesejahteraan para penduduk lansia. Alasan memilih usia pra lansia yang menjadi fokus dalam komunitas karena untuk mempersiapkan masa lansianya. Selain itu penduduk yang masih berada pada usia pra-lansia masih memiliki kekuatan fisik dan juga kesehatan yang dapat dikatakan cukup baik karena belum mengalami tanda-tanda perubahan menuju lansia. Dalam gerakan KOPRAL ini diadakan perkumpulan yang dilaksanakan selama satu minggu sekali guna membahas kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan masa lansianya. Berupa bank sampah, program wirausaha makanan khusus lansia (umbi-umbian dll), penyuluhan dan pendampingan hidup sehat, serta penanaman pola pikir untuk menjadi lansia yang mandiri, tangguh, dan sejahtera

Referensi

Buku

- Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Elda Luciana Pardede. 2018. *Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. 2015. *Lansia Tangguh dengan Tujuh Dimensi*. Surabaya: BKKBN
- Budi, Rahayu Tuti. 2015. *Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Kajian Kritis Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Demartoto, Argyo. 2006. *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia: Suatu Kajian Sosiologis*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Field, John. 2010. *Modal Sosial* (diterjemahkan dari buku *Social Capital* oleh Nurhadi). Bantul: Kreasi Wacana
- Hutapea, Ronald. 2005. *Sehat dan Ceria di Usia Senja: Suatu Awal Baru*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kominfo RI. 2015. *Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Penyediaan Informasi Kominfo RI
- Maryam, R Siti dkk. 2008. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta. Salemba Medika.

Jurnal

- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. (2015). Pergeseran Nilai dan Dukungan Sosial Keluarga pada Orang Tua Lanjut Usia (Studi Kasus pada Lansia Miskin di Kabupaten Blitar), Skripsi. Universitas Airlangga.
- Khulaifa, Siti dkk. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kemandirian Lansia dalam Pemenuhan Activitie Daily Living di Dusun Sembayat Timur, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik*
- Pepe, Kamelia Kristika, dkk. *Dukungan Sosial Keluarga dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial Lansia di Panti*. Social Work Jurnal, Volume 7, Nomor 1, ISSN: 2339-0042(p) ISSN: 2528-1577(e)
- Supriadi. (2015). LanjutUsia dan Permasalahannya. Jurnal PPKn dan Hukum, Vol. 10 No. 2.
- Wirawan, I.B dkk. 2010. *Profil Penduduk Lanjut Usia di Jawa Timur*. Surabaya: Komda Lansia Jawa Timur

Paradoks Yogyakarta Sebagai Kota Ramah Lansia

Fadhilah Dwi P. A. Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. E-Mail: Fadhilahaunillah@gmail.com

Hanifa Wulan R, Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. E-Mail: hanifawulan@gmail.com

Anita Syafitri, Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. E-Mail: syafitrianitaa@gmail.com

Abstrak

Era Industrialisasi 4.0 menuntut sebuah kota dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua elemen yang ada di masyarakat. Proses pembangunan di suatu wilayah harus disesuaikan dengan struktur demografi yang ada di wilayah tersebut. Data BPS (2017) menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sebagai salah satu wilayah dengan angka lanjut usia (lansia) terbanyak mencapai 28,9% dari jumlah total penduduknya. Meskipun demikian, Kota Yogyakarta dapat menempati kota ramah lansia pada peringkat ketiga secara nasional. Hal ini menjadi sebuah paradoks ketika di satu sisi Kota Yogyakarta dianggap sebagai kota ramah lansia, namun di sisi lain tingginya angka lansia menyebabkan timbulnya beragam permasalahan. Salah satu masalah yang muncul adalah jumlah angka lansia terlantar yang semakin meningkat sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Paradoks keberadaan lansia di Yogyakarta sebagai sebuah elemen dalam masyarakat dan keterlibatannya dalam pembangunan kota akan dikaji lebih dalam pada penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan *indepth interview* kepada *stakeholder* terkait dan studi literatur. Fenomena ini dikaji lebih dalam dengan menggunakan perspektif struktural fungsionalis oleh Robert K Merton yang menekankan pada adanya kesatuan, stabilitas, dan harmoni di tengah masyarakat yang merupakan penyempurnaan dari teori-teori fungsionalisme sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sebagai kota ramah lansia yang ditunjukkan dari dimensi partisipasi sosial, penghormatan dan keterlibatan sosial, komunikasi dan informasi, dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan, gedung dan ruang terbuka, transportasi, dan perumahan. Namun, dalam dimensi partisipasi sipil dan pekerjaan memiliki capaian yang buruk. Hal itu menyebabkan banyak lansia yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga berakibat pada tingginya angka kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: *Demografi, Fungsionalisme, Lansia, Kemiskinan.*

Pendahuluan

Pada tahun 2015, persentase penduduk lansia tertinggi di Indonesia diraih oleh Yogyakarta yaitu 13,4% (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Populasi lansia di Kota Yogyakarta yang cukup tinggi menjadikan kota ini menjadi salah satu wilayah yang dipilih oleh SurveyMeter dalam riset Kota Ramah Lansia. Terdapat 8 dimensi untuk menilai kota ramah lansia yaitu gedung dan ruang terbuka, transportasi, perumahan, partisipasi sosial, penghormatan dan inklusi, partisipasi sipil dan pekerjaan, komunikasi dan informasi, serta dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan penilaian dari 8 dimensi ini, Kota Yogyakarta dapat menduduki peringkat ketiga secara nasional sebagai kota ramah lansia (SurveyMETER, 2013). Meskipun demikian, lansia di Kota Yogyakarta memiliki tingkat partisipasi sipil dan pekerjaan yang rendah. Artinya, banyak lansia di Kota Yogyakarta yang kurang berpartisipasi dalam hal pekerjaan sehingga tingkat produktivitas mereka rendah dan berdampak pada tinggi angka ketergantungan pada usia produktif. Kondisi ini yang kemudian akan membawa pada angka kemiskinan yang tinggi di Kota Yogyakarta. Menurut Asisten Deputi Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK, kemiskinan jadi

ancaman kesejahteraan terbesar bagi lansia karena pendapatan yang rendah, kesehatan dan gizi yang buruk, kurangnya akses terhadap layanan dasar, serta tidak adanya pensiun. (Humas Kemenko PMK, 2017).

Tingginya angka lansia memberikan pengaruh yang baik ketika penduduk lansia masih produktif sehingga tidak bergantung pada penduduk usia produktif, namun ketika banyaknya lansia hanya bergantung pada penduduk usia produktif maka justru akan meningkatkan angka kemiskinan di Yogyakarta. Tingginya angka lansia sendiri disebabkan karena Angka Harapan Hidup (AHH) yang juga tinggi. Menurut BPS (2015) menunjukkan bahwa AHH di Kota Yogyakarta mencapai 74 tahun. Fenomena yang muncul di Yogyakarta adalah bahwa Kota ini juga menjadi wilayah dengan angka kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Hal ini menggambarkan AHH yang berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Menjadi sebuah isu menarik karena fenomena ini karena bertolak belakang pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berbunyi semakin tinggi AHH maka tingkat kemiskinan semakin rendah. seperti penelitian yang dilakukan oleh Baiq (2012) bahwa faktor kemiskinan yang paling utama adalah Angka Harapan Hidup dimana setiap penurunan AHH sebesar 1% maka akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 6,9%. Hasil ini sesuai dengan teori dimana di negara yang memiliki rata-rata hidup lebih lama secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Namun, kondisi yang terjadi di Kota Yogyakarta justru sebaliknya dimana semakin tinggi AHH maka tingkat kemiskinannya semakin tinggi. Fakta bahwa tingginya AHH merupakan salah satu keberhasilan fasilitas kesehatan yang semakin baik di Kota Yogyakarta. Paradoks keberadaan lansia di Yogyakarta sebagai sebuah elemen dalam masyarakat dan keterlibatannya dalam pembangunan kota akan dikaji lebih dalam pada penelitian ini.

Kajian Pustaka

Lansia, Angka Harapan Hidup dan Kemiskinan

Lanjut usia (lansia) merupakan siklus terakhir dalam kehidupan manusia. Terdapat berbagai macam batasan lansia menurut para ahli. Di Indonesia, batasan lanjut usia tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa seseorang yang lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 ke atas baik pria dan wanita (Republik Indonesia, 1998). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lansia terdiri dari 4 fase yaitu usia pertengahan (middle age) pada 45-49 tahun, lanjut usia (elderly) pada 60-74 tahun,, lanjut usia tua (old) pada 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) yaitu diatas 90 tahun. Berbeda dengan pendapat Prof. Dr. Koesmanto Setyonugroho bahwa lanjut usia (geriatric age) terbagi menjadi 3 fase yaitu young old (usia 70-75 tahun), old (usia 75-80 tahun), dan very old (usia lebih dari 80 tahun) (Efendi, 2009). Departemen Kesehatan RI (2006) mengelompokkan lansia menjadi:

1. Virilitas (presenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun)
2. Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (usia 60-64 tahun)
3. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degenerative (usia >65 tahun)

Sedangkan Angka Harapan hidup merupakan rata rata tahun hidup yang dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut dalam situasi kematian yang berlaku di lingkungan masyarakat. AHH merupakan salah satu indikator yang baik untuk melihat tingkat ekonomi dan sosial dari suatu masyarakat (Sandri, 2009). Angka Harapan Hidup seringkali dikaitkan dengan teori kemiskinan. Salah satunya adalah yang diungkapkan oleh Lincoln (1999) yang pada intinya menekankan Angka Harapan Hidup yang tinggi dapat menekan angka kemiskinan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat kemiskinan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Fima Anggadini pada tahun 2015 melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah*. Hasil dari penelitian ini salah satunya menunjukkan bahwa variabel angka harapan hidup yang semakin tinggi berbanding negatif dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan yang menyatakan bahwa kesehatan masyarakat yang semakin berkualitas ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Tingkat produktivitas masyarakat yang meningkat dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Penelitian lain dengan judul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah* dilakukan oleh Sitorus pada tahun 2015. Dengan pendekatan kuantitatif penelitian ini juga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap presentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2005-2012. Hasil dua penelitian di atas relevan dengan konsep yang dikemukakan Lincolin (1999). Dia menjelaskan bahwa intervensi dari pemerintah untuk memperbaiki kesehatan merupakan salah satu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan golongan miskin untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja. Di wilayah dengan tingkat kesehatan yang baik dan Angka Harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

Struktural Fungsionalis Robert K. Merton

Struktur sosial merupakan sebuah konsep sebagai pandangan umum untuk menggambarkan sebuah entitas atau kelompok masyarakat yang berhubungan satu sama lain, yaitu pola dan hubungan di dalam sistem sosial atau institusi sosial dengan berdasar pada norma-norma (Jary, 1991). Menurut Brinkerhoff dan White (1989), terdapat tiga asumsi utama para ahli fungsionalisme yaitu evolusi, harmoni, dan stabilitas. Evolusi menggambarkan perubahan dalam masyarakat melalui proses adaptasi struktur sosial kepada hal-hal yang baru, sedangkan stabilitas merupakan hal utama karena menentukan sejauh mana masyarakat bisa bertahan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat fungsional adalah masyarakat yang stabil, harmoni, dan sempurna dari segala bentuk kerjasama, sedangkan masyarakat tidak fungsional adalah masyarakat yang tidak berfungsi.

Robert K. Merton memberikan kritik terhadap teori Imperative Fungsional milik Person untuk membangun teori sosiologi yaitu teori Taraf Menengah. Teori taraf menengah didefinisikan sebagai teori yang terletak diantara hipotesa kerja yang kecil tapi perlu, yang mengalami perkembangan, dan usaha yang mencakup suatu teori terpadu yang dapat diamati dalam perilaku sosial (Adibah, 2017). Menurut Jonathan (1974), Model fungsionalisme struktural Robert K. Merton berdasarkan pada tiga postulat dasar analisis fungsional, yaitu:

1. Kesatuan fungsional dari sistem sosial
2. Universalitas fungsional dari sistem sosial
3. Indispensability fungsional untuk sistem sosial

Pembahasan

Paradoks Yogyakarta Ramah Lansia

Kota Ramah Lansia 2030 merupakan sebuah gagasan strategis yang coba dibangun oleh WHO. Secara detail dan lengkap WHO telah mencantumkan 8 dimensi dan 95 indikator sebagai alat ukur yang digunakan untuk menciptakan Kota Ramah Lansia. Dimensi tersebut adalah (1) Gedung dan

Ruang Terbuka, (2) Transportasi, (3) Perumahan, (4) Partisipasi Sosial, (5) Penghormatan Inklusi/ Keterlibatan Sosial, (6) Partisipasi Sipil dan Pekerjaan, (7) Komunikasi dan Informasi, dan (8) Dukungan Masyarakat dan Kesehatan. Surveymeter dalam risetnya di tahun 2013 mencoba melihat bagaimana kondisi berbagai kota di Indonesia terkait isu lansia dengan menggunakan indikator yang dibangun oleh WHO. Dari 14 Kota yang diteliti Yogyakarta berada di urutan ke-3 Kota Ramah Lansia. Hal ini tentu saja menjadi sebuah prestasi besar yang dimiliki Yogyakarta. Dukungan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan merupakan dimensi dengan skor terbaik yang dimiliki oleh Yogyakarta.

Menurut data BPS (2015) tingginya Angka Harapan Hidup di Yogyakarta yang mencapai 74 tahun. Angka Harapan Hidup yang tinggi ini adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Yogyakarta memang sudah cukup baik untuk lansia. Hal ini juga ditunjukkan oleh fasilitas, layanan, informasi dan administrasi kesehatan dan sosial sudah baik di kota ini. Semua sistem yang diciptakan bisa menjangkau lansia termasuk lansia kurang mampu. Pelayanan kesehatan ini bisa kita saksikan dengan adanya puskesmas keliling, posyandu lansia, mudah dan murah administrasi pelayanan kesehatan bagi lansia, dll. Pelayanan kesehatan yang baik ini secara langsung akan memberi pengaruh positif bagi Angka Harapan Hidup Individu (SurveyMeter, 2013).

Adapun dimensi yang masih memiliki rapor merah ialah partisipasi sipil dan pekerjaan yang hanya mendapatkan skor sebesar 18,8%. Hal ini menunjukkan bahwa lansia sangat minim dilibatkan dalam bidang pekerjaan dan pelatihan yang dapat membantu lansia untuk produktif. Masih banyak diskriminasi yang dialamatkan kepada lansia. Pemerintah sendiri belum menyikapi fenomena membludaknya lansia di Yogyakarta secara seksama. Menurut salah satu seksi bagian Kesejahteraan Sosial dan Lansia di Dinsos DIY lansia memang belum menjadi fokus yang diutamakan pemerintah, pemerintah cenderung fokus pada permasalahan anak-anak dan narkoba. Padahal Jogja sendiri lansianya banyak dan jika tidak diperhatikan justru akan menjadi masalah. Angka Harapan hidup lansia yang tinggi akan berimplikasi pada besarnya jumlah lansia yang ada di Yogyakarta. Beliau juga menambahkan bahwa jumlah lansia semakin meningkat karena Yogyakarta menjadi kota tujuan para pensiunan. Jogja dianggap dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan.

Menjadi menarik untuk diperhatikan bahwa tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Yogyakarta masih sangat tinggi. Jika merujuk pada data BPS Angka kemiskinan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun dan jika menurun pun sangat kecil sekali. Kita juga bisa menyaksikan bahwa jumlah lansia terlantar semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini seakan menunjukkan sebuah fenomena yang bertolak belakang dengan teori kemiskinan pada umumnya. Angka Harapan Hidup yang tinggi di Yogyakarta ternyata justru berjalan linear dengan angka kemiskinan yang ada. Salah satu faktor tingginya angka kemiskinan ini ternyata dipengaruhi oleh tingginya angka lansia. Ada puluhan ribu lansia terlantar di Yogyakarta papar seksi Kesejahteraan Sosial dan Lansia Dinsos DIY dalam wawancara November 2018. Dinsos sendiri membagi lansia ke dalam empat kategori: lansia tidak terlantar, lansia terlantar secara ekonomi, lansia terlantar secara sosial, dan yang terakhir ialah lansia terlantar secara sosial dan ekonomi. Dinsos sendiri fokus untuk mengatasi permasalahan lansia terlantar secara ekonomi dan lansia terlantar secara sosial sekaligus ekonomi.

Sebenarnya banyak lansia yang masih bisa produktif untuk bekerja. Namun mereka tidak memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif ke dalamnya. Menurut salah satu peneliti di PSKK (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan) UGM dalam sebuah perkuliahan (2018) menyatakan tingginya angka lansia di Yogyakarta menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan. Hal ini sesuai dengan riset yang juga dilakukan oleh SurveyMeter bahwa angka partisipasi sipil dan pekerjaan di Yogyakarta masih sangat rendah. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa meskipun Angka Harapan Hidup yang tinggi tidak mengurangi angka kemiskinan dan justru sebaliknya. Para lansia kemudian kehilangan kesempatan untuk dapat aktif dan produktif secara ekonomi sehingga pada akhirnya mereka menjadi beban dan terlantar.

Berbagai penelitian yang ada sebelumnya terkait Angka Harapan Hidup dan Kemiskinan juga serupa dengan konsep yang diungkapkan oleh Lincoln (1999). Dia menjelaskan bahwa intervensi dari pemerintah untuk memperbaiki kesehatan juga merupakan salah satu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan golongan miskin untuk meningkatkan produktifitas, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja. Di wilayah dengan tingkat kesehatan yang baik dan Angka Harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Selain karena mereka masih dapat produktif dan tidak menjadi beban, tingginya Angka Harapan Hidup membuat sebuah keluarga untuk menginvestasikan uangnya di bidang pendidikan dan menabung. Hal ini akan menyebabkan pendapatan negara semakin bertumbuh dari adanya biaya pendidikan dan tabungan masyarakat (Faturrohm, 2011).

Fenomena di Yogyakarta menunjukkan bahwa teori yang diungkapkan Lincoln tidak berlaku di Yogyakarta. Adanya pelayanan kesehatan yang baik dan tingginya Angka Harapan Hidup tidak cukup untuk menekan kemiskinan jika tidak ada akses dan kesempatan yang diberikan untuk turut serta dalam partisipasi sipil dan pekerjaan. Adanya diskriminasi, tidak tersedianya lowongan pekerjaan yang fleksibel bagi para lansia, minimnya pelatihan entrepreneurship menjadi salah satu sebab angka kemiskinan akan selalu tinggi.

Hal ini berbeda jauh dengan yang dilakukan negara lain di dunia. Singapore yang struktur penduduk lansianya juga tinggi memiliki kebijakan dimana pemerintah Singapura menetapkan usia pensiun saat warganya berusia 63 tahun. Setelah itu lansia masih dapat meminta perpanjangan waktu selama tiga tahun ataupun bekerja paruh waktu untuk mengisi waktu luangnya setelah pensiun (Idris, 2017). Salah satu lowongan pekerjaan bagi lansia yang ada di Singapore ialah pekerjaan sebagai asisten perpustakaan. Disini lansia dapat membantu membereskan buku atau menjadi petugas helpdesk. Lansia diberikan kesempatan untuk terlibat meskipun untuk hal-hal yang ringan. Pekerjaan ringan ini akan sangat membantu lansia untuk terhindar dari rasa bosan di hari tua yang dapat menyebabkan demensia sekaligus memberikan pemasukan ekonomi bagi mereka.

Struktural Fungsional dalam Menganalisis Keterlibatan Lansia

Lansia di Yogyakarta menjadi elemen yang termarginalkan dalam berbagai proses pembangunan dan ekonomi. Padahal Lansia merupakan satu bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya menurut Merton dalam Jonathan (1974) mengatakan bahwa masyarakat terdiri atas satu kesatuan utuh seperti tubuh. Jika satu sakit maka akan merusak bagian lainnya. Lebih jauh lagi, Merton menjelaskan bahwa masyarakat fungsional adalah masyarakat yang stabil, harmoni, dan sempurna dari segala bentuk kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dalam konteks pembahasan ini adalah semua orang mendapatkan proporsi yang sesuai termasuk kemudahan dalam mengakses pekerjaan. Namun pada kenyataannya, Lansia di Kota Yogyakarta mengalami hal yang sebaliknya. Banyak pekerjaan yang memperhitungkan usia dan menetapkan batas maksimum usia kerja seseorang. Jika sudah mencapai usia tertentu yang sudah menjadi ketetapan maksimum pekerjaan, maka seseorang tersebut secara tegas harus mengakhiri masa produktif kerjanya. Lansia dianggap sebagai orang yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sehingga selayaknya dirumahkan.

Dalam teori struktural fungsional yang digagas oleh Robert K. Merton, dikatakan bahwa aktor sangat dipengaruhi oleh struktur, hal itu menyebabkan masyarakat sangat diatur oleh aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh kelompok masyarakat. Merton juga menegaskan apabila salah satu fungsi struktur tidak berfungsi maka akan menyebabkan struktur tersebut secara keseluruhan akan mengalami disfungsi. Jika dikaitkan dengan kondisi lansia di Yogyakarta, aturan-aturan tentang keterlibatan lansia dalam hal pekerjaan belum benar-benar dilibatkan. Aturan-aturan yang mengikat

masyarakat terlebih dalam hal persyaratan usia bekerja membuat lansia termarginalkan dari akses pekerjaan.

Selain itu dalam laporan SurveyMeter (2013) juga menunjukkan bahwa masyarakat dengan jujur bisa menilai mengenai sistem ketenagakerjaan kita yang berpihak pada pemodal dan kaum muda usia. Tidak berpihak pada kapasitas dan kompetensi tenaga kerja. Hal ini juga didukung dengan keterangan dari salah satu Kabid di Bappeda Kota Yogyakarta yang menyatakan belum adanya fokus pemerintah daerah terkait dengan lansia dalam partisipasi pekerjaan. Pekerjaan untuk kaum usia produktif saja dianggap masih minim adanya slot pekerjaan untuk lansia dianggap hal yang tidak penting. Lansia seharusnya menikmati masa tuanya dengan di rumah saja. Padahal menurut salah satu seksi bagian Kesejahteraan Sosial dan Lansia di Dinsos DIY lansia cenderung akan bosan dan mudah terkena penyakit jika tidak bekerja -melakukan pekerjaan ringan- atau melakukan aktivitas lainnya. Meningkatnya angka lansia terlantar di DIY juga menunjukkan bahwa banyak lansia yang sebenarnya membutuhkan dukungan dalam hal ekonomi dan pekerjaan.

Hal tersebut berujung pada dampak yang negatif terhadap lansia itu sendiri maupun terhadap struktur sosial yang ada. Lansia akan semakin jauh dari mendapatkan akses pekerjaan. Ketidakmampuan untuk bekerja karena struktur yang mengikat membuat lansia tidak mendapatkan penghasilan. Hal itu tentu saja berujung pada terlantarnya lansia yang tidak memiliki keluarga yang bersedia memenuhi kebutuhan hidupnya. Implikasi lainnya terhadap tatanan sosial adalah besarnya angka ketergantungan yang tentu saja lagi-lagi berujung pada terlantarnya lansia. Pada intinya keterlibatan lansia akan sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi suatu wilayah dan perkembangan kesehatan lansia itu sendiri.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Paradoks Yogyakarta sebagai kota ramah lansia merupakan sebuah ketimpangan antara predikat yang diterima dengan kondisi yang terjadi. Ada satu indikator tentang keterlibatan lansia dalam hal mendapatkan pekerjaan yang tidak terpenuhi. Padahal usia yang dianggap sudah lanjut usia memerlukan gerak agar kondisi tubuh para lansia itu sehat dan bugar. Hal itu terjadi karena pemerintah belum menaruh perhatian lebih pada kasus keterlibatan lansia dalam mengakses pekerjaan. Ada anggapan bahwa lansia tidak selayaknya bekerja lagi, mengingat kondisi yang semakin lemah dan selayaknya untuk lebih banyak beristirahat dirumah. Pada kenyataannya lansia perlu untuk bekerja. Bekerja yang dimaksud tidak serta merta merupakan pekerjaan pada umumnya.

Pekerjaan yang dimaksudkan untuk kalangan lansia tidak serta merta hanya agar mendapatkan penghasilan, namun lebih jauh lagi adalah untuk menjauhkan lansia dari beberapa penyakit seperti kepikunan, kesehatan jantung, dan kebugaran diri. Selain daripada itu, memberikan proporsi pekerjaan kepada lansia juga akan membantu mengurangi jumlah angka ketergantungan. Para lansia dapat bekerja sesuai kemampuannya dan mendapatkan upah kerja agar tidak ada lagi lansia yang terlantar, dan berakhir menjadi pengemis. Pekerjaan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah pekerjaan seperti yang dilakukan oleh kaum muda dan dewasa, melainkan pekerjaan ringan yang dirasa mampu untuk dikerjakan oleh para lansia. Contohnya saja melihat dari negara tetangga yang mempekerjakan lansia untuk menjaga perpustakaan. Para lansia akan semakin bugar dan sehat karena harus bergerak, dan juga akan lebih bahagia karena mampu bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Kondisi psikologis lansia tersebut juga akan semakin membaik karena tidak merasa sendirian. Sehingga penting bagi pemerintah agar mampu memfasilitasi pekerjaan untuk para lansia agar dapat memberikan dampak positif baik untuk lansia maupun kehidupan sosial.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengajukan saran agar pihak-pihak terkait dapat mempertimbangkan keterlibatan para lansia untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka agar kehidupan para lansia dapat lebih terjamin, sehat, bugar, dan bahagia. Lebih

jauh lagi, akan berdampak pada angka kemiskinan akan menurun di Yogyakarta karena salah satu penyumbang alasan tingginya angka kemiskinan adalah selaras dengan tingginya angkat lansia.

Berbagai permasalahan dan analisis paradoks Yogyakarta sebagai kota ramah lansia kemudian mengantarkan penulis untuk memberikan rekomendasi kebijakan atas permasalahan ini. Sejatinya sebuah kebijakan tidak akan tidak akan mampu berjalan dengan baik jika tidak melibatkan banyak aktor di dalamnya. *Collaborative Governance* menjadi salah satu solusi yang dapat dipilih oleh pemerintah. Pada penerapan perspektif *good governance* pemerintah akan melibatkan berbagai aktor publik seperti masyarakat dan swasta. Hal ini bertujuan untuk untuk mewujudkan kebijakan dan implementasi yang produktif, efektif, dan efisien (Kurniawan dalam Iriawan, 2017). Berikut adalah rekomendasi yang peneliti rumuskan untuk menanggapi persoalan terkait keterlibatan lansia dalam mengakses pekerjaan sehari-hari:

1. Pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan kolaboratif dimana setiap perusahaan baik pemerintah maupun swasta diwajibkan memiliki slot pekerjaan untuk lansia. Slot pekerjaan yang disediakan pun ialah pekerjaan yang sesuai dengan kapabilitas lansia dengan maksimal waktu bekerja 4 jam sehari.
2. Pemerintah memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap *recruitment* pekerjaan berdasarkan usia. Pekerja dipilih berdasarkan kapabilitasnya dalam suatu bidang bukan karena batasan usia. Sehingga batasan usia menjadi melebur. Ketika seseorang masih memiliki kapabilitas dalam menjalankan suatu pekerjaan namun usia yang dimiliki sudah masuk pada usia lanjut, maka perlu pertimbangan lebih lagi untuk membuat seseorang tersebut pensiun. Paling tidak lansia tersebut dapat dipindahkan ke pekerjaan lain yang dianggap memiliki proporsi yang sesuai.
3. Memasifkan berbagai pelatihan industri ekonomi kreatif bagi lansia berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dinsos, BKKBN maupun yang lainnya. Hal ini bertujuan supaya lansia memiliki keahlian dalam mengolah dan memproduksi sesuatu yang kemudian dapat dikembangkan untuk menambah nilai mata pencaharian mereka.

Referensi

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aolikasinya dalam Kehidupan Keluarga. *INSPIRASI*, Volume 1 No 1, 171-184.
- Anggadini, Fima. 2015. Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 7, Juli 2015, ISSN: 2302-2019
- Arsyad, Lincolin.(1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. (2017). Kota Yogyakarta dalam Angka 2016. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappeda. (21 November 2018). Wawancara Lansia (Recorded by Anita Syafitri). Yogyakarta, Indonesia.
- BPS. (2015). Angka Harapan Hidup. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Retrieved November 14, 2018, from Badan Pusai Statistik Provinsi DI Yogyakarta: <http://yogyakarta.bps.go.id>
- Brinkerhoff, D. B. (1989). *Esentials of Sociology*. San Fransisco: West Publishing Company.
- Depkes RI. (2006). *Pedoman Pelatihan Kader Kelompok Usia Lanjut Bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga.
- Dinsos. (9 November 2018). Wawancara Lansia (Recorded by Fadhilah Aunillah). Yogyakarta, Indonesia

- Efendi, F. &. (2009). *Keperawatan Kesehatan komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Faturrohim, Rahmawati. 2011. *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di 35 Kabupaten di Jawa Tengah)*. UGM : Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- Humas Kemenko PMK. (2017, May 05). *Peningkatan Jumlah Lansia Bisa jadi Beban Negara*. Retrieved November 14, 2018, from Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/peningkatan-jumlah-lansia-bisa-jadi-beban-negara>
- Idris, Muhammad. (2017). *Mengapa Banyak Manula Masih Bekerja di Singapura?* Retrieved November 14, 2018, <https://finance.detik.com/beritaekonomibisnis/d3579963/mengapa-banyak-manula-masih-bekerja-di-singapura>
- Irawan, Denny. 2017. *Collaborative Governance: Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Publik* ISSN 2303-341X Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017
- Jary, D. &. (1991). *Dictionary of Sociology*. Great Britain: Harper Collins.
- Jonathan, H. T. (1974). *The Structure of Sociology Theory*. London: The Dorsey Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Pusat Data dan Informasi Situasi Lanjut Usia (Lansia) di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Merton, R. K. (1949). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sandri, Syafrizal. 2009. *Proyeksi Angka Kelahiran dan Kematian Bayi berdasarkan Data Tahun 2003-2007 di Kota Medan*. USU Repository: Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam
- SurveyMETER. (2013). *Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia Kota Ramah Lanjut Usia 2030 Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: SurveyMETER.

Analisa Hubungan Kepadatan penduduk terhadap Krisis Perkotaan dalam Perspektif *Urban Life Manifesto* di Kecamatan Jebres

Arum Tri Astuti, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, arumtriasi15@gmail.com

Ayu Bella Ganawati Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, ayubellag@gmail.com

Gumelar Ageng Prihadi, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, agengprihadi@gmail.com

Katarina Ratih Kusuma D, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, katarinaratih22@gmail.com

Rivaldi, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, akuiramudengyo@gmail.com

Abstrak

Perubahan penduduk akibat pertumbuhan demografi menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan krisis perkotaan. Pertumbuhan jumlah penduduk kota dan keterbatasan lahan menjadi sebab kepadatan kota. Kondisi kota yang semakin padat dan kebutuhan akan lahan semakin meningkat akhirnya menimbulkan pengalihan ruang kota menjadi ruang-ruang privat. Tata ruang kota menjadi tidak terkendali dan ruang-ruang publik kini banyak digunakan oleh kalangan – kalangan tertentu saja. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat krisis perkotaan yang terjadi di kecamatan Jebres dalam perspektif *urban life manifesto*. Penelitian ini mengacu pada teori dari Louis Wirth yang mengemukakan bahwa semakin bertambahnya kepadatan penduduk menyebabkan segregasi (terpisahnya manusia dan fungsi, termasuk terpisahnya tempat tinggal dan tempat kerja). Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif dengan metode *Dominant less Dominant*. Metode *dominant* menggunakan metode kuantitatif, dan *less dominant* menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster areal sampling* dengan total 11 kelurahan di kecamatan Jebres. Dalam penelitian ini, variabel yang dicari adalah hubungan antara kepadatan penduduk dengan privatisasi sebagai salah satu bentuk dari krisis perkotaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada korelasi positif dan signifikan antara kepadatan penduduk dengan privatisasi dalam perspektif *urban life manifesto* sebagai faktor terjadinya krisis perkotaan di kecamatan Jebres. Kota seharusnya menjadi tempat hidup bagi masyarakatnya, namun saat ini kota sudah berubah menjadi tempat yang tidak memiliki arti di luar kepemilikan pribadi.

Kata Kunci: Kepadatan Penduduk, *Urban Life Manifesto*, Privatisasi

Pendahuluan

Kota dipandang sebagai kemajuan baik dalam fasilitas maupun kehidupannya. Akan tetapi, hal itu hanyalah sebuah pandangan semu semata. Kota disisi lain tengah mengalami perubahan yang perlahan namun pasti akan merubah kota secara utuh. Globalisasi dan urbanisasi dianggap sebagai sebab perubahan-perubahan yang terjadi pada kota-kota terutama kota besar. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kota terkait penurunan kualitas merupakan bagian dari krisis perkotaan. Krisis perkotaan dapat berupa menurunnya kualitas solidaritas-integrasi sosial dan desain kota (Kartono, 2010). Perubahan penduduk akibat pertumbuhan demografi menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan krisis perkotaan. Dimana semakin kompleks jumlah penduduk disuatu wilayah maka akan semakin kompleks permasalahan yang terjadi di suatu wilayah tersebut.

Kota yang semakin padat dan kebutuhan akan lahan semakin meningkat menyebabkan pengalihan ruang kota menjadi ruang-ruang privat. Hal ini juga terjadi di Surakarta, dimana status ruang publik yang diberlakukan terhadap kawasan alun-alun kota surakarta kini banyak dijumpai pedagang kaki lima dan parkir kendaraan *on-street* menjadikan makna kompleks bangunan kraton dan alun-alun semakin luntur (LPM-ITB, 2001 dalam adhiatma, 2004). Selain itu, menurut Budiasih (2003 dalam adhiatma, 2004) terdapat konflik kepentingan dan kontradiksi antara aspek ekonomi dengan

aspek yang bertujuan untuk mempertahankan sektor informal dan objek pariwisata Kraton Surakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh LPM-ITB (2001 dalam Adhiatma, 2004) menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan sebagian orang yang menjadikan makna penggunaannya bergeser. Menurut Purwanto (2014) bahwa aktifitas pedagang kaki-lima dan parkir *on - street*, membuat ruang publik tersebut rawan terhadap tindak kriminal, bahkan ada pula yang sulit diakses publik secara bebas akibat munculnya berbagai macam bangunan jasa dan komersial yang lebih "selektif" terhadap masyarakat yang memanfaatkannya. Kecenderungan pasar bebas dengan privatisasi mengubah ruang publik menjadi ruang-ruang privat. Gangguan, pembatasan maupun larangan untuk mengakses ruang publik oleh masyarakat di kawasan ini sudah mengarah kepada upaya privatisasi baik secara formal maupun nonformal. Permasalahan perubahan ruang-ruang kota menjadi suatu bentuk privatisasi sudah seharusnya menjadi point penting yang perlu untuk diperhatikan oleh semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat kota itu sendiri.

Kajian Pustaka

Kepadatan Penduduk Kota

Kota sebagai pemukiman dirumuskan oleh Louis Wirth sebagai pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya. Oleh karena itu, hubungan sosial antar penghuninya bersifat longgar, acuh dan relasi yang terjalin bersifat impersonal. Akibatnya, ikatan kekerabatan di kota bersifat lemah, gotong royong menipis dan solidaritasnya goyah. Tata kehidupan kota menurut Wirth meliputi komponen-komponen yang ada di dalam definisi besarnya (Size), kepadatannya (density), dan heterogenitasnya (Kartono, 2010). Ketiga komponen tersebut merupakan komponen dalam demografi penduduk. Louis Wirth mengemukakan bahwa semakin kompleks penduduk perkotaan maka semakin kompleks permasalahannya begitupula kepadatan penduduknya. Louis Wirth juga mengemukakan bahwa semakin bertambahnya kepadatan penduduk menyebabkan segregasi (terpisahnya manusia dan fungsi, termasuk terpisahannya tempat tinggal dan tempat kerja) (Wirth, 1938).

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (Ida Bagoes Mantra, 2007). Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, Keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan.

Kota memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di desa. Tingkat kepadatan penduduk diukur juga berdasarkan luas lahan yang ada di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk yang besar merupakan salah satu faktor penyebab pertambahan jumlah penduduk sehingga ukuran jumlah penduduk kota pun cenderung besar (antara kepadatan penduduk dan jumlah penduduk memiliki relasi yang positif). Heterogenitas sosial dan kepadatan penduduk mendorong terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ruang kota (Kartono, 2010). Masyarakat kota sebagai suatu sistem yang dinamis dimungkinkan dapat terjadi perubahan yang terus menerus dan bermakna bagi masyarakat. Kota dipandang sebagai suatu gaya hidup yang didalamnya terdapat sifat-sifat serba bergerak, kontak yang dangkal dan anonimitas. Kepadatan penduduk kota menyebabkan para individu saling bertubrukan kepentingan, tidak ada lagi kesempatan untuk saling mengenal sebagai pribadi secara utuh (Kartono, 2010).

Urban Life Manifesto

Kartono menjelaskan bahwa kejahatan, kekerasan, polusi, kepadatan dan keterasingan menjadi tanda-tanda dari kota saat ini. Tanda-tanda yang terjadi merupakan contoh dari krisis yang ada sejak lama dan merupakan masalah klasik tapi masih aktual. Krisis perkotaan lainnya adalah menurunnya

kualitas solidaritas-integrasi masyarakat, perilaku yang destruktif, dan kualitas kontrol sosial yang rendah (Kartono, 2010). Menurut LeGates krisis dalam design kota menurut *Urban Life Manifesto* berupa Buruknya kehidupan, Gigantisme dan hilangnya kontrol warga terhadap perkembangan kota, Privatisasi yang tinggi sehingga menghilangkan kehidupan publik, Fragmentasi sentrifugal, Hilangnya makna ke ruangan kota, Ketiadaan peran dan jabatan, Ketidakadilan dan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota. Masyarakat kota semakin mementingkan diri sendiri, saat sesuatu hal yang menyangkut dirinya atau memberikan keuntungan maka ia akan terlibat tapi jika tidak ada maka ia tidak akan ikut campur. Setiap individu dibatasi kaca dan tembok, semua ruang sudah tertutup oleh kepentingan individu masing-masing orang (Kartono, 2010).

Privatisasi ruang publik yang terjadi dikota-kota besar kerap kali menimbulkan permasalahan sosial yang sangat kompleks. Meskipun privatisasi ruang publik berbasis pada faktor ekonomi, namun permasalahan yang ditimbulkannya lebih banyak berdimensi sosial seperti misalnya konflik pemanfaatan ruang. Pengertian sederhana dari Ruang publik atau yang sering dikenal dengan *public space*, merupakan sebuah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ruang publik atau ruang terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya (Radjawali, 2004).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif dengan metode *Dominant less Dominant*. Metode *dominant* menggunakan metode kuantitatif, dan *less dominant* menggunakan metode kualitatif. Variabel yang dicari adalah hubungan antara kepadatan penduduk dengan privatisasi sebagai salah satu bentuk dari krisis perkotaan dalam perspektif *urban life manifesto*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pemilihan *cluster area sampling* dengan jumlah sampel 11 kelurahan di kecamatan Jebres. Teknik pengumpulan data kuantitatif disebarakan melalui kuesioner yang menggunakan skala *likert* dengan alternatif jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Sedangkan, pengumpulan data kualitatif diperoleh melalui wawancara sebagai data pendukung hasil analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, *standart of eror* yang digunakan adalah $\alpha=0,05$ dengan teknik analisis korelasi bivariat dengan hipotesis sebagai berikut :

- Ho = “ Tidak ada hubungan antara kepadatan penduduk dan privatisasi di kecamatan Jebres”
- Ha = “ ada hubungan antara kepadatan penduduk dan privatisasi di kecamatan Jebres “

Dasar pengambilan keputusan didasarkan pada pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis melalui tingkat signifikan (Sujarweni, 2015) .

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan terhadap sampel sebanyak 11 kelurahan di kecamatan Jebres dengan kategori jenis kelamin dan usia.

Tabel 1.1
Data Kepadatan Penduduk di Kecamatan Jebres

Kelurahan	Kepadatan Penduduk
Jebres	30.434
Pucang Sawit	30.883
Sewu	34.824

Sudiroprajan	16.783
Jagalan	38.760
Tegalharjo	15.200
Purwodiningrat	13.681
Wetan	11.383
Kulon	13.461
Mojosongo	9.679
Gandekan	26.531

Sumber : BPS kota surakarta,2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa ada 11 kelurahan di Kecamatan Jebres dimana kelurahan tersebut yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian dengan kategori usia yang telah ditentukan dan masing-masing kategori tersebut terdiri dari responden laki-laki dan perempuan. Sehingga total responden yang diperoleh adalah 110 orang dari 11 kelurahan di Kecamatan Jebres. Data demografi dalam tabel 1.1 diatas kemudian dikorelasikan dengan variabel *urban life manifesto* yang merupakan indikator dari krisis perkotaan . Hasil korelasi antara variabel kepadatan penduduk dan *urban life manifesto* adalah sebagai berikut

Tabel 1.2
Korelasi Kepadatan Penduduk dengan *Urban Life Manifesto*

Variabel X	Variabel Y (<i>Urban Life Manifesto</i>)	Korelasi	Signifikansi
Kepadatan Penduduk	Buruknya Kehidupan	0,192	0,571
	Gigantisme	-0,508	0,11
	Privatisasi	0,621	0,041
	Fragmentasi Sentrifugal	-0,151	0,657
	Hilangnya Makna ke Ruang Kota	-0,024	0,945
	Ketiadaan Peran atau Jabatan	0,301	0,368
	Ketidakadilan	0,129	0,705
	Profesionalisme tidak berakar	-0,143	0,674

Sumber : Data Penelitian 2018

Berdasarkan hasil korelasi diatas, terlihat bahwa ada korelasi yang kuat dan signifikan antara Kepadatan Penduduk dengan *urban life manifesto* yaitu indikator Privatisasi dengan hasil korelasi 0,621 dengan tingkat signifikansi 0,041. Sedangkan pada korelasi antara kepadatan penduduk dengan *urban life manifesto* lainnya rata-rata menunjukkan hubungan yang sangat lemah dengan tingkat signifikansi antara 0,11-0,945 dimana angka tersebut lebih besar dari α eror (0,05) yang telah ditentukan. Dasar pengambilan keputusan ini didasarkan pada pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis melalui tingkat signifikan 0,05.

Maka, keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena hasil hitung menunjukkan tingkat signifikan $0,041 < 0,05$ yang artinya terdapat hubungan antara kepadatan penduduk dan privatisasi dengan angka korelasi $0,621 > 0,521$ dari r_{tabel} , dan memiliki sifat korelasi positif yang artinya semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin tinggi privatisasi. Hal ini di dukung pula oleh pendapat responden yang sebagian besar mengatakan bahwa kota surakarta memiliki banyak mall (ruang privat) dan pembangunan yang dilakukan oleh orang luar tidak diketahui oleh warga setempat ,sebagai berikut :

“ kalau pembangunan pabrik gitu ndak tau mbk, tahu-tahu sudah jadi bangunannya.”
(Rudi,48 tahun)

Dalam penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa krisis perkotaan yang terjadi di kecamatan Jebres merupakan krisis akibat adanya privatisasi yang terjadi dalam masyarakat dan berkorelasi positif dengan tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Jebres.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat krisis perkotaan di kecamatan Jebres dalam bentuk privatisasi, dimana hal ini juga berkorelasi dengan tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Jebres. Berdasarkan analisis tersebut maka hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) diterima dengan hasil korelasi 0,621 dan tingkat signifikansi 0,041 serta memiliki sifat positif , yang berarti ada hubungan antara kepadatan penduduk dan privatisasi di Kecamatan Jebres.

Referensi

- Adhiatma , Adib Suryawan And Wahyono, Hadi (2004) Studi Partisipasi Pedagang Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Surakarta. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro
(<http://eprints.undip.ac.id/4674/>)
- BPS.2018.Kota Surakarta Dalam Angka 2018.Surakarta : BPS Kota Surakarta
- Kartono,Tri Drajat.2010. Materi Pokok Sosiologi Perkotaan.Jakarta : Universitas Terbuka
- Mantra Bagoes ,Ida. 2007.Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Purwanto, Edi.2014. Privatisasi Ruang Publik Dari Civic Centre Menjadi Central Business District (Belajar Dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). Jurnal Tata Loka Vo. 16 No. 3,153-167
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/viewFile/252/169>)
- Radjawali, Irendra.2004.Pemahaman Terhadap Pola Aktifitas Ekonomi Untuk Mengidentifikasi dan Melakukan Manajemen Konflik pada Ruang Terbuka Publik. Proseding Makalah Simposium Nasional “Managing Conflicts in Public Spaces Through Urban Design, hal. 83-91
- Sujarweni,Wiratna.2015. SPSS untuk penelitian.Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Wirth, Louis. 1938. Urbanism as a Way of Life. American Journal of Sociology, Vol. 44, No. 1 (Jul., 1938), pp. 1-24. [online] <http://www.jstor.org/stable/2768119> Diakses 28 September 2018.

Analisa Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Krisis Perkotaan dalam Perspektif Urban Life Manifesto di Kecamatan Pasar Kliwon

Edgar Bayu Refansyah, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. refansyahe@gmail.com

Luluk Dwi Parwati, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. Lulukdwiparwati30@gmail.com

Muh. Arbi Y.U, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. muhammadarbiyuliutomo@gmail.com

Refai Zinedine, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. Refaizinendine98@gmail.com

Roro Dyah D, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. Ayudyah780@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia perubahan dari desa ke kota telah menjadi hal yang wajar dimana sebagian yang bernuansa desa berubah menjadi bernuansa kota, yang dianggap menjadi salah satu cara untuk memajukan manusia yang ada di dalam ruang lingkup tersebut. Dari kedua nuansa tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, di mana kota dengan kelebihanannya yaitu menjanjikan untuk menjadi tempat kehidupan yang lebih baik namun dengan kompleksitas yang lebih rumit daripada di Desa, dan Kota Surakarta menjadi salah satu tempat yang mengalami perubahan nuansa tersebut Kota sendiri juga mempunyai permasalahan tersendiri salah satunya terkait dengan buruknya kehidupan di kota karena banyaknya jumlah orang yang membutuhkan kota tersebut untuk tempat tinggal..Penelitian ini mengacu pada teori dari Louis Wirth yang mengemukakan bahwa semakin kompleks penduduk perkotaan maka semakin kompleks permasalahannya. Penelitian ini menggunakan metode *mix methode* dengan strategi *dominant less dominant*. Metode *Dominant* menggunakan metode kuantitatif, dan *less dominant* menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah areal sampling dengan total 9 kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon. Dalam penelitian ini, variabel yang diamati adalah hubungan antara jumlah penduduk (X1) yang merupakan salah indikator Variasi Demografi dengan buruknya kehidupan (Y1) yang merupakan salah satu indikator *urban life manifesto* sebagai salah satu faktor terjadinya krisis perkotaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) terdapat keeratan hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah penduduk (X1) dengan buruknya kehidupan (Y1) di Kecamatan Pasar Kliwon, (2) serta bersifat "positif", dalam arti yaitu semakin tinggi jumlah penduduk di Kecamatan Pasar Kliwon, maka semakin tinggi pula buruknya kehidupan di Kecamatan Pasar Kliwon.

Kata Kunci: Buruknya kehidupan, *Urban Life Manifesto*, Krisis Perkotaan

Pendahuluan

Kota Surakarta tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 516.102 pada tahun 2017 (BPS, 2018). Kota Surakarta mengalami perubahan secara terus-menerus dan perubahan tersebut berdampak pada masyarakat Kota Surakarta secara tidak langsung. Kaitannya pada studi perkotaan adalah kondisi yang mampu dilihat dari beberapa pandangan teori dan diantaranya adalah *Urban Life Manifesto*. Secara umum pandangan tersebut memiliki beberapa indikator yang ada di dalamnya terdapat salah satu indikator yaitu buruknya kehidupan.

Tidak dipungkiri jumlah penduduk di dunia terus bertambah, begitu pula jumlah penduduk di Kota Surakarta. Dari bertambahnya penduduk tersebut pasti membawa peningkatan jumlah kebutuhan para penduduk dan akhirnya menimbulkan berbagai masalah. Dalam aspek ekonomi misalnya masalah pemenuhan kebutuhan keluarganya, karena banyaknya beban tanggungan yang harus dipenuhi oleh sejumlah anggota keluarga yang produktif yang jumlahnya lebih sedikit dari anggota keluarga yang harus ditanggung biaya hidupnya, belum lagi pemenuhan gizi dan aspek pendidikan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan dampak-dampak lain yang lahir sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk.

Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba untuk mengupas bagaimana jumlah penduduk dapat mempengaruhi tingkat buruknya kehidupan khususnya apa yang dialami oleh penduduk di Kecamatan Pasar Kliwon sebagai akibat dari jumlah penduduk yang terus meningkat.

Kajian Pustaka

Masyarakat Perkotaan

Menurut Bintarto (dalam Pandaleke, 2015) kota adalah sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai oleh strata ekonomi yang heterogen serta corak materialistis, atau dapat diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemutusan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Sedangkan Kota adalah penggundukan besar-besaran daripada penghuni yang tidak agraris, dengan perekonomian yang diatur rasional dan kurang menunjukkan perikatan kelompok daripada tempat tinggal masa kecil. (Pandaleke, 2015)

Jumlah Penduduk

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (UUD 1945 Pasal 26 ayat 2). Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Masalah Kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial, karena masalah itu terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah tersebut bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, baik di negara maju maupun negara Indonesia yang sedang berkembang ini. Masalah kependudukan terjadi karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang.

Macam-macam Masalah Kependudukan, yaitu: Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Tingkat pendidikan. Dari ketiga masalah kependudukan tersebut, Pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang menarik untuk dikaji. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran.

Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Thomas Robert Malthus mengemukakan bahwasanya Kemelaratan adalah tidak imbangnya pertambahan penduduk dengan pertambahan bahan makanan (Prawiro, 1983: 25).

Komposisi Penduduk **a. Biologi:** umur, jenis kelamin **b. Sosial:** pendidikan, status **c. Ekonomi:** jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan **d. Geografi:** tempat tinggal **e. Budaya:** agama, adat istiadat, dan lain sebagainya.

Urban life Manifesto

Salah satu pandangan yang digunakan dalam melihat atau mengkaji krisis perkotaan atau urban crisis adalah urban life manifesto yang juga dijuluki sebagai krisis dalam desain kota. Aspek yang menjadi bahasan dalam urban life manifesto antara lain: (1) buruknya kehidupan, (2) gigantisme dan hilangnya kontrol masyarakat terhadap perkembangan kota, (3) privatisasi yang tinggi sehingga menghilangkan kehidupan publik, (4) fragmentasi sentrifugal, (5) hilangnya makna ke ruangan kota, (6) ketiadaan peran dan jabatan. (7) ketidakadilan, dan (8) profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota (Kartono, 2010).

Buruknya Kehidupan

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian,

kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih (Kerlinger, 1973; dalam Singarimbun, Sofian Effendi, 1985). Hipotesis penelitian dibuat untuk dapat mengetahui mengetahui arah hubungan yang dirumuskan sebagai berikut:

Ha₁: Ada hubungan antara Jumlah penduduk dengan buruknya kehidupan di Kecamatan Pasar Kliwon.

Ha₂: Semakin tinggi Jumlah penduduk semakin tinggi pula buruknya kehidupan di Kecamatan Pasar Kliwon.

Untuk menguji hipotesis tersebut secara statistik, dibutuhkan hipotesis statistik atau hipotesis nol, dengan rumusan :

H0₁: Tidak ada hubungan antara jumlah penduduk dengan buruknya kehidupan di Kecamatan Pasar Kliwon.

H0₂: Semakin tinggi jumlah penduduk semakin rendah buruknya kehidupan di Kecamatan Pasar Kliwon.

Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

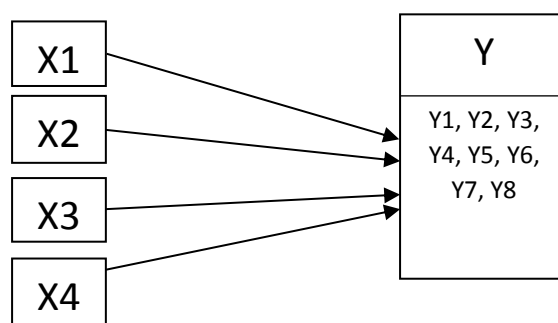
Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif dengan metode *Dominant less Dominant*. Metode *dominant* menggunakan metode kuantitatif, dan *less dominant* menggunakan metode kualitatif.

2. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian didapat dari variabel X dan Y, dimana Variabel X didapat dari konsep variasi-variasi demografi, sedangkan Variabel Y didapat dari konsep *Urban life manifesto*, yang dapat digambarkan berdasarkan bagan berikut ini:

Bagan 1 .

Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Data Penelitian tahun 2018

Keterangan:

X1 = Jumlah Penduduk

X2= Kepadatan Penduduk

X3= Heterogenitas

X4= Usia

Y = Urban Life Manifesto, yang terdiri dari 8 indikator yaitu :

Y1 = Buruknya kehidupan

Y2 = Gigantisme

Y3 = Privatisasi

Y4 = Fragmentasi sentrifugal

- Y5 = Hilangnya makna
- Y6 = Ketiadaan peran dan jabatan
- Y7 = Ketidakadilan
- Y8 = Profesionalisme

3. Populasi dan teknik pengambilan sampel

Populasinya adalah penduduk di Kecamatan Pasar Kliwon dengan 9 kelurahannya yang terdiri dari Pasar Kliwon, Joyosuran, Sangkrah, Gajahan, Kedunglumbu, Kauman, Baluwarti, Kampung Baru, Semanggi. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pemilihan *cluster area sampling* dengan jumlah 10 responden disetiap 9 kelurahan dengan 5 variasi usia laki-laki dan 5 perempuan di Kecamatan Pasar Kliwon.

4. Kuesioner Penelitian

Kuesioner penelitian berisi mengenai identitas diri seperti Nama, Usia, Jenis Kelamin, Alamat, dan Jarak rumah dari ruang publik. Alternatif jawaban pada kuesioner penelitian menggunakan skala *likert* dengan alternatif jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Variasi usia yang dimaksud dalam teknik pengambilan sampel antara lain (1) usia 10-14 tahun, (2) usia 15-24 tahun, (3) usia 25-34 tahun, (4) usia 35-54 tahun, (5) dan diatas 55 tahun. Terdapat 8 Indikator sesuai dengan perspektif *urban life* manifesto. Jumlah item pada kuesioner penelitian keseluruhan sebanyak 42 buah yang berkenaan dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kondisi kota Surakarta.

5. Teknik Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang merupakan variabel utama yang meliputi beberapa indikator variabel yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara (kuesioner) dengan responden.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari instansi, atau lembaga terkait, serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan, data data tersebut diperoleh dari BPS yang mencakup: (1) jumlah penduduk, (2) tingkat kepadatan penduduk, (3) heterogenitas penduduk.

6. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari responden kemudian diolah terlebih dahulu. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan cara (1) memberikan penilaian melalui kode-kode yang telah ditentukan untuk setiap jawaban yang ada pada kuesioner (koding). (2) jawaban-jawaban yang sudah dikoding tersebut dimasukan ke dalam Excel agar lebih mudah dalam proses pengeditan. (3) setelah semua data diedit barulah jawaban-jawaban yang sudah dikoding tersebut dapat dimasukan dalam *software analisis* yang dipakai peneliti yaitu SPSS 24.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan bantuan *software* statistik yaitu *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) Versi 24.

Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010:29) analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

8. Pengujian Hipotesis

Analisis Korelasi Bivariat

Menggunakan SPSS 24-Analyze-Correlate-Bivariate

Mencentang : *Correlation Coefficients* =Pearson, *Test of Significance*= *Two-tailed*, dan *Flag significant correlations*.

Hasil *Output* data SPSS 24

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Korelasi yang dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariante antara jumlah penduduk (X1), kepadatan penduduk (X2), heterogenitas penduduk (X3), dan usia (X4) terhadap *Urban Life Manifesto* (Y1) melalui 8 indikatornya yang dihitung menggunakan Software SPSS.24.0. Data menunjukkan bahwa nilai korelasi yang ada antara lain:

Tabel 1
Korelasi 4 Variasi demografi dengan 8 indikator *urban life manifesto*

Variasi Demografi	Indikator <i>Urban Life Manifesto</i>	R Hitung
Jumlah Peduduk	Buruknya Kehidupan	0,716
	Gigantisme	0,170
	Privatisasi	-0,180
	Fragmentasi Sentrifugal	-0,144
	Hilangnya Makna	0,317
	Ketiadaan Peran	-0,356
	Ketidakadilan	0,107
	Profesionalisme	-0,147
Kepadatan Penduduk	Buruknya Kehidupan	0,201
	Gigantisme	0,114
	Privatisasi	0,132
	Fragmentasi Sentrifugal	0,108
	Hilangnya Makna	0,523
	Ketiadaan Peran	-0,210
	Ketidakadilan	0,342
	Profesionalisme	0,275
Heterogenitas	Buruknya Kehidupan	0,565
	Gigantisme	0,097
	Privatisasi	-0,012
	Fragmentasi Sentrifugal	-0,252
	Hilangnya Makna	-0,126
	Ketiadaan Peran	-0,519
	Ketidakadilan	0,231
	Profesionalisme	-0,177
Usia	Buruknya Kehidupan	-0,047
	Gigantisme	-0,089
	Privatisasi	0,063
	Fragmentasi Sentrifugal	0,087
	Hilangnya Makna	0,120
	Ketiadaan Peran	0,169
	Ketidakadilan	0,142
	Profesionalisme	-0,061

Sumber: Data Penelitian tahun 2018

Pada tabel diatas, data dari Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Heterogenitas di Kecamatan Pasar Kliwon merupakan data sekunder dari BPS. Sedangkan data Usia dan Indikator *urban life manifesto* merupakan data primer yang bersumber dari responden penelitian. Dari tabel

diatas menunjukkan hasil *output software* SPSS 24 mengenai korelasi antara variasi demografi dengan *urban life manifesto* melalui indikator-indikatornya yang menghasilkan 32 R hitung.

Pembahasan

Dari hasil r hitung 32 korelasi dengan menggunakan analisis bivariat dapat dilihat menggunakan derajat keeratan (Abdurahman dkk, 2012), dapat disimpulkan terdapat beberapa nilai keeratan hubungan yaitu (1) 20 R hitung adalah korelasi yang lemah dengan nilai sekitar 0,000-0,200, (2) 8 R hitung adalah korelasi yang cukup dengan nilai 0,201-0,400 (3) 3 R hitung adalah korelasi yang kuat dengan nilai sekitar 0,401-0,700 , dan (4) terdapat 1 R hitung dengan derajat keeratan sangat kuat dengan nilai sekitar 0,701-0,900.

Dengan itu, peneliti mencoba untuk mengambil data R hitung yang paling kuat hubungannya antara variabel X dengan Y, dan hasilnya adalah R hitung pada variabel jumlah penduduk (X1) dan buruknya kehidupan (Y1) dengan hasil *output* SPSS 24 sebagai berikut:

Tabel 2.
Korelasi antara Jumlah Penduduk (X1) dengan buruknya kehidupan (Y1)
Correlations

		Jumlah Penduduk	Buruknya Kehidupan
Jumlah Penduduk	Pearson Correlation	1	,716*
	Sig. (2-tailed)		,030
	N	9	9
Buruknya Kehidupan	Pearson Correlation	,716*	1
	Sig. (2-tailed)	,030	
	N	9	9

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Penelitian tahun 2018

Hipotesis dilakukan dengan mencari korelasi variabel penelitian yaitu Jumlah penduduk dengan buruknya kehidupan. Hasil korelasi dapat dilihat pada tabel 5. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil korelasi pearson yaitu 0,716 dan P-value 0,030. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika menggunakan hipotesis nol (H0) adalah sebagai berikut:

- Jika r-hitung < r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) > level of significant (α) maka diterima
- Jika r-hitung > r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) < level of significant (α) maka ditolak

Maka keputusan yang diambil melalui p-value pada kolom sig.(2-tailed) = 0,030 lebih kecil dari *level of significant* (α) = 0,05, atau melihat tanda * pada output SPSS 24, interpretasinya menandakan bahwa (1) terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk dengan buruknya kehidupan dan (2) terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah penduduk (X1) dengan buruknya kehidupan (Y2) dengan melihat hasil r hitung korelasi pearson yaitu 0,716.

Dari hasil korelasi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara jumlah penduduk dengan krisis perkotaan yang ditunjukkan melalui buruknya kehidupan dalam masyarakat Kota Surakarta. Hal ini didukung pula oleh pendapat responden yang mengatakan bahwa kondisi kehidupan disekitarnya dirasa buruk:

"Lingkungannya sih nyaman mas, tetangga juga wong e penak penak, tapi kadang saya mau makan susah, cari kerja juga gak mudah mas, apalagi saya sudah berumur"

(Sri Sukesno, 59 Tahun)

"Kadang yo menikmati, tapi kadang enggak juga, kadang saya sendiri enggak nyaman hidup di surakarta karena lingkungannya, tapi harus bisa legowo, mas"

(Hasyim, 80 tahun)

"yowis ngene ki mas lingkungan sekitar, antar rumah sempit dan menurutku yo bisa dibilang permukimane kumuh."

(Setyo Pamilih, 38 tahun)

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa krisis perkotaan yang terjadi di Kecamatan Pasar Kliwon merupakan krisis akibat kondisi buruknya kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat dan berkorelasi positif dengan jumlah penduduk di Kecamatan Pasar Kliwon.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah H_{01} dan H_{02} ditolak karena (1) Korelasi antara variasi demografi dengan *urban life manifesto* memiliki hubungan yang sangat kuat melalui indikator jumlah penduduk dengan buruknya kehidupan dengan nilai hitung 0,716. (2) karena $R_{hitung} > R_{tabel}$ pada bagian signifikan yaitu $0,030 > 0,05$, yang menandakan bahwa hubungan tersebut signifikan. Dan nilai hitung pada korelasinya adalah (+) 0,716, yang bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk di Kecamatan Pasar Kliwon, maka semakin tinggi pula tingkat buruknya kehidupan di Kecamatan Pasar Kliwon.

Sedangkan H_{a1} dan H_{a2} diterima, yang artinya terdapat hubungan antara jumlah penduduk dengan buruknya kehidupan di Kecamatan Pasar Kliwon yang ditandai dengan angka 0,716 yang berarti mempunyai hubungan yang sangat kuat antara jumlah penduduk dengan buruknya kehidupan dan Semakin tinggi jumlah penduduk maka akan semakin tinggi pula buruknya kehidupan di Kecamatan Pasar Kliwon yang ditandai dengan nilai positif dari hasil korelasi pearson.

Keterkaitan antara Hasil dengan Teori

Dalam keterkaitannya hasil dengan teori, terdapat hubungan yang searah dengan teori, dimana menurut Thomas Robert Malthus mengemukakan bahwasannya kemeralatan adalah timpangnya jumlah pertambahan penduduk dengan jumlah pertambahan makanan, dalam pernyataan ini mengandung bahwa pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan kemeralatan bagi manusia dimana akan terjadi masalah-masalah yang cukup membebani di masa depan yang diprediksi oleh Malthus. Sedangkan dalam pandangan *urban life manifesto*, buruknya kehidupan digambarkan pada kualitas kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan.

Karena masalah pertambahan penduduk yang diprediksi oleh Malthus akan menyebabkan kemeralatan bagi manusia, begitu pula demikian artinya penduduk kecamatan di Pasar Kliwon juga dapat diprediksi bahwa akan terjadi kemeralatan ketika terjadi ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan kesanggupan penduduk dalam memenuhi kebutuhannya, hingga akibatnya ketika jumlah penduduk di Pasar Kliwon meningkat, maka dugaan yang terjadi adalah semakin meningkatnya pula kondisi buruknya kehidupan penduduk di Kecamatan Pasar Kliwon.

Dugaan Malthus terkait dengan masalah-masalah yang akan muncul di masa depan mengenai pertambahan penduduk ternyata benar dimana hingga sampai saat ini sebagian besar manusia mengalami kemeralatan dalam usahanya untuk mencoba memenuhi kebutuhannya aspek fisik dan non fisik yang berkaitan dengan kualitas kondisi kehidupannya, dalam arti ketika kondisi penduduk terlanda kemeralatan karena masalah pertumbuhan penduduk yang diprediksi Malthus, secara tidak

langsung juga mengakibatkan kualitas penduduknya rendah. Misalnya seperti pendidikan rendah, akan berdampak pada kesulitannya dalam mencari pekerjaan, dan jika bekerja pun maka hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang berdampak pada kondisi kehidupannya, Misalnya pula ketahanan yang rapuh ketika mengalami suatu masalah karena tidak mempunyai jaminan atau cadangan apa-apa, akhirnya terkait dengan bagaimana kemandirian penduduk yang kurang sehingga mempunyai sifat “mencari pertolongan” daripada “mempersiapkan pertolongan” dan bahkan sulit untuk bisa berfikir dan melakukan sesuatu untuk mengembangkan kemampuan agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik sehingga kondisi penduduknya semakin buruk kehidupannya tanpa disadari.

Referensi

- Abdurahman, Maman, Muhidin, Sambas & Somantri, Ating. 2012. *Dasar-Dasar Metode Statiska Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2018. *Kota Surakarta Dalam Angka (Surakarta Municipality in Figures) 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2015. *Kajian Kependudukan*.
- Kartono, Drajat Tri. 2010. *Sosiologi Perkotaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka Press.
- Pandaleke, Alfien. 2015. *Sosiologi Perkotaan*. Bogor: PT Maxindo Internasional.
- Prawiro, Ruslan, H. 1983. *Kependudukan, Teori, Fakta, dan Masalah*. Bandung: Alumni
- Singarimbun M, dan Effendi, S. 1985. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Profesionalisme yang Tidak Berakar pada Kehidupan dan Kebutuhan Kota Sebagai Krisis Perkotaan di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

Aldi Aishal, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. aldiaishall@gmail.com

Dita Ayu Mustika, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, ditaayumustika928@gmail.com

Ivander Jordan Leong, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, ivanderjdnlg@gmail.com

Wida Widiyawati, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, widawidiya439@gmail.com

Zaky Gunawantoro, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, zakygunawantoro@gmail.com

Abstrak

Jumlah penduduk di suatu daerah dapat mempengaruhi banyaknya tenaga kerja yang muncul setiap tahun. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang ada. Sehingga, pertumbuhan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap padatnya tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Jumlah Penduduk dengan profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta yang dikupas melalui Perspektif *Urban Life Manifesto*. Penelitian ini menggunakan metode *mix method Dominant less Dominant*. Metode *dominant* menggunakan metode kuantitatif, dan *less dominant* menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan penyebaran instrumen yang berjumlah 42 item. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan pengumpulan 110 responden yang mewakili 11 unit analisis di Kecamatan Laweyan. Dalam penelitian ini digunakan Variabel bebas [X] yaitu Jumlah Penduduk dan Variabel terikat [Y] yaitu Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan yang kuat antara Jumlah Penduduk dengan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota yang ditunjukkan dengan angka 0.572 dalam hitungan korelasi pearson dan menunjukkan adanya hubungan positif antara Jumlah Penduduk dengan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota yang berarti bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk maka akan semakin tinggi juga Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Profesionalisme, Krisis Kota

Pendahuluan

Pada dasarnya, jumlah penduduk di sebuah daerah dapat mempengaruhi banyaknya tenaga kerja yang muncul setiap tahun. Semakin tinggi jumlah penduduk (karena tingkat kelahiran tinggi dan arus urbanisasi tinggi), semakin banyak pula tenaga kerja yang ada. Tenaga kerja itu sendiri berarti penduduk yang berada dalam usia kerja. Sesuai UU No. 13 tahun 2003, Bab I pasal 1 ayat 2, tenaga kerja disebut sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk di sebuah kota akan sangat berpengaruh pada semakin padatnya tenaga kerja. Selain permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat menampung para tenaga kerja sehingga menghasilkan pengangguran, sebenarnya ada sebuah studi kasus yang dapat menjadi salah satu sumbangsih bagi krisis perkotaan. Hal tersebut adalah profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota.

Menurut Kartono (2004), profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota itu berarti tenaga profesional yang kita miliki terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan tenaga dan posisi yang sesuai. Dengan kata lain, banyak lulusan dari kita yang menganggur menunggu

pekerjaan atau mungkin mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Sebagai contoh, banyak mahasiswa lulusan Perencanaan Kota yang kemudian memilih bekerja di bank daripada bekerja di kursi pemerintah untuk mengurus rencana pembangunan di kota tersebut. Hal ini terjadi karena memang di kursi pemerintahan tersebut sudah penuh terisi, sedangkan para mahasiswa yang baru saja lulus membutuhkan pekerjaan dan yang terbuka adalah tempat kerja yang tidak sesuai dengan jurusannya. Pilihannya memang hanya dua, antara menganggur menunggu ada lowongan kerja di tempat yang tepat, atau bekerja di tempat lain yang terbuka walau tidak sesuai dengan status kelulusannya. Semua hal ini bermula pada jumlah penduduk yang terus meningkat di kota. Semakin banyak orang yang memulai jenjang pendidikannya tanpa melihat apa yang dibutuhkan oleh kota tempat ia tinggal, melainkan apa yang dia inginkan. Hasil akhirnya adalah tercetaknya orang-orang profesional yang tidak terlalu sesuai untuk kebutuhan kota tempat ia tinggal. Di Indonesia, sudah banyak kota yang mengalami pertumbuhan penduduk. Salah satunya adalah Kota Surakarta.

Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,04 km² memiliki penduduk sebanyak 545.653 jiwa, terdiri dari 266.724 penduduk laki-laki dan 278.929 penduduk perempuan. Jumlah ini tersebar di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Jika dilihat dengan persebaran penduduk di setiap kecamatan, urutan jumlah penduduk terbanyak adalah sebagai berikut: Kecamatan Pasar Kliwon (17.293 jiwa/km²) diikuti oleh Kecamatan Serengan (16.614 jiwa/km²), Kecamatan Banjarsari (11.691 jiwa/km²), Kecamatan Laweyan (11.233 jiwa/km²), dan Kecamatan Jebres (11.057 jiwa/km²). Lanjut mengenai pertumbuhan penduduk, jika diurutkan, penambahan penduduk tertinggi dimulai dari Kecamatan Serengan (4,71 persen), Kecamatan Laweyan (2,59 persen), Kecamatan Banjarsari (1,58 persen), Kecamatan Jebres (1,25 persen), dan Kecamatan Pasar Kliwon yang mengalami penurunan jumlah penduduk dengan angka 0,25 persen.

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Tingkat Kepadatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajang	12.227	12.519	97,67
Laweyan	1.042	1.088	95,77
Bumi	3.119	3.235	96,41
Panularan	4.620	4.809	96,07
Sriwedari	2.016	2.108	95,64
Penumping	1.986	2.109	94,17
Purwosari	5.098	5.279	96,57
Sondakan	6.015	6.235	96,47
Kerten	4.676	4.772	97,99
Jajar	4.630	4.732	97,84
Karangasem	4.892	5.126	95,44
Jumlah	102.333	8,638	11,847

Sumber : Data BPS 2017

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara jumlah penduduk dengan profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota di Kecamatan Laweyan, Surakarta. Seperti halnya yang dikatakan oleh Loius Wirth, bahwa kota tidak bisa memproduksi dirinya sendiri, kecuali dengan merekrut migran dari kota-kota lain. Kota merupakan harapan bagi semua penduduknya. Lapangan pekerjaan, tenaga kerja, bahkan para profesional yang sesuai dengan kebutuhan kota adalah keharusan yang sudah semestinya dipikirkan. Terkait dengan studi di atas, telah dilakukan pengamatan Kecamatan Laweyan dengan rentang waktu selama tiga minggu. Cara pengamatan dan hasil dapat dilihat pada pembahasan setelah ini.

Tinjauan Pustaka

Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan kelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu (Rahman, 2018, p. 324). Menurut Munir dan Budiharto (dalam Rahman, 2018) penduduk merupakan sejumlah orang yang menempati suatu habitat geografis, kemudian memperoleh kehidupan dari habitatnya dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan laman resmi *website* resmi Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2015 terdapat 33.774.141 jiwa, kemudian pada tahun 2016 terdapat 34.019.095 jiwa, dan pada tahun 2017 terdapat 34.257.865 jiwa. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka persaingan dalam kesempatan kerja semakin ketat sehingga diperlukan profesionalisme yang tinggi dalam bekerja.

Kota menawarkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, hal ini membuat pertambahan penduduk kota dari tahun ke tahun semakin tinggi. Selain dari pertambahan penduduk alamiah kota, pertambahan penduduk yang dikarenakan urbanisasi adalah yang paling utama. Faktor-faktor seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi menjadi acuan tersendiri terkait dengan pertambahan penduduk kota. Menurut Louis Wirth dalam *Urbanism as Way of Life*, tahun 1938 mengatakan jika lebih besar, lebih padat penduduknya, dan lebih heterogen masyarakat, semakin menonjolkan karakteristik yang terkait dengan urbanisme. Wirth juga menjelaskan bahwa kota menunjukkan jenis dan tingkat heterogenitas penduduk yang tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh hukum bilangan besar atau cukup diwakili dengan cara kurva distribusi normal. Karena penduduk kota tidak mereproduksi dirinya sendiri, ia harus merekrut migran yang berasal dari kota-kota lain, pedesaan atau bahkan dari negara lain.

Profesionalisme

Menurut Anogara (dalam Budihargo, 2017) Kamus Webster Amerika menegaskan bahwa profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya. Profesionalisme sangat mencerminkan sikap seseorang terhadap pekerja maupun jenis pekerjaannya/profesinya. Menurut Abeng (dalam Budihargo, 2017) pengertian profesional terdiri dari tiga unsur, yaitu knowledge, skill, integrity, dan selanjutnya ketiga unsur tersebut harus dilandasi dengan iman yang teguh, pandai bersyukur, serta kesedian untuk belajar terus-menerus. Menurut Siagian (dalam Budihargo, 2017), profesionalisme adalah keadaan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat.

Rancangan para profesional saat ini sering menjadi bagian dari permasalahan. Di banyak kasus, kita merancang untuk tempat dan orang yang tidak kita kenal dan memberi mereka sedikit kekuatan atau pengakuan. Terlalu banyak para profesional yang menjadi bagian dari budaya lokal bagi mereka yang membuat rencana dan produk kita.

Untuk kasus saat ini, bisa dikatakan kalau tenaga profesional yang kita miliki terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan tenaga dan posisi yang sesuai. Dengan kata lain, banyak dari lulusan kita yang menganggur menunggu pekerjaan atau mungkin mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. "*Right man in the Right place*" seakan sudah tidak dipegang lagi. Yang terpenting adalah adanya pekerjaan yang bisa dikerjakan dan membiayai hidup sehari-hari.

Krisis Perkotaan

Di dalam kota akan terjadi peradaban manusia yang akan terus bergerak dan berubah sehingga menuntut masyarakat di dalamnya mampu ikut arus peradaban agar tidak tergilas oleh roda kemajuan zaman. Karenanya, sumber dari segala sumber masalah kota adalah ketidakmampuan sistem kota mengantisipasi pertumbuhan dan mengontrol perubahan. Peradaban manusia, gaya hidup, dan fisik

kota begitu cepat berubah, sementara antisipasi sistem kota dan mekanisme kontrol umumnya berjalan perlahan. Krisis perkotaan sendiri tidak hanya sekedar krisis dalam hal fisik saja tetapi juga dapat berupa krisis sosial dan moral.

Krisis sosial terlihat dari semakin individualismenya masyarakat kota dan semakin hilangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sebagian masyarakat kota sudah kehilangan jiwa sosial dan kepedulian terhadap sesamanya. Degradasi kepekaan sosial masyarakat kota menandakan bahwa kota-kota mulai mengalami kemunduran dalam lingkungan sosialnya.

Krisis perkotaan dapat berupa menurunnya kualitas solidaritas-integrasi sosial dan desain kota. Kerusakan, kekerasan, dan kejahatan massa (*masscrime*) atau perilaku kolektif yang destruktif (*destruktive collectiveaction*) merupakan salah satu bentuk krisis karena lemahnya kualitas kontrol sosial dan rendahnya solidaritas-integrasi sosial.

Berbagai macam krisis perkotaan tadi telah di muat dalam sebuar manifesto yang dijadikan indikator dalam mengukur krisis di penelitian ini yang diberi nama *urban life manifesto* (LeGates, 1996 dalam Pandaleke,2015) berupa : (1) buruknya kehidupan, (2) gigantisme dan hilangnya kontrol masyarakat terhadap perkembangan kota, (3) privatisasi yang tinggi sehingga menghilangkan kehidupan publik, (4) fragmentasi sentrifugal, (5) hilangnya makna ke ruangan kota, (6) ketiadaan peran dan jabatan. (7) ketidakadilan, dan (8) profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif dengan metode *Dominant less Dominant*. Metode *dominant* menggunakan metode kuantitatif, dan *less dominant* menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pemilihan *cluster area sampling* dengan jumlah sampel 110 dengan unit analisis 11 kelurahan di kecamatan Laweyan dengan 5 variasi usia laki-laki dan perempuan di Kecamatan Laweyan. Variasi usia yang dimaksud dalam teknik pengambilan sampel antara lain (1) Usia 10-14 tahun (2) usia 15-24 tahun (3) usia 25-34 tahun (4) usia 35-54 tahun (5) dan diatas 55 tahun. Teknik pengumpulan data disebarkan melalui angket yang menggunakan skala *likert* dengan 4 alternatif jawaban; Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Jumlah item keseluruhan sebanyak 42 buah yang berkaitan langsung dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kondisi kota Surakarta. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS dan didukung dengan hasil wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1.1

Korelasi *Bivariate Pearson* Variabel Jumlah Penduduk dan Profesionalisme Yang Tidak Berakar pada Kehidupan dan Kebutuhan Kota

		Jumlah Penduduk	Profesionalisme
Jumlah Penduduk	Pearson Correlation	1	,572
	N	11	11
Profesionalisme	Pearson Correlation	,572	1
	N	11	11

Sumber : Analisa Penulis 2018

Tabel 1.1 menyajikan hasil korelasi *bivariate pearson* untuk semua sampel penelitian, Jumlah sampel sebanyak 110 responden yang terbagi dalam 11 unit analisis yaitu 11 Kelurahan dari Kecamatan Laweyan. Dari hasil analisis korelasi *bivariate pearson* tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat korelasi antara Jumlah Penduduk dengan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota (r) sebesar 0,572. Jika mengacu pada Sugiyono (2007), Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Tingkat Kepadatan Penduduk dengan Ketidakadilan. Sedangkan arah hubungan korelasi tersebut adalah positif karena nilai r positif, dimana semakin tinggi Jumlah Penduduk maka semakin tinggi Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota.

Hasil Uji Korelasi *Bivariate Pearson*

Hipotesis dilakukan dengan mencari korelasi variabel penelitian Jumlah Penduduk dengan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota. Hasil korelasi dapat dilihat pada tabel 1.1 Pada tabel tersebut menunjukkan hasil korelasi pearson yaitu 0,572. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika menggunakan hipotesis nol (H_0) adalah sebagai berikut:

- Jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$, $>$ level of significant (α) maka diterima
- Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, $<$ level of significant (α) maka ditolak

Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif dan kuat antara Jumlah Penduduk dengan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota.

Dari hasil korelasi tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungank kuat antara Jumlah Penduduk dengan krisis perkotaan yang ditunjukkan melalui Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota di Surakarta. Dalam keseharian warga kota Surakarta bekerja tidak sesuai dengan keahlian mereka, berkerja atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup adalah yang paling utama, hal ini terjadi karena di kota Surakarta sulit untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini didukung oleh pendapat responden yang mengatakan bahwa :

"di Solo itu mas, kalau cari kerja ya susah, susah susah gampang. Kalaupun ketemu ya harus di syukuri too," (PR, 54)

Dan ketika diwawancarai mengenai pekerjaan dan profil pekerjaan di kota Surakarta, salah satu responden kami PR mengatakan bahwa:

"kalau bekerja yang untuk memuhi kebutuhan hidup, jelas seperti itu mas, di solo banyak pendaatang nya yang bekerja, daerah sini juga gitu (menunjuk ke arah pabrik kain baik), yang orang solo asli malah jarang"

Dari data wawancara yang ada menunjukan bahwa ada penurunan kualitas kota Surakarta pada bagian Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota, mereka sependapat bahwa yang ada di kota Surakarta sekarang adalah pendaatang, mereka tidak mengenal dengan baik pendaatang, dan para pendaatang pun juga demikian.

Dalam penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa krisis perkotaan yang terjadi di kecamatan Laweyan merupakan krisis akibat Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota akibat banyak nya penduduk yang datang, atau urbanisasi.

Dari hasil analisis data kuantitatif yang menunjukan adanya hubungan yang kuat antara Jumlah Penduduk dan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota. Dan dari hasil

wawancara ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota adalah karena tingginya angka pendatang di kota Surakarta hal ini sependapat dengan pandangan Louis Wirth yang mengatakan bahwa penduduk kota tidak mereproduksi dirinya sendiri, ia harus merekrut migran yang berasal dari kota-kota lain, pedesaan atau bahkan dari negara lain. Semakin tinggi angka urbanisasi di kota Surakarta maka akan semakin tinggi juga Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota, yang nantinya akan berdampak kepada semakin tingginya krisis di kota Surakarta.

Kesimpulan

Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif dan kuat antara Jumlah Penduduk dengan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota. Uji korelasi menyatakan ada hubungan yang kuat antara Jumlah Penduduk dengan Profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota dari hasil korelasi pearson menunjukan angka 0,572.

Referensi

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Kartono, Drajat Tri. 2010. Sosiologi Perkotaan. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka Press.

Rahman, D. A. (2018). Komparasi Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Antara Urban (Perkotaan) dan Rural (Perdesaan) di Kota Payakumbuh. *Journal of Geography Universitas Negeri Padang*. Retrieved November 22, 2018, from <http://geografi.ppj.unp.ac.id/index.php/student/article/download/80/47/>

<https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015-2017.html> diakses pada 25 November 2018.

Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia , *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol 17 no 6 tahun 2011, hal 708.

Budihargo, Bayuaji. 2017 *Profesionalisme Ditinjau Dari Faktor Demografis (Jenis Kelamin, Usia, dan Tingkat Pendidikan) pada Karyawan Tetap Administratif Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Wirth, Louis. 1938. Urbanism as a Way of Life. *American Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 1 (Jul., 1938). [online] <http://www.jstor.org/stable/2768119> Diakses 23 November 2018.

Korelasi Antara Jumlah Penduduk dan Ketidakadilan dalam Perspektif *Urban Life Manifesto* di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Ika Agustina, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, ikaagustina28@gmail.com

Budi Kurniawan, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, budi@sociologist.com

Avif Yusuf Yanuttama, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, yanuttama@gmail.com

Syaifudin, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, elsyaif97@gmail.com

Titin Marliyana, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, titinmarliyana04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar korelasi Antara Jumlah Penduduk dan Ketidakadilan dalam Perspektif *Urban Life Manifesto* di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah Jumlah Penduduk (X) sebagai variabel bebas dan Ketidakadilan dalam Perspektif *Urban Life Manifesto* di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian di lakukan melalui pengisian kuisioner oleh warga di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang didasarkan pada jenjang usia dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Responden penelitian ini adalah warga asli di Kecamatan Banjarsari yang terdiri dari 13 kelurahan. Sampel diambil sebanyak 130 responden dari unit per kelurahan. Untuk metode analisis dan uji hipotesis menggunakan korelasi, lalu perhitungannya menggunakan program SPSS versi 16.0. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Korelasi Antara Jumlah Penduduk dan Ketidakadilan dalam Perspektif *Urban Life Manifesto* di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta memiliki nilai koefisien sebesar -0.593 yang berarti koefisien korelasi Antara Jumlah Penduduk dan Ketidakadilan dalam Perspektif *Urban Life Manifesto* di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah sedang dengan arah negatif.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Ketidakadilan, *Urban Life Manifesto*, Krisis Kota

Pendahuluan

Selama ini kota selalu ditonjolkan dengan berbagai kelebihanannya baik fasilitas maupun kesempatan untuk memperoleh kehidupan sejahtera. Maka tidak jarang banyak orang yang terjebak oleh iklan semu yang tidak sepenuhnya menceritakan keadaan kota yang sebenarnya. Kepedulian masyarakat kota terhadap tempat tinggalnya pun sangatlah kurang karena mereka terbiasa mendengarkan keadaan kota yang dianggap semakin maju. Padahal di sisi lain kota sedang menjerit karena merana. Sebagai konsekuensinya hingga saat ini kota mengalami penurunan kualitas sedikit demi sedikit namun pasti. Kehidupan kota sendiri memang cukup kompleks mulai dari politik, ekonomi, konflik kelas, hingga gaya hidup masyarakatnya (Kartono, 2010).

Persoalan yang terjadi dalam masyarakat kota terkait penurunan kualitas juga disebut sebagai krisis perkotaan. Yang mana dijelaskan juga menurut Kartono (2010), Kota adalah aquarium perubahan. Di dalamnya peradaban manusia terus bergerak dan berubah. Siapa yang tidak mampu ikut arus perubahan maka ia akan tergilas roda kemajuan zaman. Karenanya, sumber dari segala sumber masalah kota adalah ketidakmampuan sistem kota mengantisipasi pertumbuhan dan mengontrol perubahan. Salah satu kota yang memiliki pertumbuhan yang telah berubah adalah kota Surakarta.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang menyandang nama “Kota Budaya”. Posisi Kota Surakarta juga dianggap sebagai pusat dari pengembangan wilayah eks-karesidenan Surakarta yang terbentuk pada masa dahulu. Kemudian dilansir dari (news.okezone.com) Kota Solo yang tak lain adalah kota Surakarta menyandang predikat sebagai kota paling layak huni di Indonesia.

Kota Surakarta sebagai pusat Wilayah Pengembangan VIII Propinsi Jawa Tengah, mempunyai peran yang strategis bagi pengembangan wilayah di Propinsi Jawa Tengah. Sebagai pusat WP VIII kota Surakarta mempunyai tingkat pertumbuhan kota yang sangat pesat yang dapat dilihat dan pertumbuhan/ ekonomi dan sistem aktivitas kota sentra pertumbuhan fisik kota.

Kondisi Kota Surakarta juga telah memiliki perkembangan dalam segi demografi masyarakat dan tak jarang hal tersebut mampu memicu adanya konflik dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu kondisi Kota Surakarta yang terjadi pada masa reformasi, yang mana menurut (Zaida dan Arifin, 2010), Tekanan arus urbanisasi yang melonjak mengakibatkan pengaturan tata ruang kota yang dapat melahirkan konflik spasial namun tidak jarang juga memicu terjadinya konflik fisik. Seluruh kepentingan untuk memanfaatkan tata guna tanah saling beradu kuat untuk merebut akses dan dalam konteks ini biasanya tidak ada satu pihak pun yang mau mengalah. Kondisi yang terjadi di Kota Surakarta juga telah mengalami berbagai perubahan struktur sosial masyarakat yang dimulai dari periode Pra-Kerajaan, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Pemerintahan Kolonial Belanda, Kemerdekaan RI, Orde Baru, hingga periode Reformasi.

Salah satu pandangan yang digunakan dalam melihat atau mengkaji krisis perkotaan atau urban crisis adalah urban life manifesto yang juga dijuluki sebagai krisis dalam desain kota. Aspek yang menjadi bahasan dalam urban life manifesto antara lain: (1) buruknya kehidupan, (2) gigantisme dan hilangnya kontrol masyarakat terhadap perkembangan kota, (3) privatisasi yang tinggi sehingga menghilangkan kehidupan publik, (4) fragmentasi sentrifugal, (5) hilangnya makna ke ruangan kota, (6) ketiadaan peran dan jabatan. (7) ketidakadilan, dan (8) profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota (Kartono, 2010)

Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 5 kecamatan, 51 kelurahan, 604 Rukun Warga (RW), serta 2.714 Rukun Tetangga (RT). Kelima kecamatan tersebut adalah kecamatan laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Pada tahun 2016, komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk Kota Surakarta, untuk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki 282.336 jiwa atau 49,45% dan jumlah penduduk perempuan 288.540 jiwa atau 50,55%. Komposisi umur dan jenis kelamin dapat digambarkan secara grafik dengan piramida penduduk (Dispendukcapil Surakarta, 2016).

Pada piramida penduduk Kota Surakarta tahun 2016, komposisi penduduk tertinggi berada pada rentang umur 35-39 tahun dimana komposisi penduduk laki-laki sebesar 8,58% dan penduduk perempuan 8,37% dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada rentang umur tersebut sebanyak 48.375 jiwa. Adapun kondisi penduduk terkecil berada pada rentang umur 70-74 tahun dengan presentase penduduk laki-laki sebesar 1,62% dan penduduk perempuan 2,13% (Dispendukcapil Surakarta, 2016).

Kecamatan Banjarsari adalah kecamatan yang terletak di pusat kota Surakarta. Di Kecamatan Banjarsari sendiri terdapat 13 Kelurahan yaitu Timuran, Keprabon, Ketelan, Punggawan, Kestalan, Setabelan, Gilingan, Nusukan, Kadipiro, Banyuanyar, Sumber, Manahan, Mangkubumen. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Surakarta yaitu sebesar 181.006 jiwa dan luas wilayah terluas di kota Surakarta yaitu sebesar 14,81 km². (Dispendukcapil Surakarta, 2016).

Komposisi Penduduk di Kecamatan Banjarsari terbelang hampir sama rata dimana penduduk laki-laki berjumlah 89.323 jiwa atau dan jumlah penduduk perempuan 91.683 jiwa dengan jumlah kepadatan penduduk 12.222 jiwa/km² (Dispendukcapil Surakarta, 2016).

Beranjak dari kondisi demografi Kota Surakarta khususnya di Kecamatan Banjarsari yang mengalami berbagai perubahan struktur masyarakat, serta berbagai aspek di Surakarta, menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan krisis perkotaan di wilayah Kota Surakarta yaitu Kecamatan Banjarsari. Maka dari itu peneliti Ingin Melakukan Penelitian Dengan Judul **“Korelasi Antara Jumlah Penduduk Dan Ketidakadilan Dalam Perspektif Urban Life Manifesto Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.**

Kajian Pustaka

Kota

Kota-kota merupakan lambang dari ketidaksamaan. Di banyak kota pertentangan antara lingkungan orang kaya dan lingkungan orang miskin saling berbenturan. Di banyak kejadian, lingkungan orang kaya dengan pendudukan dan dominasi pola umum transportasi dan akses membuat lingkungan orang miskin terlihat lebih buruk. Pertentangan lebih sedikit terlihat di kota modern yang tidak terlalu padat, dimana kesenjangan tidak terlalu terlihat. Selain kesenjangan dibidang ekonomi, saat ini berbagai kesenjangan mulai tumbuh seperti dibidang hukum dan politik. Perbedaan perlakuan antara orang yang mempunyai kedudukan dan orang biasa sudah terlihat jelas, bahkan memang sengaja diperlihatkan untuk merendahkan orang kecil.

Ketidakadilan

Ketidakadilan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang dapat terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan secara struktural maupun kultural. Bentuk-bentuk dari ketidakadilan bisa disebutkan antara lain stereotype, marginalisasi, subordinasi dan dominasi yang semuanya pada hakikatnya sangat potensial merugikan segmen yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam sebuah dialektika hubungan. manifestasi bentuk ketidakadilan antara lain berlangsungnya eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi secara struktural dan sistemik dalam berbagai bidang dan ruang lingkup. Fenomena buram tersebut melahirkan konfigurasi tatanan sosial yang memposisikan kelompok yang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai bagian kelompok tertekan karena tersubordinasi dan terdiskriminasi.

Jumlah Penduduk

Kota menawarkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, hal ini membuat pertambahan penduduk kota dari tahun ke tahun semakin tinggi. Selain dari pertambahan penduduk alamiah kota, pertambahan penduduk yang dikarenakan urbanisasi adalah yang paling utama. Faktor-faktor seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi menjadi acuan tersendiri terkait dengan pertambahan penduduk kota. Menurut Louis Wirth dalam *Urbanism as Way of Life*, tahun 1938 mengatakan jika lebih besar, lebih padat penduduknya, dan lebih heterogen masyarakat, semakin menonjolkan karakteristik yang terkait dengan urbanisme. Wirth juga menjelaskan bahwa kota menunjukkan jenis dan tingkat heterogenitas penduduk yang tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh hukum bilangan besar atau cukup diwakili dengan cara kurva distribusi normal. Karena penduduk kota tidak mereproduksi dirinya sendiri, ia harus merekrut migran yang berasal dari kota-kota lain, pedesaan atau bahkan dari negara lain (Wirth, 1938).

Urban Life Manifesto

Dalam mengkaji krisis perkotaan yang ada di Surakarta, paper ini menggunakan pendekatan Urban Life Manifesto. *Urban Life Manifesto* memiliki delapan aspek yang di kaji yaitu (1) Buruknya Kehidupan (2) Gigantisme dan Hilangnya Kontrol Warga Terhadap Perkembangan Kota (3) Privatisasi yang Tinggi sehingga Menghilangkan Kehidupan Publik (4) Fragmentasi Sentrifugal (5) Hilangnya Makna ke Ruangan Kota (6) Ketiadaan Peran atau Jabatan (7) Ketidakadilan (8) Profesionalisme yang tidak Berakar pada Kehidupan dan Kebutuhan Kota.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Strategi *Dominant less Dominant*. Strategi *dominant* menggunakan metode kuantitatif, dan *less dominant* menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner dan data kualitatif berupa wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pemilihan *cluster area sampling* dengan jumlah sampel 13 kelurahan dengan 5 variasi usia laki-laki dan perempuan di Kecamatan Banjarsari. Variasi usia yang dimaksud dalam teknik pengambilan sampel antara lain (1) Usia 10-14 tahun (2) usia 15-24 tahun (3) usia 25-34 tahun (4) usia 35-54 tahun (5) dan diatas 55 tahun. Kecamatan Banjarsari sendiri terdapat 13 Kelurahan yaitu Timuran, Keprabon, Ketelan, Punggawan, Kestalan, Setabelan, Gilingan, Nusukan, Kadipiro, Banyuanyar, Sumber, Manahan dan Mangkubumen. Teknik pengumpulan data disebarakan melalui angket yang menggunakan skala *likert* dengan alternatif jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Jumlah item keseluruhan sebanyak 42 buah item yang berkenaan dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kondisi kota Surakarta. Data yang terkumpul dari instrumen kuesioner dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS dan didukung dengan hasil wawancara. Data sekunder berupa sumber-sumber literatur dari instansi seperti BPS juga digunakan dalam penelitian ini. Tahap pengolahan data diawali dengan coding yang kemudian diinput kedalam data excel untuk mempermudah analisis selanjutnya menggunakan SPSS.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentative terkait hubungan antara dua variabel atau lebih (Singaribun dan Efendi, 1985). Hipotesis penelitian dibuat agar dapat mengetahui arah hubungan yang dirumuskan sebagai berikut :

Ha : Ada korelasi antara jumlah penduduk dan ketidakadilan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

H0 : Tidak ada korelasi antara jumlah penduduk dan ketidakadilan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika menggunakan hipotesis nol (H0) adalah sebagai berikut:

- Jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom sig.(2-tailed) $>$ level of significant (α) maka diterima
- Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom sig.(2-tailed) $<$ level of significant (α) maka ditolak

Hasil dan Pembahasan

Correlations

		Jumlah Penduduk	Ketidakadilan
Jumlah Penduduk	Pearson Correlation	1	-,593*
	Sig. (2-tailed)		,033
	N	13	13
Ketidakadilan	Pearson Correlation	-,593*	1
	Sig. (2-tailed)	,033	
	N	13	13

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 1.1

Korelasi *Bivariate Pearson* dengan Variabel Jumlah Penduduk dan Ketidakadilan

Tabel 1.3 menyajikan hasil korelasi *bivariate pearson* untuk semua sampel penelitian, dengan jumlah sampel 130 responden warga Kecamatan Banjarsari dan digunakan unit analisis per kelurahan dimana berjumlah 13 kelurahan. Dari hasil analisis korelasi *bivariate pearson* tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat korelasi antara Jumlah Penduduk dan Ketidakadilan (r) adalah -0,593 dengan tingkat signifikansi pada level 0,05. Jika mengacu pada Sugiyono (2007), Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara Jumlah Penduduk dan Ketidakadilan. Sedangkan arah hubungan korelasi tersebut adalah negatif karena nilai r negatif, dimana semakin tinggi Jumlah Penduduk maka semakin rendah tingkat Ketidakadilan nya.

Hasil Uji Korelasi *Bivariate Pearson*

Hipotesis dilakukan dengan mencari korelasi variabel penelitian yaitu Jumlah Penduduk dan Ketidakadilan. Hasil korelasi dapat dilihat pada tabel 1.3. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil korelasipearson yaitu -0,593 dan P-value 0,033. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika menggunakan hipotesis nol (H_0) adalah sebagai berikut:

- Jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom sig.(2-tailed) $>$ level of significant (α) maka diterima
- Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom sig.(2-tailed) $<$ level of significant (α) maka ditolak

Maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena $p\text{-value}$ pada kolom sig.(2-tailed) = 0,033 lebih kecil dari level of significant (α) = 0,05, atau melihat tanda * pada output SPSS yang menunjukkan adanya korelasi signifikan. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan sedang antara jumlah penduduk dan ketidakadilan.

Dari hasil korelasi tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan antara kepadatan penduduk dengan krisis perkotaan yang ditunjukkan melalui ketidakadilan di kota Surakarta. Hal ini di dukung pula oleh pendapat responden yang mengatakan bahwa dalam setiap pelayanan publik di kalangan atas atau orang kaya lebih dimudahkan di banding kalangan bawah di Surakarta menurut warga di Kecamatan Banjarsari, sebagai berikut :

“Karena banyaknya pembangunan di Surakarta, pendatang banyak yang berdatangan. Sehingga jumlah penduduk tambah banyak. Tapi alhamdulillahnya pelayanan publik dan kondisi sosialnya makin baik aja gitu. Walikotanya itu loh mas. ”

(NF, 28)

“Pelayanan kesehatan di Surakarta itu udah bagus, mbak. Sekarang juga rumah sakit udah dibenahi fasilitasnya. Opo meneh puskesmas, udah banyak. Sekarang kalo sakit gampang berobat nya mbak, obatnya bagus juga. Harganya pas kantong”

(Angga, 21)

“Kalo dibeda bedakan sih ngga ya mas, soalnya, wong sugih karo wong miskin ki pelayanannya sama. Beda lagi kalo ada orang dalem, tapi secara menyeluruh, sama aja mas. Pemerintahnya apik, ngga membeda bedakan orang”

(Joko Sulisty, 54)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin rendah tingkat ketidakadilannya.

Kesimpulan

Korelasi antara jumlah penduduk dan ketidakadilan dalam perspektif *Urban Life Manifesto* memiliki tingkat korelasi sedang dan arah yang berbanding terbalik. Arah yang berbanding terbalik maksudnya adalah semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin rendah tingkat ketidakadilan di Kecamatan Banjarsari. Dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam hubungan ini menolak H0 karena p-value pada kolom sig. (2-tailed) = 0,033 lebih kecil dari level of significant (α) = 0,05, atau melihat tanda * pada output SPSS yang menunjukkan adanya korelasi signifikan. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan sedang antara jumlah penduduk dan ketidakadilan.

Referensi

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2018. Kota Surakarta Dalam Angka (Surakarta Municipality in Figures) 2018. Badan Pusat Statistik

Kartono, Drajat Tri. 2010. Sosiologi Perkotaan. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka Press.

Boserup, Ester. 1984. Peran Wanita dalam Perkembangan Ekonomi. Yayasan Obor indonesia: Jakarta

Zaida, Suci, N. Arifin, Nurhayati, H,S. 2010. Surakarta: Perkembangan Kota Sebagai Akibat Pengaruh Perubahan Sosial Pada Bekas Ibukota Kerajaan Di Jawa. Jurnal Lanskap Indonesia VOL. 2 NO. 2 Tahun 2010

Wirth, Louis. 1938. Urbanism As A Way Of Life. The American Jurnal Of Sociology VOL. 44 NO. 1. The University Of Chicago Press

Kondisi Krisis Perkotaan pada Korelasi Antara Jumlah Penduduk dan Urban Life Manifesto di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta

Ahmad Khoirur Roziq, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. oproziq81@gmail.com

Hendrata Wahyuesa P, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. hendratawahyuesa@gmail.com

Hikmah Eka Irmayanti, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. hikmahekairmayanti@yahoo.co.id

Julita Ayu Cahyani, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. jacsuroto@gmail.com

Muh. Ta'aruf Huda, Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret. ta99huda@gmail.com

Abstrak

Kota merupakan pusat kegiatan masyarakat yang senantiasa berkembang setiap waktu. Salah satu kota yang memiliki perkembangan adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 516.102 pada tahun 2017. Kondisi Kota Surakarta dahulunya merupakan desa dan telah mengalami perkembangan seiringnya perkembangan zaman. Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah tentu akan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dimana pembangunan perlu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus menerus tentunya akan menjadikan kebutuhannya semakin banyak. Salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat adalah tersedianya tempat tinggal yang layak. Pembangunan yang seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat kerap kali menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat golongan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kondisi krisis perkotaan yang terjadi di Kecamatan Serengan dengan menggunakan pandangan *urban life manifesto*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode campuran *dominant less dominant*, metode kuantitatif sebagai *dominant* dan metode kualitatif sebagai *less dominant*, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan 70 responden guna mengisi kuisisioner di 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Serengan dan dilakukan melalui wawancara pada responden dan informan dengan menyebarkan kuisisioner. Korelasi antara variasi demografi dengan *urban life manifesto* menunjukkan adanya korelasi antara satu sama lain, namun tidak terdapat korelasi yang signifikan. Nilai hitung dari korelasi jumlah penduduk dengan indikator ketidakadilan adalah 0,524. Korelasi ini juga diperkuat dengan hasil wawancara pada informan yang menyebutkan bahwa kondisi Kota Surakarta mengalami ketidakadilan.

Kata Kunci: Ketidakadilan, Kota, Serengan, *Urban*.

Pendahuluan

Kota didefinisikan sebagai tempat berkumpulnya berbagai penduduk atau masyarakat, kota juga merupakan pusat kegiatan masyarakat yang juga senantiasa berkembang setiap waktu. Salah satu kota dengan perkembangannya yang telah mengarah pada kondisi yang telah jauh berbeda adalah Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kota Surakarta tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 516.102 pada tahun 2017 (bps.go.id). Kondisi Kota Surakarta pada saat ini telah mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan kondisi awal berdirinya yang merupakan desa yang dinamakan Sala, Perubahan yang terjadi pada Desa Sala tidak hanya terjadi dari kondisi fisik karena alam, namun pada tata letak perkotaan serta penguasa yang silih berganti (Zaida dan Arifin, 2010). Tentunya pada perkembangan Kota Surakarta melibatkan berbagai pihak yang mempengaruhi perkembangan kota hingga berdiri seperti saat ini. Pembangunan terus terjadi dan seringkali pembangunan tersebut menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat golongan tertentu. Ketidakadilan yang didapat oleh masyarakat kota ini kebanyakan dari segi ekonomi dan segi sosial, dimana masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak untuk kehidupandi kotanya.

Kaitannya pada studi perkotaan adalah kondisi yang mampu dilihat berdasarkan teori tertentu, diantaranya terdapat pandangan *urban life manifesto*. Secara umum pandangan tersebut memiliki beberapa indikator yang ada didalamnya dan salah satunya adalah indikator ketidakadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kondisi krisis perkotaan yang terjadi di Kecamatan Serengan dengan menggunakan pandangan *urban life manifesto*. Terutama pada indikator ketidakadilan.

Kajian Pustaka

Urban Life Manifesto

Kondisi perkotaan saat ini merupakan perkembangan dari kota yang mengalami perkembangan pada masa sebelumnya, dan kondisi ini mampu dilihat melalui beberapa indikator yang melihat konteks kota dalam segi-segi kehidupan. Indikator ketidakadilan merupakan salah satu yang ada didalamnya dan dalam kaitannya dengan kota mampu menjadi acuan dalam melihat krisis kota.

Keadilan dalam sebuah masyarakat menjadi suatu keharusan. Tetapi pada realitanya dalam aspek kehidupan bermasyarakat tidak semua mendapat keadilan. Kadangkala karena terbiasa terjadinya ketidakadilan, masyarakat merasa sebuah ketidakadilan menjadi tidak perlu dipermasalahkan ataupun diributkan lagi. Rawls berpendapat bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak – hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Dalam kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk (1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dalam melakukan tugasnya. (2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat. (Chand, 1994).

Masyarakat Perkotaan

Horton dan Hunt (1992, Jamaludin, 2015) menjelaskan bahwa kota yang merupakan tempat transit berbagai aktivitas masyarakat dari berbagai wilayah cenderung mengalami perkembangan karena adanya perkembangan industri dan perdagangan yang menciptakan daya tarik kota.

Masyarakat kota mengalami segregasi, artinya membentuk kelompok manusia tertentu menjadikan sosial budaya di lingkungannya juga membentuk budaya baru, struktur sosial, dan pola hidup baru. Maka polarisasi akan menjadi berkembang dengan struktur budaya baru. Dengan sempitnya wilayah perkotaan maka segregasi yang berdampak pada polarisasi juga akan berdampak pada fragmentasi sosial. Sehingga tidak mengherankan jika di perkotaan sebuah gedung mewah harus berdampingan dengan perumahan kumuh yang dipisahkan dengan pagar atau tembok pemisah (Jamaludin, 2015).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait menggunakan pendekatan *Dominant less Dominant*, dengan pendekatan kuantitatif sebagai *dominant*, serta pendekatan kualitatif sebagai *less dominant*. Variabel yang dicari adalah korelasi antara jumlah penduduk dengan ketidakadilan sebagai salah satu bentuk dari krisis perkotaan dalam perspektif *urban life manifesto*. Pada pelaksanaannya data kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuisioner yang ditanyakan pada 70 responden pada 7 Kelurahan di Kecamatan Serengan, Surakarta. Sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Serengan, Surakarta. Sebagai pendukung, data juga diperoleh melalui studi literatur yang diperoleh dari jurnal dan buku.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis *cluster area sampling* yang kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan *accidental random sampling* pada responden dengan variasi usia yang telah ditentukan sebelumnya. Variasi usia

yang dimaksud antara lain (1) usia 10-14 tahun, (2) usia 15-24 tahun, (3) usia 25-34 tahun, (4) usia 35-54 tahun, dan (5) usia lebih dari atau sama dengan 55 tahun.

Variabel yang ada dalam penelitian ini meliputi : (X1) variasi usia, (X2) kepadatan penduduk, (X3) heterogenitas, (X4) jumlah penduduk, serta (Y) *Urban Life Manifesto*. Kemudian teknik analisa yang digunakan menggunakan *bivariate correlation* serta uji beda *chi square*. Selanjutnya data kualitatif yang didapatkan hanya digunakan sebagai pendukung dari data kuantitatif yang telah dihitung.

Dalam penelitian ini, *standart of eror* yang digunakan adalah $\alpha=0,05$ dengan teknik analisis korelasi bivariat dengan hipotesis sebagai berikut :

- Bila nilai signifikansi $t < 0,05$, $H_0 =$ “Ada hubungan antara jumlah penduduk dengan ketidakadilan di Kecamatan Serengan”.
- Bila nilai signifikansi $t > 0,05$, $H_0 =$ “Tidak Ada hubungan antara jumlah penduduk dengan ketidakadilan di Kecamatan Serengan”.

Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk sebesar 54,649 jiwa dengan wilayah seluas 319.40 Ha (bps.go.id). Secara umum Kecamatan Serengan terbagi atas 7 kelurahan, antara lain: (1) Joyotakan, (2) Danukusuman, (3) Serengan, (4) Tipes, (5) Kratonan, (6) Jayengan, dan (7) Kemlayan. Kondisi lain yang terlihat di Kecamatan Serengan adalah memiliki berbagai keberagaman umat beragama dan tempat ibadah, hal ini menunjukkan keberagaman yang ada di Kecamatan Serengan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, menunjukkan hasil yang memiliki korelasi atau berkorelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi yang dilakukan dengan menggunakan korelasi *bivariate* antara usia, kepadatan penduduk, Heterogenitas Penduduk, dan Jumlah Penduduk terhadap *Urban Life Manifesto* yang dihitung menggunakan aplikasi SPSS.

Data menunjukkan bahwa nilai korelasi yang ada antara lain:

Tabel 1
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Serengan, Kota Surakarta

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Kelurahan Joyotakan	7762
2.	Kelurahan Danukusuman	10.251
3.	Kelurahan Serengan	11.029
4.	Kelurahan Kratonan	5531
5.	Kelurahan Jayengan	4.108
6.	Kelurahan Tipes	12.133
7.	Kelurahan Kemlayan	3835
Jumlah		54.649

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta tahun 2018

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa terdapat 7 kelurahan di Kecamatan Serengan dimana kelurahan tersebut dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini dengan kategori usia yang telah ditentukan dan dari setiap kategori usia tersebut terdiri dari responden laki-laki dan perempuan. Sehingga total responden yang diperoleh adalah 70 orang dari 7 kelurahan di Kecamatan Serengan. Data demografi dalam tabel 1 di atas kemudian dikorelasikan dengan variabel indikator dari krisis

perkotaan yang ada di dalam *Urban Life Manifesto*. Hasil korelasi antara variabel jumlah penduduk dengan *Urban Life Manifesto* adalah sebagai berikut

Tabel 2
Korelasi Indikator Urban Life Manifesto dengan Jumlah Penduduk

Indikator <i>Urban Life Manifesto</i>	Jumlah Penduduk
Buruknya Kehidupan	0,294
Gigantisme	-0,038
Privatisasi	0,146
Fragmentasi Sentrifugal	-0,146
Hilangnya Makna	0,005
Ketiadaan Peran	0,438
Ketidakadilan	0,524
Profesionalisme	0,144

Sumber: Data Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS seperti terlihat pada tabel di atas, variabel/indikator ketidakadilan memiliki t hitung sebesar 0,524 dan nilai signifikansi 0,227. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis “ada hubungan jumlah penduduk dengan ketidakadilan di Kecamatan Serengan” namun hubungan yang ada tidak signifikan. Kemudian hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Informan A yang menyatakan bahwa:

“...Kota Solo niku sak niki niku oleh fasilitas kesehatan sing roto mas terutama ingkang wong lansia, tapi kadang niku tiyang kelurahan samping mriki kalih tiang kelurahan mriki niku dibedakne pelayanane” (Wawancara Informan 1, 08 November 2018).

Beberapa responden yang ditemui di lapangan mempunyai pandangan yang serupa dengan informan tersebut, kondisi berbagai fasilitas maupun pelayanan yang ada di Kecamatan Serengan dinilai masyarakat cukup baik dan menyeluruh kepada masyarakat namun masih menunjukkan ketidakadilan pada beberapa daerah.

“...Kondisi Kota Surakarta yang saat ini banyak berkembang dari segi fasilitas, fasilitas kesehatan pun juga sudah merata dibanding dahulu...” (Wawancara Informan 1, 09 November 2018).

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Surakarta memperoleh data yang dilakukan dengan menyebar kuisioner yang disebar pada Kecamatan Serengan yang dirincikan mencari 10 responden yang memiliki variasi usia yang berbeda pada tiap responden. Korelasi antara variasi demografi dengan *urban life manifesto* menunjukkan adanya korelasi antara satu sama lain, namun tidak terdapat kondisi yang signifikan antara jumlah penduduk dengan indikator ketidakadilan *urban life manifesto*. Korelasi ini juga diperkuat dengan hasil wawancara pada informan yang menyebutkan bahwa kondisi Kota Surakarta mengalami ketidakadilan dengan nilai hitung 0,524.

Referensi

- Chand, Hari. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur : International Law Book Review.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung : CV Pustaka Setia.
digilib.uinsgd.ac.id/3652/1/SOSIOLOGI%20PERKOTAAN.pdf Diakses 21 November 2018.

- Zaida, Suci N.A, Arifin, Nurhayati H.S. *Surakarta: Perkembangan Kota Sebagai Akibat Pengaruh Perubahan Sosial pada Bekas Ibukota Kerajaan di Jawa*. Jurnal Lanskap Indonesia I Vol.2 No.2, 2010. [online] <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=85344&val=229> diakses 19 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Surakarta Dalam Angka 2018*. <https://surakartakota.bps.go.id/publication/2018/08/16/c3a56b56c074228d1b0e90e0/kota-surakarta-dalam-angka-2018.html> Diakses 27 Oktober 2018.
- Savita, Neli Ardiana. 2018. *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat Kabupaten Pemalang*. https://www.researchgate.net/publication/325285786_DAMPAK_ALIH_FUNGSI_LAHAN_PERTANIAN_TERHADAP_MASYARAKAT_KABUPATEN_PEMALANG Diakses 25 November 2018..
- Budiargo , Deo and Nikmah, Nikmah (2014) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Periode 2008 -2012*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/8163/> Diakses 25 November 2018.

KESEHATAN

Pergeseran Pola Penggunaan KB Tradisional di Wilayah Perkotaan

Riza Fatma Arifa, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. E-Mail: riza.fatma.arifa@gmail.com

Abstrak

Berbeda dengan tren pada umumnya, di mana biasanya wanita yang menggunakan kontrasepsi tradisional berasal dari kelompok wanita yang berdomisili di daerah perdesaan dan berpendidikan rendah, namun hampir 90 persen pengguna kontrasepsi tradisional di Indonesia tinggal wilayah perkotaan. Jadi, tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pergeseran pola penggunaan kontrasepsi tradisional di wilayah perkotaan. Data yang digunakan pada kajian ini adalah data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 dan metode yang dipakai adalah statistik deskriptif. Selain itu, wawancara mendalam digunakan memperkuat temuan dan untuk mengali lebih dalam mengapa wanita usia subur di wilayah perkotaan cenderung menggunakan KB tradisional. Berdasarkan pada SDKI 2017, kontrasepsi yang paling populer digunakan di kalangan wanita yang menggunakan metode tradisional adalah senggama terputus (8%) dan metode kalender/pantang berkala (5%). Wanita yang menggunakan KB tradisional cenderung berasal dari wanita dengan pendidikan tinggi (lulus dari sekolah menengah atas atau universitas), hidup dengan 2 anak, menikah lebih dari 10 tahun, berusia 35-39 tahun, tidak menginginkan anak lain dan mengakses internet dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, semakin meningkatnya pengetahuan tentang masa subur dan efek samping kontrasepsi modern menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan kontrasepsi tradisional meningkat.

Kata Kunci: KB Tradisional, senggama terputus, pantang berkala.

Pendahuluan

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017, 63,4 persen dari wanita yang menikah usia 15-49 menggunakan metode kontrasepsi. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data SDKI tahun 2012 yaitu 61,2 persen wanita kawin umur 15-49 menggunakan kontrasepsi. Namun, jika dilihat dari komposisi jenis pengguna kontrasepsi, pengguna kontrasepsi modern turun dari 57,9 persen pada SDKI 2012 menjadi 57,2 persen pada SDKI 2017. Sebaliknya peningkatan pengguna metode kontrasepsi tradisional meningkat dari 4 persen di tahun 2012 menjadi 6,4 persen di tahun 2017. Selain itu, banyak pengguna kontrasepsi tradisional di Indonesia tinggal wilayah perkotaan.

Baik metode modern maupun tradisional, keduanya memberikan kontribusi terhadap angka prevalensi pemakaian kontrasepsi. Selama ini Program Keluarga Berencana lebih untuk mendorong dan mempromosikan penggunaan metode kontrasepsi modern sebagai upaya untuk meningkatkan angka CPR sehingga sedikit mengabaikan penggunaan metode kontrasepsi tradisional. Ketika prevalensi pemakaian metode kontrasepsi modern meningkat, pengelola program keluarga berencana dapat mengesampingkan pemakaian metode kontrasepsi tradisional. Sebaliknya, ketika prevalensi pemakaian metode kontrasepsi modern mengalami stagnasi atau penurunan dan pemakai metode kontrasepsi tradisional meningkat, pengelola program sebaiknya mengetahui penyebab utama perubahan komposisi tersebut. Untuk mengetahui tentang “mengapa prevalensi pemakai kontrasepsi tradisional meningkat?”, “Siapa dan dari kelompok mana yang menggunakan kontrasepsi tradisional?”, “Bagaimana pengetahuan tentang pilihan metode/alat kontrasepsi di antara pasangan usia subur?”, dan “Langkah apa yang seharusnya dilakukan pengelola program untuk merubah pola pemakaian kontrasepsi?”, maka perlu dilakukan kajian terhadap fenomena peningkatan pemakaian kontrasepsi tradisional pada wanita usia subur. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka kajian ini akan

fokus mengkaji penyebab dari perubahan pada pemakaian kontrasepsi metode tradisional yang meningkat khususnya di wilayah perkotaan.

Kajian Pustaka

Secara umum tujuan dari program keluarga berencana adalah membantu para pasangan usia subur untuk mencegah kelahiran tidak diinginkan. Meskipun metode kontrasepsi tradisional kurang efektif dalam mencegah kehamilan daripada metode kontrasepsi modern, namun metode ini dianggap lebih baik daripada tidak menggunakan kontrasepsi. Peningkatan pemakai kontrasepsi tradisional berasosiasi dengan tingginya kegagalan pemakaian kontrasepsi dan berakibat pada tingginya aborsi yang disengaja atau kelahiran yang tidak diinginkan. Hasil penelitian di India menyimpulkan bahwa risiko kehamilan di antara pengguna kontrasepsi tradisional 3 kali lebih besar daripada pengguna kontrasepsi modern (Agrahari dan Mohanty 2015).

Selain itu, penelitian sebelumnya di Honduras menunjukkan bahwa wanita yang menggunakan metode tradisional (senggama terputus/pantang berkala) cenderung berasal dari kelompok dari wanita yang menikah sah secara hukum, tinggal di pedesaan, hidup dengan 0-2 anak, rata-rata waktu yang dibutuhkan menuju fasilitas kesehatan lebih dari satu jam, dan pendidikan rendah (Hubacer et al 1996). Studi lain tentang pemakaian kontrasepsi tradisional di Manisa, Turki menunjukkan bahwa metode tradisional yang populer di kalangan pasangan usia subur di sana adalah senggama terputus (Yanikerem et al 2005). Hampir semua wanita mengetahui jenis-jenis metode kontrasepsi modern. Kondom, IUCD dan kontrasepsi oral (Pil) adalah metode yang paling dikenal. Alasan paling umum untuk menggunakan metode senggama terputus adalah mereka percaya jika metode ini dapat diandalkan atau efektif, lebih disukai suami, lebih sehat, lebih mudah digunakan atau lebih nyaman daripada metode lain.

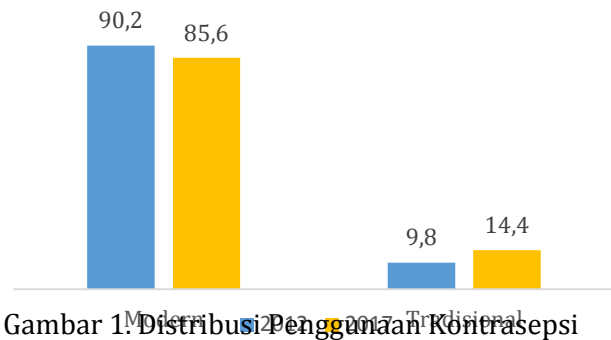
Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data sekunder hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Unit analisis dalam kajian ini adalah wanita kawin/hidup bersama berumur 15-49 tahun yang saat survei dilakukan menggunakan kontrasepsi dan tinggal di daerah perkotaan. Daerah perkotaan dalam penelitian ini mengacu pada definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel yang akan dianalisis sebanyak 10.512 wanita. Data akan disajikan secara deskriptif berupa tabel dan grafik. Selain itu, kutipan dari wawancara mendalam terhadap informan wanita yang menggunakan KB tradisional digunakan memperkuat temuan dan untuk mengali lebih dalam mengapa wanita usia subur di wilayah perkotaan cenderung menggunakan KB tradisional. Pengguna kontrasepsi paling banyak di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pengambilan data kualitatif dengan wawancara mendalam dilakukan di provinsi tersebut. Informan yang dipilih merupakan pengguna KB tradisional dan tinggal di wilayah perkotaan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yang dipilih secara subjektif. Pemilihan informan dibantu oleh kader. Dipilih di daerah Sleman dan Bantul karena wilayah ini merupakan wilayah berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan wilayah Panggungharjo, Sewon dan Purwomartani, Kalasan, termasuk wilayah perkotaan menurut BPS.

Hasil dan Pembahasan

Khusus untuk di daerah perkotaan menunjukkan perubahan pola pemakaian kontrasepsi pada wanita kawin dalam tradisional maupun modern. Dalam 5 tahun, peningkatan pemakaian kontrasepsi tradisional sekitar 5 persen. Begitu juga sebaliknya, pemakaian kontrasepsi modern mengalami penurunan.

Berdasarkan pada hasil SDKI dan 2012 dan 2017 seperti yang tersaji pada Tabel 1, peningkatan penggunaan kontrasepsi tradisional terbanyak adalah pemakai metode senggama terputus, yaitu sekitar 4 persen. Pada tahun 2012 dan 2017 Kontrasepsi tradisional yang paling populer digunakan di daerah perkotaan adalah senggama terputus kemudian metode kalender/pantang berkala.



Tabel 1. Distribusi Pemakaian Kontrasepsi pada Wanita kawin 15-49 tahun yang Tinggal di Daerah Perkotaan, SDKI 2012 dan 2017

Jenis Kontrasepsi	2012		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pill	2,060	22.63	1,959	18.64
IUD	798	8.77	1,030	9.8
Suntikan	3,954	43.45	914	8.69
Kondom	410	4.5	604	5.75
MOW	572	6.29	820	7.8
MOP	20	0.22	32	0.3
Implant	386	4.24	533	5.07
Modern Lainnya	9	0.1	3,106	29.55
Pantang Berkala/kalender	357	3.92	515	4.9
Senggama Terputus	461	5.07	929	8.84
Tradisional Lainnya	74	0.81	70	0.67
Jumlah	9,101	100	10,512	100

Sumber: SDKI 2012 dan 2017 (diolah)

Berdasarkan karakteristik latar belakang wanita yang menggunakan kontrasepsi di daerah perkotaan di Indonesia, baik pengguna kontrasepsi tradisional dan modern memiliki pola yang hampir sama, kecuali pada tingkat pendidikan dan indeks kekayaan. Hal ini, berbeda dengan hasil penelitian di Negara lain seperti di Honduras (Hubacer et al 1996) dan India (Agrahari dan Mohanty 2015). Pada Tabel 2, uji korelasi dengan nilai *chi square* menunjukkan bahwa karakteristik sosio demografi memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan penggunaan kontrasepsi. Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pengguna kontrasepsi baik modern maupun tradisional didominasi oleh wanita yang tidak tamat SLTA. Akan tetapi, pada kelompok wanita berpendidikan tinggi (perguruan tinggi), persentase pengguna kontrasepsi tradisional (28,73%) lebih daripada pengguna kontrasepsi modern (15,56%). Selain itu, pengguna kontrasepsi tradisional pada wanita berpendidikan tinggi meningkat sekitar 2 persen dari tahun 2012. Selain itu, pola penggunaan kontrasepsi baik modern maupun tradisional meningkat seiring dengan meningkatnya umur wanita. Mayoritas pengguna kontrasepsi tradisional adalah wanita dengan umur 35-39 tahun ke atas. Selain itu, 39 persen pengguna tradisional memiliki indek kekayaan teratas, dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami peningkatan sekitar 4 persen.

Sama seperti karakteristik sosio demografi, uji korelasi dengan nilai *chi square* menunjukkan bahwa karakteristik yang berhubungan dengan fertilitas juga memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan kontrasepsi. Wanita yang menggunakan kontrasepsi tradisional mayoritas dari

kelompok wanita yang tidak ingin memiliki anak lagi (62%), memiliki 2 anak (38%), menikah lebih dari 10 tahun (65%). Tidak semua wanita yang menggunakan kontrasepsi tradisional maupun modern mengetahui tentang masa subur dengan benar. Pengguna kontrasepsi tradisional yang memiliki pengetahuan tentang masa subur dengan benar (diantara siklus haid) lebih banyak (37%) daripada pengguna kontrasepsi modern (25%). Selain itu, separuh lebih pengguna pantang berkala/kalender memiliki pengetahuan yang baik mengenai masa subur. Temuan ini sama dengan hasil penelitian di Filipina di mana wanita yang menggunakan metode pantang berkala/kalender merupakan wanita yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai masa subur (Marquez et al 2017).

Tabel 2. Distribusi Wanita Kawin 15-49 yang Tinggal Di Perkotaan menurut Pemakaian Kontrasepsi dan Karakteristik Latar Belakang, SDKI 2012 dan 2017

Variabel	2012		2017		Nilai Chi-square
	Modern	Traditional	Modern	Traditional	
Pendidikan					
Tidak sekolah	1,36	0,78	0,79	0,26	190,96*
Tidak tamat SD	7,22	5,61	5,93	3,3	
Tamat SD	17,63	9,19	17,74	10,63	
Tamat SMP dan Tamat SMA	59,46	57,52	59,98	57,07	
Perguruan tinggi	14,33	26,91	15,56	28,73	
Akses internet 12 bln terakhir					
Tidak pernah	na	na	51,10	39,37	79,73*
Ya, 12 bulan terakhir	na	na	47,04	59,25	
Ya, sebelum 12 bulan terakhir	na	na	1,84	1,32	
Umur					
15-19	1,64	0,11	1,23	0,13	70,32*
20-24	9,57	3,7	7,33	4,62	
25-29	18,58	15,13	14,23	15,06	
30-34	21,2	18,05	20,10	17,57	
35-39	21,57	24,33	23,26	22,06	
40-44	17,31	23,32	20,79	21,27	
45-49	10,12	15,36	13,05	19,29	
Keinginan Punya Anak					
Ingin punya anak	34,96	34,84	30,40	35,2	163,45*
Belum memutuskan	4,97	3,83	2,27	2,38	
Tidak ingin anak lagi	52,71	61,1	56,47	61,96	
Steril	7,28		9,56	0	
Indeks Kekayaan					
Terendah	8,44	6,39	7,43	4,56	76,80*
Menengah Bawah	15,75	12,67	15,27	10,57	
Menengah	21,15	17,83	21,47	19,15	
Menengah atas	25,48	28,36	26,19	26,49	
Teratas	29,18	34,75	29,63	39,23	
Pengetahuan tentang masa subur					
Selama masa haid	0,78	0,67	0,67	1,19	109,76*
setelah haid	36,71	38,99	41,88	38,44	
Di antara 2 masa haid	24,3	37,75	25,97	37,65	

Sebelum haid	3,63	3,71	5,07	4,69	
Kapan saja	14,51	7,53	12,65	8,78	
Tidak tahu	20,07	11,35	13,67	9,25	
Lama menikah					
< 5 tahun	16,69	15,36	12,18	14,99	10,49*
5-10 tahun	20,17	19,17	18,60	19,15	
>10 tahun	63,14	65,47	69,22	65,85	
Jumlah anak					
0	0,6	0,56	0,42	0,59	
1	23,3	22,2	19,47	22,72	11,79*
2	39,02	40,25	41,80	38,38	
3	23,15	21,64	24,88	24,37	
>=4	13,94	15,36	13,43	13,94	

Sumber: SDKI 2012, 2017 (diolah)

Catatan : * Signifikan pada level 0,05

Berdasarkan karakteristik pengguna tradisional tersebut maka wawancara mendalam dilakukan kepada wanita berpendidikan tinggi/ perguruan tinggi, menggunakan kontrasepsi tradisional dan tinggal di daerah perkotaan. Wawancara dilakukan kepada 2 orang wanita, yaitu Ibu Bunga dan Ibu Sekar.

Ibu Bunga merupakan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan telah menikah kurang lebih 18 tahun. Ibu yang aktif dengan kegiatan di lingkungannya sebagai kader posyandu, bank sampah, dan pengurus PKK ini adalah lulusan diploma dan tinggal di daerah perumahan di dekat kampus ISI Yogyakarta. Menggunakan kontrasepsi dengan cara pijat syaraf sejak 7 tahun yang lalu. Yang dipijat dibagian telapak kaki dan bagian punggung atas dekat tengkuk. Ibu Bunga mendapat dukungan dari suami untuk menggunakan pijat syaraf. Setelah menggunakan pijat syaraf merasa nyaman tidak khawatir, merasa lebih bersih dan tidak mengalami keputihan, serta lebih alami. Tidak merasakan efek samping seperti kontrasepsi lainnya. Ibu Bunga selama ini mengetahui jenis-jenis kontrasepsi modern. Untuk penggunaan Pil harus rutin dan disiplin. Menurut Bu Bunga Pil, Suntik dan Implan merupakan kontrasepsi hormonal. Sistem kerjanya membuat hormon tidak seimbang dan efek sampingnya tidak bisa dihindari. Sebenarnya Ibu Bunga dan suami juga tertarik dengan kondom, tetapi belum pernah menggunakan kondom. Karena merasa ribet dan tidak praktis pada saat berhubungan, sehingga tidak jadi belum pernah mencoba. Untuk MOW dan MOP, tidak berminat karena tidak sesuai sama agama. Menggunakan pijat syaraf tidak merasakan efek samping. Sebenarnya juga ada metode pijat walik, karena yang dipijat perut, sehingga tidak berani dan takut berisiko. Ibu Bunga tidak berencana untuk memiliki anak lagi, tapi dengan menggunakan pijat syaraf ini tidak merasa khawatir jika gagal. Menurut beliau, *"kalau pun hamil ya disyukuri karena itu pemberian dari yang diatas"*.

Ibu Bunga melahirkan anak pertamanya 17 tahun lalu. Setelah melahirkan, beliau menggunakan Metode Amenore Laktasi (MAL) dan baru mendapatkan haid setelah anak berumur 11 bulan. Setelah itu, beliau tidak mendapatkan haid dan dinyatakan positif hamil. Setelah anak kedua lahir, beliau memutuskan menggunakan IUD. Sebelum memutuskan menggunakan IUD, beliau mendapatkan informasi dari teman-temannya. Beliau menggunakan IUD selama 8 tahun. Di antara pencabutan dan pemasangan IUD, beliau juga mencoba menggunakan cara kalender atau menghitung masa subur tapi karena siklus haidnya tidak teratur maka memutuskan menggunakan IUD lagi. Keluhan yang dirasakan selama menggunakan IUD adalah keputihan yang sangat banyak dan tidak wajar, ketika berhubungan seks merasa tidak nyaman, dan ada ketakutan posisi IUD geser.

Responden kedua Ibu Sekar dengan satu anak berumur 35 tahun, bekerja, lulusan magister, tinggal di daerah dekat Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Ibu ini menggunakan sistem

kalender/pantang berkala dengan bantuan aplikasi masa subur pada *handphone* androidnya. Beliau dan suami menghindari waktu masa subur (ovulasi) ketika melakukan hubungan seksual. Suami beliau pun mendukung untuk menggunakan sistem kalender karena dianggap cara paling aman. Sebelum menikah, beliau sudah terbiasa mencatat tanggal saat haid. Terkadang, beliau mengaku menggunakan kondom jika kepepet atau menggunakan metode senggama terputus. Menurut beliau, kerjasama dan disiplin antara suami istri sangat diperlukan untuk mencegah kehamilan. Alasan beliau menggunakan metode tradisional, lebih sehat, tidak takut efek samping seperti kontrasepsi modern, suami mendukung dan lebih nyaman. Menurut Ibu ini, senggama terputus juga disarankan menurut islam untuk mencegah kehamilan. Beliau mengetahui dengan baik masa ovulasinya dengan membaca artikel ketika gadis. Akan tetapi, ketika ditanya lebih lanjut artikel di dapatkan dari mana, beliau lupa. Beliau juga menjelaskan bahwa ketika program hamil, dokter kandungan menjelaskan dengan detail perkiraan masa ovulasi terjadi jika haidnya tidak teratur maupun teratur.

Ibu Sekar menikah ketika berumur 30 tahun dan anak pertamanya berumur 2 tahun. Setelah melahirkan, beliau baru mendapatkan haid ketika anaknya berumur 11 bulan. Setelah menyusui secara eksklusif selama 6 bulan, beliau terkadang menggunakan kondom atau senggama terputus ketika berhubungan seksual. Ketika mendapatkan haid pertamanya setelah melahirkan, beliau mulai mencatat tanggal haid pada *handphonenya*. Ibu Sekar mengaku tidak selalu menyimpan kondom, jika ingat saja beli sekalian belanja di mini market. Menurut Ibu Sekar, kondom sebenarnya tidak ramah lingkungan karena terbuat dari karet. Selama ini beliau membuang kondom habis pakai di tempat sampah seperti sampah yang lain dan sampah tersebut kemudian diangkut oleh tukang sampah.

Temuan pada kajian ini menunjukkan bawah pengguna kontrasepsi tradisional di dominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan dari kalangan yang berada. Alasan lebih sehat, alami dan takut efek samping menjadi alasan mendasar lebih memilih menggunakan metode kontrasepsi tradisional. Pengalaman yang tidak nyaman dalam menggunakan kontrasepsi modern membuat para wanita beralih kepada metode tradisional. Selain itu, kecenderungan mereka yang menggunakan kontrasepsi tradisional kemungkinan merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Di mana posisi wanita dalam rumah tangga yang seimbang dan dukungan dari suami juga mempengaruhi keputusan dalam menggunakan kontrasepsi tradisional. Berdasarkan kondisi saat ini, maka di masa yang akan datang pengguna kontrasepsi tradisional di perkotaan kemungkinan akan terus bertambah.

Kesimpulan

Pergeseran pola penggunaan kontrasepsi tradisional di daerah perkotaan telah terjadi dan diprediksi akan meningkat. Wanita yang berpendidikan tinggi dan dari kalangan atas cenderung tinggal di wilayah perkotaan. Dengan pengetahuan yang baik mengenai kesehatan reproduksi dan kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi faktor utama dalam memilih menggunakan kontrasepsi. Selain itu, teknologi modern dapat dikombinasikan dengan metode tradisional seperti aplikasi masa subur. Jadi, yang perlu diantisipasi para pengelola program keluarga berencana adalah menghindari kegagalan dari penggunaan kontrasepsi tradisional. Pengelola program perlu terus mempromosikan cara penggunaan metode tradisional yang efektif agar kehamilan yang tidak diinginkan dapat dihindari.

Referensi

Agrahari, K., & Mohanty, S. 2015. "Traditional Methods Use and Pregnancy Termination in India." *Social Science Spectrum* Vol. 1, No. 3, 194-2015.

- Hubacher, D., Suazo, M., Terrell, S., & Pinel, M. 1996. "Examining The Increasing Prevalence of Traditional Contraceptive Methods in Honduras." *International Family Planning Perspectives* 22, 163-168.
- Marquez, M. P. N., M. Kabamalan, and E. Laguna. 2017. "Ten Years of Traditional Contraceptive Method Use in the Philippines: Continuity and Change". *DHS Working Papers* No. 130. Rockville, Maryland, USA: ICF
- Ranjit, N., Bankole, A., Darroch, J., & Singh, S. 2001. "Contraceptive Failure in the First Two Years of Use: Differences across Socioeconomic Subgroup." *Family Planning Perspectives* 33(1), 19-27.
- Steele, F., & Curtis, S. 2003. "Appropriate Methods for Analyzing the Effect of Method Choice on Contraceptive Discontinuation." *Demography* 40 (1), 1-22.
- Yanikkerem, E., Acar, H., & Elem, E. 2006. "Withdrawal users' perceptions of and experience with contraceptive methods in Manisa". *Midwifery* 22, 274-284.



GERAKAN MENULIS BUKU INDONESIA
Program Pengembangan Literasi Nasional
Email: gabung@gmb-indonesia.com
Website: gmb-indonesia.com
Fanspage: Gerakan Menulis Buku Indonesia
Jl. Kartika, Gg. Sejahtera No 3, Jebres
Surakarta - Indonesia



KEKATA PUBLISHER



9 772614 361204